PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2027

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana APBD pada tahun mendatang yang akan dibahas dan disahkan menjadi APBD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
(2) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
    a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027;
    b. acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah tahun 2027; dan
    c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Pasal 3

Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Pasal 6

(1) Program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Apabila terjadi perbedaan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan RAPBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Juni 2026
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

MISNI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026 NOMOR 1096

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8
1.4 Maksud dan Tujuan I-10
1.5 Sistematika RKPD I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1 Aspek Geografis II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi II-5
2.1.1.3 Kondisi Geologi, Struktur Tanah dan Hidrologi II-7
2.1.1.4 Kondisi Klimatologi II-10
2.1.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah II-11
2.1.1.6 Kawasan Rawan Bencana II-23
2.1.1.7 Kondisi Demografis II-37
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-40
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-40
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-58
2.1.4 Aspek daya Saing Daerah II-170
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah II-170
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur II-172
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-172
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-174
2.1.4.5 Rasio Ketergantungan II-175
2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah II-176
2.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Isu strategis) II-176
2.2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah . II-187

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau III-2

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-7
3.2.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 ..... III-9
3.2.2 Kebijakan Umum Keuangan Daerah III-11

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IV-1
4.2 Penetapan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027 ..... IV-7
4.3 Dukungan Program RKPD Terhadap Prioritas Nasional IV-37
4.4 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM IV-89
4.5 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs .. IV-112
4.6 Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) IV-117
4.7 Program Inovasi Daerah IV-135

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1
5.1 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah V-1
5.2 Arah Kebijakan Pengarustamaan Pembangunan di Kabupaten/Kota V-15

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1
6.1 Kerangka Pendanaan VI-1
6.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah VI-3

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VII-1
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) VII-1
7.2 Indikator Kinerja Daerah VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007	II-3
Tabel 2.3	Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	II-3
Tabel 2.4	Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau	II-4
Tabel 2.5	Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau	II-4
Tabel 2.6	Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota	II-6
Tabel 2.7	Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota	II-6
Tabel 2.8	Daftar DAS di WS Kepulauan Riau	II-9
Tabel 2.9	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Tahun 2025	II-10
Tabel 2.10	Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau	II-23
Tabel 2.11	Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau	II-25
Tabel 2.12	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau	II-26
Tabel 2.13	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau	II-28
Tabel 2.14	Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau	II-30
Tabel 2.15	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau	II-31
Tabel 2.16	Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau	II-33
Tabel 2.17	Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau	II-35
Tabel 2.18	Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau	II-36
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Data Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2025	II-38
Tabel 2.20	PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025 Triwulan III (Miliar Rupiah)	II-40
Tabel 2.21	PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)	II-41
Tabel 2.22	IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2025	II-45
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	II-59

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-62
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-67
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-71
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 .. II-74
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-77
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-80
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-83
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-86
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-87
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-88
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-90
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-93
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-95
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-98
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-99
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-101
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-103
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-105
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-107
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-108

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-110
Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-113
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-115
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-117
Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-120
Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-123
Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-126
Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-129
Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-132
Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-134
Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-137
Tabel 2.55 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-139
Tabel 2.56 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-144
Tabel 2.57 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-146
Tabel 2.58 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2025 ..... II-150
Tabel 2.59 Capaian Kinerja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-152
Tabel 2.60 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-155
Tabel 2.61 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-157
Tabel 2.62 Capaian Kinerja Pengelolaan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-160
Tabel 2.63 Capaian Kinerja pengelolaan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-162

Tabel 2.64 Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-165
Tabel 2.65 Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-168
Tabel 2.66 Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 ..... II-171
Tabel 2.67 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2025 ..... II-171
Tabel 2.68 Persentase Luas Wilayah Produktif Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 ..... II-172
Tabel 2.69 Jumlah Hotel/Penginapan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 ..... II-172
Tabel 2.70 Rata-rata Lama Perizinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 ..... II-173
Tabel 2.71 Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021-2025 ..... II-176
Tabel 2.72 Keterkaitan Isu Strategis Daerah RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 Dengan Isu Global dan Isu Nasional II-197
Tabel 3.1 Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau III-4
Tabel 3.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 (rupiah) III-11
Tabel 4.1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2027 ..... IV-3
Tabel 4.2 Keterkaitan antara Tema RKP dengan Tema RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 ..... IV-8
Tabel 4.3 Keterkaitan antara Permasalahan, Isu Strategis dengan Prioritas Daerah Tahun 2027 Keterkaitan antara Tema dan Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2027 selaras dengan Tema dan Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 Pada Tahun 2027 ..... IV-9
Tabel 4.4 Keterkaitan antara Permasalahan, Isu Strategis dengan Prioritas Daerah Tahun 2027 ..... IV-12
Tabel 4.5 Prioritas, Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 ..... IV-18
Tabel 4.6 Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 ..... IV-21
Tabel 4.7 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional IV-43
Tabel 4.8 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027 Terhadap Proyek Strategis Nasional IV-71
Tabel 4.9 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau IV-90
Tabel 4.10 Sub Kegiatan RKPD Tahun 2027 Pendukung Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau IV-93

Tabel 4.11 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Pencapaian Target SDGs Provinsi Kepulauan Riau IV-113
Tabel 4.12 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau IV-119
Tabel 4.13 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Riau IV-125
Tabel 4.14 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Kesehatan Untuk Semua Provinsi Kepulauan Riau IV-127
Tabel 4.15 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Perluasan Akses Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau IV-133
Tabel 4.16 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau IV-134
Tabel 5.1 Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Natuna – Kepulauan Anambas V-5
Tabel 5.2 Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang V-9
Tabel 5.3 Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Lingga V-13
Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027 ..... VI-1
Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan VI-4
Tabel 6.3 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan VI-5
Tabel 6.4 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang VI-6
Tabel 6.5 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman VI-7
Tabel 6.6 Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat VI-7
Tabel 6.7 Program dan Kegiatan Urusan Sosial VI-8
Tabel 6.8 Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja VI-9
Tabel 6.9 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak VI-11
Tabel 6.10 Program dan Kegiatan Urusan Pangan VI-12
Tabel 6.11 Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan VI-13
Tabel 6.12 Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup VI-13
Tabel 6.13 Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil VI-14
Tabel 6.14 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VI-15
Tabel 6.15 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak VI-16

Tabel 6.16 Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan VI-16
Tabel 6.17 Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika VI-17
Tabel 6.18 Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah VI-18
Tabel 6.19 Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal VI-19
Tabel 6.20 Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga VI-20
Tabel 6.21 Program dan Kegiatan Urusan Statistik VI-20
Tabel 6.22 Program dan Kegiatan Urusan Persandian VI-21
Tabel 6.23 Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan VI-21
Tabel 6.24 Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan VI-22
Tabel 6.25 Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan VI-22
Tabel 6.26 Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan VI-23
Tabel 6.27 Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata VI-24
Tabel 6.28 Program dan Kegiatan Urusan Pertanian VI-24
Tabel 6.29 Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan VI-25
Tabel 6.30 Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .. VI-26
Tabel 6.31 Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan VI-27
Tabel 6.32 Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian VI-29
Tabel 6.33 Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi VI-29
Tabel 6.34 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Sekretariat Daerah VI-30
Tabel 6.35 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD VI-30
Tabel 6.36 Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan VI-31
Tabel 6.37 Program, Indikator Unsur Penunjang Keuangan VI-32
Tabel 6.38 Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian VI-33
Tabel 6.39 Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan VI-33
Tabel 6.40 Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan VI-34
Tabel 6.41 Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengeloaan Perbatasan . VI-34
Tabel 6.42 Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung VI-35
Tabel 6.43 Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengawasan VI-35
Tabel 6.44 Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik VI-36

Tabel 6.45 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 ..... VI-38
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 ..... VII-1
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 ..... I-4
Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 ..... I-5
Gambar 1.3 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. I-9
Gambar 2.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau II-2
Gambar 2.2 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau II-24
Gambar 2.3 Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau.. ..... II-26
Gambar 2.4 Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau II-27
Gambar 2.5 Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau II-29
Gambar 2.6 Grafik Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau II-31
Gambar 2.7 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau II-32
Gambar 2.8 Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau II-34
Gambar 2.9 Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau II-35
Gambar 2.10 Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau II-37
Gambar 2.11 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2021-2025 (%) II-43
Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera tahun 2025 (%) II-43
Gambar 2.13 Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-44
Gambar 2.14 Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2025 ..... II-46
Gambar 2.15 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun Maret 2025 (%) II-46
Gambar 2.16 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 ..... II-47
Gambar 2.17 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2025 ..... II-47
Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 ..... II-48

Gambar 2.19 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2025 ..... II-49
Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2025 ..... II-50
Gambar 2.21 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 (ribu rupiah) II-50
Gambar 2.22 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (ribu rupiah) II-51
Gambar 2.23 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2025 (%) II-51
Gambar 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 (%) II-53
Gambar 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (%) II-53
Gambar 2.26 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2025 (%) II-54
Gambar 2.27 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2023 ..... II-55
Gambar 2.28 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022–Agustus 2024 ..... II-175
Gambar 4.1 Sekma Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2027 berdasarkan Prioritas RKP Tahun 2027, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD IV-7
Gambar 4.2 Kerangka Pikir RKP Tahun 2027 ..... IV-38
Gambar 4.3 Kerangka Keterkaitan Prioritas Nasional, Subtema, Fokus Pembangunan, dan Klaster PKPN RKP Tahun 2027 ..... IV-40
Gambar 4.4 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027 ..... IV-42
Gambar 4.5 Strategi Pengentasan Kemiskinan IV-118
Gambar 4.6 Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan IV-125
Gambar 4.7 Strategi Kesehatan Untuk Semua IV-127
Gambar 4.8 Strategi Perluasan Akses Pendidikan IV-132
Gambar 4.9 Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi IV-134

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis, ekonomi, dan geopolitik yang memberikan posisi strategis dalam pembangunan nasional. Wilayah yang didominasi oleh perairan, berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, serta berada pada jalur pelayaran internasional menjadikan Kepulauan Riau memiliki peran yang tidak hanya penting bagi pembangunan daerah, tetapi juga bagi kepentingan nasional. Sebagai Provinsi Kepulauan, Kepulauan Riau memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar terdiri atas lautan dengan gugusan pulau yang tersebar. Kondisi tersebut memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda dengan wilayah daratan, terutama dalam penyediaan infrastruktur konektivitas antarpulau, pemerataan pelayanan dasar, penguatan ekonomi maritim, pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, serta peningkatan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus mampu mengakomodasi karakteristik kewilayahan kepulauan agar tercipta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Provinsi Kepulauan Riau memegang peranan strategis dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan kawasan perbatasan, serta memperkuat hubungan ekonomi dan sosial dengan negara-negara tetangga. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam menjadikan Kepulauan Riau sebagai wajah Indonesia di kawasan internasional. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada penguatan fungsi pertahanan, keamanan, pengawasan wilayah perbatasan, serta diplomasi ekonomi lintas batas.

Di sisi lain, keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*/FTZ) Batam–Bintan–Karimun merupakan salah satu keunggulan kompetitif Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan tersebut menjadi pusat pengembangan industri, perdagangan, jasa, dan investasi yang didukung oleh berbagai insentif fiskal maupun kemudahan berusaha. Optimalisasi pengelolaan kawasan FTZ diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, memperkuat hilirisasi industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai simpul investasi dan logistik internasional. Letaknya yang berada di jalur pelayaran tersibuk dunia, yaitu Selat Malaka dan Selat Singapura, memberikan keunggulan strategis sebagai pusat distribusi barang, kegiatan ekspor-impor, industri manufaktur, logistik, dan jasa maritim. Pengembangan peran tersebut perlu didukung melalui peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, pelabuhan, kawasan industri, konektivitas multimoda, transformasi digital, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menarik investasi yang berdaya saing tinggi dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan sebagai upaya pencapaian Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, yaitu ***"Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata"*.** Perwujudan visi tersebut dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berfungsi menjabarkan arah kebijakan, prioritas, serta sasaran pembangunan daerah secara operasional.

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, serta memperhatikan kebijakan perencanaan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sehingga terwujud keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Proses penyusunannya memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan multisektoral, baik nasional maupun daerah, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan, Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi berbasis sumber daya lokal, dan berbagai kebijakan lainnya. Perumusan prioritas dan kebijakan pembangunan daerah juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya, isu-isu strategis pembangunan, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta aspirasi dan usulan para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 menerapkan kebijakan *money follows program* melalui penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan tersebut menekankan pengalokasian anggaran belanja daerah pada program prioritas yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Penerapan *money follows program* diarahkan untuk mewujudkan hasil pembangunan yang terukur, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui perencanaan pembangunan yang holistik, tematik, integratif, dan berbasis kewilayahan.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 menggunakan beberapa pendekatan perencanaan yang berorientasi proses serta substansi pembangunan daerah, meliputi:

1) Pendekatan teknokratik

Pendekatan ini menempatkan metode ilmiah sebagai dasar perumusan tujuan serta sasaran pembangunan daerah. Pemanfaatan hasil penelitian menjadi rujukan utama penyusunan RKPD, didukung kerja sama bersama perguruan tinggi serta lembaga pengkajian melalui perjanjian kerja sama maupun forum diskusi kelompok terarah. Data serta informasi pembangunan dihimpun dari berbagai sumber terpercaya, antara lain Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, serta seluruh Perangkat Daerah. Kompetensi perencana daerah diperkuat melalui keterlibatan fungsional perencana dan aparatur yang telah mengikuti pendidikan serta pelatihan teknis perencanaan pembangunan.

2) Pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif memberi ruang keterlibatan pemangku kepentingan guna menjamin keterwakilan aspirasi pembangunan daerah. Masyarakat, perguruan tinggi, serta dunia usaha dilibatkan melalui Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau, sehingga proses perencanaan mencerminkan kebutuhan riil serta harapan bersama.

3) Pendekatan *bottom-up* dan *top-down*

Pendekatan ini mengintegrasikan aspirasi masyarakat dengan kebijakan serta program prioritas pemerintah pusat dan daerah. Kebutuhan masyarakat dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, kecamatan, serta kabupaten/kota yang dilaksanakan secara berjenjang hingga Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau. Keterlibatan pemangku kepentingan terwujud melalui forum konsultasi publik, Forum Perangkat Daerah, serta Musrenbang, didukung ketersediaan pedoman teknis penyelenggaraan forum perencanaan. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah digunakan sebagai media penyampaian usulan pembangunan. Usulan Musrenbang kabupaten/kota diseleksi dan diintegrasikan ke dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau.

Penyelarasan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan program prioritas serta kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah. Konsistensi tersebut dijaga melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis bersama kementerian serta lembaga. Program dan kegiatan prioritas daerah diselaraskan dengan Proyek Strategis Nasional. Keterlibatan narasumber pemerintah pusat dilaksanakan melalui tahapan konsultasi publik, Musrenbang, serta Rakortek. Dukungan program dan kegiatan daerah terhadap prioritas nasional difasilitasi melalui aplikasi KRISNA.

4) Pendekatan politik

Pendekatan politik mengakomodasi kepentingan strategis hasil proses demokrasi lokal. Janji politik kepala daerah serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi bagian tidak terpisahkan dari perumusan prioritas pembangunan. Proses tersebut diperkuat melalui konsultasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD bersama DPRD.

5) Pendekatan holistik-tematik

Pendekatan holistik-tematik memandang pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan. Potensi, tantangan, hambatan, serta permasalahan pembangunan dianalisis secara menyeluruh guna merumuskan tema pembangunan yang fokus serta terarah.

6) Pendekatan integratif

Pendekatan integratif menyatukan berbagai kewenangan lintas sektor ke satu proses perencanaan terpadu. Fokus perencanaan diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui keterpaduan program, kegiatan, serta subkegiatan antar Perangkat Daerah.

7) Pendekatan spasial

Pendekatan spasial mempertimbangkan dimensi keruangan sebagai bagian penting perencanaan pembangunan. Lokasi kegiatan pembangunan

disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau guna menjamin keterpaduan pemanfaatan ruang serta keberlanjutan pembangunan.

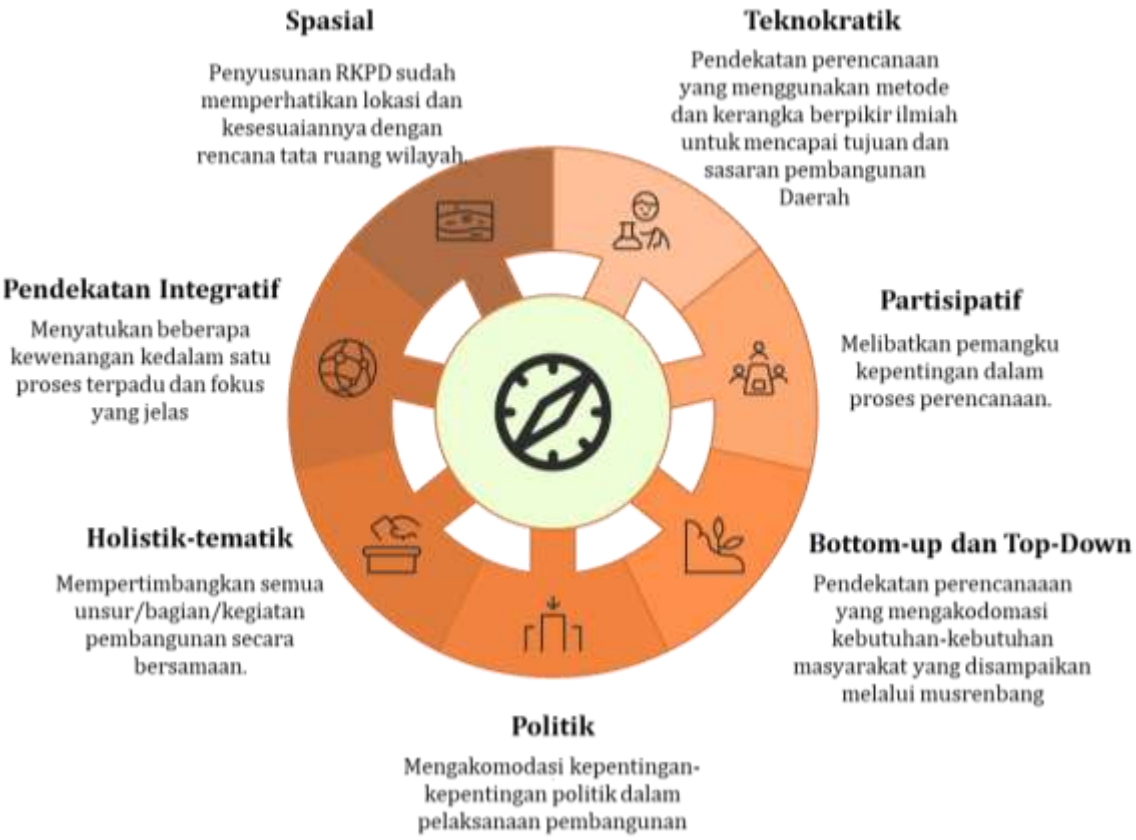

Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kepulauan Riau Tahun 2027

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui SIPD-RI. Seluruh usulan perencanaan Perangkat Daerah, Masyarakat, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui SIPD-RI.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Persiapan penyusunan RKPD**
   Tahapan ini meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi perencanaan pembangunan daerah.
2. **Penyusunan rancangan awal RKPD**
   Perumusan dan Penyusunan Rancangan awal RKPD Tahun 2027 dilakukan pada bulan Januari Tahun 2026. Rancangan awal RKPD Tahun 2027 berisikan panduan

dan cakupan perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan pendekatan perencanaan teknokratik.

3. **Penyusunan rancangan RKPD**
   Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dengan prioritas nasional dan RKP Tahun 2027. Rancangan RKPD disusun dengan memperhatikan Rakortekbang, dan Hasil Forum Perangkat Daerah.
4. **Pelaksanaan Musrenbang RKPD**
   Tahapan ini merupakan forum untuk menghasilkan sinergisitas rancangan RKPD dengan aspirasi masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Proses Musrenbang ini melibatkan berbagai *stakeholders*, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan kaum perempuan dan anak secara partisipatif.
5. **Perumusan rancangan akhir RKPD**
   Tahapan ini merupakan perbaikan rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional dan Catatan Hasil Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
6. **Penetapan RKPD**
   RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Skema penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 disajikan sebagai berikut:

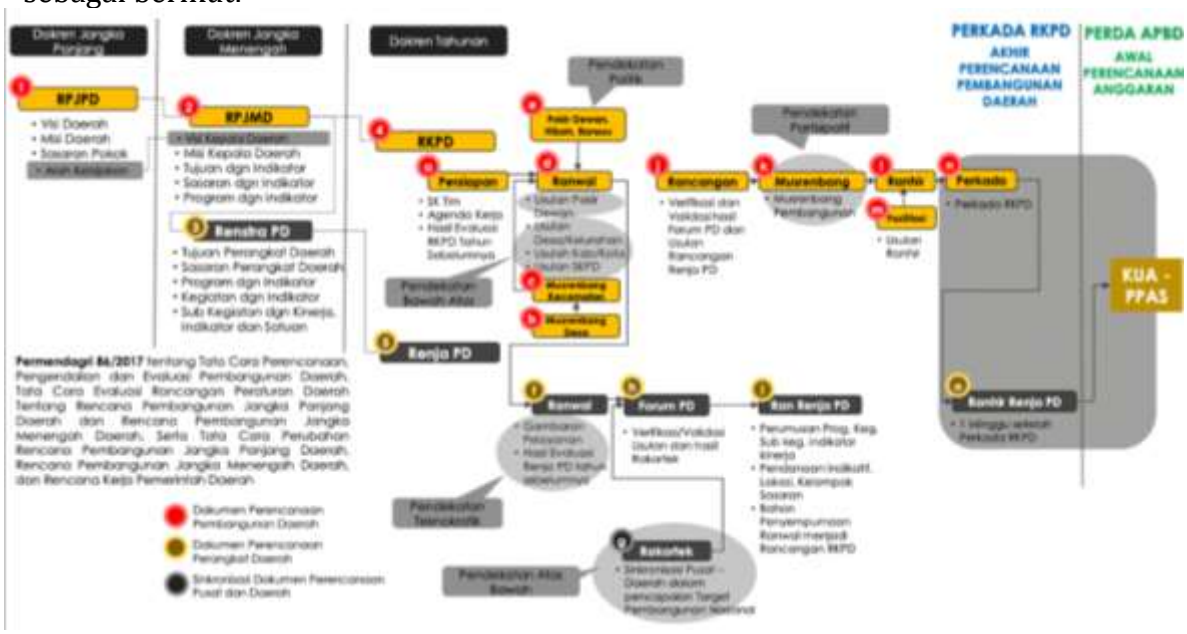

Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran pembangunan tahunan. RKPD tahun 2027 setelah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD juga menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2027 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2027. Dengan adanya prioritas dan arah kebijakan tahunan pembangunan daerah tercipta kepastian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 927), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67).
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
30. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, RKPD Provinsi Kepulauan Riau memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan nasional dan Kabupaten/Kota. RKPD juga memiliki keterkaitan dengan dokumen

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029. RKPD juga memberikan dukungan terhadap keberhasilan atas pencapaian Asta Cita dan RKP Tahun 2027. RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.

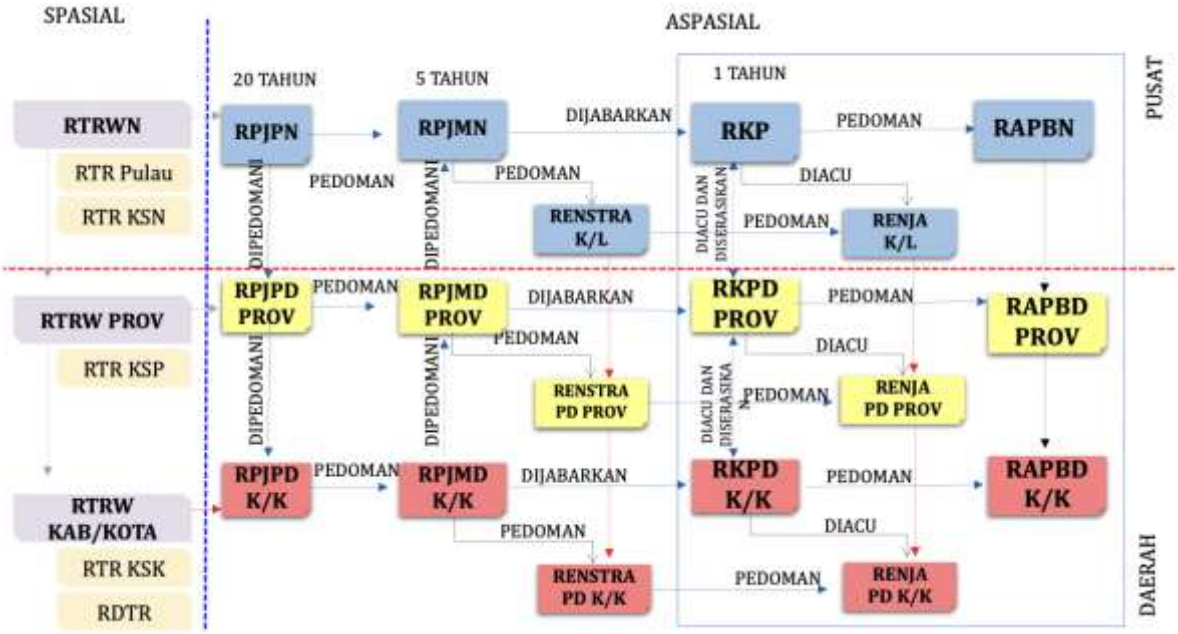

Gambar 1.3 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjelasan keterkaitan erat antara RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. **Hubungan RKPD Tahun 2027 dengan RKP Tahun 2027**
   RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, terutama terkait prioritas pembangunan nasional tahun 2027 dan arah pembangunan wilayah yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. **Hubungan RKPD Tahun 2027 dengan RPJMD Tahun 2025-2029**
   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD tahun 2027 merupakan RKPD tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Dengan demikian RKPD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.
3. **Hubungan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota**
   RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027.
4. **Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**
   Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya

Rencana Kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

5. **Hubungan RKPD dengan KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**
   RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2027 yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027.
6. **Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Multi Sektor Lainnya**
   RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor baik di Tingkat nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan, Rencana Pengembangan Tenaga Kerja Hijau, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, Reformasi Birokrasi, dan lain sebagainya.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 yaitu:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027;
2. Menyediakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS dan dasar dalam membuat kerangka acuan kerja penyusunan RAPBD Tahun 2027.
3. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan dan evaluasi pada saat akhir perencanaan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, terdiri dari delapan (8) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, landasan hukum, rumusan maksud dan tujuan, sistematika dokumen RKPD, serta hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup geografi, demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang kondisi perekonomian global dan nasional, kondisi ekonomi daerah yaitu tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah serta proyeksi kondisi keuangan daerah dan kerangka pendanaan pembangunan serta arah kebijakan pendapatan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, isu-isu strategis pembangunan tahun 2027, tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2027.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Berisi tentang sasaran pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2027.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan tentang rencana kerja kegiatan-kegiatan program prioritas dan rencana kerja pembangunan tahun 2027.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi tentang Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta kinerja yang akan dicapai tahun 2027.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD serta tindak lanjut yang diperlukan dalam implementasi RKPD tahun 2027 sebagai acuan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografis

1. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Provinsi di Indonesia secara Geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau terletak pada 0°29'LS - 4°40'LU dan 103°22'BT - 109°40'BT.

Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi strategis wilayah Indonesia bagian barat dengan koordinat antara 0°29' Lintang Selatan hingga 4°40' Lintang Utara serta 103°22' hingga 109°40' Bujur Timur. Posisi geografis tersebut menempatkan Provinsi Kepulauan Riau pada jalur pelayaran internasional yang berhadapan langsung dengan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara, sehingga memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, perdagangan, serta hubungan regional dengan negara lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Cina Selatan (Laut Natuna Utara)
Sebelah Timur	: Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
Sebelah Selatan	: Provinsi Sumatra Selatan (saait ini Provinsi Bangka Belitung) dan Provinsi Jambi
Sebelah Barat	: Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

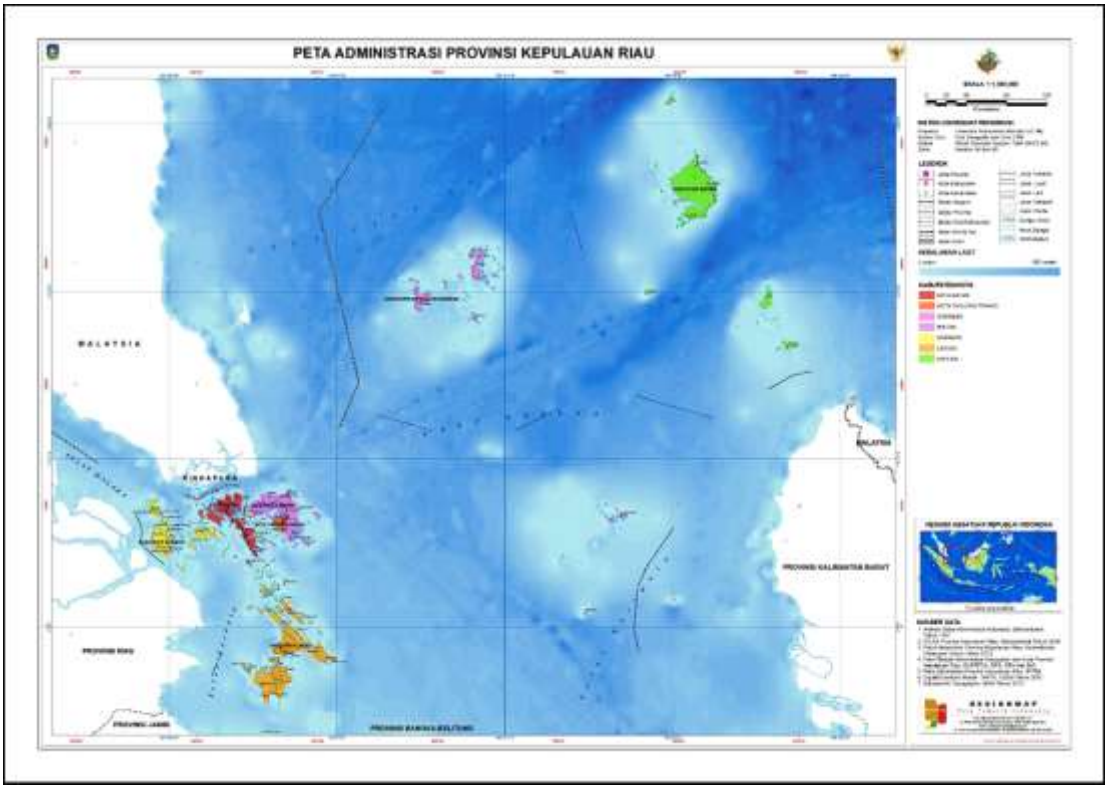

Gambar 2.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau lebih kurang 98% adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 (dua) kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, dan 5 (lima) kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2894 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.170,375 km^2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km^2)
1.	Kabupaten Karimun	916,331
2.	Kabupaten Bintan	1.311,868
3.	Kabupaten Natuna	1.978,010
4.	Kabupaten Lingga	2.173,630
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	620,622
6.	Kota Batam	1.020,280

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km^2)
7.	Kota Tanjungpinang	149,634
	Total	**8.170,375**

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km^2. Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km^2)
1	Kabupaten Karimun	4.698,09
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kabupaten Lingga	43.339,00
5	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
6	Kota Batam	3.675,25
7	Kota Tanjungpinang	149,13
	Total	**417.012,97**

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, letak astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84'' BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23'' BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53'' BT

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79'' BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80'' BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84'' BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62'' BT

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (2016)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, jumlah pulau pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1	Provinsi Kepulauan Riau	14	1
2	Kota Tanjungpinang	8	3
3	Kabupaten Bintan	263	32
4	Kota Batam	454	80
5	Kabupaten Karimun	248	45
6	Kabupaten Lingga	630	82
7	Kabupaten Natuna	172	30
8	Kabupaten Kepulauan Anambas	239	21
Jumlah Pulau Di Provinsi Kepulauan Riau		**2.028**	**294**

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2018

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 2138 Tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sebanyak 22 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Karimun	2	Pulau Karimun Anak, Pulau Tokong Hiu Kecil
2	Kota Batam	4	Pulau Batu Berantai, Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Putri
3	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Belayar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Nanas
5	Kabupaten Natuna	7	Pulau Kepala, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Semiun, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, Pulau Tokong Boro
	Jumlah	**22**	

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. **Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera**
   Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25 persen pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40 persen dan di atas 40 persen pada wilayah pegunungan.
2. **Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh**
   Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).
3. **Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep**
   Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.
4. **Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang**
   Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Ketinggian wilayah menurut Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah, diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.6
Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Kabupaten Karimun	5
2	Kabupaten Bintan	6
3	Kabupaten Natuna	14
4	Kabupaten Lingga	6
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	6
6	Kota Batam	8
7	Kota Tanjungpinang	65

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, tertinggi Gunung Daik di Kabupaten Lingga setinggi 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Karimun	Gunung Jantan	478
2	Bintan	Gunung Bintan	380
3	Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
4	Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
5	Kepulauan Anambas	Gunung Punjang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.1.1.3 Kondisi Geologi, Struktur Tanah dan Hidrologi

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "paparan sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempat di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarung juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun

oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya- timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kunicng, latosol dan aluvial. Jenis tanah Organosol dan glei humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau bulkdensity kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah Organosol tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah Latosol, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah Aluvial yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung glei dan bertotol kuning, merah dan cokelat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Wilayah Sungai Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 yang mencakup seluruh pulau pembentuk Provinsi Kepulauan Riau. Sistem hidrologi tersebut terdiri atas 117 Daerah Aliran Sungai yang tersebar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya air wilayah provinsi.

Tabel 2.8
Daftar DAS di WS Kepulauan Riau

No	Nama DAS	Luas (km²)	No	Nama DAS	Luas (km²)	No	Nama DAS	Luas (km²)
1.	DAS Abang Besar	0,29	41.	DAS Jelutung	0,43	81.	DAS Posik	0,44
2.	DAS Air Abu	0,49	42.	DAS Kampung Hilir	1,57	82.	DAS Rapit	0,17
3.	DAS Air Asuk	0,08	43.	DAS Kangka	0,49	83.	DAS Resun	0,18
4.	DAS Air Merah	0,27	44.	DAS Karimun	1,36	84.	DAS Sanglar	0,18
5.	DAS Alai	0,33	45.	DAS Katubi	1,02	85.	DAS Sawang	1,03
6.	DAS Anggus	0,89	46.	DAS Kelarik	0,39	86.	DAS Sebangka	1,71
7.	DAS Ara	0,42	47.	DAS Kelarik Hulu	0,67	87.	DAS Sebesi	0,47
8.	DAS Awak	0,28	48.	DAS Kerasing	1,89	88.	DAS Segeram	4,04
9.	DAS Bajau	0,25	49.	DAS Ketam	0,73	89.	DAS Sekarim	0,23
10.	DAS Balo	0,34	50.	DAS Durai	0,20	90.	DAS Selamak	0,60
11.	DAS Batang	0,18	51.	DAS Durian	0,24	91.	DAS Selapan	0,55
12.	DAS Batu Belah	0,51	52.	DAS Kredong	0,50	92.	DAS Selor	0,07
13.	DAS Bela	0,57	53.	DAS Kumbang	0,57	93.	DAS Sembulang	0,43
14.	DAS Benuwa	0,21	54.	DAS Ladan	0,21	94.	DAS Sendanau	0,10
15.	DAS Bidai	0,34	55.	DAS Ladi	0,49	95.	DAS Serasan	0,69
16.	DAS Binjai	6,57	56.	DAS Lagong	0,21	96.	DAS Seraya Cundung	0,16
17.	DAS Bintan	1,79	57.	DAS Langkap	0,21	97.	DAS Sergong	0,90
18.	DAS Bukit Jodoh	0,51	58.	DAS Lebuh	0,10	98.	DAS Siantan	0,10
19.	DAS Buluh	0,41	59.	DAS Lieng	0,35	99.	DAS Sopor	0,04
20.	DAS Bunguran Timur	0,77	60.	DAS Logo	1,87	100,00.	DAS Sugi	0,98
21.	DAS Buru	0,20	61.	DAS Mamut	1,43	101.	DAS Sumpai	2,27
22.	DAS Canot	0,78	62.	DAS Mapor	0,29	102.	DAS Tambang Besar	0,32
23.	DAS Cikolek	1,78	63.	DAS Maroktua	1,50	103.	DAS Tambelan	0,02
24.	DAS Cinak	1,04	64.	DAS Matak	0,86	104.	DAS Telaga	0,18
25.	DAS Cinak Besar	0,60	65.	DAS Medang	0,36	105.	DAS Telok	0,62
26.	DAS Combol	0,59	66.	DAS Mentuda	0,21	106.	DAS Teluk Radang	0,39
27.	DAS Dabo	0,44	67.	DAS Midai	0,27	107.	DAS Tembok	0,58
28.	DAS Dompak	1,33	68.	DAS Moro	0,23	108.	DAS Temiang	0,86
29.	DAS Duara	0,65	69.	DAS Mubur	0,41	109.	DAS Terong	0,32
30.	DAS Durai	0,20	70.	DAS Musal	0,27	110.	DAS Terong	0,01
31.	DAS Durian	0,24	71.	DAS Nongsa	0,75	111.	DAS Tiban Lama	0,75

No	Nama DAS	Luas (km^2)	No	Nama DAS	Luas (km^2)	No	Nama DAS	Luas (km^2)
32.	DAS Durslin	0,97	72.	DAS Nyamuk	0,14	112.	DAS Tiga	2,06
33.	DAS Ekang	0,48	73.	DAS Panai	2,34	113.	DAS Tjempah	0,32
34.	DAS Gading	1,16	74.	DAS Papan	0,53	114.	DAS Tjitim	0,25
35.	DAS Galang	0,87	75.	DAS Pauh	0,06	115.	DAS Ungar	0,58
36.	DAS Galang Baru	0,33	76.	DAS Penatu	0,72	116.	DAS Urung	0,48
37.	DAS Gata	0,65	77.	DAS Pengibu	0,01	117.	DAS Wampu	1,06
38.	DAS Gemuruh	0,25	78.	DAS Pengok	0,57			
39.	DAS Hulu	0,73	79.	DAS Penuba	0,43			
40.	DAS Jang	0,38	80.	DAS Pesung	0,50			

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

2.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau dipantau melalui 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), meliputi: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah; Stasiun BMKG Ranai Natuna; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Kijang Tanjungpinang. Suhu udara maksimum selama tahun 2025 terbesar terjadi di Kabupaten Karimun dengan suhu 36,5 derajat celsius dan kondisi suhu udara maksimum terendah terjadi di Kabupaten Karimun yaitu sekitar 34,3 derajat Celsius. Sedangkan untuk kelembaban udara minimum terjadi di Kabupaten Bintan dengan kelembaban sebesar 46 persen. Disisi lain, jumlah hari hujan terbanyak selama tahun 2025 terjadi di Kabupaten Karimun yaitu sebanyak 215 hari hujan dan hari hujan yang paling sedikit terjadi di Kabupaten Natuna yaitu sebesar 155 hari hujan.

Secara lebih rinci, rata-rata kondisi cuaca yang tercatat di stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.9
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Tahun 2025

Kabupaten/ Kota	Stasiun BMKG	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (persen)	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata Kecepatan Angin (knot)	Curah Hujan (mm^3)	Penyinaran Matahari (jam)
Karimun	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	28,4	51,0	1.009,1	2,9	2.251,7	3,8
Bintan	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	27,6	46,0	1.006,2	1,9	2.908,0	5,3
Natuna	Stasiun Meteorologi Ranai Natuna	28,0	61,0	1.010,6	4,3	2.385,1	4,5

Kabupaten/ Kota	Stasiun BMKG	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (persen)	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata Kecepatan Angin (knot)	Curah Hujan (mm^3)	Penyinaran Matahari (jam)
Lingga	Stasiun Meteorologi Dabo Singkep	27,8	57,0	1.010,1	4,1	2.737,2	5,9
Kepulauan Anambas	Stasiun Meteorologi Trempa	28,5	51,0	1.009,6	3,4	2.070,2	4,6
Batam	Stasiun Meteorologi Hang Nadim	28,1	51,0	1.012,0	5,4	2.872,5	4,2
Tanjungpinang	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	27,5	72,5	1.008,2	4,1	3.455,7	5,3

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka 2025)

2.1.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung agenda transformasi ekonomi nasional dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2027. Keunggulan geografis yang berada pada jalur perdagangan internasional, didukung keberadaan kawasan ekonomi strategis, wilayah perbatasan negara, serta basis industri manufaktur berorientasi ekspor, menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karakteristik tersebut memberikan peran yang tidak hanya penting dalam mendorong pembangunan wilayah, tetapi juga dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional dan global.

Sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam–Bintan–Karimun (BBK), Provinsi Kepulauan Riau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh berbagai fasilitas fiskal, kemudahan investasi, serta pengembangan kawasan industri dan perdagangan internasional. Kawasan FTZ telah berkembang menjadi lokasi strategis bagi industri manufaktur, galangan kapal, elektronika, teknologi, logistik, serta jasa maritim yang memiliki keterkaitan erat dengan rantai pasok global (global value chain). Keberadaan FTZ berkontribusi terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor nonmigas, transfer teknologi, serta penguatan struktur industri nasional. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan kawasan FTZ menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah.

Selain itu, posisi Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada simpul Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) memberikan nilai strategis dalam mendukung konektivitas logistik nasional maupun internasional. ALKI I merupakan jalur pelayaran utama yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina

Selatan melalui Selat Malaka dan Selat Singapura, yang merupakan salah satu koridor pelayaran tersibuk di dunia. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi Kepulauan Riau untuk berkembang sebagai pusat logistik, distribusi barang, pelabuhan transshipment, serta layanan maritim internasional. Penguatan infrastruktur pelabuhan, transportasi multimoda, digitalisasi logistik, dan integrasi jaringan transportasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.

Sebagai kawasan perbatasan negara, khususnya di Kabupaten Natuna dan wilayah sekitarnya, Provinsi Kepulauan Riau memiliki fungsi strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memperkuat ketahanan nasional, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi kawasan perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan diarahkan tidak hanya sebagai upaya menjaga keamanan dan keutuhan wilayah, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor perikanan, kelautan, energi, pariwisata bahari, serta peningkatan konektivitas antarpulau. Dengan demikian, pembangunan kawasan perbatasan menjadi bagian integral dari strategi pemerataan pembangunan nasional sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan.

Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan salah satu pusat investasi asing terbesar di Indonesia. Kedekatan geografis dengan Singapura dan Malaysia, dukungan kawasan ekonomi khusus dan FTZ, infrastruktur industri yang relatif maju, serta ekosistem investasi yang kompetitif menjadikan daerah ini sebagai tujuan utama penanaman modal asing (PMA). Arus investasi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan sektor industri dan jasa. Dalam konteks transformasi ekonomi nasional, penguatan iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kepastian hukum, pengembangan kawasan industri modern, dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan menjadi faktor yang sangat penting untuk mempertahankan daya saing daerah.

Di sisi lain, Kepulauan Riau telah berkembang sebagai basis industri manufaktur berorientasi ekspor, khususnya pada sektor elektronika, peralatan listrik, galangan kapal, mesin, komponen industri, serta berbagai industri berteknologi menengah dan tinggi. Industri-industri tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional sekaligus menjadi bagian dari penguatan hilirisasi dan diversifikasi struktur industri Indonesia. Pengembangan industri manufaktur yang berdaya saing memerlukan dukungan terhadap inovasi, penguatan rantai pasok domestik, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan industri hijau sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Selaras dengan arah kebijakan RKP Tahun 2027, penguatan peran strategis Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi, penguatan daya saing industri nasional, pengembangan ekonomi maritim, peningkatan efisiensi sistem logistik nasional, serta penguatan konektivitas kawasan. Optimalisasi fungsi FTZ Batam–Bintan–Karimun, pengembangan kawasan perbatasan Natuna, pemanfaatan posisi strategis pada ALKI I, dan penguatan ekosistem industri ekspor diharapkan mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maritim, pusat investasi, dan basis industri yang kompetitif di kawasan Asia-Pasifik.

Berikut ini dijelaskan lebih rinci berbagai potensi wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 76/MenLHK-II/2015 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 207.569 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 60.299 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 536 Hektar di Provinsi Kepulauan Riau, dengan Rincian Kawasan Hutan Produksi terbagi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 79.259 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 120.490 Hektar, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 74.367 Hektar.

Namun di tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Kepmen Nomor: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 330 Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang Seluas ± 7.560 Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

Dengan diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tersebut terdapat perubahan luasan Kawasan Hutan Produksi Konversi menjadi (HPK) seluas 81.927 ha. Selain itu kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 16.012 hektar dengan perhitungan setelah diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221.707 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman

pangan, kawasan holtikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

a) Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kawasan budidaya tanaman pangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dan lahan kering dimana pengairan dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis dan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija dan hortikultura. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana).

Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan potensi Ketinggian < 100,000 m dpl dan Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.

b) Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan ternak. Kawasan peternakan dapat dilakukan secara terpadu sebagai bagian dari komponen usaha tani lainnya (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam). Pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk membangun peternakan yang berwawasan agribisnis berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kecukupan daging secara berkelanjutan. Kawasan agribisnis berbasis peternakan merupakan kawasan peternakan yang berorientasi ekonomi dan memiliki sistem agribisnis berkelanjutan dimulai dari industri hulu hingga industri hilir.

Kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan berdasarkan pendekatan berbasis pulau dan terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan. Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (backyard farming). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten

Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada

daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan morfologi dan ukuran ternak, maka ternak besar (sapi dan kerbau) dikembangkan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) diarahkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Sedangkan ternak unggas diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

c) Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan serta pegembangkan kawasan sentra produksi perkebunan. Perkebunan yang menjadi komoditas favorit di Provinsi Kepulauan Riau adalah kelapa, sagu, karet, lada, cengkeh, coklat, gambir dan kopi. Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan mempertimbangkan faktor-faktor:

a. Ketinggian < 2.000 m dpl;
b. Kelerengan 40 persen;
c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kriteria kawasan peruntukan perikanan adalah:

a. Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan.
b. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat zonasi kawasan yang terdiri dari:

a. Zona Inti
   Zona inti diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian, dan pendidikan.
b. Zona Perikanan Berkelanjutan
   Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan,

budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.

c. Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.

d. Zona Lainnya

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, yakni antara lain zona perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya.

Pengembangan pola ruang untuk kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi:

a. Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain. Pada tahun 2025, total produksi perikanan tangkap mencapai 316.749,92 ton.

b. Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Pada tahun 2025, produksi perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 40.656,10 ton.

c. Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

d. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

   Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dikembangkan di Kabupaten Natuna dan Kota Batam.

2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

   Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas B. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT. Pelabuhan ini dapat menampung sekurang-kurangnya 75 buah kapal atau 2250 GT sekaligus dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di laut teritorial dan ZEE Indonesia. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dikembangkan di Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

   Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas C. Pelabuhan ini dapat melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT dan menampung 30 buah kapal atau 300 GT. Pelabuhan ini melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan di Antang Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

   Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas D, melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT dan menampung 20 buah kapal atau 60 GT kapal perikanan sekaligus. Pelabuhan ini melayani kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan berada di Tanjung Batu Sawah Kota Tanjungpinang; Berakit, Tambelan, Batu Duyung, Kawal dan Barek Motor Kabupaten Bintan; Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Galang Kota Batam; Moro Kabupaten Karimun; Kecamatan Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara dan Singkep Barat Kabupaten Lingga; Serasan, Selat Lempa, Pulau Laut, Bunguran Barat, Pulau Tiga,

Bunguran Utara, Subi, Midai dan Bunguran Timur Kabupaten Natuna serta Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kawasan peruntukan pertambangan memiliki kriteria antara lain:

a) Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data potensi mineral dan analisa geologi. Kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara bekerlanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.
b) Kawasan tersebut merupakan bagian proses upaya merubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Adapun kriteria kawasan peruntukan industri yakni sebagai berikut;

a) Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;
b) Tersedia sistem air baku yang cukup;
c) Adanya sistem pembuangan limbah;
d) Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat;
e) Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.

Kawasan industri yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau tersebut sesuai dengan kompetensi inti daerah. Adapun peruntukan kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di :

a) Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, Kawasan Industri Dompak Darat dan kawasan industri Dompak Seberang)

b) Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang)
c) Kota Batam (kawasan industri Kabil, Telaga Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang)
d) Kabupaten Karimun (kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup)
e) Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai Tenam di Kecamatan Lingga dan kawasan industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat)
f) Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri perikanan di Kecamatan Pulau Tiga).
g) Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja).

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan komparatif terdiri dari:

1) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
2) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
3) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
4) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
5) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
6) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;

7) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan (dengan luas tertentu) secara berkelanjutan yang memadu-serasikan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (*geodiversity*), hayati (*biodiversity*) dan budaya (*cultural diversity*). Dalam pengembangannya, konsep ini berpilar pada aspek Konservasi, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penumbuhan Nilai Ekonomi Lokal melalui geowisata. Berdasarkan keputusan Komite Nasional Geopark Indonesia di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November 2018, Natuna resmi termasuk sebagai kawasan Geopark Nasional. Setidaknya, ada 9 geosite yang masuk dalam Geopark Natuna yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk serta Taman Batu Alif.

Sebagai wujud keseriusannya, Kabupaten Natuna menyusun Rencana Induk Pengembangan Geopark Natuna. Seiring dengan hal tersebut, sebagaimana Program Kerja Badan Pengelola Geopark Natuna, pada saat ini dalam tahap persiapan menuju UNESCO Global Geopark dengan langkah yang telah dilakukan yaitu penelitian keragaman geologi Kabupaten Natuna dalam rangka perluasan geopark oleh Tim dari UNPAD Bandung.

Selain itu, pada tanggal 18 Desember 2019, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Program Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) di Natuna. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Geopark Natuna memiliki kekhususan dibandingkan dengan geopark lainnya karena mendukung Rencana Strategis Pertahanan dan Keamanan sebagai bagian dari beranda terdepan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mendorong konservasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pariwisata.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau, dengan kriteria sebagai berikut:

a) Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
b) Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan;
c) Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

Masalah permukiman penduduk berkaitan erat dengan kebutuhan penduduk akan perumahan. Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah akan memberikan konsekuensi dalam penyediaan perumahan.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga menambah permasalahan di dalam penyediaan rumah. Tingkat urbanisasi semakin pesat akibat terjadinya perubahan yang sangat pesat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Lahan siap bangun bagi pengembangan rumah perorangan perlu dikendalikan dari waktu kewaktu, hal ini mengingat keterbatasan lahan yang tidak mencukupi jika semua kawasan dibangun untuk perumahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Orientasi pengembangan perumahan khususnya di kawasan perkotaan dan cepat tumbuh diarahkan bagi "rumah tumbuh" atau vertikal. Dengan demikian akan mengurangi tekanan bagi penyempitan lahan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 85.605 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Pola perencanaan pembangunan hendaknya memasukkan unsur lingkungan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya yang ada bagi kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah haruslah didasarkan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Jika dihubungkan dengan karakteristik negara kepulauan (yang dominan adalah perairan laut dan berfungsi sebagai jembatan dan jalan yang menyatukan wilayah kepulauan) maka tentunya beberapa perencanaan pembangunan yang disusun serta arahan penataan ruang wilayah yang dibuat haruslah berkarakteristik wilayah khususnya pada wilayah kepulauan, begitu juga dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi bentang wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah 425.214,676 km^2 didominasi oleh perairan laut, terdiri dari 2.408 pulau, baik berpenghuni dan belum berpenghuni, bernama maupun belum bernama. Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi dan permasalahan sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki *comparative advantage* yang tinggi karena posisi geografisnya. Selain itu perairan lau Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral. Berbagai aspek yang terdapat pada perairan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di laut, seperti terganggunya ekosistem yang sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran. Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan wilayah negara, sehingga aspek pengelolaannya

perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat potensi dan masalah yang dapat muncul di kawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pengembangan kawasan laut, termasuk juga didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang yang berkelanjutan.

Rencana pengembangan kawasan laut Provinsi Kepulauan Riau merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan laut yang meliputi:

a. Kawasan pemanfaatan umum
   merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata, permukiman yang telah ada, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, kawasan khusus parkir kapal (*Anchorage Area*), kawasan alih muat muatan kapal *Ship to Ship (STS) Transfer*), infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biofisik lingkungannya
b. Kawasan konservasi
   merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau sempadan pantai.
c. Kawasan strategis nasional
   merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai zona pertahanan dan keamanan, situs warisan dunia, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, termasuk 22 pulau kecil terdepan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.
d. Alur laut
   Meliputi alur pelayaran internasional, nasional dan regional, alur sarana umum, alur migrasi ikan, serta jaringan kabel dan pipa gas bawah laut.

Aspek wilayah perencanaan pengembangan kawasan laut meliputi seluruh wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, aspek pengelolaan wilayah laut tetap mengikuti aturan pembagian kewenangan daerah provinsi di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. Sementara itu penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

2.1.1.6 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut:

1. Bahaya Banjir

Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; wilayah dengan ketinggian genangan 75 - 150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi (BNPB, 2019).

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau, yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	BINTAN	1.379	24.818	17.854	44.051	TINGGI
2	KARIMUN	642	13.531	10.471	24.644	TINGGI
3	KEPULAUAN ANAMBAS	32	235	327	594	TINGGI
4	LINGGA	890	24.872	17.618	43.379	TINGGI
5	NATUNA	1.413	29.372	29.242	60.028	TINGGI
B	**Kota**					
1	KOTA BATAM	607	14.632	5.731	20.970	SEDANG
2	KOTA TANJUNG PINANG	310	3.879	1.880	6.070	SEDANG
Provinsi Kepulauan Riau		**5.273**	**111.339**	**83.123**	**199.735**	**TINGGI**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau. Potensi bahaya banjir pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak banjir.

Total luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah **199.735 Ha** dan berada pada kelas **Tinggi**. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas **5.273 Ha**, kelas sedang seluas **111.339 Ha**, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas **83.123 Ha**.

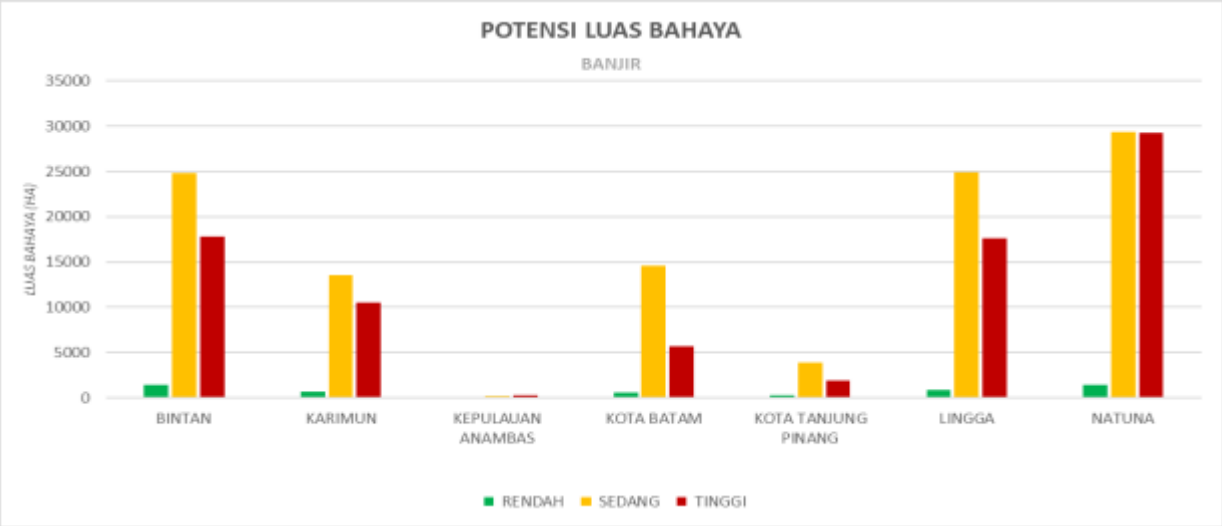

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

Gambar 2.2 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

Dari grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya banjir Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau terdampak bahaya banjir. Kabupaten/Kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Natuna dengan luas **1.413 Ha**. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Natuna dengan luas **29.372 Ha**. Sedangkanuntuk kelas tinggi adalah Kabupaten Natuna dengan luas **29.242 Ha**.

2. Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris

bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau pada tiap-tiap kabupaten, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan tinggi. Hasil potensi luas bahaya banjir bandang per kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	KEPULAUAN ANAMBAS	3	30	52	85	TINGGI
2	NATUNA	604	1.942	4.141	6.687	TINGGI
Provinsi Kepulauan Riau		**606**	**1.971**	**4.194**	**6.771**	**TINGGI**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi luas bahaya banjir bandang dari tabel di atas merupakan luasan Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya Kabupaten/Kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Kabupaten/Kota yang terdampak bahaya banjir bandang.

Potensi luas bahaya banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau adalah **6.771 Ha** dan berada pada kelas **Tinggi.** Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas **606 Ha**, kelas sedang seluas **1.971 Ha**, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas **4.194 Ha**.

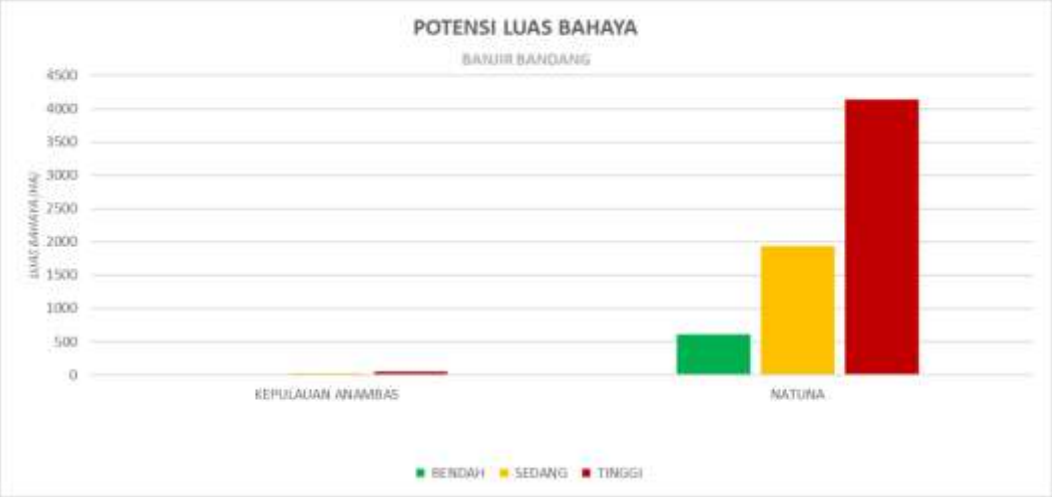

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

Gambar 2.3 Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bahaya banjir bandang. Bahaya banjir bandang berpotensi terjadi di 2 kabupaten dengan luas bahaya tertinggi di kelas rendah adalah Kabupaten Natuna, yakni seluas **604 Ha**. pada kelas sedang yakni seluas **1.971 Ha** dan kelas tinggi seluas **4.194 Ha.**

3. Bahaya Cuaca Ekstrim

Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5 persendistribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	BINTAN	23.278	46.792	59.108	129.179	TINGGI
2	KARIMUN	23.674	39.513	18.694	81.880	TINGGI
3	KEPULAUAN ANAMBAS	54.463	3.397	681	58.541	RENDAH
4	LINGGA	133.562	69.102	19.683	222.347	SEDANG
5	NATUNA	42.133	18.813	17.913	78.859	TINGGI

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
B	**Kota**					
1	KOTA BATAM	29.099	33.973	27.282	90.355	TINGGI
2	KOTA TANJUNG PINANG	117	2.515	11.059	13.691	TINGGI
	Provinsi Kepulauan Riau	**306.327**	**214.106**	**154.420**	**674.852**	**TINGGI**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luasan Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya Kabupaten/Kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau terdampak cuaca ekstrim.

Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah seluas **674.852 Ha** dan berada pada kelas **Tinggi**. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas **306.327 Ha**, padakelas sedang seluas **214.106 Ha**, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas **154.420Ha**.

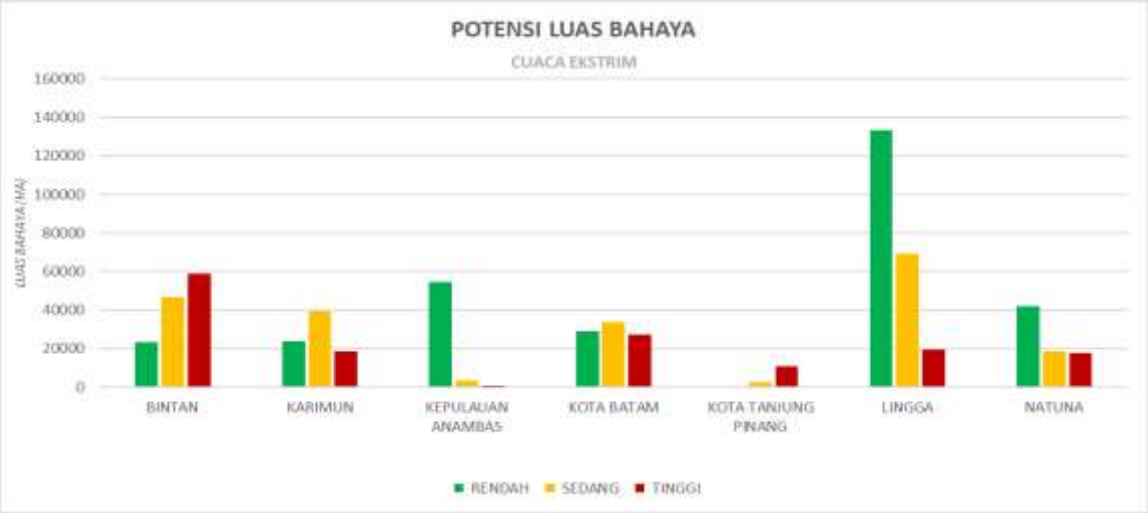

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Gambar 2.4 Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau

Pada gambar di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana cuaca ekstrim. Kabupaten/Kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah dan sedang terdapat di Kabupaten Lingga dengan luas

masing-masing yaitu **133.562 Ha** dan **69.102 Ha**. Sementara itu kabupaten yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi terdapat di Kabupaten Bintan yaitu **59.108 Ha.**

4. Bahaya Gelombang Ekstrim Dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaansiklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanyadisebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utamaabrasi ((BNPB, Definisi dan Jenis bencana, (http://www.bnpb.go.id)).

Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai dengan metode yang terdapat dalam Perka Nomor 2 BNPB Tahun 2012.Parameter penyusunan tersebut terdiri dari tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk **garis** pantai. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter kemudian dilakukan penilaian berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring.

Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut di atas, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	BINTAN	9.551	1.688	2.538	13.777	RENDAH
2	KARIMUN	12.759	486	735	13.980	RENDAH
3	KEPULAUAN ANAMBAS	8.026	3.002	4.257	15.284	TINGGI
4	LINGGA	25.650	1.014	3.006	29.669	TINGGI
5	NATUNA	5.965	1.780	6.418	14.163	TINGGI
B	**Kota**					
1	KOTA BATAM	14.678	735	1.754	17.168	TINGGI
2	KOTA TANJUNG PINANG	1.299	0	33	1.332	RENDAH
	Provinsi Kepulauan Riau	**77.927**	**8.705**	**18.741**	**105.373**	**TINGGI**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahayagelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh Kabupaten/Kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar **105.373 Ha** dan berada padakelas **Tinggi**. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas **77.927 Ha**, pada kelas sedang seluas **8.705 Ha**, dan kelas tinggi dengan luas **18.741 ha**.

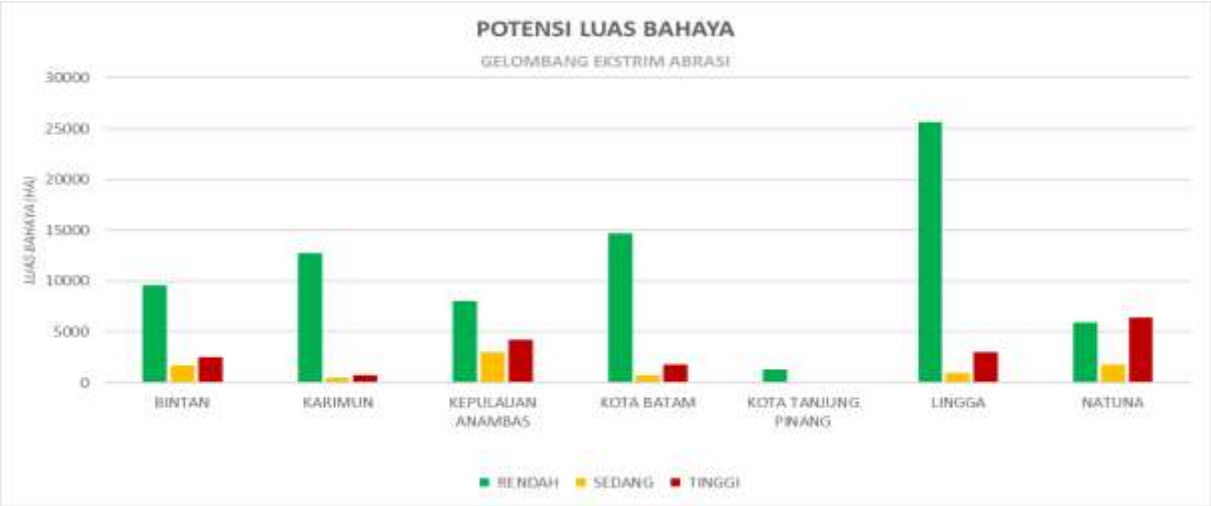

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

Gambar 2.5 Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau

Grafik di atas mendeskripsikan sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dengan Kabupaten Lingga memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah seluas **25.650 Ha**. Untuk kelas sedang di Kabupaten Kepulauan Anambas seluas **3.002 Ha** Sementara itu untuk daerah yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi yaitu Kabupaten Natuna, yakni seluas **6.418 Ha.**

5. Bahaya Gempabumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhan batuan. Dari penjelasan bencana gempabumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempabumi dilihat berdasarkan parameter - parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai berikut; (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan.

Kajian potensi luas dan kelas bahaya gempabumi dengan menggunakan parameter-parameter tersebut, menghasilkan potensi luas dan kelas bahaya gempabumi di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 2.14
Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	BINTAN	131.821	0	0	131.821	RENDAH
2	KARIMUN	91.275	0	0	91.275	RENDAH
3	KEPULAUAN ANAMBAS	59.014	0	0	59.014	RENDAH
4	LINGGA	222.347	0	0	222.347	RENDAH
5	NATUNA	200.904	0	0	200.904	RENDAH
B	**Kota**					
1	KOTA BATAM	96.025	0	0	96.025	RENDAH
2	KOTA TANJUNG PINANG	14.456	0	0	14.456	RENDAH
	Provinsi Kepulauan Riau	**815.842**	**0**	**0**	**815.842**	**RENDAH**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempabumi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau terpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi tersebut merupakan luasan Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya Kabupaten/Kota.

Potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah **815.842 Ha** dan berada pada kelas **Rendah.** Tidak ada daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk dalam kelas bahaya gempabumi sedang dan tinggi.

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

Gambar 2.6 Grafik Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau

Pada grafik dapat dilihat sebaran luas bahaya gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana gempabumi. Kabupaten Lingga adalah kabupaten terluas yang berpotensi terpapar bencana gempabumiyakni **222.347 Ha**.

6. Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dalam dokumen ini, keluaran hasil kajian yang berupa potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.15
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	BINTAN	11.261	71.575	7.528	90.364	SEDANG
2	KARIMUN	11.931	39.033	3.435	54.399	SEDANG
3	KEPULAUAN ANAMBAS	26.724	19.541	697	46.962	SEDANG
4	LINGGA	71.512	92.419	21.583	185.513	SEDANG
5	NATUNA	65.954	77.127	36.803	179.885	TINGGI
B	**Kota**					
1	KOTA BATAM	15.399	21.858	644	37.900	SEDANG

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
2	KOTA TANJUNG PINANG	387	2.587	96	3.070	SEDANG
Provinsi Kepulauan Riau		**203.168**	**324.140**	**70.786**	**598.094**	**TINGGI**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel 3.26 merupakan luasan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh Kabupaten/Kota terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riauyang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

Secara keseluruhan total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau adalah **598.094 Ha** tergolong kelas bahaya **Tinggi**. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah **203.168 Ha**, kelas sedang seluas **324.140 Ha**, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi adalah seluas **70.786 Ha**.

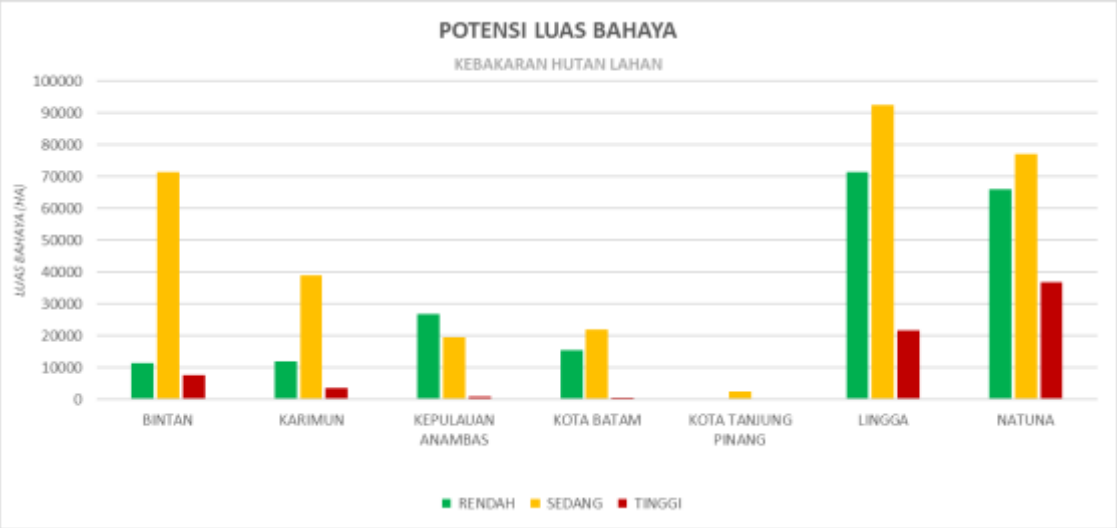

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

Gambar 2.7 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa

Kabupaten Linggamemiliki luas tertinggi untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah dan kelas sedang yaitu masing-masing seluas **71.512 Ha** dan **92.419 Ha**. Sementara itu untuk kelas tinggi, daerah yang memiliki luas bahaya kebakaran hutan danlahan tertinggi adalah Kabupaten Natuna yakni seluas **36.803 Ha**.

7. Bahaya Kekeringan

Pengkajian untuk bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter faktor meteorologi dan kemampuan tanah menyimpan air. Berdasarkan parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kekeringan yang meliputi luas bahaya terdampak kekeringan. Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kekeringan dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimanatelah disebutkan sebelumnya diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.16
Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	BINTAN	0	122.023	9.798	131.821	TINGGI
2	KARIMUN	2.447	88.828	0	91.275	SEDANG
3	KEPULAUAN ANAMBAS	0	55.702	3.312	59.014	SEDANG
4	LINGGA	0	221.742	605	222.347	SEDANG
5	NATUNA	0	182.974	17.930	200.904	TINGGI
B	**Kota**					
1	KOTA BATAM	2.375	93.650	0	96.025	SEDANG
2	KOTA TANJUNG PINANG	0	14.456	0	14.456	SEDANG
Provinsi Kepulauan Riau		**4.823**	**779.374**	**31.645**	**815.842**	**TINGGI**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi KepulauanRiau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya Kabupaten/Kota terdampak kekeringan, sedangkan kelas bahaya kekeringan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bencana kekeringan.

Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah **815.842 Ha**dan berada pada kelas

Tinggi. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah **4.823 Ha** dan kelas sedang seluas **779.374 Ha**, serta kelas tinggi seluas **31.645 Ha.**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

Gambar 2.8 Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau

Pada grafik dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana kekeringan. Kota Batam menjadi wilayah yang memiliki luas bahaya kekeringan dengankelas **Rendah** terkecil yaitu seluas **2.375 Ha**,. Wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang adalah Kabupaten Lingga, yaitu seluas 221.742 Ha. Wilaya dengan luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Natuna, yaitu seluas 17.930 Ha.

8. Bahaya Tanah Longsor

Tanah longsor terjadi ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Dengan kondisi tersebut, bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah. Dari penjelasan bencana tanah longsor tersebut, maka pengkajian untuk bahaya tanah longsor dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai berikut : kemiringan lereng, arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan dan stabilitas lereng.

Berdasarkan parameter-parameter tersebut di atas, diperoleh hasil pengkajian bahaya tanah longsor yang meliputi luas bahaya terdampak tanah longsor di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 2.17
Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	BINTAN	2.157	8.191	0	10.348	SEDANG
2	KARIMUN	2.805	4.894	6.129	13.828	TINGGI
3	KEPULAUAN ANAMBAS	6.459	26.150	17.270	49.879	TINGGI
4	LINGGA	9.420	28.348	20.604	58.371	TINGGI
5	NATUNA	3.751	18.988	3.616	26.355	TINGGI
B	**Kota**					
1	KOTA BATAM	2.764	4.647	2.870	10.281	TINGGI
Provinsi Kepulauan Riau		**27.355**	**91.218**	**50.489**	**169.062**	**TINGGI**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh Kabupaten/Kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap Kabupaten/Kota yang terdampak bencana tanah longsor.

Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah **169.062 Ha** dan berada pada kelastinggi**.** Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas **27.355 Ha**, kelas sedang seluas **91.218 Ha** dan kelas tinggi seluas **50.489 Ha.**

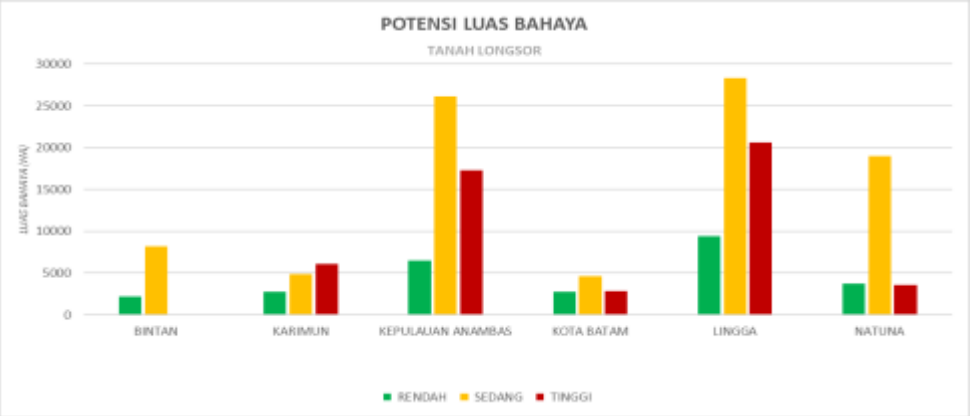

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

Gambar 2.9 Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

Gambar di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana tanah longsor. Kabupaten Lingga adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah yaitu **9.420 Ha**, kelas sedang seluas **28.348 Ha** dan kelas tinggi dengan luas yaitu **20.604 Ha**.

9. Bahaya Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untukbahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri.

Berdasarkan parameter-parameter tersebut di atas, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Luasan wilayah terdampak kegagalan teknologi berbeda untuk setiap kawasan tergantung kondisi daerah. Hasil pengkajian indeks bahaya hingga tingkat Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	BINTAN	8.674	0	0	8.674	RENDAH
2	KARIMUN	4.014	0	0	4.014	RENDAH
3	KEPULAUAN ANAMBAS	523	0	0	523	RENDAH
4	LINGGA	378	0	0	378	RENDAH
5	NATUNA	1.485	0	0	1.485	RENDAH
B	**Kota**					
1	KOTA BATAM	10.893	0	0	10.893	RENDAH
	Provinsi Kepulauan Riau	**25.967**	**0**	**0**	**25.967**	**RENDAH**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi di Provinsi Kepulauan Riau. Potensi bahaya kegagalan teknologi pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kegagalan teknologi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap Kabupaten/Kota. Kelas bahaya kegagalan teknologi

ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kegagalan teknologi.

Potensi luas bahaya kegagalan teknologi secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan Riau adalah seluas **25.967** Ha dan berada pada kelas **Rendah.**

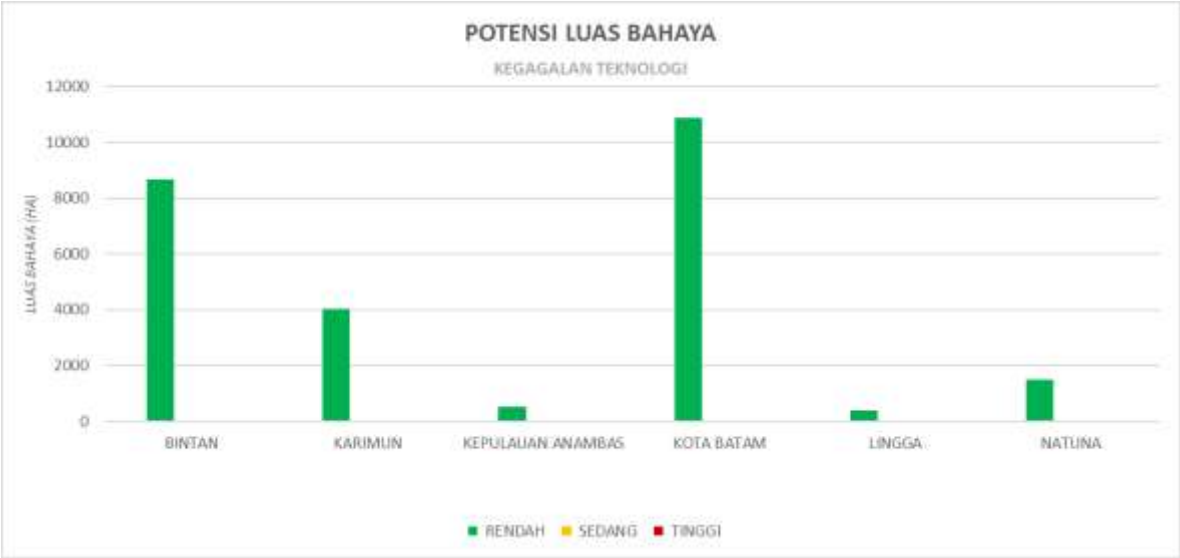

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

Gambar 2.10 Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana kegagalan teknologi. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kota Batam seluas **10.893 Ha**, sedangkan Kabupaten Lingga adalah wilayah yang memiliki luas terendah bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah dengan luas **378 Ha**.

2.1.1.7 Kondisi Demografis

Demografi merupakan ilmu yang mengkaji penduduk dengan fokus utama pada dinamika kelahiran, kematian, serta mobilitas penduduk. Kajian demografi mencakup aspek jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk, serta perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu sebagai dampak proses kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan penduduk. Aspek kependudukan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah karena sumber daya manusia berfungsi sekaligus sebagai pelaku pembangunan dan sebagai pihak yang menerima manfaat pembangunan. Atas dasar tersebut, pemahaman terhadap karakteristik demografi penduduk, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menjadi bagian penting dalam analisis potensi sumber daya pembangunan guna merumuskan arah kebijakan sektoral secara tepat.

Sebaran penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah kepulauan, tingkat aksesibilitas antarwilayah, ketersediaan infrastruktur, serta kegiatan ekonomi wilayah. Penduduk cenderung berkembang di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah kepulauan menunjukkan jumlah dan kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk beberapa tahun terakhir, proyeksi penduduk Provinsi Kepulauan Riau ke depan diperkirakan tetap mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas tenaga kerja, serta peran strategis provinsi sebagai kawasan perdagangan, industri, dan maritim, yang perlu diantisipasi melalui perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan sebaran penduduk dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sepanjang periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebanyak 2.118,2 jiwa, pada tahun 2024 menjadi 2.213,5. Rincian perkembangan jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

o	Kab/Kota	Jumlah (Ribu jiwa)	Laki-Laki (Ribu Jiwa)	Perempuan (Ribu Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)
1	Kabupaten Bintan	170,5	87,63	82,83	105,8	129
2	Kabupaten Karimun	266,0	136,4	129,61	105,2	286
3	Kabupaten Natuna	86,8	44,58	42,18	105,7	43
4	Kabupaten Lingga	103,0	53,24	49,71	107,1	47
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	50,4	26,04	24,32	107,1	80
6	Kota Batam	1.297,0	654,71	642,25	101,9	1.253
7	Kota Tanjung Pinang	240,0	121,18	118,78	102,0	1.596
	Provinsi Kepulauan Riau	**2.213,5**	**1.123,79**	**1.098,67**	**103,1**	**268**

Sumber: BPS dan Kementerian Dalam Negeri

Data jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 menunjukkan bahwa struktur penduduk masih didominasi oleh

penduduk laki-laki. Dari total penduduk sebesar 2.213,50 ribu jiwa, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 1.123,79 ribu jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1.098,67 ribu jiwa. Kondisi tersebut tercermin pada rasio jenis kelamin provinsi sebesar 103,1, yang menunjukkan terdapat sekitar 103 penduduk laki-laki untuk setiap 100,00 penduduk perempuan.

Rasio penduduk laki-laki terjadi di seluruh Kabupaten/Kota dengan tingkat rasio yang bervariasi. Kabupaten Lingga serta Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat rasio jenis kelamin tertinggi, masing-masing sebesar 107,1, disusul Kabupaten Natuna sebesar 105,7, Kabupaten Bintan sebesar 105,8, serta Kabupaten Karimun sebesar 105,2. Pola tersebut berkaitan dengan karakteristik wilayah kepulauan serta struktur ekonomi lokal yang masih bertumpu pada sektor perikanan, kelautan, dan kegiatan berbasis sumber daya alam yang relatif lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.

Wilayah perkotaan menunjukkan komposisi penduduk yang lebih seimbang. Kota Batam memiliki rasio jenis kelamin sebesar 101,9, sedangkan Kota Tanjungpinang sebesar 102,0. Kondisi ini mencerminkan struktur ekonomi yang lebih beragam, terutama sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan administrasi pemerintahan, yang memberikan ruang partisipasi tenaga kerja yang lebih inklusif bagi perempuan.

Tantangan kependudukan juga tercermin dari tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan. Kota Tanjungpinang mencatat kepadatan sebesar 1.596 jiwa per km^2 dan Kota Batam sebesar 1.253 jiwa per km^2. Tingginya kepadatan tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan penyediaan perumahan, infrastruktur dasar, transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan ruang publik yang layak dan aman, khususnya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga memiliki tingkat kepadatan yang relatif rendah, masing-masing sebesar 43 jiwa per km^2 dan 47 jiwa per km^2, namun menghadapi tantangan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan dasar akibat kondisi geografis wilayah yang tersebar.

Variasi komposisi penduduk, rasio jenis kelamin, serta tingkat kepadatan penduduk antardaerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 menegaskan perlunya kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap karakteristik demografi wilayah. Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, pengarusutamaan gender, serta pemerataan penyediaan layanan dasar menjadi elemen penting guna mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan usaha di suatu daerah (region) tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar Rp 352.436,43 miliar rupiah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 331.644,52 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2025 PDRB Atas Harga Beraku sebesar 381.729,90 miliar rupiah masih berjalan. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025
(Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.461,83	9.371,31	9.898,65	10.355,53	11.388,08
B	Pertambangan dan Penggalian	34.696,08	38.839,30	37.035,07	34.242,44	38.396,66
C	Industri Pengolahan	115.852,49	125.989,68	132.924,88	144.628,95	158.685,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.733,33	3.263,28	3.557,08	3.865,21	4.356,55
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	279,64	306,16	322,41	343,47	388,91
F	Konstruksi	53.159,16	59.057,19	66.985,11	71.355,76	75.858,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	22.474,87	27.343,40	30.165,96	32.602,64	35.965,76
H	Transportasi dan Pergudangan	3.826,60	5.887,71	6.768,92	7.207,25	7.722,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.167,57	4.874,87	6.301,87	6.681,44	6.979,95
J	Informasi dan Komunikasi	7.078,07	7.719,85	9.334,19	9.388,78	9.113,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.191,82	7.906,25	8.823,30	9.644,34	10.228,53
L	Real Estate	3.116,59	3.353,47	3.640,00	3.882,74	4.159,73

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
M,N	Jasa Perusahaan	6,63	8,82	11,12	11,97	14,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.697,96	7.202,78	7.886,50	9.223,37	8.873,93
P	Jasa Pendidikan	3.878,48	4.182,92	4.416,32	4.702,61	5.092,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.571,77	2.646,26	2.578,69	3.124,06	3.273,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	429,97	786,47	994,44	1.175,87	1.231,55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**275.622,85**	**308.739,72**	**331.644,52**	**352.436,43**	**381.729,90**

Sumber BPS Kepulauan Riau, 2025

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kepulauan Riau pada tahun 2025 sebesar Rp 224.504,72 miliar rupiah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 209.939,07 miliar rupiah. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.21
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2020-2025 (miliar rupiah)

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.322,05	5.601,86	5.687,63	5.720,17	5.919,87
B	Pertambangan dan Penggalian	24.748,82	23.015,61	22.406,26	20.650,99	23.956,26
C	Industri Pengolahan	75.925,35	79.348,16	81.302,96	87.616,69	94.202,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.648,93	1.919,01	2.073,12	2.222,43	2.452,86
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	218,68	237,96	248,56	253,49	283,14
F	Konstruksi	33.256,03	34.917,26	38.580,25	40.799,50	42.962,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	13.592,98	15.477,62	16.385,52	17.301,86	18.607,41
H	Transportasi dan Pergudangan	2.514,94	3.479,88	3.999,01	4.099,38	4.393,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.357,95	3.530,11	4.494,33	4.683,68	4.818,29
J	Informasi dan Komunikasi	5.909,45	6.421,12	7.702,88	7.698,40	7.494,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.833,25	5.035,02	5.470,38	5.875,90	6.117,41

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
L	Real Estate	2.247,92	2.352,27	2.475,66	2.614,14	2.763,51
M,N	Jasa Perusahaan	5,74	6,61	7,82	8,21	9,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.028,29	4.163,45	4.376,99	5.158,77	5.083,69
P	Jasa Pendidikan	2.183,17	2.255,62	2.342,98	2.435,31	2.568,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.886,04	1.885,75	1.794,92	2.146,71	2.203,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	272,86	463,78	563,56	653,43	666,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**180.952,44**	**190.163,69**	**199.912,83**	**209.939,07**	**224.504,72**

Sumber BPS Kepulauan Riau, 2025

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada periode Tahun 2021 tercatat sebesar 3,43 persen, dan pada periode tersebut nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,70 persen. Kemudian, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 5,06 persen. Hal tersebut terjadi seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat pascapandemi Covid-19 yang terjadi secara nasional. Relevan dengan nasional, pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama tercatat sebesar 5,31 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau meningkat kembali mencapai angka 5,16 persen, sedangkan nasional berada pada 5,05 persen. Selanjutnya, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen, dan pada tahun 2025 kembali meningkat signifikan hingga mencapai 6,94 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

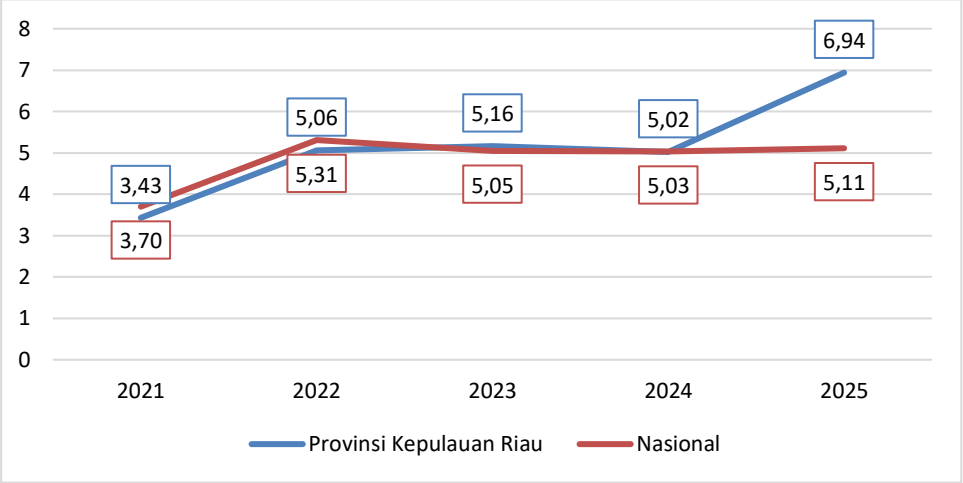

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2025 dan BPS Nasional 2025

Gambar 2.11 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi *(c-to-c)* Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2021-2025 (%)

Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar 6,94 persen berada di atas rata-rata Pulau Sumatera sebesar 4,92 persen dan nasional sebesar 5,11 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Wilayah Sumatera pada tahun yang sama, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

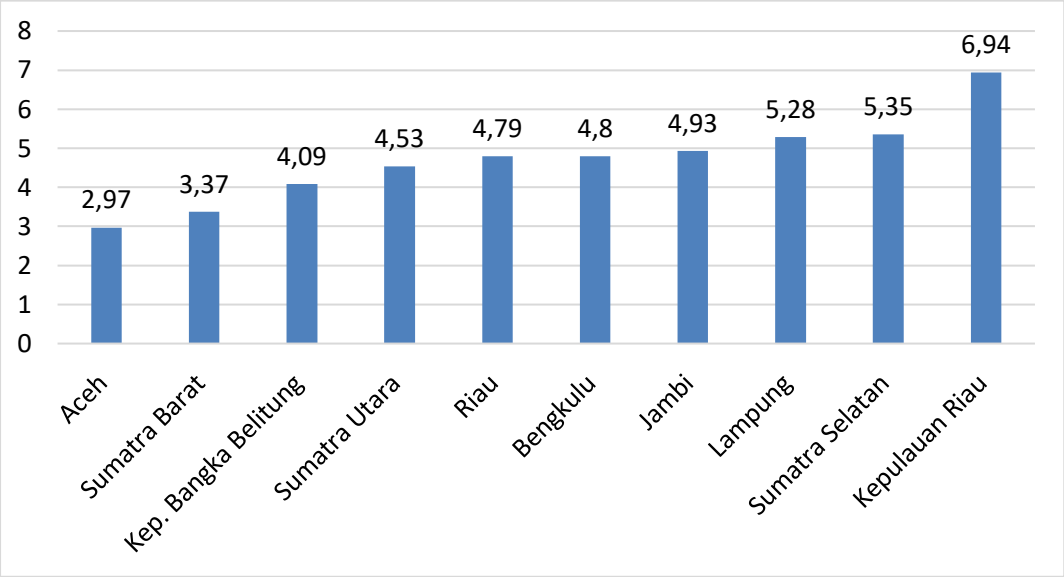

Sumber: BPS dan BPS Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi *(c-to-c)* Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera tahun 2025 (%)

2. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Selama kurun waktu 2021 hingga 2024 laju inflasi tahunan menunjukkan penurunan dari sebesar 2,26 persen pada tahun 2021, menjadi 2,09 persen pada tahun 2024. Tingkat inflasi year on year (yoy) tahun 2024 sebesar 2,09 persen, lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 sebesar 5,83 persen. Dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 2,24 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 1,53 persen. Perkembangan laju inflasi gabungan dua kota dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

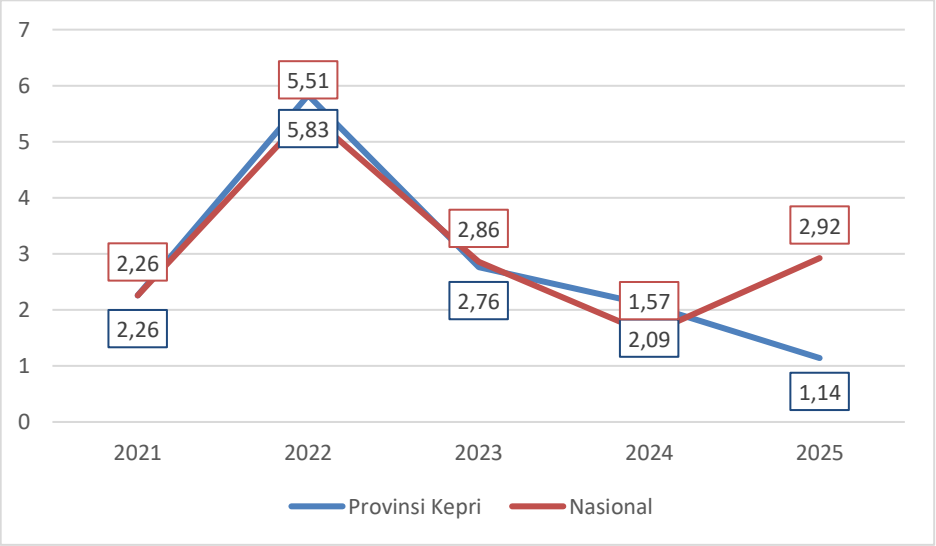

Sumber : BPS, 2025

Gambar 2.13 Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2025

Inflasi yang terjadi di Kepulauan Riau selama tahun 2025 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,19 persen dan kelompok transportasi sebesar 1,51 persen, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100,00), Desember 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2024	IHK Nov 2025	Inflasi mtm Des 2025	Inflasi yoy Des 2025	Adil Inflasi Des 2025	Andil Inflasi yoy
Umum	**107,35**	**109,83**	**0,23**	**3,00**	**0,23**	**3,00**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,31	112,62	-0,33	4,19	-0,10	1,21
Pakaian dan Alas Kaki	106,32	107,42	-0,01	0,89	~0	0,04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	105,23	106,26	0,13	1,01	0,02	0,16
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemelihataan Rutin Rumah Tangga	101,60	101,83	0,17	0,18	0,01	0,01
Kesehatan	104,11	106,04	~0	1,97	~0	0,05
Transportasi	112,86	113,95	1,99	1,51	0,27	0,21
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,97	99,96	0,02	-0,01	~0	~0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,23	102,44	-0,05	0,35	~0	0,01
Pendidikan	102,23	103,63	0,05	1,37	~0	0,09
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,02	105,87	0,04	2,79	~0	0,26
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	114,87	131,88	0,37	14,94	0,03	0,96

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

3. Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau pada Maret 2025 sebesar 6,12 persen lebih rendah dibandingkan dengan nasional sebesar 8,47 persen. Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskian. Capaian ini mengamali penurunan dari tahun sebelumnya sejalan dengan capaian nasional. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami pengurangan yang menandakan bahwa hajat hidup masyrakat mulai meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

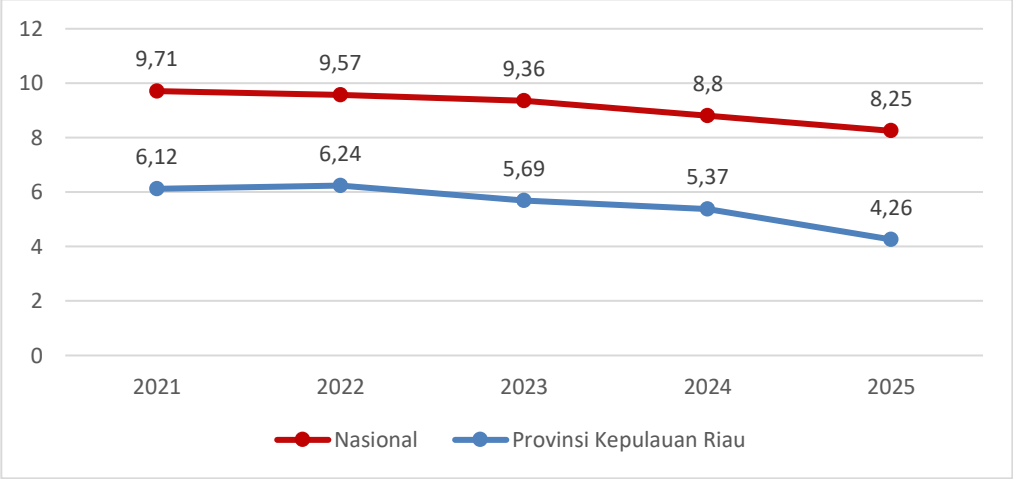

Sumber : BPS Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.14 Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2025 (%)

Jika dibandingkan dengan kemiskinan provinsi lainnya di sekitar wilayah Sumatera, kemiskinan di Kepulauan Riau berada di posisi pertama yang paling rendah diikuti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di posisi ke dua. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

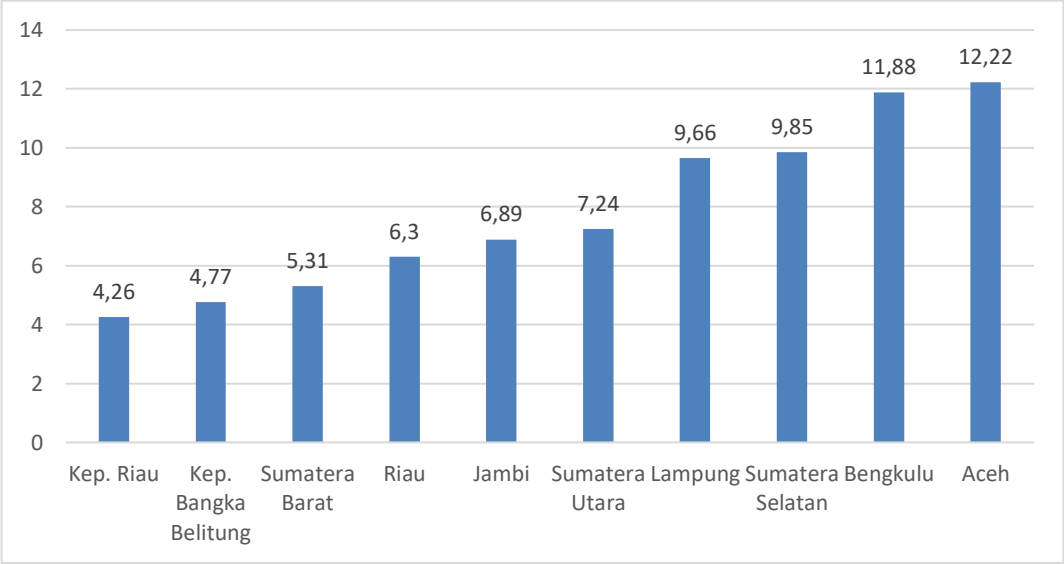

Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.15 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Maret Tahun 2025 (%)

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan "Rendah" bila Indeks Gini kurang

dari 0,3, dikatakan Ketimpangan "Sedang" bila Indeks Gini antara > 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan "Tinggi" bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indeks Gini pada tahun 2025 sebesar 0,385 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,357. Angka ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

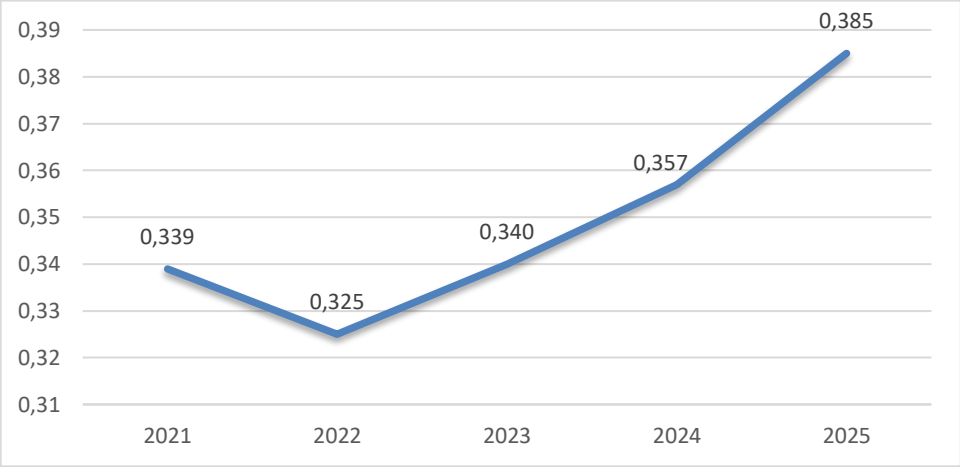

Sumber : BPS, 2025

Gambar 2.16 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2025, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,385 menempati posisi tertinggi. Secara rinci perbandingan Indeks Gini provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar berikut.

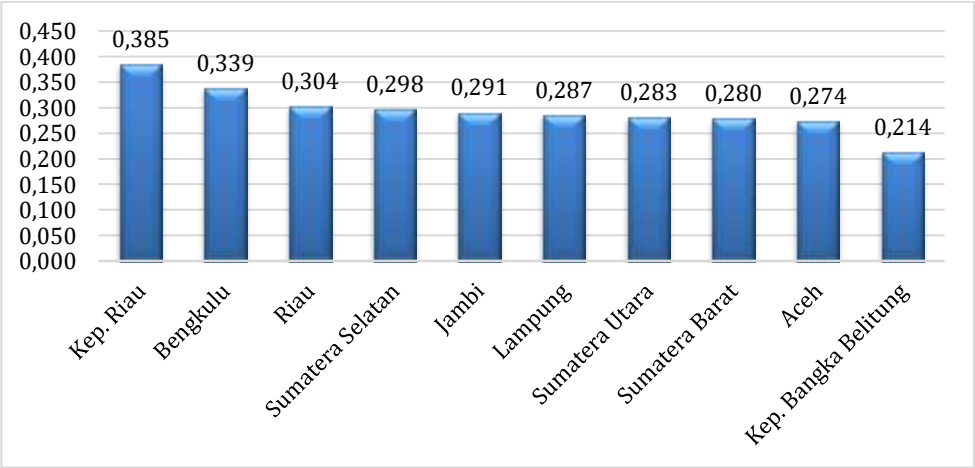

Sumber : BPS, 2025

Gambar 2.17 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2025

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life);* (2) Pengetahuan *(knowledge)*; (3) Standar hidup layak *(decent standard of living)*. Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 sebesar 80,53 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 yakni sebesar 79,08. Kondisi tersebut berada di atas rata-rata Nasional dan sejalan dengan trend IPM Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

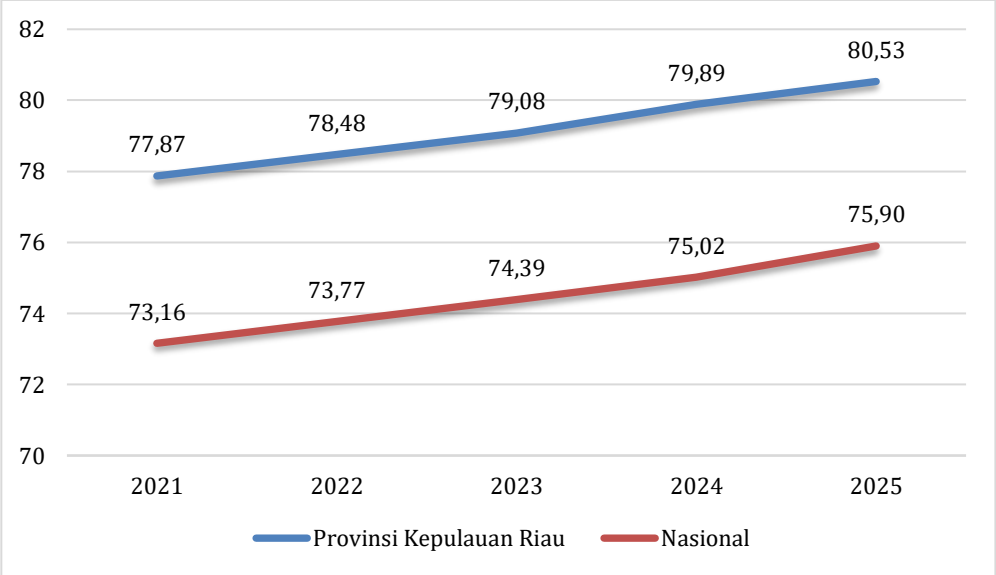

Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten berada di atas rata-rata nasional dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau tercatat sebesar 80,53, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 75,90. Hal ini menggambarkan standar hidup layak di Provinsi Kepulauan Riau sangat baik.

Dalam metode penghitungan IPM yang digunakan saat ini, dimensi kesehatan diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, yang

menggambarkan rata-rata perkiraan lama hidup penduduk dengan asumsi pola mortalitas yang berlaku pada tahun berjalan. Dimensi pendidikan diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Dengan demikian, IPM mencerminkan hasil agregasi dari ketiga dimensi tersebut. Meskipun capaian IPM Kepulauan Riau relatif tinggi, variasi pada masing-masing dimensi menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata. Pada dimensi kesehatan, capaian UHH dipengaruhi oleh akses layanan kesehatan, kualitas gizi, sanitasi, dan kondisi lingkungan. Pada dimensi pendidikan, aksesibilitas wilayah kepulauan, ketersediaan sarana prasarana, serta kualitas tenaga pendidik menjadi faktor penentu. Sementara itu, pada dimensi standar hidup layak, struktur ekonomi daerah, kesempatan kerja produktif, dan stabilitas pendapatan rumah tangga memainkan peran penting. Oleh karena itu, peningkatan IPM ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi memerlukan intervensi lintas sektor yang terintegrasi guna memperkuat layanan kesehatan dasar, memperluas akses pendidikan berkualitas, serta mendorong penciptaan lapangan kerja bernilai tambah agar pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau berlangsung secara lebih merata dan berkelanjutan.

Dibandingkan Provinsi lain di wilayah Sumatera, IPM Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

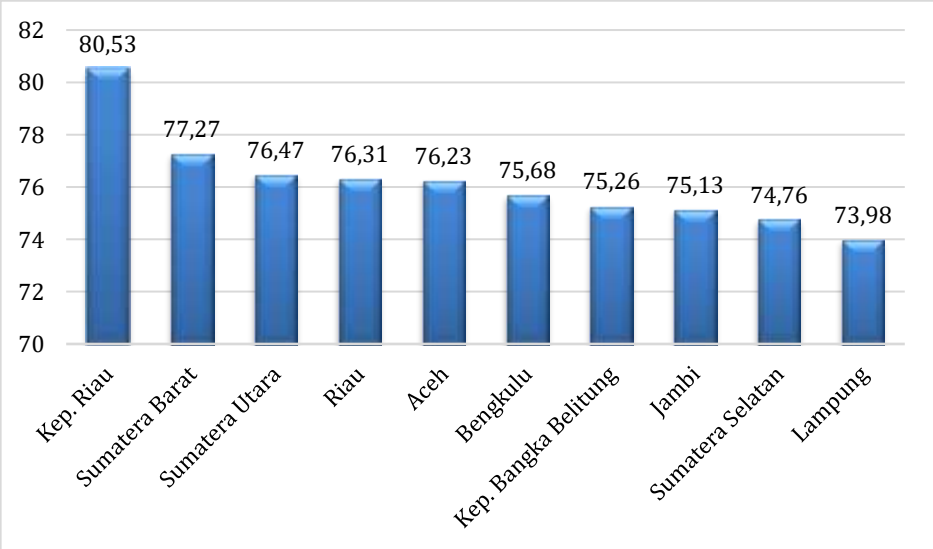

Sumber : BPS, 2025

Gambar 2.19 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2025

Pada tahun 2025, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau cukup bervariasi. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Batam sebesar 83,80, diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 82,02.

Sementara capaian IPM terendah terdapat di Kabupaten Lingga sebesar 73,82. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

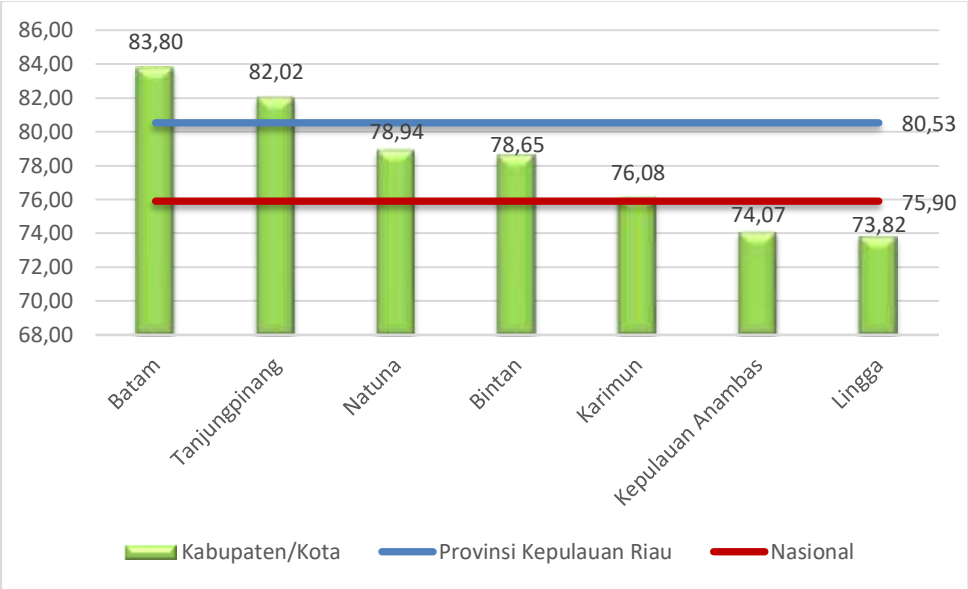

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2025

6. Pengeluaran per kapita

Pengeluaran per kapita Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021-2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita sebesar 14.122 ribu rupiah dan naik menjadi sebesar 15.573 ribu rupiah pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

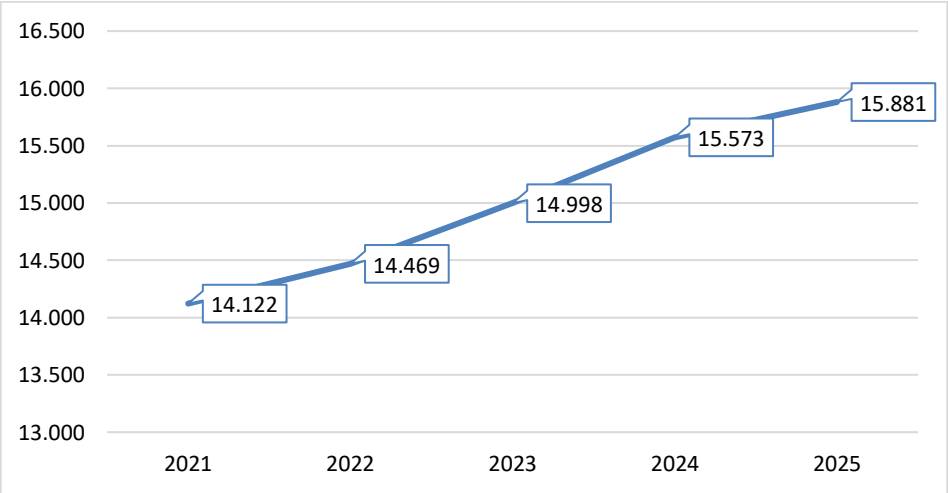

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.21 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2025 (ribu rupiah)

Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2024 tertinggi berada di Kota Batam sebesar 19.944 ribu rupiah dan terendah berada di Kabupaten Lingga sebesar 13.108 ribu rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

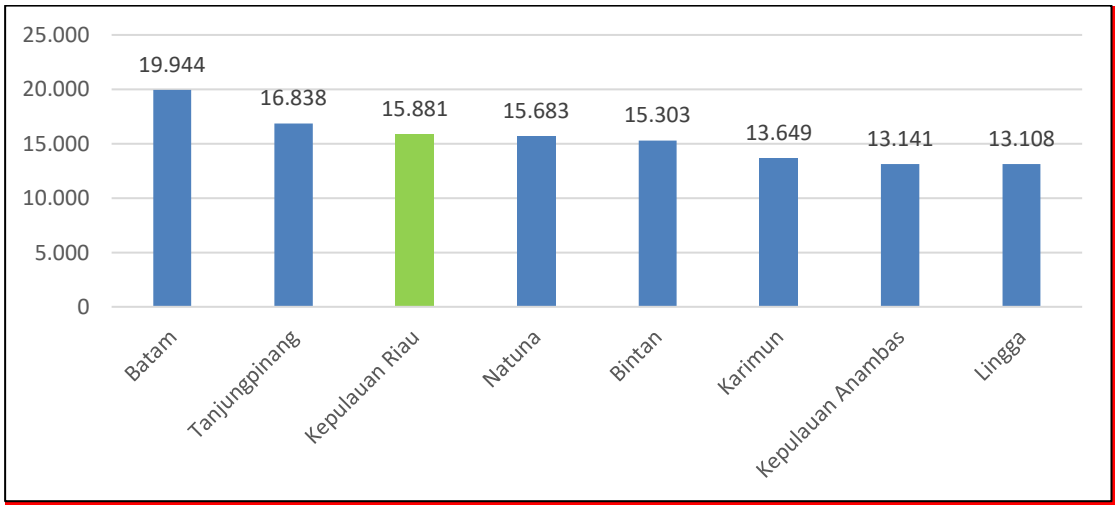

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.22 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (ribu rupiah)

7. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 sebesar 6,36 persen, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 6,39 persen. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional yang tercatat sebesar 4,74 persen.

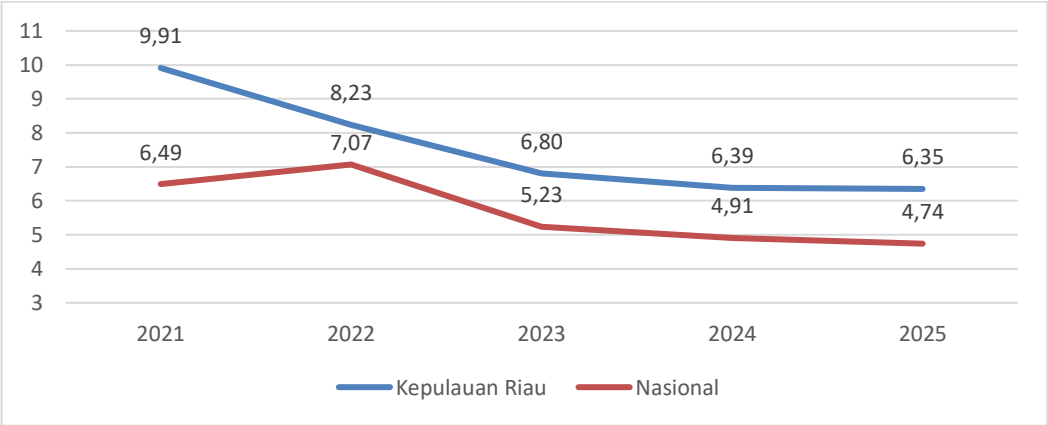

Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.23 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2025 (%)

Berdasarkan perspektif gender menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap pasar kerja antara laki-laki dan perempuan. Dalam kurun waktu tahun 2021-2024 TPT laki-laki tercatat lebih rendah dibandingkan TPT perempuan. Perbedaan ini berkaitan dengan karakteristik struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh sektor-sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja laki-laki lebih besar, seperti industri manufaktur, perkapalan, logistik, minyak dan gas, konstruksi, serta perikanan. Kondisi tersebut mendorong peluang kerja bagi laki-laki menjadi relatif lebih luas, sementara perempuan masih menghadapi keterbatasan untuk masuk ke sektor-sektor tersebut akibat faktor keterampilan teknis, norma sosial, serta belum optimalnya dukungan fasilitas kerja yang ramah perempuan.

Di sisi lain, perempuan yang berusaha masuk pasar kerja formal sering terkendala oleh beberapa faktor struktural seperti keterbatasan pelatihan yang relevan, rendahnya akses transportasi di wilayah kepulauan, serta beban kerja domestik yang secara sosial lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Hambatan-hambatan ini menyebabkan perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal dengan pendapatan lebih rendah dan perlindungan kerja minim. Sementara itu, laki-laki relatif lebih mudah berpindah antar sektor atau antar daerah untuk mencari pekerjaan, sehingga angka TPT laki-laki tetap lebih rendah.

Ketimpangan gender dalam pengangguran ini juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya program vokasi yang responsif gender dan belum optimalnya link and match antara kebutuhan industri Kepri khususnya industri manufaktur dan maritim dengan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja perempuan. Tingginya angka mismatch juga tercermin dari besarnya tenaga kerja perempuan yang tidak terserap akibat tuntutan keterampilan teknis industri yang tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan mayoritas perempuan. Akibatnya, perempuan menjadi lebih rentan terhadap pengangguran jangka panjang dan stagnasi ekonomi rumah tangga.

Dalam konteks pembangunan, TPT yang lebih tinggi pada perempuan menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi Kepri belum dirasakan secara setara. Ketidaksetaraan ini semakin tinggi pada perempuan di wilayah kepulauan seperti Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas, daerah yang memiliki keterbatasan akses lapangan kerja dan fasilitas pelatihan. Kondisi ini memperkuat urgensi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam sektor ketenagakerjaan, termasuk penyediaan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, penegakan perlindungan kerja yang inklusif, serta penyediaan dukungan layanan publik seperti childcare yang dapat membantu perempuan memasuki pasar kerja secara lebih adil dan setara.

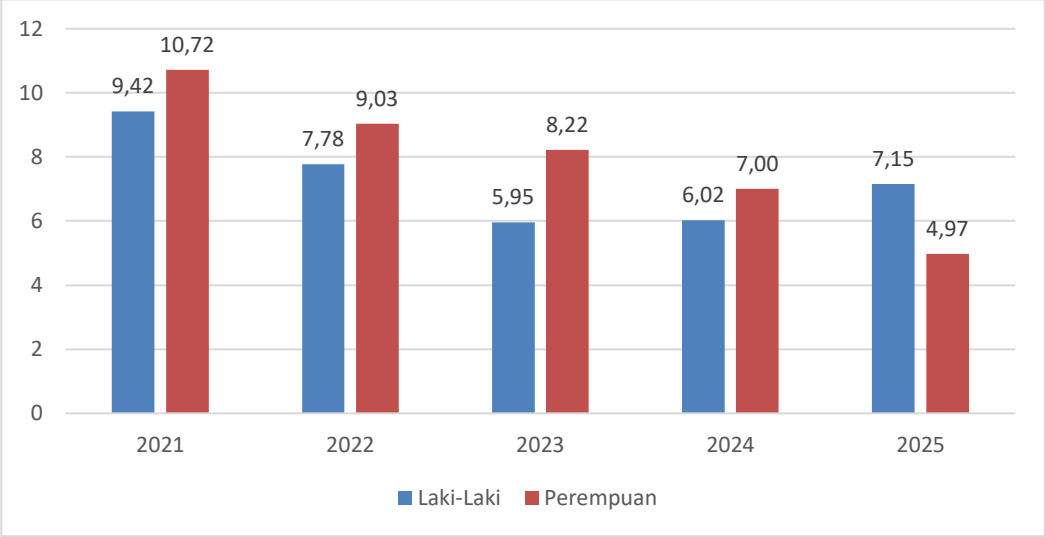

Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2025 (%)

Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, dapat diketahui bahwa pengangguran tertinggi terdapat di Batam sebesar 7,57 persen. Kemudian pengangguran terendah terdapat di Kepulauan Anambas sebesar 2,56. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

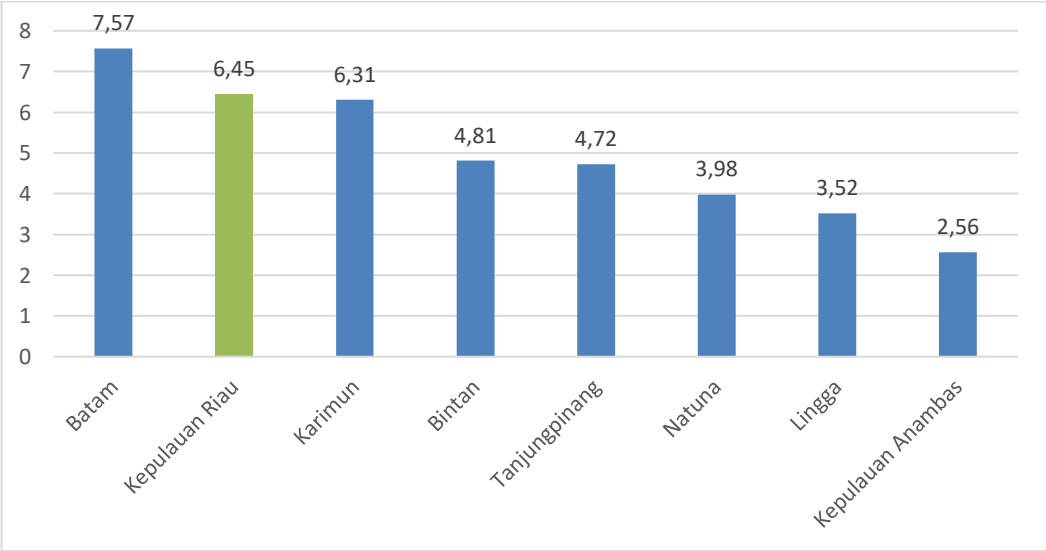

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (%)

Dibandingkan provinsi lain di wilayah Sumatera, Tingkat Pengangguran Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 6,35 persen.

Kemudian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) terendah terdapat di Provinsi Bengkulu, yakni sebesar 3,41 persen, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

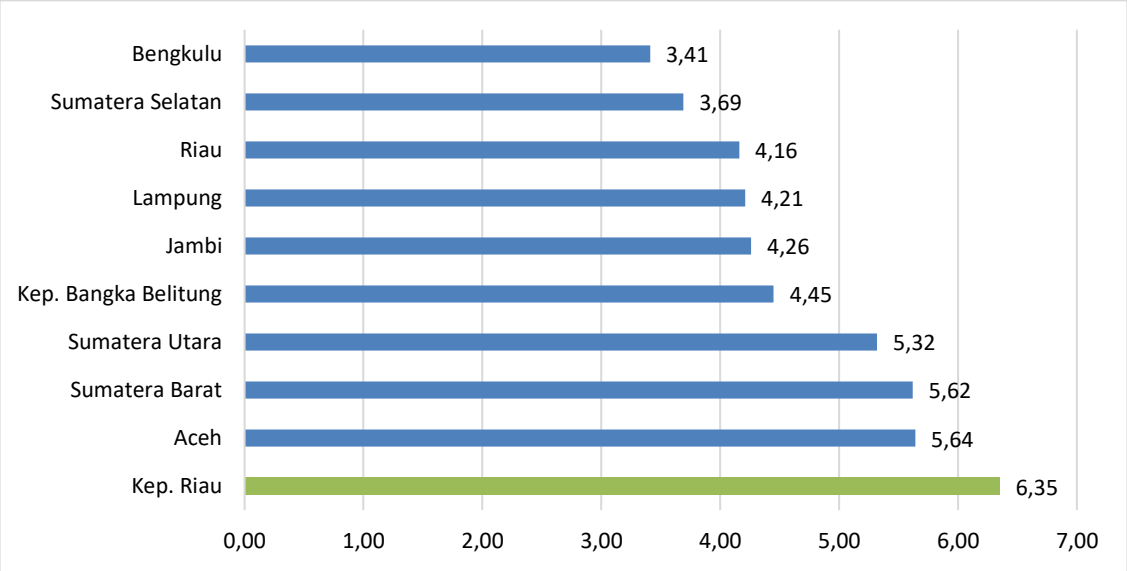

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.26 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2025 (%)

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi energi terbarukan, kehutanan dan penggunaan lahan, pertanian berkelanjutan, proses industri dan penggunaan produk, transportasi, pariwisata, pengelolaan limbah dan daur ulang, serta sektor pesisir dan kelautan. Kebutuhan terhadap tenaga kerja hijau akan meningkat seiring pengembangan beberapa sektor tersebut. Kondisi ini tidak hanya didorong oleh pengembangan wilayah yang mengarah pada pengembangan ekonomi hijau, ekonomi sircular, dan ekonomi ramah lingkungan, dukungan kebijakan dan regulasi nasional, serta perubahan teknologi, dinamika industri global, serta meningkatnya kesadaran pasar terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Kesiapan sistem pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai kendala mendasar. Kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan lulusan pendidikan masih lebar; infrastruktur pelatihan belum merata; sertifikasi untuk keterampilan hijau masih terbatas; dan tenaga kerja berbasis komunitas sering kali belum mendapat pengakuan formal. Tanpa strategi sektoral yang tepat, transformasi ini berisiko meningkatkan ketimpangan dan meninggalkan kelompok rentan. Untuk itu, pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau tidak dapat dilakukan secara generik. Diperlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan

dinamika masing-masing sektor. Setiap sektor memiliki jenis pekerjaan, keterampilan kunci, serta kesiapan infrastruktur pelatihan yang berbeda, sehingga intervensi kebijakan juga harus berbasis sektoral dan kontekstual.

8. Indeks Wiliamson

Indeks Williamson berkisar antara 0<IW<1, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang, sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah. Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari sebesar 0,451 pada tahun 2018 menjadi 0,38 pada tahun 2023. Berdasarkan ketentuan ketimpangan Williamson, pada tahun 2018-2023 di Provinsi Kepulauan Riau ketimpangan distribusi pendapatannya rendah atau distribusi pendapatan antar wilayah merata yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antar daerah yang merata. Ada peningkatan pemerataan pendapatan antar wilayah atau penurunan ketimpangan distribusi pendapatannya sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Selengkapnya perkembangan Williamson dapat dilihat pada gambar berikut ini.

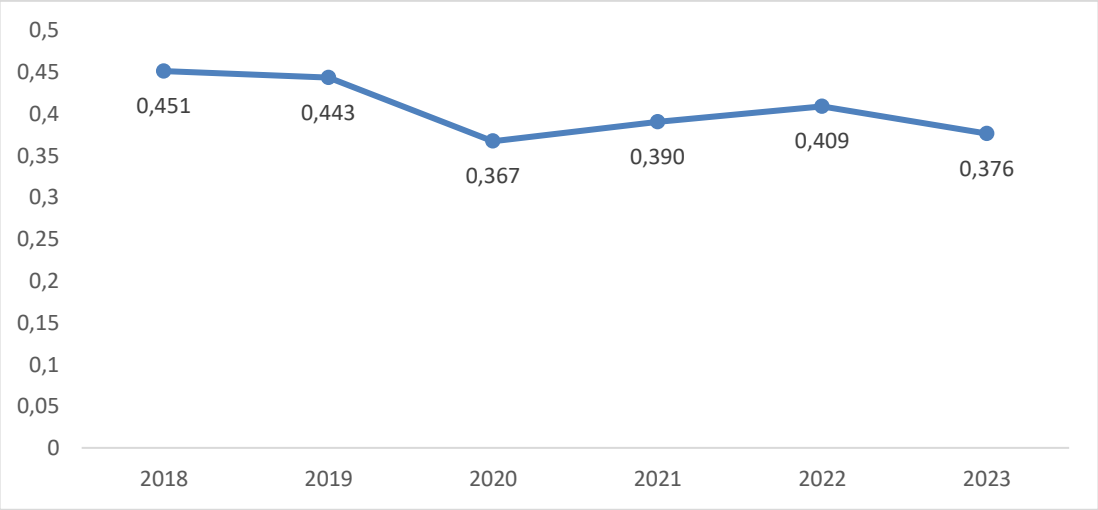

Gambar 2.27 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2023

9. Capaian Pelayanan Publik

Capaian pelayanan publik dilihat dari Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Hasil evaluasi IPP di Pemerintah Daerah sejauh ini masih berfokus pada pelayanan PTSP, RSUD, SAMSAT dan Dukcapil. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau memiliki realisasi kinerja A- pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik.

10. Capaian Pengelolaan Keuangan

Capaian pengelolaan keuangan dilihat dari Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures);* kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Pertama Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified*

opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Ketiga Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Keempat, Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan Opini WTP yang diraih Pemprov Kepri dalam 13 tahun berturut-turut.

11. Capaian Transparansi dan Akuntabilitas

Capaian transparansi terlihat dari pencapaian Indeks SPBE. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pencapaian Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mencapai 2,68 (Kategori Baik).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditunjukkan dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100,00. Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 mencapai angka BB.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjadi fondasi utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pelayanan pendidikan yang berkualitas berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat provinsi, sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi, penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat, serta pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Kabupaten/Kota.

Kinerja penyelenggaraan pendidikan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik pada aspek akses dan partisipasi pendidikan menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK mencapai 91,61 persen dengan tingkat capaian target sebesar 100 persen, sementara APK SLB tercatat 100 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK berada pada level 76,12 persen, melebihi target tahunan yang ditetapkan. Angka putus sekolah SMA/SMK/SLB berhasil ditekan hingga 0,035 persen, jauh di bawah target, yang menunjukkan efektivitas intervensi dalam menjaga keberlanjutan pendidikan peserta didik. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Dari sisi kualitas sarana dan prasarana, rasio peserta didik per kelas berada pada angka 31, lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan, sehingga mendukung proses pembelajaran yang lebih kondusif. Persentase konten pendidikan mencapai 20 persen sesuai target tahunan, sementara persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal tercapai 6,94 persen. Pada aspek capaian pembelajaran, rata-rata kemampuan literasi siswa mencapai 63,6 persen dan kemampuan numerasi siswa sebesar 56,38 persen, keduanya hampir memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas pembelajaran, meskipun penguatan kompetensi numerasi dan literasi masih memerlukan perhatian berkelanjutan.

Ketersediaan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan menengah ditunjukkan melalui rasio guru SMA/SMK terhadap murid sebesar 603,49. Nilai tersebut telah melampaui target tahunan, namun masih mencerminkan tantangan dalam pemerataan dan proporsionalitas distribusi guru antar satuan pendidikan. Kondisi ini berimplikasi pada beban mengajar dan efektivitas pembelajaran, khususnya pada wilayah dengan jumlah peserta didik yang besar atau

karakteristik geografis tertentu. Upaya peningkatan kualitas dan distribusi tenaga pendidik tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga mutu layanan pendidikan menengah.

Kinerja indikator penunjang menunjukkan capaian yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 86,80 persen dengan tingkat capaian target 100 persen, sementara nilai SAKIP perangkat daerah tetap berada pada predikat "BB". Persentase SMA/SMK/SLB swasta yang memperoleh izin mencapai 100 persen, mencerminkan tertibnya proses perizinan serta dukungan terhadap peran satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Indeks profesionalisme sumber daya manusia perangkat daerah juga tercatat stabil, mendukung pelaksanaan urusan pendidikan secara administratif dan manajerial.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	Realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	URUSAN PENDIDIKAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	80,48	-	80,46	84,57	100,00	ST	100,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	90	85	86	86,8	100,00	ST	96,44
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (persen)	persen	100,00	87,94	100	91,61	91,61	ST	91,61
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (persen)	persen	100,00	85,56	100	126,28	100,00	ST	100,00
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (persen)	persen	90,94	108,45	88,44	76,12	86,07	ST	83,70
7	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB (persen)	persen	0,008	117,98	0,013	0,035	69,23	ST	100,00
8	Rasio peserta didik per kelas (Rasio)	persen	36	0,01	36	31	100,00	ST	86,11

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	Realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
9	Persentase Konten Pendidikan (persen)	persen	45	95,66	20	20	100,00	ST	44,44
10	Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa (Nilai)	persen	66,38	108,48	65,23	63,6	97,50	ST	100,00
11	Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa (Nilai)	persen	65,99	33,81	60,84	56,38	92,67	ST	93,77
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								
12	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (persen)	persen	24,31	69,06	6,94	6,94	100,00	ST	28,55
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
13	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Rasio)	Ratio	628,9	627,38	627,99	603,49	100,00	T	95,96
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								
14	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan, 2026

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pendidikan, mayoritas indikator berada pada kategori sangat tinggi, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 berjalan efektif. Capaian positif didorong oleh meningkatnya akses pendidikan, rendahnya angka putus sekolah, terpenuhinya perizinan satuan pendidikan, serta capaian literasi dan numerasi yang sesuai target. Tantangan utama masih terdapat pada aspek pemerataan dan proporsionalitas tenaga pendidik serta penguatan kualitas pembelajaran, khususnya numerasi dan pengembangan kurikulum muatan lokal. Kondisi ini menjadi dasar penajaman kebijakan pendidikan pada RKPD Tahun 2027 agar peningkatan akses diikuti secara seimbang oleh peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan.

2. Kesehatan

Aspek kesehatan menggambarkan kondisi derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui berbagai indikator kesehatan utama, meliputi kesehatan ibu dan anak, status gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta ketersediaan dan mutu pelayanan kesehatan. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas, angka harapan hidup, dan kesejahteraan sosial. Sehingga, capaian pembangunan kesehatan dianalisis berdasarkan indikator-indikator hasil dan layanan kesehatan yang mencerminkan efektivitas upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang telah dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kinerja perangkat daerah kesehatan menunjukkan capaian yang relatif bervariasi. Nilai SAKIP perangkat daerah masih berada pada predikat "A", sementara indeks profesionalisme sumber daya manusia perangkat daerah mencapai 85,24 persen, telah melampaui targat yang ditetapkan. Indeks kepuasan masyarakat pada perangkat daerah kesehatan tercatat sebesar 91,41.

Pada aspek kesehatan ibu dan bayi, cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan mencapai 79,23 persen, namun indikator Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat sebesar 10,21 per 1.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dari target RPJMD. Prevalensi wasting pada balita berada pada angka 6,30 persen, menunjukkan masih adanya permasalahan gizi pada anak usia dini. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain keterbatasan akses pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, ketahanan pangan rumah tangga yang belum merata, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang tersebar pada pulau-pulau kecil turut mempengaruhi keterjangkauan layanan kesehatan maternal dan gizi balita.

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menunjukkan capaian yang beragam. Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis mencapai 49,4 persen, sementara jumlah infeksi baru HIV tercatat sebesar 0,45 per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. Eliminasi malaria telah dicapai pada 7 Kabupaten/Kota, melampaui target tahunan dan telah mencapai target RPJMD. Di sisi lain, cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 75 persen. Capaian tersebut mencerminkan bahwa program pengendalian penyakit menular belum berjalan dengan baik, sehingga masih membutuhkan penguatan, kepatuhan pengobatan, dan perluasan jangkauan layanan kesehatan masyarakat.

Kualitas fasilitas pelayanan kesehatan ditunjukkan oleh persentase puskesmas terakreditasi sebesar 99,00 persen serta rasio daya tampung rumah sakit rujukan sebesar 1,83 per 1.000 penduduk. Status RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama tetap terjaga, sementara RSJKO Engku Haji Daud berada pada status Satelit. Pada aspek sumber daya manusia kesehatan, rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi tercatat sebesar 4,22,

Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun sebesar 90%, dan Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun sebesar 97%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	URUSAN KESEHATAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	A	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	90	75	80	85,24	100,00	ST	94,71
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,2	91,23	91,40	91,41	100,00	ST	99,14
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
4	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	persen	95	92	92,50	87,24	94,31	ST	83,40
5	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 100,000 Kelahiran Hidup)	Angka	6,5	7,4	11	10,21	92,85	ST	100,00
6	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	5,1	6,3	6,1	6,3	100,00	ST	100,00
7	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan								
8	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
9	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(persen)	65	53,79	55	49,4	89,88	T	73,19
10	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	Per 100,000	0,32	0,34	0,33	0,45	100,00	ST	100,00
11	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	Kabupaten/Kota	7	6	6	7	100,00	ST	100,00
12	Hipertensi dalam pengendalian	persen	25	11,8	12	15	100,00	ST	59,21
13	Cakupan imunisasi bayi lengkap	persen	95	89,26	90	75	83,62	T	78,94
14	Persentase Puskesmas terakreditasi	persen	99,5	96	97	99	100,00	ST	99,46
15	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 100,000	1,99	1,98	1,98	1,83	98,01	ST	97,52
16	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(persen)	98	95	98	98,20	100,00	ST	100,00
17	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kabupaten/Kota	3	0	0	0	0,00	SR	0,00
18	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	Peringkat	Utama	Utama	Utama	Utama	100,00	ST	100,00
19	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	Peringkat	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	100,00	ST	100,00
20	Persentase Instalasi farmasi	persen	90	88,84	88,9	89,7	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	sesuai standar (skor minimal 80)								
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
21	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	Rasio	4,3	4,27	4,28	4,22	98,60	ST	98,14
22	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	persen	93	80	80	90	100,00	ST	96,8
23	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	persen	80	50	55	97	100,00	ST	100,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
24	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	persen	94	88	89	81	91,01	ST	86,17
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
25	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10 persen	persen	57,14	0	14,29	43	100,00	ST	75,00

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kesehatan, indikator pembangunan kesehatan menunjukkan capaian yang bervariasi antara aspek layanan rujukan, pengendalian penyakit, dan kesehatan masyarakat. Capaian positif terlihat pada status rumah sakit rujukan, cakupan eliminasi malaria, cakupan imunisasi, serta tingkat kepuasan masyarakat pada layanan rumah sakit.

Tantangan utama masih terdapat pada indikator kesehatan ibu dan bayi, prevalensi masalah gizi, cakupan pengobatan penyakit menular, serta profesionalisme aparatur kesehatan. Kondisi ini menjadi dasar perlunya penajaman kebijakan kesehatan pada RKPD Tahun 2027 melalui penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan akses layanan di wilayah kepulauan, penguatan intervensi gizi masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan guna mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Aspek kesehatan mencerminkan kondisi derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui indikator kesehatan utama, meliputi kesehatan ibu dan anak, status gizi, pengendalian penyakit, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan. Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan telah mencapai 79,23 persen, namun Angka Kematian Bayi masih berada pada angka 10,21 per 1.000 kelahiran hidup dan prevalensi wasting balita tercatat 6,30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan kesehatan maternal, neonatal, dan gizi masih perlu diperkuat, terutama pada wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses pelayanan dan distribusi pangan.

Pada aspek pencegahan dan pelayanan kesehatan, eliminasi malaria telah tercapai di 7 Kabupaten/Kota, sementara cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 65 persen. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan relatif baik dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 98,20 persen serta dukungan fasilitas kesehatan yang sebagian besar telah terakreditasi. Meskipun demikian, pemerataan tenaga kesehatan dan penguatan layanan kesehatan primer masih menjadi tantangan utama, khususnya di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil. Kondisi ini menjadi dasar perlunya penajaman arah kebijakan kesehatan pada RKPD Tahun 2027 untuk meningkatkan mutu dan pemerataan layanan kesehatan secara berkelanjutan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kualitas lingkungan hidup. Penyediaan infrastruktur dasar seperti pengendalian banjir, jalan, air minum, sanitasi, bangunan gedung, dan penataan ruang menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi, khususnya pada wilayah kepulauan. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah provinsi mencakup sub-urusan sumber daya air, jalan, air minum, air limbah, bangunan gedung, jasa konstruksi, serta penataan ruang lintas Kabupaten/Kota.

kinerja perangkat daerah menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Nilai SAKIP perangkat daerah berada pada predikat “BB”, sementara indeks

profesionalisme sumber daya manusia perangkat daerah mencapai 85,36 dan indeks kepuasan masyarakat sebesar 88,94. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aspek manajerial dan pelayanan publik pada urusan PUPR dan pertanahan telah berjalan cukup baik, sehingga menjadi landasan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

Pada sub-urusan sumber daya air, rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir mencapai 0,492 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang ada masih berada pada angka 10,26 persen, dan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk tercatat sebesar 60,76 persen. Pada aspek air minum dan sanitasi, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan mencapai 34,33 persen, sementara rumah tangga dengan akses sanitasi aman masih sangat terbatas hanya 8,82 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan infrastruktur dasar, khususnya air dan sanitasi, masih memerlukan penguatan secara bertahap.

Kinerja sub-urusan jalan menunjukkan capaian yang relatif baik, dengan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mencapai 81,11 persen, mendekati target RPJMD. Pada aspek bangunan gedung dan lingkungan strategis, persentase penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah mencapai 27,27 persen, sementara penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis lintas Kabupaten/Kota juga tercapai sesuai target tahunan. Capaian ini mencerminkan fokus pembangunan pada kawasan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi daerah.

Pada aspek jasa konstruksi, rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat mencapai 9,78 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya namun masih relatif rendah dibandingkan target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia konstruksi yang berpengaruh terhadap kualitas dan efisiensi pelaksanaan proyek infrastruktur. Dari sisi penataan ruang, proses revisi RTRW provinsi telah mencapai 68,63 persen, mencerminkan upaya penyesuaian kebijakan tata ruang terhadap dinamika pembangunan, meskipun implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan masih memerlukan penguatan.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	Realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	persen Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	BB
2	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	88,64	84,53	84,53	85,36	100,00	ST	96,30
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	88,90	88,78	88,80	88,94	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
4	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	persen	0,203	0,098	0,103	0,492	100,00	SR	100,00
5	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	persen	36,21	10,26	10,26	10,26	100,00	ST	28,33
6	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	persen	90,37	60,76	76,84	60,76	79,07	T	67,23
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
7	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	57,60	33,51	50,35	34,33	68,18	S	59,60
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	Realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	persen Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	50	0	7,76	8,82	100,00	ST	17,60
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
9	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	persen	11	100,00	29,63	29,63	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								
10	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	persen	18,18	100,00	27,27	27,27	100,00	ST	100,00
11	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
12	Persentase Jalan Kondisi Mantap (Dengan Satuan: persen)	persen	81,26	80,87	81,10	81,11	100,00	ST	99,82
13	Persentase Jalan Kondisi Mantap (Dengan Satuan: persen)	persen	7,16	0	6,17	26,7	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
14	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli. (Dengan Satuan: persen)	persen	8	6,4	8	9,78	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
15	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (Dengan Satuan: persen)	persen	80	66,63	70	68,63	98,04	ST	85,79

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2026

Berdasarkan tabel kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian sejumlah indikator strategis masih menunjukkan tantangan pada beberapa aspek pelayanan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut tercermin dari rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang baru mencapai 0,492 persen, serta persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat yang berada pada angka 9,78 persen. Pada sisi sumber daya air, persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada tercatat sebesar 10,26 persen, sementara ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk berada pada angka 60,76 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih menghadapi kendala struktural dan teknis, khususnya pada sub-urusan sumber daya air dan jasa konstruksi.

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air, capaian kinerja yang belum optimal dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur air baku serta rendahnya kapasitas rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang ada. Karakteristik Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan menyebabkan pasokan air baku sangat bergantung pada curah hujan dan distribusi antarwilayah yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya layanan air irigasi bagi pertanian rakyat dan belum optimalnya perlindungan kawasan permukiman terhadap risiko banjir.

Pada Program Penyelenggaraan Jalan, kinerja penyelenggaraan infrastruktur jalan menunjukkan capaian yang relatif baik, dengan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mencapai 81,11 persen dan mendekati target RPJMD. Selain itu, terdapat indikator jalan dengan capaian sebesar 26,7 persen pada tahun berjalan. Meskipun demikian, kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan masih diperlukan, terutama pada ruas-ruas strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, aktivitas logistik, serta pengembangan kawasan industri dan pelabuhan. Sebaran wilayah kepulauan dan tingginya biaya konstruksi menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pemeliharaan jalan provinsi.

Pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi dan Program Penataan Ruang, persentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebesar 9,78 persen mencerminkan masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia konstruksi di daerah yang berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur. Dari sisi penataan ruang, proses revisi RTRW provinsi telah mencapai 68,63 persen, menunjukkan adanya kemajuan, namun pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota masih memerlukan penguatan agar selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memerlukan penguatan

infrastruktur dasar pada wilayah kepulauan, peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan dan pemeliharaan, percepatan pengembangan sumber daya manusia konstruksi melalui sertifikasi, serta konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang. Penajaman prioritas investasi infrastruktur dan peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Penyediaan hunian yang layak, aman, dan didukung prasarana dasar yang memadai berperan strategis dalam menjaga harkat dan martabat manusia serta mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi, sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup sub-urusan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta aspek pendukung kelembagaan dan sumber daya manusia.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik pada aspek tata kelola dan pelayanan dasar. Hal ini tercermin dari capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang telah mencapai predikat A serta Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah sebesar 86,38, melampaui target tahun berjalan sebesar 77,39. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat tercatat sebesar 84,98 dan telah mencapai target kinerja, menunjukkan bahwa pelayanan urusan perumahan dan permukiman telah dirasakan secara positif oleh masyarakat.

Pada Program Pengembangan Perumahan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal, khususnya pada penanganan masyarakat terdampak kebijakan dan bencana. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi dan memperoleh fasilitasi rumah layak huni telah mencapai 100 persen. Demikian pula, persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni juga telah terealisasi sebesar 100,00 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas intervensi pemerintah provinsi dalam penyediaan hunian layak pada kondisi darurat dan situasi khusus.

Pada Program Kawasan Permukiman, penanganan kawasan kumuh menunjukkan capaian yang telah memenuhi target tahunan, dengan luas kawasan kumuh yang ditangani sebesar 1,83 hektare. Meskipun capaian tersebut telah mencapai target tahun berjalan, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

seluas 359,68 hektare, kontribusinya masih relatif kecil, yakni sekitar 0,509 persen dari target akhir. Di sisi lain, indikator jumlah rumah layak huni yang dibangun hingga Tahun 2025 telah mencapai 99 unit dari target akhir RPJMD sebanyak 150 unit, atau sekitar 66 persen. Kondisi ini menandakan bahwa percepatan pembangunan rumah layak huni masih menjadi tantangan utama dalam urusan ini.

Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase satuan perumahan yang telah dilengkapi PSU mencapai 54,4 persen, melampaui target tahun berjalan sebesar 53,00 persen dengan tingkat capaian sebesar 100 persen, serta tingkat capaian RPJMD sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dasar telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	Reaisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)**	Predikat	A	A	A	A	100,00	ST	A
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	87,39	0	77,39	86,38	100,00	ST	98,8
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	85,25	83,72	84,98	84,98	100,00	ST	99,7
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
2	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	Reaisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni. (Dengan Satuan: persen)								
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni. (Dengan Satuan: persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
4	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun. (Dengan Satuan:Unit Rumah)	Unit Rumah	150	21	99	99	100,00	ST	66
5	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 â€“ 15 Ha yang ditangani (persen)	Ha	359,68	0	1,83	1,83	100,00	ST	0,509
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
6	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (persen)	Jumlah Lokasi	54,25	52,66	53,00	54,40	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2026

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau hingga Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang kuat pada aspek tata kelola, pelayanan masyarakat terdampak relokasi dan bencana, serta penyediaan prasarana dasar permukiman. Namun demikian, tantangan masih terdapat pada percepatan pembangunan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh secara lebih luas untuk mengejar target akhir RPJMD. Oleh karena itu, pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 diperlukan penajaman prioritas kebijakan pada pembangunan rumah layak huni, peningkatan investasi kawasan permukiman, serta penguatan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintah daerah agar capaian pembangunan perumahan dan permukiman dapat lebih merata dan berkelanjutan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut meliputi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi, penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penanggulangan bencana provinsi, serta penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk menjamin stabilitas sosial, rasa aman, dan perlindungan masyarakat sebagai prasyarat utama keberlanjutan pembangunan daerah.

Pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan mencapai 100 persen, persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan juga telah mencapai 100 persen, serta peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Satlinmas menunjukkan capaian target tahunan. Namun demikian, indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal belum memiliki data realisasi (N/A), sehingga belum dapat digunakan secara optimal sebagai dasar evaluasi rasa aman masyarakat secara kuantitatif.

Pada aspek penanggulangan bencana, capaian indikator masih menunjukkan tantangan. Indeks Pencegahan Bencana tercatat sebesar 2,70, Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana sebesar 0,27, serta Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sebesar 0,43. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan pascabencana masih memerlukan penguatan, terutama dalam konteks karakteristik Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dengan tingkat kerawanan bencana yang beragam dan tantangan mobilisasi sumber daya antarwilayah.

Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, indikator cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran telah mencapai 100,00 persen dari target tahunan, meskipun realisasi persentasenya masih relatif rendah secara absolut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi telah menjangkau sasaran program, namun masih perlu diperluas secara lebih masif agar berdampak signifikan terhadap peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 menunjukkan kekuatan pada aspek penanganan gangguan ketertiban umum, penegakan regulasi, serta tata kelola perangkat daerah. Sementara itu, aspek

penanggulangan bencana, kesiapsiagaan darurat, dan penguatan rasa aman masyarakat masih menghadapi kendala struktural, terutama terkait keterbatasan sarana prasarana, kapasitas sumber daya manusia, serta tantangan geografis wilayah kepulauan. Oleh karena itu, pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 diperlukan penguatan kebijakan pada peningkatan kapasitas mitigasi bencana, modernisasi sarana penanggulangan kebakaran, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kualitas data dan indikator rasa aman masyarakat guna mendukung perlindungan masyarakat yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	BB
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	92	86	87	83	95,40	ST	90,22
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Imdeks	91,5	84,75	87,75	87,64	99,87	ST	95,78
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
4	Indeks Pencegahan Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	3	2,69	2,7	2,99	100,00	ST	99,67
5	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	0,35	0,27	0,28	0,27	96,43	ST	77,14
6	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	0,45	0,53	0,54	0,47	87,04	T	100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	BB

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,52	84,06	84,43	84,68	100,00	ST	97,87
9	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	85,26	78,16	77,61	78,58	100,00	ST	92,17
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
10	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
11	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya (persen)	persen	4,87	1,62	2,17	2,17	100,00	ST	44,56
12	Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya (persen)	persen	100,00	57,73	64,55	64,55	100,00	ST	64,55
13	Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan (persen)	persen	100,00	50	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
14	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((persen))	persen	77,84	N/A	73,49	73,49^)	100,00	ST	94,41
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGU LANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
15	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	persen	85,71		14,29	14,29	100,00	ST	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2026

6. Sosial

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut meliputi penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi, pemulangan warga negara migran korban tindak

kekerasan dari titik debarkasi provinsi, rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di dalam panti, penerbitan izin pengangkatan anak lintas daerah, pengelolaan data fakir miskin tingkat provinsi, penyediaan kebutuhan dasar serta pemulihan trauma korban bencana provinsi, hingga pemeliharaan taman makam pahlawan nasional. Pelaksanaan kewenangan ini diarahkan untuk menjamin perlindungan sosial, penguatan kesejahteraan kelompok rentan, serta keberlanjutan nilai-nilai sosial dan kepahlawanan.

Dari sisi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kinerja tata kelola urusan sosial menunjukkan hasil yang sangat baik dan menjadi fondasi utama pencapaian program teknis. Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang konsisten berada pada predikat BB, Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah sebesar 83,82, serta Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat menjadi 88,04 menunjukkan bahwa kualitas perencanaan, pengelolaan organisasi, serta pelayanan administratif pada urusan sosial telah berjalan efektif. Capaian ini berperan penting dalam mendukung kelancaran implementasi program-program sosial yang bersifat langsung kepada masyarakat.

Pada Program Pemberdayaan Sosial, capaian indikator menunjukkan kontribusi terhadap penguatan kapasitas pelaku dan lembaga kesejahteraan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan keberlanjutan. Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya mencapai 31,37 persen, sedangkan persentase lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitas pelayanannya tercatat 0,89 persen. Capaian tersebut telah memenuhi target tahunan RKPD, namun secara kumulatif terhadap target akhir RPJMD masih memerlukan penguatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas aktor dan kelembagaan sosial perlu dilakukan secara lebih konsisten dan berkelanjutan agar mampu menopang pelayanan sosial dalam jangka panjang.

Kinerja Program Rehabilitasi Sosial menjadi salah satu penopang utama capaian urusan sosial dan berdampak langsung terhadap kelompok rentan. Seluruh indikator rehabilitasi sosial di dalam panti menunjukkan capaian 100 persen, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA. Capaian ini mencerminkan efektivitas layanan rehabilitasi sosial berbasis panti dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, indikator yang berpengaruh langsung terhadap penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil yang cukup baik. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 3,86 persen, sementara persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonominya tercatat 0,18 persen dan melampaui target tahunan. Selain itu, seluruh daerah telah melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin secara menyeluruh dengan capaian 100,00 persen, yang

menjadi basis penting dalam penajaman sasaran perlindungan sosial. Program Penanganan Bencana juga menunjukkan kinerja optimal dengan capaian 100,00 persen dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pada masa tanggap darurat dan pascabencana, serta pemeliharaan taman makam pahlawan nasional yang terealisasi penuh sebesar 11,11 persen sesuai target kewenangan provinsi.

Kinerja Urusan Sosial diukur melalui 17 indikator program, dengan 16 indikator berkategori Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator kategori Tinggi (T). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	URUSAN SOSIAL								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	83,30	83,3	83,30	83,82	100,00	ST	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	83,43	83,43	83,43	88,04	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
4	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (persen)	persen	42,35	83,43	31,37	31,37	100,00	ST	74,08
5	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (persen)	persen	2,38	8,93	0,89	0,89	100,00	ST	37,52
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
7	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	dasarnya di dalam panti (persen)								
8	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
9	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
11	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (persen)	persen	3,89	16,15	4,34	3,86	89,07	T	99,30
12	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
13	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (persen)	persen	0,19	0,26	0,17	0,18	100,00	ST	97,29
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
14	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
15	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (persen)	persen	11,11	11,11	11,11	11,11	100,00	ST	100,00
16	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (persen)								
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
17	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (persen)	persen	11,11	11,11	11,11	11,11	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Sosial, 2026

7. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi perencanaan ketenagakerjaan, pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta pengawasan ketenagakerjaan. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta menjamin perlindungan dan hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan.

Kinerja tata kelola urusan tenaga kerja menunjukkan hasil yang sangat baik dan menjadi fondasi utama pencapaian program teknis. Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang konsisten berada pada predikat BB, Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah yang mencapai 87,07, serta Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,67 menunjukkan bahwa kualitas perencanaan, pengelolaan organisasi, dan pelayanan administrasi pada urusan tenaga kerja telah berjalan efektif dan mendukung pelaksanaan program substantif di bidang ketenagakerjaan.

Pada Program Perencanaan Tenaga Kerja, kualitas dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) menunjukkan capaian optimal dengan realisasi 100,00 persen, melampaui target akhir RPJMD sebesar 75 persen. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas perencanaan ketenagakerjaan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih terarah dalam pengembangan pasar kerja dan penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor unggulan daerah.

Kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja menunjukkan capaian yang relatif baik, meskipun masih memerlukan penguatan. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

tercatat sebesar 61,53 persen atau 92,29 persen dari target tahunan, dengan tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 82,04 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa program pelatihan telah berjalan, namun masih terdapat ruang peningkatan cakupan dan pemerataan akses pelatihan, terutama untuk menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri di wilayah Kepulauan Riau.

Pada Program Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, capaian indikator menunjukkan variasi kinerja. Persentase pencari kerja terdaftar yang berhasil ditempatkan tercatat sebesar 48,29 persen dan berada pada kategori sedang, menunjukkan bahwa efektivitas penempatan tenaga kerja masih menghadapi tantangan, terutama akibat ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mencapai 59,45 persen atau 100,00 persen dari target, mencerminkan meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap norma hubungan industrial yang adil.

Pada aspek pengawasan ketenagakerjaan, kinerja menunjukkan hasil yang cukup positif. Persentase perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mencapai 22,54 persen atau 152,30 persen dari target, menunjukkan peningkatan signifikan kesadaran perusahaan terhadap standar keselamatan kerja. Selain itu, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 50,80 persen atau 97,73 persen dari target, sementara persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani sebesar 64,38 persen dan berada pada kategori tinggi, meskipun masih memerlukan percepatan penyelesaian kasus secara lebih efektif.

Kinerja Urusan Tenaga Kerja diukur melalui 18 indikator program, dengan 13 indikator berkategori Sangat Tinggi (ST), 4 indikator kategori Tinggi (T), dan 1 indikator kategori Sedang (S). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	URUSAN TENAGA KERJA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	A	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	79,55	0	0	87,07	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	87,10	0	0	82,67	100,00	ST	94,91
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								
4	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas (Dengan Satuan:persen)	Dengan Satuan:persen	75	50	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (persen)	persen	75	50,8	66,67	61,53	92,29	ST	82,04
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
6	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (persen)	persen	80,12	79,35	64	48,29	75,45	S	60,27
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((persen))	(persen)	74,54	-	73,94	69	93,32	ST	92,57
8	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((persen))	(persen)	55,75	-	46	35,59	77,38	T	63,84
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
9	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (persen)	persen	60	40,56	50	59,45	100,00	ST	99,09
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((persen))	(persen)	53,48	0	51,98	50,80	97,73	ST	94,99
11	Persentase kasusnketenagakerjaan yang tertangani (persen)	persen	77,5	60,27	77,00	64,38	83,61	T	83,07
12	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (persen)	persen	15,8	21,18	14,80	22,54	100,00	ST	100,00
13	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (persen)	persen	53,48	-	77,00	64,38	83,61	T	100,00
14	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (persen)	persen	77,5	60,27	51,98	50,80	97,73	ST	65,55
15	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (persen)	persen	15,8	21,18	14,80	22,54	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
16	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (persen)	persen	53,48	-	51,98	50,80	97,73	ST	94,99
17	Persentase kasusnketenagakerjaan yang tertangani (persen)	persen	77,5	60,27	77,00	64,38	83,61	T	83,07
18	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (persen)	persen	16,3	21,18	14,80	22,54	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2026

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan, perlindungan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, serta pengelolaan sistem data gender dan anak. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil gender, serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Dari sisi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kinerja tata kelola urusan PPPA menunjukkan hasil yang sangat baik dan menjadi fondasi utama pelaksanaan program substantif. Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah mencapai 80,69 atau 100 persen dari target, Nilai SAKIP Perangkat Daerah konsisten berada pada predikat BB, serta Indeks Kepuasan Masyarakat tercatat sebesar 88,8. Capaian ini mencerminkan kualitas perencanaan, pengelolaan organisasi, dan pelayanan administrasi yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, indikator strategis menunjukkan capaian positif. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD Provinsi mencapai 12,67 persen atau 100 persen dari target, yang menandakan semakin kuatnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Namun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan tercatat sebesar 52,15 persen dan belum sepenuhnya mencapai target, menunjukkan bahwa pemberdayaan

ekonomi perempuan masih menghadapi tantangan struktural, khususnya dalam akses terhadap kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan.

Kinerja Program Perlindungan Perempuan menunjukkan capaian yang signifikan pada aspek layanan. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif mencapai 100 persen, mencerminkan efektivitas sistem layanan dan rujukan perlindungan. Di sisi lain, rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO tercatat sebesar 23,04 per 100.000 penduduk perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun layanan penanganan telah berjalan optimal, upaya pencegahan kekerasan berbasis gender masih perlu diperkuat melalui edukasi, penguatan keluarga, dan pengawasan sosial.

Pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, serta Pemenuhan Hak Anak, capaian indikator relatif stabil. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga tercatat sebesar 72,07 dan mendekati target tahunan, sementara tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan mencapai 51,16 persen. Pada aspek pemenuhan hak anak, persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) mencapai 57,14 persen dan berada pada kategori tinggi, meskipun masih memerlukan percepatan untuk mencapai target akhir RPJMD.

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur melalui 13 indikator program, dengan 11 indikator berkategori Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator berkategori Tinggi (T).

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	77,75	79,57	77,00	80,69	100,00	ST	100,00
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	78	0	76,65	76,77	100,00	ST	98,43
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	94	92,75	93,00	88,8	95,48	ST	94,47
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN								

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
5	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD (persen)	persen	13,09	11,82	12,41	12,67	100,00	ST	96,79
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (persen)	persen	65,5	52,8	53,86	52,15	96,83	ST	79,62
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,00.000 penduduk perempuan) (persen)	persen	40,38	43,7	43,51	23,04	100,00	ST	57,06
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (persen)	persen	99	93,43	95	100,00	94,74	ST	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								
9	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((persen)) **	(persen)	73,48	71,41	72,18	72,07	99,85	ST	98,08
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
10	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA (Persentase)	Persentase	85,71	46,51	71,43	57,14	79,99	T	66,67
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
11	Rasio Kekerasan Anak (Rasio)	Rasio	5,56	6,15	6,03	4,62	100,00	ST	83,09
12	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (persen)	persen	99	94	95	100,00	100,00	ST	100,00

Sumber: DP3AKB, 2026

9. Pangan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut mencakup sub-urusan penyelenggaraan pangan berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, serta pengawasan keamanan pangan segar lintas Kabupaten/Kota. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, dan keamanan pangan bagi masyarakat, khususnya dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan ketergantungan pasokan antarwilayah.

Kinerja tata kelola urusan ketahanan pangan menunjukkan hasil yang sangat baik dan menjadi fondasi utama pelaksanaan program teknis. Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah mencapai 88,62, Nilai SAKIP Perangkat Daerah konsisten berada pada predikat A, serta Indeks Kepuasan Masyarakat tercatat sebesar 85,20 dan melampaui target tahunan. Capaian ini mencerminkan kualitas perencanaan, pengelolaan organisasi, dan pelayanan administrasi yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan dan program ketahanan pangan.

Pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, indikator utama menunjukkan kinerja sangat tinggi. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mencapai 92,46 atau 100 persen dari target, yang mengindikasikan perbaikan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Capaian ini mencerminkan efektivitas intervensi promosi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta mulai meningkatnya pemanfaatan pangan non-beras dalam pola konsumsi masyarakat.

Kinerja Program Penanganan Kerawanan Pangan menunjukkan bahwa persentase daerah rentan rawan pangan tercatat sebesar 7,5 persen dan masih berada dalam ambang target maksimal 10 persen. Meskipun secara status indikator berada pada kategori sangat rendah, capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian wilayah masih menghadapi kerentanan akses pangan akibat faktor geografis, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta fluktuasi distribusi dan harga pangan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta intervensi yang lebih terarah pada wilayah pulau-pulau kecil dan daerah terpencil.

Pada Program Pengawasan Keamanan Pangan, kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan mencapai 98,84 persen atau 100 persen dari target. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan keamanan pangan segar lintas daerah, peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan, serta penguatan pembinaan dan inspeksi pada rantai distribusi pangan segar.

Kinerja urusan ketahanan pangan diukur melalui 5 indikator program, dengan 5 indikator berkategori Sangat Tinggi (ST), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 20254	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	URUSAN KETAHANAN PANGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	83,45	89,35	82,15	88,62	100,00	ST	100,00
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	A	A	A	A	100,00	ST	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	89	84,8	85	85,20	100,00	ST	95,73
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (persen)	persen	90,44	88,76	89,3	92,46	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (persen)	persen	â‰¤10	7,9	≤10	7,5	100,00	ST	75,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	persen	85	93,57	83	98,84	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2026

10. Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut mencakup penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum lintas Kabupaten/Kota, fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan provinsi, serta perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya melintasi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kewenangan ini diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah melalui penyediaan kepastian hukum atas pemanfaatan tanah.

Kinerja urusan pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 diukur melalui Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan satu

indikator utama, yaitu persentase luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum. Berdasarkan tabel kinerja, realisasi indikator tersebut mencapai 10 persen, sesuai dengan target tahunan RKPD Tahun 2025 dan meningkat dibanding capaian tahun 2024 yang masih 0 persen.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (persen)
	URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN								
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM								
1	Persentase luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum (persen)	persen	6,88	0	0	10	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2026

Tingkat capaian indikator tersebut berada pada kategori Sangat Tinggi (ST) dengan persentase capaian target sebesar 100 persen dan capaian terhadap target akhir RPJMD mencapai 100 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya percepatan pelaksanaan pengadaan tanah dibandingkan dengan target RPJMD, sekaligus menunjukkan meningkatnya kesiapan pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti kebutuhan lahan bagi proyek pembangunan strategis daerah.

11. Lingkungan Hidup

Lingkungan dengan kualitas baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait pengelolaan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH provinsi; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP provinsi; 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); (7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; (8) Pendidikan,

Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan (11) Persampahan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan melalui sejumlah indikator utama. Ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah mencapai 100 persen, mencerminkan kesiapan dokumen perencanaan lingkungan di tingkat provinsi. Pada aspek pengendalian dan pengawasan, persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3 mencapai 100 persen, sementara persentase penyelesaian sengketa lingkungan hidup tercatat sebesar 19,51 persen, melampaui target tahunan yang ditetapkan. Di sisi lain, kinerja pengelolaan persampahan masih menghadapi tantangan, ditunjukkan oleh persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah yang baru mencapai 17 persen, sehingga memerlukan penguatan pada upaya pengurangan dan pengolahan sampah dari sumbernya.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui 11 indikator program, dengan perincian sebanyak 10 indikator program kategori sangat tinggi (ST) dan 1 indikator program kategori Tinggi (T). Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	BB
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	80,51	0	80,29	79,96	99,59	ST	99,32
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) (Dinas)	Indeks	85,3	83,82	84,25	84,25	100,00	ST	98,77
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) (UPTD Lab. Lingkungan Hidup)	Indeks	85,3	0	84,25	76,92	91,30	ST	90,18
	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								
5	Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (persen)	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
6	Penurunan intensitas emisi GRK ((persen))	persen	10,11	2,54	3,76	4,23	100,00	ST	41,84
7	Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa (persen)	persen	100,00	46,67	46,67	46,67	100,00	ST	46,67
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
8	Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3 (persen)	persen	100,00	50	50,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
9	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (persen)	persen	24,39	9,76	9,76	19,51	100,00	ST	79,99
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
10	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (persen)) (persen)	persen	31,5	11,68	12,00	17,00	100,00	ST	53,97
11	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (persen RT) (persen)	persen	88,75	84,76	85,00	65,40	76,94	T	65,40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2026

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi. Kewenangan tersebut telah dilaksanankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyusun profil kependudukan. Selain penyusunan profil kependudukan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi ber-akte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah dan Persentase kepemilikan kartu keluarga.

Perkembangan penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari capaian indikator pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang umumnya telah memenuhi target. Persentase kepemilikan Kartu Identitas

Anak (KIA) telah mencapai 68,98 persen, sedangkan kepemilikan KTP-el tercatat sebesar 98,93 persen, melampaui target tahunan yang ditetapkan. Pada aspek pencatatan sipil, penerbitan akta kelahiran dan akta kematian bagi penduduk yang melaporkan telah mencapai 100 persen, mencerminkan efektivitas layanan pencatatan peristiwa penting. Selain itu, pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah provinsi tercatat sebesar 45,45 persen, yang meskipun telah memenuhi target RKPD, masih memerlukan penguatan agar data administrasi kependudukan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan melalui 8 indikator program dengan seluruh capaian indikator program berkategori sangat tinggi (ST). Secara rinci kinerja urusan Administrasi Kependuduk dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	90,92	0	80,46	86,94	100,00	ST	100,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	100,00	87,71	86	87,64	100,00	ST	87,64
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Perdikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
4	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (persen	persen	67	62,83	62,95	68,98	100,00	ST	100,00
5	Persentase Kepemilikan KTP-el (persen)	persen	99,8	99,76	99,77	98,93	99,16	ST	99,13
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
7	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
8	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi	persen	50	36,36	36,36	45,45	100,00	ST	90,90

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan seluruh indikator mencapai nilai 100 persen dan berada pada kategori sangat tinggi. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata kelola data kependudukan yang akurat, tertib, dan sesuai dengan pedoman nasional. Salah satu faktor pendorong utama capaian tersebut adalah konsistensi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan laporan data pendaftaran penduduk secara lengkap dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan telah berjalan efektif, baik dari sisi sistem informasi administrasi kependudukan maupun koordinasi kelembagaan antara provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, seluruh Kabupaten/Kota telah memanfaatkan database konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sebagai rujukan utama dalam pemutakhiran data kependudukan. Penggunaan database terintegrasi ini mendorong harmonisasi data, meminimalkan duplikasi, serta mendukung validitas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Keberhasilan penyusunan profil kependudukan provinsi yang telah memenuhi pedoman penyusunan juga menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan data telah berjalan sistematis dan berbasis standar. Kapasitas aparatur Dukcapil yang semakin baik dalam mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) turut mempercepat pelayanan dokumen seperti KTP-el, KK, akta kelahiran, dan akta kematian.

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil sempurna, terdapat satu aspek yang masih menjadi hambatan, yaitu rendahnya ketersediaan data akta pencatatan sipil yang hanya mencapai 30 persen. Rendahnya angka ini disebabkan oleh masih terbatasnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa

penting kehidupan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, atau perceraian. Kondisi geografis provinsi yang terdiri atas banyak pulau juga mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pencatatan sipil, terutama bagi penduduk di pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau. Selain itu, masih terdapat kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penduduk tanpa dokumen, dan pekerja migran internal yang kurang mendapatkan layanan Adminduk secara optimal.

Di samping itu, tantangan lain muncul dari perlunya peningkatan sosialisasi dan jemput bola pelayanan, baik melalui layanan mobil keliling, pelayanan berbasis desa/kelurahan, maupun integrasi layanan Adminduk dengan layanan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Upaya percepatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil memerlukan sinergi antara Dinas Dukcapil dan perangkat daerah lain, terutama dalam mengidentifikasi warga yang belum memiliki dokumen serta memberikan fasilitasi pendaftaran tanpa hambatan biaya maupun jarak.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan Adminduk dipengaruhi oleh faktor pendorong seperti kedisiplinan pelaporan data, pemanfaatan database nasional yang konsisten, peningkatan kapasitas aparatur, serta tersedianya sistem layanan Adminduk yang semakin modern. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya pelaporan peristiwa penting oleh masyarakat, keterbatasan akses layanan di wilayah kepulauan, serta masih adanya kelompok rentan yang belum terlayani secara optimal.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025 dapat dilihat dari beberapa indikator. Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar sebesar 10 desa dengan capaian sebesar 100 persen pada tahun 2025. Persentase desa yang difasilitasi kerjasama sebesar 50,55 persen, Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebesar 39,82 persen, sedangkan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas sebesar 5,72 persen.

Kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa dari sebanyak 4 indikator program yang ditargetkan pada tahun 2025 dengan capaian 4 indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi (ST). Secara rinci realisasi kinerja indikator program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,								
	PROGRAM PENATAAN DESA								
1	Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan Desanya sesuai standar	Desa	25	110	10	10	100,00	ST	40,00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								
2	Persentase Desa Yang Difasilitasi Kerjasamanya	persen	61,82	49,45	50,55	50,55	100,00	ST	81,76
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	persen	100,00	39,82	41,64	39,82	95,63	ST	39,82
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
4	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna Yang Sudah Dibina	persen	32,8	0,31	5,72	5,72	100,00	ST	17,40

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipengaruhi oleh faktor pendorong seperti kuatnya fungsi pembinaan provinsi, tersedianya pedoman kelembagaan desa, serta adanya peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam beberapa aspek tata kelola. Namun, faktor penghambat utamanya meliputi rendahnya kualitas SDM desa, minimnya kerjasama desa, belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakatan secara merata, serta tantangan geografis wilayah kepulauan yang memperlambat proses pembinaan dan koordinasi. Untuk memperkuat kinerja urusan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas aparatur desa, pengembangan model kerjasama desa yang adaptif terhadap karakter wilayah, perluasan pendampingan kelembagaan, serta memperkuat peran organisasi kemasyarakatan desa sebagai motor pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: (1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; (2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi; (3) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local; (4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; (5) Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (6) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Implementasi pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan capaian sangat tinggi. Adapun indikator yang melebihi target yang ditentukan seperti Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 100 persen (75,60) lebih besar dari target akhir RPJMD dan tahun 2025 masing-masing sebesar 71,00 dan 67,00. Selain itu, persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) sebesar 97,55 persen (55,80) dari target tahun 2025 sebesar 57,20 persen dengan kategori capaian Sangat Tinggi (ST). Kemudian, angka kelahiran remaja umur 15–19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) sebesar 100 persen (12,50) lebih besar dari target RPJMD dan Tahun 2025 sebesar 9,60 dan 10,80.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui 7 indikator program, dengan realisasi 6 indikator termasuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator termasuk kategori Rendah (R). Secara lengkap kinerja urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB								
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks) **	Indeks	72,10	68,70	69,25	68,70	99,21	ST	95,28
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19) (persen)	persen	9,60	11,10	10,80	12,50	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (persen)	persen	9,75	12,10	11,75	16,40	60,43	R	100,00
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (persen) **	persen	88,69	79,69	81,19	78,6	96,81	ST	88,62
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (persen)	persen	64,00	56,10	57,20	55,80	97,55	ST	87,19
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
6	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) (Indeks)	Indeks	71,00	66,00	67	75,60	100,00	ST	100,00
7	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	persen	40,61	31,61	33,11	36,12	100,00	ST	88,94

Sumber: DP3AKB, Tahun 2026

Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan capaian yang tinggi pada sebagian besar indikator program, namun masih menghadapi tantangan pada indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang mencapai 78,6 persen menunjukkan bahwa banyak pasangan yang membutuhkan tetapi belum dapat mengakses layanan KB. Faktor penyebab kondisi ini antara lain keterbatasan akses layanan kesehatan reproduksi, minimnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat KB, serta preferensi budaya yang masih memengaruhi pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi.

Meskipun capaian pada indikator dampak masih rendah, indikator program urusan KB justru menunjukkan kategori sangat tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional seperti sosialisasi, advokasi, dan pelayanan KB telah dilaksanakan sesuai target. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KB, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan mitra strategis seperti PKK, organisasi masyarakat, dan tenaga penyuluh KB. Peran penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) juga sangat berpengaruh dalam memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai KB modern.

Namun, beberapa tantangan struktural masih membatasi efektivitas program. Pertama, letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau kecil menyebabkan layanan KB sulit menjangkau wilayah terpencil, terutama untuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Distribusi alat kontrasepsi tidak selalu stabil, dan fasilitas kesehatan di pulau-pulau kecil memiliki kapasitas yang terbatas. Kedua, terdapat kesenjangan informasi dalam masyarakat terkait kesehatan reproduksi, yang menyebabkan sebagian pasangan ragu atau tidak yakin terhadap keamanan dan manfaat kontrasepsi. Hal ini diperburuk oleh adanya mitos-mitos tentang KB yang masih cukup banyak beredar di tingkat komunitas.

Selain itu, angka unmet need yang tinggi mengindikasikan adanya hambatan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga. Di sejumlah wilayah, keputusan penggunaan kontrasepsi masih didominasi oleh suami, sehingga perempuan memiliki ruang terbatas untuk menentukan metode KB yang sesuai bagi dirinya. Rendahnya cakupan pelayanan KB pascapersalinan dan kurang optimalnya integrasi layanan KB dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak juga berkontribusi terhadap tingginya unmet need.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan KB dipengaruhi oleh faktor pendorong seperti intensitas KIE yang meningkat, penguatan peran PLKB, serta koordinasi lintas sektor yang baik dalam pelaksanaan program. Namun, beberapa faktor penghambat masih signifikan, antara lain keterbatasan akses layanan di wilayah kepulauan, budaya patriarki

dalam pengambilan keputusan KB, mitos dan misinformasi, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta belum optimalnya integrasi layanan KB dengan layanan kesehatan dasar. Untuk meningkatkan kinerja urusan ini, dibutuhkan perluasan layanan KB berbasis wilayah, penguatan *supply chain* alat kontrasepsi, peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, serta strategi penjangkauan masyarakat terpencil melalui intervensi berbasis komunitas dan kemitraan multipihak.

15. Perhubungan

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan mendukung terciptanya kemadirian ekonomi suatu negara. Pelaksanaan urusan Perhubungan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); (2) Pelayaran; dan (3) Perkeretaapian.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik pada indikator pelayanan utama. Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah mencapai predikat BB dengan status capaian sangat tinggi, sementara Indeks Kepuasan Masyarakat tercatat sebesar 82,56 dan memenuhi target kinerja. Pada Program Pelayanan Perhubungan, seluruh indikator teknis masing-masing telah mencapai 100 persen. Namun demikian, masih terdapat satu indikator yang perlu mendapat perhatian, yaitu Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah yang terealisasi sebesar 82,56.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perhubungan diukur melalui 7 indikator, yang mencakup indikator penunjang dan pelayanan teknis. Dari keseluruhan indikator tersebut, seluruh indikator berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Komposisi capaian ini menunjukkan bahwa secara substansi pelayanan perhubungan telah berjalan efektif dan memenuhi target RKPD.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PERHUBUNGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai Sakip (Predikat)	Predikat	A	B	BB	BB	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	83	0	81	80,33	99,17	ST	99,47
3	Indeks Kepuasaan Masyarakat (Indeks)	Indeks	82	87,03	78,56	82,56	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
4	Persentase layanan angkutan darat	persen			30	30	100,00	ST	
5	Persentase Peningkatan Ketersedian Perlengkapan Jalan	persen	100,00	58,3	58,85	58,88	100,00	ST	58,88
6	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	persen	63	49	52,50	52,50	100,00	ST	83,33
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	persen	95,15	76,92	84,62	84,62	100,00	ST	88,93

Sumber: Dinas Perhubungan, 2026

Kinerja urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian sangat tinggi, ditandai dengan terpenuhinya target pada sebagian besar indikator pelayanan dan perencanaan transportasi yang mencapai 100 persen. Penyusunan dan fasilitasi dokumen perencanaan transportasi telah berjalan optimal sebagai dasar pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi. Namun demikian, masih terdapat satu indikator yang memerlukan perhatian, yaitu Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah yang belum menunjukkan capaian optimal, sehingga menjadi tantangan dalam penguatan kapasitas kelembagaan. Secara keseluruhan, kinerja urusan Perhubungan didukung oleh tata kelola perencanaan yang kuat dan koordinasi kelembagaan yang baik, namun ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas SDM serta penguatan implementasi kebijakan transportasi.

16. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi, pengelolaan nama domain dan subdomain di lingkungan pemerintah daerah provinsi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk menjamin keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan komunikasi pemerintahan, serta mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang relatif baik pada indikator penunjang tata kelola dan keterbukaan informasi. Nilai SAKIP Perangkat Daerah konsisten berada pada predikat BB, Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah mencapai 78,96 dan melampaui target tahunan, serta Indeks Kepuasan Masyarakat tercatat sebesar 82,75. Pada aspek keterbukaan informasi publik, nilai Keterbukaan Informasi Publik mencapai 97,25 dan berada pada kategori sangat tinggi. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada indikator teknis, khususnya Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik sebesar 76,32 serta Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum terealisasi (NA), sehingga memerlukan penguatan pada aspek pengelolaan informasi publik dan pengembangan infrastruktur serta sistem teknologi informasi.

Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika diukur melalui 6 indikator program yang mencakup program penunjang, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta pengelolaan aplikasi informatika. Dari keseluruhan indikator tersebut, 5 indikator berada pada kategori Sangat Tinggi (ST), sementara 1 indikator belum dapat dinilai.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
2	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	80	0	75,00	78,96	100,00	ST	98,70
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	86	80,67	81,00	82,75	100,00	ST	96,22
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
4	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (Indeks)	Indeks	76	0	71,00	76,32	100,00	ST	100,00
5	Nilai Keterbukaan informasi Publik (Nilai)	Nilai	90	58,88	66,00	97,25	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
6	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	Indeks	90,00	6,66	6,80	6,80	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada aspek tata kelola dan keterbukaan informasi publik, tercermin dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang konsisten pada predikat BB, Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah sebesar 78,96, Indeks Kepuasan Masyarakat 82,75, serta Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang mencapai 97,25. Capaian ini mencerminkan semakin baiknya kualitas layanan informasi, fungsi kehumasan pemerintah, serta dukungan tata kelola SPBE di tingkat provinsi. Namun demikian, kinerja masih menghadapi tantangan pada indikator teknis, yaitu Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik serta Indeks Pembangunan TIK yang belum menunjukkan capaian optimal, sehingga diperlukan penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM digital, dan perluasan jangkauan layanan informasi publik agar kinerja urusan Kominfo lebih seimbang dan inklusif.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di tingkat Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi,

pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan UMKM. Pelaksanaan kewenangan ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, meningkatkan daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis usaha rakyat.

Berdasarkan data realisasi Tahun 2024, kinerja urusan KUKM menunjukkan capaian yang masih berproses dan memerlukan penguatan pada berbagai aspek. Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam terealisasi sebesar 33,33 persen, sementara persentase koperasi yang diawasi mencapai 5,67 persen. Penilaian kesehatan KSP/USP tercatat 4,52 persen, sedangkan koperasi yang memperoleh dukungan pemberdayaan mencapai 7,10 persen. Pada aspek UMKM, rasio kewirausahaan daerah mencapai 3,57 persen, proporsi UKM non-pertanian 16,48 persen, serta persentase UMKM yang dikembangkan sebesar 86,33 persen.

Kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diukur melalui 11 indikator program yang mencakup aspek perizinan, pengawasan, peningkatan kapasitas koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Kinerja sebanyak 10 indikator memiliki kinerja sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator memiliki kinerja tinggi, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks	Indeks	82,08	82,90	80,99	82,03	100,00	ST	99,94
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	83,72	82,22	83,22	82,22	98,80	ST	98,20
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								
4	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (persen)	persen	20,70	18,68	18,46	33,33	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								
5	Persentase Koperasi yang Diawasi (persen)	persen	7,39	7,27	5,44	5,67	100,00	ST	76,73

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								
6	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya (persen)	persen	10,9	5,44	8,74	7,10	81,20	T	65,14
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								
7	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya (persen)	persen	37,5	24,9	28,8	79,40	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
8	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (persen)	persen	50,12	47,08	37,18	69,72	100,00	ST	100,00
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)								
9	Rasio Kewirausahaan Daerah (persen)	persen	4,76	3,11	3,31	3,57	100,00	ST	75,00
10	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (persen)	persen	15,95	-	14,95	16,48	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
11	Persentase UMKM yang dikembangkan (persen)	persen	36,39	26,82	34,89	86,33	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2026

18. Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di tingkat Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk menciptakan kepastian berusaha, meningkatkan daya tarik investasi daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi secara berkelanjutan.

Berdasarkan capaian kinerja hingga Tahun 2025, indikator urusan Penanaman Modal menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Seluruh indikator utama pada program teknis mencapai realisasi 100 persen, meliputi pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi, terselenggaranya event promosi

penanaman modal, pelayanan perizinan penanaman modal yang terlayani, persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta ketersediaan data dan informasi perkembangan investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Dari sisi tata kelola, Nilai SAKIP Perangkat Daerah tetap berada pada predikat BB, Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah mencapai 86,36, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi 3,00 dari target 3,48, yang menunjukkan kualitas layanan penanaman modal berada pada kategori baik dan konsisten mendukung iklim investasi daerah.

Kinerja urusan Penanaman Modal diukur melalui 8 indikator program yang mencakup aspek penunjang tata kelola serta program teknis penanaman modal. Seluruh indikator tersebut berada pada kategori capaian Sangat Tinggi (ST), yang mencerminkan efektivitas penyelenggaraan layanan, promosi, pengendalian, serta pengelolaan data investasi dalam mendukung peningkatan daya saing investasi Provinsi Kepulauan Riau..

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PENANAMAN MODAL								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	A	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	87,68	-	86,36	86,36	100,00	ST	98,49
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	4,80	3,48	3,48	3,48	100,00	ST	72,50
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
4	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	persen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								
5	Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal	persen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
6	Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani	persen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
7	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	persen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								
8	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau	persen	20,00	5,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2026

Kinerja urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian sangat tinggi pada seluruh indikator utama. Seluruh indikator teknis, meliputi pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi, terselenggaranya promosi penanaman modal, pelayanan perizinan yang terlayani, kepatuhan penyampaian LKPM, serta ketersediaan data dan informasi investasi, masing-masing mencapai 100 persen. Capaian ini mencerminkan bahwa tata kelola pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP telah berjalan optimal, didukung oleh kepastian waktu layanan, pemenuhan standar pelayanan, serta ketersediaan data investasi sebagai dasar perencanaan dan promosi daerah.

Tingginya capaian kinerja tersebut didorong oleh efektivitas sistem perizinan terintegrasi, komitmen kuat pemerintah provinsi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta dukungan sumber daya manusia PTSP yang kompeten. Digitalisasi layanan perizinan berperan signifikan dalam mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan menurunkan biaya birokrasi, sementara tersusunnya peta potensi investasi secara menyeluruh memperkuat kapasitas kelembagaan daerah dalam menyediakan informasi investasi yang akurat dan menarik bagi investor.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan

pemuda pada skala provinsi, termasuk pemuda pelopor dan wirausaha muda; pemberdayaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi; pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang menengah; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat provinsi; pembinaan olahraga prestasi tingkat nasional; pembinaan organisasi olahraga provinsi; serta pengembangan kepramukaan tingkat daerah provinsi sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda.

Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan hasil yang relatif baik pada sebagian besar indikator teknis. Rasio wirausaha pemuda mencapai 1,47 dan tingkat partisipasi pemuda dalam kepeloporan, kepemimpinan, serta organisasi tercatat sebesar 0,21 persen, yang telah memenuhi target tahunan. Pada aspek olahraga, cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat nasional mencapai 0,87 persen, sementara cakupan pembinaan atlet muda sebesar 4,2 persen, menunjukkan konsistensi pembinaan prestasi olahraga. Selain itu, persentase kwartir yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas kepramukaan mencapai 14,85 persen, mencerminkan dukungan pemerintah provinsi terhadap penguatan gerakan kepramukaan. Namun demikian, Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah terealisasi sebesar 73,32 (96,47 persen dari target), yang menjadi catatan penting dalam peningkatan kualitas tata kelola urusan ini.

Kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur melalui 8 indikator program, yang seluruhnya berada pada kategori Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN KEPEMUDAAN & OLAHRAGA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	81	76,0	76,0	73,32	96,47	ST	90,52
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	88	80,0	80,0	90,69	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								
4	Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio)	Rasio	3,65	0,38	1,5	1,47	100,00	ST	40,27

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
5	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi (persen)	persen	0,32	0,17	0,2	0,21	100,00	ST	65,63
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
6	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional (persen)	persen	1,01	0,76	0,6	0,87	100,00	ST	86,14
7	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (persen)	persen	16,3	2,69	4,2	4,2	100,00	ST	25,77
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								
8	Persentase Kwartir terfasilitasi Pengembangan Kepramukaan (persen)	persen	22,4	9,63	14,9	14,85	100,00	ST	66,29

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2026

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang relatif baik, ditandai dengan terpenuhinya sebagian besar indikator pada kategori sangat tinggi. Capaian positif terlihat pada rasio wirausaha pemuda, partisipasi pemuda dalam kepeloporan dan organisasi, pembinaan atlet muda, partisipasi atlet pada kejuaraan tingkat nasional, serta fasilitasi pengembangan kepramukaan yang seluruhnya mencapai target tahunan RKPD. Kondisi ini mencerminkan bahwa fungsi fasilitasi, pembinaan dasar, dan penyelenggaraan program kepemudaan serta keolahragaan telah berjalan sesuai perencanaan, meskipun masih terdapat indikator kelembagaan, khususnya profesionalisme SDM perangkat daerah, yang menunjukkan capaian 73,32 dan memerlukan perhatian dalam peningkatan kualitas aparatur.

Capaian kinerja tersebut didorong oleh koordinasi yang cukup baik antara pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota, organisasi kepemudaan, organisasi olahraga, serta pemangku kepentingan terkait. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemuda, pelatihan kewirausahaan, pengembangan kepemimpinan, serta pelaksanaan event dan kejuaraan olahraga secara berkelanjutan turut memperkuat capaian indikator teknis. Dukungan kelembagaan seperti kerja sama dengan KONI dan kwartir kepramukaan, ketersediaan fasilitas olahraga di pusat-pusat pertumbuhan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga menjadi faktor utama yang mendorong tercapainya target kinerja pada urusan ini.

20. Statistik

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan, mengembangkan sistem yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan urusan statistik di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi.

Kinerja Urusan Statistik saat ini dapat dilihat berdasarkan realisasi Tahun 2025 dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik. Realisasi kinerja RKPD Tahun 2025 tercatat sebesar 2,61 dari target tahun 2025 sebesar 2,70, dengan tingkat capaian target sebesar 96,67 persen dan tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 87,00 persen. Oleh karena itu, evaluasi kinerja urusan statistik menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi dan telah memenuhi target kinerja tahunan.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN STATISTIK								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	3,00	2,61	2,70	2,61	96,67	ST	87,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

21. Persandian

Pelaksanaan urusan persandian dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencakup penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi. Kewenangan ini diarahkan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintahan melalui penerapan sistem pengamanan informasi yang andal, sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kinerja urusan persandian pada Tahun 2025 diukur melalui satu indikator, yaitu Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah. Berdasarkan tabel capaian, indikator ini menunjukkan kinerja sangat tinggi (ST) dengan realisasi sebesar 55 persen, melampaui target Tahun 2025 sebesar 40 persen atau mencapai 100 persen dari target tahunan, dengan tingkat capaian terhadap target

akhir RPJMD sebesar 88,71 persen. Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya penerapan pengamanan informasi pemerintah daerah, baik dari sisi kebijakan, prosedur, maupun dukungan teknis persandian. Dengan hanya satu indikator yang digunakan, kinerja urusan persandian secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat baik dan memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PERSANDIAN								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	persen	62,00	64,34	40	55	100,00	ST	88,71

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

Kinerja Urusan Persandian di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian sangat tinggi, ditunjukkan oleh indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah yang melampaui target Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 55 persen dari target 40 persen. Capaian ini mencerminkan semakin efektifnya penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah, baik pada aspek perlindungan data, keamanan komunikasi, maupun dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

Faktor pendorong utama capaian tersebut antara lain meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam menerapkan standar keamanan informasi, pemanfaatan sistem persandian yang terintegrasi dengan SPBE, serta dukungan kebijakan dan pedoman teknis persandian dari pemerintah pusat. Selain itu, meningkatnya kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya perlindungan informasi strategis pemerintah turut mendorong optimalisasi layanan persandian dan penguatan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

22. Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan kebudayaan yang pelakunya lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat lintas wilayah, pembinaan kesenian dan sejarah lokal provinsi, penetapan serta pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi, penerbitan izin pemindahan cagar budaya ke luar provinsi, hingga pengelolaan museum provinsi. Penyelenggaraan urusan ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan identitas budaya daerah sekaligus memperkuat peran kebudayaan sebagai aset pembangunan.

Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh Kabupaten/Kota mempunyai nilai tawar yang layak dikembangkan. Di samping itu, peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah bagi pengembangan pariwisata budaya yang ditawarkan di masing-masing daerah. Kondisi ini menempatkan urusan kebudayaan tidak hanya sebagai fungsi pelestarian, tetapi juga sebagai pengungkit ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.

Capaian kinerja urusan kebudayaan pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik, khususnya pada aspek pelestarian dan pengembangan budaya. Persentase warisan budaya yang didaftarkan dan ditetapkan mencapai 32,59 persen dan melampaui target tahunan, sementara persentase kesenian tradisional yang didaftarkan dan dikembangkan mencapai 7,3 persen sesuai target. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas seni budaya juga menunjukkan tren positif, tercermin dari persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni sebesar 1,71 persen, serta persentase yang menjadikan aktivitas seni sebagai sumber penghasilan sebesar 0,18 persen, keduanya melampaui target RKPD.

Pada aspek pelestarian sejarah dan cagar budaya, capaian kinerja menunjukkan kemajuan signifikan. Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan mencapai 10,76 persen dan jauh melampaui target, serta persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah atau cagar budaya tercatat sebesar 18,33 persen. Upaya pengelolaan permuseuman juga menunjukkan hasil positif dengan peningkatan konservasi koleksi museum sebesar 11,63 persen. Namun demikian, pada Program Pembinaan Sejarah masih terdapat indikator dengan capaian sangat rendah, khususnya terkait tingkat kompetensi SDM sejarah dan kesadaran pelajar terhadap sejarah lokal yang terealisasi 0 persen.

Secara keseluruhan, kinerja urusan kebudayaan diukur melalui 12 indikator program. Dari jumlah tersebut, 10 indikator berada pada kategori Sangat Tinggi (ST) dan 2 indikator berada pada kategori Sangat Rendah (SR), terutama pada aspek pembinaan sejarah.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN KEBUDAYAAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	88	86	86,5	86,36	99,84	ST	98,14
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	88,3	88,3	88,3	85,58	96,92	ST	96,92
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
4	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	Persentase	37,08	23,6	25,84	32,59	100,00	ST	87,89
5	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (persen)	persen	1,89	1,66	1,69	1,71	100,00	ST	90,48
6	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	Persentase	1,89	6,93	7,3	7,3	100,00	ST	386,24
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
7	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai	persen	0,3	0,13	0,15	0,18	100,00	ST	60,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (persen)								
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								
8	Persentase Tingkat kompetensi SDM Sejarah (persen)	persen	66,67	0	0	0	0,00	SR	0,00
9	Persentase Tingkat kesadaran Pelajar se-Tingkat SLTA/sederajat tentang sejarah lokal (persen)	persen	1,76	0	0,29	0	0,00	SR	0,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
9	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	Persentase	1,76	5,9	6,94	10,76	100,00	ST	611,36
10	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (persen)	persen	64,4	41,76	45,53	43,65	95,87	ST	67,78
11	Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau Cagar budaya yang telah Ditetapkan (persen)	persen	20,65	41,76	17,26	18,33	100,00	ST	88,77
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								
12	Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun (persen)	persen	20,59	9,25	11,14	12,10	100,00	ST	56,48

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2026

Kinerja Urusan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang positif, terutama pada indikator pembinaan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan. Capaian tinggi tampak pada kegiatan fasilitatif dan administratif, seperti penyusunan dokumen kebudayaan, pengembangan event budaya daerah, pembinaan komunitas budaya, serta pelestarian dan pendataan warisan budaya. Hal ini mencerminkan peran aktif pemerintah provinsi dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya dan menyediakan ruang ekspresi bagi seniman, budayawan, serta komunitas adat.

Faktor pendorong utama capaian tersebut adalah kekayaan potensi budaya daerah, khususnya budaya Melayu yang masih kuat, didukung seni pertunjukan tradisional, tradisi lisan, permainan rakyat, dan warisan budaya maritim. Peningkatan penyelenggaraan festival budaya, event seni, serta kolaborasi dengan komunitas budaya, sanggar seni, lembaga adat, dan pelaku industri kreatif turut meningkatkan eksposur budaya dan partisipasi masyarakat, termasuk generasi muda. Dukungan regulasi daerah dan koordinasi lintas pemangku kepentingan juga memperkuat ekosistem pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Secara umum, capaian kinerja urusan kebudayaan dipengaruhi oleh kekuatan budaya lokal dan meningkatnya aktivitas pembinaan serta promosi budaya. Namun demikian, optimalisasi pemajuan kebudayaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur kebudayaan, anggaran, kapasitas kelembagaan, regenerasi pelaku seni, serta kendala geografis wilayah kepulauan. Ke depan, diperlukan strategi pemajuan kebudayaan yang lebih terintegrasi melalui digitalisasi budaya, pengembangan infrastruktur kebudayaan berbasis wilayah, penguatan ekosistem industri kreatif, dan pemberdayaan komunitas budaya secara berkelanjutan.

23. Perpustakaan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi pengelolaan perpustakaan provinsi, pembudayaan kegemaran membaca, pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah, pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah, serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara. Urusan ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan literasi, akses pengetahuan, dan pelestarian khazanah intelektual daerah.

Kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan menunjukkan capaian yang beragam antarindikator. Dari sisi tata kelola dan pelayanan, indikator penunjang seperti Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Profesionalisme SDM, serta Indeks Kepuasan Masyarakat dan UPT Perpustakaan berada pada kategori sangat tinggi. Pada aspek layanan teknis, jumlah kunjungan masyarakat ke UPT Perpustakaan M. Sani Batam melampaui target dengan realisasi 6.109 kunjungan, sementara jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan mencapai 36.930 orang atau 72,84 persen dari target dan berada pada kategori sedang. Di sisi lain, indikator tingkat kegemaran membaca masyarakat terealisasi sebesar 59,33 atau 79,43 persen dari target. Adapun indikator pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno telah mencapai target tahunan sebesar 12 persen dengan kategori sangat tinggi.

Kinerja urusan perpustakaan diukur melalui 8 indikator program yang mencakup indikator penunjang dan indikator teknis layanan perpustakaan. Dari keseluruhan indikator tersebut, mayoritas berada pada kategori Sangat Tinggi (ST), satu indikator berada pada kategori Sedang (S).

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PERPUSTAKAAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	BB	BB	BB	100,00	ST	75,00
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	78,91	0	78,01	84	100,00	ST	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,75	88,15	88,25	88,30	100,00	ST	99,49
4	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT	Indeks	82,25	80,5	81,00	81,05	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
5	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	79,69	73,69	74,69	59,33	79,43	T	74,45
6	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan	Orang	51.200	50.607	50.700	47.575	93,84	ST	92,92
7	Jumlah Kunjungan Pemustaka ke UPT Perpustakaan M. Sani Batam	Orang	4.754	3.288	4.004	6109	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								
8	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	22	10	12	12	100,00	ST	54,55

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2026

Kinerja Urusan Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada indikator layanan dasar perpustakaan, peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan, serta pembinaan perpustakaan sekolah dan desa. Capaian indikator yang relatif tinggi

mencerminkan bahwa pemerintah provinsi telah berperan aktif dalam memperluas akses informasi, mendorong peningkatan literasi masyarakat, dan memperkuat kelembagaan perpustakaan daerah. Peningkatan jumlah kunjungan dan pemanfaatan layanan perpustakaan menjadi indikator positif atas upaya penyediaan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Faktor pendorong capaian tersebut antara lain meningkatnya pemanfaatan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui layanan konvensional maupun layanan digital. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, diskusi komunitas, dan pengembangan keterampilan. Selain itu, pembinaan perpustakaan sekolah dan desa, ketersediaan koleksi yang lebih beragam, serta kerja sama dengan perpustakaan nasional, lembaga pendidikan, dan komunitas literasi turut memperkuat kualitas layanan dan jangkauan perpustakaan di wilayah provinsi.

Secara umum, kinerja urusan perpustakaan didukung oleh penguatan layanan literasi dan kelembagaan perpustakaan, namun masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur antarwilayah, keterbatasan SDM perpustakaan, rendahnya budaya baca di sebagian masyarakat, serta belum meratanya akses layanan digital di wilayah kepulauan. Ke depan, peningkatan kinerja perlu diarahkan pada penguatan perpustakaan desa dan sekolah, peningkatan kompetensi pustakawan, perluasan program literasi masyarakat, serta investasi berkelanjutan pada digitalisasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

24. Kearsipan

Pelaksanaan urusan Kearsipan di tingkat provinsi dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD, pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) tingkat provinsi, pemusnahan arsip sesuai retensi, pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana berskala provinsi, autentikasi arsip statis dan hasil alih media, pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang, serta penerbitan izin penggunaan arsip tertutup. Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi, baik pemerintah maupun swasta, karena berfungsi sebagai sumber informasi pengambilan keputusan, alat bukti yang sah, sarana pertanggungjawaban manajemen, serta instrumen transparansi birokrasi. Arsip hanya dapat memberikan manfaat optimal apabila dikelola secara tertib dan sistematis, sedangkan pengelolaan arsip yang tidak tertib berpotensi menimbulkan permasalahan organisasi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan pada tahun 2024 ditunjukkan melalui indikator Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Berdasarkan tabel capaian, realisasi indikator pada tahun 2024 mencapai 20,34 persen dan meningkat menjadi 22,63 persen pada target tahun 2025, dengan capaian target sebesar 100,00 persen dan status kinerja berkategori Sangat Tinggi (ST). Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan arsip sebagai instrumen akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintahan telah berjalan sesuai arah kebijakan, meskipun masih memerlukan penguatan untuk mencapai target akhir RPJMD.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kearsipan diukur melalui 1 indikator utama sebagaimana tercantum dalam tabel. Dengan capaian kinerja yang telah memenuhi target tahunan RKPD dan berstatus Sangat Tinggi, penyelenggaraan urusan Kearsipan secara umum menunjukkan arah pengelolaan yang positif. Namun demikian, tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD yang masih berada pada 61,16 persen mengindikasikan perlunya peningkatan konsistensi pengelolaan arsip, penguatan sistem kearsipan perangkat daerah, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas SDM kearsipan agar fungsi arsip sebagai alat akuntabilitas dan transparansi birokrasi dapat semakin optimal ke depan.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN KEARSIPAN								
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009) (persen)	persen	37,00	20,34	22,63	22,63	100,00	ST	61,16

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2026

Kinerja urusan Kearsipan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang cukup baik dan terarah, tercermin dari terpenuhinya target tahunan indikator Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional. Realisasi kinerja tahun berjalan telah memenuhi target RKPD dengan status Sangat Tinggi (ST), yang menunjukkan

bahwa fungsi arsip sebagai instrumen akuntabilitas, transparansi birokrasi, dan pertanggungjawaban pemerintahan mulai berjalan secara sistematis. Namun demikian, tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD masih memerlukan penguatan agar pengelolaan arsip dapat semakin merata dan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah.

Faktor pendorong capaian kinerja tersebut antara lain adanya komitmen pemerintah provinsi dalam penguatan tata kelola kearsipan, penerapan regulasi kearsipan secara konsisten, serta meningkatnya pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya arsip sebagai alat bukti dan dasar pengambilan keputusan. Dukungan kebijakan nasional di bidang kearsipan, pemanfaatan sistem informasi kearsipan melalui SIKN–JIKN, serta pembinaan dan koordinasi lembaga kearsipan provinsi dengan perangkat daerah turut memperkuat pengelolaan arsip dinamis dan statis. Selain itu, upaya penataan arsip dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja pemerintahan juga menjadi faktor penting dalam mendorong pencapaian indikator.

Secara keseluruhan, kinerja urusan Kearsipan berada pada jalur yang positif, dengan capaian target tahunan yang telah terpenuhi dan arah pengelolaan yang mendukung akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Ke depan, peningkatan kinerja perlu difokuskan pada penguatan kapasitas SDM kearsipan, peningkatan kualitas pengelolaan arsip di seluruh perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan sistem kearsipan terintegrasi. Langkah tersebut diperlukan agar capaian kinerja tidak hanya tinggi secara administratif, tetapi juga berdampak nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib, dan akuntabel.

25. Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi, sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup kewenangan pada suburusan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; perikanan tangkap; perikanan budidaya; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan ruang laut hingga 12 mil di luar migas, penerbitan izin pemanfaatan ruang laut dan usaha perikanan lintas Kabupaten/Kota, pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam lingkup provinsi.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, mengingat sekitar 96 persen wilayahnya berupa laut dan berada pada kawasan perairan strategis. Potensi tersebut mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, wisata bahari, serta ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang. Komoditas

unggulan yang dikembangkan antara lain ikan tangkap bernilai ekonomi tinggi, hasil budidaya perikanan, serta produk olahan perikanan yang mendukung peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun berjalan menunjukkan capaian yang relatif baik pada sebagian besar indikator. Pengelolaan kawasan konservasi mencapai 87,81 persen dengan status sangat tinggi, kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan mencapai 99,50 persen, serta indikator pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menunjukkan kinerja sangat tinggi, tercermin dari angka konsumsi ikan sebesar 69,64 kg/kapita/tahun dan produksi olahan hasil perikanan sebesar 18.592,02 ton. Di sisi lain, produksi perikanan tangkap terealisasi sebesar 316.749,93 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 40.656,10 ton atau 100 persen dari target, yang mengindikasikan masih adanya tantangan pada aspek produktivitas, sarana budidaya, dan kondisi lingkungan usaha perikanan budidaya.

Secara keseluruhan, kinerja indikator program pembangunan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan melalui 9 indikator yang tersebar pada beberapa program. Dari keseluruhan indikator tersebut, semuanya sebanyak 9 indikator berada pada kategori Sangat Tinggi (ST), seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	81,45	80,13	80,20	85,53	100,00	ST	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	86,01	85,79	85,81	87,23	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
4	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (persen)	persen	98	75	87,81	87,81	100,00	ST	89,60
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	320.042,54	35.255,75	315.281,97	316.749,93	100,00	ST	98,97
	PROGRAM PENGELOLAAN PERI KANAN BUDIDAYA								
6	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	54.806,00	39.898,00	39.899,26	40.656,10	100,00	ST	74,18
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
7	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (persen)	persen	90	95	90	99,50	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
8	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/KAP /TH	44,41	68,17	40,61	69,64	100,00	ST	100,00
9	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	Ton	13.900	19.692,58	13.400	18.592,02	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2026

Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang relatif bervariasi, dengan dominasi indikator berkategori sangat tinggi, khususnya pada aspek pengelolaan kawasan konservasi, kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Indikator konsumsi ikan dan produksi olahan hasil perikanan melampaui target, mencerminkan meningkatnya pemanfaatan sumber daya perikanan dan nilai tambah sektor hilir.

Faktor pendorong utama capaian tersebut adalah karakteristik geografis Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan potensi sumber daya ikan yang besar. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta fasilitasi sarana prasarana dan pembinaan kelompok nelayan dan pembudidaya turut memperkuat kinerja. Selain itu, meningkatnya aktivitas pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan, serta dorongan konsumsi ikan masyarakat, berkontribusi signifikan terhadap capaian indikator hilir perikanan.

Di sisi lain, faktor penghambat masih cukup kuat, terutama pada rendahnya modernisasi armada dan alat tangkap, keterbatasan teknologi perikanan budidaya, serta minimnya infrastruktur rantai dingin di beberapa wilayah. Kondisi geografis kepulauan menyebabkan biaya logistik tinggi dan akses pasar terbatas, khususnya bagi nelayan dan pembudidaya di pulau-pulau kecil. Tantangan lain berasal dari degradasi lingkungan pesisir, cuaca ekstrem, serta keterbatasan SDM penyuluh perikanan dan akses pembiayaan usaha yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha perikanan.

Secara keseluruhan, kinerja urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan arah yang positif dengan capaian indikator yang didominasi kategori sangat tinggi, terutama pada aspek pengelolaan, pengawasan, dan pengolahan hasil perikanan. Namun, untuk meningkatkan kinerja secara lebih merata, diperlukan upaya berkelanjutan berupa modernisasi perikanan tangkap dan budidaya, penguatan infrastruktur rantai dingin dan logistik, peningkatan kapasitas SDM, serta perlindungan ekosistem pesisir agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berlangsung optimal dan berkelanjutan.

26. Pariwisata

Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat provinsi dilaksanakan sesuai Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat provinsi dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencakup pengelolaan daya tarik wisata provinsi, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan destinasi pariwisata provinsi. Selain itu, pemerintah provinsi berwenang melaksanakan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Kabupaten/Kota, penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan. Kewenangan tersebut menjadi landasan dalam mendorong pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kinerja urusan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang relatif positif pada sejumlah indikator utama. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara mencapai 1,96 hari dan wisatawan nusantara 1,64 hari, yang keduanya memenuhi target tahunan. Pada aspek pergerakan wisatawan, jumlah perjalanan wisatawan nusantara terealisasi sebesar 4.294.670 perjalanan atau melampaui target, sementara jumlah wisatawan mancanegara tercatat 2.027,00 ribu orang dan masih berada di bawah target yang ditetapkan. Di sisi lain, pengembangan ekonomi kreatif menunjukkan hasil baik, ditandai dengan

persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual sebesar 4,69 persen serta peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 10,11 persen.

Potensi pariwisata Kepulauan Riau yang didominasi wilayah laut turut menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja tersebut. Keunggulan pariwisata bahari, seperti keindahan bawah laut Kepulauan Anambas, pantai pasir putih di Natuna dan Lingga, serta kawasan pariwisata berkelas internasional di Bintan, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Upaya promosi, penguatan destinasi, serta peningkatan kualitas layanan pariwisata berkontribusi pada meningkatnya lama tinggal dan pergerakan wisatawan nusantara, meskipun pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, kinerja indikator program pembangunan urusan pariwisata diukur melalui 9 indikator yang tersebar pada beberapa program, meliputi program penunjang, peningkatan daya tarik destinasi, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya pariwisata. Dari keseluruhan indikator tersebut, 8 indikator berada pada kategori Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator berada pada kategori Tinggi (T).

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PARIWISATA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	83,80	0,00	83,46	81,05	97,11	ST	96,72
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	89,50	88,86	88,9	93,63	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
4	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	Hari	2,15	88,86	1,9	2,02	100,00	ST	93,95
5	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	Hari	1,90	1,64	1,65	1,77	99,39	ST	93,16
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	Ribu Orang	3.621,80	1.667,10	2.397,80	2.027,00	84,54	T	55,97
7	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	Perjalanan	3.606.151	3.491.947	3.500.450	4.294.670	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDU NGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
8	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (persen)	persen	14,08	2,22	4,65	4,69	100,00	ST	33,31
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
9	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya (persen)	persen	14,08	7,61	9,61	10,11	100,00	ST	71,80

Sumber: Dinas Pariwisata, 2026

Kinerja Urusan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang relatif baik pada sebagian besar indikator, khususnya pada aspek promosi, peningkatan daya tarik destinasi, dan pergerakan wisatawan. Hal ini tercermin dari capaian rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara 1,96 hari, wisatawan nusantara 1,64 hari, serta tingginya capaian perjalanan wisatawan nusantara sebesar 4.294.670 perjalanan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kualitas destinasi, ragam aktivitas wisata, dan upaya promosi daerah telah mampu mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama dan berwisata lintas wilayah di Kepulauan Riau.

Faktor pendorong utama kinerja urusan pariwisata adalah keunggulan geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan strategis yang didominasi wisata bahari, didukung budaya Melayu, wisata belanja, serta potensi MICE di Batam dan Bintan. Penguatan promosi melalui media digital, penyelenggaraan event pariwisata dan budaya, serta kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata turut meningkatkan eksposur destinasi. Selain itu, konektivitas transportasi laut dan udara yang relatif baik di kawasan utama menjadi faktor penting dalam mendukung arus kunjungan wisatawan.

Di sisi lain, kinerja pariwisata masih menghadapi sejumlah faktor penghambat, terutama ketimpangan kualitas destinasi dan infrastruktur antarwilayah. Banyak destinasi di kabupaten kepulauan masih terbatas dari sisi aksesibilitas, amenitas, dan fasilitas pendukung wisata. Kualitas SDM pariwisata yang belum merata, terbatasnya konektivitas antarpulau, serta isu lingkungan

seperti sampah laut dan daya dukung destinasi juga menjadi kendala dalam meningkatkan kunjungan, khususnya wisatawan mancanegara. Selain itu, penguatan peran Pokdarwis dan diversifikasi produk wisata di luar kawasan inti masih memerlukan pendampingan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendorong berupa potensi wisata unggulan, promosi yang semakin intensif, serta dukungan industri pariwisata, dan faktor penghambat berupa ketimpangan infrastruktur, kualitas SDM, konektivitas wilayah, serta isu lingkungan. Ke depan, peningkatan kinerja pariwisata perlu diarahkan pada pengembangan destinasi berbasis wilayah, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, perbaikan infrastruktur dan konektivitas antarpulau, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

27. Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup sub urusan: (1) Sarana Pertanian; (2) Prasarana Pertanian; (3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; (4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan (5) Perizinan Usaha Pertanian.

Sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Kinerja urusan pertanian pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat positif pada sebagian besar indikator produksi dan dukungan sistem pertanian. Produksi tanaman pangan mencapai 19.364,33 ton (100 persen dari target), hortikultura 38.577,48 ton (100 persen), dan tanaman perkebunan 27.613,37 ton (92,90 persen). Produksi ternak melampaui target dengan realisasi 26.874,63 ton (100 persen). Pada aspek prasarana, luas lahan pertanian yang dimanfaatkan mencapai 106 hektar (100 persen), sementara pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) terealisasi 78,88 persen dan pengendalian OPT mencapai 48,98 persen, keduanya memenuhi target tahunan.

Dari sisi ketahanan dan keberlanjutan pertanian, penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian mencapai 100 persen dari target (realisasi 100 persen), menunjukkan upaya adaptasi yang berjalan efektif. Dukungan

sumber daya manusia juga menunjukkan hasil optimal, tercermin dari peningkatan SDM penyuluh pertanian yang mencapai 52 persen atau 100 persen dari target. Secara umum, capaian indikator-indikator tersebut menggambarkan bahwa program penyediaan sarana dan prasarana, pengendalian kesehatan hewan dan OPT, serta penyuluhan pertanian telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan produksi dan ketahanan sektor pertanian daerah.

Kinerja indikator program urusan pertanian diukur melalui 11 indikator. Seluruh indikator pada tahun 2025 berada pada kategori Sangat Tinggi (ST), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pertanian secara umum telah berjalan efektif dan mampu memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Rincian capaian masing-masing indikator selengkapnya tersaji pada tabel kinerja urusan pertanian.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PERTANIAN								
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
1	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Ton	33.814,08	17.251,66	17.510,40	19.364,33	100,00	ST	57,27
2	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	Ton	30.385,47	27.788,80	28.205,63	38.577,48	100,00	ST	100,00
3	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	Ton	34.456,53	27.788,80	29.722,5	27.613,37	92,90	ST	80,14
4	Produksi Ternak (Ton)	Ton	20.128,32	18.823,34	19.034,55	26.874,63	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
3	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan (Hektar)	Hektar	90	199	82	292,75	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (persen)	persen	69	NA	64	78,88	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
8	Persentase Luas Areal Pengendalian dan	persen	45	4.898	42	48,98	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	Penanggulangan Bencana OPT (persen)								
9	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian (persen)	persen	748	NA	73,9	100,00	100,00	ST	13,37
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	persen	62	50	52	52	100,00	ST	83,87

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2026

Kinerja Urusan Pertanian di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik pada sebagian besar indikator, khususnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan ternak yang umumnya mencapai atau melampaui target. Produksi tanaman pangan terealisasi 100 persen, hortikultura 100 persen, perkebunan 92,90 persen, dan produksi ternak mencapai 100 persen. Dukungan prasarana juga kuat, ditandai dengan pemanfaatan lahan pertanian sebesar 100 persen, pengendalian PHMS 100 persen, pengendalian OPT 100 persen, serta peningkatan SDM penyuluh pertanian yang mencapai 100 persen dari target.

Capaian positif tersebut didorong oleh penguatan peran penyuluh pertanian, peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyediaan sarana produksi (bibit unggul, pupuk, dan alsintan), serta implementasi program pengendalian penyakit hewan dan OPT yang relatif efektif. Kebijakan daerah yang menitikberatkan pada ketahanan pangan, pemanfaatan lahan secara optimal, dan penguatan kapasitas SDM pertanian turut mempercepat realisasi target, termasuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada sektor pertanian yang tercermin dari penanganan dampak perubahan iklim yang mencapai 100 persen dari target.

Meski demikian, kinerja pertanian masih menghadapi hambatan struktural, terutama keterbatasan lahan pertanian produktif akibat dominasi wilayah pesisir dan alih fungsi lahan. Modernisasi pertanian belum merata; sebagian petani masih menggunakan teknologi sederhana dengan keterbatasan alsintan, irigasi, dan teknologi budidaya ramah iklim. Akses permodalan dan literasi usaha tani juga masih terbatas, diperparah oleh tingginya biaya logistik wilayah kepulauan dan rantai pasok yang belum terintegrasi, sehingga memengaruhi stabilitas harga dan daya saing produk.

Secara keseluruhan, Urusan Pertanian di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang kuat dan progresif dengan mayoritas indikator berada pada kategori Sangat Tinggi (ST), terutama pada aspek produksi, prasarana,

pengendalian kesehatan, dan penyuluhan. Namun, keberlanjutan capaian tersebut memerlukan strategi lanjutan berupa intensifikasi pertanian berbasis teknologi, penguatan kawasan pertanian prioritas, peningkatan akses pembiayaan, perbaikan rantai pasok, serta percepatan modernisasi untuk mengatasi keterbatasan lahan dan tantangan wilayah kepulauan.

28. Kehutanan

Pelaksanaan urusan kehutanan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau Pelaksanaan urusan kehutanan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan provinsi meliputi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung lintas Kabupaten/Kota, pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perlindungan dan pengamanan hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan usaha kehutanan masyarakat. Kewenangan ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fungsi hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Dari sisi program penunjang urusan pemerintahan daerah, kinerja pelayanan kehutanan menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh unit KPHP di Provinsi Kepulauan Riau meliputi Karimun 84,5, Batam 89,25, Lingga 86,67, Tanjungpinang–Bintan 86,67, Natuna 88,23, dan Anambas 85,00 seluruhnya mencapai target tahunan dengan status capaian Sangat Tinggi (ST). Capaian ini mencerminkan bahwa layanan pengelolaan dan perlindungan hutan oleh unit KPHP telah berjalan efektif, responsif, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta pemangku kepentingan di wilayah kerja masing-masing.

Pada Program Pengelolaan Hutan, indikator persentase tutupan lahan berhutan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berhasil dipertahankan sebesar 100,00 persen sesuai target RPJMD. Selain itu, upaya perlindungan kawasan hutan dari perambahan dan penebangan liar menunjukkan capaian sangat tinggi di seluruh unit KPHP, antara lain Unit I Karimun 22,51 persen, Unit II Batam 19,41 persen, Unit III Lingga 14,25 persen, Unit IV Tanjungpinang–Bintan 33,01 persen, Unit V Natuna 14,17 persen (91,09 persen dari target), dan Unit VI Anambas 31,10 persen. Pada aspek pemberdayaan masyarakat, nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat hutan mencapai 1,186 miliar rupiah atau 100 persen dari target, menunjukkan kontribusi kehutanan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Secara keseluruhan, kinerja urusan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diukur melalui sejumlah indikator yang tersebar pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, program pengelolaan hutan, serta program pendidikan,

pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat kehutanan. Hampir seluruh indikator berada pada kategori Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN KEHUTANAN								
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) KPHP UNIT I KARIMUN	Indeks	85,3	0	84,25	84,5	100,00	ST	99,06
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) KPHP UNIT II BATAM	Indeks	85,3	0	84,25	89,25	100,00	ST	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) KPHP UNIT III LINGGA	Indeks	85,3	0	84,25	86,67	100,00	ST	100,00
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) KPHP UNIT IV TANJUNGPINANG-BINTAN	Indeks	85,3	0	84,25	86,67	100,00	ST	100,00
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) (KPHP UNIT V NATUNA	Indeks	85,3	0	84,25	88,23	100,00	ST	100,00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) (KPHP UNIT VI ANAMBAS	Indeks	85,29	0	84,25	85,00	100,00	ST	99,66
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
1	Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
2	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (persen) KPHP UNIT I KARIMUN	persen	32,50	20	22,50	22,51	100,00	ST	69,26
3	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (persen) KPHP UNIT II BATAM	persen	34,90	16,67	17,00	19,41	100,00	ST	55,62
4	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (persen) KPHP UNIT III LINGGA	persen	32,78	9,78	11,22	14,25	100,00	ST	43,47
5	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (persen)	persen	33,32	13	17,66	33,01	100,00	ST	99,07

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	KPHP UNIT IV TANJUNGPINANG-BINTAN								
6	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (persen) KPHP UNIT V NATUNA	persen	31,69	13,33	15,56	14,17	91,09	ST	44,71
7	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (persen) KPHP UNIT VI ANAMBAS	persen	39,88	17,75	22,80	31,10	100,00	ST	77,98
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
8	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan (SBM/Milyar Rupiah)	SBM/Milyar Rupiah	1,201	1,116	1,175	1,186	100,00	ST	98,75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2026

Kinerja Urusan Kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum menunjukkan capaian yang baik, terutama pada indikator pembinaan, pengelolaan, dan perlindungan kawasan hutan. Capaian tinggi terlihat pada aspek tata kelola administrasi, penyusunan dokumen perencanaan kehutanan, pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kehutanan di seluruh unit KPHP. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi pelayanan publik, koordinasi kelembagaan, dan pengelolaan kehutanan lintas wilayah telah berjalan relatif efektif.

Faktor pendorong utama capaian kinerja tersebut adalah kuatnya dukungan regulasi dan kebijakan nasional, khususnya terkait perhutanan sosial, perlindungan kawasan hutan, serta pengendalian perambahan dan penebangan liar. Implementasi program perhutanan sosial mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara legal dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kelompok masyarakat hutan. Selain itu, koordinasi yang cukup baik antara pemerintah provinsi, unit KPH, dan pemerintah pusat turut memperkuat pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kehutanan.

Di sisi lain, kinerja urusan kehutanan masih menghadapi sejumlah faktor penghambat struktural. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya polisi hutan dan penyuluh kehutanan, menyebabkan pengawasan kawasan hutan belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah. Kondisi geografis Kepulauan

Riau yang bercorak kepulauan dengan sebaran kawasan hutan di pulau-pulau kecil juga meningkatkan kompleksitas pengawasan dan pengelolaan, baik dari sisi logistik maupun biaya operasional.

Tantangan ke depan semakin kompleks dengan adanya tekanan terhadap kawasan hutan akibat alih fungsi lahan, aktivitas ekonomi pesisir, serta degradasi ekosistem seperti mangrove dan hutan pantai. Ancaman perubahan iklim, abrasi, serta potensi kebakaran lahan turut memengaruhi keberlanjutan fungsi hutan. Di samping itu, kapasitas kelompok tani hutan dan pelaku perhutanan sosial dalam mengelola hasil hutan bukan kayu masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan hutan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan arah yang positif dengan dominasi capaian indikator pada kategori sangat tinggi. Namun demikian, keberlanjutan capaian tersebut memerlukan penguatan pengawasan kawasan hutan, peningkatan kapasitas SDM kehutanan, percepatan rehabilitasi hutan dan mangrove, serta pengembangan perhutanan sosial berbasis usaha produktif. Langkah-langkah strategis tersebut menjadi kunci untuk menjaga fungsi ekologis hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pemerintah provinsi meliputi sub-urusan geologi, mineral dan batubara, energi baru terbarukan, serta ketenagalistrikan. Urusan ini diarahkan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya energi dan mineral yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan energi daerah, serta mendukung pembangunan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan.

Kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan capaian yang bervariasi antar sub-urusan. Pada aspek tata kelola perangkat daerah, indikator penunjang seperti Nilai SAKIP Perangkat Daerah (predikat BB), Indeks Profesionalisme SDM sebesar 85 (97,70 persen dari target), dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,84 menunjukkan capaian sangat tinggi dan telah memenuhi target RKPD Tahun 2025. Pada sub-urusan geologi, persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan mencapai 18,18 persen dan telah memenuhi target tahunan RKPD, meskipun secara kumulatif terhadap target akhir RPJMD baru mencapai 19,05 persen. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemetaan dan perlindungan sumber daya air tanah di tingkat provinsi.

Sementara itu, pada sub-urusan mineral dan batubara, energi baru terbarukan, serta ketenagalistrikan, realisasi kinerja RKPD Tahun 2025 telah

tersedia. Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik tercatat 57 persen (100 persen dari target). Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer sebesar 15,43 persen (97,04 persen dari target), intensitas energi primer sebesar 136 SBM/miliar rupiah (100 persen dari target), dan rasio elektrifikasi mencapai 99,21 persen (100 persen dari target).

Secara keseluruhan, kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diukur melalui 8 indikator program yang tersebar pada program penunjang dan program teknis ESDM. Seluruh indikator menunjukkan capaian sangat tinggi (ST).

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	90	85,73	87,00	85	97,70	ST	94,44
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	87,80	87,35	87,55	91,84	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								
4	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan (persen)	persen	95,45	13,64	18,18	18,18	100,00	ST	19,05
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								
5	Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik (persen)	persen	68	55	57	57	100,00	ST	83,82
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN								
6	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (persen)	persen	20,2	15,43	15,90	15,43	97,04	ST	76,39
7	Intensitas energi primer (SBM/Milyar Rupiah)	SBM/Milyar Rupiah	134,4	136	135,70	136	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								
8	Rasio Elektrifikasi (persen)	persen	99,55	98,19	98,8	99,21	100,00	ST	99,66

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2026

Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang relatif baik pada indikator-indikator penunjang dan layanan dasar, khususnya pada aspek tata kelola perangkat daerah, kepuasan masyarakat, serta pemetaan dan pengelolaan sumber daya geologi. Capaian indikator-indikator tersebut mencerminkan bahwa fungsi regulasi, fasilitasi, dan koordinasi pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan ESDM telah berjalan cukup efektif, terutama pada aspek pelayanan publik dan administrasi teknis.

Faktor pendorong utama capaian kinerja tersebut antara lain meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur ESDM, penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, serta pemanfaatan sistem perizinan dan pengawasan berbasis digital. Pada subsektor ketenagalistrikan dan geologi, dukungan kebijakan nasional serta komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan energi dan perlindungan sumber daya air tanah turut berkontribusi terhadap tercapainya target indikator tahunan.

Di sisi lain, capaian kinerja pada beberapa indikator strategis masih menghadapi tantangan struktural. Karakteristik geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan menyebabkan penyediaan dan pemerataan akses energi menghadapi kendala teknis dan biaya logistik yang tinggi. Kondisi ini berdampak pada upaya peningkatan porsi energi baru terbarukan, pelayanan kelistrikan di pulau-pulau kecil, serta pengawasan kegiatan pertambangan.

Tantangan utama ke depan adalah masih terbatasnya investasi dan infrastruktur pendukung energi baru terbarukan, pemanfaatan potensi energi surya, angin, dan biomassa yang belum optimal, serta keterbatasan SDM teknis pengawasan di bidang mineral, batubara, dan ketenagalistrikan. Selain itu, penguatan sistem pendataan dan pelaporan kinerja tetap diperlukan agar evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif

Secara umum, kinerja Urusan ESDM di Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan arah yang positif pada aspek tata kelola dan pelayanan, namun masih memerlukan penguatan pada indikator-indikator strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan energi dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Ke depan, peningkatan kinerja urusan ESDM perlu diarahkan pada percepatan pengembangan energi terbarukan, pemerataan akses energi di wilayah kepulauan, penguatan kapasitas pengawasan, serta perbaikan sistem pendataan dan pelaporan kinerja agar evaluasi RKPD dapat dilakukan secara lebih akurat dan berkelanjutan.

30. Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup kewenangan pada suburusan: (1) Perizinan dan Pendaftaran

Perusahaan; (2) Sarana Distribusi Perdagangan; (3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (4) Pengembangan Ekspor; serta (5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Kewenangan ini menempatkan pemerintah provinsi sebagai koordinator dan fasilitator utama dalam menjaga kelancaran distribusi barang, stabilitas harga, peningkatan daya saing perdagangan, serta perlindungan konsumen lintas Kabupaten/Kota.

Kinerja urusan perdagangan Provinsi Kepulauan Riau secara umum menunjukkan capaian yang baik, terutama pada indikator penunjang tata kelola dan pelayanan publik. Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah mencapai 97,84 persen dari target, Nilai SAKIP Perangkat Daerah tetap berada pada predikat BB, serta Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 100 persen dari target. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan program perdagangan, serta efektivitas pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam mendukung aktivitas perdagangan daerah.

Pada indikator substantif perdagangan, Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 99,01 persen dari target, menunjukkan bahwa upaya penguatan kapasitas pelaku usaha berjalan sesuai rencana. Persentase Fasilitasi Pengembangan Ekspor tercapai 100 persen, menandakan optimalnya dukungan pemerintah provinsi terhadap aktivitas ekspor. Indeks Tertib Niaga mencapai 100 persen dari target, serta Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi mencapai 100 persen dari target. Namun demikian, indikator Koefisien Variasi Harga antarwilayah tingkat provinsi menunjukkan capaian 18,97 persen (kategori sangat rendah), yang mengindikasikan masih adanya disparitas harga barang kebutuhan pokok antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

Secara keseluruhan, kinerja indikator program pembangunan pada urusan perdagangan ditunjukkan melalui 8 indikator yang tersebar pada beberapa program, meliputi program penunjang, peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, serta promosi produk dalam negeri. Mayoritas indikator berada pada kategori sangat tinggi.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PERDAGANGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	87	85,89	86,75	84,88	97,84	ST	97,56
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	87,31	86,71	86,8	89,26	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
4	Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri (persen)	persen	2,64	1,64	2,03	2,01	99,01	ST	76,14
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING								
5	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (persen)	persen	5,58	1,64	5,64	10,21	18,97	SR	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
6	Persentase Fasilitasi Pengembangan Ekspor (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen								
7	Indeks Tertib Niaga (Indeks)	Indeks	81-100,00	61,5	61-80	71,19	100,00	ST	
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri								
8	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi (persen)	persen	55	20	30	35	100,00	ST	63,64

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2026

Kinerja Urusan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang relatif baik pada sebagian besar indikator pembinaan, fasilitasi, dan

pengendalian perdagangan. Indikator seperti profesionalisme perangkat daerah, nilai SAKIP, kepuasan masyarakat, fasilitasi pengembangan ekspor, indeks tertib niaga, serta promosi produk lokal berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, yang mencerminkan berjalannya fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan secara konsisten.

Faktor pendorong utama capaian tersebut adalah semakin kuatnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, instansi vertikal, serta pelaku usaha perdagangan. Pemanfaatan sistem informasi harga dan distribusi barang, pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha, fasilitasi ekspor, serta peningkatan kapasitas aparatur pengawas barang beredar turut mendukung stabilitas pasokan dan peningkatan kinerja perdagangan daerah.

Di sisi lain, beberapa indikator masih menghadapi hambatan, terutama pada aspek stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Tingginya koefisien variasi harga antarwilayah menunjukkan adanya ketimpangan distribusi dan tingginya biaya logistik antar-pulau. Ketergantungan pasokan barang dari luar daerah serta gangguan transportasi laut akibat cuaca juga berkontribusi terhadap fluktuasi harga di pasar daerah tertentu.

Tantangan ke depan dalam urusan perdagangan mencakup keterbatasan infrastruktur distribusi, belum meratanya fasilitas penyimpanan dan rantai dingin, serta rendahnya literasi perdagangan digital di kalangan pedagang kecil dan UMKM. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran barang ilegal, barang tanpa standar, dan produk impor non-prosedural masih memerlukan penguatan, mengingat luasnya wilayah pengawasan dan tingginya mobilitas barang lintas batas.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh pembinaan pelaku usaha, penguatan fasilitasi ekspor, promosi produk lokal, serta sistem informasi perdagangan yang semakin baik. Namun, kinerja tersebut masih dibatasi oleh tantangan logistik wilayah kepulauan, ketimpangan harga antarwilayah, dan keterbatasan infrastruktur perdagangan. Ke depan, diperlukan penguatan sistem distribusi intra-provinsi, modernisasi pasar rakyat, percepatan digitalisasi perdagangan, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan perlindungan konsumen agar kinerja perdagangan semakin merata.

31. Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Selanjutnya, berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perindustrian yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi meliputi

penetapan rencana pembangunan industri provinsi, penerbitan izin usaha industri (IUI) besar, penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri besar, penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, penyampaian laporan informasi industri, serta pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kinerja urusan perindustrian Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang sangat baik pada sebagian besar indikator. Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas pada tahun 2025 mencapai 6,82 persen dari target 7 persen dengan tingkat capaian target sebesar 97,43 persen dan tingkat capaian kinerja RPJMD 100,00 persen. Selain itu, proporsi jumlah industri kecil dan menengah (IKM) menunjukkan capaian 100 persen dari target tahunan, mencerminkan meningkatnya peran IKM dalam struktur industri daerah.

Pada aspek pengendalian dan tata kelola industri, indikator persentase pengawasan izin usaha industri telah mencapai target secara penuh dengan realisasi 0,20 persen dari target 0,20 persen (capaian 100 persen), menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan industri berjalan sesuai ketentuan. Selanjutnya, dalam pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, jumlah dokumen informasi industri yang komprehensif telah terealisasi sebanyak 1 dokumen sesuai target (100 persen), yang mendukung ketersediaan data industri sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan industri daerah.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perindustrian ditunjukkan melalui 4 indikator yang tersebar pada beberapa program, yaitu perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri, serta pengelolaan sistem informasi industri. Seluruh indikator tersebut berada pada kategori sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan efektif dan selaras dengan target RPJMD serta RKPD tahun 2025.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PERINDUSTRIAN								
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas (persen)	persen	7	6,64	7	6,82	97,43	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
2	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (persen)	persen	3,36	84,92	2,81	72,98	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								
3	Persentase Pengawasan Izin Usaha Industri (persen)	persen	9,26	0	0,20	0,20	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								
4	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2026

Kinerja Urusan Perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang relatif baik, terutama pada indikator pembinaan industri, fasilitasi perizinan usaha industri, serta penyediaan data dan informasi industri. Capaian ini mencerminkan berjalannya fungsi pemerintah provinsi dalam mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas dan peningkatan peran industri kecil dan menengah (IKM) sebagai penggerak ekonomi daerah. Pelaksanaan pengawasan izin usaha industri dan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) juga menunjukkan kinerja yang konsisten dan sesuai target.

Faktor pendorong utama capaian kinerja tersebut adalah posisi strategis Kepulauan Riau sebagai kawasan industri nasional, khususnya di Batam, Bintan, dan Karimun, yang didukung oleh keberadaan kawasan industri, pelabuhan internasional, dan fasilitas logistik. Dukungan kebijakan pusat melalui skema Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) turut memperkuat iklim investasi dan pertumbuhan industri. Selain itu, kolaborasi dengan kementerian teknis, asosiasi industri, dan lembaga pelatihan mendorong efektivitas pembinaan IKM dan peningkatan kapasitas pelaku industri.

Meskipun demikian, capaian kinerja masih dibatasi oleh sejumlah faktor penghambat struktural, terutama ketimpangan kapasitas antara industri besar dan IKM. Banyak IKM masih menghadapi keterbatasan teknologi produksi, rendahnya efisiensi, serta minimnya akses pembiayaan dan pasar. Di luar kawasan

industri utama, pelaku industri juga menghadapi keterbatasan sarana pendukung seperti mesin modern, fasilitas produksi bersama, dan layanan teknis industri.

Tantangan ke depan dalam pengembangan urusan perindustrian adalah rendahnya integrasi IKM ke dalam rantai pasok industri besar, keterbatasan bahan baku lokal, serta tingginya biaya logistik akibat karakteristik wilayah kepulauan. Selain itu, kesenjangan kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri manufaktur, khususnya industri berbasis teknologi dan hilirisasi, masih menjadi isu strategis. Tantangan lainnya adalah belum optimalnya adopsi digitalisasi industri dan penerapan standar mutu seperti SNI, sertifikasi halal, dan standar ekspor oleh sebagian besar IKM.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh keberadaan kawasan industri yang mapan, pertumbuhan sektor industri pengolahan, serta pembinaan dan pengawasan yang berjalan efektif. Namun, peningkatan kinerja ke depan memerlukan penguatan peran IKM melalui modernisasi teknologi, pengembangan sentra industri dan layanan teknis, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta penguatan kemitraan antara industri besar dan IKM.

32. Transmigrasi

Urusan transmigrasi merupakan salah satu urusan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran undang-undang tersebut, pemerintah provinsi memiliki kewenangan di bidang transmigrasi yang meliputi: pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi, penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi, serta pengembangan satuan permukiman transmigrasi pada tahap pemantapan.

Kinerja urusan transmigrasi pada tahun berjalan ditunjukkan melalui indikator Persentase bidang lahan/kawasan transmigrasi yang tertata. Berdasarkan data, realisasi tahun 2024 mencapai 25 persen, dengan target tahun 2025 sebesar 34,4 persen. Sementara itu, realisasi kinerja RKPD Tahun 2025 tercatat sebesar 33,3 persen atau setara dengan 96,80 persen dari target, sehingga secara umum capaian indikator tergolong tinggi dan menunjukkan kemajuan dalam penataan lahan kawasan transmigrasi.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan transmigrasi ditunjukkan melalui 1 (satu) indikator utama. Berdasarkan hasil capaian tersebut, indikator urusan transmigrasi berada pada kategori sangat tinggi, dengan tingkat capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 tercatat sebesar 100 persen.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN TRANSMIGRASI								
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI								
1	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:persen)	persen	33,3	25	34,4	33,3	96,80	ST	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2026

Kinerja Urusan Transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang relatif baik, khususnya pada indikator penataan bidang lahan/kawasan transmigrasi. Realisasi kinerja RKPD Tahun 2025 telah mencapai 33,3 persen dari target 34,4 persen atau setara dengan 96,80 persen, sehingga secara umum berada pada kategori sangat tinggi. Capaian ini mencerminkan bahwa fungsi koordinasi, fasilitasi, dan perencanaan kawasan transmigrasi oleh pemerintah provinsi telah berjalan cukup efektif sesuai kewenangannya.

Faktor pendorong utama capaian kinerja tersebut adalah terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta pemerintah Kabupaten/Kota. Dukungan regulasi, pedoman teknis, dan sinkronisasi perencanaan kawasan transmigrasi lintas wilayah turut memperkuat proses penataan lahan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dan pengalaman pengelolaan kawasan transmigrasi yang telah ada menjadi modal penting dalam mendorong capaian indikator.

Meskipun capaian relatif tinggi, kinerja urusan transmigrasi masih dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat, terutama keterbatasan ketersediaan lahan yang layak dan berstatus clear and clean. Karakteristik wilayah Kepulauan Riau yang didominasi pulau-pulau kecil dengan daya dukung lingkungan terbatas menyebabkan penyiapan lahan transmigrasi memerlukan waktu dan proses yang lebih kompleks, termasuk penyelesaian status lahan dan potensi tumpang tindih dengan kawasan lain.

Tantangan utama pengembangan transmigrasi ke depan adalah keterbatasan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi, seperti akses jalan, listrik, air bersih, serta sarana pendukung ekonomi. Kondisi geografis kepulauan juga berdampak pada tingginya biaya logistik dan keterbatasan akses pasar, sehingga menghambat percepatan peningkatan kesejahteraan transmigran. Di sisi lain, minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi masih relatif

rendah, baik karena faktor ekonomi maupun persepsi terhadap keberlanjutan usaha di kawasan transmigrasi.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan hasil yang cukup baik dan mendekati target yang ditetapkan, didukung oleh koordinasi lintas pemerintahan dan kapasitas aparatur yang memadai. Namun, keberlanjutan dan peningkatan kinerja masih memerlukan penguatan pada aspek penyediaan lahan legal, pembangunan infrastruktur kawasan, pendampingan ekonomi transmigran, serta strategi pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan.

33. Unsur Penunjang Perencanaan

Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam kerangka tersebut, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah. Urusan ini berfungsi sebagai instrumen utama untuk memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah.

Berdasarkan data kinerja, penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan menunjukkan capaian yang relatif baik pada indikator-indikator utama. Nilai SAKIP Perangkat Daerah perencanaan berada pada predikat A, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 91,25, serta Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah tercatat sebesar 82,94 dengan capaian di atas target. Selain itu, indikator perencanaan dan pengendalian seperti keselarasan dokumen perencanaan mencapai 100 persen, capaian kinerja program RPJMD berstatus sangat tinggi, persentase keselarasan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota dengan provinsi mencapai 95,35 persen, serta capaian indikator kinerja utama daerah sebesar 79,23 persen. Sementara itu indikator penurunan nilai risiko daerah melalui penerapan manajemen risiko belum terealisasi (0 persen).

Masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal atau belum terisi, khususnya pada indikator koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lintas bidang pemerintahan. Beberapa indikator seperti penerapan manajemen risiko pada sebagian mitra bidang, dukungan program prioritas nasional, serta sebagian keselarasan program perangkat daerah menunjukkan variasi capaian, meskipun sebagian besar indikator lainnya telah mencapai 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fungsi perencanaan utama telah berjalan baik, penguatan integrasi lintas bidang dan konsistensi

implementasi perencanaan masih perlu terus ditingkatkan agar seluruh indikator dapat mencapai target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Penunjang Perencanaan di Provinsi Kepulauan Riau diukur melalui 26 indikator yang tersebar pada fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah. Dari keseluruhan indikator tersebut, mayoritas berada pada kategori Sangat Tinggi, sementara sebagian kecil indikator masih berstatus Sedang dan terdapat indikator yang berstatus Sangat Rendah karena belum terealisasi.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PERENCANAAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	A	BB	A	A	100,00	ST	A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	93,00	90,09	90,50	91,25	100,00	ST	98,12
3	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	80,98	78,23	78,48	82,94	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
4	Capaian Kinerja Program RPJMD (Predikat)	Predikat	-	ST	ST	ST	100,00	ST	100,00
5	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kab/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi (persen)	persen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
6	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (persen)	persen	100,00	60	80	79,23	99,04	ST	79,23
7	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD (persen)	persen	81,63	0	71,42	95,35	100,00	ST	100,00
8	Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan	persen	4,76	0	16,67	NA	NA	NA	NA

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	Menejemen Risiko (persen)								
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
9	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Pemerintaan dan Pembangunan Manusia (persen)	persen	0	0	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
10	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persen)	persen	0	0	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
11	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persen)	persen	100,00	0	76,19	76,19	100,00	ST	76,19
12	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Nilai)	Nilai	48,94	45,94	47,97	47,97	100,00	ST	98,02
13	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persen)	persen	100,00	0	72,29	72,29	100,00	ST	72,29
14	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (persen)	persen	100,00	0	22,00	22	100,00	ST	22,00
15	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (persen)	persen	0	0	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
16	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra	persen	0	0	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	Bidang Perekonomian dan SDA (persen)								
17	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
18	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Nilai)	Nilai	49,83	46,83	48,08	48,08	100,00	ST	96,49
19	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (persen)	persen	22,03	0,00	18,64	18,64	100,00	ST	84,61
20	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (persen)	persen	40	0	20	20	100,00	ST	50,00
21	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	persen	0	0	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
22	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	persen	0	0	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
23	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	persen	100,00	0	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
24	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Nilai)	Nilai	48	45	46,89	46,89	100,00	ST	97,69
25	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	persen	63	0	52	52	100,00	ST	82,54

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
26	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (persen)	persen	100,00	0	86	86	100,00	ST	86,00

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2026

Kinerja Urusan Penunjang Perencanaan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum menunjukkan capaian yang sangat tinggi, khususnya pada indikator penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah. Penyusunan dokumen strategis seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah, serta laporan monitoring dan evaluasi pembangunan telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi perencanaan daerah telah berjalan konsisten mengikuti siklus perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta mampu mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Faktor pendorong utama capaian kinerja tersebut adalah konsistensi pemerintah provinsi dalam menjalankan tahapan perencanaan pembangunan, mulai dari Musrenbang berjenjang, forum perangkat daerah, hingga konsultasi publik. Penerapan digitalisasi perencanaan melalui SIPD Perencanaan turut memperkuat integrasi data, mempercepat proses penyusunan dokumen, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan. Selain itu, koordinasi yang relatif baik antara Bappeda, perangkat daerah, Kabupaten/Kota, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menjaga keselarasan kebijakan dan prioritas pembangunan.

Meskipun capaian kinerja tergolong tinggi, masih terdapat faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi fungsi perencanaan. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya kualitas perencanaan berbasis data di seluruh perangkat daerah. Perbedaan kapasitas pengelolaan data sektoral, validitas data, serta keterbatasan pembaruan data pada sebagian OPD berdampak pada kualitas analisis permasalahan dan penetapan prioritas pembangunan. Selain itu, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran masih belum sepenuhnya optimal.

Tantangan ke depan dalam penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan semakin kompleks, terutama terkait integrasi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah pada karakteristik wilayah kepulauan. Keterbatasan SDM perencana fungsional di beberapa OPD dan Kabupaten/Kota menyebabkan kualitas dokumen perencanaan belum seragam. Di samping itu, pemanfaatan hasil

evaluasi pembangunan seperti LKPJ, LAKIP, dan laporan monitoring belum sepenuhnya dijadikan dasar utama dalam perbaikan kebijakan dan program.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Penunjang Perencanaan di Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan arah yang positif dan berperan penting dalam mendukung tata kelola pembangunan daerah yang terencana dan akuntabel. Capaian tersebut ditopang oleh keteraturan siklus perencanaan, digitalisasi melalui SIPD, serta koordinasi lintas sektor yang semakin baik, namun tetap memerlukan penguatan kapasitas SDM perencana, integrasi dan kualitas data perencanaan, serta konsistensi pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan.

34. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan merupakan bagian dari unsur penunjang pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka tersebut, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, merencanakan program dan anggaran litbang daerah, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan provinsi, serta mendorong dan melaksanakan inovasi daerah. Pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, yang berperan strategis dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan berbasis kajian ilmiah dan inovasi.

Kinerja penyelenggaraan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang sangat baik. Indeks Inovasi Daerah berada pada kategori Inovatif, mencerminkan komitmen daerah dalam pengembangan inovasi publik. Persentase hasil riset yang direkomendasikan telah mencapai 75 persen sesuai target tahun 2025, sementara persentase inovasi yang dilaporkan mencapai 70 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,33 persen. Selain itu, jumlah diseminasi hasil kelitbangan telah tercapai sepenuhnya sesuai target, yaitu sebanyak 20 karya. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi litbang tidak hanya menghasilkan kajian, tetapi juga mendorong inovasi dan penyebarluasan pengetahuan yang relevan bagi pembangunan daerah.

Kinerja indikator program pembangunan pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan melalui 4 indikator, dan seluruhnya berada pada kategori capaian sangat tinggi. Keempat indikator tersebut mencerminkan kinerja yang konsisten dalam aspek inovasi daerah, rekomendasi hasil riset, pelaporan inovasi, serta diseminasi hasil kelitbangan.

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
1	Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)	Indeks	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	100,00	ST	Inovatif
2	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan (persen)	persen	100,00	70	75	75	100,00	ST	75,00
3	Persentase Inovasi yang dilaporkan (persen)	persen	85	70	75	70	93,33	ST	82,35
4	Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan (Karya)	Karya	20	20	20	20	100,00	ST	100,00

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2026

Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang cukup baik, khususnya pada indikator penyusunan kajian pembangunan, inovasi daerah, dan fasilitasi kegiatan penelitian. Hal ini tercermin dari status Indeks Inovasi Daerah yang berada pada kategori inovatif serta terpenuhinya target diseminasi hasil kelitbangan sebanyak 20 karya.

Faktor pendorong utama capaian tersebut adalah meningkatnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas inovasi. Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi publik melalui kompetisi inovasi, fasilitasi replikasi inovasi, serta penguatan Sistem Inovasi Daerah turut memperkuat peran litbang. Selain itu, digitalisasi pengelolaan riset dan mulai terintegrasinya hasil kajian ke dalam sistem perencanaan mendukung peningkatan kualitas administrasi, pelaporan, dan pemanfaatan data ilmiah dalam perencanaan pembangunan.

Namun demikian, kinerja litbang masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia fungsional peneliti. Jumlah peneliti daerah yang terbatas menyebabkan sebagian kajian belum sepenuhnya bersifat riset terapan yang mendalam dan berorientasi pada pemecahan masalah strategis pembangunan. Kondisi ini juga berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh perangkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Urusan Litbang dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa penguatan kolaborasi multipihak, dukungan kebijakan inovasi daerah, serta mekanisme penyusunan kajian pembangunan yang telah

berjalan, sementara faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran dan SDM peneliti serta pemanfaatan hasil kajian yang belum optimal masih perlu diperkuat pada periode berikutnya.

35. Unsur Penunjang Keuangan

Urusan Keuangan merupakan salah satu urusan penunjang pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Di Provinsi Kepulauan Riau, fungsi keuangan daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

Kinerja Urusan Keuangan yang dilaksanakan BKAD Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang sangat baik pada sebagian besar indikator. Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilaksanakan tepat waktu dengan capaian 100,00 persen, demikian pula pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten/Kota dan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang seluruhnya terealisasi tepat waktu. Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu juga mencapai 100 persen. Selain itu, realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar mencapai 93,89 persen dengan tingkat capaian 100 persen terhadap target, serta indeks kepuasan masyarakat berada pada kategori sangat tinggi dengan capaian 100 persen terhadap target.

Urusan keuangan daerah yang dilaksanakan Bapenda Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang secara umum sangat baik, khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah berhasil mempertahankan predikat BB, sesuai dengan target tahun 2025, dengan tingkat capaian 100% dan progres terhadap target RPJMD mencapai 75%. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan kinerja yang sangat positif, dengan realisasi sebesar 91,81, melampaui target yang ditetapkan sebesar 84. Capaian ini tidak hanya memenuhi target tahunan (100%), tetapi juga telah mencapai target RPJMD secara penuh (100%), yang mengindikasikan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada indikator Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD, realisasi tahun 2025 mencapai 17%, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dan melampaui target sebesar 9,93%. Dengan

capaian 100% terhadap target tahunan dan 99,07% terhadap target RPJMD, hal ini menunjukkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan non-pajak yang semakin baik. Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah juga menunjukkan kinerja optimal dengan realisasi sebesar 84,52, melampaui target 75. Indikator ini telah mencapai 100% baik terhadap target tahunan maupun RPJMD, yang mencerminkan peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, indikator Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan telah tercapai sepenuhnya (100%), baik pada target tahunan maupun RPJMD, yang menunjukkan tata kelola pendapatan daerah yang terjaga dengan baik. Namun demikian, terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah. Realisasi tahun 2025 tercatat sebesar -18,59%, jauh di bawah target -8,03%, sehingga capaian hanya 0% dengan status sangat rendah (SR). Hal ini menunjukkan adanya kontraksi signifikan dalam penerimaan pajak daerah yang perlu menjadi perhatian dan evaluasi mendalam. Di sisi lain, indikator Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital menunjukkan kemajuan, dengan realisasi sebesar 25%, melampaui target 20%. Capaian terhadap target tahunan mencapai 100%, meskipun secara kumulatif terhadap RPJMD baru mencapai 25%, sehingga masih perlu percepatan implementasi digitalisasi. Terakhir, Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih mencapai 28%, sedikit melampaui target 27%. Indikator ini telah mencapai 100% terhadap target tahunan dan 93,33% terhadap target RPJMD, yang menunjukkan efektivitas dalam upaya penagihan piutang pajak daerah.

Kinerja Urusan Keuangan pada tahun pelaporan ditunjukkan melalui 16 indikator program yang tersebar pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, program pengelolaan keuangan daerah, dan program pengelolaan barang milik daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah. Dari keseluruhan indikator tersebut, sebanyak 15 indikator berada pada status sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator berada pada status sangat rendah, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN KEUANGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	84,68	0,00	83,11	82,10	98,78	ST	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	90,05	88,53	89,05	89,05	100,00	ST	98,89
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
4	Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
5	Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tepat Waktu	Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
6	Persentase Realisai Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Dasar	92,94	91,51	91,68	93,89	100,00	ST	100,00
7	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
8	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Tetap	3	0	3	2,78	92,67	ST	92,67
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	BB	BB	BB	100,00	ST	75,00
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	84	84	91,81	100,00	ST	100,00
11	Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	%	17,16	10,30	9,93	17	100,00	ST	99,07
12	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	(Indeks)	80,55	74,25	75	84,52	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
13	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
14	Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	2,32	8,96	-8,03	-18,59	0	SR	0
15	Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	%	100	20	20	25	100,00	ST	25,00
16	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	30	27	27	28	100,00	ST	93,33

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

Kinerja Urusan Keuangan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang secara umum sangat baik, khususnya pada indikator ketepatan waktu penetapan APBD, evaluasi APBD Kabupaten/Kota, serta penyampaian laporan keuangan daerah. Seluruh indikator terkait ketepatan waktu pengelolaan dan pelaporan keuangan terealisasi 100 persen, mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar mencapai 93,89 persen sesuai target yang ditetapkan, sehingga mendukung keberlanjutan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Faktor pendorong utama capaian kinerja tersebut adalah konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penganggaran berbasis kinerja, serta implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan melalui SIPD Keuangan. Penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan kas, hingga penyusunan laporan keuangan dilakukan secara lebih sistematis dan tepat waktu. Selain itu, koordinasi yang kuat antara BPKAD, BP2RD, Bappeda, Inspektorat, serta instansi pengawas eksternal seperti BPK dan BPKP turut memperkuat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun demikian, beberapa aspek kinerja masih menghadapi hambatan, terutama pada pengelolaan aset daerah. Indikator persentase penambahan nilai aset tetap menunjukkan capaian 92,67 persen dari target, yang mengindikasikan masih adanya kendala dalam pencatatan, inventarisasi, dan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah. Selain itu, ketimpangan kapasitas SDM pengelola keuangan antarperangkat daerah menyebabkan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan berbasis akrual dan penatausahaan aset belum sepenuhnya merata.

Tantangan utama dalam penyelenggaraan Urusan Keuangan adalah sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran serta pola penyerapan anggaran yang belum merata sepanjang tahun. Sebagian perangkat daerah masih menunjukkan kecenderungan penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun anggaran akibat keterlambatan pengadaan barang dan jasa serta penyesuaian administrasi. Di sisi lain, perubahan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya integrasi SIPD Perencanaan dan SIPD Keuangan, menuntut adaptasi teknis dan peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.

Capaian kinerja urusan keuangan daerah masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada pertumbuhan realisasi pajak daerah yang belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang melemah sehingga berdampak pada kemampuan bayar wajib pajak. Selain itu, basis data objek pajak yang belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi turut menghambat optimalisasi potensi pendapatan. Faktor lainnya adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak serta

belum optimalnya penagihan piutang. Di sisi internal, keterbatasan kapasitas SDM dan belum maksimalnya implementasi sistem digital juga menjadi kendala dalam pengelolaan pendapatan. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah yang belum sepenuhnya efektif turut memengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

36. Unsur Penunjang Kepegawaian

Penyelenggaraan unsur penunjang kepegawaian di daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka tersebut, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan manajemen ASN yang meliputi perencanaan kebutuhan dan formasi ASN, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN daerah, penetapan kenaikan pangkat, pengembangan kompetensi, serta pembinaan disiplin dan sistem merit. Fungsi kepegawaian diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara umum, kinerja urusan kepegawaian tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan stabil, dengan mayoritas indikator mencapai target yang ditetapkan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, seluruh indikator berada pada kategori sangat tinggi (ST). Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah mencapai predikat A, sesuai target RPJMD. Indeks Profesionalisme SDM juga meningkat signifikan menjadi 87,65, melampaui target tahunan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat pada BKD dan KORPRI mencapai 86,53 (99,78% dari target), serta pada UPTD Penilaian Kompetensi mencapai 84,50, yang menunjukkan kualitas layanan yang tetap terjaga dengan baik.

Pada Program Kepegawaian Daerah, capaian kinerja juga didominasi oleh hasil optimal. Indikator berbasis sistem merit, seperti pengadaan, mutasi, dan rotasi pegawai, seluruhnya mencapai atau melampaui target dengan capaian 100%, mencerminkan tata kelola kepegawaian yang semakin profesional dan transparan. Selain itu, indikator kinerja individu ASN juga sangat baik, terlihat dari tingginya persentase pegawai dengan nilai SKP baik (98,8%) serta rendahnya tingkat pelanggaran disiplin (99,89% ASN tidak menjalani hukuman disiplin). Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perhatian. Persentase ASN yang dibina karirnya hanya mencapai 87,31% dari target, sehingga belum optimal. Selain itu, persentase ASN yang dinilai kompetensi manajerial dan sosial kultural mencapai 92,20%, meskipun masuk kategori sangat tinggi, namun masih di bawah target penuh.

Secara keseluruhan, kinerja unsur penunjang kepegawaian diukur melalui 11 indikator yang tersebar pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Program Kepegawaian Daerah. Dari indikator-indikator

tersebut, 11 indikator berada pada kategori sangat tinggi (ST) dan 1 indikator berada pada kategori Tinggi (T), yaitu Persentase ASN yang dibina Karirnya.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN KEPEGAWAIAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	A	BB	A	A	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks) BKD dan KORPRI	Indeks	85,07	84,68	79,58	87,65	100,00	ST	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) BKD dan KORPRI	Indeks	86,97	91,02	86,72	86,53	99,78	ST	99,49
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	Indeks	83,57	80,57	81,07	84,50	100,00	ST	100,00
5	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks) UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	Indeks	87,33	-	78,50	84,71	100,00	ST	97,00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
6	Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit (Nilai)	Nilai	39,75	38,00	38,25	40,00	100,00	ST	100,00
7	Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit (Nilai)	Nilai	32,00	20,00	22,00	40,00	100,00	ST	100,00
8	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (persen)	persen	98,63	-	98,58	98,8	100,00	ST	100,00
9	Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat (persen)	persen	99,85	-	99,50	99,89	100,00	ST	100,00
10	Persentase ASN yang dibina Karirnya (persen)	persen	5,99	-	5,15	5,23	87,31	T	87,31
11	Persentase ASN yang dinilai kompetensi manajerial dan sosial kultural (persen)	persen	29,76	-	8,31	27,44	92,20	ST	92,20

Sumber: Badan Kepegawaian dan Korpri, 2026

Kinerja Urusan Kepegawaian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum menunjukkan capaian yang tinggi, terutama pada indikator manajemen ASN, pelayanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, serta penerapan sistem merit. Capaian ini tercermin dari predikat kinerja perangkat daerah yang baik, meningkatnya indeks profesionalisme ASN, serta tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa pengelolaan kepegawaian telah berjalan relatif efektif dan selaras dengan regulasi nasional mengenai manajemen ASN.

Faktor pendorong utama capaian kinerja kepegawaian adalah penguatan penerapan sistem merit yang ditunjang oleh pemanfaatan sistem administrasi kepegawaian berbasis digital, seperti SAPK BKN, e-kinerja, dan sistem layanan kepegawaian daring lainnya. Selain itu, meningkatnya kapasitas aparatur pengelola kepegawaian, dukungan kebijakan pusat, serta kerja sama dengan instansi pembina seperti BKN dan LAN turut memperkuat kualitas pengelolaan ASN. Pelaksanaan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional juga berkontribusi pada peningkatan profesionalisme dan kompetensi ASN.

Meskipun capaian kinerja tergolong tinggi, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi urusan kepegawaian. Hambatan utama adalah ketimpangan distribusi dan komposisi ASN antarperangkat daerah, khususnya kekurangan jabatan fungsional strategis dan teknis, sementara di sisi lain masih terdapat kelebihan jabatan administratif. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN belum merata akibat keterbatasan anggaran pelatihan dan belum optimalnya pemanfaatan pembelajaran berbasis digital di seluruh OPD.

Tantangan ke depan dalam pengelolaan kepegawaian antara lain adalah penguatan manajemen kinerja ASN yang lebih objektif dan terintegrasi. Implementasi e-kinerja di beberapa OPD belum sepenuhnya seragam, sehingga penilaian kinerja individu belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Di samping itu, proses administrasi kepegawaian tertentu masih bergantung pada dokumen fisik, serta tingkat literasi digital ASN yang bervariasi menjadi tantangan dalam percepatan transformasi digital layanan kepegawaian.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Urusan Kepegawaian di Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa penerapan sistem merit, digitalisasi layanan kepegawaian, peningkatan kapasitas aparatur, serta koordinasi yang kuat dengan instansi pembina. Namun demikian, capaian tersebut masih dibatasi oleh faktor penghambat berupa ketimpangan komposisi ASN, belum meratanya pengembangan kompetensi, serta tantangan dalam penguatan manajemen kinerja dan literasi digital. Ke depan, diperlukan strategi penataan ASN berbasis kebutuhan organisasi, percepatan digitalisasi, serta penguatan budaya kinerja dan inovasi ASN untuk mendukung birokrasi yang profesional.

37. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja fungsi Pendidikan dan pelatihan sudah memiliki capaian sangat baik, karena indikator program pada tahun 2025 telah terealisasi. Indikator yang di targetkan diantaranya Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional sebesar 27,81 persen, Persentase

Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan sebesar 42,39 persen, Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi sebesar 22 persen, dan Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis sebesar 54,28 persen.

Fungsi Pendidikan dan pelatihan memiliki 4 indikator program, dengan seluruh indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	BB	BB	BB	100,00	ST	75,00
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	87,68	84,68	85,18	88,33	100,00	ST	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,32	91,02	91,07	91,09	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
4	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (persen)	persen	100,00	-	12,72	27,81	218,63	ST	27,81
5	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (persen)	persen	51,55	-	42,39	42,39	100,00	ST	82,23
6	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (persen)	persen	100,00	-	11,25	22	195,56	ST	22,00
7	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan	persen	44,08	-	34,78	54,26	156,01	ST	123,09

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	kompetensi teknis (persen)								

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Pada indikator penunjang urusan pemerintahan daerah, seperti Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan predikat BB, Indeks Profesionalisme SDM sebesar 88,33, dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,09, capaian tergolong sangat tinggi dan mencerminkan berfungsinya kelembagaan pendidikan dan pelatihan ASN secara administratif. Pada indikator pengembangan kompetensi ASN, capaian juga menunjukkan hasil sangat baik karena indikator pelatihan teknis, manajerial, dan sertifikasi kompetensi ASN telah terealisasi pada tahun berjalan.

Faktor pendorong capaian positif pada aspek kelembagaan antara lain adanya dukungan regulasi nasional di bidang pengembangan kompetensi ASN, penerapan sistem manajemen kinerja, serta koordinasi yang cukup baik antara perangkat daerah dengan lembaga pembina seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, pemanfaatan sistem administrasi dan pelaporan kinerja yang terintegrasi turut mendukung tercapainya indikator-indikator penunjang dengan kategori sangat tinggi.

Di sisi lain, capaian indikator pengembangan kompetensi ASN telah menunjukkan peningkatan, terlihat dari persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, teknis, manajerial, dan fungsional sebesar 27,81 persen, ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi sebesar 22 persen, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebesar 42,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaan dan kuota pelatihan mulai mampu mengakomodasi kebutuhan ASN di perangkat daerah.

Tantangan utama dalam urusan pendidikan dan pelatihan adalah pemetaan kebutuhan pelatihan berbasis jabatan dan kompetensi (Analisis Kebutuhan Diklat), ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan, serta jumlah widyaiswara dan instruktur kompeten. Selain itu, variasi kesiapan ASN dalam mengikuti pelatihan, khususnya pelatihan berbasis digital dan e-learning, juga memengaruhi efektivitas penyelenggaraan diklat dan capaian indikator pengembangan kompetensi.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh kuatnya aspek kelembagaan dan tata kelola

penunjang serta telah tercapainya indikator pengembangan kompetensi ASN. Ke depan, peningkatan kinerja memerlukan penguatan perencanaan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan, peningkatan alokasi anggaran diklat, optimalisasi metode pembelajaran digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pelatihan agar pengembangan profesionalisme ASN dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

38.Sekretariat DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Dalam pelaksanaan kewenangannya, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang relatif baik pada sebagian besar indikator. Nilai SAKIP Perangkat Daerah berhasil dipertahankan pada predikat BB dengan tingkat capaian 100,00 persen. Indeks Kepuasan Masyarakat juga mencapai target dengan realisasi sebesar 79,50 atau 100,00 persen dari target yang ditetapkan. Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, seluruh indikator utama seperti ketepatan penetapan Perda APBD, persentase partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui DPRD, serta persentase penetapan Raperda Tahun N, seluruhnya terealisasi 100 persen dan masuk kategori sangat tinggi. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar 83,14 dengan tingkat capaian 100 persen dan berstatus sangat tinggi.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD diukur melalui 6 indikator yang tersebar pada dua program utama. Dari keseluruhan indikator tersebut, mayoritas indikator berada pada kategori sangat tinggi dan telah mencapai target yang ditetapkan, khususnya indikator yang berkaitan langsung dengan dukungan terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	SEKRETARIAT DPRD								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	**ST**	100,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks	Indeks	80,00	76,00	78,00	79,50	101,92	**ST**	99,38
3	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	85,00	82,27	80,00	83,14	103,93	**ST**	97,81
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
4	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**ST**	100,00
5	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) (Persentase)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**ST**	100,00
6	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**ST**	100,00

Sumber: Sekretariat DPRD, 2026

Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau secara umum menunjukkan capaian yang tinggi, khususnya pada indikator dukungan administrasi, fasilitasi persidangan, penyediaan bahan rapat, serta pelayanan kesekretariatan bagi pimpinan dan anggota DPRD. Seluruh indikator utama pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, seperti ketepatan penetapan Perda APBD, penetapan Raperda, serta partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui DPRD, telah mencapai target 100,00 persen dengan status sangat tinggi. Capaian ini mencerminkan bahwa peran Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung utama pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD telah berjalan efektif.

Faktor pendorong utama capaian kinerja tersebut adalah profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan teknis dan administratif, mulai dari penyusunan risalah rapat, dokumentasi persidangan, fasilitasi rapat dan kunjungan kerja, hingga penyediaan bahan pembahasan secara tepat waktu. Koordinasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dengan alat kelengkapan dewan

(AKD), perangkat daerah, serta mitra kerja lainnya turut memperlancar pelaksanaan agenda DPRD. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan dokumentasi rapat semakin meningkatkan efektivitas dan akurasi layanan kesekretariatan.

Meskipun demikian, kinerja Sekretariat DPRD masih menghadapi beberapa faktor penghambat. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan SDM dengan kompetensi khusus di bidang legislasi, analisis kebijakan, dan tata kelola persidangan. Fungsi pendukung yang bersifat analitis, seperti penyusunan bahan pendalaman materi dan dukungan kebijakan bagi DPRD, belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja. Selain itu, Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah telah menunjukkan capaian sangat tinggi pada tahun berjalan, sehingga perhatian diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas kapasitas aparatur sekretariat.

Tantangan lain yang dihadapi Sekretariat DPRD adalah dinamika jadwal persidangan dan pembahasan kebijakan yang sangat bergantung pada kesiapan dokumen dari perangkat daerah. Perubahan agenda yang bersifat mendadak menuntut fleksibilitas tinggi dalam penyediaan dukungan administrasi. Di samping itu, sarana dan prasarana pendukung persidangan di beberapa ruang rapat masih perlu dimodernisasi, terutama terkait sistem audio visual, dokumentasi digital, dan dukungan rapat hybrid. Tantangan dalam publikasi dan penyebaran informasi kegiatan DPRD kepada masyarakat juga masih perlu ditingkatkan agar transparansi dan akuntabilitas kelembagaan semakin kuat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Urusan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau didorong oleh profesionalisme aparatur, koordinasi kelembagaan yang baik, serta keberhasilan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara tepat waktu. Namun demikian, capaian tersebut masih dibatasi oleh keterbatasan SDM analis dan profesional legislasi, dinamika jadwal persidangan, serta kebutuhan modernisasi sarana pendukung. Ke depan, peningkatan kinerja Sekretariat DPRD memerlukan penguatan kompetensi aparatur, optimalisasi digitalisasi layanan kesekretariatan, perbaikan manajemen dokumen dan publikasi, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah guna mendukung pelaksanaan fungsi DPRD yang semakin efektif dan akuntabel.

39. Sekretariat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 213, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan serta pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berperan sebagai unsur staf yang mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelayanan administratif, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Pelaksanaan tugas ini didukung oleh beberapa biro penunjang yang menangani urusan strategis seperti fasilitasi hukum, kesejahteraan rakyat, pemerintahan dan otonomi daerah, penataan organisasi, serta koordinasi pembangunan dan kerja sama daerah.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan hasil yang bervariasi antarprogram. Pada Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, indikator Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mencapai nilai 2,87 atau sebesar 100,00 persen dari target, dengan status capaian sangat tinggi. Selain itu, Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan mencapai 85 persen dan telah memenuhi target. Pada Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, realisasi target Persentase Produk Hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan mencapai 95 persen. Sementara itu, indikator pada Program Penataan Organisasi, Program Kesejahteraan Rakyat, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi telah mencapai target dengan status sangat tinggi, termasuk indikator efektivitas kebijakan kesejahteraan rakyat, penerapan tata laksana OPD, dan nilai komponen pelaporan kinerja pada evaluasi SAKIP.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diukur melalui 13 indikator yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Penataan Organisasi, serta Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dari keseluruhan indikator tersebut, seluruh indikator telah mencapai target dengan status sangat tinggi.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	SEKRETARIAT DAERAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	A	A	A	A	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	81,5	71	72,00	86,20	100,00	ST	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	86,25	84,65	84,90	85,32	100,00	ST	98,92
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
4	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan (Persentase)	persen	100,00	95	95	95	100,00	ST	95,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
5	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi Kebijakan	persen	100,00	90	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								
6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	persen	94	0	0	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								
7	Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)	Skor	2,25	1,75	2,17	2,17	100,00	ST	96,44
8	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)	Indeks	43,5	38,2	39,20	39,3	100,00	ST	90,34
9	Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)	persen	100,00	-	79,07	79,07	100,00	ST	79,07
10	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)	Nilai	12,3	11,77	11,89	11,92	100,00	ST	96,91
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								
11	Skor LPPD (Skor)	Skor	2,75	0	2,55	2,87	100,00	ST	100,00
12	Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan (Persentase)	persen	100,00	0	85	85	100,00	ST	85,00
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								
13	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Predikat)	Predikat	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	100,00	ST	100,00

Sumber: Sekretariat Daerah, 2026

Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian cukup baik, dengan sebagian besar indikator mencapai target sangat tinggi, khususnya pada urusan pemerintahan dan otonomi daerah, sementara indikator lainnya juga telah optimal. Peran Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan dan koordinasi administratif tetap berjalan, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi kerja sama daerah, serta pengoordinasian lintas perangkat daerah. Capaian positif terlihat pada indikator strategis yang berkaitan langsung dengan fungsi koordinatif dan fasilitatif Setda.

Faktor pendorong utama capaian kinerja tersebut adalah peran kelembagaan Sekretariat Daerah yang strategis sebagai simpul koordinasi kebijakan dan administrasi pemerintahan. Dukungan regulasi yang jelas, mekanisme rapat koordinasi yang berjalan rutin, serta keterlibatan aktif biro-biro di lingkungan Setda dalam memfasilitasi urusan hukum, pemerintahan, organisasi, dan kerja sama daerah turut memperkuat pelaksanaan tugas. Selain itu, dukungan pimpinan daerah dan meningkatnya penggunaan sistem administrasi berbasis elektronik membantu percepatan proses koordinasi dan pelayanan administratif lintas perangkat daerah.

Di sisi lain, capaian beberapa indikator tidak lagi menunjukkan status rendah, karena indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Kesejahteraan Rakyat, serta Program Penataan Organisasi telah terealisasi sesuai target. Realisasi kegiatan dan pelaksanaan kebijakan lintas sektor berjalan lebih baik sehingga mendukung peningkatan capaian indikator-indikator tersebut.

Tantangan utama yang dihadapi Sekretariat Daerah adalah kompleksitas koordinasi lintas biro dan lintas perangkat daerah yang memerlukan keselarasan kebijakan, data, dan pelaksanaan di lapangan. Perbedaan kapasitas antarperangkat daerah, dinamika perubahan kebijakan, serta keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi spesifik seperti analis kebijakan, perancang peraturan perundang-undangan, dan perencana organisasi menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas output kebijakan dan efektivitas koordinasi. Selain itu, digitalisasi administrasi yang belum sepenuhnya merata juga memengaruhi kecepatan dan konsistensi pelayanan kesekretariatan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Urusan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa peran strategis Setda dalam koordinasi pemerintahan, dukungan regulasi, serta fungsi fasilitasi kebijakan yang berjalan relatif baik. Namun demikian, peningkatan kinerja tetap memerlukan penguatan kapasitas SDM dan sinkronisasi lintas perangkat daerah agar kualitas koordinasi pemerintahan semakin efektif dan berkelanjutan.

40. Pengelolaan Penghubung

Kinerja penyelenggaraan pengelolaan penghubung daerah pada tahun berjalan menunjukkan capaian yang sangat baik pada sebagian besar indikator. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah mencapai target dengan persentase capaian 100 persen, serta keberhasilan pelaksanaan pelayanan penghubung yang meliputi pelayanan masyarakat Kepulauan Riau, promosi produk unggulan daerah, dan koordinasi pusat–daerah yang seluruhnya mencapai target 100 persen. Selain itu, capaian Nilai SAKIP perangkat daerah berada pada kategori baik dan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan, meskipun indikator Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah belum terealisasi secara optimal.

Secara keseluruhan, kinerja urusan Penghubung Daerah diukur melalui 6 indikator, yang tersebar pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pelayanan Penghubung. Dari jumlah tersebut, sebagian besar indikator berada pada status capaian sangat tinggi dan satu indikator dengan status SR dikarenakan realisasi tahun 2025 belum terdata.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Pengelolaan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PENGHUBUNG DAERAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai Sakip (Predikat)	Predikat	A	B	B	B	100,00	ST	100,00
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	74,4	0				SR	0,00
3	Indeks Kepuasaan Masyarakat (Indeks)	Indeks	90	87,03	87	87,03	100,00	ST	96,70
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								
2	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani (persen)	persen	100,00	12	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
3	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau (persen)	persen	100,00	12	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
4	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah (persen)	persen	100,00	12	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

Sumber: Badan Penghubung Daerah, 2026

Kinerja Urusan Pengelolaan Penghubung di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang relatif tinggi pada indikator fasilitasi hubungan kelembagaan, koordinasi antar-pemerintah, layanan keprotokolan, dokumentasi kegiatan pimpinan, serta pelaksanaan kerja sama strategis. Capaian ini mencerminkan bahwa fungsi penghubung telah berjalan efektif sebagai simpul komunikasi, representasi, dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, serta mitra eksternal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan diplomasi daerah.

Faktor pendorong utama capaian kinerja tersebut adalah tingginya intensitas koordinasi lintas instansi di tingkat nasional dan regional, yang mendorong peningkatan kapasitas aparatur penghubung dalam penyelenggaraan layanan keprotokolan dan hubungan kelembagaan. Pelaksanaan agenda strategis seperti rapat koordinasi dengan kementerian, fasilitasi kunjungan kerja pimpinan daerah, penyusunan bahan komunikasi pimpinan, serta penguatan kemitraan antardaerah turut mendukung capaian indikator. Selain itu, modernisasi layanan melalui pemanfaatan sistem informasi keprotokolan, manajemen undangan digital, dan dokumentasi elektronik memperkuat efektivitas tugas penghubung.

Meskipun capaian kinerja relatif baik, masih terdapat faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan urusan penghubung. Hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus di bidang keprotokolan, kehumasan, dan hubungan antar-lembaga. Aparatur penghubung dituntut memiliki keahlian dalam etika protokoler, penyusunan materi komunikasi pimpinan, serta koordinasi lintas institusi, namun pemerataan kompetensi dan jumlah pegawai di beberapa unit belum sepenuhnya seimbang sehingga memengaruhi kualitas layanan.

Tantangan signifikan lainnya berasal dari tingginya dinamika agenda pimpinan daerah dan instansi eksternal yang sering berubah secara mendadak, sehingga menuntut fleksibilitas, kecepatan respons, dan kesiapan logistik yang tinggi. Selain itu, karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan menimbulkan kendala transportasi, waktu tempuh, dan konektivitas antarwilayah. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan biaya dan waktu dalam pelaksanaan koordinasi serta fasilitasi kegiatan lintas daerah dan lintas pemerintahan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Urusan Pengelolaan Penghubung dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa profesionalisme aparatur, intensitas koordinasi kelembagaan, dukungan pimpinan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan keprotokolan dan hubungan eksternal. Namun capaian tersebut masih dibatasi oleh faktor penghambat dan tantangan seperti keterbatasan SDM spesialis, dinamika agenda yang tinggi, kendala logistik wilayah kepulauan, belum optimalnya sistem dokumentasi digital, serta keterbatasan anggaran operasional.

41. Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Perbatasan Daerah merupakan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada urusan pemerintahan umum dan kewenangan strategis daerah provinsi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. Pemerintah provinsi memiliki peran dalam koordinasi, perencanaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan, termasuk penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dan sinkronisasi kebijakan antarwilayah.

Kinerja penyelenggaraan pengelolaan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang tergolong baik. Hal ini tercermin dari tercapainya indikator kinerja utama, antara lain persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kabupaten/Kota yang mencapai 45,24 persen dan telah memenuhi target tahunan. Selain itu, persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang pengelolaan kawasan perbatasan mencapai 37,03 persen, melampaui target yang ditetapkan, serta persentase rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitor mencapai 29,73 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi perencanaan, fasilitasi, dan pengendalian pembangunan kawasan perbatasan telah berjalan efektif.

Kinerja Urusan Pengelolaan Perbatasan Daerah ditunjukkan melalui 6 indikator, yang mencakup indikator penunjang perangkat daerah serta indikator program pengelolaan perbatasan. Seluruh indikator utama pengelolaan perbatasan pada tahun berjalan berada pada status capaian sangat tinggi, yang menandakan bahwa target kinerja tahunan telah tercapai atau melampaui target yang ditetapkan. Secara lebih rinci, capaian kinerja Urusan Pengelolaan Perbatasan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja pengelolaan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	B	B	B	BB	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	85	82,37	82,87	83,16	100,00	ST	97,84
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	85	-	80	86,91	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN								
4	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (Dengan Satuan: Persentase)	persen	67	40	45	45,24	100,00	ST	67,52
5	Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Dengan Satuan:Persentase)	persen	48,28	15,38	16,67	37,03	100,00	ST	76,70
6	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (Dengan Satuan:Persentase)	persen	44,83	24,83	27,59	29,73	100,00	ST	66,32

Sumber: Badan Pengelolaan Perbatasan, 2026

Kinerja Urusan Pengelolaan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang relatif tinggi, khususnya pada indikator perencanaan, fasilitasi, dan monitoring pembangunan kawasan perbatasan. Hal ini tercermin dari tercapainya target indikator persentase usulan Kabupaten/Kota yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan, pengembangan kawasan perbatasan sesuai rencana tata ruang, serta pelaksanaan monitoring rencana aksi pembangunan perbatasan. Capaian tersebut menandakan bahwa peran pemerintah provinsi sebagai koordinator pembangunan kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota telah berjalan efektif, terutama dalam fungsi perencanaan dan pengendalian.

Faktor pendorong utama capaian kinerja ini adalah posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan negara yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dukungan kebijakan nasional melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), ketersediaan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan perbatasan, serta meningkatnya koordinasi antara

pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan data spasial, dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendorong tercapainya indikator kinerja.

Meskipun demikian, kinerja pengelolaan perbatasan masih menghadapi sejumlah hambatan struktural. Faktor penghambat utama adalah kondisi geografis Kepulauan Riau yang berciri kepulauan dengan pulau-pulau kecil dan terpencar, sehingga menyulitkan koordinasi lapangan, monitoring kegiatan, serta pelaksanaan pembangunan secara merata. Keterbatasan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan, seperti transportasi laut, listrik, telekomunikasi, dan sarana pendukung lainnya, turut memperlambat realisasi pembangunan fisik dan pelayanan publik.

Tantangan ke depan dalam pengelolaan perbatasan adalah penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perbedaan prioritas pembangunan dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah perbatasan sering menyebabkan rencana aksi yang telah disusun belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Selain itu, tantangan pengawasan wilayah perbatasan, termasuk aktivitas ilegal dan kerentanan sosial ekonomi masyarakat perbatasan, menuntut koordinasi yang lebih intensif dengan instansi vertikal serta pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Urusan Pengelolaan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa dukungan kebijakan pusat, peran koordinatif pemerintah provinsi, serta tersusunnya rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan. Namun, capaian tersebut masih dibatasi oleh faktor penghambat berupa tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur dasar, dan belum optimalnya integrasi perencanaan lintas pemerintahan. Ke depan, peningkatan kinerja pengelolaan perbatasan memerlukan penguatan sinergi pusat–daerah, percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola perbatasan agar pembangunan kawasan perbatasan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

42. Pengawasan

Kinerja Fungsi Pengawasan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan fungsi penunjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota. Fungsi pengawasan mencakup pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pembinaan akuntabilitas, serta asistensi penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko.

Berdasarkan data kinerja, penyelenggaraan Urusan Pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada sebagian besar indikator. Indikator seperti Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Profesionalisme SDM, persentase program strategis daerah yang dilakukan pengawasan, pengawasan akuntabilitas pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi MCP KPK, serta asistensi SPIP seluruhnya mencapai target dengan status sangat tinggi. Namun demikian, masih terdapat indikator yang capaiannya belum optimal, khususnya pada jumlah rekomendasi kebijakan teknis pengawasan yang dihasilkan yang baru mencapai 3 rekomendasi atau 33,33 persen terhadap target RPJMD.

Kinerja fungsi pengawasan ditunjukkan melalui sebanyak 12 indikator yang tersebar pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penyelenggaraan Pengawasan, serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi. Dari keseluruhan indikator tersebut, seluruh indikator telah mencapai target dengan status sangat tinggi. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan efektif dalam mendukung peningkatan akuntabilitas, pencegahan korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN PENGAWASAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	A	A	A	A	100,00	ST	100,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	92	88,07	88,09	88,09	100,00	ST	95,75
3	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	86,24	0	85,65	85,65	100,00	ST	99,32
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
4	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas (persen)	persen	91,17	79	85,29	85,29	100,00	ST	93,55
5	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (persen)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
6	Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah (persen)	persen	100,00	88	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
7	Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota (persen)	persen	100,00	100,00	42,86	42,86	100,00	ST	42,86
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
9	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI (Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah	1	0	1	1	100,00	ST	100,00
10	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang dihasilkan (Rekomendasi)	Rekomendasi	9	2	3	3	100,00	ST	33,33
11	perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK (Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah	12	12	12	12	100,00	ST	100,00
12	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi SPIP (Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah	34	34	34	34	100,00	ST	100,00

Sumber: Inspektorat Daerah, 2026

Kinerja Urusan Pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum menunjukkan capaian yang tinggi pada indikator yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, monitoring, serta pendampingan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Capaian tersebut mencerminkan bahwa fungsi pengawasan internal telah berjalan efektif sebagai instrumen pengendalian tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan keuangan, serta pencegahan penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Faktor pendorong utama capaian kinerja pengawasan adalah meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang didukung oleh pelaksanaan pelatihan, sertifikasi auditor, serta pendampingan

teknis dari BPKP dan lembaga pengawasan lainnya. Implementasi audit berbasis risiko, penguatan peran Inspektorat dalam reviu perencanaan dan penganggaran, serta dukungan pimpinan daerah terhadap fungsi pengawasan turut memperkuat efektivitas pengendalian intern. Selain itu, pemanfaatan aplikasi pengawasan dan sistem pelaporan digital mendukung percepatan proses audit dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Meskipun demikian, capaian kinerja pengawasan masih menghadapi sejumlah faktor penghambat. Keterbatasan jumlah auditor dan ketimpangan kompetensi teknis, khususnya dalam audit kinerja dan audit investigatif, menyebabkan beban kerja APIP relatif tinggi dan membatasi pendalaman pemeriksaan. Di samping itu, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh sebagian perangkat daerah masih memerlukan penguatan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman teknis, kendala anggaran, serta manajemen internal perangkat daerah.

Tantangan utama pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau juga berasal dari karakteristik wilayah kepulauan yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan lapangan membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya lebih besar. Selain itu, integrasi sistem pengawasan dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja belum sepenuhnya optimal, sehingga pemanfaatan data lintas sektor untuk pengawasan berbasis risiko masih terbatas. Di sisi lain, pemahaman sebagian perangkat daerah terhadap peran Inspektorat sebagai mitra strategis dalam manajemen risiko belum merata, sehingga hasil pengawasan belum selalu dimanfaatkan secara optimal dalam perbaikan kebijakan dan kinerja.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Urusan Pengawasan dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa peningkatan kapabilitas APIP, penguatan SPIP, dukungan pimpinan daerah, serta pemanfaatan teknologi pengawasan. Namun capaian tersebut masih dibatasi oleh faktor penghambat berupa keterbatasan SDM auditor, tantangan geografis wilayah kepulauan, belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi, serta keterbatasan integrasi data pengawasan.

43. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat provinsi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kehidupan demokrasi, serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial menjadi kewenangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi berperan penting dalam menjaga stabilitas politik,

ketentraman dan ketertiban umum, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di daerah.

Capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan hasil yang sangat baik, tercermin dari mayoritas indikator yang mencapai target. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah, serta Nilai SAKIP Perangkat Daerah berada pada kategori sangat tinggi. Pada program substantif, seluruh potensi konflik antar suku, etnis, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan konflik sosial berhasil ditangani 100 persen. Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan ketentuan juga mencapai 99,55 persen, demikian pula persentase masyarakat yang memperoleh pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara yang menunjukkan capaian sangat tinggi dengan realisasi 0,004 persen.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur melalui sejumlah indikator yang tersebar pada beberapa program, meliputi program penunjang urusan pemerintahan daerah, penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan peran partai politik, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Seluruh indikator dalam tabel menunjukkan status capaian sangat tinggi, sehingga secara umum kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat dinilai berhasil dan konsisten.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	ST	100,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	88,60	88,54	88,55	88,63	100,00	ST	100,00
3	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	89,64	83,88	83,97	86,47	100,00	ST	96,46
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								
4	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2024	Target tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)
	Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (persen)								
5	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (persen)	persen	0,002	0	0,002	0,004	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDI DI KAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
6	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (persen)	persen	61,11	11,11	11,11	11,11	100,00	ST	18,18
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
7	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	Aturan	85,71	97	97	99,55	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
8	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	Tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
9	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani	Tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2026

Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Kepulauan Riau secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik pada indikator pemeliharaan stabilitas politik daerah, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, fasilitasi kehidupan demokrasi, serta pencegahan dan penanganan konflik sosial. Seluruh indikator utama, termasuk penanganan potensi konflik sosial, konflik antar suku, etnis, agama, serta konflik ekonomi dan budaya, berhasil mencapai target 100 persen. Capaian ini mencerminkan bahwa peran perangkat daerah Kesbangpol sebagai garda terdepan dalam menjaga

persatuan, ketertiban, dan stabilitas sosial-politik daerah telah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Faktor pendorong utama capaian kinerja tersebut adalah kuatnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi dengan instansi vertikal, seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, KPU, Bawaslu, Kementerian Agama, serta unsur intelijen dan keamanan lainnya. Sinergi ini mendukung kelancaran penyelenggaraan agenda politik, termasuk Pemilu dan Pilkada, serta menjaga kondusivitas daerah pada setiap tahapan politik. Selain itu, pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan turut memperkuat ketahanan sosial dan politik daerah.

Meskipun capaian kinerja tergolong tinggi, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan urusan Kesbangpol. Tantangan utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang jumlahnya terus bertambah. Tidak seluruh organisasi melaporkan aktivitasnya secara tertib, sehingga memerlukan upaya pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif. Selain itu, karakteristik Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan dan perbatasan internasional meningkatkan kompleksitas pengawasan sosial dan politik.

Tantangan ke depan semakin kompleks seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial masyarakat, termasuk tingginya arus informasi digital yang berpotensi memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas deteksi dini berbasis teknologi dan penguatan literasi politik masyarakat. Selain itu, penguatan forum-forum kewaspadaan dini seperti FKDM, FKUB, dan FPK masih perlu ditingkatkan agar peran masyarakat dalam pencegahan konflik sosial dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh Kabupaten/Kota.

Secara keseluruhan, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan mayoritas indikator mencapai kategori sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi lintas instansi, efektivitas pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta sistem deteksi dini konflik yang relatif berjalan baik.

2.1.4 Aspek daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Nilai konsumsi rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat Kepulauan Riau mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai Rp2.468.319,00 per bulan pada tahun 2025. Kondisi

saat ini memperlihatkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Provinsi Kepulauan Riau untuk kelompok makanan mencapai Rp1.063.897,00 (43,10 persen) sedangkan kelompok non makanan mencapai Rp1.404.422,00 (56,90 persen). Terlihat bahwa persentase pengeluaran non pangan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran pangan yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau sudah cukup baik karena fokus pengeluaran sudah lebih ke arah kebutuhan sekunder bahkan tersier.

Tabel 2.66
Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

No	Kelompok	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Rata-rata Pengeluaran per Kapita (Rp)**	**1.773.521**	**1.855.296**	**1.831.701**	**1.989.703**	**2.468.319**
	- Makanan	800.424	828.206	846.222	863.530	1.063.897
	- Non Makanan	973.097	1.027.089	985.479	1.126.172	1.404.422
2	**Persentase Pengeluaran per Kapita**					
	- Makanan	45,13	44,64	46,20	43,40	43,10
	- Non Makanan	54,87	55,36	53,80	56,60	56,90

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka, 2025

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu proxy indikator kesejahteraan petani dengan melihat tingkat daya beli petani. Nilai Tukar Petani adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2025 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2021 sebesar 104,37 persen menurun hingga sebesar 95,59 persen.

Tabel 2.67
Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Harga yang Diterima Petani	109,51	115,98	117,12	120,35	116,28
2	Indeks Harga yang Dibayar Petani	104,91	108,61	112,09	115,98	121,65
	NTP	104,37	106,81	104,49	103,77	95,59

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

1. **Luas Wilayah Produktif**

Wilayah produktif adalah lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wilayah produktif terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan perikanan. Wilayah produktif di sini merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dengan satuan luasan hektar di dalam rencana pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau, luas kawasan peruntukan pertanian yang direncanakan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau ini adalah 2025 tahun sampai dengan sebelum adanya revisi perubahan sebagaimana Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki rentang waktu tahun 2017-2037. Persentase wilayah produktif Provinsi Kepulauan Riau dan persentase wilayah produktif Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Persentase Luas Wilayah Produktif Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Wilayah Produktif	226.451	226.451	226.451	226.451	226.451
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	708.172	708.172	708.172	708.172	708.172
	Rasio	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2. **Penginapan/Hotel**

Penginapan/hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Jumlah Jumlah Hotel/Penginapan sebesar 139 unit, dengan jumlah kamar 14.492 kamar, dan tempat tidur sebanyak 20.629 unit.

Tabel 2.69
Jumlah Hotel/Penginapan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Hotel/Penginapan	101	128	107	139	139
2	Jumlah Kamar	11.784	13.254	11.867	14.492	14.492
3	Jumlah Tempat Tidur	16.263	18.272	17.079	20.629	20.629

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah, pemerintah daerah mengupayakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Sebagai panduan pelaksanaan pelayanan perizinan, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018. Dengan adanya acuan tersebut sudah jelas tugas, fungsi, dan Standar Operasional Pelayanan yang harus dilakukan DPMPTSP dalam pemberian pelayanan perizinan di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai panduan teknis pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, telah didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur alur, penanggung jawab dan juga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perizinan.

Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pelayanan perizinan. Hal ini disebabkan adanya peralihan sistem pelayanan ke Online Single Submission (OSS). Pelayanan melalui sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan mulai dari izin prinsip, izin prinsip perluasan, izin prinsip alih status, izin prinsip penggabungan dan izin perubahan, yang sebelumnya terdata melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Dengan diberlakukannya OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission, para investor diharuskan pendaftaran ulang izin usahanya melalui sistem yang baru ini.

Proses pelaksanaan verifikasi dan penerbitan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Rata-rata lama perizinan Provinsi Kepulauan Riau adalah 3 hari.

Tabel 2.70
Rata-rata Lama Perizinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

No	Jenis Izin	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3
2.	Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha	Hari	3	3	3	3	3
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3
4.	Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha	Hari	3	3	3	3	3
5.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3
6.	Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha	Hari	3	3	3	3	3
7.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3

No	Jenis Izin	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
8.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha	Hari	3	3	3	3	3
9.	Izin Pembukaan Kantor Cabang	Hari	3	3	3	3	3
10.	Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)	Hari	3	3	3	3	3
11.	Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	Hari	3	3	3	3	3
12.	Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin	Hari	3	3	3	3	3
13.	Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan	Hari	3	3	3	3	3
14.	Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu	Hari	3	3	3	3	3

Keterangan:
*Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
**Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 821.2/20 SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Tahun 2025, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat), yaitu sebesar 33,12 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 19,15 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan menunjukkan pola yang berbeda dengan Agustus 2025, seperti terlihat pada Gambar 4. Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan menduduki posisi kedua tertinggi pada Agustus 2024, sedangkan sebelumnya didominasi oleh tamatan SD ke bawah.

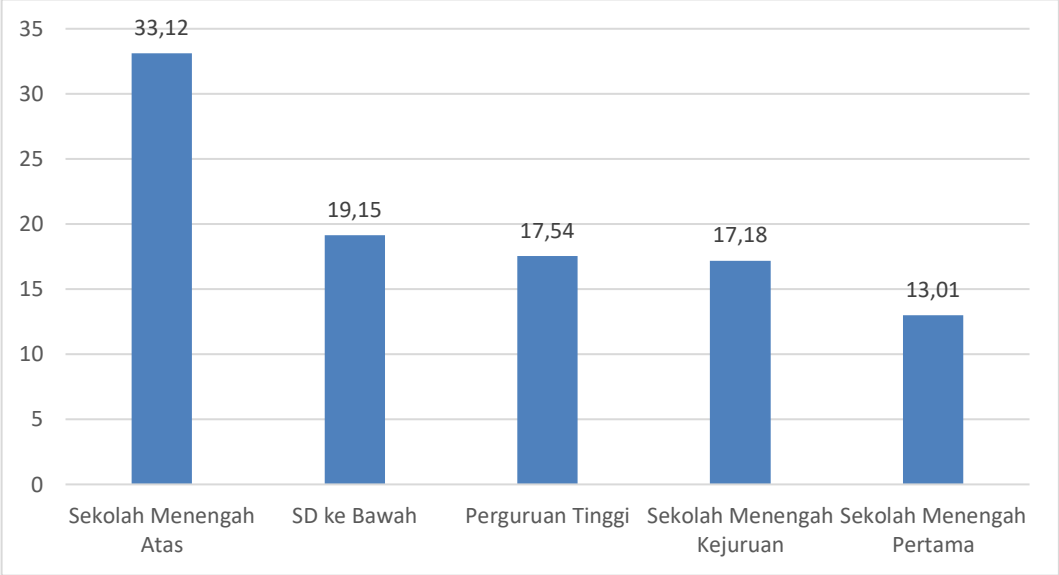

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.28 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2025 (November)

2.1.4.5. Rasio Ketergantungan

Struktur penduduk memiliki peran strategis dalam menentukan dinamika dan kapasitas pembangunan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan data tahun 2021–2025, struktur penduduk Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15–64 tahun) yang terus meningkat dari 1.479.186 jiwa pada tahun 2021 menjadi sekitar 1.541.000 jiwa pada tahun 2025. Di sisi lain, jumlah penduduk usia tidak produktif juga mengalami peningkatan, baik pada kelompok usia 0–14 tahun yang relatif stabil cenderung meningkat, maupun kelompok usia 65 tahun ke atas yang meningkat cukup signifikan dari 78.709 jiwa pada tahun 2021 menjadi sekitar 102.700 jiwa pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan dua fenomena sekaligus, yaitu masih kuatnya potensi bonus demografi melalui besarnya penduduk usia kerja, serta mulai menguatnya gejala penuaan penduduk (ageing population) yang perlu diantisipasi melalui kebijakan jangka menengah dan panjang.

Rasio ketergantungan sebagai indikator yang menggambarkan beban penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif menunjukkan kondisi yang relatif stabil sepanjang periode 2021–2025. Rasio ketergantungan tercatat sebesar 43,20 pada tahun 2021, menurun hingga 43,63 pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100,00 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43–44 penduduk usia nonproduktif. Stabilitas rasio ketergantungan ini mengindikasikan bahwa Kepulauan Riau masih berada dalam fase struktur penduduk yang cukup menguntungkan bagi pembangunan, karena beban ekonomi yang ditanggung penduduk usia kerja masih relatif.

Kecenderungan meningkatnya penduduk usia lanjut perlu menjadi perhatian serius, karena dalam jangka panjang dapat mendorong kenaikan rasio ketergantungan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia, serta sistem perlindungan sosial yang memadai. Sehingga, perlu diimbangi dengan kualitas maryarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja menjadi kunci agar kondisi demografis ini benar-benar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

Tabel 2.71
Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk Usia 0-14 tahun	560.344	568.386	564.650	567.700	569,600
2	Jumlah Penduduk Usia 64 tahun keatas	78.709	85.093	89.100,00	95.000	102,700
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1 + 2)	639.053	653.479	653.750	662.700	672.300
4	Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 tahun (Usia produktif)	1.479.186	1.526.341	1.498.880	1.520.100,00	1.541.000
5	Rasio Ketergantungan	43,20	42,81	43,61	43,60	43,63

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.2.1 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Daerah

Perumusan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan utama yang memengaruhi capaian kinerja pembangunan dan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Riau. Identifikasi permasalahan disusun berdasarkan analisis data kinerja tiap urusan pemerintahan, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas kelembagaan perangkat daerah, serta tantangan tata kelola. Hasil perumusan permasalahan ini menjadi dasar dalam penajaman arah kebijakan dan program pembangunan daerah agar lebih fokus, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan Pembangunan daerah pada urusan Pendidikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan, terlihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang belum optimal
b. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terlihat dari angka putus sekolah yang belum optimal
c. Belum optimalnya jumlah guru yang mengajar dalam pendidikan, terlihat dari rasio guru SMA/SMK terhadap murid di sekolah yang belum optimal.

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kesehatan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan untuk persalinan, terlihat dari cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan angka kematian bayi (AKB)
b. Masih kurangnya keterjangkauan fasilitas kesehatan untuk bayi, terlihat dari cakupan imunisasi
c. Masih rendahnya pengobatan kasus tuberkulosis, terlihat dari cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

a. Masih kurangnya ketersediaan air baku untuk masyarkat, terlihat dari tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan air siap minum perpipaan
b. Masih rendahnya akses sanitasi aman bagi masyarakat, terlihat dari rumah tangga dengan akses sanitasi aman
c. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang, terlihat dari proses revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan perda yang belum optimal

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah belum optimalnya jumlah rumah layak huni yang dibangun, dan penataan kawasan kumuh.

5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah masih kurangnya tingkat rasa aman masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, terlihat dari perkuatan kesiapsiagaan penanganan bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana yang belum optimal.

6) Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan sosial adalah belum meratanya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat, terlihat dari penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

7) Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja yang terdaftar
b. Belum optimalnya inklusivitas pasar kerja khususnya pada sekotr formal bagi pekerja penyandang disabilitas
c. Belum optimalnya mekanisme penanganan perselisihan ketenagakerjaan serta keterbatasan kapasitas layanan pengaduan dan penyelesaian kasus.
d. Masih tingginya kesenjangan kompetensi (mismatch) antara kualifikasi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, khususnya pada sektor-sektor unggulan daerah seperti manufaktur, maritim, pariwisata, dan sektor berbasis ekonomi hijau.
e. Belum tersedianya program pelatihan kerja yang secara spesifik diorientasikan pada kompetensi tenaga kerja hijau (green skills), sejalan dengan arah kebijakan pada Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia (Bappenas, 2025) yang menetapkan Tahap I Penguatan Fondasi periode 2025–2029.
f. Masih rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Provinsi Kepulauan Riau (4,59% pada tahun 2024) yang menunjukkan keterbatasan akses terhadap lembaga sertifikasi terakreditasi, biaya sertifikasi yang tinggi, dan minimnya kesadaran tenaga kerja akan pentingnya sertifikasi.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah belum optimalnya pelayanan pemenuhan hak dan perlindungan kasus anak.

9) Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pangan adalah belum optimalnya ketahanan pangan wilayah, terutama bagi daerah rentan rawan pangan.

10) Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanahan adalah belum optimalnya pembebasan lahan dan tata kelola administrasi pertanahan.

11) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan lingkungan hidup adalah belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, dan masih kurangnya penanganan sampah di fasilitas pengolahan sampah.

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah belum optimalnya pemenuhan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain terlihat terlihat dari masih terdapat penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el .

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah

a. Masih kurangnya pembinaan pada lembaga kemasyarakatan desa, terlihat dari Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya
b. Masih rendahnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah belum optimanya partisipasi masyarakat yang ber-KB.

15) Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perhubungan adalah belum optimalnya pelayanan dan fasilitasi ketersediaan anggkutan jalan, terlihat dari ketersediaan perlengkapan jalan, layanan angkutan laut, angkutan sungai, angkutan danau, dan penyebrangan.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pelayanan publlik, terlihar dari profesionalisme SDM Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat
b. Masih rendahnya fasilitasi dan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, terlihat dari pembangunan teknologi, infotmasi, dan komunikasi yang belum optimal

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya fasilitasi dan penilaian koperasi, terlihat dari koperasi yang diawasi dan KSP/UPS yang dinilai kesehatannya
b. Masih rendahnya koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan.

18) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan penanaman modal adalah belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan, terlihat dari hasil survei kepuasan masyarakat yang belum optimal.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kepemudaan dan olahraga adalah belum optimalnya fasilitasi bagi wirausaha pemuda dan pembinaan atlet, terlihat dari rasio kewirausahaan pemuda dan cakupan pembinaan atlet muda yang belum optimal.

20) Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan statistik adalah belum optimal dukungan perangkat daerah pada dalam penerapan Single Data Statistik (SDS).

21) Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan persandian adalah belum optimalnya tingkat keamanan informasi pemerintah daerah.

22) Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya yang dilestarikan
b. Masih rendahnya pembinaan sejarah, terlihat dari kesadaran pelajar tentang sejarah lokal dan kompetensi SDM Sejarah

23) Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perpustakaan adalah masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan, terlihat dari jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan tingkat kegemaran membaca masyarakat yang belum optimal.

24) Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan arsip sesuai standar.

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kawasan konservasi yangg dikelola minimun, terlihar dari luas kawasan konservasi yang dikelola minimum
b. Masih rendahnya produksi perikanan budidaya
c. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap

26) Urusan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pariwisata adalah belum optimalnya daya tarik wisatawan mancanegara, terlihat dari rata rata lama tinggal dan jumlah tamu wisatawan mancanegara

27) Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanian yaitu:

a. Belum optimalnya penanganan dampak perubahan iklim, terlihat dari penanganan dampak perubhaan iklim terhadap pertanian yang berdampak pada produktivitas sektor pertanian
b. Belum optimalnya fasilitasi penyuluhan bagi petani, terlihat dari SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan.

28) Urusan Kehutanan

Permasalahan pembangunan daerah ada urusan kehutanan adalah belum optimalnya pengelolaan area hutan yang dilindung dari perambahan dan penebangan liar.

29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya pengelolaan zona konservasi air tanah
b. Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan (EBT)

30) Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perdagangan adalah

a. Masih rendahnya pengendalian stabilitasi harga barang kebutuhan, terlihat dari variasi harga antar wilayah
b. Belum optimalnya peningkatan sarana distribusi perdagangan, terlihat dari fasilitasi pembinaan pelaku usaha perdagangan.

31) Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perindustrian adalah belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, menengah, industri kreatif serta peningkatan nilai tambah produk olahan industri.

32) Urusan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan transmigrasi adalah belum optimalnya penataan bidang lahan/KK di lokasi kawasan transmigrasi.

33) Urusan Penunjang Sekretariat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang sekretariat daerah belum optimalnya pelaksaan birokrasi yang dipengaruhi oleh pencapaian target pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, regulasi hukum, dan sebagainya.

34) Urusan Penunjang Sekretariat DPRD

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.

35) Unsur Penunjang Perencanaan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang perencanaan adalah belum optimalnya kualitas, keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

36) Unsur Penunjang Keuangan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang keuangan adalah belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah dalam penambahan nilai aset tetap.

37) Unsur Penunjang Kepegawaian

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang kepegawaian adalah belum optimalnya pengembangan dan sertifikasi kompetensi ASN.

38) Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan adalah belum optimalnya kurangnya kompetensi teknis dan managerial ASN.

39) Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang penelitian dan pengembangan adalah kurangnya inovasi penelitian dan pengembangan, terlihat dari persentase inovasi yang dilaporakan.

40) Unsur Penunjang Pengawasan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengawasan adalah:

a. Belum optimalnya manajemen risiko pemerintah daerah ditunjukkan dengan tingkat maturitas SPIP.
b. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
c. Belum terpenuhinya Kebutuhan dan kompetensi Auditor dan P2UPD

41) Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengelolaan perbatasan adalah belum optimalnya pengelolaan lokasi prioritas wilayah perbatasan.

42) Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengelolaan penghubung adalah belum optimalnya pelayanan penghubung.

43) Unsur Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang kesatuan bangsa dan politik adalah adanya potensi konflik sosial dan politik dan belum optimalnya ketahanan nasional.

Permasalahan pada urusan perhubungan, kelautan dan perikanan, penanaman modal, perindustrian, pariwisata, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, serta urusan pemerintahan lainnya sebagaimana diuraikan diatas pada dasarnya merupakan manifestasi dari permasalahan strategis pembangunan daerah yang saling berkaitan. Berbagai permasalahan sektoral tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan konektivitas wilayah kepulauan yang terpadu, penguatan ekonomi maritim, peningkatan daya saing investasi, transformasi industri dan jasa bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, pemerataan pembangunan kawasan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan pembangunan yang terintegrasi, lintas sektor, dan lintas wilayah agar mampu memberikan dampak yang lebih efektif terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau.

Permasalahan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil interaksi berbagai faktor struktural, kewilayahan, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling memengaruhi. Sebagai provinsi kepulauan yang terdiri atas gugusan pulau dengan karakteristik wilayah yang tersebar, berbatasan langsung dengan negara lain, serta memiliki posisi strategis pada jalur perdagangan internasional, tantangan pembangunan Kepulauan Riau tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan pembangunan, penguatan daya saing wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan wilayah perbatasan. Oleh karena itu, penyelesaian berbagai permasalahan sektoral perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan pembangunan yang berbasis kewilayahan, berorientasi pada transformasi ekonomi, dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama pembangunan daerah adalah belum optimalnya konektivitas antarwilayah kepulauan. Karakteristik wilayah yang didominasi lautan menyebabkan masih terdapat kesenjangan aksesibilitas antarpulau, terutama pada wilayah terluar, terpencil, dan kawasan perbatasan. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap tingginya biaya logistik, belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, terbatasnya mobilitas barang dan

jasa, serta belum optimalnya integrasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan sektor pekerjaan umum, perhubungan, permukiman, telekomunikasi, energi, dan penyediaan infrastruktur dasar yang masih memerlukan percepatan pembangunan agar mampu mendukung konektivitas wilayah secara lebih efektif.

Permasalahan konektivitas tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan belum optimalnya pengembangan ekonomi maritim sebagai sektor unggulan daerah. Potensi kelautan, perikanan, pelabuhan, pariwisata bahari, industri maritim, dan jasa logistik belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang optimal terhadap perekonomian daerah. Masih terbatasnya hilirisasi hasil kelautan dan perikanan, rendahnya produktivitas sektor maritim, belum optimalnya pengembangan kawasan pelabuhan, serta belum terintegrasinya rantai pasok industri maritim menjadi faktor yang membatasi daya saing ekonomi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus diintegrasikan dengan pengembangan industri pengolahan, logistik, perdagangan, investasi, serta inovasi teknologi sehingga mampu memperkuat transformasi ekonomi daerah.

Di sisi lain, daya saing investasi daerah masih menghadapi berbagai tantangan meskipun Provinsi Kepulauan Riau memiliki keunggulan geografis sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam–Bintan–Karimun, pusat investasi asing, dan simpul logistik internasional. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain belum meratanya infrastruktur pendukung investasi di luar kawasan utama, perlunya peningkatan kualitas pelayanan perizinan, keterbatasan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, belum optimalnya keterkaitan antara industri besar dengan usaha lokal, serta perlunya peningkatan kepastian dan efisiensi pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan investasi tidak hanya bergantung pada insentif ekonomi, tetapi juga memerlukan perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan ekosistem industri yang lebih kompetitif.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, pengembangan kawasan perbatasan, khususnya Natuna dan Anambas, menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur dasar, aksesibilitas transportasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, konektivitas digital, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang masih belum sebanding dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Di sisi lain, kawasan tersebut memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan, keamanan, kedaulatan negara, ekonomi maritim, dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perbatasan diarahkan untuk memperkuat fungsi pertahanan negara sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan mengurangi kesenjangan

pembangunan antarwilayah.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis industri dan jasa bernilai tambah. Struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau masih memerlukan penguatan melalui diversifikasi sektor unggulan, peningkatan hilirisasi industri, pengembangan industri berbasis teknologi, penguatan ekonomi digital, peningkatan produktivitas UMKM, serta pengembangan sektor jasa modern yang mampu memberikan nilai tambah lebih tinggi. Transformasi ekonomi tersebut juga harus mampu memperkuat keterkaitan antara sektor industri manufaktur, perdagangan, logistik, pariwisata, dan ekonomi maritim sehingga tercipta struktur ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.

Keberhasilan transformasi ekonomi tersebut sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Meskipun indikator pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang positif, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kompetensi tenaga kerja, produktivitas, penguasaan teknologi, kesetaraan gender, serta pemerataan kualitas layanan dasar antarwilayah. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan industri manufaktur, ekonomi digital, dan sektor jasa modern belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang ada. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan keterkaitan antara pembangunan sumber daya manusia dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Apabila disintesiskan, berbagai permasalahan sektoral yang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya saling berkaitan dan membentuk satu sistem pembangunan yang terintegrasi. Keterbatasan konektivitas wilayah memengaruhi efisiensi logistik, pemerataan pelayanan dasar, dan pengembangan kawasan ekonomi. Belum optimalnya ekonomi maritim dan investasi berdampak pada terbatasnya penciptaan nilai tambah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketimpangan pembangunan kawasan perbatasan menghambat pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi optimalisasi potensi strategis wilayah. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan menjadi faktor penentu dalam mempercepat transformasi ekonomi menuju struktur ekonomi yang lebih inovatif, produktif, hijau, dan berdaya saing.

Dengan demikian, penyelesaian permasalahan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau memerlukan pendekatan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang mengintegrasikan pembangunan konektivitas kepulauan, penguatan ekonomi maritim, peningkatan investasi, pengembangan kawasan strategis dan perbatasan Natuna–Anambas, transformasi industri dan jasa bernilai tambah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup. Pendekatan tersebut

diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memperkuat posisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan, beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

2.2.2 Isu strategis Daerah

Permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan prioritas Pembangunan (Isu-isu strategis) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 diuraikan sebagai berikut.

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal

Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis yang sangat khas sebagai wilayah kepulauan mendukung potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar dan berkelanjutan. Potensi ini tercermin dari beragam komoditas unggulan yang telah menjadi andalan ekspor daerah, antara lain lobster, kepiting, ikan laut bernilai ekonomi tinggi, serta hasil budidaya laut. Pada sektor perikanan tangkap, kontribusi utama berasal dari wilayah Kabupaten Natuna, khususnya di kawasan Laut Natuna Utara, Laut Natuna, dan perairan Selat Karimata, yang merupakan salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) strategis nasional. Wilayah ini memiliki stok sumber daya ikan yang relatif besar, namun hingga saat ini pemanfaatannya masih belum sepenuhnya optimal dan menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknologi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau tergolong signifikan, namun belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi sumber daya, kualitas tenaga kerja, dan struktur kesempatan kerja yang tersedia.

Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh wilayah perairan memiliki keunggulan strategis untuk menjadikan sektor maritim sebagai motor utama transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi maritim di Kepulauan Riau tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengarusutamaan maritim menjadi kunci agar potensi kelautan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah secara menyeluruh. Pengembangan ekonomi maritim yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pekerjaan hijau potensial di sektor pesisir dan kelautan terkait erat dengan meningkatnya perhatian terhadap berbagai aspek pemulihan ekosistem laut dan pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang serta pengembangan ekowisata bahari dan perdagangan karbon biru. Selain itu,

inovasi teknologi seperti pemantauan ekosistem berbasis drone dan citra satelit, penggunaan sistem informasi geografis (GIS) untuk tata kelola wilayah pesisir, serta pengembangan sistem budi daya laut ramah lingkungan berbasis IoT turut mendorong munculnya jenis-jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan hijau spesifik dan adaptif terhadap dinamika ekosistem pesisir.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan, mencakup pariwisata bahari (ekowisata), dan pariwisata berbasis alam dan budaya yang konservatif, rendah emisi, serta inklusif bagi komunitas lokal. Pengembangan sektor pariwisata yang ramah lingkungan dan mampu memulihkan ekosistem, sehingga menghasilkan pekerjaan hijau (greenjobs). Transformasi pariwisata yang lebih berkelanjutan membuka peluang bagi munculnya jenis-jenis pekerjaan baru yang tidak hanya mendukung pemulihan ekonomi, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan efisiensi sumber daya. Dalam konteks ini, pekerjaan hijau di sektor pariwisata tidak lagi terbatas pada kegiatan konvensional, melainkan mencakup profesi-profesi yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, konservasi, dan digitalisasi.

Pengembangan industri di Provinsi Kepulauan Riau juga perlu terus dilakukan, dengan mengembangkan kawasan industri yang menerapkan prinsip *circular economy* dan efisiensi bahan baku. Kerja sama strategis untuk membangun kawasan industri hijau terintegrasi, termasuk dengan Singapura, untuk membangun kawasan industri ramah lingkungan yang dipasok energi bersih menjadi kebutuhan yang harus diwujudkan. Tentunya didukung dengan tenaga kerja terampil dalam teknologi bersih, manajemen limbah industri, dan pengurangan emisi. Provinsi Kepulauan Riau perlu dikembangkan untuk perwujudan *Green Corridor Economy* di KEK Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) untuk menarik investasi rendah karbon. Diharapkan melalui investasi dalam industri hijau dan energi terbarukan dapat diciptakan ribuan lapangan kerja baru, mendukung transfer teknologi canggih dan mengurangi pengangguran. Pekerjaan hijau di sektor industri berakar pada penguasaan teknis tingkat lanjut, kesadaran emisi, dan kemampuan sistemik untuk mengintegrasikan efisiensi, digitalisasi, dan sirkularitas ke dalam proses produksi. Beberapa pekerjaan, seperti insinyur dekarbonisasi industri, ahli efisiensi energi, dan verifikator karbon industri, sudah memiliki hubungan langsung dengan pengurangan emisi, sehingga dikategorikan sebagai pekerjaan hijau inti. Sementara pekerjaan lain, seperti teknisi smart manufacturing atau ahli pengolahan mineral, berperan penting namun berdampak tidak langsung terhadap pengurangan emisi, sehingga dikategorikan sebagai pekerjaan hijau potensial atau pendukung.

Pengembangan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau perlu terus ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan. Peningkatan inovasi perlu

dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Pekerjaan hijau dalam pertanian tidak hanya hadir dalam bentuk profesi baru, tetapi juga melalui transformasi fungsi pekerjaan lama yang kini diorientasikan kembali pada keberlanjutan. Mulai dari petani agroekologi, teknisi irigasi hemat air, penyuluh pertanian berkelanjutan, hingga spesialis karbon tanah, semuanya menempati posisi strategis dalam sistem pangan rendah emisi. Bahkan, pekerjaan berbasis teknologi seperti teknisi smart farming dapat menjadi bagian dari agenda hijau jika diarahkan pada efisiensi, konservasi, dan kedaulatan petani.

2. Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi, serta Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Penyediaan infrastruktur dasar di daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang berimplikasi langsung terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan kualitas dan jangkauan infrastruktur menyebabkan aksesibilitas antarwilayah belum optimal, khususnya pada wilayah kepulauan, pesisir, pulau kecil, dan daerah terpencil. Kondisi ini berdampak pada tingginya biaya logistik, terbatasnya mobilitas barang dan orang, serta terhambatnya integrasi ekonomi antarwilayah.

Ketersediaan infrastruktur dasar Masyarakat belum merata, terutama akses terhadap air minum layak, sanitasi aman, pengelolaan air limbah, dan persampahan. Masih terdapat wilayah dan kelompok masyarakat yang belum memperoleh layanan dasar secara memadai, sehingga berpengaruh terhadap kualitas kesehatan lingkungan, derajat kesehatan masyarakat, dan produktivitas ekonomi. Keterbatasan infrastruktur dasar ini juga memperlebar kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan maupun antar pulau.

Kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman di sejumlah kawasan masih belum memenuhi standar kelayakan. Permukiman kumuh, hunian tidak layak, sistem drainase yang kurang memadai, serta keterbatasan ruang terbuka hijau masih menjadi permasalahan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana lingkungan seperti banjir, rob, dan abrasi pantai. Penanganan kawasan permukiman belum sepenuhnya terintegrasi dengan upaya perlindungan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim.

Pengembangan transportasi rendah emisi perlu terus dikembangkan untuk mewujudkan integrasi dan konektivitas antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam transisi menuju transportasi berkelanjutan, muncul berbagai pekerjaan hijau yang berperan dalam pengembangan sistem transportasi rendah emisi, digitalisasi manajemen transportasi, dan

peningkatan efisiensi energi. Transformasi transportasi ke arah berkelanjutan tidak cukup dengan mengganti jenis kendaraan, tetapi menuntut adanya ekosistem keterampilan baru mulai dari teknisi kendaraan listrik, operator pengisian daya, perencana transportasi hijau, hingga ahli keamanan sistem transportasi berbasis hidrogen. Beberapa pekerjaan, seperti teknisi kendaraan listrik dan perencana transportasi berkelanjutan, termasuk dalam kategori pekerjaan hijau inti karena berkontribusi langsung pada pengurangan emisi. Sementara itu, keterampilan di bidang smart mobility, keselamatan kerja, dan logistik bersifat mendukung, namun tetap krusial dalam mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan aman.

Keterbatasan infrastruktur energi dan telekomunikasi juga belum sepenuhnya andal dan merata. Masih terdapat wilayah yang menghadapi keterbatasan pasokan listrik, ketergantungan pada energi fosil, serta akses jaringan telekomunikasi dan digital yang belum optimal. Kondisi ini menghambat pengembangan aktivitas ekonomi produktif, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan energi terbarukan perlu terus dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Diharapkan dengan pengembangan ini tercipta tenaga kerja hijau *(greenjobs)* seperti Teknisi dan Operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Teknisi Baterai dan Penyimpanan Energi (BESS), Manajer dan Auditor Efisiensi Energi, Teknisi dan Operator Smart Grid, Insinyur dan Teknisi CCS/CCUS, Ahli Hidrogen dan Operator PLT Hidrogen.

Dalam rangka mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam dan Adaptasi Iklim, diperlukan pengelolaan sektor-sektor berbasis ekosistem dan sistem produksi alamiah yang mendukung ketahanan lingkungan dan ekonomi. Kehutanan dan penggunaan lahan memainkan peran sentral dalam pencapaian net sink melalui restorasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan perlu dikembangkan dengan mengadopsi praktik agroekologi, pertanian presisi, penggunaan pupuk organik, serta mengembangkan inovasi teknologi yang meningkatkan efisiensi air dan rendah emisi.

Pengelolaan sampah dan limbah perlu terus dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Sektor limbah dan daur ulang merupakan sektor dengan spektrum pekerjaan hijau yang sangat luas dan tersebar di berbagai level keterampilan mulai dari teknisi lapangan, operator komunitas, hingga ahli rekayasa material. Kekuatan sektor ini terletak pada keterkaitannya dengan lingkungan hidup sehari-hari dan peran langsungnya dalam mengurangi pencemaran, memperpanjang siklus hidup material, dan menciptakan nilai ekonomi dari residu.

3. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis pembangunan yang memerlukan penanganan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, persentase penduduk miskin pada November 2025 tercatat sebesar 4,26 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,76. Meskipun demikian, tantangan kemiskinan tetap perlu mendapatkan perhatian serius, terutama terkait kerentanan kelompok miskin terhadap gejolak ekonomi, kenaikan harga, dan keterbatasan akses layanan dasar di wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau bersifat lintas sektor dan memerlukan konvergensi kebijakan yang kuat antarperangkat daerah. Salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi adalah akurasi dan pemanfaatan basis data sasaran, baik data kemiskinan maupun data keluarga rentan. Ketidaksinkronan penggunaan data penerima manfaat berpotensi menyebabkan intervensi bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan dasar tidak tepat sasaran, sehingga efektivitas program pengentasan kemiskinan belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pemutakhiran dan pemanfaatan data terpadu seperti DTKS dan P3KE sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program.

Selain kemiskinan, pengangguran juga masih menjadi isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau. Data BPS Tahun 2025 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 sebesar 6,35 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,39 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan struktural dalam pasar tenaga kerja, khususnya keterbatasan *link and match* antara pendidikan dan kebutuhan industri, dominasi sektor-sektor tertentu yang menyerap tenaga kerja terbatas, serta keterbatasan akses kerja di wilayah kepulauan.

Ketimpangan distribusi pendapatan juga masih menjadi perhatian. Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,349, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,340. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kepulauan Riau berada pada kategori sedang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan antarwilayah.

Dalam konteks transisi menuju ekonomi hijau, upaya penurunan pengangguran dan kemiskinan perlu diintegrasikan dengan strategi pengembangan tenaga kerja hijau. Sebagaimana diamanatkan dalam Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia (Bappenas, 2025) dan RPJMN 2025–2029, penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian integral dari Indeks Ekonomi Hijau Indonesia, oleh karena itu, program pengurangan pengangguran di Provinsi Kepulauan

Riau perlu diarahkan tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja konvensional, tetapi juga pada penciptaan dan pengembangan pekerjaan hijau (green jobs) di sektor-sektor unggulan daerah, seperti energi terbarukan, ekowisata bahari, industri hijau di KEK BBK, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah/daur ulang. Transformasi ini memerlukan penguatan ekosistem pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan green skills, serta kemitraan yang lebih erat antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan vokasi.

4. Kualitas Pembangunan Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pemajuan Budaya Lokal yang Belum Optimal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Kepulauan Riau merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan, mengingat perannya yang sangat menentukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan daya saing daerah. Kualitas SDM di Kepri tidak hanya berkaitan dengan capaian pendidikan dan derajat kesehatan, tetapi juga tercermin dari tingkat pendapatan dan kesempatan ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Urgensi isu ini semakin menguat akibat masih tingginya disparitas kualitas SDM antarwilayah Kabupaten/Kota. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang relatif tinggi, sementara kabupaten kepulauan seperti Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas masih tertinggal. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta peluang kerja yang lebih terbatas di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Dari aspek kesehatan, kondisi penduduk Kepulauan Riau relatif baik, tercermin dari Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencapai 75,46 tahun pada tahun 2025, yang berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya merata antarwilayah dan kelompok sosial, terutama di daerah pulau kecil dan terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan dasar dan tenaga kesehatan.

Pada dimensi pendidikan, kualitas SDM Kepri menunjukkan kemajuan, namun masih menyisakan tantangan struktural. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2024 tercatat sebesar 10,72 tahun, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk belum sepenuhnya menamatkan pendidikan menengah atas. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,28 tahun, menandakan adanya peluang peningkatan jenjang pendidikan bagi generasi muda. Kesenjangan antara HLS dan RLS ini mengindikasikan masih

adanya persoalan keberlanjutan pendidikan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses sekolah menengah dan pendidikan vokasi.

Dari perspektif kesetaraan gender, pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya inklusif. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 0,309, menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah perempuan yang masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun harapan lama sekolah perempuan relatif lebih tinggi. Selain itu, pendapatan per kapita perempuan tercatat lebih rendah dibandingkan laki-laki, sementara usia harapan hidup perempuan justru lebih tinggi. Fakta ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses dan manfaat pembangunan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam pasar kerja dan kesempatan ekonomi produktif.

Isu peningkatan kualitas SDM di Kepulauan Riau juga tidak terlepas dari persoalan stunting, yang masih menjadi tantangan pembangunan manusia jangka panjang. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan paparan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usianya. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan kognitif, kapasitas belajar, produktivitas di usia dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit degeneratif di masa mendatang. Oleh karena itu, stunting menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas kesehatan, gizi, lingkungan, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakter sosial budaya melayu yang kuat, berlandaskan nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan norma hukum yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai agama dan budaya daerah tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman, panutan, dan landasan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun demikian, capaian pembangunan pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pemajuan budaya, khususnya Budaya Melayu sebagai akar nilai masyarakat Kepulauan Riau, belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. Tantangan tersebut terlihat dari belum terintegrasinya nilai-nilai budaya Melayu secara sistematis dalam pembangunan sosial, pendidikan, ekonomi kreatif, maupun dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan budaya lokal perlu ditempatkan sebagai salah satu isu strategis pembangunan daerah. Penguatan budaya lokal tidak hanya mencakup pelestarian aspek budaya yang bersifat tangible (berwujud), seperti pengelolaan benda, situs, dan cagar budaya, tetapi juga aspek intangible (tidak berwujud), seperti bahasa dan sastra Melayu, nilai-nilai adat, tradisi, serta falsafah hidup Melayu yang menjadi identitas dan perekat sosial masyarakat.

5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal

Pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau ke depan masih dihadapkan pada berbagai persoalan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah. Meskipun reformasi birokrasi terus dilakukan, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu merespons tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, lintas sektor, dan lintas wilayah. Pola kerja pemerintahan masih cenderung sektoral, sehingga kolaborasi antar perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal belum menghasilkan dampak pembangunan yang optimal.

Tantangan tata kelola juga berkaitan dengan belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi pemerintahan. Transformasi digital yang seharusnya menjadi pendorong lahirnya birokrasi yang lincah, cepat, dan responsif masih menghadapi kendala struktural. Evaluasi penyelenggaraan e-government menunjukkan bahwa integrasi data antarinstansi pemerintah daerah masih lemah, sistem informasi berjalan secara terpisah, dan interoperabilitas layanan belum terbangun secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan, rendahnya efektivitas perencanaan berbasis data, serta belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Kesiapan sumber daya manusia aparatur dalam menghadapi transformasi digital juga menjadi persoalan tersendiri. Keterampilan digital ASN yang belum merata, ditambah dengan isu keamanan sistem informasi dan keterbatasan infrastruktur digital di sebagian wilayah kepulauan, menjadi faktor penghambat dalam percepatan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Perumusan isu strategis dalam RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional dari isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Penyusunannya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, perkembangan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, serta arah kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, isu strategis RKPD tidak merupakan isu baru, melainkan bentuk penajaman, pengelompokan, dan integrasi isu-isu RPJMD agar lebih fokus dalam menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi pada tahun perencanaan. Keterkaitan Isu Strategis RKPD Tahun 2027 dengan Isu Strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 diuraikan sebagai berikut.

1. Isu strategis "Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal" dalam RKPD secara langsung merupakan penjabaran dari isu

strategis RPJMD dengan substansi yang sama. Isu ini tetap menjadi prioritas mengingat karakteristik Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan, kawasan perbatasan negara, pusat industri manufaktur berorientasi ekspor, kawasan Free Trade Zone (FTZ), serta simpul logistik internasional. Fokus penanganannya diarahkan pada peningkatan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan, penguatan industri maritim, pengembangan pariwisata bahari, peningkatan investasi, serta optimalisasi potensi ekonomi berbasis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Isu strategis RKPD "Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi, serta Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup" merupakan penggabungan dua isu strategis RPJMD, yaitu isu mengenai pemerataan infrastruktur dan isu lingkungan hidup. Pengintegrasian kedua isu tersebut mencerminkan keterkaitan yang semakin kuat antara pembangunan infrastruktur dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan konektivitas antarpulau, mendukung sistem logistik, dan memperkuat pelayanan dasar, tetapi juga harus mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim, mengurangi risiko bencana, menjaga ekosistem pesisir dan laut, serta mendukung pembangunan rendah karbon.
3. Isu strategis "Kemiskinan dan Pengangguran" dalam RKPD tetap dipertahankan sebagaimana tercantum dalam RPJMD karena masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau relatif tinggi, manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan UMKM, pengembangan kewirausahaan, peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, serta penguatan sistem perlindungan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran secara berkelanjutan.
4. Isu strategis RKPD "Kualitas Pembangunan Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pemajuan Budaya Lokal yang Belum Optimal" merupakan integrasi dari tiga isu strategis RPJMD, yaitu kualitas pembangunan manusia, kesetaraan gender, dan pemajuan budaya lokal. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur melalui aspek pendidikan dan kesehatan, tetapi juga melalui peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengarusutamaan gender, pelestarian nilai-nilai budaya Melayu, penguatan karakter masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial yang inklusif. Pendekatan ini diharapkan mampu

menghasilkan pembangunan manusia yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan tetap berakar pada identitas budaya daerah.

5. Isu strategis "Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal" dalam RKPD merupakan kelanjutan langsung dari isu strategis RPJMD dengan substansi yang sama. Fokus penanganannya diarahkan pada percepatan reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, transformasi digital pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi, serta peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis pada tingkat global, nasional, dan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak hanya mampu menjawab permasalahan internal, tetapi juga adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal yang memengaruhi pembangunan daerah. Dengan demikian, isu strategis daerah merupakan hasil sinkronisasi antara tantangan global, arah kebijakan pembangunan nasional, serta kondisi dan karakteristik pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.72
Keterkaitan Isu Strategis Daerah RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 dengan Isu Global dan Isu Nasional

Isu Global	Isu Nasional	Isu Strategis Daerah
Konflik Geopolitik dan Keamanan	Pertumbuhan ekonomi bekelanjutan	1. Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal
Perubahan Iklim dan Lingkungan	• Pembangunan Prasarana Dasar Kota Terpadu • Pembangunan Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi • Pembangunan Khusus Provinsi Wilayah Kepulauan • Pemulihan Wilayah Pascabencana	2. Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi, serta Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Kemiskinan ekstrem dan kelaparan	Penurunan kemiskinan	3. Kemiskinan dan Pengangguran
Ancaman epidemi dan resistensi antimikroba (resistensi obat)	Peningkatan SDM	4. Kualitas Pembangunan Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pemajuan Budaya Lokal yang Belum Optimal
Keamanan Siber dan Teknologi		5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal

BAB III
KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026, dari sisi tahunan, ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2025 terhadap Triwulan IV-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,39 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi 1,31 persen, serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang terkontraksi 0,51 persen. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,98 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,71 persen, sedangkan Industri Pengolahan sebagai sektor dominan tumbuh sebesar 5,40 persen.

Secara kumulatif tahun 2025 (c-to-c), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 5,03 persen.. Pertumbuhan tertinggi menurut lapangan usaha dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 9,93 persen, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 9,10 persen, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,78 persen. Struktur PDB tahun 2025 masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,07 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,17 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,10 persen, Konstruksi sebesar 9,83 persen, serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,75 persen. Kelima sektor tersebut menyumbang 63,92 persen terhadap total perekonomian nasional.

Dari sisi pengeluaran, secara kumulatif tahun 2025 seluruh komponen mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,03 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 5,13 persen, PMTB sebesar 5,09 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,98 persen, serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,50 persen. Sementara itu, Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB tumbuh sebesar 4,77 persen.. Struktur PDB menurut pengeluaran masih didominasi oleh PK-RT sebesar 53,88 persen, diikuti PMTB sebesar 28,77 persen, dan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,85 persen..

Secara spasial, selama tahun 2025 Pulau Jawa tetap mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 56,93 persen dan pertumbuhan 5,30 persen (c-to-c). Pertumbuhan tertinggi secara regional dicatatkan oleh kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 6,23 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di Maluku dan Papua sebesar 1,44

persen. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tetap solid dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta (USD 5.083,4). Pertumbuhan yang terjaga di atas 5 persen ini mencerminkan daya tahan ekonomi nasional yang didukung oleh ekspansi sektor jasa, penguatan transportasi dan logistik, serta kinerja konsumsi domestik dan investasi yang tetap positif.

3.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau No. 12/02/21/Th. XXI, 5 Februari 2026, kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang solid, akselerasi yang konsisten, ditopang oleh ekspansi sektor industri pengolahan, peningkatan investasi, serta penguatan kinerja perdagangan luar negeri. Struktur ekonomi yang relatif terkonsentrasi pada sektor industri dan konstruksi memberikan daya dorong yang kuat, namun sekaligus menuntut penguatan diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan yang tinggi tersebut dapat terjaga secara berkelanjutan.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 7,89%(yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,48% (yoy), serta lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,54% (yoy). Adapun secara kumulatif, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,94% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada periode ini juga tercatat sebagai yang tertinggi se-Sumatera. Dari sisi nominal, PDRB atas dasar harga berlaku pada Triwulan IV-2025 mencapai Rp102.137,24 miliar, dengan PDRB per kapita tahun 2025 sebesar Rp172,46 juta. Dalam lingkup regional, kontribusi PDRB Kepulauan Riau terhadap PDRB Pulau Sumatera mencapai 7,57 persen.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada keseluruhan tahun 2025 didorong oleh kinerja 4 lapangan usaha (LU) utama yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi, yakni:

a. Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh 7,52% (ctc), dengan andil 3,14%.
b. Lapangan Usaha Pertambangan tumbuh 16,01% (ctc), dengan andil 1,57%.
c. Lapangan Usaha Konstruksi tumbuh 5,30% (ctc), dengan andil 1,03%.
d. Lapangan Usaha Perdagangan tumbuh 7,55% (ctc), dengan andil 0,62%.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan positif pada hampir seluruh komponen pengeluaran. Tiga komponen utama yang memberikan andil pertumbuhan sebagai berikut:

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi tumbuh 6,81% (ctc), dengan andil 2,81%.
b. Net Ekspor tumbuh 20,52% (ctc), dengan andil 2,93%.

c. Konsumsi RT tumbuh 3,84% (ctc), dengan andil 1,51%.

Memasuki tahun 2026, Bank Indonesia memprakirakan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau akan tumbuh di kisaran 6,38% - 7,18% (yoy). Prospek perekonomian yang positif di Provinsi Kepulauan Riau didorong oleh:

a. Kepastian iklim investasi dengan diterbitkannya PP No. 25 dan 28 Tahun 2025 yang menyederhanakan regulasi perizinan di Kepulauan Riau.
b. Berlanjutnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun investasi sektor prioritas BP Batam tahun 2026 yang mencakup industri data center, semikonduktor, energi transisi, serta keberlanjutan Pengembangan Kawasan Industri (KI) mendorong pertumbuhan pada sektor industri pengolahan, konstruksi, serta meningkatkan serapan tenaga kerja.
c. Pengembangan energi hijau mendorong meningkatnya permintaan sel fotovoltaik sebagai komponen utama industri panel surya, sekaligus menarik investasi pada sektor tersebut untuk mendukung ekspor listrik bersih.

Beberapa risiko pertumbuhan ekonomi yang juga perlu menjadi perhatian pada tahun 2026, antara lain:

a. Normalisasi pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan sejalan dengan *high-base effect* pada tahun 2025.
b. Ketidakpastian global yang masih terus berlanjut akibat adanya sejumlah konflik geopolitik.
c. Persaingan daya tarik investasi regional, khususnya dengan Johor-Singapore *Special Economic Zone* (JS-SEZ).

Stabilitas inflasi Provinsi Kepulauan Riau diprakirakan masih tetap terjaga di rentang 2,5±1% (yoy) pada tahun 2026. Sejumlah risiko yang dapat memengaruhi inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 antara lain kondisi cuaca dan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah produsen yang dapat memengaruhi pasokan pangan di Provinsi Kepulauan Riau dan berlanjutnya ketidakpastian global yang berpengaruh pada komoditas inflasi inti. Di sisi lain, sinergi dan kolaborasi dalam TPID dengan pengendalian inflasi dalam *framework* 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif yang diwujudkan melalui upaya GNPIP diprakirakan dapat menahan inflasi yang akan terjaga stabil pada rentang sasaran.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2027 berada pada kisaran 6,46% - 7,26% (yoy), sedikit berbeda dengan target RPJMD sebesar 5,67-7,62%. Perbedaan kisaran proyeksi tersebut mencerminkan adanya perbedaan pendekatan dalam penyusunan target dan proyeksi. Target RPJMD disusun sebagai sasaran pembangunan jangka menengah yang memberikan ruang terhadap berbagai kemungkinan perkembangan ekonomi selama periode perencanaan, sedangkan proyeksi Bank Indonesia merupakan estimasi makroekonomi yang

mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini, tren pertumbuhan, perkembangan perdagangan internasional, prospek investasi, kebijakan moneter dan fiskal, serta berbagai faktor risiko domestik maupun global yang diperkirakan memengaruhi kinerja perekonomian pada Tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti Indeks Modal Manusia pada angka 0,62-0,64, Rasio Gini pada angka 0,348-0,360, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita sebesar 192,06-203,60 Juta rupiah Per Tahun, Tingkat Kemiskinan sebesar 3,87-3,27%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,21-6,14%.

Tabel 3.1
Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	5,67-7,62
2	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,62-0,64
3	Rasio Gini (Indeks)	Indeks	0,348-0,360
4	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)	Rp. Juta Per Tahun	192,06-203,60
5	Tingkat Kemiskinan	%	3,87-3,27
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,21-6,14

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Target makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 disusun selaras dengan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2027 sebagai bentuk kontribusi daerah terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Keselarasan tersebut tercermin pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Target pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh optimalisasi peran Provinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam–Bintan–Karimun, pusat investasi, basis industri manufaktur berorientasi ekspor, kawasan perbatasan negara, dan simpul logistik internasional. Keunggulan tersebut diharapkan mampu meningkatkan investasi, memperkuat ekspor, mengembangkan ekonomi maritim, serta mendorong peningkatan produktivitas sektor industri dan jasa sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pencapaian target penurunan kemiskinan dan pengangguran diarahkan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan UMKM, serta perluasan kesempatan berusaha. Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui penguatan

pelayanan pendidikan, kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pengarusutamaan kesetaraan gender sebagai modal utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, transformasi ekonomi didorong melalui pengembangan industri bernilai tambah, penguatan ekonomi maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan peningkatan konektivitas wilayah kepulauan. Dengan demikian, target makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 tidak hanya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, transformasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2027.

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia dan stakeholders lainnya akan terus diperkuat, dengan beberapa upaya antara lain:

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui: (a) Penyediaan insentif dan penguatan regulasi, termasuk perluasan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem *One Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA); (b) Meningkatkan promosi investasi dengan menjadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai daya tarik utama, didukung oleh lokasi strategis dan kepastian iklim investasi pasca tahun politik; (c) Mendukung peningkatan keunggulan komparatif daya saing investasi di Provinsi Kepulauan Riau di tengah persaingan regional yang semakin ketat (termasuk dengan berdirinya Johor-Singapore *Special Economic Zone)* melalui penguatan insentif bagi investor dan perbaikan infrastruktur.
2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui: (a) Memperkuat aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain melalui penambahan event, peningkatan promosi MICE *(Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)* serta pengembangan *quality tourism*; (b) Mendukung penerapan kebijakan short term visa guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau; (c) Mendorong normalisasi frekuensi penerbangan dan pembukaan rute baru di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperkuat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus menjaga stabilitas inflasi pada komoditas angkutan udara.
3. Mengoptimalkan realisasi belanja pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN, untuk menciptakan *multiplier effect* terhadap perekonomian.
4. Mendorong proses hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam Provinsi Kepulauan Riau untuk memperkuat *Local Value Chain* (LVC).

5. Memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal, termasuk peningkatan akseptansi QRIS oleh *merchant* dan *user* , serta promosi QRIS *cross-border* untuk mendukung konsumsi masyarakat.
6. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sehingga dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah.
7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM melalui dukungan pembiayaan, capacity building, perluasan akses pasar, dan pendampingan agar mampu menghasilkan produk unggulan berorientasi ekspor.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat, antara lain:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui: (a) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan strategis; (b) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri; (c) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (d) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (e) dukungan optimalisasi pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (f) penguatan digitalisasi dan data pangan; dan (g) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
2. Mendorong peningkatan produksi pangan di tengah keterbatasan lahan subur, antara lain melalui budidaya cabai merah oleh koperasi dan kelompok tani serta pembangunan *greenhouse* untuk mengatasi kendala cuaca. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat dioptimalkan dalam pengembangan komoditas pangan strategis.
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar anggota TPID melalui rapat koordinasi, rapat teknis, dan *High Level Meeting* (HLM) untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi masyarakat perlu dilakukan dengan penyebaran nformasi terkait pasokan, kewajara harga, serta kampanye belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan flyer.
4. Meningkatkan sinergi antar instansi dalam TPID melalui penyelarasan program pendukung GNPIP dan strategi pengendalian inflasi daerah, termasuk penerapan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya yang berasal dari luar daerah, dengan dukungan asosiasi distributor.
6. Memperkuat koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam pelaksanaan program stabilisasi harga pangan strategis.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 disusun sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dan RKP Tahun 2027. Perumusannya didasarkan pada analisis kondisi fiskal daerah, proyeksi kapasitas keuangan, dinamika perekonomian regional dan nasional, serta perkembangan kebijakan fiskal nasional. Pendekatan tersebut bertujuan agar kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah mampu mendukung pembangunan secara berkelanjutan melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Secara umum, kapasitas fiskal Provinsi Kepulauan Riau masih dipengaruhi oleh dinamika Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, serta perkembangan aktivitas ekonomi nasional dan global yang berdampak terhadap penerimaan pajak daerah dan investasi. Di sisi lain, kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat untuk mendukung pemerataan infrastruktur kepulauan, peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi maritim, pengembangan kawasan perbatasan, transformasi ekonomi berbasis industri dan jasa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan fiskal yang lebih adaptif melalui peningkatan kemandirian pendapatan daerah, penguatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang lebih selektif dan berkelanjutan.

Pada sisi pendapatan, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi yang ditempuh meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah, penyempurnaan regulasi pemungutan, digitalisasi administrasi perpajakan dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan kinerja unit pemungut, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, pemerintah daerah terus mengoptimalkan akses terhadap berbagai sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dukungan APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan skema pembiayaan lainnya yang dapat mendukung pembangunan daerah. Upaya tersebut menjadi penting mengingat struktur pendapatan daerah masih menunjukkan ketergantungan yang relatif tinggi terhadap transfer pemerintah pusat sehingga peningkatan PAD diperlukan untuk memperluas ruang fiskal daerah.

Pada sisi belanja, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja (*quality of spending*) melalui pengalokasian anggaran yang lebih berorientasi pada hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pencapaian target RPJMD dan RKPD, terutama pada pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan, peningkatan kualitas

pelayanan dasar, penguatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan kawasan strategis dan perbatasan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta percepatan transformasi ekonomi berbasis industri, maritim, dan jasa bernilai tambah. Di samping itu, kebijakan belanja diarahkan pada peningkatan efisiensi struktur APBD melalui pengendalian belanja operasi dan penguatan alokasi belanja yang produktif. Mengingat struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi, khususnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja wajib lainnya, maka kebijakan Tahun 2027 difokuskan pada pengendalian belanja rutin dan realokasi anggaran menuju belanja modal yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan wilayah.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengelolaan belanja pegawai dilakukan agar tetap berada pada proporsi yang sehat terhadap total belanja APBD. Strategi yang ditempuh meliputi penataan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, optimalisasi distribusi ASN sesuai kebutuhan pelayanan publik, penerapan organisasi yang lebih efektif dan efisien, pemanfaatan transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas birokrasi, serta pengendalian belanja yang kurang memberikan nilai tambah. Kebijakan tersebut tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak ASN dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan belanja juga diarahkan untuk memenuhi ketentuan mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan dasar, pengawasan, serta belanja wajib lainnya dilakukan secara konsisten dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan. Pemenuhan mandatory spending tidak hanya berorientasi pada pencapaian besaran alokasi anggaran, tetapi juga pada peningkatan efektivitas pelaksanaan program sehingga memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan fiskal nasional Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menerapkan kebijakan efisiensi belanja daerah melalui rasionalisasi belanja administratif, pengendalian belanja operasional yang kurang produktif, optimalisasi belanja berbasis digital, konsolidasi pengadaan barang dan jasa, peningkatan efektivitas perjalanan dinas, serta penguatan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang belum memberikan hasil optimal. Efisiensi belanja dimaknai sebagai upaya meningkatkan produktivitas penggunaan anggaran sehingga ruang fiskal dapat dialihkan kepada program-program prioritas yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Pada sisi pembiayaan, arah kebijakan difokuskan pada pengelolaan pembiayaan secara hati-hati (*prudent*), selektif, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal. Pemanfaatan instrumen pembiayaan, termasuk pinjaman daerah apabila diperlukan, diarahkan untuk mendukung pembiayaan program atau proyek strategis yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang, bukan untuk membiayai kebutuhan belanja rutin. Pengelolaan pembiayaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, kelayakan proyek, tingkat risiko, serta kemampuan pembayaran kembali (*ability to pay*), sehingga kesehatan fiskal daerah tetap terjaga dalam jangka menengah dan panjang.

Sebagai penguatan implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat tata kelola fiskal melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan analisis fiskal, modernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kualitas pengawasan internal, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD. Penguatan analisis fiskal menjadi aspek yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah, mencakup analisis kapasitas fiskal, ruang fiskal (*fiscal space*), tingkat kemandirian keuangan daerah, risiko fiskal, dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Dengan analisis yang lebih komprehensif tersebut, arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2027 diharapkan menjadi lebih operasional, terukur, adaptif terhadap dinamika perekonomian, selaras dengan kebijakan fiskal nasional, serta mampu memperkuat peran APBD sebagai instrumen utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

3.2.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027

Proyeksi pendapatan daerah, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperhitungkan kontribusinya cenderung meningkat terhadap total Pendapatan Daerah pada periode proyeksi. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan transfer juga diproyeksikan mengalami peningkatan. Kenaikan PAD secara umum bersumber dari peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, yang diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan analisis kapasitas fiskal Provinsi Kepulauan Riau, kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai pencapaian visi dan misi daerah masih relatif terbatas. Kondisi ini mendorong perlunya upaya peningkatan kapasitas fiskal melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman kepada pihak ketiga. Penetapan besaran pinjaman daerah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan membayar (*ability to pay*), sehingga tetap menjaga kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah dalam jangka menengah.

Beberapa kebijakan yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan dan penyediaan fasilitas yang memadai pada unit-unit pelayanan yang memiliki potensi penerimaan signifikan. Perbaikan standar pelayanan, kemudahan akses, serta peningkatan kepuasan masyarakat diharapkan mampu mendorong kepatuhan dan meningkatkan kontribusi retribusi secara berkelanjutan.
2. Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan melalui pembenahan tata kelola internal, penajaman orientasi bisnis, serta peningkatan efisiensi operasional. Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, BUMD diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan kontribusi dividen yang optimal bagi daerah, sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen pendukung APBD sekaligus penggerak perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan penerimaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu diupayakan dengan tetap menjadikan mutu pelayanan sebagai prioritas utama. Pengelolaan BLUD yang fleksibel, efektif, dan berorientasi pada kinerja akan mendorong peningkatan pendapatan sekaligus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
4. Optimalisasi pengelolaan aset daerah menjadi langkah penting dalam memperkuat fiskal daerah. Hal ini dilakukan melalui penatausahaan aset secara komprehensif dan terperinci, disertai evaluasi dan penilaian kembali terhadap nilai ekonomi dan manfaat aset. Dengan pengelolaan aset yang lebih optimal dan produktif, aset daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan belanja yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan *(mandatory spending);* dan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
2. Belanja daerah dilakukan secara selektif dan tepat guna dan tepat sasaran dengan mengedepankan prioritas capaian RPJMD dan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung.
3. Belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 (rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.802.692.463.003,00**
4.1.01	Pajak Daerah	1.566.559.035.194,00
4.1.02	Retribusi Daerah	187.075.969.309,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.857.458.500,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.687.146.790.780,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.687.146.790.780,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.350.716.960,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.350.716.960,00
	Jumlah Pendapatan	**3.491.189.970.743,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**3.509.461.110.517,00**
	Jumlah Belanja Daerah	**3.509.461.110.517,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**149.400.000.000,00**
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	149.400.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**131.128.860.226,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	111.128.860.226,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**131.128.860.226,00**
	Pembiayaan Netto	**18.271.139.774,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**

Sumber: TAPD Provinsi Kepulauan Riau

3.2.2 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Landasan hukum dalam perumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. **Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 merupakan perkiraan yang terukur dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau diupayakan mengalami peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan program-program kerja yang disusun untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien dengan rincian sebagai berikut:

a. **Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah diarahkan pada penguatan tata kelola pemungutan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:

1) Penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan serta penguatan sistem komputerisasi dan basis data pada seluruh unit pelaksana teknis pemungutan, sehingga proses pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan terintegrasi.
2) Penyempurnaan landasan hukum melalui penyesuaian dan penguatan regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Upaya ini disertai dengan peningkatan kegiatan sosialisasi, edukasi, serta penegakan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah juga diperkuat, khususnya pada unit-unit pelaksana teknis, untuk meminimalkan potensi kebocoran dan meningkatkan optimalisasi penerimaan.
3) Pengembangan sistem informasi pendapatan daerah berbasis daring terus didorong untuk meningkatkan akurasi data, kemudahan pelayanan, dan efektivitas pengendalian. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah berupaya memperluas jumlah perangkat daerah

yang berperan sebagai pengelola retribusi, sehingga potensi penerimaan retribusi dapat digali secara lebih luas dan merata.

4) Dalam rangka mengoptimalkan potensi retribusi dari sektor kelautan, Pemerintah Provinsi bersama DPRD mendorong percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Peraturan ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemungutan retribusi pemanfaatan ruang laut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial ke depan.
5) Pemerintah provinsi juga memberikan dukungan anggaran kepada perangkat daerah penghasil retribusi, termasuk melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, untuk pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan.
6) Optimalisasi pendapatan daerah turut dilakukan melalui inventarisasi aset milik pemerintah provinsi yang berpotensi dimanfaatkan secara komersial, sehingga dapat memberikan kontribusi retribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah. Di samping itu, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan melalui perbaikan tata kelola perusahaan dan penguatan struktur permodalan, guna mendorong ekspansi usaha serta pemanfaatan peluang kerja sama dengan pihak swasta.
7) Selanjutnya, penataan manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menjadi bagian dari strategi intensifikasi PAD, khususnya melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu RSUD Engku Haji Daud di Tanjunguban dan RSUD Raja Ahmad Thabib di Tanjungpinang, sehingga peningkatan pendapatan dapat berjalan seiring dengan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah khususnya dengan melakukan Pengkajian terhadap jenis objek Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.

c. Peningkatan Pendapatan tranfer bersumber dari Dana Perimbangan dilakukan melalui:

1) Penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi secara aktif melakukan komunikasi, konsultasi, serta advokasi kebijakan dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat guna memastikan

optimalisasi alokasi dan penyaluran Dana Perimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Koordinasi intensif dengan instansi perpajakan, meliputi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data perpajakan serta mengoptimalkan potensi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang menjadi hak daerah.
3) Pengkajian, klarifikasi, dan verifikasi terhadap data realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah pusat serta pihak-pihak terkait, termasuk kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, guna memastikan ketepatan perhitungan dan penyaluran DBH sesuai potensi dan realisasi yang sebenarnya.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2027, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut:

a. Prioritas Pertama

Belanja yang menjadi prioritas pertama mencakup jenis belanja berikut ini.

1) Belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan *(mandatory spending)*

Alokasi belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan *(mandatory spending),* antara lain :

a) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pedoman Penyusunan APBD;
b) Belanja Fungsi Kesehatan, diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD meliputi:
   a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
   b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting:
   c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
   d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
   e. penguatan jejaring layanan primer,
   f. penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

c) Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/ atau transfe r kepada daerah dan/atau desa, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) Belanja untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan sebesar 0,9% dari total belanja daerah, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD.
e) Belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebesar 0,34% dari total belanja daerah, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD.
f) Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pedoman Penyusunan APBD.

Berdasarkan kondisi eksisting, struktur belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh belanja yang bersifat wajib, antara lain belanja pendidikan, kesehatan, belanja pegawai, belanja infrastruktur pelayanan dasar, pengawasan, serta alokasi belanja lain yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya memenuhi ketentuan *mandatory spending* melalui penyesuaian struktur APBD dan penguatan perencanaan penganggaran berbasis kinerja. Namun demikian, dinamika kapasitas fiskal, fluktuasi pendapatan daerah, serta meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan mandatory spending dan pendanaan program prioritas daerah.

Pada Tahun 2027, pemenuhan *mandatory spending* diarahkan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk alokasi fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan dasar, serta belanja wajib lainnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengoptimalkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar pemenuhan *mandatory spending* tidak hanya berorientasi pada pencapaian persentase alokasi anggaran, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan yang lebih efektif. Evaluasi terhadap efektivitas program akan terus dilakukan sehingga belanja wajib mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dari sisi kapasitas fiskal, *mandatory spending* memiliki implikasi terhadap terbatasnya ruang fiskal (*fiscal space*) yang dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan baru atau program strategis daerah. Semakin besar proporsi belanja wajib, semakin kecil fleksibilitas

pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan pembangunan yang berkembang. Oleh karena itu, peningkatan ruang fiskal dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengendalian belanja pegawai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, efisiensi belanja operasional, serta peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada hasil.

2) Belanja Mengikat *(mandatory expenditure).*

Belanja Mengikat *(mandatory expenditure)* dialokasikan untuk memenuhi kewajiban belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk menjamin keberlangsungan pelayanan dasar dan fungsi pemerintahan. Belanja mengikat tersebut meliputi:

a) Belanja pegawai, yang mencakup belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), honorarium pengelola keuangan daerah, pengelola barang milik daerah, serta pengelola sistem informasi pemerintahan daerah;
b) Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, khususnya DAK BOS, guna mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan;
c) Belanja operasional perkantoran untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah; dan
d) Belanja fungsional, terutama pada rumah sakit daerah dan Unit Pelaksana Teknis perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Belanja pegawai diarahkan untuk melaksanakan batas maksimal belanja pegawai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga dapat menjaga keberlanjutan fiskal dan peningkatan ruang fiskal pembangunan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen menjaga proporsi belanja pegawai agar tetap berada dalam batas yang ditetapkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengendalian belanja pegawai merupakan strategi penting untuk memperluas ruang fiskal (fiscal space) sehingga alokasi anggaran dapat lebih diarahkan pada belanja pembangunan yang produktif.

Strategi pemenuhan ketentuan tersebut dilakukan melalui penataan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pengendalian formasi ASN secara selektif sesuai kebutuhan

organisasi, serta optimalisasi redistribusi pegawai antarperangkat daerah untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan SDM. Rekrutmen aparatur baru dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, prioritas pelayanan dasar, dan kebutuhan jabatan yang bersifat strategis. Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas aparatur melalui penyederhanaan proses bisnis, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi layanan pemerintahan, dan penguatan manajemen kinerja ASN. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa diikuti peningkatan belanja pegawai yang tidak terkendali.

Pengendalian belanja pegawai juga diimbangi dengan efisiensi belanja operasional lainnya melalui rasionalisasi belanja administratif, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta penguatan penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, ruang fiskal yang tersedia dapat dialihkan untuk memperkuat belanja modal dan belanja pembangunan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Prioritas Kedua

Selain memenuhi belanja mengikat sebagai prioritas utama, kapasitas riil keuangan daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Alokasi belanja pada prioritas ini difokuskan pada program dan kegiatan strategis yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing wilayah Kepulauan Riau.

c. Prioritas Ketiga

Prioritas ketiga diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya sesuai kewenangan provinsi, setelah terpenuhinya belanja mengikat dan belanja prioritas pembangunan daerah. Alokasi anggaran pada prioritas ini tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keselarasan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2027.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja (*quality of spending*) agar lebih efektif, efisien,

tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Pengalokasian anggaran diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional, meliputi sebagai berikut:

1. Percepatan penurunan kemiskinan**.** Belanja daerah difokuskan pada penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kesenjangan, serta memperluas akses terhadap layanan publik yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)**.** Belanja daerah diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, pengembangan inovasi, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pengalokasian anggaran juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, serta mendukung pengembangan SDM yang unggul, produktif, dan berdaya saing.
3. Penguatan pelayanan publik**.** Belanja diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, percepatan transformasi digital melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun 2027 diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah melalui pengelolaan pembiayaan yang *prudent* dan terukur. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bank, serta pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok pinjaman. Pengelolaan pinjaman daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, risiko fiskal jangka menengah, serta pemanfaatannya untuk mendukung program dan kegiatan strategis yang memberikan manfaat

ekonomi dan sosial secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029.

Kebijakan pinjaman daerah Provinsi Kepulauan Riau diarahkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan pinjaman daerah dilakukan secara selektif, terukur, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian *(prudent),* dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah, kemampuan pembayaran kembali (*ability to pay*), serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fokus utama kebijakan pinjaman daerah adalah mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek ikonik daerah, antara lain Monumen Bahasa dan Rumah Sakit sebagai infrastruktur strategis yang diharapkan mampu memperkuat identitas daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memberikan fleksibilitas terhadap jangka waktu penyelesaian proyek sesuai dengan kebutuhan teknis dan kemampuan pendanaan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Perumusan visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pada periode sebelumnya, hasil analisis isu-isu strategis daerah, serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan nasional. Visi dimaknai sebagai gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode, sedangkan misi merupakan rumusan upaya strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Visi dan misi pembangunan daerah tersebut merupakan penjabaran langsung dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terpilih untuk masa jabatan 2025–2030. Penjabaran visi dan misi ini dituangkan secara operasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 sebagai dasar penetapan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan, serta program dan kegiatan perangkat daerah. Melalui penjabaran tersebut, visi dan misi kepala daerah diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan yang terukur dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2025-2029 adalah:

" KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA "

Dalam rangka mewujudkan visi**" Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata"**, misi yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah.
3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter;
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Penjabaran tujuan dan sasaran berdasar visi dan misi diuraikan sebagaimana berikut:

1. **Tujuan Pertama:** Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah
   Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:
   - Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif;
   - Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi;
   - Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
   - Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing;
   - Sasaran 5 : Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
   - Sasaran 6 : Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha, dan;
   - Sasaran 7 : Menurunnya tingkat kemiskinan.
2. **Tujuan Kedua:** Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah
   Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:
   - Sasaran 8: Meningkatnya kualitas infrastruktur publik;
   - Sasaran 9: Meningkatnya konektivitas transportasi publik.
3. **Tujuan ketiga:** Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter
   Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:
   - Sasaran 10 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
   - Sasaran 11: Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
   - Sasaran 12: Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak
   - Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga.
4. **Tujuan Keempat:** Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan
   Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:
   - Sasaran 14: Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat;
   - Sasaran 15: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban;
   - Sasaran 16: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan serta Daya Saing Daerah;
   - Sasaran 17: Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN;
   - Sasaran 18: Meningkatnya transformasi digital daerah, dan;
   - Sasaran 19: Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan.

5. **Tujuan Kelima:** Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
   Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:
   - Sasaran 20: Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dan;
   - Sasaran 21: Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah dengan sasaran.

Indikator yang digunakan pada masing-masing Tujuan dan Sasaran di dalam RPJMD tersebut dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2027

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Target 2027
1	**Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah**			
01.01	**Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	6,94	**5.67-7.62**
		Rasio Gini (Indeks)	0,382	**0.348-0.360**
		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta) (Rp. Juta Per Tahun)	172,46	**192.06-203.60**
1.1.1	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,83	2,11
1.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,4411	0,691
1.1.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,57	42.20-42.68
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	106,9	73,65
1.1.4	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,45	6.21-6.14

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Target 2027
1.1.5	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks)	44,60	39,70
		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	73,21	67,79
1.1.6	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	44,38	44,76
1.1.7	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	4,44	3.87-3.27
2	**Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah**			
2.1	**Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit**	**Indeks Infrastruktur (Indeks)**	64,22	**66,14**
2.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)	44,45	54,40
		Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	3.046	3,188
2.12	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,69	0,76
3	**Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter**			
3.1	**Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul**	**Indeks Modal Manusia (Indeks)**	0,59**)	**0.62-0.64**
3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,46	75,84
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15	13,90
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	10,78	11,19
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,28	13,38

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Target 2027
3.1.3	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,309	0.321-0.316
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	74,1	73,28
3.1.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks)	68,73	72,35
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)	0,319	0,356
4	**Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan**			
4.1	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital**	**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	A- (83,24)	**A-**
4.1.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,48	4,37
4.1.2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	68,91	73,15
4.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Predikat SAKIP (Predikat)	BB (78.35)	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini)	WTP*)	WTP
		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	47,02	47,61
		Level Maturitas SPIP (Level)	Level 2	Level 3
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	3,38*)	3,56
4.1.4	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	83,4	81,83
4.1.5	Meningkatnya Transformasi Digital Daerah	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) (Indeks)	55,93*)	51,67
4.1.6	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	80,83	77,69

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Target 2027
5	**Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**			
5.1	**Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju**	**Indeks Harmoni (Indeks)**	7,07 (Sangat Baik)	**Bagus**
5.1.1	Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	60,34*)	62,30
5.1.2	Meningkatnya toleransi kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	83,68	84.42-84.56
5.2	**Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah**	**Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)**	64,47	**50,45**
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	77,62	75,88
5.2.2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	132,68	106,5

4.2. Penetapan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Prioritas Nasional Tahun 2027, tujuan dan sasaran RPJMD dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan *Bottom Up*) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini.

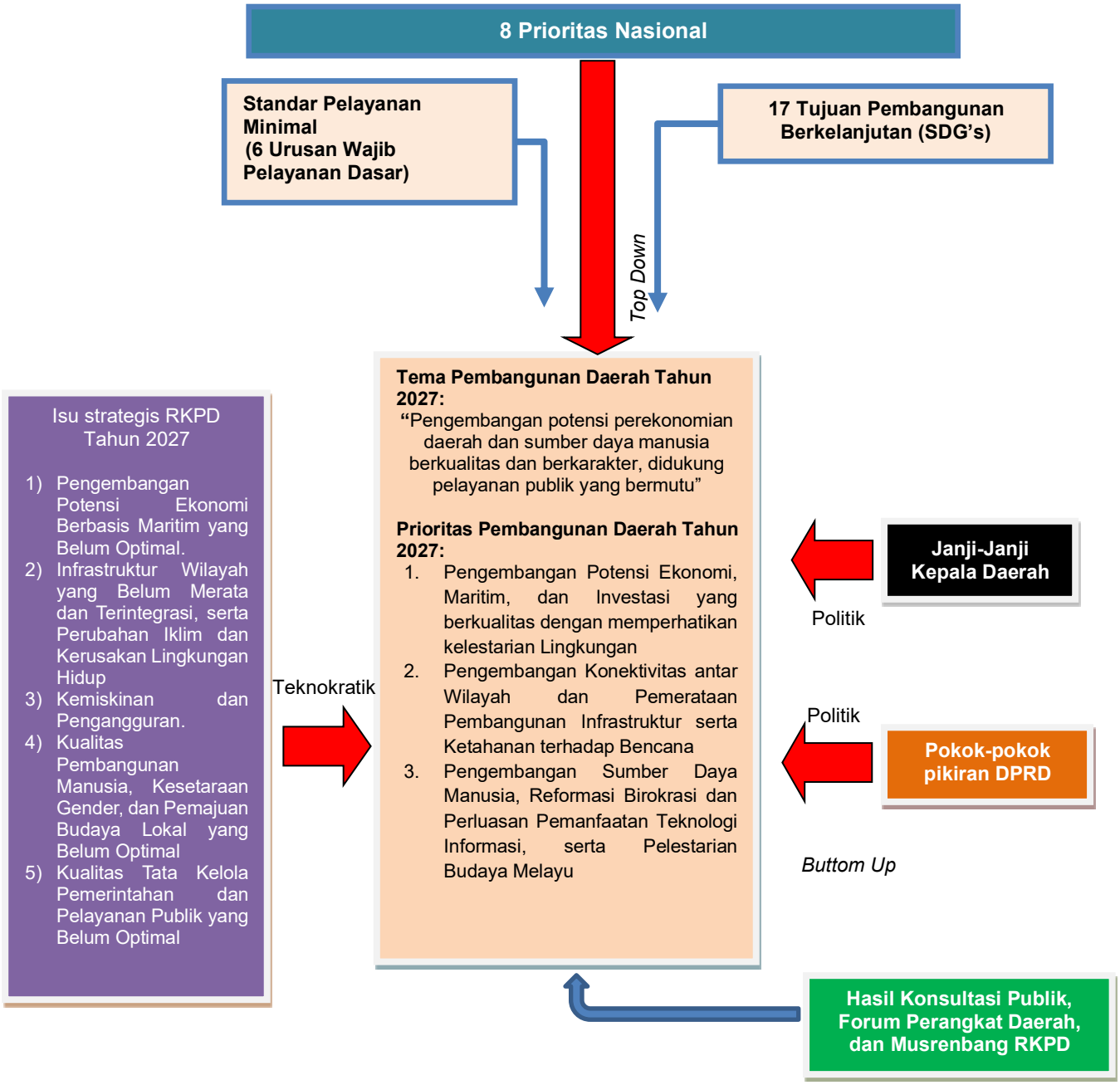

Gambar 4.1 Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2027 berdasarkan Prioritas RKP Tahun 2027, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Mendasarkan hasil perumusan prioritas diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2027 yaitu:

"Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berkarakter, Didukung Pelayanan Publik yang Bermutu"

Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2027 selaras dengan RKP tahun 2027 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Keterkaitan antara Tema RKP dengan Tema RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

Tema RKP Tahun 2027	Tema RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027
"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"	"Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berkarakter, Didukung Pelayanan Publik yang Bermutu"

Tema dan Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2027 selaras dengan Tema dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun 2027 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Keterkaitan antara Tema dan Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2027 selaras dengan Tema dan Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 Pada Tahun 2027

	Tema dan Prioritas RKPD Pada Tahun 2027	Tema dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029
Tema	"Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berkarakter, Didukung Pelayanan Publik yang Bermutu"	"Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berkarakter, Didukung Pelayanan Publik yang Bermutu"
Prioritas	Pengembangan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan.	Pengembangan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan.
	Pengembangan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana.	Pengembangan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana.
	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfataan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfataan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.

Penetapan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan daerah, mempertimbangkan peningkatan kualitas belanja daerah, efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan, penguatan ruang fiskal, serta optimalisasi belanja yang berorientasi pada hasil *(outcome),* sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan fiskal nasional dan peningkatan efektivitas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 yang ditetapkan yaitu:

a. **Pengembangan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan.**

   Prioritas ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah dengan menempatkan potensi kemaritiman sebagai penggerak utama pembangunan. Pengembangan ekonomi difokuskan pada sektor industri pengolahan, perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, serta ekonomi kreatif yang memiliki keterkaitan erat dengan karakter wilayah kepulauan. Seluruh upaya pengembangan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah,

meningkatkan produktivitas daerah, serta memperluas kesempatan kerja secara inklusif.

Peningkatan kualitas investasi dilakukan melalui perbaikan tata kelola perizinan, kepastian tata ruang, penyediaan dan penguatan kawasan strategis, serta percepatan digitalisasi layanan publik. Kebijakan investasi diarahkan untuk menarik investasi yang berorientasi jangka panjang, ramah lingkungan, dan mampu mendorong penguatan struktur ekonomi daerah, khususnya pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan ekonomi berbasis maritim.

Pengembangan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada optimalisasi koridor pariwisata yang telah ditetapkan dengan memperkuat keterhubungan antar destinasi dan keunggulan komparatif masing-masing wilayah. Arah kebijakan pariwisata menitikberatkan pada peningkatan kualitas destinasi wisata bahari, pengembangan wisata tematik seperti wisata kesehatan, kebugaran, olahraga, seni, dan budaya, serta penguatan pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan potensi alam, budaya lokal, dan kawasan geopark strategis. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata diprioritaskan pada destinasi unggulan, disertai penguatan kelembagaan ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata di kabupaten/kota. Pembangunan pariwisata diarahkan menuju model destinasi regeneratif dengan prinsip konservasi, dekarbonisasi, penciptaan lapangan kerja hijau, dan inklusivitas, serta mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di Batam dan Bintan.

b. Pengembangan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana.

Prioritas ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan yang sangat bergantung pada sistem transportasi laut dan udara. Kebijakan difokuskan pada penguatan pelabuhan pengumpan regional, peningkatan kualitas dermaga dan pelabuhan rakyat, pemeliharaan dan pembangunan jalan provinsi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, dan kelistrikan guna menjamin akses pelayanan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk di pulau-pulau kecil, terluar, dan wilayah perbatasan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan mobilitas orang dan barang, tetapi juga untuk memperkuat konektivitas ekonomi, menurunkan ketimpangan antarwilayah, serta memperluas akses terhadap layanan sosial dasar. Peningkatan layanan angkutan umum disesuaikan dengan kondisi kepulauan, antara lain melalui penyediaan fasilitas pendukung transportasi dan simpul integrasi transportasi darat dan laut.

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional diprioritaskan pada pelabuhan yang telah siap secara kelembagaan dan administratif untuk mendukung konektivitas wilayah secara efektif.

Pengembangan kawasan permukiman dilakukan melalui penetapan kawasan strategis provinsi dan pelaksanaan program yang mendukung kabupaten/kota, termasuk dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan peningkatan pengelolaan air limbah domestik.

Prioritas ini juga menekankan penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana yang tinggi di Kepulauan Riau, seperti cuaca ekstrem, angin kencang, banjir rob, abrasi pantai, dan kenaikan muka air laut. Pemerintah provinsi mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, rehabilitasi ekosistem pesisir dan mangrove, serta penerapan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan konektivitas dapat berlangsung secara aman, tangguh, dan berkelanjutan.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfataan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.

Prioritas ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kepulauan Riau melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga masyarakat memiliki kompetensi, kesehatan, dan produktivitas yang memadai dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan global. Kebijakan difokuskan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah dan vokasi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta pengembangan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan sektor maritim, pariwisata, industri, dan ekonomi kreatif.

Dalam rangka mendukung Tahap I Penguatan Fondasi Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia (2025–2029) sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia yang disusun oleh Bappenas (2025) dan selaras dengan RPJMN 2025–2029, maka prioritas pembangunan ketenagakerjaan Tahun 2027 di Provinsi Kepulauan Riau juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem tenaga kerja hijau. Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2027 meliputi: (1) meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi hijau (green skills) di sektor prioritas daerah, meliputi energi terbarukan, kelautan dan pesisir, pariwisata berkelanjutan, industri hijau, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah; (2) terintegrasinya elemen kompetensi hijau dalam kurikulum pelatihan pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi di wilayah Kepulauan Riau;

(3) meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memperoleh sertifikasi kompetensi, khususnya pada jabatan-jabatan pekerjaan hijau yang relevan dengan sektor unggulan daerah; serta (4) tersusunnya peta pekerjaan hijau (green jobs mapping) yang spesifik untuk konteks Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar perencanaan ketenagakerjaan sektoral yang adaptif.

Terkait tata kelola pemerintahan, prioritas ini menekankan reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan transparansi. Transformasi digital didorong melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi layanan publik, integrasi sistem informasi, dan optimalisasi pemanfaatan data. Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Kepulauan Riau terus diperkuat melalui peningkatan keterisian, kualitas, dan interoperabilitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat dan tepat sasaran.

Pelestarian Budaya Melayu menjadi bagian integral dari prioritas pembangunan sebagai upaya memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata berbasis budaya. Kebijakan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat kebudayaan, revitalisasi situs sejarah, penguatan pendidikan budaya, serta penyelenggaraan event budaya Melayu yang mendorong kreativitas, ekonomi masyarakat, dan harmoni sosial.

Keterkaitan antara Permasalahan, Isu Strategis dengan Prioritas Daerah Tahun 2027 sebagai berikut.

Tabel 4.4.
Keterkaitan antara Permasalahan, Isu Strategis dengan Prioritas Daerah Tahun 2027

Permasalahan	Isu Strategis Daerah	Prioritas RKPD
1) Belum optimalnya kawasan konservasi yang dikelola minimun, terlihat dari luas kawasan konservasi yang dikelola minimum 2) Masih rendahnya produksi perikanan budidaya 3) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	a. Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal	1) Pengembangan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan
4) Masih kurangnya fasilitasi dan penilaian koperasi, terlihat dari koperasi yang diawasi dan KSP/UPS yang dinilai kesehatannya 5) Masih rendahnya koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan.		

Permasalahan	Isu Strategis Daerah	Prioritas RKPD
6) Belum optimalnya daya tarik wisatawan mancanegara, terlihat dari rata rata lama tinggal dan jumlah tamu wisatawan mancanegara		
7) Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan, terlihat dari hasil survei kepuasan masyarakat yang belum optimal.		
8) Belum optimalnya penanganan dampak perubahan iklim, terlihat dari penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian yang berdampak pada produktivitas sektor pertanian 9) Belum optimalnya fasilitasi penyuluhan bagi petani, terlihat dari SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan		
10) Belum optimalnya pengelolaan area hutan yang dilindung dari perambahan dan penebangan liar.		
11) Masih rendahnya pengelolaan zona konservasi air tanah 12) Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan (EBT)		
13) Masih rendahnya pengendalian stabilitasi harga barang kebutuhan, terlihat dari variasi harga antar wilayah 14) Belum optimalnya peningkatan sarana distribusi perdagangan, terlihat dari fasilitasi pembinaan pelaku usaha perdagangan.		
15) Belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, menengah, industri kreatif serta peningkatan nilai tambah produk olahan industri.		
16) Masih kurangnya ketersediaan air baku untuk masyarakat, terlihat dari tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan air siap minum perpipaan 17) Masih rendahnya akses sanitasi aman bagi masyarakat, terlihat dari	b. Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi, serta Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2) Pengembangan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta

Permasalahan	Isu Strategis Daerah	Prioritas RKPD
rumah tangga dengan akses sanitasi aman 18) Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang, terlihat dari proses revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan perda yang belum optimal		Ketahanan terhadap Bencana.
19) Belum optimalnya pelayanan dan fasilitasi ketersediaan angkutan jalan, terlihat dari ketersediaan perlengkapan jalan, layanan angkutan laut, angkutan sungai, angkutan danau, dan penyebrangan.		
20) Belum optimalnya jumlah rumah layak huni yang dibangun, dan penataan kawasan kumuh.		
21) Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, dan masih kurangnya penanganan sampah di fasilitas pengolahan sampah.		
22) Belum optimalnya penataan bidang lahan/KK di lokasi kawasan transmigrasi.		
23) Belum optimalnya pembebasan lahan dan tata kelola administrasi pertanahan.		
24) Belum optimalnya pengelolaan lokasi prioritas wilayah perbatasan.		
25) Belum meratanya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat, terlihat dari penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	c. Kemiskinan dan Pengangguran	
26) Masih kurangnya pembinaan pada lembaga kemasyarakatan desa, terlihat dari Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya 27) Masih rendahnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa		
28) Masih kurangnya layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja yang terdaftar		

Permasalahan	Isu Strategis Daerah	Prioritas RKPD
29) Belum optimalnya inklusivitas pasar kerja khususnya pada sekotr formal bagi pekerja penyandang disabilitas 30) Belum optimalnya mekanisme penanganan perselisihan ketenagakerjaan serta keterbatasan kapasitas layanan pengaduan dan penyelesaian kasus		
31) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan, terlihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang belum optimal 32) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terlihat dari angka putus sekolah yang belum optimal 33) Belum optimalnya jumlah guru yang mengajar dalam pendidikan, terlihat dari rasio guru SMA/SMK terhadap murid di sekolah yang belum optimal.	d. Kualitas Pembangunan Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pemajuan Budaya Lokal yang Belum Optimal	3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfataan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.
34) Masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan, terlihat dari jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan tingkat kegemaran membaca masyarakat yang belum optimal.		
35) Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan untuk persalinan, terlihat dari cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan angka kematian bayi (AKB) 36) Masih kurangnya keterjangkauan fasilitas kesehatan untuk bayi, terlihat dari cakupan imunisasi 37) Masih rendahnya pengobatan kasus tuberkulosis, terlihat dari cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis.		
38) Belum optimalnya ketahanan pangan wilayah, terutama bagi daerah rentan rawan pangan.		

Permasalahan	Isu Strategis Daerah	Prioritas RKPD
39) Belum optimalnya fasilitasi bagi wirausaha pemuda dan pembinaan atlet, terlihat dari rasio kewirausahaan pemuda dan cakupan pembinaan atlet muda yang belum optimal.		
40) Belum optimalnya pelayanan pemenuhan hak dan perlindungan kasus anak.		
41) Belum optimanya partisipasi masyarakat yang ber-KB.		
42) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya yang dilestarikan 43) Masih rendahnya pembinaan sejarah, terlihat dari kesadaran pelajar tentang sejarah lokal dan kompetensi SDM Sejarah		
44) Belum optimalnya pemenuhan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain terlihat terlihat dari masih terdapat penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el .	e. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal	
45) Belum optimalnya pelayanan publik, terlihar dari profesionalisme SDM Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat 46) Masih rendahnya fasilitasi dan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, terlihat dari pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi yang belum optimal		
47) Belum optimalnya tingkat keamanan informasi pemerintah daerah.		
48) Belum optimal dukungan perangkat daerah pada dalam penerapan Single Data Statistik (SDS).		
49) Belum optimalnya pengelolaan arsip sesuai standar.		
50) Belum optimalnya pelaksaan birokrasi yang dipengaruhi oleh pencapaian target pemerintah		

Permasalahan	Isu Strategis Daerah	Prioritas RKPD
daerah, kualitas pelayanan publik, regulasi hukum, dan sebagainya.		
51) Belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.		
52) Belum optimalnya kualitas, keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.		
53) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah dalam penambahan nilai aset tetap.		
54) Belum optimalnya pengembangan dan sertifikasi kompetensi ASN.		
55) Belum optimalnya kurangnya kompetensi teknis dan managerial ASN.		
56) Kurangnya inovasi penelitian dan pengembangan, terlihat dari persentase inovasi yang dilaporakan.		
57) Belum optimalnya manajemen risiko pemerintah daerah ditunjukkan dengan tingkat maturitas SPIP. 58) Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan. 59) Belum terpenuhinya Kebutuhan dan kompetensi Auditor dan P2UPD		
60) Belum optimalnya pelayanan penghubung.		
61) Masih kurangnya tingkat rasa aman masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, terlihat dari perkuatan kesiapsiagaan penanganan bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana yang belum optimal.		
62) Potensi konflik sosial dan politik dan belum optimalnya ketahanan nasional.		

Tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 pada masing-masing prioritas tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5.
Prioritas, Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

No.	Prioritas RKPD / Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2027
PD-1	**Pengembangan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan.**		
1.1	**Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**5.67-7.62**
		Rasio Gini (Indeks)	**0.348-0.360**
		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta) (Rp. Juta Per Tahun)	**192.06-203.60**
1.1.1	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,11
1.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,691
1.1.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	42.20-42.68
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	73,65
1.1.4	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.21-6.14
1.1.5	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks)	39,70
		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	67,79
1.1.6	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	44,76
1.1.7	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	3.87-3.27
1.2	**Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan**	**Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)**	**50,45**

No.	Prioritas RKPD / Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2027
	memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah		
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	75,88
1.2.2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	106,5
PD-2	**Pengembangan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana**		
2.1	**Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit**	**Indeks Infrastruktur (Indeks)**	**66,14**
2.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)	54,40
		Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	3,188
2.12	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,76
PD-3	**Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfataan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu**		
3.1	**Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul**	**Indeks Modal Manusia (Indeks)**	**0.62-0.64**
3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,84
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,90
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	11,19
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,38
3.1.3	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0.321-0.316
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	73,28
3.1.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks)	72,35

No.	Prioritas RKPD / Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2027
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)	0,356
3.2	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital**	**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	**A-**
3.2.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,37
3.2.2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	73,15
3.2.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Predikat SAKIP (Predikat)	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini)	WTP
		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	47,61
		Level Maturitas SPIP (Level)	Level 3
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	3,56
3.2.4	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81,83
3.2.5	Meningkatnya Transformasi Digital Daerah	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) (Indeks)	51,67
3.2.6	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	77,69
3.3	**Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju**	**Indeks Harmoni (Indeks)**	**Bagus**
3.3.1	Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	62,30
3.3.2	Meningkatnya toleransi kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	84.42-84.56

Perincian arah kebijakan dan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.6.
Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
PD-1	**Pengembangan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan.**			
1.1	**Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	
			Rasio Gini (Indeks)	
			Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta) (Rp. Juta Per Tahun)	
1.1.1	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	
		Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Produktivitas UMKM	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
1.1.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Fasilitasi Pengembangan Ekspor (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	
1.1.4	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		Meningkatanya pekerja Provinsi Kepri yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%))	
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1.1.5	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks)	
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan (Hektar)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
1.1.6	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
1.1.7	Menurunnya tingkat kemiskinan		Tingkat Kemiskinan (%)	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Pesentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Yang Sudah Dibina (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP-el (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin (%)	
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	
1.2	**Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah**		**Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)**	
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	
		Meningkatnya tata Kelola Persampahan	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
		Menurunnya Kerusakan hutan	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
			Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan (%)	
		Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa (%)	

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1.2.2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan saat Pasca Bencana	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Indeks)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Indeks)	
			Indeks Pencegahan Bencana (Indeks)	
PD-2	**Pengembangan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana**			
2.1	**Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit**		**Indeks Infrastruktur (Indeks)**	
2.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik		Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)	
			Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	
			Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	
		Terwujudnya tertib penyelenggaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
			Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun (Unit)	
		Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
		Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
			Intensitas energi primer (SBM/Milyar Rupiah)	
2.12	Meningkatnya konektivitas transportasi publik		Rasio Konektivitas (Rasio)	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	
PD-3	**Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfataan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu**			
3.1	**Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul**		**Indeks Modal Manusia (Indeks)**	
3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	
			Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	
			Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%)	
			Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1000)	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	
			Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (kabupaten/kota)	

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	
			Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Per 1000)	
			Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) (Angka)	
			Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	
			Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	
			Hipertensi dalam pengendalian (%)	
			Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	
			Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (%)	

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa (Nilai)	
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB (%)	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (%)	
			Rasio peserta didik per kelas (Rasio)	
			Persentase Konten Pendidikan (%)	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (%)	
3.1.3	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Rasio Kekerasan Anak (Rasio)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
3.1.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks)	
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)	
		Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi (%)	

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	
3.2	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital**		**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	
3.2.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani (%)	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
			Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau (%)	
			Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah (%)	
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (%)	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
			Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	
			Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (%)	
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
			Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)	
			Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)	
			Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)	

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
3.2.2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya (%)	
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	
			Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya (%)	
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	
3.2.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah		Predikat SAKIP (Predikat)	
			Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini)	
			Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	
			Level Maturitas SPIP (Level)	
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (%)	
			Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual Risk) Melalui Penerapan Manajemen Risiko (%)	
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer dibandingkan Target Tahun Berjalan (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
			Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)	
			Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)	
			Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih (%)	
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	
			Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital (%)	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah (%)	
			Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (%)	
			Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota (%)	
3.2.4	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	
			Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	
			Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat (%)	
			Persentase ASN yang dibina Karirnya (%)	
			Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit (Nilai)	
			Persentase ASN yang dinilai kompetensi manajerial dan sosial kultural (%)	
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	
			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	
3.2.5	Meningkatnya Transformasi Digital Daerah		Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) (Indeks)	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
3.2.6	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan		Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) (Persentase)	
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	
		Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
3.3	**Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju**		**Indeks Harmoni (Indeks)**	
3.3.1	Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan Melayu		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%)	
			Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	
		Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	

NO.	PRIORITAS RKPD / TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009) (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan (Indeks)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	
3.3.2	Meningkatnya toleransi kerukunan umat beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	
		Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

4.3. Dukungan Program RKPD Terhadap Prioritas Nasional dan Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Tema RKP Tahun 2027 yaitu: “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Tema ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

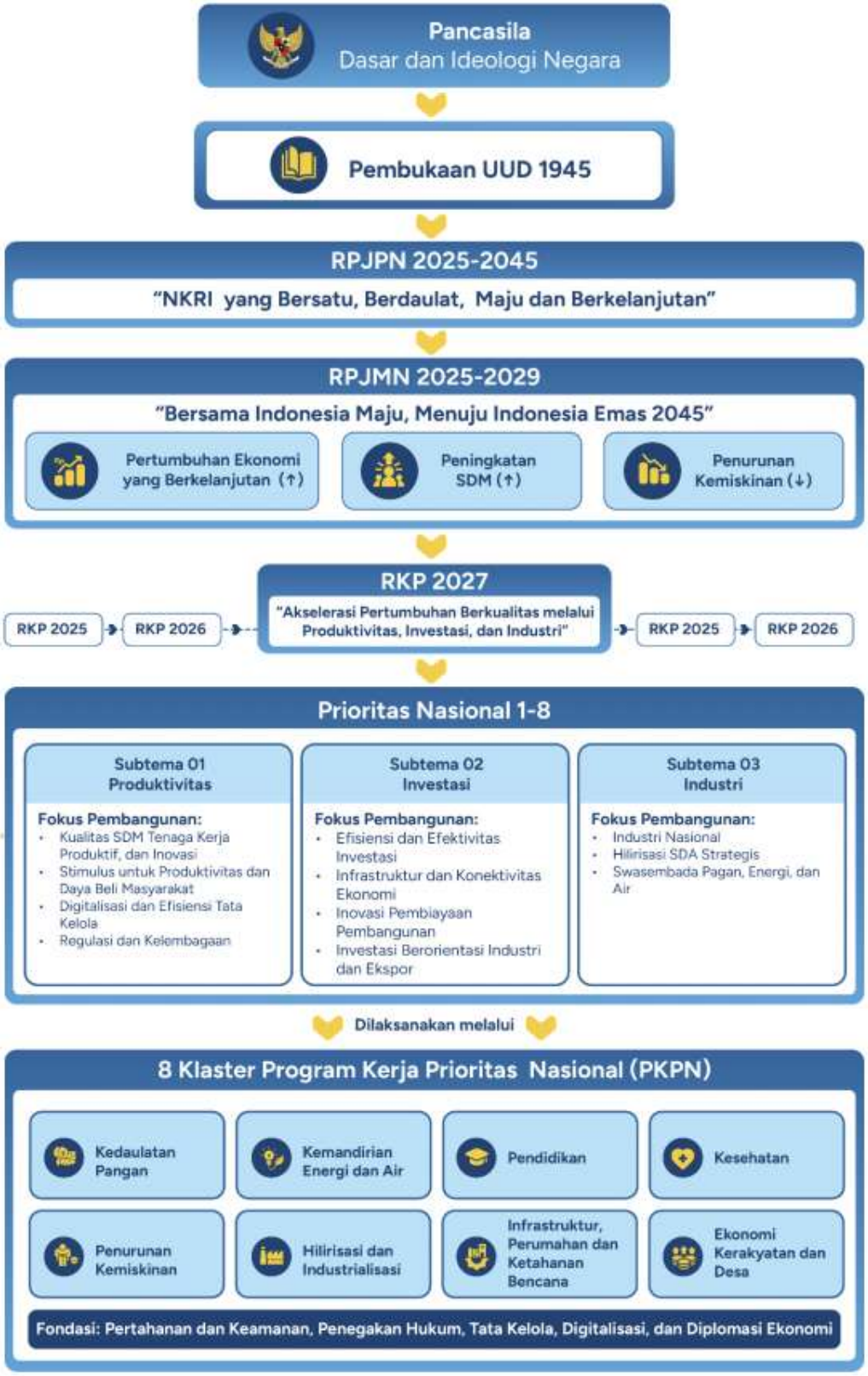

Gambar 4.2 Kerangka Pikir RKP Tahun 2027

Ketiga subtema RKP Tahun 2027 dilaksanakan melalui sebelas Fokus Pembangunan (FP) sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan ketajaman arah kebijakan dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Kesebelas FP tersebut yaitu (1) Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan Inovasi; (2) Stimulus untuk Produktivitas Daya Beli Masyarakat; (3) Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola; (4) Regulasi dan Kelembagaan; (5) Efisiensi dan Efektivitas Investasi; (6) Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi; (7) Inovasi Pembiayaan Pembangunan; (8) Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor; (9) Industri Nasional; (10) Hilirisasi SDA Strategis; serta (11) Swasembada Pangan, Energi, dan Air, menjadi instrumen untuk menerjemahkan arah kebijakan makro ke dalam intervensi yang lebih konkret, terarah, dan terukur.

Dalam rangka memastikan sebelas FP dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang lebih konkret, RKP Tahun 2027 menjabarkannya lebih lanjut ke dalam delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Penjabaran daftar program PKPN, keterpaduan program dengan PN, serta strategi pembiayaan program secara lebih detail dijabarkan dalam Buku I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKP Tahun 2027. Penajaman prioritas pembangunan melalui intervensi kebijakan strategis bertujuan untuk menjawab ketercapaian Trisula Pembangunan. Melalui klaster PKPN, intervensi pembangunan lintas sektor diarahkan agar lebih terintegrasi, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan tahunan. Dalam RKP Tahun 2027, PKPN terhimpun dalam delapan klaster, yaitu (1) kedaulatan pangan; (2) kemandirian energi dan air; (3) pendidikan; (4) kesehatan; (5) penurunan kemiskinan; (6) hilirisasi dan industrialisasi; (7) infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; serta (8) ekonomi kerakyatan dan desa. Adapun delapan klaster tersebut didukung oleh penguatan aspek pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Kedelapan klaster beserta pendukungnya ini memberikan dukungan terhadap sebelas FP.

Gambar 4.3 Kerangka Keterkaitan Prioritas Nasional, Subtema, Fokus Pembangunan, dan Klaster PKPN RKP Tahun 2027

Pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2027 diharapkan mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berlandaskan pada Trisula Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan tersebut disusun sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, sekaligus menjadi instrumen pengendalian agar arah kebijakan tetap selaras dengan target pembangunan jangka menengah. Pada pilar pertumbuhan ekonomi berkualitas, sasaran pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, yang didukung oleh peningkatan produktivitas, penguatan investasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional bruto per kapita, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, serta peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Indikator-indikator tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Pada pilar penurunan kemiskinan dan ketimpangan, sasaran pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, antara lain, meliputi (1) penguatan perlindungan sosial, (2) peningkatan kesempatan kerja, serta (3) stabilisasi harga kebutuhan pokok. Indikator yang digunakan meliputi tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan rasio gini, yang secara bersama-sama mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Upaya ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan serta meningkatkan daya beli masyarakat secara luas.

Pada pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia, sasaran pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas tenaga kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Hal ini dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Indikator yang digunakan antara lain tingkat pengangguran terbuka dan indeks modal manusia sebagai ukuran kualitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ekonomi. Selain indikator utama tersebut, sasaran pembangunan juga diperkuat dengan indikator pendukung yang mencerminkan kinerja sektor-sektor strategis, antara lain indeks kesejahteraan petani dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal. Indikator tersebut penting untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi yang didorong melalui produktivitas, investasi, dan industrialisasi juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi di sektor riil serta penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

Gambar 4.4 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027

Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Riau terhadap ASTA CITA sebagai berikut.

Tabel 4.7.
Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027 Terhadap ASTA CITA

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
							1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
							1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digit, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
							2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
		3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
							3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
							3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
							3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
							3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
		3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi				
							3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar
					3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
							3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
		3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pencapaian Ketahanan Energi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
							3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
					3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang,

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						KETENAGALISTRIKAN		Daerah Terpencil dan Perdesaan
							3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
							1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
							1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
				Terlaksananya pembangunan	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARA	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				daerah sesuai dengan rencana tata ruang		AN PENATAAN RUANG		
							1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional
							2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
		3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
							3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
							3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa,

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
							2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						DAN USAHA MIKRO (UMKM)		dan Pengentasan Kemiskinan
							2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
		3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
							3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
							3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
							3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
							3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual
							3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
							3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan akses di daerah				
							2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
		2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
		2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
					2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
							2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
					2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
							2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
							1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
							1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
							1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru
		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit
							1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
							1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
							1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
							1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
							1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
							1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
							2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan tehadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
							2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
							2.12.02.3.01.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
							2.12.03.3.02.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
		2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
							2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
							2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
							2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
							2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
		2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi
							2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Tercapainya pertumbuhan sektor industri	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		PERINDUSTRIAN	pengolahan nonmigas		PEMBANGUNAN INDUSTRI		
							3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
							3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
		3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Meningkatnya Perdagangan melalui	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			PERDAGANGAN	Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global		DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
							3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional
							3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor
		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal
							2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
							1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
		2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
					2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						PEMERINTAHAN DESA		
		3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01.0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
							3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
					3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
							2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik
							2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
							2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
							2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet
							2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
		2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
							2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sectoral
		2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemerintah Daerah		PENGAMANAN INFORMASI		
							2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
							1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
							1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar				
							1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
							1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
							1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
							2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Proyek Strategis Nasional Tahun 2027 sebagai berikut.

Tabel 4.8.
Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027 Terhadap Proyek Strategis Nasional

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan									
			2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem									
			3. Sekolah Rakyat	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat tahun 2029	Tingkat Kemiskinan	%	3.27 - 3.87	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.00 08 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/Kota	7
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	2.11.06.1.01.00 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	1

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
								LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
								PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.06.00 04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	1
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		4. Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	63.72	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01.00 23 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten/Kotan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kabupaten/ Kota	7
								PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03.00 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	5
									1.04.02.1.03.00 08 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	2
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Terlaksananya jaringan irigasi swasembada pangan yang berkelanjutan	Tingkat kesiapan teknis dan operasi pemeliharaan irigasi untuk mendukung swasembada pangan (%)	%	-	-	-	-	-	-

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Operasionalisasi BPP	Unit	21	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01.00 03 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	1
									3.27.07.1.02.00 04 Sinkronisasi dan Koordinasi penyuluh pertanian (ASN, Swadaya dan Swasta) lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan penyuluhan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	Laporan	1
			3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah									
			4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung	Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah	Luas Hasil Cetak Sawah yang ditingkatkan IP nya	Hektare	20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01.00 06 1. Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	Dokumen	1

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
			Pangan/Food Estate)									
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.00 01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1
									3.27.03.1.01.00 13 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	40
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Pangan Akuatik	Terwujudnya Ketersediaan Sumber Pangan Akuatik Secara Berkelanjutan Sebagai Bentuk Swasembada dan Ketahanan Pangan.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	317179.39	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.00 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	1472796.93
								PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.00 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1
									3.25.03.1.01.00 10 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	5800
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,		Kampung Nelayan Merah Putih	Terwujudnya kemandirian dan daya saing kampung nelayan serta kampung	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar	Miliar Rupiah	4026	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03.00 04 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Persentase	100

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.			budi daya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir.	Harga Konstan Sektor Perikanan				Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil 1.		
									3.25.03.1.06.00 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	1
3	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan untuk semua	1. Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	13,9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.00 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	7
									1.02.02.1.02.00 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.00 14 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/ Kota	1

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
			2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, Dan Lansia Yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, Dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	50	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.00 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1
									1.02.02.1.02.00 32 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Laporan	10
									1.02.02.1.02.00 38 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	1
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02.00 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	7
			3. Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	98.8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.00 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.00 08 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/Kota	7
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02.00 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	1
			4. Penuntasan TBC	Tercapainya Penuntasan TBC Melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	Penemuan Kasus TBC	%	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.00 33 Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	Kabupaten/ Kota	1
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.00 06 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	2040
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02.00 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	7
			5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	meningkatkan kualitas rumah sakit tipe atau kelas D menjadi C melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas di rumah sakit daerah	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	%	85	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.00 26 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat	Unit	1

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
										tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
								PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.00 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	22
									1.02.02.1.01.00 26 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	unit	1
								PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.00 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	22
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas	%	100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.00 60 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus							
									1.01.02.1.02.00 53 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1
									1.01.02.1.03.00 59 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1
									1.01.02.1.01.00 60 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1
			2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah									
			3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	77,29	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.00 75 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
					Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	76,15		1.01.02.1.02.00 73 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50
									1.01.02.1.03.00 73 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	25
									1.01.02.1.01.00 75 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50
									1.01.02.1.02.00 73 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50
			4. Makan Bergizi Gratis	Meningkatnya asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.00 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4
								PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.00 08 Pelaksanaan kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi	Jumlah Kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi yang dilaksanakan	Dokumen	1

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02.00 03 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	4
					Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	%	100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.00 75 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.267					

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
	milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
				Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	900	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.00 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	2031
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.00 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	8
								PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.00 05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	50
								PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.00 13 Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Lembaga	30
								PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.00 20 Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang	100

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan pelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	%	100					
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73,28	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.00 65 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.00 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	8
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.00 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	65
								PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.00 16 Bimbingan teknis dan pendampingan	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas	Orang	100

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
									SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.		
								PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01.00 05 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	2
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi	Pengendalian inflasi dengan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Provinsi	Bulan	1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.00 09 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Laporan	1
								PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.02.00 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian lokal melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT	%	80	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01.00 03 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	326

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
			3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)									
			4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)									
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	15.31	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01.00 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	2
					Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	55.19	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.00 05 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	1
									2.11.03.1.01.00 11 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	1
								PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.00 14 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
									pengelolaan sampah di kabupaten/kota			
								PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.00 05 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	1
									2.11.03.1.01.00 11 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK.	Dokumen	1
								PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.00 14 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1
				Terintegrasinya implementasi Ekonomi Syariah dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	7000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.00 16 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Unit Usaha	5
								PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.00 18 Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku usaha	50
								PROGRAM PERENCANAAN DAN	3.31.02.1.01.00 10 Pelaksanaan	Jumlah objek pengawasan jaminan	Dokumen	1

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
								PEMBANGUNAN INDUSTRI	pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan		
								PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.06.1.01.00 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	1
					Indeks Zakat Nasional (IZN).	Poin	0.65	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.00 03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	130
	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).			Terwujudnya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP	Indeks	50	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.00 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100
									8.01.02.1.01.00 11 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1
									8.01.02.1.01.00 12 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	35
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan			Tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan	Persentase penurunan potensi kehilangan	%	100	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.00 03 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	1

NO	ASTACITA	ProSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/ TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/ TEMATIK	SATUAN	TARGET 2027	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
	lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			upaya pengurangan risiko, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak bencana	PDB sektor terdampak bahaya iklim							
									1.05.03.1.04.00 09 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1

4.4. Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM

Program-program yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 menunjukkan tingkat keselarasan yang kuat dengan upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Kepri telah menempatkan enam urusan wajib pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial sebagai bagian integral dari program prioritas daerah. Penyelarasan ini terlihat dari bagaimana program RKPD dirancang tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat melalui pemenuhan indikator-indikator SPM.

Pada urusan pendidikan, program RKPD Kepri mengenai peningkatan akses dan mutu pendidikan, penyediaan sarana prasarana pendidikan menengah, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan kurikulum dan literasi merupakan wujud nyata komitmen terhadap SPM Pendidikan. Fokus pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK, peningkatan layanan pendidikan inklusif, dan pemenuhan kebutuhan sarana ruang kelas menunjukkan bahwa Kepri telah menyelaraskan programnya dengan target pelayanan minimal pendidikan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Keselarasan juga tampak jelas pada urusan kesehatan, khususnya melalui program peningkatan layanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan imunisasi, penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, pengendalian penyakit menular, penanganan stunting, serta penyediaan layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah. Program yang memperkuat akreditasi Puskesmas dan partisipasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejalan dengan SPM Kesehatan yang mensyaratkan seluruh penduduk memperoleh akses layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau. Kepri juga mencakup program penanganan kedaruratan kesehatan dan kesiapsiagaan bencana kesehatan, yang merupakan komponen penting dalam SPM.

Pada urusan pekerjaan umum, penyediaan air minum aman (SPAM), sanitasi layak, pengelolaan drainase, dan pengurangan risiko banjir menunjukkan sinkronisasi dengan SPM urusan Pekerjaan Umum terkait penyediaan layanan dasar permukiman. Target peningkatan akses air minum dan sanitasi bukan hanya mendukung SPM, tetapi juga mendukung agenda nasional mengenai percepatan layanan dasar untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Program urusan perumahan rakyat, seperti pembangunan rumah layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), dan penyediaan hunian bagi kelompok rentan, juga sangat selaras dengan kewajiban daerah dalam memenuhi SPM Perumahan. Kepri telah menempatkan program-program ini sebagai bagian dari prioritas pemerataan layanan permukiman, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah tertinggal.

Pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, keselarasan diwujudkan melalui program peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP, kesiapsiagaan penanggulangan bencana, perlindungan masyarakat, pengawasan dan penegakan peraturan daerah, serta peningkatan keamanan wilayah. Program ini mendukung SPM bidang ketentraman dan ketertiban yang menuntut daerah memastikan perlindungan masyarakat dari ancaman gangguan keamanan dan kedaruratan.

Selanjutnya, urusan sosial tercermin dalam program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan penyandang disabilitas, perlindungan anak, pelayanan lansia, dan penguatan sistem jaminan sosial daerah. Program-program ini menjawab kewajiban SPM Sosial, yang mengharuskan daerah memberikan layanan dasar kepada kelompok rentan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendataan, penanganan masalah sosial, serta peningkatan akses layanan rehabilitasi sosial.

Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SPM tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9.
Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
1	**Pendidikan**				
	a. pendidikan menengah;	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional			
		• Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	65,69	
		• Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	62,90	
	b. pendidikan khusus;	Persentase Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	%	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional			
		• Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	61,50	

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
		• Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	31,50	
2	**Kesehatan**				
	a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;	Persentase Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
	a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	%	100,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**				
	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	Program Pengembangan Perumahan
	b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi	%	100,00	Program Pengembangan Perumahan

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	Pemerintah Daerah provinsi;	penyediaan rumah yang layak huni			
5	**Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat**				
	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	%	100,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
6	**Sosial**				
	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan	Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.	Persentase Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100,00	Program Penanganan Bencana

Tabel 4.10.
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2027 Pendukung Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Rp 500.000.000(500 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1250	Rp 6.932.726.200(6 Miliar 932 Juta 726 Ribu 200 Rupiah)
					1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0068 – Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2	Rp 700.000.000(700 Juta Rupiah)
				1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Rp 100.000.000(100 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0004 - Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	1	Rp 15.000.000(15 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8	Rp 1.900.000.000(1 Miliar 900 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0031 – Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000	Rp 1.125.000.000(1 Miliar 125 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0037 – Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1466	Rp 6.461.200.000(6 Miliar 461 Juta 200 Ribu Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					1.01.02.1.02.0053 – Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0062 – Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	6	Rp 700.000.000(700 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0064 – Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	Rp 650.947.470(650 Juta 947 Ribu 470 Rupiah)
					1.01.02.1.02.0069 – Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
				1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0001 – Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0008 – Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	Rp 400.000.000(400 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0038 – Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	298	Rp 440.000.000(440 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0044 – Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0059 – Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0069 – Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0070 – Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					1.01.02.1.03.0079 – Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
		1.01.0.00.0.00.0 1.0002 – CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0014 – Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0	Rp 10.000.000(10 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0019 – Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Rp 10.000.000(10 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0039 – Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	Rp 10.000.000(10 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0072 – Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
	Literasi dan Numerasi	1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0041 – Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0049 – Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150	Rp 400.000.000(400 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0050 – Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	10	Rp 33.587.296.890(3 3 Miliar 587 Juta 296 Ribu 890 Rupiah)
					1.01.02.1.01.0051 – Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	Rp 750.000.000(750 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0052 –	Terlaksananya Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan	93	Rp 100.000.000(100 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
					1.01.02.1.01.0061 – Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0063 – Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0066 – Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100	Rp 75.000.000(75 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0075 – Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0078 – Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	93	Rp 75.000.000(75 Juta Rupiah)
				1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0033 – Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10	Rp 10.000.000.000(10 Miliar Rupiah)
					1.01.02.1.02.0041 – Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150	Rp 400.000.000(400 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0042 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	7	Rp 21.132.449.940(21 Miliar 132 Juta 449 Ribu 940 Rupiah)
					1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	75	Rp 100.000.000(100 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
					1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	37	Rp 250.000.000(250 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0054 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0057 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	75	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0072 - Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	37	Rp 75.000.000(75 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
				1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0040 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50	Rp 200.000.000(200 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	5	Rp 2.587.199.020(2 Miliar 587 Juta 199 Ribu 20 Rupiah)
					1.01.02.1.03.0050 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10	Rp 41.000.000(41 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10	Rp 10.000.000(10 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0060 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10	Rp 100.000.000(100 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0083 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	50	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
			1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota	1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1	Rp 100.000.000(100 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
				dalam 1 (Satu) Provinsi		Menengah dan Pendidikan Khusus			
					1.01.04.1.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1	Rp 10.000.000(10 Juta Rupiah)
		1.01.0.00.0.00.01.0001 - BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0058 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.01.0059 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
				1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0051 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.02.0052 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
				1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0056 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	0	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
					1.01.02.1.03.0057 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
					1.01.02.1.03.0058 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
		- -	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0081 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	Rp 0(Nol Rupiah)
	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
				1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0059 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
				1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0066 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Rp 25.000.000(25 Juta Rupiah)
	Kekhususan SMK	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0063 - Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	1	Rp 15.000.000(15 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	150	Rp 30.000.000(30 Juta Rupiah)
	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	636	Rp 30.000.000(30 Juta Rupiah)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.0014 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2	Rp 100.000.000(100 Juta Rupiah)
					1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	1.4	Rp 250.000.000(250 Juta Rupiah)
					1.03.03.1.01.0018 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	20.5	Rp 250.000.000(250 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					1.03.03.1.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2	Rp 500.000.000(500 Juta Rupiah)
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	Rp 100.000.000(100 Juta Rupiah)
					1.03.05.1.01.0022 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	7	Rp 200.000.000(200 Juta Rupiah)
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Rp 20.000.000(20 Juta Rupiah)
					1.04.02.1.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1	Rp 20.000.000(20 Juta Rupiah)
				1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
				1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	3	Rp 36.000.000(36 Juta Rupiah)
					1.04.02.1.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	3	Rp 824.000.000(824 Juta Rupiah)
				1.04.02.1.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1	Rp 50.000.000(50 Juta Rupiah)
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1	Rp 10.000.000(10 Juta Rupiah)
					1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	18	Rp 100.000.000(100 Juta Rupiah)
					1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5	Rp 512.000.000(512 Juta Rupiah)
					1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50	Rp 100.000.000(100 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
						Perlindungan Masyarakat			
				1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1	Rp 40.000.000(40 Juta Rupiah)
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	65	Rp 32.000.000(32 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.01.0002 - Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	65	Rp 5.000.000(5 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.01.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	65	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.01.0004 - Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1	Rp 5.000.000(5 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.01.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	65	Rp 2.500.000(2 Juta 500 Ribu Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	65	Rp 3.000.000(3 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.01.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	65	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.01.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.01.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.01.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.01.0017 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	1	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.01.0021 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1	Rp 15.000.000(15 Juta Rupiah)
	Rehabilitasi sosial dasar anak	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar	1.06.04.1.02.0001 - Pengasuhan	Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan	5	Rp 10.000.000(10 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
	telantar di dalam panti			Anak TerlAntar di dalam Panti			Pengasuhan Kewenangan Provinsi		
					1.06.04.1.02.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	310	Rp 5.000.000(5 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	310	Rp 300.000.000(300 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.02.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	310	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.02.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.02.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.02.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1	Rp 15.000.000(15 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					1.06.04.1.02.0022 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.02.0023 - Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	1	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
		1.06.0.00.0.00.06.0001 - UPTD Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0003 - Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0	Rp 7.500.000(7 Juta 500 Ribu Rupiah)
					1.06.04.1.02.0004 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	0	Rp 187.000.000(187 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0	Rp 20.000.000(20 Juta Rupiah)
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	103	Rp 20.000.000(20 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.03.0002 - Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	103	Rp 10.000.000(10 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.03.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	103	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.03.0004 - Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	1	Rp 5.000.000(5 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
						Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		
					1.06.04.1.03.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	103	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	103	Rp 100.000.000(100 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.03.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	103	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.03.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.03.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.03.0012 - Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	1	Rp 5.000.000(5 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.03.0015 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.03.0016 - Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1	Rp 2.000.000(2 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					1.06.04.1.03.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1	Rp 15.000.000(15 Juta Rupiah)
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10	Rp 5.500.000(5 Juta 500 Ribu Rupiah)
					1.06.04.1.04.0002 - Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	10	Rp 1.500.000(1 Juta 500 Ribu Rupiah)
					1.06.04.1.04.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	10	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.04.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	10	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.04.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	10	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.04.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	10	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
						Hari Kewenangan Provinsi			
					1.06.04.1.04.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	10	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.04.0009 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.04.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	10	Rp 15.000.000(15 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.04.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1	Rp 15.000.000(15 Juta Rupiah)
					1.06.04.1.04.0013 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	TTerpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	1	Rp 1.000.000(1 Juta Rupiah)
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100	Rp 145.000.000(145 Juta Rupiah)

URUSAN	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU
	bencana daerah provinsi								
					1.06.06.1.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	50	Rp 20.000.000(20 Juta Rupiah)
					1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100	Rp 116.000.000(116 Juta Rupiah)
					1.06.06.1.01.0011 - Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100	Rp 30.000.000(30 Juta Rupiah)
					1.06.06.1.01.0013 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	20	Rp 7.000.000(7 Juta Rupiah)

4.5. Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs

Program-program yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi dengan berbagai tujuan dan target dalam Sustainable Development Goals (SDGs). RKPD Kepri tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga secara jelas mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola. Penyelarasan ini terlihat dari bagaimana setiap urusan pemerintahan dirancang untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs, sejalan dengan komitmen pembangunan nasional dan global.

Dari aspek pengentasan kemiskinan (Tujuan 1) dan penghapusan kelaparan (Tujuan 2), program-program RKPD Kepri yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan sosial, peningkatan ketahanan pangan, serta penguatan sektor perikanan dan pertanian memberikan kontribusi nyata pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas. Program pemberdayaan masyarakat pesisir, bantuan sosial bagi kelompok rentan, dan peningkatan produksi pangan berbasis laut memperkuat ketahanan pangan daerah sesuai karakter wilayah kepulauan.

Keselarasan terhadap Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) tercermin melalui program peningkatan layanan kesehatan dasar, perluasan cakupan imunisasi, penurunan angka kematian ibu dan bayi, percepatan penanganan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan akreditasi fasilitas kesehatan. Seluruh program ini menjadi cerminan nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mencapai indikator kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada aspek pendidikan Berkualitas (Tujuan 4**),** RKPD Kepri telah menyusun program yang mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah, penguatan literasi dan numerasi, peningkatan kompetensi pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih layak dan merata. Program-program ini secara langsung mendukung pemenuhan target pendidikan inklusif, berkualitas, dan berkesetaraan gender dalam dunia pendidikan.

Program terkait pengarusutamaan gender, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan menunjukkan kesesuaian dengan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender). Demikian pula program ketenagakerjaan, UMKM, ekonomi kreatif, dan investasi sangat berkontribusi terhadap Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan mendorong iklim usaha yang kondusif, peningkatan keterampilan angkatan kerja, serta perluasan peluang usaha.

Program pengembangan tenaga kerja dan kompetensi hijau yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya: (a) SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui penciptaan lapangan kerja hijau yang inklusif, meningkatnya keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri ramah lingkungan, dan penurunan TPT; (b) SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim, melalui penguatan kapasitas tenaga kerja di sektor-sektor yang berkontribusi pada penurunan emisi GRK sesuai target ENDC Indonesia; serta (c) SDG 17 – Kemitraan untuk Tujuan, melalui penguatan kolaborasi pemerintah–dunia usaha–lembaga pendidikan dalam pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau di Kepulauan Riau.

Keselarasan berikutnya tampak dalam Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), melalui program peningkatan akses air minum aman (SPAM), pengembangan sanitasi dan drainase, serta pengelolaan limbah domestik dan persampahan. Program pembangunan perumahan layak huni, penataan permukiman, dan pengurangan kawasan kumuh mendukung Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), terutama dalam upaya menyediakan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau.

Pada bidang infrastruktur dan energi, program RKPD Kepri mendukung Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) melalui penguatan bauran energi dan pengembangan energi terbarukan, serta Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui pembangunan konektivitas antarwilayah, infrastruktur transportasi, digitalisasi layanan publik, serta penguatan industri pengolahan dan ekonomi kreatif. Hal ini memperlihatkan bahwa Kepri tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga transformasi ekonomi yang modern dan berkelanjutan.

Program lingkungan hidup seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan penurunan emisi GRK mendukung Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Lautan), dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan). Hal ini sangat relevan mengingat posisi Kepri sebagai provinsi kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan kerentanan terhadap perubahan iklim.

Di bidang tata kelola pemerintahan (Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), program reformasi birokrasi, penguatan SAKIP, peningkatan layanan publik, SPBE, penegakan regulasi, dan peningkatan keamanan wilayah memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Selain itu, program komunikasi publik dan kolaborasi multipihak mencerminkan kontribusi terhadap SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui mekanisme koordinasi, kolaborasi, dan integrasi program antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SDGs tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11.
Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Pencapaian Target SDGs Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
1. **Tidak Ada Kemiskinan**: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.	a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) e. Program Pengembangan UMKM f. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja g. Program Penempatan Tenaga Kerja
2. **Menghapuskan Kelaparan**: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan	a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat b. Program Penanganan Kerawanan Pangan c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan	d. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian f. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner g. Program Penyuluhan Pertanian.
3. **Kesehatan Yang Baik**: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan e. Program Pengendalian Penduduk f. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) g. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) h. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4. **Pendidikan Berkualitas**: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.	Program Pengelolaan Pendidikan
5. **Kesetaraan Gender**: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.	a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) f. Program Perlindungan Khusus Anak
6. **Air Bersih dan Sanitasi**: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.	a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
7. **Energi Terbarukan**: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.	a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian b. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
8. **Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi**: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus,	a. Program Perencanaan Tenaga Kerja b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Penempatan Tenaga Kerja d. Program Hubungan Industrial e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.	f. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan g. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting h. Program Pengembangan Ekspor i. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen j. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri k. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam l. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi m. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi n. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian o. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi p. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) q. Program Pengembangan UMKM r. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal s. Program Promosi Penanaman Modal t. Program Pelayanan Penanaman Modal u. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal v. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal w. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata x. Program Pemasaran Pariwisata y. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual z. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.	a. Program Penyelenggaraan Jalan b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) e. Program Pengelolaan Pelayaran f. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri h. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional i. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10. **Berkurangnya Ketidaksetaraan**: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
11. **Kota dan Masyarakat Berkelanjutan**: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.	a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Kawasan Permukiman c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) d. Program Penanggulangan Bencana e. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
12. **Pemakaian Yang Bertanggungjawab**: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup f. Program Pengelolaan Persampahan g. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian h. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara i. Program Pengelolaan Energi Terbarukan j. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
13. **Aksi Iklim**: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup b. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
14. **Kehidupan di Bawah Air**: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan e. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
15. **Kehidupan di Darat**: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan kenekaragaman hayati.	a. Program Pengelolaan Hutan b. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
16. **Perdamaian dan Keadilan**: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang	a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.	e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial f. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum g. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah h. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah i. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah j. Program Pengelolaan Keuangan Daerah k. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah l. Program Penyelenggaraan Pengawasan m. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi n. Program Kepegawaian Daerah o. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia p. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan q. Program Perlindungan Perempuan r. Program Peningkatan Kualitas Keluarga s. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
17. **Kemitraan**: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.	a. Program Pengembangan Ekspor b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

4.6. Program Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Program Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Provinsi Kepulauan Riau disusun sejalan dengan Program Strategis Nasional, meliputi sebagai berikut.

1. Pengentasan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Riau diposisikan sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan daerah yang selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Pengentasan kemiskinan mendukung proyek/kegiatan nasional penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, sekolah rakyat, dan pembangunan 3 juta rumah. Kegiatan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, mengurangi beban pengeluaran, dan meningkatkan pendapatan. Penanggulangan Kemiskinan diarahkan pada pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, subsidi tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan dasar. Intervensi dilakukan secara terpadu melalui pemutakhiran data sasaran, pendampingan keluarga, serta penguatan kapasitas usaha mikro dan ekonomi produktif

masyarakat. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem difokuskan pada rumah tangga miskin ekstrem melalui pendekatan terpadu berbasis individu dan wilayah. Kegiatan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi, serta intervensi perbaikan hunian dan sanitasi. Targetnya adalah memastikan seluruh penduduk keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan. Dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang berisiko putus sekolah. Kegiatan mencakup penyediaan fasilitas pendidikan gratis, dukungan perlengkapan belajar, pembinaan karakter, serta integrasi dengan program bantuan sosial keluarga. Dukungan Proyek/Kegiatan Pembangunan 3 Juta Rumah berfokus pada penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Kegiatan meliputi bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana dasar permukiman, serta kemitraan dengan sektor swasta.

Gambar 4.5 Strategi Pengentasan Kemiskinan

Adapun Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 yang mendukung tema pengentasan kemiskinan dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 4.12.
Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Dinas Perhubungan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
	Dinas Sosial	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
	Dinas Sosial	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
	Dinas Perhubungan	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		Pembangunan Tanggul Sungai
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
	Dinas Kesehatan	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
	Dinas Perhubungan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN
	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepualauan Anambas	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)
	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi
		Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk
	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
	Dinas Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	Dinas Kesehatan	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
	Dinas Sosial	Pemulasaraan
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
	Dinas Sosial	Pengasuhan
	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
	Dinas Sosial	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
	Dinas Sosial	Penyediaan Alat Bantu
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
		Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
	Dinas Sosial	Penyediaan Makanan
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
		Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Sandang
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
		Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk
Meningkatkan Pendapatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN
	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
	UPTD Balai Benih Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
	UPTD Balai Benih Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

2. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan diarahkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan bagi seluruh masyarakat. Strateginya mencakup peningkatan produksi dalam negeri, penguatan infrastruktur pertanian seperti irigasi, optimalisasi lahan, serta penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan pemerintah. Program ini juga mendorong modernisasi pertanian dan pemberdayaan petani agar produktivitas meningkat dan ketergantungan pada impor dapat ditekan. Dengan ketahanan pangan yang kuat, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjaga. Perwujudan ketahanan pangan dilakukan melalui beberapa kegiatan. Pertama Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan), dengan kegiatan mencakup pembangunan, rehabilitasi, dan optimalisasi jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian. Upaya ini bertujuan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil pertanian untuk mendukung swasembada pangan nasional. Kedua, Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, untuk memperkuat kapasitas dan distribusi penyuluh pertanian dalam mendampingi petani. Kegiatan meliputi pelatihan teknologi pertanian, penerapan praktik budidaya modern, serta penguatan kelembagaan kelompok tani. Ketiga, Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, diarahkan pada stabilisasi harga dan pasokan beras melalui pengadaan gabah/beras dalam negeri, pengelolaan cadangan beras pemerintah, dan distribusi pada saat terjadi gejolak harga atau bencana. Keempat, Pencetakan dan Peningkatan Produktivitas Lahan (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate), mencakup pembukaan lahan baru, optimalisasi lahan tidur, serta pengembangan kawasan lumbung pangan terpadu untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan.

Gambar 4.6 Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan

Adapun Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 yang mendukung tema Ketahanan Pangan dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 4.13.
Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Riau

PROYEK/KEGIATAN NASIONAL	NAMA OPD	PROGRAM RKPD
1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Program Penyuluhan Pertanian
3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

3. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk Semua bertujuan memastikan seluruh penduduk memperoleh akses layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Program ini menitikberatkan pada penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan, perluasan kepesertaan jaminan kesehatan, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Pendekatan promotif dan preventif diperkuat agar masyarakat tidak hanya memperoleh pengobatan, tetapi juga memiliki kesadaran dan perilaku hidup sehat. Dengan sistem kesehatan yang inklusif, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Kesehatan untuk semua mencakup Percepatan Penurunan Stunting, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Penuntasan TBC, dan Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota. Percepatan Penurunan Stunting difokuskan pada intervensi gizi spesifik dan sensitif, seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, sanitasi layak, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala. Dalam penurunan stunting, sektor kesehatan berperan dalam penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta pencegahan dan penanganan masalah gizi. Sektor pendidikan berkontribusi melalui penguatan literasi gizi, pendidikan pengasuhan, serta layanan PAUD yang berkualitas. Sektor pekerjaan umum dan perumahan mendukung melalui penyediaan air minum layak, sanitasi, dan hunian sehat, sementara sektor sosial dan ketahanan pangan berperan dalam memperkuat perlindungan sosial, ketahanan pangan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Pemeriksaan Kesehatan Gratis dilakukan dengan menyediakan layanan skrining kesehatan gratis untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular maupun menular, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan melalui penguatan kepesertaan dan layanan, program ini menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tanpa hambatan biaya. Penuntasan TBC mencakup deteksi aktif kasus, pengobatan tuntas berbasis standar nasional, pelacakan kontak erat, serta edukasi masyarakat guna menekan angka penularan tuberkulosis. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota bertujuan meningkatkan pemerataan layanan kesehatan rujukan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit yang dilengkapi tenaga medis dan peralatan modern.

Gambar 4.7 Strategi Kesehatan Untuk Semua

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 mendukung Tema Kesehatan Untuk Semua dengan perincian kegiatan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.14.
Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Kesehatan Untuk Semua Provinsi Kepulauan Riau

No	Perangkat Daerah	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
1	**Dinas Kesehatan**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

No	Perangkat Daerah	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

No	Perangkat Daerah	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3	**Dinas Pendidikan**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Pengelolaan Pendidikan Khusus
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
4	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
5	**Dinas Sosial**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
6	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

No	Perangkat Daerah	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
		Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
7	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
8	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

No	Perangkat Daerah	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
9	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
10	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	KEUANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
11	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	PERENCANAAN
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

4. Perluasan Akses Pendidikan

Perluasan Akses Pendidikan difokuskan pada pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Program ini mencakup pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penguatan kurikulum berbasis kompetensi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Selain itu, dukungan pemenuhan gizi dan bantuan pendidikan diberikan untuk mencegah anak putus sekolah, khususnya dari keluarga kurang mampu. Tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Perluasan akses pendidikan dilakukan dengan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Menengah. Perluasan akses pendidikan mendukung pencapaian beberapa kegiatan. Pertama, perbaikan infrastruktur sekolah, penyediaan sarana belajar, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik guna meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kedua, Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran, mencakup pengembangan sekolah unggulan berbasis sains dan teknologi serta penerapan sistem pembelajaran digital untuk meningkatkan daya saing peserta didik. Ketiga, Makan Bergizi Gratis untuk menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik untuk mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, serta mencegah masalah gizi.

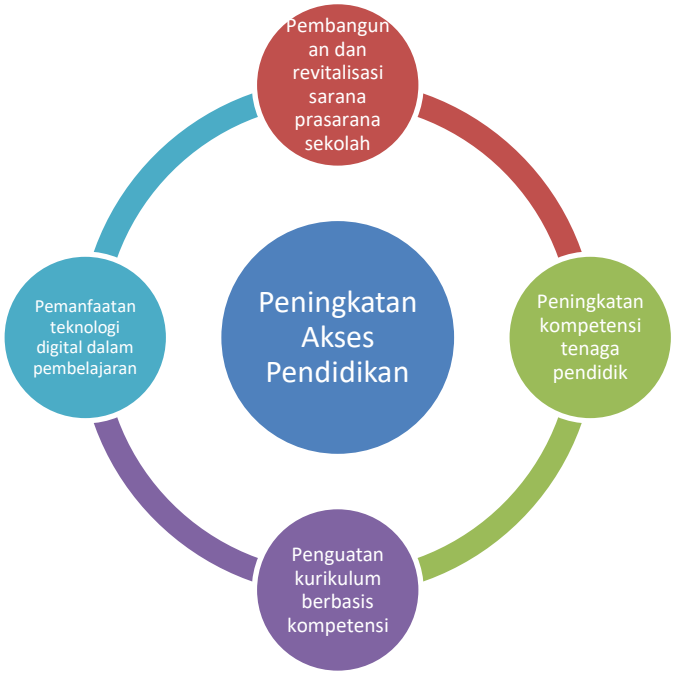

Gambar 4.8 Strategi Perluasan Akses Pendidikan

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 mendukung Tema Perluasan Akses Pendidikan dengan perincian kegiatan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15.
Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Perluasan Akses Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau

PROYEK/KEGIATAN NASIONAL	NAMA OPD	PROGRAM RKPD
1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah		
3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran		
4. Makan Bergizi Gratis		

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Strateginya meliputi pengendalian inflasi, penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan UMKM, optimalisasi belanja daerah yang produktif, serta percepatan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam agar memiliki nilai tambah. Di sisi lain, aspek keberlanjutan menjadi perhatian melalui pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah yang efektif. Program ini bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa kegiatan. Pertama Pengendalian Inflasi, meliputi pemantauan harga kebutuhan pokok, operasi pasar, penguatan distribusi barang, dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk menjaga stabilitas harga. Kedua, Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan dan penguatan koperasi sebagai wadah usaha bersama masyarakat desa/kelurahan. Ketiga, Optimalisasi APBD, difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar belanja lebih produktif, tepat sasaran, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Keempat, Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi dan Lapangan Pekerjaan), mendorong peningkatan nilai tambah komoditas melalui pengembangan industri pengolahan, kemudahan investasi, serta penciptaan lapangan kerja baru. Kelima, Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah mencakup pengurangan dan pengolahan sampah, pengembangan ekonomi sirkular, rehabilitasi lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Gambar 4.9 Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 mendukung Tema Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan perincian kegiatan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16.
Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau

PROYEK/KEGIATAN NASIONAL	NAMA OPD	PROGRAM RKPD
1. Pengendalian Inflasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Dinas Koperasi dan UKM	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

	Pintu	
5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Pengelolaan Persampahan

6. Pengembangan Ekosistem Tenaga Kerja Hijau

Program Tematik Pengembangan Ekosistem Tenaga Kerja Hijau Kepulauan Riau dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai koordinator, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Program ini mencakup: (1) penyusunan peta pekerjaan hijau (green jobs mapping) berbasis sektoral dan spasial di Provinsi Kepulauan Riau; (2) penyelenggaraan Forum Koordinasi Tenaga Kerja Hijau yang melibatkan pemerintah daerah, asosiasi industri, lembaga pelatihan, dan komunitas lokal; (3) pengembangan skema insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik produksi hijau dan merekrut tenaga kerja bersertifikat kompetensi hijau; serta (4) penyelenggaraan kampanye kesadaran publik (green jobs awareness) yang menjangkau angkatan kerja muda, perempuan, dan komunitas pesisir."

4.7. Program Inovasi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan riset dan inovasi daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan *research-based policy* dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Berbagai riset telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menjawab berbagai permasalahan daerah sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Salah satu contoh riset yang telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan diantaranya adalah Studi Kelayakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Energi Kepri yang merupakan landasan pembentukan BUMD Energi Kepri yang saat ini tengah dalam pembahasan Bersama dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan riset dan inovasi daerah melalui dukungan pengalokasian anggaran dan sumber daya manusia. Terkait dengan Inovasi Daerah, berikut secara

singkat dapat dijelaskan beberapa inovasi daerah yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

1. BEASISWA *ONLINE*

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka di pandang perlu untuk melaksanakan inovasi daerah dengan tujuan mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini pelaksanaan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan jenjang pendidikan tinggi dalam dan luar negeri melalui *Website* bagi calon penerima beasiswa tingkat pendidikan tinggi Provinsi Kepulauan Riau yang Bernama BEASISWA *ONLINE*. Inovasi ini merupakan kegiatan strategis Gubernur Kepulauan Riau, yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Masyarakat. *Outcome* dari inovasi ini adalah terbangunnya penyaluran beasiswa yang selektif serta akurat terhadap mahasiswa yang berprestasi. Adapun manfaat dari inovasi ini adalah untuk menjamin tewujudnya penyaluran beasiswa yang objektif, transparan, dan akuntabel.

2. SUBSIDI BUNGA/MARGIN

Dalam memperkuat kemampuan permodalan usaha, percepatan pengembangan sektor riil dan meningkatkan daya saing usaha, maka di pandang perlu untuk melaksanakan Inovasi berupa program kebijakan subsidi bunga/margin kepada pelaku usaha. Adapun inovasi ini diberi nama "Subsidi Bunga/Margin" yaitu memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga/margin kepada pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Riau. Inovasi ini merupakan kegiatan strategis Gubernur Kepulauan Riau, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bank Riau Kepri Syariah dan Masyarakat. *Outcome* dari inovasi ini adalah Meningkatkan daya saing usaha pelaku usaha. Sedangkan manfaat yang ingin dicapai adalah melindungi, mempertahankan dan pengembangan usaha kecil dan menengah selama covid dan pasca covid.

3. KEPRI TERANG

Dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau maka dipandang perlu untuk melaksanakan terobosan yang mengarah pada pembangunan jaringan listrik dan energi baru dan terbarukan, yang mampu menerangi seluruh pedesaan di pulau-pulau. Penerangan merupakan kebutuhan mendasar, yang memberi dampak positif pada berbagai sektor kehidupan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi

Kepulauan Riau. Inovasi tersebut Bernama KEPRI TERANG yang merupaka kegiatan strategis Gubernur Kepulauan Riau. Inovasi ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melibatkan PLN dan Masyarakat. *Outcome* dari inovasi ini adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan dan meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan. Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya distribusi energi listrik yang dibutuhkan masayarakat sebagai pemenuhan kebutuhan yang mendasar.

4. SIBADANG (Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan Kepri Gemilang)

Pandemi COVID-19 saat ini telah mendorong banyak sektor industri untuk melakukan transformasi digital. Salah satu sector yang kini banyak melakukan strategi transformasi digital adalah sektor kesehatan, terutama karena layanan Kesehatan merupakan hal yang vital di masa pandemi. Berkaitan dengan transformasi digital kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun berupaya untuk melakukan upaya transformasi melalui *Digital Transformation Office* (DTO). Arah strategi transformasi digital Kemenkes sendiri adalah pada sistem pelayanan kesehatan dan keamanan data.

Pada tahun 2022, DTO Kemenkes menargetkan adanya pengembangan sistem big data yang berbasis *integrated electronic health record*. Hal ini ditandai dengan rencana peluncuran platform *Indonesia Health Services* (IHS) yang akan menghubungkan ribuan fasilitas kesehatan, mulai dari lab, apotek dan masih banyak lagi. IHS adalah platform yang memiliki standarisasi seperti terminologi, kode obat, pelayanan, dan sebagainya. Hal ini kemudian diharapkan juga dapat mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Transformasi digital kesehatan menjadi salah satu pilar utama penopang kesehatan di Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang cukup signifikan dan menyentuh hampir disegala bidang. Dalam konteks kesehatan, transformasi digital merujuk pada perubahan yang terjadi dalam sistem dan praktik kesehatan karena mengadopsi perkembangan teknologi digital dan inovasi. Hal tersebut merupakan salah satu aspek terpenting dalam evolusi industri kesehatan saat ini. Dampaknya telah dirasakan dalam berbagai bidang, seperti telemedisin, *big data*, kecerdasan buatan, dan perangkat medis yang terhubung. Manfaat yang ditawarkan oleh transformasi digital meliputi akses yang lebih baik, perawatan yang lebih baik, efisiensi, dan kolaborasi antara tim kesehatan.

Dalam hal memaksimalkan manfaat dan mengatasi tantangan, penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk penyedia layanan kesehatan, industri teknologi, pemerintah, dan pasien untuk berkolaborasi dan berkomitmen dalam menciptakan masa depan kesehatan yang lebih cerdas, efisien, dan inklusif. Untuk mendukung transformasi digital bidang kesehatan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023

mengintegrasikan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dengan nama "SIBADANG" Sistem Informasi & Bank Data Kesehatan Kepri Gemilang adalah bentuk dukungan Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pilar Ke-6 Transformasi Sistem Kesehatan Kemenkes RI yaitu Transformasi Teknologi Kesehatan. Dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun "SIBADANG" Sistem Informasi & Bank Data Kesehatan Kepri Gemilang dibangun dalam tiga tahapan, diantaranya:

1. Integrasi Data Puskesmas;
2. Integrasi Data Rumah Sakit; dan
3. Integrasi Satu Sehat Kementerian Kesehatan RI.

5. P2K3 (Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Di era industri modern ini, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek fundamental yang harus menjadi prioritas utama bagi setiap organisasi dan menjadi elemen kunci dalam memastikan operasional perusahaan berjalan lancer dan produktif serta menciptakan Zero Accident di lingkungan kerja. Perusahaan yang berkomitmen terhadap K3 tidak hanya melindungi karyawan dari risiko kecelakaan dan penyakit ditempat kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, efisiensi, kepuasan, dan loyalitas karyawan, serta reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan K3, kami telah mengembangkan dan menerapkan aplikasi online yang dirancang khusus untuk manajemen K3. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang membantu dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Aplikasi Pelayanan K3 Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu bentuk pelayanan dalam memberikan "single service" secara online yang mencakup pelayanan penerbitan Surat Keterangan K3 (SUKET K3) dan penerbitan Surat Keputusan (SK) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Adapun tujuan dibuatnya aplikasi ini untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan K3 melalui digitalisasi serta memudahkan akses perusahaan dalam hal administrasi, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya digunakan untuk manajemen K3 manual serta akan lebih memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

Ketersediaan Aplikasi K3 Kepri ini sangat penting agar para pelaku usaha/perusahaan yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan pelayanan yang cepat, efektif efisien dan terukur karena memiliki batasan waktu yang telah dicantumkan dalam alur standar operasional prosedur (SOP). Aplikasi pelayanan K3 Kepri dapat dengan mudah di akses

melalui website sehingga lebih mudah utk semua pelaku usaha termasuk perusahaan yang bergerak di bidang pemeriksaan dan pengujian (PJK3) dalam pengajuan Surat Keterangan memenuhi persyaratan K3 setelah melakukan pemeriksaan & pangujian terhadap peralatan objek K3.

Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 5 Kabupaten yaitu Bintan, Natuna, Lingga dan Anambas serta 2 Kota yaitu Tanjungpinang dan Batam dengan kondisi geografis yang terdiri dari beberapa pulau dan dipisahkan oleh lautan, ditambah kondisi pelaku usaha dan Perusahaan Jasa K3 mayoritas berada diwilayah Kota Batam, Karimun dan Bintan maka dengan adanya aplikasi Pelayanan K3 Kepri secara online akan lebih mempersingkat waktu dan tidak perlu pengurus perusahaan harus bolak-balik ke Kantor Disnaker pada saat melakukan pengurusan dokumen Surat Keterangan K3 (SUKET K3) dan penerbitan SK Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dengan demikian dari segi pembiayaan perjalanan pengurus perusahaan tidak terbebani.

Dengan terus berinovasi dalam penerapan K3 dan menggunakan teknologi terkini, kami memastikan bahwa praktik keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya relevan saat ini tetapi juga berkelanjutan di masa depan dan dengan komitmen kuat terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta dukungan teknologi melalui aplikasi online, kami terus berupaya mendorong serta memberikan dukungan terhadap seluruh perusahaan yang berada di Wilayah Kepulauan Riau agar terus meningkatkan kesadaran untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kami percaya bahwa investasi dalam K3 adalah investasi untuk masa depan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Melalui penerapan praktik terbaik dalam K3 dan teknologi modern, kami bertekad untuk menjadi panutan dalam industri, menciptakan tempat kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga aman dan sehat bagi semua pihak yang terlibat.

6. MIBEDIL (Media Informasi Berbasis Digital)

Pemerintah mengakui berbagai persoalan bidang pendidikan begitu kompleks, diantaranya adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan jumlah guru, kualitas guru dan pemerataan guru belum menjangkau semua wilayah serta pertumbuhan penduduk usia sekolah yang lebih besar dari ketersedian sarana dan prasarana sekolah yang disediakan pemerintah Pemerataan dalam bidang pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah. Selain itu juga pemerataan pendidikan dapat menguatkan rasa nasionalisme, kebangsaan dan persatuan dari seluruh wilayah Indonesia.

Menjawab tuntutan dan keluhan Layanan sistem administrasi pendidikan, dalam hal ini, Dinas Pendidikan melakukan inovasi layanan Pendidikan dengan membangun sistim administrasi yang lebih modern dengan

memanfaatkan teknologi informasi, inovasi ini diharapkan menjadi solusi pelayanan administrasi yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sumber daya manusia, perencanaan program dan kegiatan serta berbagai fitur lainnya yang memudahkan setiap unsur Pendidikan memanfaatkan fasilitas ini. Inovasi ini dikenal dengan inovasi MIBEDIL (Media Informasi Berbasis Digital). Inovasi MIBEDIL memberikan kemudahan bagi pengguna layananan Pendidikan dalam mengurus layanann secara online tanpa harus bertemu dengan petugas, bersifat terbuka dan tanpa biaya serta perkembangan permohonan dapat diakses dan dipantau secara real time.

Inovasi MIBEDIL memiliki beberapa fitur seperti fitur Profil Organisasi Perangkat Daerah, Layanan Sepakat yang terdiri atas legalisir ijazah, legalisir pindah rayon, rekomendasi perizinan, PPDB, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penilaian angka kredit dan pensiun. Beberapa fitur lain seperti layanan pengajuan sarana dan prasarana Pendidikan, layanan dokumen kurikulum, peta sebaran sekolah, forum interaksi dan data pembangunan Pendidikan.

Pada saat ini fitur yang sudah digunakan dalam penatausahaan pegwai adalah fitur sepakat yaitu sub menu berkaitan dengan layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB). Layanan ini menjadi prioritas didasari karena jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang besar serta dalam rangka mengatasi kendala geografis dan percepatan layanan administrasi kepegawaian.

7. LAM BERTASBIH (Aktivitas Layanan Umum Balai Sertifikasi Benih)

Benih merupakan salah satu sarana produksi yang tidak dapat digantikan dan sangat menentukan dalam sistem produksi pertanian. Kualitas benih menjadi hal penting dan perlu diperhatikan oleh semua pihak. Mutu benih merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi. Minat masyarakat untuk membudidayakan tanaman buah, sayuran tahunan dan obat tahunan secara komersial semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu jaminan mutu benih sangat diperlukan oleh petani pengguna. Salah satu mekanisme yang efektif untuk memproduksi benih bermutu adalah melalui sertifikasi benih.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi lahan yang masih luas untuk pengembangan tanaman pertanian khususnya untuk tanaman hortikultura. Minat masyarakat untuk menaman tanaman buah sangat tinggi meskipun hanya untuk ditanam di pekarangan rumah. Oleh sebab itu tidak sedikit dari masyarakat maupun perusahaan yang memanfaatkan situasi ini untuk memproduksi benih/bibit dan menjualnya kepada petani dan masyarakat sekitar. Namun sangat disayangkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menggunakan benih unggul bersertifikat sangat rendah. Oleh sebab itu UPTD BPPSPTPHP berkewajiban melakukan sosialisasi, membina dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan benih bersertifikat.

Untuk itu agar layanan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien maka UPTD BPPSPTPHP Provinsi Kepulauan Riau selalu berusaha mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat salah satunya adalah dengan membuat kebijakan baru yaitu pelayanan kepada masyarakat melalui sistem layanan online yang diberi nama "ALAM BERTASBIH" (Aktivitas Layanan Umum Balai Sertifikasi Benih) yang diharapkan dapat memudahkan petani dan masyarakat dalam mendapatkan informasi serta Pelayanan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pertanian yang dibutuhkan dari UPTD BPPSPTPHP Provinsi Kepulauan Riau. Yang pasti dengan adanya sistem layanan online ini dapat memangkas jarak dan waktu bagi petani dan masyarakat yang karena kesibukannya atau karena faktor kendala lainnya, tidak bisa datang ke kantor untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

8. LAKID (Layanan Kekayaan Intelektual Digital)

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.4-TI.04.01 TAHUN 2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pemberian rekomendasi dinas atas Hak Kekayaan Intelektual Merek dan Hak Cipta di Provinsi Kepulauan Riau, maka di pandang perlu untuk melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik secara digital yang dikemas dengan menggunakan aplikasi milkshake. Aplikasi tak berbayar ini memberikan laman web yang ideal dan bisa diletakkan di link bio media sosial lainnya. Pengguna bisa membuka di mana saja dengan cara mengklik link atau scan barcode yang tersedia. Adapun inovasi ini diberi nama "LAKID" Layanan kekayaan Intelektual Digital di Provinsi Kepulauan Riau.

LAKID digunakan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pemberian rekomendasi dinas atas Hak Kekayaan Intelektual Merek dan Hak Cipta serta sangat mudah digunakan, dan menyediakan layanan gratis kepada Pelaku usaha kategori mikro dan kecil Sektor Pariwisata & Ekraf Kepri, terutama masyarakat daerah terluar dan sulit dijangkau dalam mendapatkan informasi dan pengurusan rekomendasi HKI.

9. SIJANTAN (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan)

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas lebih dari 2.000 pulau, tersebar di Kawasan strategis antara Semenanjung Malaysia, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Kondisi geografis ini menjadikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai tantangan utama dalam mendukung konektivitas antar wilayah, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Jalan dan jembatan sebagai

infrastruktur dasar memiliki peran vital dalam mobilitas penduduk dan distribusi logistik di wilayah ini.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan jalan dan jembatan yang efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membangun aplikasi SIJANTAN (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan). Dasar hukum dari pengembangan aplikasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Sistem Manajemen dan Pengendalian Jalan, serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No.1 Tahun 2017 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah kurangnya data terintegrasi mengenai kondisi dan status jalan serta jembatan yang tersebar di berbagai wilayah, lambatnya proses pemutakhiran data di lapangan, serta kurang optimalnya pengambilan keputusan akibat keterbatasan informasi yang akurat dan real-time. Aplikasi SIJANTAN hadir sebagai solusi inovatif terhadap isu-isu strategis seperti disparitas infrastruktur antar pulau, keterbatasan sumber daya dalam monitoring fisik di lapangan, serta kebutuhan akan sistem pendukung keputusan yang berbasis data. Keunggulan SIJANTAN terletak pada kemampuannya menyediakan data kondisi jalan dan jembatan secara digital dan berbasis peta GIS (Geographic Information System), sehingga mempermudah pengambilan kebijakan strategis oleh pemerintah daerah.

Kebaharuan aplikasi ini juga mencakup fitur pelaporan kerusakan jalan dan jembatan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi mobile, melakukan update data berupa titik koordinat dan dokumentasi dari kerusakan jalan dan jembatan setiap tahun. Dengan pengembangan SIJANTAN, diharapkan pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan geografis serta kebutuhan pembangunan daerah. Aplikasi SIJANTAN sudah diciptakan sejak tahun 2023 melalui disahkannya SK No. 1524 KPTS-6/VII/2023 tentang tim sistem informasi jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dan telah disosialisasikan secara internal dan eksternal.

10. SIDASI (Sistem Informasi Data Investasi Kabupaten/Kota)

Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas wilayah 251.810 km^2 yang terdiri dari 4% daratan dan 96% lautan serta 2.408 pulau, memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara

tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Namun, keberagaman geografis ini juga menimbulkan tantangan serius, terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan data investasi yang efektif. Rentang kendali yang luas dan beragam, dengan 5 kabupaten dan 2 kota yang tersebar di wilayah yang cukup jauh dari ibukota provinsi, menciptakan kesenjangan aksesibilitas dan koordinasi. Misalnya, waktu tempuh dari ibukota provinsi ke Bintan dan Tanjungpinang hanya sekitar 1 jam, sedangkan ke Natuna bisa mencapai 12 jam. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakmerataan dalam penyediaan layanan publik dan pengumpulan data investasi.

Kondisi pengelolaan data investasi di Kepulauan Riau menunjukkan beberapa masalah signifikan. Data yang berasal dari DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya disampaikan melalui email (softcopy) dan surat/berkas (hardcopy). Metode ini memiliki berbagai kelemahan, termasuk penyajian data yang kurang lengkap dan tidak akurat, lambatnya penyampaian data, serta sulitnya menghubungi pengelola data di tingkat Kabupaten/Kota. Ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data berdampak langsung pada kualitas analisis dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas program pembangunan dan investasi. Selain itu, metode manual dan kurang terintegrasi ini menyebabkan birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan risiko kesalahan manusia, dan memperlambat proses administrasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau meluncurkan Aplikasi Data Investasi (Si Dasi).

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses dan penggunaan data investasi oleh DPMPTSP di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan Si Dasi, data dapat disajikan dengan lebih lengkap dan akurat, penyampaian data menjadi lebih cepat, dan komunikasi antar pengelola data di tingkat Kabupaten/Kota menjadi lebih efektif. Aplikasi ini juga memastikan keterhubungan yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan strategis. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik dan investasi di Kepulauan Riau akan menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

11. SIKSKepri. V.1.9 (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Riau)

Dimulai pada tahun 2022 dan 2023, Pemerintah Pusat gencar menekan penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 di setiap daerah menjadi 0% terutama daerah yang menjadi target pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, salah satu strategi dalam penanganan kemiskinan yaitu berkolaborasi mengintervensi masyarakat yang

sudah di tetapkan dalam Data Percepatan Pensasaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang di keluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK), data tersebut dihasilkan dari pendataan yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (PK BKKBN 2021). Kementrian Sosial juga gencar memperbaiki data base melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota memverifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar segala bantuan Pemerintah Pusat tepat sasaran di seluruh wilayah. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terus mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam memberikan kontribusi terkait penanganan kemiskinan tersebut wilayah kepulauan yang luas dan terluar yang memiliki potensi angka kemiskinan relative banyak, oleh karena itu, perlunya berbagai kebijakan dan pembaharuan dalam berbagai bidang untuk mendukung terwujudnya penanganan kemiskinan tersebut. Pada dasarnya data merupakan suatu landasan dalam menentukan sasarannya data yang benar memberikan dukungan yang tepat untuk menjadikan program-program bantuan dari pemerintah daerah tepat pada sasaran yang diinginkan, didasari dengan dua wali data yang telah di jelaskan di atas yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Percepatan Pensasaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Pemerintah Daerah Provinsi Melalui Dinas Sosial Provinsi merumuskan suatu Inovasi berbasis elektronik yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Kepulauan Riau yang dimana aplikasi yang berbasi web ini menjadi landasan dalam menentukan sasaran suatu keluarga miskin yang menjadi sebuah profile rumah tangga miskin yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

SIKSKepri V.1.9 adalah platform digital yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung pengelolaan data dan layanan kesejahteraan sosial secara terintegrasi, akurat, dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini menjadi alat utama dalam mendukung kebijakan dan program bantuan sosial agar tepat sasaran di seluruh wilayah Kepulauan Riau dan merupakan langkah strategis dalam digitalisasi layanan kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis data, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.

Aplikasi ini memberikan informasi untuk memformulasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis avidance ataupun nyata yang memiliki manfaat Mengidentifikasi karakter kesejahteraan sosial di dalam sebuah keluarga, Memberikan informasi yang lengkap kesejhteraan dalam sebuah keluarga, Memberikan informasi melalui surat informasi kesejahteraan keluarga/sosial, Menjadikan sasaran kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran dalam hal pengentasan kemiskinan, dan Menjadikan program bantuan sosial

yang berasal dari instansi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pihak Swasta lainnya.

12. Aplikasi 24 KRAT Aja

Dalam upaya peningkatan pelayanan di RSUD Raja Ahmad Tabib maka perlu adanya aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pasien dan pengunjung untuk untuk memudahkan pasien dalam mengakses layanan yang diberikan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib. Untuk itu RSUD Raja Ahmad Tabib meluncurkan Inovasi Aplikasi 24 KRAT Aja yang merupakan sebuah terobosan berupa aplikasi portal layanan pasien online yang mengakomodir seluruh kebutuhan pasien secara digital dengan mengakses satu pintu aplikasi. Aplikasi 24 KART Aja ini merupakan upaya dari permasalahan yang dihadapi sebagai upaya memaksimalkan pelayanan pasien Adapun fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini memudahkan dari layanan yang ada di RSUD Raja Ahmad Tabib. Fitur-fitur yang tersedia di aplikasi 24 KRAT AJA saja tersebut yaitu Hasil Laboratorium, Hasil Radiologi, Hasil Patologi Anatomi, Daftar Pelayanan, Resume Medis, Dok. SKDP dan Surat Kontrol, Surat Keterangan Kesehatan, Checkin Online, Antrian Rawat Jalan, Farmasi, Jadwal Dokter, Layanan Kami, Info Ruang Rawat, Survei Kepuasan Masyarakat, Media Edukasi, Ikatan Kerjasama dan Pengaduan Masyarakat. Aplikasi 24 KRAT AJA merupakan suatu sistem yang didownload dari Play Store menggunakan program Android Package Kit (APK). Aplikasi 24 KRAT AJA merupakan aplikasi portal layanan pasien online yang mengakomodir seluruh kebutuhan pasien secara digital dengan mengakses satu pintu aplikasi. Aplikasi 24 KRAT AJA adalah nama aplikasi layanan kesehatan digital yang memiliki makna mendalam dan menyatu antara filosofi mutu layanan serta identitas institusional. Terinspirasi dari emas 24 karat yang dikenal sebagai logam paling murni, bernilai tinggi dan berharga. Nama ini mencerminkan komitmen terhadap pelayanan kesehatan yang murni, tulus dan berkualitas tinggi. Dalam konteks ini, angka 24 bukan hanya menunjukkan ketersediaan layanan selama 24 jam, tetapi juga menegaskan bahwa setiap layanan yang diberikan memiliki standar kemurnian dan keunggulan seperti emas 24 karat. Sementara itu, kata KRAT merupakan singkatan dari Kesehatan Raja Ahmad Tabib, yaitu institusi layanan kesehatan utama di Kepulauan Riau. Penyematan nama rumah sakit dalam akronim ini memperkuat identitas bahwa aplikasi ini adalah milik resmi dan bagian dari transformasi digital RSUD Raja Ahmad Tabib. Selanjutnya, kata AJA dimaknai sebagai Akses Jelas dan Andal menekankan bahwa aplikasi ini memberikan kemudahan, transparansi, dan keandalan dalam setiap interaksi pasien dengan layanan kesehatan. Penggunaan kata "AJA" juga sengaja dipilih karena terdengar ringan, akrab, dan membumi, seolah mengajak masyarakat dengan nada bersahabat: "Pakai aplikasi 24 Krat Aja!".

13. KEMAS (Kesbangpol Masuk Sekolah)

Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI dan Implementasi Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam upaya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa guna mewujudkan Generasi Muda yang berkualitas, terhindar dari Radikalisme dan Narkoba serta memiliki semangat Persatuan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau maka dilaksanakannya Program Kesbangbangol Masuk Sekolah Tahun 2025. Dengan diadakannya Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS) dapat menyampaikan upaya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa guna mewujudkan Generasi Muda yang berkualitas, terhindar dari Radikalisme dan Narkoba serta memiliki semangat Persatuan.

KEMAS (Kesbangpol Masuk Sekolah) adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, Bentuk Kegiatan yaitu Sosialisasi ke Sekolah SMA/SMK dengan menghadirkan Narasumber yang ahli dibidangnya.

Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS) merupakan suatu program pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Mengacu dari tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dilaksanakannya program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS) untuk memberikan informasi dan edukasi yang dikembangkan menjadi kegiatan sosialaisasi ke siswa/siswi di SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga target yang dicapai dalam rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau terutama dalam hal penyampaian informasi ke generasi muda yang menjadi target capaian di bidang-bidang dapat sekaligus terpenuhi. Peserta Kegiatan adalah Pelajar SMA/SMK pada sekolah yang telah dipilih dengan jumlah 500 s.d 1000 orang pelajar pada setiap kegiatan.

14. Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua di Jakarta

Tingginya intensitas masyarakat Kepri yang dirujuk ke Rumah Sakit di wilayah Jakarta maka membutuhkan akomodasi dan transportasi selama melakukan perawatan lanjutan. Waktu yang lama dalam masa perawatan lanjutan menimbulkan masalah pembiayaan yang menjadi kendala bagi keluarga pendamping dan pasien. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan inovasi pelayanan Pengelolaan Rumah Singgah pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai perwakilan provinsi Kepri di Jakarta. Diharapkan dengan adanya fasilitas pelayanan rumah singgah, maka akan membantu meringankan beban akomodasi dan transportasi selama rangkaian pengobatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan inovasi pelayanan Pengelolaan Rumah Singgah pada Badan Penghubung Daerah

Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu inovasi yang dihasilkan adalah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan sebagai verifikator calon pasien yang juga memiliki program yang lebih pas untuk menyediakan suplemen bagi penghuni rumah singgah seperti program home care visit (kunjungan nakes untuk memantau kondisi pasien), konseling dengan psikolog, senam Kesehatan sebagai bagian dari rekreasi penghuni, dan terutama pendaftaran pasien secara online untuk membantu kemudahan pendaftaran yang pengembangan sistem aplikasi softwarenya bekerjasama dengan Diskominfo Kepri.

Pelaksanaan Pembangunan Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua di Jakarta ini melibatkan sinergi kolaborasi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas PUPR dan Biro Umum untuk pengadaan bangunan dan sarana prasarana, Dinas Kesehatan dan Kominfo untuk tata kelola administrasi pasien, dan Badan Penghubung Daerah sebagai OPD yang melakukan pengelolaan terhadap Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua di Jakarta.

Pelayanan yang diberikan Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua di Jakarta adalah proses pendaftaran dan verifikasi yang bisa dilakukan secara online, penyediaan akomodasi yang dilengkapi dengan Air conditioner, water heater, televisi, jaringan wifi, laundry room, penyediaan sarapan pagi, penyediaan transportasi antar jemput ke rumah sakit selama pengobatan. Seluruh fasilitas ini diberikan tanpa dikenakan biaya. Dengan demikian, rancang bangun inovasi Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua di Jakarta diharapkan akan lebih stabil dengan pola kolaboratif untuk kemajuan Bersama dengan tujuan yang sama yaitu pemerintah daerah hadir bermanfaat membantu memudahkan Masyarakat Kepri yang membutuhkan. Dengan dibangunnya Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua di Jakarta, menjadikan salah satu program unggulan yang akan meringankan beban masyarakat Kepri yang berobat di Jakarta yang tujuan akhirnya adalah Mewujudkan kualitas Sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, arah kebijakan pembangunan wilayah kepulauan difokuskan pada penguatan keterhubungan antarpulau, pemerataan akses layanan dasar, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis kemaritiman, industri, dan pariwisata. Arah kebijakan ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam indikasi highlight intervensi pembangunan daerah kepulauan dan pulau-pulau kecil yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah guna mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kepulauan meliputi:

1. Penataan regulasi, sinkronisasi kebijakan, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di pusat dan daerah, khususnya di bidang tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan, pariwisata, dan industri.
2. Hilirisasi produk perikanan dan kelautan serta pembangunan *cold storage* dan unit pengolahan ikan untuk penguatan sentra produksi berbasis pulau dan pengembangan ekonomi biru.
3. Pendampingan IKM/UMKM dan koperasi, pembangunan kampung nelayan, implementasi riset inovasi pada industri, dan pelatihan tenaga kerja lokal untuk peningkatan dampak ekonomi.
4. Pembangunan dermaga wisata, penyediaan homestay, pelatihan praktik pariwisata ramah lingkungan dalam pengembangan destinasi pariwisata bahari.
5. Pembangunan pelabuhan, penyediaan layanan kapal perintis dan tol laut, penambahan penerbangan perintis, penyediaan seaplane dan pembangunan infrastruktur pendukungnya, serta jaringan jalan lingkar/trans pulau terutama di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan wilayah 3T.
6. Penataan permukiman pesisir layak huni, penyediaan air minum, sanitasi, pengelolaan sampah berbasis kepulauan, dan listrik, serta penguatan sinyal telekomunikasi.
7. Penyediaan kapal dan tenaga kesehatan untuk RS/Puskesmas bergerak (mobile health services) termasuk layanan gawat darurat antarpulau, dilengkapi telemedicine.
8. Penyediaan sekolah berbasis digital di pulau kecil melalui kelas jarak jauh (daring/hybrid), pembangunan BTS/penyediaan satelit sekolah, serta insentif tenaga pendidik daerah kepulauan.
9. Penyediaan infrastruktur air baku, pencetakan sawah, ekstensifikasi lahan pertanian, penyediaan lumbung padi, dan pembangunan pembangkit listrik

berbasis EBT (PLTS, PLTA, PLTMH, Biogas) untuk mendukung pemenuhan ketahanan air, pangan, dan energi.

10. Pengawasan dan pengendalian zonasi kawasan konservasi pesisir dan laut, serta pembentukan peningkatan kapasitas Pokmaswas.
11. Pembangunan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat tanggap bencana, dan pembangunan infrastruktur kebencanaan
12. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pemberantasan IUU fishing, serta penambahan armada pengawasan laut untuk peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan penguatan.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki keunggulan komparatif yang kuat sebagai daerah kepulauan dengan dominasi wilayah laut yang luas serta kekayaan sumber daya maritim yang melimpah. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran dan penerbangan internasional, sekaligus sebagai kawasan perbatasan dan beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, menempatkan Kepulauan Riau pada posisi penting dalam arus perdagangan, logistik, dan mobilitas kawasan regional maupun global. Keunggulan geografis tersebut menjadi modal utama dalam pengembangan aktivitas ekonomi berbasis kelautan dan kepulauan.

Potensi wilayah tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah, antara lain perikanan tangkap dan budidaya, pertambangan yang dikelola secara berkelanjutan, pengembangan kawasan industri, serta sektor jasa termasuk pariwisata bahari dan pariwisata berbasis budaya dengan nilai tambah tinggi. Pengembangan sektor-sektor ini perlu didukung oleh penguatan konektivitas antarwilayah, baik antar pulau maupun antara pusat-pusat pertumbuhan di kabupaten/kota, sehingga tercipta keterpaduan aktivitas ekonomi dalam satu kesatuan wilayah kepulauan.

Optimalisasi potensi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau juga menuntut terbangunnya keterkaitan yang erat antara aktivitas ekonomi di wilayah provinsi dengan kawasan sekitarnya, termasuk wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Melalui penguatan jejaring produksi, distribusi, dan pemasaran lintas wilayah, diharapkan terbentuk rantai nilai yang terintegrasi dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat peran Kepulauan Riau sebagai simpul ekonomi maritim yang strategis di kawasan.

Secara umum arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau menekankan pada strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui penguatan kawasan-kawasan strategis berbasis keunggulan wilayah. Struktur pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada:

1. Penguatan kawasan pertumbuhan utama, khususnya kawasan perkotaan Batam, Tanjungpinang–Bintan, serta Tanjungbalai Karimun yang terintegrasi dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kawasan ini diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi regional dengan fokus pada

peningkatan investasi, industrialisasi, dan konektivitas logistik yang berdaya saing internasional, mengingat letak strategis Kepulauan Riau di jalur perdagangan global.

2. Pengembangan wilayah melalui pendekatan berbasis komoditas unggulan, khususnya ekonomi biru di wilayah Natuna dan Anambas. Kawasan ini didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan baru berbasis potensi kelautan dan perikanan, yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi tetapi juga memperkuat kedaulatan wilayah perbatasan.
3. Penguatan kawasan swasembada energi di Natuna-Anambas untuk mendukung ketahanan energi sekaligus membuka peluang pengembangan industri berbasis sumber daya alam.
4. Pendekatan afirmasi wilayah terutama pada wilayah Lingga serta Natuna–Anambas sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan aksesibilitas dan pelayanan dasar, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan.
5. Penguatan keberlanjutan lingkungan diarahkan pada penetapan kawasan konservasi dan rawan bencana seperti Geopark Natuna, yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Aktivitas ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau memiliki profil pembangunan yang beragam di setiap kabupaten/kota, sehingga arah kebijakan pembangunan untuk transformasi ekonomi dapat dibagi menjadi tiga klaster utama, yaitu:

1. **Klaster Wilayah Natuna-Kepulauan Anambas**

   Pembangunan wilayah Natuna-Kepulauan Anambas diarahkan pada penguatan fondasi dasar pembangunan sebagai prasyarat utama bagi percepatan pertumbuhan kawasan perbatasan dan kepulauan terluar. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan dasar masyarakat, serta percepatan penyediaan infrastruktur strategis, khususnya transportasi laut dan udara. Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan serta bandara menjadi kunci untuk memperkuat konektivitas antarpulau dan membuka keterisolasian wilayah. Seiring dengan hal tersebut, penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perlu didorong untuk mendukung transformasi digital, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi di wilayah kepulauan.

   Dalam pengembangan ekonomi wilayah, Natuna–Kepulauan Anambas diarahkan pada penguatan sektor unggulan berbasis sumber daya kelautan dan keindahan alam, dengan menjadikan pariwisata alam dan ekonomi biru sebagai penggerak utama pertumbuhan. Pengembangan pariwisata difokuskan pada pemanfaatan potensi kepulauan, kekayaan ekosistem laut, serta keunikan budaya lokal yang khas. Kabupaten Natuna memiliki potensi geopark Tanjung Datuk yang dapat dikembangkan sebagai destinasi unggulan berkelas

internasional, sementara Kepulauan Anambas dikenal dengan keindahan alam bawah laut dan gugusan pulau eksotis yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari dan pariwisata premium, termasuk melalui pengembangan akses transportasi khusus.

Pengembangan destinasi pariwisata tersebut perlu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang berwawasan lingkungan, seperti akomodasi ramah lingkungan, pusat layanan informasi wisata, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Penguatan kompetensi pemandu wisata dan pelaku usaha pariwisata lokal menjadi bagian penting untuk memastikan terciptanya pengalaman wisata yang berkualitas, autentik, dan berkelanjutan, khususnya pada segmen wisata bahari.

Selain pariwisata, penguatan ekonomi biru menjadi pilar strategis lainnya dalam pembangunan Natuna-Kepulauan Anambas. Pengembangan sektor ini dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada sisi hulu, peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, serta pengelolaan sumber daya pertambangan minyak dan gas bumi dan mineral lainnya, perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi modern yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Pada sisi hilir, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, galangan kapal, serta industri pendukung kemaritiman menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal dan memperkuat struktur ekonomi wilayah.

Pengembangan industri berbasis teknologi tinggi, khususnya yang terkait dengan sektor energi dan kemaritiman, juga menjadi peluang strategis untuk mendorong transformasi ekonomi kawasan. Di samping itu, pengembangan produk dan layanan wisata halal dapat menjadi ceruk pasar baru yang potensial, sejalan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di bidang pariwisata, perikanan, serta industri kemaritiman perlu dipercepat dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Lebih lanjut, posisi Natuna–Kepulauan Anambas sebagai wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan kawasan regional, termasuk Malaysia bagian timur, Vietnam, dan perairan Laut Tiongkok Selatan, memberikan peluang strategis dalam pengembangan kerja sama ekonomi dan perdagangan lintas negara. Pemanfaatan peluang tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan aspek pertahanan dan keamanan wilayah guna menjaga stabilitas kawasan. Stabilitas ini menjadi prasyarat utama bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Natuna–Kepulauan Anambas.

Target kinerja pembangunan klaster wilayah Natuna-Kepulauan Anambas tahun 2027 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Natuna – Kepulauan Anambas

NO	INDIKATOR	TARGET 2027
1	**Kabupaten Natuna**	
	PDRB per kapita (Rp Juta)	93,25
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,58
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,70
	Indeks Daya Saing Daerah	3,39
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,44
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,01
	Indeks Pembangunan Manusia	80,44
2	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	
	PDRB per kapita (Rp Juta)	403,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,08-5,23
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,25-1,66
	Indeks Daya Saing Daerah	2,89
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	85,27
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,14
	Indeks Pembangunan Manusia	75,19

Program Unggulan pembangunan klaster wilayah Natuna-Kepulauan Anambas difokuskan pada lima agenda utama pembangunan daerah.

1. Optimalisasi potensi kemaritiman dan keunggulan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, serta perlindungan lingkungan. Rencana aksi diarahkan pada:
   a. Pengembangan sentra perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan.
   b. Peningkatan perlindungan sosial bagi petani dan nelayan, penguasaan teknologi, pengembangan SDM kemaritiman, penguatan destinasi dan promosi pariwisata bahari, serta pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko bencana;
   c. Hilirisasi produk perikanan dan kelautan serta pembangunan *cold storage* dan unit pengolahan ikan untuk penguatan sentra produksi berbasis pulau dan pengembangan ekonomi biru.
   d. Pembangunan dermaga wisata, penyediaan homestay, pelatihan praktik pariwisata ramah lingkungan dalam pengembangan destinasi pariwisata bahari.
   e. Pengawasan dan pengendalian zonasi kawasan konservasi pesisir dan laut, serta pembentukan peningkatan kapasitas Pokmaswas.

f. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pemberantasan IUU fishing, serta penambahan armada pengawasan laut untuk peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan penguatan.
g. Penataan regulasi, sinkronisasi kebijakan, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di daerah, khususnya di bidang tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan, pariwisata, dan industri.

2. Transformasi ekonomi berbasis pertumbuhan berkualitas dan peningkatan investasi dilakukan melalui pengembangan kawasan strategis Natuna–Anambas, diversifikasi ekonomi berbasis industrialisasi perikanan dan jasa, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan UMKM dan ekonomi kreatif melalui pembiayaan, digitalisasi, akses pasar, dan internasionalisasi produk. Rencana aksi transformasi ekonomi diarahkan pada:
   a. Pengembangan kawasan ekonomi perbatasan berbasis kelautan dan perikanan melalui pembangunan kampung nelayan.
   b. Pengembangan industri energi, migas, dan energi baru terbarukan, dan implementasi riset inovasi pada industri.
   c. Pengembangan FTZ, KEK, dan ekonomi biru Natuna–Anambas.
   d. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja lokal untuk peningkatan dampak ekonomi.
   e. Pendampingan IKM/UMKM dan koperasi.
   f. Pengembangan pariwisata bahari, konservasi laut, dan ekonomi biru (*blue economy*).
   g. Pelatihan tenaga kerja lokal untuk peningkatan dampak ekonomi.
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar pulau dan wilayah diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan dan pulau terluar, peningkatan listrik, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, transportasi laut dan udara, perbaikan sistem logistik, pengembangan energi terbarukan, serta penguatan infrastruktur digital dan talenta digital.
   a. Pembangunan pelabuhan, penyediaan layanan kapal perintis dan tol laut, penambahan penerbangan perintis, penyediaan seaplane dan pembangunan infrastruktur pendukungnya, serta jaringan jalan lingkar/trans pulau terutama di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan wilayah 3T.
   b. Penataan permukiman pesisir layak huni, penyediaan air minum, sanitasi, pengelolaan sampah berbasis kepulauan, dan listrik, serta penguatan sinyal telekomunikasi.
   c. Penyediaan infrastruktur air baku, pencetakan sawah, ekstensifikasi lahan pertanian, penyediaan lumbung padi, dan pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT (PLTS, PLTA, PLTMH, Biogas) untuk mendukung pemenuhan ketahanan air, pangan, dan energi.

4. Pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan layanan dan tenaga pendidik, perluasan layanan kesehatan dan tenaga kesehatan, peningkatan gizi dan penurunan stunting, pendidikan karakter berbasis budaya Melayu, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan kepemudaan dan kewirausahaan muda. Rencana aksi diarahkan pada:
   a. Penyediaan kapal dan tenaga kesehatan untuk RS/Puskesmas bergerak *(mobile health services)* termasuk layanan gawat darurat antarpulau, dilengkapi telemedicine.
   b. Penyediaan sekolah berbasis digital di pulau kecil melalui kelas jarak jauh *(daring/hybrid*), pembangunan BTS/penyediaan satelit sekolah, serta insentif tenaga pendidik daerah kepulauan.
   c. Pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan penguatan harmoni sosial diarahkan pada peningkatan kerukunan umat beragama, pemberian insentif bagi tokoh keagamaan, serta penguatan peran sosial kemasyarakatan melalui dukungan kepada RT/RW, Posyandu, BPD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
   d. Penguatan peran Natuna sebagai kawasan perbatasan negara melalui penguatan ketahanan wilayah, logistik perbatasan, serta pelayanan dasar masyarakat.

2. Klaster Wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang memiliki karakter pembangunan yang relatif lebih maju dibandingkan klaster wilayah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi tersebut tercermin dari kontribusi ekonomi yang signifikan, dominasi aktivitas sektor sekunder dan tersier, serta keberadaan status khusus sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Keunggulan ini menempatkan klaster sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah sekaligus simpul penting dalam jejaring ekonomi nasional dan internasional.

Sebagai kawasan KPBPB, klaster ini diarahkan untuk memperkuat peran dalam perdagangan luar negeri dan peningkatan ekspor nasional. Tingginya minat dan realisasi investasi, terutama pada sektor industri pengolahan, ditopang oleh keberadaan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berkembang pesat. Kondisi ini membuka peluang bagi klaster untuk menjadi pelopor dalam pengembangan industri bernilai tambah tinggi, termasuk industri galangan kapal, industri manufaktur berorientasi ekspor, serta industri hijau berbasis prinsip keberlanjutan dan transisi menuju pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Ke depan, pengembangan industri diarahkan untuk mendorong pergeseran dari aktivitas maklon menuju industri pengolahan produk akhir, guna meningkatkan nilai tambah dan daya

saing sektor industri pengolahan secara keseluruhan, di samping pengembangan sektor pertambangan mineral dan batubara secara terkendali.

Pesatnya perkembangan industri di wilayah KPBPB juga membuka peluang pembentukan rantai nilai yang lebih inklusif dengan melibatkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam dan sekitar klaster. Meskipun rantai pasok produksi cenderung terhubung langsung dengan perdagangan internasional, peningkatan keterlibatan wilayah sekitar perlu terus didorong agar tercipta efek pengganda yang lebih luas. IKM dan UMKM dapat dikembangkan sebagai bagian dari rantai pasok industri, baik dalam penyediaan bahan baku, jasa pendukung, maupun pemenuhan kebutuhan konsumsi kawasan industri dan permukiman tenaga kerja. Untuk mendukung integrasi tersebut, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci, melalui pengembangan pendidikan vokasi, khususnya SMK dan politeknik, yang selaras dengan kebutuhan dunia industri.

Peningkatan peran IKM dan UMKM dalam mendukung industri pengolahan juga memerlukan dukungan sektor primer yang kuat. Oleh karena itu, pengembangan pertanian dalam arti luas tetap menjadi bagian penting dari arah kebijakan klaster ini. Pembentukan sentra-sentra produksi perikanan dan pertanian, termasuk pengembangan komoditas unggulan seperti sagu di Kabupaten Karimun, perlu didorong untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan sektor primer tersebut, seiring dengan potensi dasar yang telah dimiliki.

Di luar perannya sebagai basis industri, klaster Batam–Bintan–Karimun–Tanjungpinang juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata. Kota Tanjungpinang didorong untuk memperkuat pengembangan pariwisata sejarah dan religi, khususnya di kawasan Pulau Penyengat, yang didukung oleh pengembangan industri halal di Kabupaten Bintan serta penguatan wisata kuliner di Kota Tanjungpinang. Selain itu, pariwisata kesehatan menjadi salah satu segmen potensial yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan kedekatan geografis dengan negara tetangga. Pengembangan layanan ini juga diharapkan mampu menangkap peluang pasar wisata lansia akibat tren penuaan penduduk global, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan di luar negeri. Inisiatif ini dapat diawali melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jasa Kesehatan di Kota Batam.

Pengembangan sektor jasa lainnya juga diarahkan pada optimalisasi posisi strategis Batam sebagai simpul transportasi regional. Peluang pengembangan usaha Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) untuk angkutan udara, serta jasa labuh jangkar, perawatan kapal, dan kegiatan *ship-to-ship* bagi kapal internasional perlu dimaksimalkan. Peningkatan kualitas dan

daya saing layanan jasa tersebut menjadi prasyarat penting agar klaster ini mampu bersaing dengan kawasan lain di sepanjang jalur perdagangan Selat Malaka dan memperkuat perannya sebagai pusat jasa maritim dan logistik internasional.

Target kinerja pembangunan klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang tahun 2027 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

NO	INDIKATOR	TARGET
		2027
1	**Kota Batam**	
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	228,69-233,10
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,40-4,28
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,40-8,66
d.	Indeks Daya Saing Daerah	4,10
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,94
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,09
g.	Indeks Pembangunan Manusia	83,71
2	**Kabupaten Bintan**	
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	233,34
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,94
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,92
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,72
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,46
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44
g.	Indeks Pembangunan Manusia	78,26
3	**Kabupaten Karimun**	
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	76,95-80,59
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,99-4,08
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60-6,60
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,82
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,12
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,77-5,46
g.	Indeks Pembangunan Manusia	76,15
4	**Kota Tanjungpinang**	
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	122,17
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,37
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,25-5,17

NO	INDIKATOR	TARGET
		2027
d.	Indeks Daya Saing Daerah	4,15
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,56
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,49
g.	Indeks Pembangunan Manusia	82,82

Program unggulan yang dilaksanakan di Klaster Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang diarahkan untuk memperkuat peran kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri, jasa, dan konektivitas regional. Fokus utama pembangunan meliputi:

1. Optimalisasi potensi kemaritiman dan keunggulan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan yang didukung perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi, pengembangan SDM kemaritiman, serta penguatan industri perkapalan dan pariwisata bahari. Upaya ini dilengkapi dengan pengelolaan lingkungan pesisir dan pembangunan infrastruktur pengolahan limbah untuk menjaga keberlanjutan kawasan.
   a. Peningkatan perlindungan sosial bagi petani dan nelayan, penguasaan teknologi, pengembangan SDM kemaritiman, penguatan destinasi dan promosi pariwisata bahari, serta pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko bencana;
   b. Hilirisasi produk perikanan dan kelautan serta pembangunan *cold storage* dan unit pengolahan ikan untuk penguatan sentra produksi berbasis pulau dan pengembangan ekonomi biru.
   c. Pembangunan dermaga wisata, penyediaan homestay, pelatihan praktik pariwisata ramah lingkungan dalam pengembangan destinasi pariwisata bahari.
   d. Pengawasan dan pengendalian zonasi kawasan konservasi pesisir dan laut, serta pembentukan peningkatan kapasitas Pokmaswas.
   e. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pemberantasan IUU fishing, serta penambahan armada pengawasan laut untuk peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan penguatan.
   f. Penataan regulasi, sinkronisasi kebijakan, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di daerah, khususnya di bidang tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan, pariwisata, dan industri.
2. Transformasi ekonomi melalui optimalisasi peran kawasan industri, peningkatan investasi, serta diversifikasi ekonomi berbasis industri pengolahan perikanan, industri jasa, ekonomi digital, dan industri halal. Penguatan tenaga kerja dilakukan melalui *link and match* pendidikan

dengan industri, peningkatan keterampilan dan sertifikasi, serta perluasan jaminan sosial. UMKM dan ekonomi kreatif dikembangkan melalui dukungan pembiayaan, digitalisasi, perluasan pasar hingga internasional, pembentukan sentra ekonomi baru, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha. Rencana aksi diarahkan pada:

a. Penguatan kawasan FTZ, KEK dan kawasan industri berdaya saing global
b. Pengembangan industri manufaktur berteknologi menengah dan tinggi, hilirisasi industri berbasis pengolahan perikanan, dan industri halal.
c. Pengembangan ekonomi digital, pusat inovasi, dan kawasan ekonomi kreatif.
d. Pengembangan pusat investasi dan perdagangan internasional.
e. Penguatan sistem logistik nasional dan internasional berbasis pelabuhan dan ALKI I.
f. Pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan *MICE* bertaraf internasional.
g. Peningkatan kualitas SDM industri, vokasi, dan inovasi berbasis kebutuhan dunia usaha.

3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas logistik yang berdaya saing dengan percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti Jembatan Batam–Bintan, pelabuhan, jalan, listrik, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, serta transportasi laut dan udara. Upaya ini didukung perbaikan sistem logistik antarwilayah, pengembangan industri pertambangan dan hilirisasi mineral, pemanfaatan energi terbarukan, serta penguatan infrastruktur digital dan pengembangan talenta digital. Rencana aksi diarahkan pada:
   a. Pembangunan pelabuhan, penyediaan layanan kapal perintis dan tol laut, penambahan penerbangan perintis, penyediaan seaplane dan pembangunan infrastruktur pendukungnya, serta jaringan jalan lingkar/trans pulau terutama di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan wilayah 3T.
   b. Penataan permukiman pesisir layak huni, penyediaan air minum, sanitasi, pengelolaan sampah berbasis kepulauan, dan listrik, serta penguatan sinyal telekomunikasi.
   c. Penyediaan infrastruktur air baku, pencetakan sawah, ekstensifikasi lahan pertanian, penyediaan lumbung padi, dan pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT (PLTS, PLTA, PLTMH, Biogas) untuk mendukung pemenuhan ketahanan air, pangan, dan energi.
4. Pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan pendidikan karakter berbasis nilai budaya Melayu. Pemberdayaan perempuan dan pemuda

menjadi bagian integral melalui penguatan ekonomi keluarga, perlindungan sosial, serta pengembangan kewirausahaan dan kreativitas generasi muda. Rencana aksi diarahkan pada:

a. Penyediaan kapal dan tenaga kesehatan untuk RS/Puskesmas bergerak (mobile health services) termasuk layanan gawat darurat antarpulau, dilengkapi telemedicine.
b. Penyediaan sekolah berbasis digital di pulau kecil melalui kelas jarak jauh (daring/hybrid), pembangunan BTS/penyediaan satelit sekolah, serta insentif tenaga pendidik daerah kepulauan.
h. Pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan penguatan harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan. Program difokuskan pada pengembangan Pulau Penyengat sebagai pusat budaya Melayu, penguatan destinasi wisata budaya dan sejarah, peningkatan kerukunan umat beragama, serta penguatan kelembagaan sosial kemasyarakatan guna mendukung stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan kawasan.

3. Klaster wilayah Lingga

Pembangunan wilayah Kabupaten Lingga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Prioritas kebijakan difokuskan pada penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar serta akses terhadap layanan publik, meliputi perumahan yang layak, sanitasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Seiring dengan perkembangan era digital, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan mendesak, mengingat Kabupaten Lingga merupakan daerah dengan jumlah desa terbanyak yang masih mengalami keterbatasan akses jaringan telekomunikasi di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan sebagian wilayah belum terjangkau layanan internet secara memadai.

Arah pembangunan ekonomi Lingga difokuskan pada penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini menjadi penting mengingat kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lingga terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau masih relatif kecil. Pengembangan ekonomi daerah diarahkan pada sektor-sektor unggulan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, khususnya ekonomi biru dan pariwisata alam. Dalam kerangka ekonomi biru, Kabupaten Lingga berpotensi dikembangkan sebagai sentra pangan dan produksi komoditas pertanian dan perkebunan, seperti lada, pala, kelapa, karet, serta pengolahan sagu. Selain itu, peningkatan produktivitas pertanian hortikultura, antara lain sayuran dan buah-buahan lokal, menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Rencana aksi diarahkan pada Pendampingan IKM/UMKM dan koperasi, pembangunan kampung nelayan,

implementasi riset inovasi pada industri, dan pelatihan tenaga kerja lokal untuk peningkatan dampak ekonomi.

Sektor perikanan juga memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi Lingga, terutama melalui penguatan perikanan budidaya dan pengembangan komoditas unggulan seperti rumput laut. Di sisi lain, sektor pariwisata menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Lingga memiliki kekayaan alam berupa pantai dan ekosistem bawah laut yang masih alami, serta nilai historis dan budaya yang kuat sebagai Bunda Tanah Melayu dengan pusat Kerajaan Riau–Lingga di Kecamatan Daik. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui penguatan komponen pariwisata yang mencakup atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta pengembangan paket-paket wisata terpadu yang menghubungkan berbagai destinasi unggulan di wilayah Lingga.

Untuk memastikan keberlanjutan pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda penting. Kebijakan diarahkan pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata, agar selaras dengan kebutuhan ekonomi lokal. Di samping itu, persoalan konektivitas wilayah menjadi tantangan yang perlu segera ditangani. Akses menuju Kabupaten Lingga, khususnya dari pusat-pusat pertumbuhan seperti Batam, masih didominasi oleh transportasi laut dengan waktu tempuh dan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pengembangan alternatif moda transportasi, termasuk pemanfaatan pesawat amfibi, dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk meningkatkan keterhubungan wilayah dan daya tarik pariwisata.

Target kinerja pembangunan klaster wilayah Lingga tahun 2027 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3
Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Lingga

NO	INDIKATOR	Target 2027
1	**Kabupaten Lingga**	
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	57,99-58,32
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,53-7,99
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,79
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,94
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,40-3,29
g.	Indeks Pembangunan Manusia	73,76

Program unggulan Klaster Wilayah Lingga difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan fondasi pembangunan wilayah kepulauan melalui optimalisasi potensi kemaritiman dan keunggulan lokal yang berkelanjutan. Arah kebijakan diarahkan pada penguatan sektor pertanian, perkebunan, serta perikanan dan kelautan melalui peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi, perlindungan sosial bagi petani dan nelayan, penguatan SDM kemaritiman, serta dukungan permodalan dan pemasaran. Pengembangan pariwisata bahari juga menjadi prioritas dengan mendorong penguatan SDM, pembukaan dan promosi destinasi wisata, serta jejaring pariwisata antardaerah, yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan pesisir dan laut. Rencana aksi diarahkan pada:
   a. Pengembangan kawasan agro-maritim berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan budidaya.
   b. Peningkatan perlindungan sosial bagi petani dan nelayan, penguasaan teknologi, pengembangan SDM kemaritiman, penguatan destinasi dan promosi pariwisata bahari, serta pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko bencana;
   c. Hilirisasi produk perikanan dan kelautan serta pembangunan *cold storage* dan unit pengolahan ikan untuk penguatan sentra produksi berbasis pulau dan pengembangan ekonomi biru.
   d. Pembangunan dermaga wisata, penyediaan homestay, pelatihan praktik pariwisata ramah lingkungan dalam pengembangan destinasi pariwisata bahari.
   e. Pengawasan dan pengendalian zonasi kawasan konservasi pesisir dan laut, serta pembentukan peningkatan kapasitas Pokmaswas.
   f. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pemberantasan IUU fishing, serta penambahan armada pengawasan laut untuk peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan penguatan.
   g. Penataan regulasi, sinkronisasi kebijakan, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di daerah, khususnya di bidang tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan, pariwisata, dan industri.
2. Transformasi ekonomi Lingga diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas melalui diversifikasi ekonomi berbasis industrialisasi perikanan, pengembangan sektor jasa, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Penguatan ketenagakerjaan dilakukan melalui peningkatan keterkaitan pendidikan dan dunia kerja, perluasan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, serta penciptaan lapangan kerja baru. UMKM dan pelaku ekonomi kreatif didorong melalui dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, perluasan akses pasar hingga internasional, serta pengembangan sentra-sentra ekonomi baru. Rencana aksi diarahkan pada:

a. Hilirisasi produk unggulan daerah dan penguatan UMKM berbasis sumber daya lokal.
b. Pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya Melayu, dan ekowisata bahari.
c. Penguatan ketahanan pangan daerah dan ekonomi desa.
d. Pengembangan industri kecil, ekonomi kreatif, serta kewirausahaan masyarakat.

3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas menjadi agenda strategis dengan fokus pada pemenuhan listrik di pulau-pulau, peningkatan infrastruktur pelabuhan, transportasi laut dan udara, jaringan listrik, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, serta perbaikan sistem logistik antarpulau. Pengembangan energi terbarukan, pengelolaan pertambangan yang melibatkan masyarakat, serta mitigasi risiko bencana dan revitalisasi kawasan kumuh menjadi bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan. Rencana aksi diarahkan pada:
   a. Peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung distribusi hasil produksi.
   b. Pembangunan pelabuhan, penyediaan layanan kapal perintis dan tol laut, penambahan penerbangan perintis, penyediaan seaplane dan pembangunan infrastruktur pendukungnya, serta jaringan jalan lingkar/trans pulau terutama di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan wilayah 3T.
   c. Penataan permukiman pesisir layak huni, penyediaan air minum, sanitasi, pengelolaan sampah berbasis kepulauan, dan listrik, serta penguatan sinyal telekomunikasi.
   d. Penyediaan infrastruktur air baku, pencetakan sawah, ekstensifikasi lahan pertanian, penyediaan lumbung padi, dan pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT (PLTS, PLTA, PLTMH, Biogas) untuk mendukung pemenuhan ketahanan air, pangan, dan energi.
   e. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
4. Pembangunan sumber daya manusia menjadi pilar penting melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, peningkatan gizi dan sanitasi lingkungan, serta penguatan pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan dan budaya Melayu. Pemberdayaan perempuan dan pemuda didorong melalui penguatan ekonomi keluarga, peningkatan partisipasi di sektor produktif dan publik,

serta pengembangan kewirausahaan dan kreativitas generasi muda. Rencana aksi diarahkan pada:

a. Penyediaan kapal dan tenaga kesehatan untuk RS/Puskesmas bergerak *(mobile health services)* termasuk layanan gawat darurat antarpulau, dilengkapi telemedicine.
b. Penyediaan sekolah berbasis digital di pulau kecil melalui kelas jarak jauh *(daring/hybrid),* pembangunan BTS/penyediaan satelit sekolah, serta insentif tenaga pendidik daerah kepulauan.

5. Selain itu, klaster Lingga menempatkan pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan penguatan harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan daerah. Program diarahkan pada pengembangan dan integrasi destinasi wisata budaya dan sejarah, revitalisasi warisan budaya, penyelenggaraan event budaya, penguatan kerukunan umat beragama, serta penguatan peran kelembagaan sosial kemasyarakatan guna mendukung stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan wilayah Lingga.

5.2 Arah Kebijakan Pengarustamaan Pembangunan di Kabupaten/Kota

Pengarusutamaan pembangunan merupakan pendekatan strategis yang wajib dijadikan landasan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selaras dengan arah pembangunan nasional yang berorientasi pada inklusivitas, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, isu-isu lintas sektor harus diintegrasikan secara konsisten dalam seluruh siklus perencanaan, mulai dari identifikasi permasalahan, perumusan tujuan dan sasaran, penetapan program dan kegiatan, hingga pelaksanaan serta evaluasi kinerja pembangunan.

1. Pemerintah kabupaten/kota perlu menjadikan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan penguatan ketahanan iklim sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan daerah. Upaya ini meliputi pengendalian emisi dari sektor energi dan transportasi, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, rehabilitasi ekosistem mangrove dan daerah aliran sungai, pengelolaan sampah dan limbah secara berkelanjutan, serta perlindungan keanekaragaman hayati daerah. Arah pembangunan perlu difokuskan pada pengurangan dampak lingkungan sekaligus peningkatan daya lenting wilayah terhadap perubahan iklim, sejalan dengan target nasional penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) harus menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten/kota dalam seluruh proses pembangunan. Aspek PRB perlu diintegrasikan dalam penataan ruang, perizinan, pembangunan infrastruktur publik, dan pengembangan kawasan permukiman, serta diperkuat melalui peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat. Setiap investasi

publik wajib mempertimbangkan faktor keselamatan, mitigasi bencana, dan adaptasi terhadap ancaman iklim yang semakin kompleks.

3. Pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial adaptif perlu ditempatkan sebagai agenda prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota yang diterjemahkan secara konkret dalam program pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, memperluas cakupan perlindungan sosial, serta memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. Sinergi lintas perangkat daerah perlu diperkuat agar upaya pengurangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, tematik, holistik, integratif, dan berbasis wilayah.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penurunan stunting harus diarusutamakan dalam kebijakan daerah Kabupaten/Kota melalui intervensi gizi yang spesifik dan sensitif, perluasan akses terhadap layanan dasar, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan. Pemerintah kabupaten/kota juga perlu menjamin pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, termasuk di wilayah terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau kecil.
5. Kesetaraan gender, perlindungan anak, dan inklusi sosial perlu menjadi prinsip dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah kabupaten/kota harus memastikan bahwa seluruh layanan publik dan program pembangunan dapat diakses secara adil oleh perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), penyediaan data terpilah, serta pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender menjadi bagian penting dari pengarusutamaan ini.
6. Transformasi digital dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu dipercepat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten/Kota. Digitalisasi layanan diarahkan pada keterpaduan sistem, kemudahan akses, dan efisiensi, mencakup layanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Penguatan SPBE menjadi fondasi bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja birokrasi daerah.
7. Pengarusutamaan pembangunan berbasis inovasi dan riset perlu diwujudkan dalam Pembangunan Kabupaten/Kota. Penguatan ekosistem inovasi daerah, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, serta penerapan inovasi dalam pelayanan publik dan ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing daerah.
8. Ketahanan pangan dan penguatan ekonomi lokal harus diintegrasikan dalam strategi pembangunan daerah Kabupaten/Kota melalui dukungan terhadap produksi pangan lokal, penguatan rantai pasok dan distribusi, stabilisasi harga,

serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Pengembangan potensi ekonomi daerah, baik di sektor pertanian, perikanan, industri kreatif, maupun pariwisata, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi kabupaten/kota secara berkelanjutan.

9. Pengarusutamaan budaya, moderasi beragama, dan penguatan karakter bangsa perlu diwujudkan Kabupaten/Kota dalam kebijakan pendidikan dan pembangunan sosial. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menjaga kelestarian budaya lokal, mengembangkan ekosistem kreatif, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
10. Pengarusutamaan manajemen risiko perlu diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan kabupaten/kota. Pengarusutamaan ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian, baik yang bersumber dari dinamika ekonomi, sosial, lingkungan, maupun tata kelola, sehingga target pembangunan daerah dapat dicapai secara berkelanjutan dan adaptif.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Kerangka Pendanaan

Penyelesaian permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, juga didukung partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Program dan kegiatan Pendanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun 2027 tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga APBN, CSR, dan Perusahaan Daerah. Kerangka pendanaan pembangunan tahun 2027 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.802.692.463.003,00**
4.1.01	Pajak Daerah	1.566.559.035.194,00
4.1.02	Retribusi Daerah	187.075.969.309,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.857.458.500,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.687.146.790.780,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.687.146.790.780,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.350.716.960,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.350.716.960,00
	Jumlah Pendapatan	**3.491.189.970.743,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**3.509.461.110.517,00**
5.1	Belanja Operasi	2.236.041.904.358,00
5.2	Belanja Modal	728.424.328.643,00
5.3	Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	529.994.877.516,00
	Jumlah Belanja Daerah	**3.509.461.110.517,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**149.400.000.000,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	149.400.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**131.128.860.226,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	111.128.860.226,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**131.128.860.226,00**
	Pembiayaan Netto	**18.271.139.774,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**

Berdasarkan tabel di atas, kapasitas fiskal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 menunjukkan kemampuan daerah yang relatif baik dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3,49 triliun. Struktur pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,80 triliun atau sekitar 51,6% dari total pendapatan, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,69 triliun atau sekitar 48,3%, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,04%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Kepulauan Riau relatif tinggi, karena lebih dari separuh pendapatan daerah berasal dari PAD. Kondisi ini lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi di Indonesia yang masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat. Namun demikian, kontribusi pendapatan transfer yang masih mencapai hampir separuh total pendapatan menunjukkan bahwa stabilitas fiskal daerah masih dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat, sehingga upaya peningkatan PAD tetap menjadi agenda strategis.

Total belanja daerah Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp3,51 triliun. Struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp2,24 triliun atau sekitar 63,7% dari total belanja. Sementara itu, belanja modal mencapai Rp728,42 miliar atau sekitar 20,8%, belanja transfer sebesar Rp529,99 miliar atau sekitar 15,1%, dan belanja tidak terduga sekitar 0,4%. Dominasi belanja operasi menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas fiskal masih digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Meskipun demikian, proporsi belanja modal yang telah mencapai lebih dari 20 persen menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas wilayah kepulauan, penyediaan sarana pelayanan dasar, dan pembangunan fasilitas publik yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari perspektif ruang fiskal (fiscal space), fleksibilitas APBD masih menghadapi tekanan akibat tingginya kebutuhan belanja wajib (*mandatory spending*), belanja operasi, serta kewajiban pembayaran cicilan pokok utang daerah. Kondisi tersebut menyebabkan ruang anggaran yang dapat digunakan untuk

membiayai program-program pembangunan baru menjadi relatif terbatas. Oleh karena itu, peningkatan ruang fiskal perlu dilakukan melalui optimalisasi PAD, efisiensi belanja operasional, pengendalian belanja pegawai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Pada Tahun 2027, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp149,40 miliar yang seluruhnya berasal dari penerimaan utang daerah. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp131,13 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp20 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp111,13 miliar. Dengan demikian, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp18,27 miliar yang digunakan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja daerah sehingga APBD Tahun 2027 berada dalam kondisi anggaran berimbang (balanced budget). Struktur pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan pinjaman daerah tetap dilakukan secara terkendali dengan tetap memperhatikan kemampuan pembayaran kembali (*ability to pay*) dan keberlanjutan fiskal daerah.

6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun sebelumnya dan memperhatikan prioritas pemerintah pusat dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersebut diusulkan melalui mekanisme forum Musrenbang, namun karena keterbatasan anggaran tidak semua rencana program/kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang tidak dapat diakomodir dalam dokumen RKPD. Oleh karena itu, ditetapkan skala prioritas program dan kegiatan yang dapat dianggarkan.

RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 yang disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kapasitas fiskal daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta dinamika kebijakan nasional dan kondisi aktual daerah. Oleh karena itu, tidak seluruh program yang tercantum dalam RPJMD dapat diakomodasi secara bersamaan dalam RKPD Tahun 2027. Program yang belum diakomodasi pada RKPD Tahun 2027 bukan berarti dihapus atau tidak lagi menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah, melainkan dilakukan penjadwalan kembali atau penyesuaian waktu pelaksanaannya pada tahun perencanaan berikutnya. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap tingkat urgensi, kesiapan

pelaksanaan, ketersediaan pendanaan, keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahun berjalan, serta kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program secara efektif.

Selain keterbatasan kapasitas fiskal, penyesuaian juga dipengaruhi oleh kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi belanja wajib (*mandatory spending*), pengendalian belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelesaian program strategis yang sedang berjalan, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan isu-isu strategis yang berkembang. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah menerapkan prinsip penganggaran berbasis prioritas sehingga sumber daya yang tersedia difokuskan pada program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan target pembangunan Tahun 2027.

Ringkasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendidikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan • Pengelolaan Pendidikan Khusus
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	• Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah • Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

2. Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.3
Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KESEHATAN	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	• Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi • Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	• Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi • Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.4
Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	• Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	• Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi • Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	• Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.5
Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	• Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	• Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha • Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.6
Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	• Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi • Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur • Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	• Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran • Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6. Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan sosial yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.7
Program dan Kegiatan Urusan Sosial

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS SOSIAL	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	• Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti • Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti • Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti • Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

7. Tenaga kerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.8
Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Program	Kegiatan
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	• Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi • Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja • Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	• Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Informasi Pasar Kerja • Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi • Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	• Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota • Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi • Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

Dalam rangka memperkuat relevansi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap kebutuhan transisi ekonomi hijau, pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada Tahun 2027 diarahkan untuk mengintegrasikan elemen kompetensi hijau *(green skills)* ke dalam skema pelatihan yang ada, khususnya pada klaster yang berkaitan dengan: (a) teknisi energi terbarukan (PLTS, sistem penyimpanan energi); (b) pengelolaan ekosistem pesisir dan budidaya laut ramah lingkungan; (c) pemandu ekowisata bahari; (d) teknisi efisiensi energi dan pengelolaan limbah industri; serta (e) praktik pertanian berkelanjutan/agroekologi. Integrasi ini dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang relevan dan memperhatikan ketersediaan instruktur yang kompeten di bidang green skills. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja juga diarahkan untuk mendorong LPK agar memenuhi standar penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi hijau, sejalan dengan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 diarahkan untuk memuat secara eksplisit proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja pada sektor-sektor berbasis ekonomi hijau, identifikasi jabatan-jabatan pekerjaan hijau yang relevan dengan karakteristik wilayah

kepulauan, serta strategi pengembangan kompetensi yang mendukung transisi tenaga kerja ke pekerjaan hijau. Hal ini sejalan dengan amanah Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia (Bappenas, 2025) yang mewajibkan perencanaan tenaga kerja daerah untuk mengintegrasikan dimensi tenaga kerja hijau sebagai bagian dari fondasi transformasi ekonomi hijau pada periode 2025–2029."

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.9
Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi • Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	• Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	• Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	• Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

9. Pangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pangan, pertanian, dan Kesehatan hewan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.10
Program dan Kegiatan Urusan Pangan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	• Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan • Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi • Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	• Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi • Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

10. Pertanahan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.11
Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan

Kode	Program	Kegiatan
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	• Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

11. Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.12
Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	• Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi • Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	• Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup • Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.13
Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program	Kegiatan
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyaraklat dan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.14
Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	• Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan • Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan •
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.15
Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program	Kegiatan
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	• Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal • Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	• Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

15. Perhubungan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perhubungan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.16
Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	• Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
		• Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi • Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan • Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	• Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi • Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional • Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan • Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas • Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional • Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional • Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

16. Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan komunikasi dan informatika yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.17
Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		• Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	• Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi • Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.18
Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

18. Penanaman Modal

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan penanaman modal yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.19
Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	• Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

19. Kepemudaan dan olah raga

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kepemudaan dan olahraga yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.20
Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	• Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi • Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga • Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

20. Statistik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Statistik yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.21
Program dan Kegiatan Urusan Statistik

Kode	Program	Kegiatan
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

21. Persandian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan persandian yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.22
Program dan Kegiatan Urusan Persandian

Kode	Program	Kegiatan
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

22. Kebudayaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.23
Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KEBUDAYAAN	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	• Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Provinsi

23. Perpustakaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perpustakaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.24
Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	• Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi • Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	• Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi • Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah • Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

24. Kearsipan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kearsipan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.25
Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan

Kode	Program	Kegiatan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	• Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi • Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi • Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi • Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota • Pengawasan kearsipan di provinsi
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	• Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun • Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi

25. Kelautan dan Perikanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kelautan dan perikanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.26
Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	• Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi • Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi • Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	• Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil • Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT • Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi • Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	• Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	• Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

26. Pariwisata

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.27
Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PARIWISATA	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	• Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi • Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi • Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	• Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif • Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

27. Pertanian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanian yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.28
Program dan Kegiatan Urusan Pertanian

Kode	Program	Kegiatan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	• Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian • Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman • Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
		• Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi • Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi • Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	• Penataan Prasarana Pertanian • Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	• Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan • Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner • Kesejahteraan Hewan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	• Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian • Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian • Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

28. Kehutanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Kehutanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.29
Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan

Kode	Program	Kegiatan
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	• Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi • Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) • Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung • Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara • Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi • Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Kode	Program	Kegiatan
		• Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	• Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi • Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	• Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan • Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan • Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan energi dan sumberdaya mineral yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.30
Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	• Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi • Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	• Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil • Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Kode	Program	Kegiatan
		• Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat • Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan • Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	• Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi • Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi • Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi • Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi • Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri • Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

30. Perdagangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perdagangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.31
Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	• Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor • Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi • Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar • Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) • Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	• Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi • Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan • Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya • Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi • Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	• Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Program	Kegiatan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	• Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri • Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri • Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

31. Perindustrian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perindustrian yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.32
Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian

Kode	Program	Kegiatan
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

32. Transmigrasi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan transmigrasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.33
Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi

Kode	Program	Kegiatan
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan

33. Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.34
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Sekretariat Daerah

Kode	Program	Kegiatan
	SEKRETARIS DAERAH	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	• Pelaksanaan Tugas Pemerintahan • Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Kerjasama Daerah
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	• Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	• Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan • Fasilitasi Bantuan Hukum
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	• Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	• Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa • Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik • Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	• Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah • Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

34. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.35
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD

Kode	Program	Kegiatan
	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	• Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD • Pembahasan Kebijakan Anggaran • Peningkatan Kapasitas DPRD • Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat • Fasilitasi Tugas DPRD

35. Unsur Perencanaan Pembangunan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang perencanaan pembangunan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.36
Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	• Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	• Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

36. Keuangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang keuangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.37
Program, Indikator Unsur Penunjang Keuangan

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	• Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah • Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah • Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah • Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	• Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah • Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		• Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

37. Unsur Penunjang Kepegawaian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.38
Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	• Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN • Mutasi dan Promosi ASN • Pengembangan Kompetensi ASN • Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

38. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.39
Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	• Pengembangan Kompetensi Teknis • Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

39. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.40
Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program	Kegiatan
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	• Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi • Pengembangan Inovasi dan Teknologi

40. Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pengelolaan perbatasan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.41
Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengeloaan Perbatasan

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Program	Kegiatan
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	• Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi

41. Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pengelolaan penghubung yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.42
Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	• Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

42. Unsur Penunjang Pengawasan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Unsur Penunjang Pengawasan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.43
Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengawasan

Kode	Program	Kegiatan
	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi

43. Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.44
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kode	Program	Kegiatan
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja dan target kinerja indikator program dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.45
Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			**1.140.042.706.707,73**			**939.556.107.828,98**	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			682.357.666.041,00			670.817.990.346,98	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	80,47	682.357.666.041,00	84,57	80,47	670.817.990.346,98	Dinas Pendidikan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,00		86,80	88,00		Dinas Pendidikan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB		BB	BB		Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			452.885.040.666,73			268.368.117.482,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (%)	100,00	452.885.040.666,73	91,61	100	268.368.117.482,00	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (%)	100,00		126,28	100		Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (%)	89,44		76,12	89,44		Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB (%)	0,011		0,035	0,011		Dinas Pendidikan
	Rasio peserta didik per kelas (Rasio)	36,00		31	36,00		Dinas Pendidikan
	Persentase Konten Pendidikan (%)	30,00		20	30,00		Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa (Nilai)	65,69		63,6	65,69		Dinas Pendidikan
	Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa (Nilai)	62,90		56,38	62,90		Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			800.000.000,00			225.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	13,89	800.000.000,00	6,94	13,89	225.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			3.500.000.000,00			110.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Rasio)	628,60	3.500.000.000,00	603,49	628,60	110.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			500.000.000,00			35.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin (%)	100,00	500.000.000,00	100,00	100,00	35.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**513.580.051.685,11**			**414.558.660.150,15**	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			409.058.530.153,77			375.755.922.771,81	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	409.058.530.153,77	BB	BB	375.755.922.771,81	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	82,00		80	82		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,80		91,4	91,80		Dinas Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B		-	B		Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,00		93,01	91,85		Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B		-	B		Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,00		85,72	83		Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	98,70		98,6	98,70		Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			90.539.930.619,34			34.794.260.142,34	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	93,50	90.539.930.619,34	87,24	93,50	34.794.260.142,34	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) (Angka)	9,00		10,20	9,00		Dinas Kesehatan
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	5,70		6,30	5,70		Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100,00		100,00	100,00		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%)	100,00		100,00	100,00		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	60,00		49,4	60,00		Dinas Kesehatan
	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Per 1000)	0,33		0,45	0,33		Dinas Kesehatan
	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	7,00		7,00	7,00		Dinas Kesehatan
	Hipertensi dalam pengendalian (%)	18,00		15,00	18,00		Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	92,00		75,26	92,00		Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	99,20		99,00	99,20		Dinas Kesehatan
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1000)	1,99		1,83	1,99		Dinas Kesehatan
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	98,00		98,20	98,00		Dinas Kesehatan
	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (kabupaten/kota)	1,00		0	1,00		Dinas Kesehatan
	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	89,20		89,7	89,20		Dinas Kesehatan
	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	Utama		Utama	Utama		Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib
	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	Satelit		Satelit	Satelit		Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			12.459.870.931,00			3.458.047.236,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	4,29	12.459.870.931,00	4,2	4,29	3.458.047.236,00	Dinas Kesehatan
	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	87,00		89	87		Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib
	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	65,00		99,47	52		Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			561.656.548,00			40.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (%)	91,00	561.656.548,00	81	91,00	40.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			960.063.433,00			510.430.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10% (%)	28,57	960.063.433,00	43	28,57	510.430.000,00	Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**226.840.931.696,52**			**239.658.075.479,94**	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			35.540.931.696,52			35.540.931.696,52	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	33.540.931.696,52	BB	BB	33.540.931.696,52	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	86,23		85,36	86,23		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,83		88,94	88,83		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Terwujudnya Tata Kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	1.000.000.000,00	BB	BB	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,83		88,94	88,83		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Terwujudnya Tata Kelola UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Insfrastruktur yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	1.000.000.000,00	BB	BB	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			4.870.000.000,00			6.685.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	0,12	4.870.000.000,00	0,492	0,12	6.685.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	infrastruktur pengendalian banjir (%)						
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	27,55		10,26	27,55		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	82,48		60,76	82,48		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			1.100.000.000,00			1.100.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	53,25	1.100.000.000,00	34,33	53,25	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			300.000.000,00			300.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,08	300.000.000,00	8,82	10,08	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1.130.000.000,00			1.130.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	14,29	1.130.000.000,00		14,29	1.130.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			80.850.000.000,00			87.877.143.783,42	
Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	7,41	80.850.000.000,00	29,63	7,41	87.877.143.783,42	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			71.200.000.000,00			75.175.000.000,00	
Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	9,09	71.200.000.000,00	27,27	9,09	74.975.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00		100,00	100,00	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			30.450.000.000,00			30.450.000.000,00	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	82,29	30.450.000.000,00	81,11	82,29	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	6,16		26,7	6,16	450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			700.000.000,00			700.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	8,00	700.000.000,00	9,78	8	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			700.000.000,00			700.000.000	
Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	72,00	700.000.000,00	68,63	72	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**46.218.625.999,00**			**109.250.799.431,78**	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			20.530.000.000,00			13.793.575.064,78	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	20.530.000.000,00	A	A	13.793.575.064,78	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	81,74		86,38	81,74		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,10		84,98	85,10		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			3.239.000.000,00			1.000.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100,00	3.239.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100,00		100,00	100,00		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			7.700.000.000,00			2.700.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani (%)	9,17	7.700.000.000,00	1,83	9,17	2.700.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun (Unit)	100,00		99,00	39,00		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			14.749.625.999,00			91.757.224.367,00	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	53,50	14.749.625.999,00	52,66	53,50	91.757.224.367,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**39.082.992.587,00**			**34.367.098.158,87**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			31.901.919.055,00			31.845.198.158,87	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	22.531.303.952,00	BB	BB	22.986.966.284,17	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,10		84,68	85,10		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	80,88		78,58	80,88		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	9.370.615.103,00	BB	BB	8.858.231.874,70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	89,00		83,00	84,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,50		87,64	88,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.762.635.353,00			1.322.000.000,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100,00	1.762.635.353,00	100,00	100,00	1.322.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat							Penanggulangan Kebakaran
	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya (%)	3,25		2,17	3,25		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
	Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya (%)	79,55		64,55	79,55		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
	Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan (%)	100,00		100,00	100,00		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	75,23		73,49	75,23		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			3.608.438.179,00			999.900.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan saat Pasca Bencana	Indeks Pencegahan Bencana (Indeks)	2,76	3.608.438.179,00	2,99	2,76	999.900.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Indeks)	0,31		0,27	0,28		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Indeks)	0,58		0,47	0,48		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,			1.810.000.000,00			200.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
Meningkatnya Pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	42,86	1.810.000.000,00	14,29	42,86	200.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			**20.000.000.000,00**			**24.330.843.071,83**	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			14.487.031.387,00			14.380.012.257,83	
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	14.000.264.427,00	BB	BB	14.146.012.257,83	Dinas Sosial
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83,30		83,82	83,30		Dinas Sosial
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,43	486.766.960,00	88,04	83,43	234.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.070.600.000,00			1.610.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	42,35	1.070.600.000,00	31,37	42,35	1.610.000.000,00	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	2,38		0,89	2,38		Dinas Sosial
	Persentase Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (%)	100,00		0,00	100,00		Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.135.383.480,00			1.563.000.000,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100,00	1.160.000.000,00	100,00	100,00	948.500.000,00	Dinas Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100,00		100,00	100,00		Dinas Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100,00		100,00	100,00		Dinas Sosial
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100,00		100,00	100,00		Dinas Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00		100,00	100,00		Dinas Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100,00	975.383.480,00	100,00	100,00	614.500.000,00	Dinas Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00		100,00	100,00		Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.889.985.133,00			6.434.830.814,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	3,22	1.889.985.133,00	3,86	4,45	6.434.830.814,00	Dinas Sosial
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin (%)	100,00		100,00	100,00		Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	0,13		0,18	0,33		Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			392.000.000,00			318.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100,00	392.000.000,00	100,00	100,00	318.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			25.000.000,00			25.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	11,11	25.000.000,00	11,11	11,11	25.000.000,00	Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			**37.312.324.761,00**			**33.225.207.186,50**	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			30.744.776.961,00			30.889.179.186,50	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	30.744.776.961,00	BB	BB	30.889.179.186,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	79,25		87,07	79,25		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,57		82,67	86,57		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,68		82,67	86,68		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,57		82,67	86,57		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,57		82,67	86,57		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			115.000.000,00			40.000.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas (%)	62,50	115.000.000,00	100	62,50	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			3.994.547.769,00			1.251.028.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	73,82	3.994.547.769,00	61,53	73,82	1.251.028.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	73,82		61,53	73,82		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			693.000.031,00			160.000.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	79,66	693.000.031,00	64,00	79,66	160.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	73,99		69,00	73,99		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%))						
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	49,90		35,59	49,90		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			815.000.000,00			505.000.000,00	
Meningkatanya pekerja Provinsi Kepri yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)	55,00	815.000.000,00	48,29	55,00	505.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			950.000.000,00			380.000.000,00	
Terlindunginya hak-hak pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	52,58	950.000.000,00	50,80	52,58	380.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (%)	77,50		64,38	77,50		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (%)	15,80		22,54	15,80		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (%)	77,50		64,38	77,50		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (%)	52,58		50,80	52,58		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (%)	15,80		22,54	15,80		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (%)	52,58		50,80	52,58		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (%)	77,50		64,38	77,50		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen	16,00		22,54	16,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (%)						
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**23.006.145.635,60**			**25.408.396.808,84**	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			20.198.146.235,60			19.121.249.508,84	
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	77,30	20.198.146.235,60	80,69	77,3	19.121.249.508,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB		BB	BB		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	77,00		76,78	77		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas,	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93,55		88,8	93,55		Dinas Pemberdayaan Perempuan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Efektivitas Kinerja dan Pelayanan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau							Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1.470.000.000,00			4.949.147.900,00	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD (%)	13,05	1.470.000.000,00	12,67	13,05	4.949.147.900,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55,09		52,15	54,50		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			429.171.500,00			429.171.500,00	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	42,31	250.852.100,00	23,04	42,31	429.171.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	97,00	178.319.400,00	100,00	97,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			280.000.000,00			280.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	72,70	280.000.000,00	72,07	72,70	280.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			20.000.000,00			20.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan (%)	60,46	20.000.000,00	0,00	60,46	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			220.000.000,00			220.000.000,00	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA (Persentase)	85,71	220.000.000,00	57,14	85,71	220.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			388.827.900,00			388.827.900,00	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi,	Rasio Kekerasan Anak (Rasio)	5,79	270.507.900,00	4,62	5,79	388.827.900,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak							Pengendalian Penduduk dan KB
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	97,00	118.320.000,00	100,00	97,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**25.630.104.038,65**			**22.088.936.761,93**	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			23.933.801.911,65			21.690.248.823,93	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	83,27	23.933.801.911,65	88,62	83,27	21.690.248.823,93	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A		A	A		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,00		85,20	86,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN			1.003.903.752,00			283.687.938,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	90,18	1.003.903.752,00	92,46	90,18	283.687.938,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			292.398.375,00			60.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	≥ 10	292.398.375,00	7,50	≥ 10	60.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			400.000.000,00			55.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	85,00	400.000.000,00	98,84	85,00	55.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			**1.100.000.000,00**			**1.100.000.000,00**	
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			1.100.000.000,00			1.000.000.000,00	
Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase luas lahan yang di bebaskan untuk kepentingan umum (%)	20,53	1.100.000.000,00	10,00	20,53	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau (%)	25,00	0,00	0,00	25,00	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			**36.156.414.207,33**			**33.376.291.503,53**	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			35.009.114.207,33			32.631.291.503,53	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	34.734.114.207,33	BB	BB	32.631.291.503,53	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	80,47		79,96	80,47		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,65		84,25	84,65		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,65	275.000.000,00	76,92	84,65		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			140.000.000,00			80.000.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	100,00	140.000.000,00	100,00	100,00	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			495.000.000,00			360.000.000,00	
Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	6,30	495.000.000,00	4,23	6,30	360.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa (%)	60,00		46,67	60,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			85.000.000,00			35.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ((%))	0,51	85.000.000,00	N/A	0,52	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			50.000.000,00			45.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3 (%)	57,14	50.000.000,00	100	57,14	45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN			85.000.000,00			60.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi lingkungan kepada unit usaha (%)	32,93	85.000.000,00	N/A	32,93	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			45.000.000,00			25.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitasnya Bidang Lingkungan Hidup (%)	6,64	45.000.000,00	N/A	6,64	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			50.000.000,00			25.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	Persentase Lembaga Masyarakat atau Dunia Usaha Yang dinilai kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	68,09	50.000.000,00	N/A	68,09	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			87.300.000,00			25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (%)	14,63	87.300.000,00	19,51	14,63	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			110.000.000,00			90.000.000,00	
Meningkatnya tata Kelola Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)) (%)	19,80	110.000.000,00	16,95	19,80	90.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	86,50		65,40	86,50		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**1.070.000.000,00**			**305.000.000,00**	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			465.000.000,00			155.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	99,78	465.000.000,00	68,98	67	155.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan KTP-el (%)	64,00		98,93	99,5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL			300.000.000,00			35.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	100,00	300.000.000,00	100,00	100,00	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	100,00		100,00	100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			295.000.000,00			105.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi (%)	40,91	295.000.000,00	45,45	40	105.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			10.000.000,00			10.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun (%)	100,00	10.000.000,00	100,00	100,00	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**15.678.322.340,87**			**15.199.604.667,25**	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.398.322.340,87			13.003.104.667,25	
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,15	13.398.322.340,87	86	87,5	13.003.104.667,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	93,00		80,46	81,5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB		BB	BB		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA			120.000.000,00			90.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan Desanya sesuai standar (Desa)	15,00	120.000.000,00	10	15	90.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			195.000.000,00			160.000.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Desa Yang Difasilitasi Kerjasamanya (%)	54,18	195.000.000,00	50,55	54,18	160.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			435.000.000,00			550.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	51,03	435.000.000,00	39,82	51,03	550.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1.530.000.000,00			1.396.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Pesentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Yang Sudah Dibina (%)	16,55	1.530.000.000,00	5,72	16,55	1.396.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**810.000.000,00**			**610.000.000,00**	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			50.000.000,00			50.000.000,00	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	70,00	50.000.000,00	68,70	70,00	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19) (%)	10,20		12,50	10,20		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			160.000.000,00			160.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10,75	160.000.000,00	16,40	10,75	160.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Keluarga Berencana (KB)							
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	84,19		78,60	84,19		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	59,70		55,80	59,70		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			600.000.000,00			400.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) (Indeks)	69,00	600.000.000,00	75,60	69,00	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	36,11		36,12	36,11		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**36.575.042.930,42**			**30.691.463.840,89**	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			20.925.042.930,42			20.676.463.840,89	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	20.925.042.930,42	BB	BB	20.676.463.840,89	Dinas Perhubungan
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	82,00		81,00	82,00		Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,99		78,00	80,99		Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,99		78,00	80,99		Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,99		78,00	80,99		Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,99		78,00	80,99		Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,99		78,00	80,99		Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,99		78,00	80,99		Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			1.375.000.000,00			2.800.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Peningkatan Ketersedian Perlengkapan Jalan (%)	69,40	1.375.000.000,00	58,85	64,29	2.800.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			14.275.000.000,00			7.215.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	56,00	14.275.000.000,00	52,50	56,00	7.215.000.000,00	Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	88,46		84,62	88,46		Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	56,00		52,50	56,00		Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	88,46		84,62	88,46		Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	56,00		52,50	56,00		Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	88,46		84,62	88,46		Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	56,00		52,50	56,00		Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	88,46		84,62	88,46		Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	56,00		52,50	56,00		Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	88,46		84,62	88,46		Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	56,00		52,50	56,00		Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	88,46		84,62	88,46		Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**29.272.572.944,00**			**25.960.374.110,00**	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			17.146.201.858,00			18.348.374.110,00	
Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Urusan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	17.146.201.858,00	BB	BB	18.348.374.110,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian							
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	77,00		78,96	77,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,00		82,75	83,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			6.899.825.344,00			4.262.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (Indeks)	73,00	6.899.825.344,00	76,23	73,00	4.262.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Keterbukaan informasi Publik (Nilai)	75,00		97,25	75,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			5.226.545.742,00			3.350.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	6,90	5.226.545.742,00	6,80*	6,90	3.350.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			**33.186.716.576,52**			**43.015.059.006,00**	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.710.349.558,52			13.710.349.559,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	13.710.349.558,52	BB	BB	13.710.349.559,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM							
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	81,48		82,03	81,84		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,42		82,22	83,42		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			120.000.000,00			250.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	19,30	120.000.000,00	33,33	19,3	250.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			120.000.000,00			120.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diawasi (%)	6,20	120.000.000,00	5,67	6,2	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			60.000.000,00			60.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya (%)	9,58	60.000.000,00	7,1	9,58	60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			120.000.000,00			720.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (%)	32,22	120.000.000,00	79,4	32,22	720.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN			670.000.000,00			670.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PERLINDUNGAN KOPERASI							
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (%)	42,64	670.000.000,00	69,72	42,64	670.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			12.181.245.000,00			14.005.000.000,00	
Meningkatnya Produktivitas UMKM	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,89	12.181.245.000,00	4,01	3,89	14.005.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	15,35		16,05	15,35		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			6.205.122.018,00			13.479.709.447,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (%)	35,49	6.205.122.018,00	86,33	35,49	13.479.709.447,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**18.133.226.623,00**			**16.316.594.235,65**	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16.188.226.623,00			15.308.594.235,65	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	16.188.226.623,00	A	BB	15.308.594.235,65	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	86,69		86,36	86,69		Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	4,26		3,48	3,52		Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN			250.000.000,00			244.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
IKLIM PENANAMAN MODAL							
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal (%)	16,00	250.000.000,00	16	16	244.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			560.000.000,00			205.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti (%)	16,00	560.000.000,00	16	16	205.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			625.000.000,00			310.000.000,00	
Meningkatnya Perizinan berusaha Berbasis Risiko	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai SOP (%)	16,00	625.000.000,00	16	16	310.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			360.000.000,00			195.000.000,00	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (%)	16,00	360.000.000,00	16	16	195.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			150.000.000,00			54.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (Dokumen)	16,00	150.000.000,00	16	16	54.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			**36.845.518.709,00**			**28.426.402.637,56**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16.087.392.709,00			15.346.402.637,56	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan di Bidang Olahraga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	16.087.392.709,00	BB	BB	15.346.402.637,56	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	78,00		73,32	78		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,00		90,69	85		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			6.650.000.000,00			1.010.000.000,00	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio)	2,31	6.650.000.000,00	1,47	2,31	1.010.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi (%)	0,24		0,21	0,24		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			13.108.126.000,00			10.970.000.000,00	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional (%)	0,90	13.108.126.000,00	0,87	0,76	8.670.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	9,49		4,2	7,98	2.300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			1.000.000.000,00			1.100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Kwartir terfasilitasi Pengembangan Kepramukaan (%)	21,68	1.000.000.000,00	14,85	21,68	1.100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			**525.000.000,00**			**175.000.000,00**	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			525.000.000,00			175.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,85	525.000.000,00	2,61*	2,85	175.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**510.000.000,00**			**150.000.000,00**	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			510.000.000,00			150.000.000,00	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	50,00	510.000.000,00	55	50,00	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**18.512.121.289,00**			**16.666.093.789,00**	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			15.092.121.289,00			12.128.593.789,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kinerja dan Efisiensi Aparatur Dinas Kebudayaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	15.092.121.289,00	BB	BB	12.128.593.789,00	Dinas Kebudayaan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	87,00		86,36	87,00		Dinas Kebudayaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,30		85,58	88,30		Dinas Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1.810.000.000,00			1.050.000.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	30,34	1.810.000.000,00	32,59	30,34	1.050.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%)	1,77		1,71	1,77		Dinas Kebudayaan
	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	8,03		7,3	8,03		Dinas Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			875.000.000,00			1.882.500.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (%)	0,21	875.000.000,00	0,18	0,21	1.882.500.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			250.000.000,00			155.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Persentase Tingkat kompetensi SDM Sejarah (%)	26,67	250.000.000,00	0	26,67	155.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase Tingkat kesadaran Pelajar se-Tingkat SLTA/sederajat tentang sejarah lokal ()	0,88		0	0,88		Dinas Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			335.000.000,00			400.000.000,00	
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	9,72	335.000.000,00	10,76	9,72	400.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	53,08		43,65	53,03		Dinas Kebudayaan
	Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau Cagar budaya yang telah Ditetapkan (%)	18,61		18,33	18,61		Dinas Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			150.000.000,00			1.050.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun (%)	14,92	150.000.000,00	12,1	14,92	1.050.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			**23.464.272.684,98**			**23.214.120.237,50**	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			21.314.847.630,98			21.703.380.337,50	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	21.314.847.630,98	BB	BB	21.703.380.337,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	78,46		84,00	78,46		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,45		88,30	88,45		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81,50		81,05	81,50		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			1.879.425.054,00			1.295.739.900,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	76,69	1.879.425.054,00	59,33	60,52	1.295.739.900,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan (Orang)	50.900,00		47.575,00	50.900,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Jumlah Kunjungan Pemustaka ke UPT Perpustakaan M. Sani Batam (Orang)	4.304,00		6.109,00	4.304,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			270.000.000,00			215.000.000,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	16,00	270.000.000,00	12,00	16,00	215.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			**929.705.000,00**			**270.000.000,00**	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			650.000.000,00			255.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009) (%)	28,18	650.000.000,00	22,68	28,18	255.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			279.705.000,00			15.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	21,67	279.705.000,00	0	21,67	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			**68.634.691.002,36**			**64.268.225.198,72**	64.268.225.198,72
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			41.848.830.987,36			41.150.000.988,72	
Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	41.848.830.987,36	BB	BB	41.150.000.988,72	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	80,84		85,53	80,84		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,85		87,23	85,85		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,00		87,23	80,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,00		87,23	80,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,00		87,23	80,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,00		87,23	80,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,00		87,23	80,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,00		87,23	80,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,00		87,23	80,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,00		87,23	80,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,00		87,23	80,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			1.000.000.000,00			395.000.000,00	
Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	94,00	1.000.000.000,00	87,81	94	395.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	92,00		87,81	92,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	92,00		87,81	92,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	92,00		87,81	92,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	92,00		87,81	92,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	92,00		87,81	92,00		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			14.831.904.651,00			14.752.262.770,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	317.179,36	14.831.904.651,00	316.749,93	317.179,36	14.752.262.770,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	317.179,36		316.749,93	317.179,36		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	317.179,36		316.749,93	317.179,36		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	317.179,36		316.749,93	317.179,36		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	317.179,36		316.749,93	317.179,36		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	317.179,36		316.749,93	317.179,36		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	317.179,36		316.749,93	317.179,36		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			8.243.395.364,00			6.754.961.440,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	45.289,06	8.243.395.364,00	40.656,10	45.289,06	6.754.961.440,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	45.289,06		40.656,10	45.289,06		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	45.289,06		40.656,10	45.289,06		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	45.289,06		40.656,10	45.289,06		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	45.289,06		40.656,10	45.289,06		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	45.289,06		40.656,10	45.289,06		Dinas Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	45.289,06		40.656,10	45.289,06		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.569.560.000,00			511.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	90,00	1.569.560.000,00	99,5	90	511.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	90,00		99,5	90		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	90,00		99,5	90		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	90,00		99,5	90		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	90,00		99,5	90		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	90,00		99,5	90		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			1.141.000.000,00			705.000.000,00	
Meningkatnya produksi Olahan Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	42,13	1.141.000.000,00	69,64	42.13	705.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	13.600,00		19.592,02	13.600		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	13.600,00		19.592,02	13.600		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			**25.555.446.601,94**			**20.818.771.393,00**	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN			15.555.446.601,94			14.083.771.393,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	15.555.446.601,94	BB	BB	14.083.771.393,00	Dinas Pariwisata
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83,58		81,05	81,08		Dinas Pariwisata
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,00		93,63	89,00		Dinas Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			1.150.000.000,00			600.000.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	2,00	1.150.000.000,00	2,02	2,00	600.000.000,00	Dinas Pariwisata
	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,75		1,77	1,75		Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			4.935.000.000,00			4.835.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	2.947,40	4.935.000.000,00	2.027,00	2.452,70	4.835.000.000,00	Dinas Pariwisata
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	3.525.750,00		4.294.670,00	3.525.750,00		Dinas Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			2.100.000.000,00			500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	8,42	2.100.000.000,00	4,69	8,42	500.000.000,00	Dinas Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			1.815.000.000,00			800.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	13,61	1.815.000.000,00	10,11	13,61	800.000.000,00	Dinas Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			**7.004.351.638,00**			**4.301.275.936,00**	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.708.000.000,00			280.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	22.783,17	1.708.000.000,00	19.364,33	22.783,17	280.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	29.058,14		38.577,48	29.058,14		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	31.532,60		27.613,37	31.532,60		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Produksi Ternak (Ton)	19.464,84		26.874,63	19.464,84		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			1.676.414.938,00			1.553.646.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan (Hektar)	82,00	1.676.414.938,00	292,75	82	1.553.646.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.189.936.700,00			220.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan menular strategis (PHMS) (%)	66,00	1.189.936.700,00	78,88	66	220.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			200.000.000,00			70.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (%)	45,00	200.000.000,00	48,98	45	70.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian (%)	74,80		100	74,8		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2.230.000.000,00			2.177.629.936,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	56,00	2.230.000.000,00	52	56	2.177.629.936,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			**3.401.700.000,00**			**1.300.000.000,00**	
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN			1.229.000.000,00			645.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,63	1.229.000.000,00	84,50	84,63	645.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,65		89,25	84,65		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,64		86,67	84,64		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,64		86,67	84,64		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,64		88,23	84,64		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,64		85,00	84,64		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			1.807.700.000,00			530.000.000,00	
Menurunnya Kerusakan hutan	Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan (%)	100,00	1.807.700.000,00	100,00	100,00	530.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	25,50		22,51	25,50		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	29,00		19,41	29,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	19,00		14,25	19,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	26,24		33,01	26,24		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	23,33		14,17	23,33		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	31,75		31,10	31,75		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			80.000.000,00			40.000.000,00	
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Persentase kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terkelola dengan baik (%)	100,00	80.000.000,00	N/A	100	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			175.000.000,00			35.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Kehutanan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan (SBM/Milyar Rupiah)	1,19	175.000.000,00	1,19	1,19	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			110.000.000,00			50.000.000,00	
Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Riau Yang Terkelola dengan baik (%)	2,56	110.000.000,00	N/A	2,56	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			**22.282.561.315,00**			**18.001.316.277,29**	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN			14.370.100.000,00			13.561.316.277,29	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	14.370.100.000,00	BB	BB	13.561.316.277,29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	88,20		85,00	88,20		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,75		91,84	87,75		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			1.096.830.000,00			250.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan (%)	68,18	1.096.830.000,00	18,18	40,91	250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			1.400.000.000,00			750.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik (%)	62,00	1.400.000.000,00	65,00	62,00	750.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			2.442.420.979,00			2.160.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	17,10	2.442.420.979,00	15,90	17,10	2.160.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Intensitas energi primer (SBM/Milyar Rupiah)	135,20		152,62	135,20		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			2.973.210.336,00			1.280.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	99,30	2.973.210.336,00	99,45	99,30	1.280.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**23.173.786.431,00**			**17.184.551.860,83**	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16.473.786.431,00			16.214.551.860,83	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	86,85	16.473.786.431,00	84,88	86,85	16.214.551.860,83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,02		89,26	87,02		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB		BB	BB		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			300.000.000,00			50.000.000,00	
Meningkatnya Kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi (%)	100,00	300.000.000,00	0	100,00	50.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			300.000.000,00			100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri (%)	2,24	300.000.000,00	2,01	2,24	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			2.400.000.000,00			100.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)	5,62	2.400.000.000,00	10,21	5,62	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			1.000.000.000,00			150.000.000,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Fasilitasi Pengembangan Ekspor (%)	100,00	1.000.000.000,00	100	100	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			1.800.000.000,00			520.000.000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks Tertib Niaga (Indeks)	61-80	1.800.000.000,00	71,19	61-80	520.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			900.000.000,00			50.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi (%)	40,00	900.000.000,00	35	40	50.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			**4.100.000.000,00**			**2.515.000.000,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			3.500.000.000,00			2.415.000.000,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	7,00	3.500.000.000,00	72,98	7	2.415.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	3,03		6,82	3,03		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			400.000.000,00			50.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan (%)	2,95	400.000.000,00	0,2	2,95	50.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			200.000.000,00			50.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif (Dokumen)	1,00	200.000.000,00	1	1	50.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			**645.000.000,00**			**65.000.000,00**	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			470.000.000,00			55.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase bidang ahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi (%)	45,90	470.000.000,00	33,30	50,50	55.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			175.000.000,00			10.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan (%)	31,25	175.000.000,00	0,00	12,50	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			**269.712.880.283,00**			**253.074.094.990,95**	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			202.534.274.961,00			204.390.815.700,95	
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	75,00	186.895.411.303,00	86,07	75,00	191.022.925.038,95	Biro Umum
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A		A	A		Biro Umum
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,50		85,32	85,50		Biro Umum
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	1.700.000.000,00	A	A	1.500.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	75,00		86,07	75,00		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,50		85,32	85,50		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	2.098.000.000,00	A	A	1.755.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	75,00		86,07	79,00		Biro Perekonomian dan Pembangunan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,50		85,32	85,50		Biro Perekonomian dan Pembangunan
Meningkatnya akuntabilitas, efektifitas kinerja dan pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	1.000.000.000,00	A	A	1.000.000.000,00	Biro Organisasi
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	75,00		71,00	75,00		Biro Organisasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,50		84,90	85,50		Biro Organisasi
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	75,00	1.371.468.078,00	72,00	75,00	1.362.890.662,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A		A	A		Biro Kesejahteraan Rakyat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,50		86,08	85,50		Biro Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	1.000.000.000,00	A	A	1.000.000.000,00	Biro Hukum
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	75,00		86	75,00		Biro Hukum
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,50		85	85,50		Biro Hukum
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulaun Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	1.825.000.000,00	A	A	1.050.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	75,00		86,07	79,00		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,50		85,32	85,50		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	6.644.395.580,00	A	A	5.700.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	75,00		85.72	75,00		Biro Administrasi Pimpinan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,50		83.68	85.5		Biro Administrasi Pimpinan
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			1.500.000.000,00			750.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)	2,18	1.500.000.000,00	2,17	2,18	750.000.000,00	Biro Organisasi
	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)	41,60		39,20	41,60		Biro Organisasi
	Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)	88,37		79,07	88,37		Biro Organisasi
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)	12,02		11,89	12,02		Biro Organisasi
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			1.500.000.000,00			500.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor LPPD (Skor)	2,59	1.500.000.000,00	2,87*	2,59	500.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan (Persentase)	88,00		0,85	0,88		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			60.901.605.322,00			45.738.279.290,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	91,50	60.901.605.322,00	94,80	91,00	45.738.279.290,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			1.500.000.000,00			500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan (Persentase)	97,00	1.500.000.000,00	100,00	100,00	500.000.000,00	Biro Hukum
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			780.000.000,00			585.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan (Persentase)	100,00	780.000.000,00	100,00	100,00	585.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			675.000.000,00			450.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Predikat)	Sangat Baik	675.000.000,00	Sangat Baik	Sangat Baik	450.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			322.000.000,00			160.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan (Persentase)	100,00	322.000.000,00	100,00	100,00	160.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4.02 - SEKRETARIAT DPRD			**128.241.334.861,00**			**105.784.304.270,14**	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			77.932.172.044,00			71.556.184.270,14	
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	77.932.172.044,00	BB	BB	71.556.184.270,14	Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,00		79,5	80		Sekretariat DPRD
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	84,00		83,14	84		Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			50.309.162.817,00			34.228.120.000,00	
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100,00	50.309.162.817,00	100,00	100,00	34.228.120.000,00	Sekretariat DPRD
	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) (Persentase)	100,00		100,00	100,00		Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100,00		100,00	100,00		Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN			**35.457.153.370,94**			**28.237.626.807,41**	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			28.672.435.716,14			25.567.626.807,41	
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	28.672.435.716,14	A	A	25.567.626.807,41	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,50		91,25	91,5		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	79,48		82,94	79,48		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.177.327.000,00			1.410.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Program RPJMD (Predikat)	-	3.177.327.000,00			1.410.000.000,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kab/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi (%)	0,00					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (%)	80,00		79,23	80		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD (%)	75,51		95,35	75,51		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Menejemen Risiko (%)	11,90		N/A	11,9		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			3.607.390.654,80			1.260.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Pemerintaan dan Pembangunan Manusia (%)	0,00	3.607.390.654,80	76,19	85,71	1.260.000.000,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	0,00					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	85,71					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Nilai)	47,44		47,97	47,44		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	81,93		72,29	81,93		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	70,59		22	70,59		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	0,00					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	0,00					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	100,00		100	100		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Nilai)	48,33		48,08	48,33		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	20,34		18,64	20,34		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	30,00		20	30		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	0,00					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	0,00					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100,00		100	100		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Nilai)	46,50		46,89	46,5		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra	52,00		52	52		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)						
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	100,00		86	100		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5.02 - KEUANGAN			**724.835.470.443,53**			**704.035.292.515,64**	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			137.110.679.791,53			133.072.401.863,64	
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	43.417.807.066,88	BB	BB	38.855.087.734,58	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83,51		82,10	82,30		Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,50		89,05	89,50		Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,50		89,05	89,50		Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,50		89,05	89,50		Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	93.692.872.724,65	BB	BB	94.217.314.129,06	Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,00		91,81	86		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD (%)	13,10		17,48	13,1		Badan Pendapatan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	77,23		84,52	77,23		Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,85		88,80	88,15		Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	97,58		91,15	89,62		Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,73		92,46	88,70		Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	97,19		97,23	90,20		Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,26		86,19	85,15		Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,24		87,66	86,10		Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,06		87,07	82,95		Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,36		94,83	87,88		Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	94,38		98,62	90,65		Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,80		95,34	83,12		Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			570.384.790.652,00			564.946.290.652,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu (%)	100,00	570.384.790.652,00	100,00	100,00	564.946.290.652,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan	100,00		100,00	100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu (%)						
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	92,22		93,89	92,22		Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100,00		100,00	100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100,00		100,00	100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			2.340.000.000,00			1.295.600.000,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	3,00	2.340.000.000,00	2,78	1,5	1.295.600.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			15.000.000.000,00			4.721.000.000,00	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100,00	15.000.000.000,00	100,00	100,00	4.721.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	1,44		-18,59	-0,82		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital (%)	50,00		25,00	50,00		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih (%)	28,00		28,00	28,00		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	1,87		-35,97	-3,34		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	1,81		-43,40	0,59		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	1,86		-40,97	1		Badan Pendapatan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	1,82		-39,71	0,69		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	1,83		-38,72	0,67		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	1,83		-44,21	0,67		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	1,89		-64,80	0,76		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	1,71		-25,09	0,06		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	1,73		-30,25	0,09		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	1,73		-29,48	0,09		Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN			**28.924.689.768,89**			**22.666.735.511,83**	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			25.849.689.768,89			20.016.035.511,83	
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	25.849.689.768,89	A	A	20.016.035.511,83	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	81,94		87,65	87,70		Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,82		86,53	86,55		Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	82,07		84,50	84,55		Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	82,83		84,71	84,80		Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			3.075.000.000,00			2.650.700.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit (Nilai)	39,00	3.075.000.000,00	40,00	40,00	2.650.700.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit (Nilai)	25,50		40,00	40,00		Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	98,60		99,80	99,81		Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat (%)	99,70		99,89	99,90		Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	Persentase ASN yang dibina Karirnya (%)	5,46		5,23	5,46		Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	Persentase ASN yang dinilai kompetensi manajerial dan sosial kultural (%)	22,18		27,44	35,00		Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**20.148.967.766,12**			**15.772.116.876,84**	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.318.153.067,12			12.072.116.876,84	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan bidang urusan pendidikan dan pelatihan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	13.318.153.067,12	BB	BB	12.072.116.876,84	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	86,18		88,33	86,18		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,17		91,09	91,17		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			6.830.814.699,00			3.700.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	54,69	6.830.814.699,00	27,81	54,69	3.700.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	50,23		42,39	50,23		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	42,50		22,00	42,50		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	39,07		54,26	39,07		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			**1.350.000.000,00**			**330.000.000,00**	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.200.000.000,00			240.000.000,00	
Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)	-	1.200.000.000,00			240.000.000,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan (%)	85,00		75,00	85,00		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Inovasi yang dilaporkan (%)	80,00		70,00	60,00		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan (Karya)	20,00		20,00	20,00		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			150.000.000,00			90.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan (%)	0,00	150.000.000,00			90.000.000,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan (%)	100,00			100,00		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN			**10.200.979.516,00**			**7.490.849.649,50**	
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.752.979.516,00			6.490.849.649,50	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	9.752.979.516,00	BB	B	6.490.849.649,50	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83,50		83,16	83,50		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	82,50		86,91	82,50		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			448.000.000,00			1.000.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (%)	55,00	448.000.000,00	45,24	55,00	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	43,14		37,03	43,14		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (%)	37,93		29,73	37,93		Badan Pengelola Perbatasan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG			**20.988.274.792,00**			**14.558.454.613,50**	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16.075.135.615,00			12.533.468.848,40	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Bidang Penghubung	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	16.075.135.615,00	B	B (69)	12.533.468.848,40	Badan Penghubung Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	65,04		87	55,12		Badan Penghubung Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,40		89,03	89,40		Badan Penghubung Daerah
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			4.913.139.177,00			2.024.985.765,10	
Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani (%)	100,00	4.913.139.177,00	100,00	100,00	2.024.985.765,10	Badan Penghubung Daerah
	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau (%)	100,00		100,00	100,00		Badan Penghubung Daerah
	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah (%)	100,00		100,00	100,00		Badan Penghubung Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH			**55.195.249.127,00**			**58.333.299.345,32**	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			43.929.849.911,00			46.414.350.129,32	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	43.929.849.911,00	A	A	46.414.350.129,32	Inspektorat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,03		88,09	89,03		Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	85,88		85,65	85,88		Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			7.379.144.000,00			7.813.380.000,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas (%)	91,17	7.379.144.000,00	85,29	91,17	7.813.380.000,00	Inspektorat Daerah
	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (%)	100,00		100,00	100,00		Inspektorat Daerah
	Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah (%)	100,00		100,00	100,00		Inspektorat Daerah
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota (%)	100,00		42,86	100,00		Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			3.886.255.216,00			4.105.569.216,00	
Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI (Perangkat Daerah)	1,00	3.886.255.216,00	1,00	1,00	4.105.569.216,00	Inspektorat Daerah
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang dihasilkan (Rekomendasi)	5,00		3,00	5,00		Inspektorat Daerah
	perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK (Perangkat Daerah)	12,00		12,00	12,00		Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi SPIP (Perangkat Daerah)	34,00		34,00	34,00		Inspektorat Daerah
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**50.125.777.184,00**			**40.617.775.807,33**	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			18.092.752.546,00			11.112.265.419,33	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	18.092.752.546,00	BB	BB	11.112.265.419,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,57		88,63	88,57		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	85,73		86,47	85,73		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			3.249.079.448,00			1.709.200.123,00	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100,00	3.249.079.448,00	100	100	1.709.200.123,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	0,002		0,001040434	0,002		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN			6.314.166.997,00			5.406.815.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	44,44	6.314.166.997,00	33,33	44,44	5.406.815.700,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			1.971.554.093,00			3.565.000.000,00	
Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (%)	85,15	1.971.554.093,00	80,00	85,15	3.565.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			1.663.205.517,00			1.125.000.000,00	
Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100,00	1.663.205.517,00	100	100	1.125.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI			18.835.018.583,00			17.699.494.565,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2027	PAGU		TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani (%)	100,00	18.835.018.583,00	100	100	17.699.494.565,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN			**3.824.461.110.516,51**			**3.457.274.819.960,50**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan						**988.437.898.385,50**							**1.122.645.351.079,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**988.437.898.385,50**							**1.122.645.351.079,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**988.437.898.385,50**							**1.122.645.351.079,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**670.817.990.346,98**							**685.100.624.331,00**	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan						***669.281.990.346,98***							***676.088.176.331,00***	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.48 Indeks		80.46 Indeks	80.47 Indeks	669.281.990.346,98						80.47 Indeks	676.088.176.331,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks		87 Indeks	88 Indeks	669.281.990.346,98						89 Indeks	676.088.176.331,00	
			3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	669.281.990.346,98						BB Predikat	676.088.176.331,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan		225.000.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan , Penganggaran Dan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau						20.000.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00						4 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						660.002.487.816,98					Aparatur Dinas Pendidikan		662.336.326.301,00	
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Administrasi melaksanakan Tugas						660.002.487.816,98					Aparatur Dinas Pendidikan		662.336.326.301,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.962.928.000,00						12 Dokumen	3.962.928.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5911 Orang/ Bulan		4863 Orang/ Bulan	5106 Orang/ Bulan	656.029.559.816,98						5361 Orang/ Bulan	658.273.398.301,00	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						656.029.559.816,98							658.273.398.301,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5911 Orang/ Bulan		4863 Orang/ Bulan	4776 Orang/ Bulan	656.029.559.816,98	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5361 Orang/ Bulan	658.273.398.301,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						3.962.928.000,00							3.962.928.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.962.928.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Dokumen	3.962.928.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						5.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						30.000.000,00					Dinas Pendidikan		300.000.000,00	
		Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan						30.000.000,00					Dinas Pendidikan		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.112.140.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan		703.088.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan						1.112.140.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan		703.088.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	112.140.000,00						4 Dokumen	303.088.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	200.000.000,00						25 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		25 Orang	25 Orang	50.000.000,00						25 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	725.000.000,00						1 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		5 Orang	5 Orang	25.000.000,00						5 Orang	50.000.000,00	
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						700.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		1 Paket	86 Paket	700.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		25 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						200.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		25 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						419.000.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan		4.650.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Pendidikan						419.000.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan		4.650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.500.000,00						6 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00						Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00						4 Laporan	475.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	255.000.000,00						12 Laporan	1.100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	12 Paket	12.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	12 Paket	1.000.000,00						12 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	8.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	44.000.000,00						12 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	36.000.000,00						12 Paket	950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	18.500.000,00						12 Paket	525.000.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	5 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.500.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	2 Paket	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						500.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	5 Paket	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	5 Paket	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						2.500.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		6 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		6 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						500.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	2 Paket	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.500.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						100.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					Dinas Pendidikan		2.525.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					Dinas Pendidikan		2.525.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	74.000.000,00						2 Paket	825.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	252.000.000,00						2 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.500.000,00						2 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	300.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					Dinas Pendidikan		6.560.360.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					Dinas Pendidikan		6.560.360.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	673.100.000,00						4 Laporan	1.845.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	652.750.000,00						4 Laporan	3.486.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.260.000,00						4 Laporan	1.158.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.500.000,00						4 Laporan	70.000.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						586.750.000,00							3.276.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	586.750.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	3.276.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					Dinas Pendidikan		1.336.302.530,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					Dinas Pendidikan		1.336.302.530,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.500.000,00						1 Unit	325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	514.302.530,00						15 Unit	567.552.530,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	104.500.000,00						1 Unit	243.750.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						486.302.530,00							486.302.530,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	486.302.530,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		15 Unit	486.302.530,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						6.606.950.000,00					Dinas Pendidikan		6.464.547.500,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						6.606.950.000,00					Dinas Pendidikan		6.464.547.500,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5 Unit Kerja		5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	6.606.950.000,00						5 Unit Kerja	6.464.547.500,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						6.606.950.000,00							6.464.547.500,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5 Unit Kerja		5 Unit Kerja	15 Unit Kerja	6.606.950.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit Kerja	6.464.547.500,00	Dinas Pendidikan
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**318.954.408.038,52**							**452.907.174.748,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***313.287.408.038,52***							***382.682.174.748,00***	
			1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	100 %		100 %	100 %	313.287.408.038,52						100 %	382.682.174.748,00	
			2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	100 %		100 %	100 %	313.287.408.038,52						100 %	382.682.174.748,00	
			3.Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	90.94 %		88.94 %	89.44 %	313.287.408.038,52						89.94 %	382.682.174.748,00	
			4.Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB	0,008 %		0,012 %	0,011 %	313.287.408.038,52						0,01 %	382.682.174.748,00	
			5.Rasio peserta didik per kelas	36 Rasio		36 Rasio	36 Rasio	313.287.408.038,52						36 Rasio	382.682.174.748,00	
			6.Persentase Konten Pendidikan	45 %		25 %	30 %	313.287.408.038,52						35 %	382.682.174.748,00	
			7.Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa	66,38 Nilai		65,46 Nilai	65,69 Nilai	313.287.408.038,52						65,92 Nilai	382.682.174.748,00	
			8.Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa	65,99 Nilai		61,87 Nilai	62,90 Nilai	313.287.408.038,52						63,93 Nilai	382.682.174.748,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						172.964.148.090,00					Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan		225.654.885.423,28	
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA						172.964.148.090,00					Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan		225.654.885.423,28	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	891.952.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000 Buku		Buku	1000 Buku	75.000.000,00						1000 Buku	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	6 Unit		1 Unit	5 Unit	25.000.000,00						5 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		1 Unit	5 Unit	35.000.000,00						5 Unit	575.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00						1 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	25.000.000,00						1 Komunitas	50.000.000,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00						1 Ruang	150.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket		2 Paket	6 Paket	750.000.000,00						6 Paket	1.200.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		100 Orang	250 Orang	750.000.000,00						250 Orang	2.500.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	734 Orang		865 Orang	734 Orang	33.587.296.890,00						734 Orang	43.308.843.636,28	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	17190 Paket		23813 Paket	17190 Paket	3.385.000.000,00						17190 Paket	7.293.840.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket		1 Paket	5 Paket	1.960.000.000,00						5 Paket	650.000.000,00	
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		1 Ruang	5 Ruang	25.000.000,00						5 Ruang	750.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang		1 Ruang	5 Ruang	25.000.000,00						5 Ruang	2.250.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2031 Peserta didik		2031 Peserta didik	2031 Peserta didik	6.932.726.200,00						2031 Peserta didik	7.213.851.100,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang		2 Ruang	4 Ruang	25.000.000,00						4 Ruang	1.800.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		4 Ruang	5 Ruang	25.000.000,00						5 Ruang	1.250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		5 Ruang	6 Ruang	825.000.000,00						6 Ruang	4.700.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		5 Ruang	15 Ruang	35.000.000,00						15 Ruang	4.750.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	25.000.000,00						2 Ruang	900.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Ruang		1 Ruang	3 Ruang	500.000.000,00						3 Ruang	1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		1 Ruang	3 Ruang	25.000.000,00						3 Ruang	450.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang		2 Ruang	5 Ruang	25.000.000,00						5 Ruang	750.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		1 Ruang	5 Ruang	25.000.000,00						5 Ruang	750.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		2 Unit	3 Unit	25.000.000,00						3 Unit	1.350.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	3 Unit		2 Unit	2 Unit	25.000.000,00						2 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	5 Unit		1 Unit	5 Unit	200.000.000,00						5 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit		5 Unit	20 Unit	3.810.000.000,00						20 Unit	5.600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	15 Unit		2 Unit	7 Unit	710.000.000,00						7 Unit	1.350.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	93 Satuan Pendidikan		93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	75.000.000,00						93 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00						1 Unit	10.000.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	93 Satuan Pendidikan		93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						93 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	93 Satuan Pendidikan		93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	117.684.125.000,00						93 Satuan Pendidikan	116.921.398.687,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		250 Peserta Didik	500 Peserta Didik	400.000.000,00						500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)						500.000.000,00							10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	10.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						25.000.000,00							1.800.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Ruang	1.800.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						25.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Ruang	750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						25.000.000,00							2.250.000.000,00	
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Ruang	2.250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						500.000.000,00							1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Ruang	1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						3.800.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit		5 Unit	17 Unit	3.800.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		20 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir						25.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	6 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah						25.000.000,00							375.000.000,00	
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	375.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						25.000.000,00							3.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		5 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		15 Ruang	3.750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						25.000.000,00							1.250.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		4 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Ruang	1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						25.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Ruang	750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						25.000.000,00							750.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Ruang	750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						25.000.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Ruang	450.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah						750.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket		2 Paket	3 Paket	750.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		6 Paket	1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						1.950.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket		1 Paket	88 Paket	1.950.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Paket	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						3.375.000.000,00							7.143.840.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	17190 Paket		23813 Paket	3000 Paket	3.375.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		17190 Paket	7.143.840.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah						200.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	5 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						50.000.000,00							891.952.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	891.952.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						6.932.726.200,00							7.213.851.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2031 Peserta didik		2031 Peserta didik	2031 Peserta didik	6.932.726.200,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2031 Peserta didik	7.213.851.100,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						400.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		250 Peserta Didik	150 Peserta Didik	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						33.587.296.890,00							43.308.843.636,28	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	734 Orang		865 Orang	789 Orang	33.587.296.890,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		734 Orang	43.308.843.636,28	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						750.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		100 Orang	100 Orang	750.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		250 Orang	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						100.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	93 Satuan Pendidikan		93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		93 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						117.684.125.000,00							116.921.398.687,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	93 Satuan Pendidikan		93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	117.684.125.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		93 Satuan Pendidikan	116.921.398.687,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Komunitas	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Kegiatan	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						75.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000 Buku		Buku	100 Buku	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1000 Buku	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						25.000.000,00							1.350.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		2 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Unit	1.350.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						700.000.000,00							1.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	15 Unit		2 Unit	2 Unit	700.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		7 Unit	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium						25.000.000,00							900.000.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Ruang	900.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						25.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru						800.000.000,00							2.700.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		5 Ruang	2 Ruang	800.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		6 Ruang	2.700.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						25.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	3 Unit		2 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	300.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Orang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						75.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	93 Satuan Pendidikan		93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		93 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						128.752.528.416,52					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		187.600.514.991,97	
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK						128.752.528.416,52					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		187.600.514.991,97	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket		10 Paket	20 Paket	10.001.000.000,00						20 Paket	30.200.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000 Buku		Buku	1000 Buku	50.000.000,00						1000 Buku	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		1 Unit	5 Unit	15.000.000,00						5 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00						1 Kegiatan	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	25.000.000,00						1 Komunitas	150.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket		2 Paket	5 Paket	502.973.800,00						5 Paket	1.000.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		25 Orang	100 Orang	100.000.000,00						100 Orang	1.500.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	734 Orang		12977 Orang	734 Orang	21.132.449.940,00						734 Orang	26.795.426.081,97	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	17713 Paket		16713 Paket	17713 Paket	1.130.000.000,00						17713 Paket	5.304.020.000,00	
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	2 Paket	905.000.000,00						2 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00						1 Ruang	450.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00						1 Ruang	75.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00						50 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1466 Peserta didik		5480 Peserta didik	1466 Peserta didik	6.461.200.000,00						1466 Peserta didik	7.662.600.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang		2 Ruang	3 Ruang	15.000.000,00						3 Ruang	1.350.000.000,00	
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		1 Ruang	5 Ruang	15.000.000,00						5 Ruang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		5 Ruang	6 Ruang	670.947.470,00						6 Ruang	4.700.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	30.000.000,00						1 Ruang	350.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang		1 Ruang	3 Ruang	15.000.000,00						3 Ruang	1.500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		1 Ruang	5 Ruang	15.000.000,00						5 Ruang	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		1 Ruang	5 Ruang	15.000.000,00						5 Ruang	750.000.000,00	
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	7 Ruang		2 Ruang	3 Ruang	15.000.000,00						3 Ruang	1.950.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang		1 Ruang	2 Ruang	15.000.000,00						2 Ruang	500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.000.000.000,00						1 Ruang	150.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang		1 Ruang	3 Ruang	15.000.000,00						3 Ruang	750.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		1 Ruang	5 Ruang	15.000.000,00						5 Ruang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	5 Unit		1 Unit	5 Unit	25.000.000,00						5 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit		3 Unit	5 Unit	1.910.000.000,00						5 Unit	1.400.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Unit		1 Unit	5 Unit	701.000.000,00						5 Unit	950.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	37 Satuan Pendidikan		37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	75.000.000,00						37 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		2 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	10.000.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	37 Satuan Pendidikan		37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						37 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	37 Satuan Pendidikan		37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	82.767.957.206,52						37 Satuan Pendidikan	79.863.468.910,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		100 Peserta Didik	500 Peserta Didik	400.000.000,00						500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)						100.000.000,00							10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	10.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						15.000.000,00							1.350.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Ruang	1.350.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa						15.000.000,00							1.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	7 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Ruang	1.950.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium						15.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Ruang	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						15.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Ruang	750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						15.000.000,00							450.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	450.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						15.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Ruang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.900.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit		3 Unit	8 Unit	1.900.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah						15.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						15.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Ruang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium						15.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Ruang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah						15.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Ruang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah						502.973.800,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket		2 Paket	6 Paket	502.973.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Paket	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						900.000.000,00							400.000.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	36 Paket	900.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	400.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						1.125.000.000,00							5.104.020.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	17713 Paket		16713 Paket	1000 Paket	1.125.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		17713 Paket	5.104.020.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah						25.000.000,00							250.000.000,00	
		Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	5 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						10.000.000.000,00							30.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket		10 Paket	10 Paket	10.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		20 Paket	30.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						6.461.200.000,00							7.662.600.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1466 Peserta didik		5480 Peserta didik	1466 Peserta didik	6.461.200.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1466 Peserta didik	7.662.600.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						400.000.000,00							2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		100 Peserta Didik	150 Peserta Didik	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						21.132.449.940,00							26.795.426.081,97	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	734 Orang		12977 Orang	514 Orang	21.132.449.940,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		734 Orang	26.795.426.081,97	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						100.000.000,00							1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		25 Orang	75 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		100 Orang	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	37 Satuan Pendidikan		37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		37 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						82.767.957.206,52							79.863.468.910,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	37 Satuan Pendidikan		37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	82.767.957.206,52	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		37 Satuan Pendidikan	79.863.468.910,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						25.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						25.000.000,00							150.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Komunitas	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						25.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Kegiatan	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						50.000.000,00							500.000.000,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000 Buku		Buku	75 Buku	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1000 Buku	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						700.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Unit		1 Unit	6 Unit	700.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						15.000.000,00							750.000.000,00	
		Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Ruang	750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru						650.947.470,00							2.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		5 Ruang	2 Ruang	650.947.470,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		6 Ruang	2.700.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						25.000.000,00							250.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula						1.000.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah						25.000.000,00							75.000.000,00	
		Kantin Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	75.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						25.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	37 Satuan Pendidikan		37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		37 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						25.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Orang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						25.000.000,00							75.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	75.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah						25.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	75.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						17.237.731.532,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		39.651.774.332,75	
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB						17.237.731.532,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		39.651.774.332,75	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		1 Paket	5 Paket	30.000.000,00						5 Paket	1.450.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000 Buku		Buku	1000 Buku	50.000.000,00						1000 Buku	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	2 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00						1 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		50 Orang	100 Orang	41.000.000,00						100 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	111 Orang		102 Orang	111 Orang	2.587.199.020,00						111 Orang	4.375.293.963,45	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	298 Paket		298 Paket	298 Paket	445.000.000,00						298 Paket	900.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	25.000.000,00						2 Ruang	500.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50.000.000,00						25 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Peserta Didik		350 Peserta Didik	350 Peserta Didik	50.000.000,00						350 Peserta Didik	1.500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00						1 Ruang	450.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00						1 Ruang	150.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	5 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	30.000.000,00						2 Ruang	2.100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	2 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	30.000.000,00						1 Ruang	550.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00						1 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	Ruang	25.000.000,00						1 Ruang	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00						1 Ruang	150.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	450.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		1 Unit	1 Unit	405.000.000,00						1 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00						Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Satuan Pendidikan		10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						10 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		0 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	10.000.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan		10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	10.000.000,00						10 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	10 Satuan Pendidikan		10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	12.574.532.512,00						10 Satuan Pendidikan	10.526.480.369,30	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik		100 Peserta Didik	150 Peserta Didik	200.000.000,00						150 Peserta Didik	500.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						25.000.000,00							10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		0 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	10.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						25.000.000,00							450.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	450.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						25.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						25.000.000,00							500.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Ruang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						25.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	350.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						400.000.000,00							200.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		1 Unit	2 Unit	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir						25.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	2 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah						25.000.000,00							200.000.000,00	
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium						25.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah						25.000.000,00							200.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						25.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						440.000.000,00							700.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	298 Paket		298 Paket	298 Paket	440.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		298 Paket	700.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						25.000.000,00							1.250.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Paket	1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						50.000.000,00							1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Peserta Didik		350 Peserta Didik	350 Peserta Didik	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		350 Peserta Didik	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						200.000.000,00							500.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik		100 Peserta Didik	50 Peserta Didik	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		150 Peserta Didik	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus						2.587.199.020,00							4.375.293.963,45	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	111 Orang		102 Orang	8 Orang	2.587.199.020,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		111 Orang	4.375.293.963,45	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						41.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		50 Orang	10 Orang	41.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		100 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						10.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan		10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		10 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus						12.574.532.512,00							10.526.480.369,30	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	10 Satuan Pendidikan		10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	12.574.532.512,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		10 Satuan Pendidikan	10.526.480.369,30	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Kegiatan	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						25.000.000,00							450.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	450.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						25.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru						25.000.000,00							900.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	5 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Ruang	900.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Satuan Pendidikan		10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		10 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		25 Orang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						25.000.000,00							150.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir						25.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	75.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						25.000.000,00							150.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	2 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						25.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						50.000.000,00							500.000.000,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000 Buku		Buku	50 Buku	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1000 Buku	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**225.000.000,00**							**800.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan						***175.000.000,00***							***800.000.000,00***	
			2.Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	24.31 %		10.42 %	13.89 %	175.000.000,00						17.36 %	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						150.000.000,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		550.000.000,00	
		Tersedianya Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Menengah						150.000.000,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		550.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	2000 Buku		2000 Buku	2000 Buku	50.000.000,00						2000 Buku	250.000.000,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	200 Orang		100 Orang	200 Orang	100.000.000,00						200 Orang	300.000.000,00	
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	2000 Buku		2000 Buku	100 Buku	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2000 Buku	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						100.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	200 Orang		100 Orang	25 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		200 Orang	300.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						75.000.000,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		250.000.000,00	
		Tersedianya Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Khusus						75.000.000,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		250.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	1000 Buku		1000 Buku	1000 Buku	25.000.000,00						1000 Buku	150.000.000,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	100.000.000,00	
	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus						25.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	1000 Buku		1000 Buku	100 Buku	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1000 Buku	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang		50 Orang	10 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Orang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**110.000.000,00**							**3.500.000.000,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan						***110.000.000,00***							***3.500.000.000,00***	
			1.Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	628,90 Rasio		628,49 Rasio	628,60 Rasio	110.000.000,00						628,70 Rasio	3.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi						110.000.000,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		3.500.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kepri						110.000.000,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		3.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	2.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	1.000.000.000,00	
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						100.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						10.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**35.000.000,00**							**500.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan						***35.000.000,00***							***250.000.000,00***	
			1.Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100 %		100 %	100 %	35.000.000,00						100 %	250.000.000,00	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						25.000.000,00					Masyarakat		250.000.000,00	
		Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						25.000.000,00					Masyarakat		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						25.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00					Masyarakat		250.000.000,00	
		Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00					Masyarakat		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
		BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN						**704.500.000,00**							**4.745.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**704.500.000,00**							**4.745.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**704.500.000,00**							**4.745.000.000,00**	
6.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**670.817.990.346,98**							**685.100.624.331,00**	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan						***185.500.000,00***							***563.750.000,00***	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.48 Indeks		80.46 Indeks	80.47 Indeks	185.500.000,00						80.47 Indeks	563.750.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks		87 Indeks	88 Indeks	185.500.000,00						89 Indeks	563.750.000,00	
			3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	185.500.000,00						BB Predikat	563.750.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.112.140.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (BTIKP)		703.088.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan						1.112.140.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (BTIKP)		703.088.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	112.140.000,00						4 Dokumen	303.088.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	725.000.000,00						1 Paket	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						419.000.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (BTIKP)		4.650.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Pendidikan						419.000.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (BTIKP)		4.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00						4 Laporan	475.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	255.000.000,00						12 Laporan	1.100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	12 Paket	12.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	12 Paket	1.000.000,00						12 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	8.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	44.000.000,00						12 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	36.000.000,00						12 Paket	950.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	18.500.000,00						12 Paket	525.000.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	5 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	150.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	5 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.500.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	10 Paket	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	2 Paket	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						500.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	3 Paket	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.500.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	125.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						25.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	150.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (BTIKP)		2.525.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (BTIKP)		2.525.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	74.000.000,00						2 Paket	825.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	252.000.000,00						2 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.500.000,00						2 Unit	600.000.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						5.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	150.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (BTIKP)		6.560.360.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (BTIKP)		6.560.360.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	673.100.000,00						4 Laporan	1.845.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	652.750.000,00						4 Laporan	3.486.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.260.000,00						4 Laporan	1.158.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.500.000,00						4 Laporan	70.000.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	20.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	150.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					Dinas Pendidikan (BTIKP)		1.336.302.530,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					Dinas Pendidikan (BTIKP)		1.336.302.530,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.500.000,00						1 Unit	325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	514.302.530,00						15 Unit	567.552.530,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	104.500.000,00						1 Unit	243.750.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.500.000,00							31.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	1 Unit	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		15 Unit	31.250.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00							31.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	31.250.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000,00							87.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	87.500.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
7.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**318.954.408.038,52**							**452.907.174.748,00**	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***75.000.000,00***							***750.000.000,00***	
			1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	100 %		100 %	100 %	75.000.000,00						100 %	750.000.000,00	
			2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	100 %		100 %	100 %	75.000.000,00						100 %	750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	90.94 %		88.94 %	89.44 %	75.000.000,00						89.94 %	750.000.000,00	
			4.Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB	0,008 %		0,012 %	0,011 %	75.000.000,00						0,01 %	750.000.000,00	
			5.Rasio peserta didik per kelas	36 Rasio		36 Rasio	36 Rasio	75.000.000,00						36 Rasio	750.000.000,00	
			6.Persentase Konten Pendidikan	45 %		25 %	30 %	75.000.000,00						35 %	750.000.000,00	
			7.Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa	66,38 Nilai		65,46 Nilai	65,69 Nilai	75.000.000,00						65,92 Nilai	750.000.000,00	
			8.Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa	65,99 Nilai		61,87 Nilai	62,90 Nilai	75.000.000,00						63,93 Nilai	750.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						172.964.148.090,00					Masyarakat		225.654.885.423,28	
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA						172.964.148.090,00					Masyarakat		225.654.885.423,28	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	50.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	50.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	50.000.000,00						-	250.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						50.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	500.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	1 Konten Digital	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	250.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	250.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						128.752.528.416,52					Masyarakat		187.600.514.991,97	
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK						128.752.528.416,52					Masyarakat		187.600.514.991,97	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	50.000.000,00						-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	50.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	50.000.000,00						-	250.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						50.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	25 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	500.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						50.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	1 Konten Digital	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	250.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	25 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	250.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						17.237.731.532,00					Masyarakat		39.651.774.332,75	
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB						17.237.731.532,00					Masyarakat		39.651.774.332,75	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	25.000.000,00						-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	50.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	50.000.000,00						-	250.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						50.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	25 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	500.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						25.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	1 Konten Digital	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	250.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	25 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	250.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM						**200.000.000,00**							**11.850.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**200.000.000,00**							**11.850.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**200.000.000,00**							**11.850.000.000,00**	
8.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**670.817.990.346,98**							**685.100.624.331,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan						***25.500.000,00***							***400.000.000,00***	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.48 Indeks		80.46 Indeks	80.47 Indeks	25.500.000,00						80.47 Indeks	400.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks		87 Indeks	88 Indeks	25.500.000,00						89 Indeks	400.000.000,00	
			3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	25.500.000,00						BB Predikat	400.000.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.112.140.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (Cabdis Batam)		703.088.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan						1.112.140.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (Cabdis Batam)		703.088.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	112.140.000,00						4 Dokumen	303.088.000,00	
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						6.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						419.000.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (CABDIS BATAM)		4.650.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Pendidikan						419.000.000,00					Aparatur Dinas Pendidikan (CABDIS BATAM)		4.650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00						4 Laporan	475.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	255.000.000,00						12 Laporan	1.100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	12 Paket	12.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	8.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	44.000.000,00						12 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	36.000.000,00						12 Paket	950.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	18.500.000,00						12 Paket	525.000.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						500.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					Dinas Pendidikan (CABDIS BATAM)		2.525.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					Dinas Pendidikan (CABDIS BATAM)		2.525.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	74.000.000,00						2 Paket	825.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	252.000.000,00						2 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.500.000,00						2 Unit	600.000.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						500.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					Dinas Pendidikan (CABDIS BATAM)		6.560.360.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					Dinas Pendidikan (CABDIS BATAM)		6.560.360.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	673.100.000,00						4 Laporan	1.845.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	652.750.000,00						4 Laporan	3.486.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.260.000,00						4 Laporan	1.158.760.000,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.500.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						500.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					Dinas Pendidikan (CABDIS BATAM)		1.336.302.530,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					Dinas Pendidikan (CABDIS BATAM)		1.336.302.530,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.500.000,00						1 Unit	325.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	514.302.530,00						15 Unit	567.552.530,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	104.500.000,00						1 Unit	243.750.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	1 Unit	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		15 Unit	25.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						500.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	25.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						500.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
9.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**318.954.408.038,52**							**452.907.174.748,00**	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***61.000.000,00***							***5.850.000.000,00***	
			1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	100 %		100 %	100 %	61.000.000,00						100 %	5.850.000.000,00	
			2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	100 %		100 %	100 %	61.000.000,00						100 %	5.850.000.000,00	
			3.Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	90.94 %		88.94 %	89.44 %	61.000.000,00						89.94 %	5.850.000.000,00	
			4.Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB	0,008 %		0,012 %	0,011 %	61.000.000,00						0,01 %	5.850.000.000,00	
			5.Rasio peserta didik per kelas	36 Rasio		36 Rasio	36 Rasio	61.000.000,00						36 Rasio	5.850.000.000,00	
			6.Persentase Konten Pendidikan	45 %		25 %	30 %	61.000.000,00						35 %	5.850.000.000,00	
			7.Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa	66,38 Nilai		65,46 Nilai	65,69 Nilai	61.000.000,00						65,92 Nilai	5.850.000.000,00	
			8.Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa	65,99 Nilai		61,87 Nilai	62,90 Nilai	61.000.000,00						63,93 Nilai	5.850.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						172.964.148.090,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		225.654.885.423,28	
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA						172.964.148.090,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		225.654.885.423,28	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		1 Unit	5 Unit	35.000.000,00						5 Unit	575.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	17190 Paket		23813 Paket	17190 Paket	3.385.000.000,00						17190 Paket	7.293.840.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket		1 Paket	5 Paket	1.960.000.000,00						5 Paket	650.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		5 Ruang	6 Ruang	825.000.000,00						6 Ruang	4.700.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		5 Ruang	15 Ruang	35.000.000,00						15 Ruang	4.750.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit		5 Unit	20 Unit	3.810.000.000,00						20 Unit	5.600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	15 Unit		2 Unit	7 Unit	710.000.000,00						7 Unit	1.350.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						10.000.000,00							600.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit		5 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		20 Unit	600.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah						10.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						10.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		5 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		15 Ruang	1.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						10.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Paket	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						10.000.000,00							150.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	17190 Paket		23813 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		17190 Paket	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						10.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	15 Unit		2 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		7 Unit	300.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru						25.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		5 Ruang	1 Ruang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		6 Ruang	2.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						128.752.528.416,52					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		187.600.514.991,97	
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK						128.752.528.416,52					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		187.600.514.991,97	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket		10 Paket	20 Paket	10.001.000.000,00						20 Paket	30.200.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	17713 Paket		16713 Paket	17713 Paket	1.130.000.000,00						17713 Paket	5.304.020.000,00	
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	2 Paket	905.000.000,00						2 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		5 Ruang	6 Ruang	670.947.470,00						6 Ruang	4.700.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	30.000.000,00						1 Ruang	350.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit		3 Unit	5 Unit	1.910.000.000,00						5 Unit	1.400.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Unit		1 Unit	5 Unit	701.000.000,00						5 Unit	950.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						10.000.000,00							400.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit		3 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	400.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						5.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						5.000.000,00							200.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	17713 Paket		16713 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		17713 Paket	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						1.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket		10 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		20 Paket	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.000.000,00							200.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru						20.000.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		5 Ruang	1 Ruang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		6 Ruang	2.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						5.000.000,00							200.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Ruang	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						17.237.731.532,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		39.651.774.332,75	
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB						17.237.731.532,00					Satuan Pendidikan,Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		39.651.774.332,75	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		1 Paket	5 Paket	30.000.000,00						5 Paket	1.450.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	298 Paket		298 Paket	298 Paket	445.000.000,00						298 Paket	900.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	5 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	30.000.000,00						2 Ruang	2.100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	2 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	30.000.000,00						1 Ruang	550.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		1 Unit	1 Unit	405.000.000,00						1 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00						Unit	350.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						5.000.000,00							400.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	400.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						5.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						5.000.000,00							200.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	298 Paket		298 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		298 Paket	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						5.000.000,00							200.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						5.000.000,00							200.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru						5.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	5 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Ruang	1.200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						5.000.000,00							400.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	2 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	400.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	
10.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**670.817.990.346,98**							**685.100.624.331,00**	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan						***172.500.000,00***							***454.362.000,00***	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.48 Indeks		80.46 Indeks	80.47 Indeks	172.500.000,00						80.47 Indeks	454.362.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks		87 Indeks	88 Indeks	172.500.000,00						89 Indeks	454.362.000,00	
			3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	172.500.000,00						BB Predikat	454.362.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.112.140.000,00					Dinas Pendidikan (Cabdis Karimun)		703.088.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan						1.112.140.000,00					Dinas Pendidikan (Cabdis Karimun)		703.088.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	112.140.000,00						4 Dokumen	303.088.000,00	
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						13.910.000,00							13.272.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	13.910.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						419.000.000,00					Dinas Pendidikan (Cabdis Karimun)		4.650.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Pendidikan						419.000.000,00					Dinas Pendidikan (Cabdis Karimun)		4.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00						4 Laporan	475.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	255.000.000,00						12 Laporan	1.100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	12 Paket	12.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	8.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	44.000.000,00						12 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	36.000.000,00						12 Paket	950.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	18.500.000,00						12 Paket	525.000.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.500.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						30.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					Dinas Pendidikan (CABDIS KARIMUN)		2.525.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					Dinas Pendidikan (CABDIS KARIMUN)		2.525.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	74.000.000,00						2 Paket	825.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	252.000.000,00						2 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.500.000,00						2 Unit	600.000.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						3.500.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					Dinas Pendidikan (CABDIS KARIMUN)		6.560.360.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					Dinas Pendidikan (CABDIS KARIMUN)		6.560.360.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	673.100.000,00						4 Laporan	1.845.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	652.750.000,00						4 Laporan	3.486.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.260.000,00						4 Laporan	1.158.760.000,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.400.000,00							11.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	11.400.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	11.400.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.190.000,00							2.190.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.190.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	2.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					Dinas Pendidikan (Cabdis Karimun)		1.336.302.530,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					Dinas Pendidikan (Cabdis Karimun)		1.336.302.530,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.500.000,00						1 Unit	325.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	514.302.530,00						15 Unit	567.552.530,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	104.500.000,00						1 Unit	243.750.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		15 Unit	25.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.500.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	12.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	12.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	12.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	
11.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**670.817.990.346,98**							**685.100.624.331,00**	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan						***160.000.000,00***							***441.862.000,00***	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.48 Indeks		80.46 Indeks	80.47 Indeks	160.000.000,00						80.47 Indeks	441.862.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks		87 Indeks	88 Indeks	160.000.000,00						89 Indeks	441.862.000,00	
			3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	160.000.000,00						BB Predikat	441.862.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.112.140.000,00					Dinas Pendidikan (Cabang Dinas Lingga)		703.088.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan						1.112.140.000,00					Dinas Pendidikan (Cabang Dinas Lingga)		703.088.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	112.140.000,00						4 Dokumen	303.088.000,00	
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						13.910.000,00							13.272.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	13.910.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						419.000.000,00					CABANG DINAS LINGGA		4.650.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Pendidikan						419.000.000,00					CABANG DINAS LINGGA		4.650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00						4 Laporan	475.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	255.000.000,00						12 Laporan	1.100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	12 Paket	12.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	8.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	44.000.000,00						12 Paket	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	36.000.000,00						12 Paket	950.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	18.500.000,00						12 Paket	525.000.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.500.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						30.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA		2.525.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA		2.525.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	74.000.000,00						2 Paket	825.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	252.000.000,00						2 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.500.000,00						2 Unit	600.000.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						5.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					-		6.560.360.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					-		6.560.360.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	673.100.000,00						4 Laporan	1.845.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	652.750.000,00						4 Laporan	3.486.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.260.000,00						4 Laporan	1.158.760.000,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.400.000,00							11.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	11.400.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	11.400.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.190.000,00							2.190.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.190.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	2.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA		1.336.302.530,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA		1.336.302.530,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.500.000,00						1 Unit	325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	104.500.000,00						1 Unit	243.750.000,00	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	25.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	25.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	
12.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**670.817.990.346,98**							**685.100.624.331,00**	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan						***160.000.000,00***							***441.862.000,00***	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.48 Indeks		80.46 Indeks	80.47 Indeks	160.000.000,00						80.47 Indeks	441.862.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks		87 Indeks	88 Indeks	160.000.000,00						89 Indeks	441.862.000,00	
			3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	160.000.000,00						BB Predikat	441.862.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.112.140.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA		703.088.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan						1.112.140.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA		703.088.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	112.140.000,00						4 Dokumen	303.088.000,00	
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						13.910.000,00							13.272.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	13.910.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						419.000.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA		4.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Pendidikan						419.000.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA		4.650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00						4 Laporan	475.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	255.000.000,00						12 Laporan	1.100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	12 Paket	12.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	8.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	44.000.000,00						12 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	36.000.000,00						12 Paket	950.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	18.500.000,00						12 Paket	525.000.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.500.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						30.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA		2.525.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA		2.525.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	74.000.000,00						2 Paket	825.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	252.000.000,00						2 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.500.000,00						2 Unit	600.000.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						5.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA		6.560.360.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA		6.560.360.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	673.100.000,00						4 Laporan	1.845.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	652.750.000,00						4 Laporan	3.486.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.260.000,00						4 Laporan	1.158.760.000,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.400.000,00							11.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	11.400.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	11.400.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.190.000,00							2.190.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.190.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	2.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA		1.336.302.530,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA		1.336.302.530,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.500.000,00						1 Unit	325.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	104.500.000,00						1 Unit	243.750.000,00	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	25.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**200.000.000,00**							**891.862.000,00**	
13.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**670.817.990.346,98**							**685.100.624.331,00**	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan						***160.000.000,00***							***441.862.000,00***	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.48 Indeks		80.46 Indeks	80.47 Indeks	160.000.000,00						80.47 Indeks	441.862.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks		87 Indeks	88 Indeks	160.000.000,00						89 Indeks	441.862.000,00	
			3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	160.000.000,00						BB Predikat	441.862.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.112.140.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS		703.088.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan						1.112.140.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS		703.088.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	112.140.000,00						4 Dokumen	303.088.000,00	
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						13.910.000,00							13.272.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	13.910.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						419.000.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS		4.650.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Pendidikan						419.000.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS		4.650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00						4 Laporan	475.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	255.000.000,00						12 Laporan	1.100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	12 Paket	12.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	8.500.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	44.000.000,00						12 Paket	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	36.000.000,00						12 Paket	950.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	12 Paket	18.500.000,00						12 Paket	525.000.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.500.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		6 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.500.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						30.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS		2.525.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						416.500.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS		2.525.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	74.000.000,00						2 Paket	825.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	252.000.000,00						2 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.500.000,00						2 Unit	600.000.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						5.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS		6.560.360.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.435.610.000,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS		6.560.360.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	673.100.000,00						4 Laporan	1.845.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	652.750.000,00						4 Laporan	3.486.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.260.000,00						4 Laporan	1.158.760.000,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.400.000,00							11.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	11.400.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	11.400.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.190.000,00							2.190.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.190.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	2.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS		1.336.302.530,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775.302.530,00					CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS		1.336.302.530,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.500.000,00						1 Unit	325.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	104.500.000,00						1 Unit	243.750.000,00	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	25.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	25.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
		Dinas Kesehatan						**61.807.784.116,51**							**109.052.444.293,34**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**61.807.784.116,51**							**109.052.444.293,34**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**61.807.784.116,51**							**109.052.444.293,34**	
14.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**29.124.047.042,51**							**35.071.077.262,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan						***27.794.047.042,51***							***32.708.133.418,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	27.794.047.042,51						BB Predikat	32.708.133.418,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	90 Indeks		80 Indeks	82 Indeks	27.794.047.042,51						85 Indeks	32.708.133.418,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	92.20 Indeks		91.60 Indeks	91.80 Indeks	27.794.047.042,51						92 Indeks	32.708.133.418,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						228.920.000,00					-		424.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						228.920.000,00					-		424.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.120.000,00						1 Dokumen	232.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.850.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	52.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	78.950.000,00						22 Laporan	90.000.000,00	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						39.850.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.850.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						85.120.000,00							197.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.120.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	197.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							52.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	52.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						78.950.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	78.950.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		22 Laporan	90.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25.857.467.042,51					-		26.920.383.088,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25.857.467.042,51					-		26.920.383.088,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.420.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	916.656.000,00						1 Dokumen	1.055.900.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/ Bulan		180 Orang/ Bulan	180 Orang/ Bulan	24.907.391.042,51						180 Orang/ Bulan	25.714.483.088,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						24.907.391.042,51							25.714.483.088,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/ Bulan		180 Orang/ Bulan	180 Orang/ Bulan	24.907.391.042,51	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang/ Bulan	25.714.483.088,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						916.656.000,00							1.055.900.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	916.656.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.055.900.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						33.420.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.420.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						70.300.000,00					-		269.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						70.300.000,00					-		269.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.300.000,00						1 Laporan	128.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	56.000.000,00	
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							56.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	56.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						42.300.000,00							95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.300.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	95.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						45.900.000,00					-		157.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						45.900.000,00					-		157.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	45.900.000,00						100 Orang	107.000.000,00	
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	75.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						779.629.000,00					-		1.323.485.474,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						779.629.000,00					-		1.323.485.474,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.230.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.788.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.850.000,00						1 Laporan	105.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	513.586.000,00						1 Laporan	780.485.474,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	28.700.000,00						1 Paket	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.225.000,00						1 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	34.370.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.770.000,00						1 Paket	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.110.000,00						1 Paket	23.000.000,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						18.870.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.870.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						70.770.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.770.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	90.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.110.000,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.110.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	23.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.580.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.580.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	90.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.225.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.225.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	35.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						15.230.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.230.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	70.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						460.276.000,00							627.550.330,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	460.276.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	627.550.330,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						35.788.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.788.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	60.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						93.540.000,00					-		955.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						93.540.000,00					-		955.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	44.440.000,00						1 Paket	360.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		12 Unit	1 Unit	49.100.000,00						5 Unit	595.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						44.440.000,00							360.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	44.440.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	360.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						49.100.000,00							480.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		12 Unit	6 Unit	49.100.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	480.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.404.576.000,00					-		2.914.708.700,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.404.576.000,00					-		2.914.708.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	623.511.000,00						12 Laporan	1.001.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	722.615.000,00						2 Laporan	1.815.708.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	58.450.000,00						1 Laporan	98.000.000,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						70.511.000,00							560.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.511.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	560.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						58.450.000,00							98.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	58.450.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	98.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						400.310.000,00							1.606.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	400.310.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	1.606.700.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						643.715.000,00					-		2.107.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						643.715.000,00					-		2.107.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	218.665.000,00						1 Unit	410.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	70.500.000,00						3 Unit	390.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	323.400.000,00						20 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	0,00						30 Unit	257.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	100 Unit	31.150.000,00						100 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	250.000.000,00	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						323.400.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	323.400.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							257.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	257.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						31.150.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	30 Unit	31.150.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						33.150.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	33.150.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
15.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**30.471.047.000,00**							**68.341.670.196,34**	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat						***29.731.047.000,00***							***65.145.670.196,34***	
			10.Cakupan imunisasi bayi lengkap	95 %		91 %	92 %	29.731.047.000,00						93 %	65.145.670.196,34	
			11.Persentase Puskesmas terakreditasi	99.50 %		98.90 %	99.20 %	29.731.047.000,00						99.30 %	65.145.670.196,34	
			12.Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1.99 Per 1000		1.99 Per 1000	1.99 Per 1000	29.731.047.000,00						1.99 Per 1000	65.145.670.196,34	
			13.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98 (%)		98 (%)	98 (%)	29.731.047.000,00						98 (%)	65.145.670.196,34	
			14.Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	3 kabupaten/ kota		1 kabupaten/ kota	1 kabupaten/ kota	29.731.047.000,00						2 kabupaten/ kota	65.145.670.196,34	
			15.Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	90 %		89 %	89.20 %	29.731.047.000,00						89.30 %	65.145.670.196,34	
			1.Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	95 %		93 %	93.50 %	29.731.047.000,00						94 %	65.145.670.196,34	
			2.Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	6.5 Angka		10 Angka	9 Angka	29.731.047.000,00						8 Angka	65.145.670.196,34	
			3.Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	5.1 Persentase		5.9 Persentase	5.7 Persentase	29.731.047.000,00						5.5 Persentase	65.145.670.196,34	
			4.Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %	100 %	29.731.047.000,00						100 %	65.145.670.196,34	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			5.Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	100 %		100 %	100 %	29.731.047.000,00						100 %	65.145.670.196,34	
			6.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	65 (%)		55 (%)	60 (%)	29.731.047.000,00						60 (%)	65.145.670.196,34	
			7.Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	0.32 Per 1000		0.33 Per 1000	0.33 Per 1000	29.731.047.000,00						0.32 Per 1000	65.145.670.196,34	
			8.Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	7 kabupaten/ kota		7 kabupaten/ kota	7 kabupaten/ kota	29.731.047.000,00						7 kabupaten/ kota	65.145.670.196,34	
			9.Hipertensi dalam pengendalian	25 %		15 %	18 %	29.731.047.000,00						20 %	65.145.670.196,34	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						1.468.920.000,00					-		15.044.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						1.468.920.000,00					-		15.044.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit		20 Unit	4 Unit	30.000.000,00						3 Unit	5.000.000.000,00	
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	30.000.000,00						2 Unit	995.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	625.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	825.000.000,00						1 Unit	4.825.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	25 Unit		6 Unit	7 Unit	0,00						10 Unit	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		1 Paket	Paket	428.920.000,00						Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	7 Layanan		5 Layanan	5 Layanan	30.000.000,00						3 Layanan	900.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00						1 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	326.000.000,00	
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	553.000.000,00	
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						825.000.000,00							4.630.000.000,00	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	825.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	4.630.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)						30.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	7 Layanan		5 Layanan	5 Layanan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelaya nan Kesehatan Rujukan	-	-		3 Layanan	900.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center						0,00							553.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		1 Unit	553.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						0,00							625.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	625.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						0,00							326.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	326.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						30.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit		20 Unit	4 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						0,00							750.000.000,00	
		Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	25 Unit		6 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit						75.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						428.920.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		1 Paket	7 Paket	428.920.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						28.661.127.000,00					-		51.394.380.541,34	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						28.661.127.000,00					-		51.394.380.541,34	
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	189.000.000,00						1 Dokumen	684.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.612.127.000,00						1 Dokumen	36.916.007.409,34	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	120.000.000,00						4 Dokumen	1.900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	120.000.000,00						7 Dokumen	770.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00						6 Dokumen	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	152.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000,00						7 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	0,00						1 Dokumen	272.373.132,00	
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	700.000.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	636 Orang		636 Orang	636 Orang	30.000.000,00						636 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	465 Orang		400 Orang	420 Orang	30.000.000,00						430 Orang	650.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	75 Orang		55 Orang	60 Orang	20.000.000,00						65 Orang	180.000.000,00	
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						30.000.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	465 Orang		400 Orang	150 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		430 Orang	650.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						30.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	636 Orang		636 Orang	636 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		636 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						120.000.000,00							770.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	7 Dokumen		7 Dokumen	8 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	770.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut						30.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						120.000.000,00							1.900.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	1.900.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						30.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen		6 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						30.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						30.000.000,00							152.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	152.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						20.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA						20.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	75 Orang		55 Orang	60 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		65 Orang	180.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						27.612.127.000,00							36.916.007.409,34	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.612.127.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-		1 Dokumen	36.916.007.409,34	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						30.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota						0,00							850.000.000,00	
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	850.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						189.000.000,00							684.000.000,00	
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	189.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	684.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas						0,00							272.373.132,00	
		Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	272.373.132,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota						20.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional						20.000.000,00							700.000.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan						0,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						271.000.000,00					-		783.289.655,00	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						271.000.000,00					-		783.289.655,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	271.000.000,00						15 Dokumen	783.289.655,00	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						241.000.000,00							497.289.655,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	241.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Dokumen	497.289.655,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						70.000.000,00					-		1.120.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						70.000.000,00					-		1.120.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	36 Unit		36 Unit	36 Unit	40.000.000,00						36 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	30.000.000,00						9 Unit	370.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	36 Unit		36 Unit	36 Unit	0,00						36 Unit	400.000.000,00	
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						30.000.000,00							370.000.000,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Unit	370.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						0,00							400.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	36 Unit		36 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Unit	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						40.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	36 Unit		36 Unit	36 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Unit	350.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						28.661.127.000,00					-		51.394.380.541,34	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	0,00						-	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	120.000.000,00						-	3.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						120.000.000,00							3.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	10 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0033	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	1 Kabupaten/ Kota	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						0,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	170.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0036	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						30.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	4 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
16.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**3.072.260.074,00**							**7.509.382.378,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan						***3.072.260.074,00***							***7.509.382.378,00***	
			1.Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	4.30 Rasio		4.28 Rasio	4.29 Rasio	3.072.260.074,00						4.29 Rasio	7.509.382.378,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						1.422.260.074,00					-		6.785.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						1.422.260.074,00					-		6.785.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	57 Orang		57 Orang	57 Orang	1.382.260.074,00						57 Orang	6.700.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	260 Orang		260 Orang	260 Orang	40.000.000,00						260 Orang	85.000.000,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						1.382.260.074,00							6.700.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	57 Orang		57 Orang	57 Orang	1.382.260.074,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Orang	6.700.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						40.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	260 Orang		260 Orang	260 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		260 Orang	85.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1.650.000.000,00					-		724.382.378,00	
		Tersusunnya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1.650.000.000,00					-		724.382.378,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	335.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.630.000.000,00						50 Orang	389.382.378,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						1.630.000.000,00							389.382.378,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.630.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	389.382.378,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						20.000.000,00							335.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	335.000.000,00	Dinas Kesehatan
17.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**40.000.000,00**							**481.002.614,00**	
		Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman						***20.000.000,00***							***481.002.614,00***	
			1.Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	94 %		90 %	91 %	20.000.000,00						92 %	481.002.614,00	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						20.000.000,00					-		270.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan						20.000.000,00					-		270.000.000,00	
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	43 Sarana		25 Sarana	31 Sarana	20.000.000,00						40 Sarana	270.000.000,00	
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK						20.000.000,00							270.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	43 Sarana		25 Sarana	27 Sarana	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Sarana	270.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						20.000.000,00					-		211.002.614,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						20.000.000,00					-		211.002.614,00	
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	4 Sarana		2 Sarana	2 Sarana	20.000.000,00						3 Sarana	211.002.614,00	
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional						20.000.000,00							211.002.614,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	4 Sarana		2 Sarana	1 Sarana	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana	211.002.614,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
18.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**510.430.000,00**							**881.780.126,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***510.430.000,00***							***718.255.687,00***	
			1.Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10%	57.14 %		14.29 %	28.57 %	510.430.000,00						42.86 %	718.255.687,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						480.430.000,00					-		423.524.439,00	
		Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						480.430.000,00					-		423.524.439,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	480.430.000,00						7 Dokumen	423.524.439,00	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						480.430.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	480.430.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	260.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						30.000.000,00					-		328.255.687,00	
		Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						30.000.000,00					-		328.255.687,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	0,00						7 Dokumen	151.455.687,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000,00						7 Dokumen	176.800.000,00	
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						30.000.000,00							176.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	176.800.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						0,00							151.455.687,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7 Dokumen		7 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	151.455.687,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		130.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	0,00						7 Dokumen	130.000.000,00	
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM						0,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	7 Dokumen		7 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	130.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib						**263.323.751.409,02**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**263.323.751.409,02**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**263.323.751.409,02**							**0,00**	
19.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**262.323.751.409,02**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan						***262.323.751.409,02***							***0,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		B Predikat	B Predikat	262.323.751.409,02						BB Predikat	0,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Indeks		91.85 Indeks	92 Indeks	262.323.751.409,02						92.25 Indeks	0,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00						6 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						110.388.670.609,02					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)						110.388.670.609,02					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	863.184.000,02						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	788 Orang/ Bulan		788 Orang/ Bulan	788 Orang/ Bulan	109.525.486.609,00						788 Orang/ Bulan	0,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						109.525.486.609,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	788 Orang/ Bulan		788 Orang/ Bulan	788 Orang/ Bulan	109.525.486.609,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		788 Orang/ Bulan	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						863.184.000,02							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	863.184.000,02	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Pinang Kencana || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan satuan : Persentase)						0,00					-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang		0 Orang	61 Orang	0,00						61 Orang	0,00	
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang		0 Orang	61 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		61 Orang	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)						0,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		0 Unit	20 Unit	0,00						20 Unit	0,00	
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		0 Unit	20 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						4.960.000.000,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)						4.960.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		121 Laporan	12 Laporan	4.960.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.960.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		121 Laporan	12 Laporan	4.960.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)						0,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		0 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		0 Unit	20 Unit	0,00						20 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	0,00	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		0 Unit	20 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		0 Unit	6 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						146.935.080.800,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)						146.935.080.800,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	146.935.080.800,00						1 Unit Kerja	0,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						146.935.080.800,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	146.935.080.800,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
20.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.000.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat						***500.000.000,00***							***0,00***	
			1.Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib	Utama Peringkat		Utama Peringkat	Utama Peringkat	500.000.000,00						Utama Peringkat	0,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						1.000.000.000,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)						1.000.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	500.000.000,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	98 Unit		90 Unit	92 Unit	500.000.000,00						94 Unit	0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	4 Unit		0 Unit	4 Unit	0,00						4 Unit	0,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	0,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	0,00	
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	4 Unit		0 Unit	4 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						500.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelaya nan Kesehatan Rujukan	-	-		3 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						500.000.000,00							0,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	98 Unit		90 Unit	92 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Pinang Kencana || 0	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelaya nan Kesehatan Rujukan	-	-		94 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit						0,00							0,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	0,00	
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						0,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Dengan Satuan : Dokumen)						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		0,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Persentase)						0,00					-		0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						0,00							0,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
21.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**0,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan						***0,00***							***0,00***	
			1.Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	93 %		85 %	87 %	0,00						89 %	0,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						0,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)						0,00					-		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	165 Orang		12 Orang	165 Orang	0,00						165 Orang	0,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	165 Orang		12 Orang	165 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		165 Orang	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)						0,00					-		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	75 Orang		0 Orang	61 Orang	0,00						61 Orang	0,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						0,00							0,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	75 Orang		0 Orang	61 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Tanjung Pinang Timur || Kelurahan Melayu Kota Piring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		61 Orang	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud						**88.117.124.624,62**							**99.818.496.561,32**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**88.117.124.624,62**							**99.818.496.561,32**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**88.117.124.624,62**							**99.818.496.561,32**	
22.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**84.308.124.320,28**							**93.594.621.585,32**	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan						***83.958.124.320,28***							***91.244.621.585,32***	
			2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		B Predikat	B Predikat	83.958.124.320,28						BB Predikat	91.244.621.585,32	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Indeks		83 Indeks	84 Indeks	83.958.124.320,28						84 Indeks	91.244.621.585,32	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000.000,00					-		400.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000.000,00					-		400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	220.000.000,00						6 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						220.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	220.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	300.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54.206.556.195,73					-		58.693.923.849,32	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54.206.556.195,73					-		58.693.923.849,32	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	774.408.000,00						1 Dokumen	798.864.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	49.999.999,00						2 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/ Bulan		223 Orang/ Bulan	223 Orang/ Bulan	53.382.148.196,73						223 Orang/ Bulan	57.795.059.849,32	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						53.382.148.196,73							57.795.059.849,32	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/ Bulan		223 Orang/ Bulan	223 Orang/ Bulan	53.382.148.196,73	Provinsi Kepulauan Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		223 Orang/ Bulan	57.795.059.849,32	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						774.408.000,00							798.864.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	774.408.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	798.864.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						49.999.999,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	49.999.999,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		0 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	50.000.000,00	
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		0 Paket	3 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	50.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						434.129.056,40					-		1.300.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						434.129.056,40					-		1.300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	54.129.056,40						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	500.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						54.129.056,40							300.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	54.129.056,40	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	300.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.916.510.236,00					-		2.016.510.236,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.916.510.236,00					-		2.016.510.236,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.916.510.236,00						1 Laporan	1.916.510.236,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.916.510.236,00							1.916.510.236,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.916.510.236,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.916.510.236,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.492.178.832,15					-		3.880.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.492.178.832,15					-		3.880.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	50.000.000,00						3 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	100.000.000,00						12 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	345.811.512,15						3 Unit	2.400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	180.000.000,00						3 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit		23 Unit	23 Unit	96.367.320,00						23 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit		80 Unit	85 Unit	50.000.000,00						90 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	50.000.000,00						25 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	570.000.000,00						4 Unit	300.000.000,00	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						96.367.320,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit		23 Unit	23 Unit	96.367.320,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23 Unit	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						180.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	180.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	180.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit		80 Unit	85 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90 Unit	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	300.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						100.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	300.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						345.811.512,15							2.400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	345.811.512,15	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	2.400.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						570.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	570.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	300.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						25.908.750.000,00					-		27.204.187.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK)						25.908.750.000,00					-		27.204.187.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25.908.750.000,00						1 Unit Kerja	27.204.187.500,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						25.908.750.000,00							27.204.187.500,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25.908.750.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	27.204.187.500,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
23.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.473.213.142,34**							**3.578.540.798,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat						***3.223.213.142,34***							***3.078.540.798,00***	
			1.Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud	Satelit Peringkat		Satelit Peringkat	Satelit Peringkat	3.223.213.142,34						Satelit Peringkat	3.078.540.798,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						2.883.213.142,34					-		2.300.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasaranadan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						2.883.213.142,34					-		2.300.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit		15 Unit	20 Unit	1.283.213.142,34						20 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	200.000.000,00						2 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	80 Unit		80 Unit	80 Unit	200.000.000,00						80 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.000.000.000,00	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						1.283.213.142,34							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit		15 Unit	20 Unit	1.283.213.142,34	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		20 Unit	500.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	300.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit						200.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	80 Unit		80 Unit	80 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Unit	500.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						1.200.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						440.000.000,00					-		783.489.764,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						440.000.000,00					-		783.489.764,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	390.000.000,00						1 Dokumen	683.489.764,00	
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.02.1.02.0031	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						390.000.000,00							683.489.764,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	390.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	683.489.764,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						100.000.000,00					-		375.051.034,00	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						100.000.000,00					-		375.051.034,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	375.051.034,00	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						100.000.000,00							375.051.034,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	375.051.034,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		120.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provins						50.000.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	120.000.000,00	
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						50.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	120.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
24.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**335.787.162,00**							**2.645.334.178,00**	
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan						***335.787.162,00***							***2.645.334.178,00***	
			2.Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	80 %		60 %	65 %	335.787.162,00						70 %	2.645.334.178,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						85.787.162,00					-		2.020.385.212,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						85.787.162,00					-		2.020.385.212,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang		50 Orang	50 Orang	85.787.162,00						50 Orang	2.020.385.212,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						85.787.162,00							2.020.385.212,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang		50 Orang	50 Orang	85.787.162,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	2.020.385.212,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						250.000.000,00					-		624.948.966,00	
		Tersusunnya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						250.000.000,00					-		624.948.966,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	183 Orang		161 Orang	169 Orang	200.000.000,00						176 Orang	324.948.966,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						200.000.000,00							324.948.966,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	183 Orang		161 Orang	169 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		176 Orang	324.948.966,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						50.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
		UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)						**1.410.000.000,00**							**3.232.468.283,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.410.000.000,00**							**3.232.468.283,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.410.000.000,00**							**3.232.468.283,00**	
25.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**29.124.047.042,51**							**35.071.077.262,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan						***1.300.000.000,00***							***1.437.943.844,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	1.300.000.000,00						BB Predikat	1.437.943.844,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	90 Indeks		80 Indeks	82 Indeks	1.300.000.000,00						85 Indeks	1.437.943.844,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	92.20 Indeks		91.60 Indeks	91.80 Indeks	1.300.000.000,00						92 Indeks	1.437.943.844,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						228.920.000,00					-		424.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						228.920.000,00					-		424.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.120.000,00						1 Dokumen	232.000.000,00	
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						70.300.000,00					-		269.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						70.300.000,00					-		269.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.300.000,00						1 Laporan	128.000.000,00	
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						28.000.000,00							33.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	33.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						45.900.000,00					-		157.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						45.900.000,00					-		157.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	45.900.000,00						100 Orang	107.000.000,00	
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						15.900.000,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		100 Orang	2 Orang	15.900.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	32.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						779.629.000,00					-		1.323.485.474,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						779.629.000,00					-		1.323.485.474,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.850.000,00						1 Laporan	105.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	513.586.000,00						1 Laporan	780.485.474,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	28.700.000,00						1 Paket	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	34.370.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.120.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.120.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	40.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.850.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.850.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	35.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						53.310.000,00							152.935.144,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	53.310.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	152.935.144,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						93.540.000,00					-		955.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						93.540.000,00					-		955.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		12 Unit	1 Unit	49.100.000,00						5 Unit	595.000.000,00	
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		0 Unit	0,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		12 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	115.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.404.576.000,00					-		2.914.708.700,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.404.576.000,00					-		2.914.708.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	623.511.000,00						12 Laporan	1.001.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	722.615.000,00						2 Laporan	1.815.708.700,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						553.000.000,00							441.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	553.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	441.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						322.305.000,00							209.008.700,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	322.305.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	209.008.700,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						643.715.000,00					-		2.107.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						643.715.000,00					-		2.107.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	218.665.000,00						1 Unit	410.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	70.500.000,00						3 Unit	390.000.000,00	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						70.500.000,00							190.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	4 Unit	70.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	190.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						185.515.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	185.515.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	160.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
26.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**30.471.047.000,00**							**68.341.670.196,34**	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat						***80.000.000,00***							***1.596.000.000,00***	
			10.Cakupan imunisasi bayi lengkap	95 %		91 %	92 %	80.000.000,00						93 %	1.596.000.000,00	
			11.Persentase Puskesmas terakreditasi	99.50 %		98.90 %	99.20 %	80.000.000,00						99.30 %	1.596.000.000,00	
			12.Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1.99 Per 1000		1.99 Per 1000	1.99 Per 1000	80.000.000,00						1.99 Per 1000	1.596.000.000,00	
			13.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98 (%)		98 (%)	98 (%)	80.000.000,00						98 (%)	1.596.000.000,00	
			14.Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	3 kabupaten/ kota		1 kabupaten/ kota	1 kabupaten/ kota	80.000.000,00						2 kabupaten/ kota	1.596.000.000,00	
			15.Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	90 %		89 %	89.20 %	80.000.000,00						89.30 %	1.596.000.000,00	
			1.Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	95 %		93 %	93.50 %	80.000.000,00						94 %	1.596.000.000,00	
			2.Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	6.5 Angka		10 Angka	9 Angka	80.000.000,00						8 Angka	1.596.000.000,00	
			3.Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	5.1 Persentase		5.9 Persentase	5.7 Persentase	80.000.000,00						5.5 Persentase	1.596.000.000,00	
			4.Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %	100 %	80.000.000,00						100 %	1.596.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			5.Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	100 %		100 %	100 %	80.000.000,00						100 %	1.596.000.000,00	
			6.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	65 (%)		55 (%)	60 (%)	80.000.000,00						60 (%)	1.596.000.000,00	
			7.Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	0.32 Per 1000		0.33 Per 1000	0.33 Per 1000	80.000.000,00						0.32 Per 1000	1.596.000.000,00	
			8.Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	7 kabupaten/ kota		7 kabupaten/ kota	7 kabupaten/ kota	80.000.000,00						7 kabupaten/ kota	1.596.000.000,00	
			9.Hipertensi dalam pengendalian	25 %		15 %	18 %	80.000.000,00						20 %	1.596.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						1.468.920.000,00					-		15.044.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						1.468.920.000,00					-		15.044.000.000,00	
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	30.000.000,00						2 Unit	995.000.000,00	
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	850.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	825.000.000,00						1 Unit	4.825.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		1 Paket	Paket	428.920.000,00						Paket	120.000.000,00	
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						0,00							195.000.000,00	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	195.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						30.000.000,00							245.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	245.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						50.000.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	850.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	20.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						271.000.000,00					-		783.289.655,00	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						271.000.000,00					-		783.289.655,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	271.000.000,00						15 Dokumen	783.289.655,00	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						30.000.000,00							286.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15 Dokumen		15 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Dokumen	286.000.000,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
27.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**510.430.000,00**							**881.780.126,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***0,00***							***163.524.439,00***	
			1.Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10%	57.14 %		14.29 %	28.57 %	0,00						42.86 %	163.524.439,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						480.430.000,00					-		423.524.439,00	
		Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						480.430.000,00					-		423.524.439,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	480.430.000,00						7 Dokumen	423.524.439,00	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						0,00							163.524.439,00	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		7 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	163.524.439,00	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan						**238.108.075.479,94**							**74.140.931.696,52**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**237.008.075.479,94**							**73.040.931.696,52**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**237.008.075.479,94**							**73.040.931.696,52**	
28.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**35.540.931.696,52**							**33.240.931.696,52**	
		Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel						***33.207.786.756,52***							***32.107.786.756,52***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	33.207.786.756,52						BB Predikat	32.107.786.756,52	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	88.64 Indeks		85.38 Indeks	86.23 Indeks	33.207.786.756,52						87.09 Indeks	32.107.786.756,52	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	88.90 Indeks		88.80 Indeks	88.83 Indeks	33.207.786.756,52						88.85 Indeks	32.107.786.756,52	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						392.725.234,00					PERANGKAT DAERAH		422.725.234,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun						392.725.234,00					PERANGKAT DAERAH		422.725.234,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	189.580.294,00						1 Laporan	189.580.294,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	83.144.940,00						1 Laporan	83.144.940,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						120.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						189.580.294,00							189.580.294,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	189.580.294,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	189.580.294,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						83.144.940,00							83.144.940,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	83.144.940,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	83.144.940,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25.660.216.555,52					PERANGKAT DAERAH		25.073.943.910,52	
		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25.660.216.555,52					PERANGKAT DAERAH		25.073.943.910,52	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.939.616.000,00						1 Dokumen	1.939.616.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	83.144.940,00						1 Laporan	83.144.940,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/ Bulan		202 Orang/ Bulan	202 Orang/ Bulan	23.637.455.615,52						202 Orang/ Bulan	23.051.182.970,52	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						23.637.455.615,52							23.051.182.970,52	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/ Bulan		202 Orang/ Bulan	202 Orang/ Bulan	23.637.455.615,52	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		202 Orang/ Bulan	23.051.182.970,52	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						1.939.616.000,00							1.939.616.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.939.616.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	1.939.616.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						83.144.940,00							83.144.940,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	83.144.940,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	83.144.940,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						11.952.000,00					PERANGKAT DAERAH		11.952.000,00	
		Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						11.952.000,00					PERANGKAT DAERAH		11.952.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.952.000,00						1 Laporan	11.952.000,00	
	1.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						11.952.000,00							11.952.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.952.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	11.952.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.695.238,00					-		240.695.238,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.695.238,00					-		240.695.238,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	117 Paket		117 Paket	117 Paket	77.650.238,00						117 Paket	77.650.238,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang		11 Orang	11 Orang	173.045.000,00						11 Orang	163.045.000,00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						77.650.238,00							77.650.238,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	117 Paket		117 Paket	117 Paket	77.650.238,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		117 Paket	77.650.238,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						93.045.000,00							93.045.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang		11 Orang	11 Orang	93.045.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		11 Orang	93.045.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.569.178.532,00					PERANGKAT DAERAH		1.780.451.177,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.569.178.532,00					PERANGKAT DAERAH		1.780.451.177,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.000.000,00						1 Dokumen	57.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	109.968.400,00						1 Laporan	169.968.400,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.110.727.355,00						1 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	220.982.100,00						1 Paket	187.982.100,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	182.271.251,00						1 Paket	212.271.251,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	81.852.626,00						1 Paket	31.852.626,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	306.223.200,00						1 Paket	206.223.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	115.153.600,00						1 Paket	115.153.600,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						31.852.626,00							31.852.626,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	31.852.626,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	31.852.626,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						156.223.200,00							156.223.200,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	156.223.200,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	156.223.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						45.153.600,00							45.153.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.153.600,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	45.153.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.982.100,00							127.982.100,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.982.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	127.982.100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						82.271.251,00							82.271.251,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	82.271.251,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	82.271.251,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						57.000.000,00							57.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	57.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						109.968.400,00							169.968.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	109.968.400,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	169.968.400,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						805.727.355,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	805.727.355,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						300.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						992.400.000,00					PERANGKAT DAERAH		241.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						992.400.000,00					PERANGKAT DAERAH		241.000.000,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		0 Unit	Unit	0,00						Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	60.000.000,00						1 Unit	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	826.400.000,00						1 Unit	125.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						0 Unit	0,00	
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Unit	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						220.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	220.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	120.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						60.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	60.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						4.571.164.137,00					PERANGKAT DAERAH		4.450.164.137,00	
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.571.164.137,00					PERANGKAT DAERAH		4.450.164.137,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	879.416.083,00						1 Laporan	819.416.083,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.610.293.854,00						1 Laporan	3.558.293.854,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.454.200,00						1 Laporan	26.454.200,00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						21.454.200,00							21.454.200,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.454.200,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	21.454.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						779.416.083,00							779.416.083,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	779.416.083,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	779.416.083,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.510.293.854,00							3.510.293.854,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.510.293.854,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	3.510.293.854,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.092.600.000,00					PERANGKAT DAERAH		1.020.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.092.600.000,00					PERANGKAT DAERAH		1.020.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit		0 Unit	2 Unit	50.500.000,00						2 Unit	500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	3 Unit	147.100.000,00						3 Unit	147.100.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	425.000.000,00						8 Unit	425.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	90.000.000,00						1 Unit	90.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	155.000.000,00						1 Unit	132.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	225.000.000,00						1 Unit	225.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						400.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		8 Unit	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	3 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Unit	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit		0 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
29.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**6.685.000.000,00**							**2.000.000.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi						***6.035.000.000,00***							***1.150.000.000,00***	
			1.Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0.203 %		0.113 %	0.128 %	6.035.000.000,00						0.153 %	1.150.000.000,00	
			2.Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	36.21 %		24.49 %	27.55 %	6.035.000.000,00						30.52 %	1.150.000.000,00	
			3.Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	90.37 %		79.70 %	82.48 %	6.035.000.000,00						85.19 %	1.150.000.000,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						6.405.000.000,00					MASYARAKAT		2.000.000.000,00	
		Terlindunginya Bangunan Pengendali Banjir/Bangunan Perkuatan Tebing/Pengaman Pantai/Normalisasi/Restorasi						6.405.000.000,00					MASYARAKAT		2.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	7 Lembaga		0 Lembaga	7 Lembaga	150.000.000,00						7 Lembaga	150.000.000,00	
			Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	0.5 KM		0.5 KM	0.5 KM	625.000.000,00						0.5 KM	500.000.000,00	
			Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	1 KM		0 KM	1 KM	500.000.000,00						0 KM	0,00	
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.5 KM		0.5 KM	0.5 KM	800.000.000,00						0.5 KM	500.000.000,00	
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM		0 KM	1 KM	500.000.000,00						0 KM	0,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM		2 KM	1 KM	2.700.000.000,00						1 KM	300.000.000,00	
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM		0 KM	1 KM	100.000.000,00						0 KM	0,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1 KM		0 KM	1 KM	190.000.000,00						1 KM	150.000.000,00	
		Tersedianya Kapasitas Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk						6.405.000.000,00					MASYARAKAT		2.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	7 Lembaga		0 Lembaga	7 Lembaga	150.000.000,00						7 Lembaga	150.000.000,00	
			Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	0.5 KM		0.5 KM	0.5 KM	625.000.000,00						0.5 KM	500.000.000,00	
			Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	1 KM		0 KM	1 KM	500.000.000,00						0 KM	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.5 KM		0.5 KM	0.5 KM	800.000.000,00						0.5 KM	500.000.000,00	
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM		0 KM	1 KM	500.000.000,00						0 KM	0,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM		2 KM	1 KM	2.700.000.000,00						1 KM	300.000.000,00	
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM		0 KM	1 KM	100.000.000,00						0 KM	0,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1 KM		0 KM	1 KM	190.000.000,00						1 KM	150.000.000,00	
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai						190.000.000,00							150.000.000,00	
		Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1 KM		0 KM	2 KM	190.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 KM	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	7 Lembaga		0 Lembaga	7 Lembaga	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		7 Lembaga	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai						2.700.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM		2 KM	5 KM	2.700.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 KM	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.02.1.01.0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir						500.000.000,00							0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM		0 KM	1 KM	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir						800.000.000,00							500.000.000,00	
		Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.5 KM		0.5 KM	0.5 KM	800.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0.5 KM	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM		0 KM	1 KM	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						240.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	240.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai						600.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	6 Dokumen	600.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.02.1.01.0124	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai						500.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	1 KM		0 KM	1 KM	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai						625.000.000,00							500.000.000,00	
		Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	0.5 KM		0.5 KM	0.5 KM	625.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0.5 KM	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						280.000.000,00					MASYARAKAT		0,00	
		Terbangunya Jaringan Iriasi						280.000.000,00					MASYARAKAT		0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.5 KM		0 KM	0.5 KM	150.000.000,00						0 KM	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM		0 KM	0.5 KM	130.000.000,00						KM	0,00	
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						150.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.5 KM		0 KM	0.5 KM	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						130.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM		0 KM	0.5 KM	130.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
30.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**1.100.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum						***850.000.000,00***							***600.000.000,00***	
			1.Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	57.6 %		51.8 %	53.25 %	850.000.000,00						54.7 %	600.000.000,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						1.100.000.000,00					MASYARAKAT		1.600.000.000,00	
		Tersedianya Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan						1.100.000.000,00					MASYARAKAT		1.600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						2 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Kabupaten/ Kota		0 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100.000.000,00						2 Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	1.4 Liter/Detik		0.1 Liter/Detik	1.4 Liter/Detik	250.000.000,00						1.4 Liter/Detik	500.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	2 Liter/Detik		0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	250.000.000,00						1 Liter/Detik	500.000.000,00	
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Kabupaten/ Kota		0 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		2 Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						250.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	1.4 Liter/Detik		0.1 Liter/Detik	1.4 Liter/Detik	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1.4 Liter/Detik	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						250.000.000,00							500.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	2 Liter/Detik		0 Liter/Detik	20.5 Liter/Detik	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Liter/Detik	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		2 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
31.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**100.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan persampahan regional						***100.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	50 %		0 %	0 %	100.000.000,00						25 %	0,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						100.000.000,00					MASYARAKAT		0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan yang dibangun dan direhabilitasi						100.000.000,00					MASYARAKAT		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
32.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**300.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah						***300.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			1.Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	13.50 %		8.92 %	10.08 %	300.000.000,00						11.24 %	50.000.000,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						300.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Terpenuhinya Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman						300.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	7 Kabupaten/ Kota		7 Kabupaten/ Kota	7 Kabupaten/ Kota	200.000.000,00						7 Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						100.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota						200.000.000,00							50.000.000,00	
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	7 Kabupaten/ Kota		7 Kabupaten/ Kota	7 Kabupaten/ Kota	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		7 Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
33.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**1.030.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan						***1.030.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			1.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	21.4 %		21.43 %	14.29 %	1.030.000.000,00						21.4 %	200.000.000,00	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi						1.030.000.000,00					MASYARAKAT		200.000.000,00	
		Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan						1.030.000.000,00					MASYARAKAT		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00						0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaan		2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	730.000.000,00						3 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						730.000.000,00							200.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaan		2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	730.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						100.000.000,00							0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
34.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**87.877.143.783,42**							**5.000.000.000,00**	
		Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi						***87.877.143.783,42***							***4.000.000.000,00***	
			1.Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	11 %		37.04 %	7.41 %	87.877.143.783,42						7.41 %	4.000.000.000,00	
		Tersedianya bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah						87.877.143.783,42					MASYARAKAT		5.000.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung		0 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	5.000.000.000,00						1 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						5.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung		0 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						87.877.143.783,42					MASYARAKAT		5.000.000.000,00	
		Tersedianya bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah						87.877.143.783,42					MASYARAKAT		5.000.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-		-	-	79.697.143.783,42						-	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Provinsi	-		-	-	3.000.000.000,00						-	2.900.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	-	80.000.000,00						-	0,00	
	1.03.08.1.01.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten/Kotan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota						80.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	7 Kabupaten/ Kota	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.08.1.01.0024	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						79.697.143.783,42							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-		-	1 Bangunan Gedung	79.697.143.783,42	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.08.1.01.0025	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						3.000.000.000,00							2.900.000.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Provinsi	-		-	6 Bangunan Gedung	3.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	2.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.08.1.01.0029	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdaftarnya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	-		-	1 Bangunan Gedung Negara	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
35.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**75.175.000.000,00**							**5.000.000.000,00**	
		Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						***74.975.000.000,00***							***3.800.000.000,00***	
			1.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.18 %		27.27 %	9.09 %	74.975.000.000,00						9.09 %	3.800.000.000,00	
		Terpenuhinya Penataan Bangunan dan Lingkungan diKawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						75.175.000.000,00					MASYARAKAT		5.000.000.000,00	
			Jumlah dokumen legal yang disahkan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1 kabupaten/ kota		0 kabupaten/ kota	0 kabupaten/ kota	350.000.000,00						1 kabupaten/ kota	1.050.000.000,00	
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan		3 Kawasan	1 Kawasan	73.600.000.000,00						1 Kawasan	2.900.000.000,00	
	1.03.09.1.01.0014	Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya dokumen legal sebagai acuan perencanan detil dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen legal yang disahkan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota						300.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1 kabupaten/ kota		0 kabupaten/ kota	1 kabupaten/ kota	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 kabupaten/ kota	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						73.500.000.000,00							2.800.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan		3 Kawasan	1 Kawasan	73.500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Kawasan	2.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						75.175.000.000,00					MASYARAKAT		5.000.000.000,00	
		Terpenuhinya Penataan Bangunan dan Lingkungan diKawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						75.175.000.000,00					MASYARAKAT		5.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.025.000.000,00						-	1.050.000.000,00	
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						975.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	975.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
36.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**30.450.000.000,00**							**26.300.000.000,00**	
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman						***17.500.000.000,00***							***20.450.000.000,00***	
			1.Persentase Jalan Kondisi Mantap	82.81 %		82.18 %	82.29 %	17.500.000.000,00						82.40 %	20.450.000.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						30.450.000.000,00					MASYARAKAT		26.300.000.000,00	
		Terpenuhinya Jalan Provinsi Kondisi Mantap						30.450.000.000,00					MASYARAKAT		26.300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen		2 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00						5 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Panjang Flyover yang Dibangun	33 Meter		0 Meter	5 Meter	7.500.000.000,00						10 Meter	9.450.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	620.76 KM		0 KM	620.76 KM	1.000.000.000,00						620.76 KM	800.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	5.24 KM		0 KM	4.33 KM	1.000.000.000,00						4.76 KM	1.000.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	620.76 KM		620.76 KM	620.76 KM	500.000.000,00						620.76 KM	1.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun	0.19 KM		0.15 KM	0.15 KM	2.100.000.000,00						0.15 KM	2.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	KM		KM	1 KM	500.000.000,00						1 KM	500.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0.40 KM		0.3 KM	0.33 KM	1.000.000.000,00						0.36 KM	1.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	5.87 KM		4.41 KM	4.60 KM	5.350.000.000,00						4.70 KM	5.350.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.04 KM		0 KM	0.08 KM	500.000.000,00						0.04 KM	500.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3.72 KM		2.28 KM	0.5 KM	1.500.000.000,00						0.5 KM	1.500.000.000,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	22 Meter		20 Meter	5 Meter	5.000.000.000,00						0 Meter	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	4 Meter		8 Meter	8 Meter	1.000.000.000,00						4 Meter	500.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4 Meter		0 Meter	8 Meter	1.000.000.000,00						4 Meter	500.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	5 Meter		5 Meter	5 Meter	1.000.000.000,00						5 Meter	1.000.000.000,00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.04 KM		0 KM	0.08 KM	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.04 KM	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3.72 KM		2.28 KM	0.50 KM	1.500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.5 KM	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	KM		KM	1 KM	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 KM	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen		2 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						500.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	620.76 KM		620.76 KM	620.76 KM	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		620.76 KM	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan						500.000.000,00							200.000.000,00	
		Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	5.87 KM		4.41 KM	4.60 KM	5.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4.70 KM	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0047	Pemeliharaan Berkala Jembatan						1.000.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	4 Meter		8 Meter	8 Meter	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Meter	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		&Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	5 Meter		5 Meter	5 Meter	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Meter	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	5.24 KM		0 KM	4.33 KM	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4.76 KM	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan						5.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	22 Meter		20 Meter	5 Meter	5.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0 Meter	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0055	Pembangunan Flyover						7.500.000.000,00							9.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang Dibangun	33 Meter		0 Meter	5 Meter	7.500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Meter	9.450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0.40 KM		0.3 KM	0.33 KM	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.36 KM	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan						1.000.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4 Meter		0 Meter	8 Meter	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Meter	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		&Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0.19 KM		0.15 KM	0.15 KM	2.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.15 KM	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi						1.000.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	620.76 KM		0 KM	620.76 KM	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		620.76 KM	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
37.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**700.000.000,00**							**500.000.000,00**	
		Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional						***330.000.000,00***							***280.000.000,00***	
			1.Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	8 %		8 %	8 %	330.000.000,00						8 %	280.000.000,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						435.000.000,00					MASYARAKAT		235.000.000,00	
		Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi yang berkualifikasi Ahli						435.000.000,00					MASYARAKAT		235.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	5 Orang		15 Orang	5 Orang	50.000.000,00						5 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00						1 Lembaga	50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00						1 Lembaga	15.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	90 Orang		90 Orang	90 Orang	135.000.000,00						90 Orang	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	90 Orang		90 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	50 Orang		0 Orang	50 Orang	50.000.000,00						0 Orang	0,00	
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	5 Orang		15 Orang	5 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Orang	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	90 Orang		90 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Orang	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Lembaga	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						135.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	90 Orang		90 Orang	90 Orang	135.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		90 Orang	70.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						50.000.000,00							0,00	
		Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	50 Orang		0 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		0 Orang	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi						50.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Lembaga	15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						110.000.000,00					MASYARAKAT		110.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Konstruksi						110.000.000,00					MASYARAKAT		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	30.000.000,00						1 Layanan Informasi	30.000.000,00	
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang		0 Orang	5 Orang	20.000.000,00						5 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung		0 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	20.000.000,00						1 Perangkat Pendukung	20.000.000,00	
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Layanan Informasi	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung		0 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Perangkat Pendukung	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi						40.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang		0 Orang	5 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Orang	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						155.000.000,00					MASYARAKAT		155.000.000,00	
		Terpenuninya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi						155.000.000,00					MASYARAKAT		155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha		0 Badan Usaha	20 Badan Usaha	45.000.000,00						20 Badan Usaha	45.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	1 Bangunan Konstruksi		0 Bangunan Konstruksi	1 Bangunan Konstruksi	40.000.000,00						1 Bangunan Konstruksi	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	0 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	40.000.000,00						1 Lembaga	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan		1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	10.000.000,00						1 Paket Pekerjaan	10.000.000,00	
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan		1 Paket Pekerjaan	32 Paket Pekerjaan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket Pekerjaan	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						40.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	1 Bangunan Konstruksi		0 Bangunan Konstruksi	1 Bangunan Konstruksi	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Bangunan Konstruksi	40.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	0 Lembaga		0 Lembaga	7 Lembaga	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Lembaga	40.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						45.000.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha		0 Badan Usaha	20 Badan Usaha	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		20 Badan Usaha	45.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
38.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**700.000.000,00**							**450.000.000,00**	
		Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang						***255.000.000,00***							***50.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	80 %		70 %	72 %	255.000.000,00						75 %	50.000.000,00	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi						185.000.000,00					MASYARAKAT		100.000.000,00	
		Tersedianya Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda						185.000.000,00					MASYARAKAT		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	35.000.000,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	80 Orang		0 Orang	200 Orang	50.000.000,00						0 Orang	0,00	
			Jumlah Perda RTRW Provinsi	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi		1 Publikasi	1 Publikasi	25.000.000,00						1 Publikasi	50.000.000,00	
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						35.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi		1 Publikasi	1 Publikasi	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Publikasi	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Perda RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang						50.000.000,00							0,00	
		Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	80 Orang		0 Orang	200 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Orang	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						100.000.000,00					MASYARAKAT		50.000.000,00	
		Terlaksanaya koordinasi dan siknronisasi perencanaan tata ruang						100.000.000,00					MASYARAKAT		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						0 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progres dan tindak lanjut dari provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota						40.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						115.000.000,00					MASYARAKAT		150.000.000,00	
		Terlaksanaya koordinasi dan siknronisasi pemanfaatan tata ruang						115.000.000,00					MASYARAKAT		150.000.000,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	0 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	0 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						45.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						300.000.000,00					MASYARAKAT		150.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						300.000.000,00					MASYARAKAT		150.000.000,00	
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						0 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	40.000.000,00						0 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus		1 Kasus	0 Kasus	40.000.000,00						0 Kasus	0,00	
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus		0 Kasus	1 Kasus	40.000.000,00						0 Kasus	0,00	
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang						40.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus		0 Kasus	1 Kasus	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Kasus	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						40.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang						40.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Kasus	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR						40.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						40.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	1.03.12.1.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal						40.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Berita Acara	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.100.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**1.100.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
39.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**						**1.000.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum						***850.000.000,00***							***850.000.000,00***	
			1.Persentase luas lahan yang di bebaskan untuk kepentingan umum	6.88 %		45 %	20.53 %	850.000.000,00						20.53 %	850.000.000,00	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi						1.000.000.000,00					MASYARAKAT		1.000.000.000,00	
		Terfasilitasinya OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi						1.000.000.000,00					MASYARAKAT		1.000.000.000,00	
			Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum						800.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	2.10.03.1.01.0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	2.10.03.1.01.0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
40.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		Terwujudnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						***100.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau	25 %		0 %	25 %	100.000.000,00						25 %	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						100.000.000,00					MASYARAKAT		100.000.000,00	
		Tersedianya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						100.000.000,00					MASYARAKAT		100.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara		0 Berita Acara	0 Berita Acara	100.000.000,00						1 Berita Acara	100.000.000,00	
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Berita Acara	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN						**1.000.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.000.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1.000.000.000,00**							**300.000.000,00**	
41.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**35.540.931.696,52**							**33.240.931.696,52**	
		Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel						***870.000.000,00***							***165.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	870.000.000,00						BB Predikat	165.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	88.64 Indeks		85.38 Indeks	86.23 Indeks	870.000.000,00						87.09 Indeks	165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	88.90 Indeks		88.80 Indeks	88.83 Indeks	870.000.000,00						88.85 Indeks	165.000.000,00	
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.695.238,00					PERANGKAT DAERAH		240.695.238,00	
		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.695.238,00					PERANGKAT DAERAH		240.695.238,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang		11 Orang	11 Orang	173.045.000,00						11 Orang	163.045.000,00	
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang		11 Orang	15 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		11 Orang	20.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.569.178.532,00					PERANGKAT DAERAH		1.780.451.177,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.110.727.355,00						1 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	220.982.100,00						1 Paket	187.982.100,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	182.271.251,00						1 Paket	212.271.251,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	81.852.626,00						1 Paket	31.852.626,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	50.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						65.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	50.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						992.400.000,00					PERANGKAT DAERAH		241.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						992.400.000,00					PERANGKAT DAERAH		241.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	826.400.000,00						1 Unit	125.000.000,00	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						550.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	550.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						4.571.164.137,00					PERANGKAT DAERAH		4.450.164.137,00	
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.571.164.137,00					PERANGKAT DAERAH		4.450.164.137,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	879.416.083,00						1 Laporan	819.416.083,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	46.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	45.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.092.600.000,00					PERANGKAT DAERAH		1.020.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.092.600.000,00					PERANGKAT DAERAH		1.020.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	3 Unit	147.100.000,00						3 Unit	147.100.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	425.000.000,00						8 Unit	425.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	90.000.000,00						1 Unit	90.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	155.000.000,00						1 Unit	132.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	225.000.000,00						1 Unit	225.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		8 Unit	15.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Unit	10.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.569.178.532,00					PERANGKAT DAERAH		1.780.451.177,00	
		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.569.178.532,00					PERANGKAT DAERAH		1.780.451.177,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						60.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
		UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR						**1.650.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.650.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1.650.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
42.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**35.540.931.696,52**							**33.240.931.696,52**	
		Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel						***935.000.000,00***							***324.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	935.000.000,00						BB Predikat	324.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	88.64 Indeks		85.38 Indeks	86.23 Indeks	935.000.000,00						87.09 Indeks	324.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	88.90 Indeks		88.80 Indeks	88.83 Indeks	935.000.000,00						88.85 Indeks	324.000.000,00	
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.695.238,00					PERANGKAT DAERAH		240.695.238,00	
		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.695.238,00					PERANGKAT DAERAH		240.695.238,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang		11 Orang	11 Orang	173.045.000,00						11 Orang	163.045.000,00	
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang		11 Orang	3 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		11 Orang	50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.569.178.532,00					PERANGKAT DAERAH		1.780.451.177,00	
		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.569.178.532,00					PERANGKAT DAERAH		1.780.451.177,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.110.727.355,00						1 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	220.982.100,00						1 Paket	187.982.100,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	182.271.251,00						1 Paket	212.271.251,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	306.223.200,00						1 Paket	206.223.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	115.153.600,00						1 Paket	115.153.600,00	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	70.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						90.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	80.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						240.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						992.400.000,00					PERANGKAT DAERAH		241.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						992.400.000,00					PERANGKAT DAERAH		241.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	1.000.000,00						1 Unit	1.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	826.400.000,00						1 Unit	125.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	5.000.000,00						1 Unit	5.000.000,00	
	1.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	1.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						56.400.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	56.400.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	5.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	5.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						4.571.164.137,00					PERANGKAT DAERAH		4.450.164.137,00	
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.571.164.137,00					PERANGKAT DAERAH		4.450.164.137,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	879.416.083,00						1 Laporan	819.416.083,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.610.293.854,00						1 Laporan	3.558.293.854,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	46.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.454.200,00						1 Laporan	26.454.200,00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	5.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	15.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	1.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.000.000,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	48.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.092.600.000,00					PERANGKAT DAERAH		1.020.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.092.600.000,00					PERANGKAT DAERAH		1.020.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit		0 Unit	2 Unit	50.500.000,00						2 Unit	500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	3 Unit	147.100.000,00						3 Unit	147.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	425.000.000,00						8 Unit	425.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	90.000.000,00						1 Unit	90.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	155.000.000,00						1 Unit	132.400.000,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			8 Unit	10.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.100.000,00							37.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	1 Unit	37.100.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Unit	37.100.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						500.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit		0 Unit	1 Unit	500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	500.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	15.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00							7.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	7.400.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
43.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**75.175.000.000,00**							**5.000.000.000,00**	
		Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.18 %		27.27 %	9.09 %	150.000.000,00						9.09 %	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Penataan Bangunan dan Lingkungan diKawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						75.175.000.000,00					MASYARAKAT		5.000.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1 kabupaten/ kota		0 kabupaten/ kota	0 kabupaten/ kota	350.000.000,00						1 kabupaten/ kota	1.050.000.000,00	
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan		3 Kawasan	1 Kawasan	73.600.000.000,00						1 Kawasan	2.900.000.000,00	
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1 kabupaten/ kota		0 kabupaten/ kota	1 kabupaten/ kota	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 kabupaten/ kota	50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan		3 Kawasan	1 Kawasan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Kawasan	100.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						75.175.000.000,00					MASYARAKAT		5.000.000.000,00	
		Terpenuhinya Penataan Bangunan dan Lingkungan diKawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						75.175.000.000,00					MASYARAKAT		5.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.025.000.000,00						-	1.050.000.000,00	
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
44.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**30.450.000.000,00**							**26.300.000.000,00**	
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman						***450.000.000,00***							***350.000.000,00***	
			1.Persentase Jalan Kondisi Mantap	82.81 %		82.18 %	82.29 %	450.000.000,00						82.40 %	350.000.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						30.450.000.000,00					MASYARAKAT		26.300.000.000,00	
		Terpenuhinya Jalan Provinsi Kondisi Mantap						30.450.000.000,00					MASYARAKAT		26.300.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun	0.19 KM		0.15 KM	0.15 KM	2.100.000.000,00						0.15 KM	2.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	5.87 KM		4.41 KM	4.60 KM	5.350.000.000,00						4.70 KM	5.350.000.000,00	
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						350.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	5.87 KM		4.41 KM	3 KM	350.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4.70 KM	350.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan						100.000.000,00							0,00	
		&Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0.19 KM		0.15 KM	1 KM	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.15 KM	0,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						**109.250.799.431,78**							**40.963.725.999,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**109.250.799.431,78**							**40.963.725.999,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**109.250.799.431,78**							**40.963.725.999,00**	
45.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.793.575.064,78**							**19.579.625.999,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						***13.013.575.064,78***							***18.279.625.999,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		A Predikat	A Predikat	13.013.575.064,78						A Predikat	18.279.625.999,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	87.39 Indeks		79.50 Indeks	81.74 Indeks	13.013.575.064,78						83.91 Indeks	18.279.625.999,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	85.25 Indeks		85.00 Indeks	85.10 Indeks	13.013.575.064,78						85.15 Indeks	18.279.625.999,00	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						230.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Tersedianya Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						230.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	300.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.993.575.064,78					-		15.099.625.999,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.993.575.064,78					-		15.099.625.999,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ Bulan		84 Orang/ Bulan	84 Orang/ Bulan	11.793.575.064,78						84 Orang/ Bulan	13.499.625.999,00	
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.793.575.064,78							13.499.625.999,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ Bulan		84 Orang/ Bulan	84 Orang/ Bulan	11.793.575.064,78	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		84 Orang/ Bulan	13.499.625.999,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						150.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						60.000.000,00					-		150.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						60.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00					-		125.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00					-		125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		5 Orang	15 Orang	50.000.000,00						15 Orang	75.000.000,00	
	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		5 Orang	10 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Orang	75.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						365.000.000,00					-		970.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah						365.000.000,00					-		970.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						0 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	180.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						130.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						95.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						95.000.000,00					-		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						825.000.000,00					-		2.260.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						825.000.000,00					-		2.260.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	360.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00						1 Laporan	1.870.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						300.000.000,00							360.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	360.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						500.000.000,00							1.870.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.870.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						155.000.000,00					-		275.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						155.000.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		1 Unit	5 Unit	20.000.000,00						5 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		1 Unit	2 Unit	25.000.000,00						2 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		1 Unit	5 Unit	20.000.000,00						5 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		1 Unit	2 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		1 Unit	5 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	25.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		1 Unit	5 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	25.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
46.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**1.000.000.000,00**							**984.000.000,00**	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah						***950.000.000,00***							***834.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %		100 %	100 %	950.000.000,00						100 %	834.000.000,00	
			2.Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %		100 %	100 %	950.000.000,00						100 %	834.000.000,00	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						46.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						46.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani						26.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang		10 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang		10 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						854.000.000,00					-		784.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						854.000.000,00					-		784.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	0 Unit Rumah		5 Unit Rumah	0 Unit Rumah	550.000.000,00						0 Unit Rumah	0,00	
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	2 Unit Rumah		0 Unit Rumah	2 Unit Rumah	220.000.000,00						2 Unit Rumah	700.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga	60.000.000,00						5 Rumah Tangga	60.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	2 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga	2 Rumah Tangga	24.000.000,00						2 Rumah Tangga	24.000.000,00	
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						550.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	0 Unit Rumah		5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	550.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit Rumah	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Pen ugasan	-	-		5 Rumah Tangga	60.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi						220.000.000,00							700.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	2 Unit Rumah		0 Unit Rumah	2 Unit Rumah	220.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afir masi-Penyediaan Rumah Khusus	-	-		2 Unit Rumah	700.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.03.0010	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	2 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga	2 Rumah Tangga	24.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Pen ugasan	-	-		2 Rumah Tangga	24.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						50.000.000,00					-		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
47.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**2.700.000.000,00**							**6.600.100.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						***2.550.000.000,00***							***6.550.050.000,00***	
			1.Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	20.16 %		5.50 %	9.17 %	2.550.000.000,00						12.83 %	6.550.050.000,00	
			2.Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	100 Unit		100 Unit	100 Unit	2.550.000.000,00						100 Unit	6.550.050.000,00	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						150.000.000,00					-		50.100.000,00	
		Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						150.000.000,00					-		50.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang		10 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	50.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Rumah Tangga		10 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	50.000.000,00						50 Rumah Tangga	50.000.000,00	
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						50.000.000,00							50.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh						50.000.000,00							50.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang		10 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Rumah Tangga		10 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	-	-		50 Rumah Tangga	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						2.550.000.000,00					-		6.550.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						2.550.000.000,00					-		6.550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	10 Unit Rumah		20 Unit Rumah	10 Unit Rumah	700.000.000,00						10 Unit Rumah	2.000.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	90 Unit Rumah		80 Unit Rumah	90 Unit Rumah	1.800.000.000,00						90 Unit Rumah	4.500.000.000,00	
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1.800.000.000,00							4.500.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	90 Unit Rumah		80 Unit Rumah	36 Unit Rumah	1.800.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90 Unit Rumah	4.500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						700.000.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	10 Unit Rumah		20 Unit Rumah	3 Unit Rumah	700.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	-	-		10 Unit Rumah	2.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
48.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**91.757.224.367,00**							**13.800.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman						***91.707.224.367,00***							***13.750.000.000,00***	
			1.Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	54.25 %		53.25 %	53.50 %	91.707.224.367,00						53.75 %	13.750.000.000,00	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						91.757.224.367,00					-		13.800.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						91.757.224.367,00					-		13.800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	60 Lokasi		200 Lokasi	50 Lokasi	89.657.224.367,00						50 Lokasi	13.000.000.000,00	
			Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	10 Lokasi		150 Lokasi	10 Lokasi	1.500.000.000,00						10 Lokasi	500.000.000,00	
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman						500.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman						1.500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	10 Lokasi		150 Lokasi	10 Lokasi	1.500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Lokasi	500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman						89.657.224.367,00							13.000.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	60 Lokasi		200 Lokasi	601 Lokasi	89.657.224.367,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Lokasi	13.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**9.858.131.874,70**							**12.943.005.946,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.858.131.874,70**							**12.943.005.946,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**9.858.131.874,70**							**12.943.005.946,00**	
49.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.858.231.874,70**							**9.750.615.103,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						***8.643.231.874,70***							***9.340.615.103,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	8.643.231.874,70						BB Predikat	9.340.615.103,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	92 Indeks		88 Indeks	89 Indeks	8.643.231.874,70						90 Indeks	9.340.615.103,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	91.50 Indeks		88.00 Indeks	89.50 Indeks	8.643.231.874,70						90.00 Indeks	9.340.615.103,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00					Pemerintah		220.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00					Pemerintah		220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00						3 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00						2 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	30.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		3 Dokumen	160.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Laporan	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.049.695.536,70					Pemerintah dan ASN		8.140.615.103,00	
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.049.695.536,70					Pemerintah dan ASN		8.140.615.103,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	186.563.662,00						2 Dokumen	266.563.662,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00						2 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan		59 Orang/ Bulan	59 Orang/ Bulan	7.858.131.874,70						59 Orang/ Bulan	7.834.051.441,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.858.131.874,70							7.834.051.441,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan		59 Orang/ Bulan	59 Orang/ Bulan	7.858.131.874,70	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		59 Orang/ Bulan	7.834.051.441,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						186.563.662,00							266.563.662,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	186.563.662,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Dokumen	266.563.662,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						5.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Pemerintah dan ASN		80.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Pemerintah dan ASN		80.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		3 Orang	3 Orang	0,00						4 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		3 Orang	3 Orang	0,00						4 Orang	40.000.000,00	
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		3 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Orang	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		3 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Orang	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						225.000.000,00					Pemerintah dan ASN		440.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						225.000.000,00					Pemerintah dan ASN		440.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	180.000.000,00						2 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		0 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00						2 Paket	20.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Paket	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Paket	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Paket	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						180.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	180.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						152.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		160.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						152.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		160.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	152.000.000,00						2 Unit	160.000.000,00	
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						152.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	152.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Unit	160.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						182.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		320.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						182.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		320.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	180.000.000,00						2 Laporan	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00						2 Laporan	110.000.000,00	
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						180.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	180.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	210.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	110.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						169.536.338,00					Pemerintah dan Masyarakat		390.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						169.536.338,00					Pemerintah dan Masyarakat		390.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						2 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		2 Unit	3 Unit	20.000.000,00						3 Unit	140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	141.000.000,00						22 Unit	170.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		25 Unit	30 Unit	8.536.338,00						37 Unit	40.000.000,00	
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						141.000.000,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	141.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		22 Unit	170.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.536.338,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		25 Unit	15 Unit	8.536.338,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		37 Unit	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Unit	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		3 Unit	140.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
50.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**999.900.000,00**							**3.192.390.843,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan saat Pasca Bencana						***914.900.000,00***							***2.102.390.843,00***	
			2.Indeks Pencegahan Bencana	2.88 Indeks		2.72 Indeks	2.76 Indeks	914.900.000,00						2.80 Indeks	2.102.390.843,00	
			3.Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.38 Indeks		0.29 Indeks	0.31 Indeks	914.900.000,00						0.33 Indeks	2.102.390.843,00	
			4.Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.68 Indeks		0.55 Indeks	0.58 Indeks	914.900.000,00						0.61 Indeks	2.102.390.843,00	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi						180.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi						180.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	500 Orang		60 Orang	40 Orang	0,00						40 Orang	100.000.000,00	
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi						180.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	500 Orang		60 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kab. Kepulauan Anambas || Kecamatan Siantan || Kelurahan Terempa || 0 || Provinsi Kepulauan Riau || Kab. Lingga || Kecamatan Lingga || Kelurahan Daik || 0 || Provinsi Kepulauan Riau || Kab. Natuna || Kecamatan Bunguran Timur || Kelurahan Ranai Kota || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		40 Orang	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						203.900.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						203.900.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.200.000.000,00	
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.300.000,00						1 Kegiatan	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	78.300.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	400 Keluarga		50 Keluarga	80 Keluarga	0,00						200 Keluarga	250.000.000,00	
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	7 Kawasan		0 Kawasan	1 Kawasan	0,00						2 Kawasan	150.000.000,00	
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	60 Orang		40 Orang	40 Orang	15.300.000,00						40 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	50 Orang		0 Orang	40 Orang	0,00						40 Orang	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang		60 Orang	40 Orang	0,00						40 Orang	100.000.000,00	
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	7 Kawasan		0 Kawasan	0 Kawasan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Kawasan	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	50 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		40 Orang	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi						78.300.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	78.300.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana						25.300.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.300.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Kegiatan	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana						15.300.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	60 Orang		40 Orang	20 Orang	15.300.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		40 Orang	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	400 Keluarga		50 Keluarga	0 Keluarga	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		200 Keluarga	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						10.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	4 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						0,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang		60 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		40 Orang	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						308.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		870.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						308.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		870.000.000,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Orang		0 Orang	20 Orang	0,00						40 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang		170 Orang	180 Orang	158.000.000,00						300 Orang	480.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	140.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	2 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana						10.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		40 Orang	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	2 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						158.000.000,00							480.000.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang		170 Orang	75 Orang	158.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		300 Orang	480.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana						140.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	140.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Laporan	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						308.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.022.390.843,00	
		Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						308.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.022.390.843,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	60 Orang		50 Orang	40 Orang	25.000.000,00						40 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	4 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						3 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan	3 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	7 kabupaten/ kota		7 kabupaten/ kota	7 kabupaten/ kota	25.000.000,00						7 kabupaten/ kota	60.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	150 Keluarga		40 Keluarga	40 Keluarga	0,00						80 Keluarga	200.000.000,00	
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	50 Lembaga		0 Lembaga	40 Lembaga	33.000.000,00						40 Lembaga	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	62.390.843,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	2 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00						1 Kegiatan	50.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						0,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	150 Keluarga		40 Keluarga	0 Keluarga	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		80 Keluarga	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi						175.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	4 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		3 Dokumen	350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	2 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Kegiatan	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi						33.000.000,00							80.000.000,00	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	50 Lembaga		0 Lembaga	20 Lembaga	33.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		40 Lembaga	80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi						25.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	60 Orang		50 Orang	40 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		40 Orang	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah						0,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah dan dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	3 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						0,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota						25.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	7 kabupaten/ kota		7 kabupaten/ kota	7 kabupaten/ kota	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		7 kabupaten/ kota	60.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor						25.000.000,00							62.390.843,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi atau kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	62.390.843,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran						**24.508.966.284,17**							**26.103.939.305,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**24.508.966.284,17**							**26.103.939.305,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**24.508.966.284,17**							**26.103.939.305,00**	
51.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**22.986.966.284,17**							**22.531.303.952,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau						***22.617.966.284,17***							***21.236.303.952,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	22.617.966.284,17						BB Predikat	21.236.303.952,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86,52 Indeks		84,71 Indeks	85,10 Indeks	22.617.966.284,17						85,36 Indeks	21.236.303.952,00	
			3.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	85.26 Indeks		79.19 Indeks	80.88 Indeks	22.617.966.284,17						82.35 Indeks	21.236.303.952,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00					Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		350.000.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00					Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		350.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	25.000.000,00						1 Data	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00						2 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00						6 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						75.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Dokumen	125.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						75.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		6 Laporan	125.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Data	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.606.966.284,17					Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.319.164.859,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.606.966.284,17					Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.319.164.859,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	34.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00						4 Dokumen	401.010.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/ Bulan		216 Orang/ Bulan	216 Orang/ Bulan	21.008.966.284,17						216 Orang/ Bulan	18.768.154.859,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						21.008.966.284,17							18.768.154.859,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/ Bulan		216 Orang/ Bulan	212 Orang/ Bulan	21.008.966.284,17	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		216 Orang/ Bulan	18.768.154.859,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						500.000.000,00							401.010.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Dokumen	401.010.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						34.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	34.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Dokumen	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						34.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						30.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Dokumen	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						50.000.000,00					Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000,00					Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		250.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	50.000.000,00	
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						50.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						50.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Orang	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						435.000.000,00					Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		795.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						435.000.000,00					Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		795.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00						4 Laporan	600.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	25.000.000,00						4 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						70.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Paket	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						300.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Laporan	600.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Dokumen	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah		450.000.000,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah		450.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Unit	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						445.000.000,00					Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		322.000.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						445.000.000,00					Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		322.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	160.000.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	235.000.000,00						4 Laporan	72.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						160.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	160.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Laporan	200.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						235.000.000,00							72.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	235.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Laporan	72.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.000.000,00					Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		995.139.093,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00					Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		995.139.093,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	0,00						21 Unit	281.814.093,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	100.000.000,00						4 Unit	63.325.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		45 Unit	45 Unit	50.000.000,00						45 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha		1 Ha	1 Ha	0,00						1 Ha	100.000.000,00	
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							63.325.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Unit	63.325.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							281.814.093,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		21 Unit	281.814.093,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		45 Unit	45 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		45 Unit	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Unit	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha		1 Ha	1 Ha	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Ha	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
52.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.322.000.000,00**							**1.762.635.353,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat						***1.067.000.000,00***							***837.635.353,00***	
			1.Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %		100 %	100 %	1.067.000.000,00						100 %	837.635.353,00	
			3.Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	4,87 %		2,71 %	3,25 %	1.067.000.000,00						3,79 %	837.635.353,00	
			3.Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya	100,00 %		71,36 %	79,55 %	1.067.000.000,00						89,55 %	837.635.353,00	
			4.Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan	100 %		100 %	100 %	1.067.000.000,00						100 %	837.635.353,00	
			5.Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	77.84 (%)		74.36 (%)	75.23 (%)	1.067.000.000,00						76.10 (%)	837.635.353,00	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1.172.000.000,00					Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1.137.635.353,00	
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.172.000.000,00					Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1.137.635.353,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	15 Orang		15 Orang	18 Orang	100.000.000,00						22 Orang	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Pembentukaan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00						4 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	280.000.000,00						4 laporan	277.635.353,00	
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00						4 Laporan	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit		5 Unit	5 Unit	512.000.000,00						5 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00						50 Orang	150.000.000,00	
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP						0,00							25.000.000,00	
		Terbentuknya Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SK Pembentukaan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi						0,00							25.000.000,00	
		Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Laporan	75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						280.000.000,00							277.635.353,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	280.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 laporan	277.635.353,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.01.0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi						75.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Laporan	75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	15 Orang		15 Orang	18 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		22 Orang	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.01.0025	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.01.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						512.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit		5 Unit	5 Unit	512.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		5 Unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						100.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		50 Orang	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur						80.000.000,00					Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		350.000.000,00	
		Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur						80.000.000,00					Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Laporan	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						30.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.02.0011	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi						70.000.000,00					Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		275.000.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi						70.000.000,00					Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		275.000.000,00	
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan		1 laporan	1 laporan	0,00						1 laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah						0,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Dokumen	30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan		1 laporan	1 laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 laporan	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						40.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.02.1.03.0008	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
53.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**200.000.000,00**							**1.810.000.000,00**	
		Meningkatnya Pencegahan kebakaran						***120.000.000,00***							***1.380.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	85.71 Persentase		28.57 Persentase	42.86 Persentase	120.000.000,00						57.14 Persentase	1.380.000.000,00	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran						170.000.000,00					Meningkatnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		1.710.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran						170.000.000,00					Meningkatnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		1.710.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga		0 Keluarga	0 Keluarga	0,00						0 Keluarga	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan		1 laporan	1 laporan	0,00						1 laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit		1 Unit	5 Unit	40.000.000,00						5 Unit	900.000.000,00	
			Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	40 Orang		40 Orang	40 Orang	0,00						40 Orang	100.000.000,00	
	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran						40.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga		0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Keluarga	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran						0,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota						0,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan		1 laporan	1 laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 laporan	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran						0,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota						50.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						40.000.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		5 Unit	900.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.01.0039	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	40 Orang		40 Orang	40 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		40 Orang	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						30.000.000,00					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakara		100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						30.000.000,00					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakara		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	40.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						0,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	40.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	1.05.04.1.02.0005	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						0,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
		Dinas Sosial						**23.482.343.071,83**							**123.814.285.402,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**23.482.343.071,83**							**123.814.285.402,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**23.482.343.071,83**							**123.814.285.402,00**	
54.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**14.380.012.257,83**							**116.853.467.229,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial						***14.121.012.257,83***							***116.281.700.269,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	14.121.012.257,83						BB Predikat	116.281.700.269,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	83.30 Indeks		83.30 Indeks	83.30 Indeks	14.121.012.257,83						83.30 Indeks	116.281.700.269,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						560.000.000,00					-		450.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						560.000.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	170.000.000,00	
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						300.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	170.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.146.012.257,83					-		114.320.696.269,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.146.012.257,83					-		114.320.696.269,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	507.758.000,00						1 Dokumen	580.212.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	768 Orang/ Bulan		768 Orang/ Bulan	768 Orang/ Bulan	11.638.254.257,83						768 Orang/ Bulan	113.740.484.269,00	
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.638.254.257,83							113.740.484.269,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	768 Orang/ Bulan		768 Orang/ Bulan	804 Orang/ Bulan	11.638.254.257,83	Provinsi Kepulauan Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		768 Orang/ Bulan	113.740.484.269,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						507.758.000,00							580.212.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	507.758.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	580.212.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						132.750.000,00					-		160.133.480,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						132.750.000,00					-		160.133.480,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	132.750.000,00						1 Dokumen	160.133.480,00	
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						71.750.000,00							71.750.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	71.750.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	71.750.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						86.000.000,00					-		82.600.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						86.000.000,00					-		82.600.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	61.000.000,00						1 Paket	57.600.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	25.000.000,00						5 Orang	25.000.000,00	
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						61.000.000,00							57.600.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	61.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	57.600.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						741.750.000,00					-		972.204.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						741.750.000,00					-		972.204.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00						1 Laporan	21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	528.850.000,00						1 Laporan	724.304.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.000.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	74.900.000,00						1 Paket	74.900.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	37.000.000,00						1 Paket	47.000.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	15.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						32.000.000,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	32.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	32.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	60.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						74.900.000,00							74.900.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	74.900.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	74.900.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	6.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						508.850.000,00							654.304.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	508.850.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	654.304.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						169.000.000,00					-		225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						169.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.000.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	90.000.000,00						1 Unit	85.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	67.000.000,00						8 Unit	85.000.000,00	
	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						90.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	85.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						12.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						67.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	67.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	70.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						304.500.000,00					-		404.883.480,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						304.500.000,00					-		404.883.480,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	133.000.000,00						1 Laporan	135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	136.500.000,00						1 Laporan	234.883.480,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00						1 Laporan	35.000.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						110.000.000,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	115.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						36.500.000,00							36.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	36.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	36.500.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						240.000.000,00					-		237.950.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						240.000.000,00					-		237.950.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	45.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	165.000.000,00						5 Unit	162.950.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		44 Unit	44 Unit	25.000.000,00						44 Unit	30.000.000,00	
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						165.000.000,00							162.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	4 Unit	165.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	162.950.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		44 Unit	44 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		44 Unit	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	45.000.000,00	Dinas Sosial
55.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**1.610.000.000,00**							**1.990.200.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial						***1.610.000.000,00***							***1.990.200.000,00***	
			1.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	42.35 %		1.57 %	42.35 %	1.610.000.000,00						42.35 %	1.990.200.000,00	
			2.Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	2.38 %		2.38 %	2.38 %	1.610.000.000,00						2.38 %	1.990.200.000,00	
			3.Persentase Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 %		100 %	100 %	1.610.000.000,00						100 %	1.990.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						10.000.000,00					-		25.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						10.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						1.600.000.000,00					-		1.965.200.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						1.600.000.000,00					-		1.965.200.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	8 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	700.000.000,00						8 Lembaga	480.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1250 Orang		1250 Orang	1250 Orang	500.000.000,00						1250 Orang	1.165.200.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	108 Orang		4 Orang	108 Orang	400.000.000,00						108 Orang	320.000.000,00	
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi						700.000.000,00							480.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	8 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	700.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Lembaga	480.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi						400.000.000,00							320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	108 Orang		4 Orang	108 Orang	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		108 Orang	320.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						500.000.000,00							1.165.200.000,00	
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1250 Orang		1250 Orang	1250 Orang	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1250 Orang	1.165.200.000,00	Dinas Sosial
56.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**1.563.000.000,00**							**2.442.383.480,00**	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial						***792.500.000,00***							***850.000.000,00***	
			1.Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	792.500.000,00						100 %	850.000.000,00	
			2.Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	792.500.000,00						100 %	850.000.000,00	
			3.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	792.500.000,00						100 %	850.000.000,00	
			4.Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	792.500.000,00						100 %	850.000.000,00	
			5.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	792.500.000,00						100 %	850.000.000,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti						71.500.000,00					-		256.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						71.500.000,00					-		256.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	1.000.000,00						3 Orang	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	12 Orang		1 Orang	12 Orang	5.000.000,00						12 Orang	18.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	2.000.000,00						1 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	2.000.000,00						1 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	65 Orang		65 Orang	65 Orang	2.500.000,00						65 Orang	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	65 Orang		65 Orang	65 Orang	32.000.000,00						65 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	65 Orang		65 Orang	65 Orang	5.000.000,00						65 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	65 Orang		Orang	65 Orang	1.000.000,00						65 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	1.000.000,00						3 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	65 Orang		65 Orang	65 Orang	2.000.000,00						65 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	65 Orang		65 Orang	65 Orang	3.000.000,00						65 Orang	25.000.000,00	
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan						32.000.000,00							90.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	65 Orang		65 Orang	65 Orang	32.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		65 Orang	90.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang						5.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	65 Orang		65 Orang	65 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		65 Orang	40.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	65 Orang		Orang	65 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		65 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu						5.000.000,00							18.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	12 Orang		1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Orang	18.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						2.500.000,00							8.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	65 Orang		65 Orang	65 Orang	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		65 Orang	8.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						3.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	65 Orang		65 Orang	65 Orang	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		65 Orang	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						2.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	65 Orang		65 Orang	65 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		65 Orang	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	1 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	1 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti						850.500.000,00					-		904.383.480,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						850.500.000,00					-		904.383.480,00	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	10 Orang		5 Orang	5 Orang	10.000.000,00						5 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	2.000.000,00						3 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	1.000.000,00						3 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	2.000.000,00						3 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	2.000.000,00						3 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	5.000.000,00						310 Orang	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	65.000.000,00						310 Orang	224.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	257.500.000,00						310 Orang	315.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	2.000.000,00						10 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	2.000.000,00						310 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	300.000.000,00						310 Orang	60.000.000,00	
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	10 Orang		5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		310 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		310 Orang	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						300.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		310 Orang	60.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						2.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		310 Orang	60.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						1.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	1 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	1 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	1 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan						45.000.000,00							184.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		310 Orang	184.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	1 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	1 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						167.000.000,00					-		261.000.000,00	
		Terlaksanannya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						167.000.000,00					-		261.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	2.000.000,00						3 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	4 Orang		4 Orang	4 Orang	5.000.000,00						4 Orang	16.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	2.000.000,00						3 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	2.000.000,00						3 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	2.000.000,00						103 Orang	16.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	20.000.000,00						103 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	10.000.000,00						103 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	1.000.000,00						103 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	1.000.000,00						3 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	2 Orang		2 Orang	2 Orang	5.000.000,00						2 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	2.000.000,00						103 Orang	22.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	100.000.000,00						103 Orang	22.000.000,00	
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan						20.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		103 Orang	60.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang						10.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		103 Orang	60.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						1.000.000,00							10.000.000,00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		103 Orang	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu						5.000.000,00							16.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	4 Orang		4 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	16.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						2.000.000,00							16.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		103 Orang	16.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						100.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		103 Orang	22.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						2.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	103 Orang		103 Orang	103 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		103 Orang	22.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	1 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	1 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan						5.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	2 Orang		2 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	1 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	3 Orang		3 Orang	1 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						44.000.000,00					-		96.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						44.000.000,00					-		96.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	15.000.000,00						10 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.000.000,00						10 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1.000.000,00						1 Orang	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.000.000,00						10 Orang	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	5.500.000,00						10 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.500.000,00						10 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	10 Orang		Orang	10 Orang	1.000.000,00						10 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1.000.000,00						1 Orang	2.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.000.000,00						10 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.000.000,00						10 Orang	10.000.000,00	
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan						5.500.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	5.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang						1.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	10 Orang		Orang	10 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						1.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						1.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar						1.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis						1.000.000,00							2.000.000,00	
		TTerpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						430.000.000,00					-		925.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						430.000.000,00					-		925.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	20.000.000,00						25 Orang	50.000.000,00	
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Sosial
57.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**6.434.830.814,00**							**3.271.385.133,00**	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial						***6.434.830.814,00***							***3.271.385.133,00***	
			1.Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	3.89 %		0.40 %	3.22 %	6.434.830.814,00						3.65 %	3.271.385.133,00	
			2.Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin	100 %		100 %	100 %	6.434.830.814,00						100 %	3.271.385.133,00	
			3.Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	0.19 %		0.01 %	0.13 %	6.434.830.814,00						0.16 %	3.271.385.133,00	
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						6.434.830.814,00					-		3.271.385.133,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						6.434.830.814,00					-		3.271.385.133,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	7 Kab/Kota		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	1.514.830.814,00						7 Kab/Kota	871.100.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	890 Orang		26 Orang	130 Orang	2.950.000.000,00						317 Orang	1.236.514.867,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	8885 Orang		850 Orang	2040 Orang	1.920.000.000,00						4670 Orang	1.163.770.266,00	
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						2.950.000.000,00							1.236.514.867,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	890 Orang		26 Orang	692 Orang	2.950.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		317 Orang	1.236.514.867,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						1.920.000.000,00							1.163.770.266,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	8885 Orang		850 Orang	9390 Orang	1.920.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4670 Orang	1.163.770.266,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						1.514.830.814,00							871.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	7 Kab/Kota		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	1.514.830.814,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Kab/Kota	871.100.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						6.434.830.814,00					-		3.271.385.133,00	
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	1.06.05.1.02.0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin						50.000.000,00							0,00	
		Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Sosial
58.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**318.000.000,00**							**784.000.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana						***318.000.000,00***							***784.000.000,00***	
			1.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %		100 %	100 %	318.000.000,00						100 %	784.000.000,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						318.000.000,00					-		784.000.000,00	
		Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						318.000.000,00					-		784.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	500 Keluarga		100 Keluarga	100 Keluarga	0,00						200 Keluarga	20.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	500 Orang		100 Orang	100 Orang	116.000.000,00						200 Orang	224.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	500 Orang		100 Orang	100 Orang	30.000.000,00						200 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	500 Orang		100 Orang	100 Orang	20.000.000,00						200 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	500 Orang		100 Orang	100 Orang	145.000.000,00						200 Orang	360.000.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	100 Orang		20 Orang	20 Orang	7.000.000,00						40 Orang	30.000.000,00	
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan						145.000.000,00							360.000.000,00	
		Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	500 Orang		100 Orang	100 Orang	145.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	360.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	500 Orang		100 Orang	50 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						116.000.000,00							224.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	500 Orang		100 Orang	100 Orang	116.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	224.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	500 Orang		100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						7.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	100 Orang		20 Orang	20 Orang	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	30.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.06.1.01.0017	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	500 Keluarga		100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Keluarga	20.000.000,00	Dinas Sosial
59.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**25.000.000,00**							**25.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan						***25.000.000,00***							***25.000.000,00***	
			1.Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	11.11 %		11.11 %	11.11 %	25.000.000,00						11.11 %	25.000.000,00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						25.000.000,00					-		25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						25.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam		1 Makam	1 Makam	25.000.000,00						1 Makam	25.000.000,00	
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam		1 Makam	1 Makam	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	-	-		1 Makam	25.000.000,00	Dinas Sosial
		UPTD Sosial						**848.500.000,00**							**1.552.150.440,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**848.500.000,00**							**1.552.150.440,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**848.500.000,00**							**1.552.150.440,00**	
60.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**14.380.012.257,83**							**116.853.467.229,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial						***219.000.000,00***							***436.766.960,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	219.000.000,00						BB Predikat	436.766.960,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	83.30 Indeks		83.30 Indeks	83.30 Indeks	219.000.000,00						83.30 Indeks	436.766.960,00	
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						132.750.000,00					-		160.133.480,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						132.750.000,00					-		160.133.480,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	132.750.000,00						1 Dokumen	160.133.480,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						61.000.000,00							88.383.480,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	61.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	88.383.480,00	UPTD Sosial
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						741.750.000,00					-		972.204.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						741.750.000,00					-		972.204.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00						1 Laporan	21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	528.850.000,00						1 Laporan	724.304.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.000.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	37.000.000,00						1 Paket	47.000.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	15.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						20.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	70.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						169.000.000,00					-		225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						169.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.000.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	67.000.000,00						8 Unit	85.000.000,00	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	15.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						304.500.000,00					-		404.883.480,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						304.500.000,00					-		404.883.480,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	133.000.000,00						1 Laporan	135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	136.500.000,00						1 Laporan	234.883.480,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00						1 Laporan	35.000.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.000.000,00							198.383.480,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	198.383.480,00	UPTD Sosial
61.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**1.563.000.000,00**							**2.442.383.480,00**	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial						***614.500.000,00***							***1.065.383.480,00***	
			1.Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	614.500.000,00						100 %	1.065.383.480,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	614.500.000,00						100 %	1.065.383.480,00	
			3.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	614.500.000,00						100 %	1.065.383.480,00	
			4.Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	614.500.000,00						100 %	1.065.383.480,00	
			5.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	614.500.000,00						100 %	1.065.383.480,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti						850.500.000,00					-		904.383.480,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						850.500.000,00					-		904.383.480,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	65.000.000,00						310 Orang	224.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	310 Orang	257.500.000,00						310 Orang	315.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		Orang	Orang	187.000.000,00						Orang	160.383.480,00	
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang						7.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	10 Orang	7.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		310 Orang	15.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						187.000.000,00							160.383.480,00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		Orang	10 Orang	187.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Orang	160.383.480,00	UPTD Sosial
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan						20.000.000,00							40.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1000 Orang		310 Orang	10 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		310 Orang	40.000.000,00	UPTD Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						430.000.000,00					-		925.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						430.000.000,00					-		925.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	-	400.000.000,00						-	750.000.000,00	
			Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	-		-	-	0,00						-	90.000.000,00	
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan						400.000.000,00							750.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-		-	320 Orang	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	750.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal						0,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	90.000.000,00	UPTD Sosial
	1.06.04.1.05.0018	Pemulasaraan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pemulasaraan bagi penyandang disabilitas kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	UPTD Sosial
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi						**32.183.180.234,50**							**34.830.178.193,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.118.180.234,50**							**34.155.178.193,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**32.118.180.234,50**							**34.155.178.193,00**	
62.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.889.179.186,50**							**31.031.776.961,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi						***30.307.152.234,50***							***29.979.550.393,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	30.307.152.234,50						BB Predikat	29.979.550.393,00	
			2.Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	79,55 Indeks		79,19 Indeks	79,25 Indeks	30.307.152.234,50						79,33 Indeks	29.979.550.393,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	87,10 Indeks		86,45 Indeks	86,57 Indeks	30.307.152.234,50						86,68 Indeks	29.979.550.393,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		115.000.000,00	
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi						50.000.000,00					-		115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00						3 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00						5 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00						3 Laporan	25.000.000,00	
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	45.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						15.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	45.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						29.294.532.234,50					-		27.175.725.002,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						29.294.532.234,50					-		27.175.725.002,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						37 Dokumen	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						37 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	864.240.000,00						12 Dokumen	864.240.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00						37 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00						37 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/ Bulan		106 Orang/ Bulan	106 Orang/ Bulan	28.410.292.234,50						106 Orang/ Bulan	26.231.485.002,00	
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						28.410.292.234,50							26.231.485.002,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/ Bulan		106 Orang/ Bulan	135 Orang/ Bulan	28.410.292.234,50	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		106 Orang/ Bulan	26.231.485.002,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						864.240.000,00							864.240.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	864.240.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	864.240.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55.000.000,00					-		185.000.000,00	
		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu						55.000.000,00					-		185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang		135 Orang	135 Orang	5.000.000,00						320 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	85.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	5.000.000,00						30 Orang	25.000.000,00	
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						40.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	85.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Orang	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang		135 Orang	135 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		320 Orang	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						384.000.000,00					-		628.560.200,00	
		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						384.000.000,00					-		628.560.200,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	5.000.000,00						72 Dokumen	55.080.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	10.000.000,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	215.000.000,00						110 Laporan	275.899.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	105.474.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	47.106.100,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	35.000.000,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	15.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							85.474.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	85.474.600,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							25.106.100,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.106.100,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00							55.080.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		72 Dokumen	55.080.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						200.000.000,00							255.899.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	50 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		110 Laporan	255.899.500,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						80.000.000,00					-		445.000.000,00	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu						80.000.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	Paket	30.000.000,00						Paket	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1 Unit	Unit	0,00						1 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	30.000.000,00						4 Unit	65.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	Unit	20.000.000,00						1 Unit	30.000.000,00	
	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	350.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						850.646.952,00					-		2.132.491.759,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						850.646.952,00					-		2.132.491.759,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	456.902.000,00						1 Laporan	500.702.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	333.674.952,00						1 Laporan	1.564.719.759,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.070.000,00						2 Laporan	47.070.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	20.000.000,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						230.000.000,00							238.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	238.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.620.000,00							32.620.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	32.620.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	32.620.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						300.000.000,00							1.261.645.191,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.261.645.191,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						175.000.000,00					-		350.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						175.000.000,00					-		350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00						2 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00						10 Unit	190.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	10.000.000,00						8 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00						2 Unit	25.000.000,00	
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.000.000,00							190.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	190.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	5 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	70.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
63.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**40.000.000,00**							**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya informasi tenaga kerja						***35.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			1.Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas	75 %		50 %	62.50 %	35.000.000,00						65.50 %	50.000.000,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						40.000.000,00					Masyarakat, Stakeholde, instansi terkait		50.000.000,00	
		Persentase kab/kota yang menyusun perencanaan ketenagakerjaan						40.000.000,00					Masyarakat, Stakeholde, instansi terkait		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	30.000.000,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	10 Orang		10 Orang	10 Orang	5.000.000,00						Orang	0,00	
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	14 Orang		14 Orang	14 Orang	5.000.000,00						14 Orang	50.000.000,00	
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						30.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	14 Orang		14 Orang	5 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Orang	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	10 Orang		10 Orang	5 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Orang	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
64.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**1.251.028.000,00**							**3.647.547.769,00**	
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja						***821.028.000,00***							***1.812.627.769,00***	
			1.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75.00 %		71.79 %	73.82 %	821.028.000,00						74.43 %	1.812.627.769,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						1.206.028.000,00					-		3.387.547.769,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n						1.206.028.000,00					-		3.387.547.769,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	534 Orang		200 Orang	210 Orang	1.176.028.000,00						200 Orang	3.017.547.769,00	
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						776.028.000,00							1.552.627.769,00	
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	534 Orang		200 Orang	210 Orang	776.028.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	1.552.627.769,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja						20.000.000,00					-		85.000.000,00	
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi (Dengan Satuan:persen)						20.000.000,00					-		85.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK		10 LPK	15 LPK	20.000.000,00						20 LPK	85.000.000,00	
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja						20.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK		10 LPK	15 LPK	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 LPK	85.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah						15.000.000,00					-		75.000.000,00	
		Persentase peserta terlatih yang mendapat bimbingan peningkatan produktivitas (Dengan Satuan:persen)						15.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan		25 Perusahaan	25 Perusahaan	15.000.000,00						25 Perusahaan	75.000.000,00	
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah						15.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan		25 Perusahaan	15 Perusahaan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Perusahaan	75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi						10.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Persentase kab/kota yang diukur tingkat kompetensi dan produktivitasnya (Dengan Satuan:persen)						10.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	8 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00						10 Dokumen	100.000.000,00	
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	8 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
65.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**160.000.000,00**							**713.000.031,00**	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja						***95.000.000,00***							***508.000.031,00***	
			1.Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	80,12 %		79,45 %	79,66 %	95.000.000,00						79,72 %	508.000.031,00	
			2.Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	74.54 (%)		73.96 (%)	73.99 (%)	95.000.000,00						74.01 (%)	508.000.031,00	
			3.Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	55.75 (%)		47.95 (%)	49.90 (%)	95.000.000,00						51.85 (%)	508.000.031,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00					-		518.000.031,00	
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelayanan antarkerja (Dengan Satuan:persen)						70.000.000,00					-		518.000.031,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	250 Orang		11 Orang	11 Orang	25.000.000,00						11 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang		40 Orang	50 Orang	0,00						60 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang		15 Orang	15 Orang	20.000.000,00						15 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	30 Orang		5 Orang	5 Orang	25.000.000,00						5 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	353.000.031,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	4500 Orang		500 Orang	600 Orang	0,00						700 Orang	35.000.000,00	
	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja						20.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang		15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Orang	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja						0,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	4500 Orang		500 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		700 Orang	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang		40 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Orang	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	250 Orang		11 Orang	11 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Orang	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						0,00							353.000.031,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	353.000.031,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	30 Orang		5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						70.000.000,00					-		170.000.000,00	
		Persentase pencari kerja melalui informasi pasar kerja (Dengan Satuan:persen)						70.000.000,00					-		170.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	750 Orang		500 Orang	500 Orang	20.000.000,00						500 Orang	75.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	75.000.000,00	
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	750 Orang		500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Orang	75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi						20.000.000,00					-		25.000.000,00	
		Persentase PMI Memperoleh Pelayanan dan Perlindungan (Pra dan Purna Penempatan) (Dengan Satuan:persen)						20.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	44 Perusahaan		11 Perusahaan	11 Perusahaan	20.000.000,00						11 Perusahaan	25.000.000,00	
	2.07.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian Izin kepada cabang Perusahaan PMI secara Online	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	44 Perusahaan		11 Perusahaan	11 Perusahaan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Perusahaan	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
66.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**505.000.000,00**							**790.000.000,00**	
		Meningkatanya pekerja Provinsi Kepri yang terlindungi						***225.000.000,00***							***690.000.000,00***	
			1.Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	60 %		54 %	55 %	225.000.000,00						55,98 %	690.000.000,00	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota						40.000.000,00					-		120.000.000,00	
		Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang dilayani						40.000.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan		50 Perusahaan	50 Perusahaan	10.000.000,00						50 Perusahaan	35.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	30 Perusahaan		50 Perusahaan	50 Perusahaan	10.000.000,00						50 Perusahaan	30.000.000,00	
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial						10.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan		50 Perusahaan	20 Perusahaan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Perusahaan	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	30 Perusahaan		50 Perusahaan	20 Perusahaan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Perusahaan	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						20.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00					-		345.000.000,00	
		perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama						200.000.000,00					-		345.000.000,00	
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja		0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000,00						0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	120.000.000,00						8 Lembaga	180.000.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara		20 Perkara	20 Perkara	10.000.000,00						100 Perkara	35.000.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perkara		3 Perkara	3 Perkara	10.000.000,00						9 Perkara	65.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan		50 Perusahaan	50 Perusahaan	10.000.000,00						250 Perusahaan	65.000.000,00	
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						10.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perkara		3 Perkara	3 Perkara	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Perkara	65.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						10.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara		20 Perkara	20 Perkara	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Perkara	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						50.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja		0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi						120.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Lembaga	180.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi						10.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan		50 Perusahaan	25 Perusahaan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Perusahaan	65.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)						265.000.000,00					-		325.000.000,00	
		Persentase Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan (Dengan Satuan:persen)						265.000.000,00					-		325.000.000,00	
			Jumlah penetapan UMK	7 Surat Keputusan		7 Surat Keputusan	7 Surat Keputusan	120.000.000,00						7 Surat Keputusan	135.000.000,00	
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan		1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	120.000.000,00						1 Surat Keputusan	120.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	700000 Orang		587619 Orang	597619 Orang	25.000.000,00						650000 Orang	70.000.000,00	
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan		1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Surat Keputusan	120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)						120.000.000,00							135.000.000,00	
		Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	7 Surat Keputusan		7 Surat Keputusan	7 Surat Keputusan	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Surat Keputusan	135.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						25.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	700000 Orang		587619 Orang	597619 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		650000 Orang	70.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
67.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**380.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
		Terlindunginya hak-hak pekerja						***80.000.000,00***							***505.000.000,00***	
			1.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	53.48 (%)		52.28 (%)	52.58 (%)	80.000.000,00						52.88 (%)	505.000.000,00	
			2.Persentase kasusnketenagakerjaan yang tertangani	77.50 %		77.50 %	77.50 %	80.000.000,00						77.50 %	505.000.000,00	
			3.Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15.80 %		15.80 %	15.80 %	80.000.000,00						15.80 %	505.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						380.000.000,00					-		1.050.000.000,00	
		Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan (Dengan Satuan:persen)						380.000.000,00					-		1.050.000.000,00	
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus		15 Kasus	15 Kasus	70.000.000,00						15 Kasus	350.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	30 Perusahaan		20 Perusahaan	20 Perusahaan	70.000.000,00						30 Perusahaan	150.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan		50 Perusahaan	50 Perusahaan	240.000.000,00						50 Perusahaan	550.000.000,00	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						50.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan		50 Perusahaan	50 Perusahaan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Perusahaan	275.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan						30.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus		15 Kasus	15 Kasus	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Kasus	160.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						30.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	30 Perusahaan		20 Perusahaan	20 Perusahaan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Perusahaan	70.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**65.000.000,00**							**675.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**65.000.000,00**							**675.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
68.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**						**0,00**							**0,00**	
		Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi						***0,00***							***0,00***	
			1.Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	33.3 %		33.3 %	33.3 %	0,00						33.3 %	0,00	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						0,00					-		0,00	
		Jumlah wilayah pencadangan yang memenuhi syarat (Dengan Satuan:kawasan)						0,00					-		0,00	
			Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	0 Kawasan Transmigrasi		1 Kawasan Transmigrasi	0 Kawasan Transmigrasi	0,00						0 Kawasan Transmigrasi	0,00	
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi						0,00							0,00	
		Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	0 Kawasan Transmigrasi		1 Kawasan Transmigrasi	0 Kawasan Transmigrasi	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Kawasan Transmigrasi	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Jumlah wilayah pencadangan yang memenuhi syarat (Dengan Satuan:kawasan)						0,00					-		0,00	
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi						0,00							0,00	
		Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-		-	0 Hektar	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
69.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**55.000.000,00**							**470.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi						***55.000.000,00***							***470.000.000,00***	
			1.Persentase bidang ahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	45.9 %		45.9 %	45.9 %	55.000.000,00						45.9 %	470.000.000,00	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						55.000.000,00					-		470.000.000,00	
		Persentase persebaran penduduk yang mendapat penataan (Dengan Satuan:persen)						55.000.000,00					-		470.000.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	2.000.000,00						30 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	3 Lokasi		3 Lokasi	3 Lokasi	50.000.000,00						3 Lokasi	120.000.000,00	
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						3.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota						2.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	30 Orang		30 Orang	10 Orang	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Orang	200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi						50.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	3 Lokasi		3 Lokasi	3 Lokasi	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Lokasi	120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
70.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**10.000.000,00**							**205.000.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi						***5.000.000,00***							***205.000.000,00***	
			1.Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	31.25 %		31.25 %	31.25 %	5.000.000,00						31.25 %	205.000.000,00	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan						10.000.000,00					-		205.000.000,00	
		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Dengan Satuan:Kepala Keluarga)						10.000.000,00					-		205.000.000,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga		40 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	5.000.000,00						40 Kepala Keluarga	120.000.000,00	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman		1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	5.000.000,00						1 Satuan Permukiman	85.000.000,00	
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						5.000.000,00							120.000.000,00	
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga		40 Kepala Keluarga	10 Kepala Keluarga	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Kepala Keluarga	120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						5.000.000,00							85.000.000,00	
		Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman		1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Satuan Permukiman	85.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam						**343.650.000,00**							**687.349.808,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**343.650.000,00**							**687.349.808,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**343.650.000,00**							**687.349.808,00**	
71.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.889.179.186,50**							**31.031.776.961,00**	
		Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi						***83.650.000,00***							***252.349.808,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	83.650.000,00						BB Predikat	252.349.808,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	79,55 Indeks		79,19 Indeks	79,25 Indeks	83.650.000,00						79,33 Indeks	252.349.808,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	87,10 Indeks		86,45 Indeks	86,57 Indeks	83.650.000,00						86,68 Indeks	252.349.808,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						384.000.000,00					-		628.560.200,00	
		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						384.000.000,00					-		628.560.200,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	215.000.000,00						110 Laporan	275.899.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	105.474.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	47.106.100,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	35.000.000,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	12.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		110 Laporan	10.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						80.000.000,00					-		445.000.000,00	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu						80.000.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	30.000.000,00						4 Unit	65.000.000,00	
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						850.646.952,00					-		2.132.491.759,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						850.646.952,00					-		2.132.491.759,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	456.902.000,00						1 Laporan	500.702.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	333.674.952,00						1 Laporan	1.564.719.759,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.070.000,00						2 Laporan	47.070.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	20.000.000,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	5.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						61.200.000,00							61.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	61.200.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	61.200.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.450.000,00							9.450.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	7.450.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	9.450.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							134.699.808,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	134.699.808,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
72.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**380.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
		Terlindunginya hak-hak pekerja						***200.000.000,00***							***405.000.000,00***	
			1.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	53.48 (%)		52.28 (%)	52.58 (%)	200.000.000,00						52.88 (%)	405.000.000,00	
			2.Persentase kasusnketenagakerjaan yang tertangani	77.50 %		77.50 %	77.50 %	200.000.000,00						77.50 %	405.000.000,00	
			3.Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15.80 %		15.80 %	15.80 %	200.000.000,00						15.80 %	405.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						380.000.000,00					-		1.050.000.000,00	
		Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan (Dengan Satuan:persen)						380.000.000,00					-		1.050.000.000,00	
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus		15 Kasus	15 Kasus	70.000.000,00						15 Kasus	350.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	30 Perusahaan		20 Perusahaan	20 Perusahaan	70.000.000,00						30 Perusahaan	150.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan		50 Perusahaan	50 Perusahaan	240.000.000,00						50 Perusahaan	550.000.000,00	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						175.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan		50 Perusahaan	75 Perusahaan	175.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Perusahaan	200.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan						25.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus		15 Kasus	30 Kasus	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Kasus	150.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						25.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	30 Perusahaan		20 Perusahaan	40 Perusahaan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Perusahaan	55.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
		UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau						**650.702.000,00**							**2.209.321.808,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**650.702.000,00**							**2.209.321.808,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**650.702.000,00**							**2.209.321.808,00**	
73.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.889.179.186,50**							**31.031.776.961,00**	
		Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi						***185.702.000,00***							***349.401.808,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	185.702.000,00						BB Predikat	349.401.808,00	
			2.Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	79,55 Indeks		79,19 Indeks	79,25 Indeks	185.702.000,00						79,33 Indeks	349.401.808,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	87,10 Indeks		86,45 Indeks	86,57 Indeks	185.702.000,00						86,68 Indeks	349.401.808,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						384.000.000,00					-		628.560.200,00	
		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						384.000.000,00					-		628.560.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	215.000.000,00						110 Laporan	275.899.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	105.474.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	47.106.100,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	35.000.000,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		110 Laporan	5.000.000,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						80.000.000,00					-		445.000.000,00	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu						80.000.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	30.000.000,00						4 Unit	65.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	Unit	20.000.000,00						1 Unit	30.000.000,00	
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	25.000.000,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						850.646.952,00					-		2.132.491.759,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						850.646.952,00					-		2.132.491.759,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	456.902.000,00						1 Laporan	500.702.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	333.674.952,00						1 Laporan	1.564.719.759,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	20.000.000,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						160.702.000,00							184.702.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	160.702.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	184.702.000,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							134.699.808,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	134.699.808,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						175.000.000,00					-		350.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						175.000.000,00					-		350.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	10.000.000,00						8 Unit	25.000.000,00	
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	0,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
74.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**1.251.028.000,00**							**3.647.547.769,00**	
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja						***430.000.000,00***							***1.834.920.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75.00 %		71.79 %	73.82 %	430.000.000,00						74.43 %	1.834.920.000,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						1.206.028.000,00					-		3.387.547.769,00	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n						1.206.028.000,00					-		3.387.547.769,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	534 Orang		200 Orang	210 Orang	1.176.028.000,00						200 Orang	3.017.547.769,00	
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						400.000.000,00							1.464.920.000,00	
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	534 Orang		200 Orang	200 Orang	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	1.464.920.000,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n						1.206.028.000,00					-		3.387.547.769,00	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-		-	-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	-		-	-	20.000.000,00						-	320.000.000,00	
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-		-	8 Lembaga	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja						20.000.000,00							320.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	-		-	4 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	320.000.000,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun						**112.674.952,00**							**230.474.952,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**112.674.952,00**							**230.474.952,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**112.674.952,00**							**230.474.952,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
75.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.889.179.186,50**							**31.031.776.961,00**	
		Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi						***41.674.952,00***							***55.474.952,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	41.674.952,00						BB Predikat	55.474.952,00	
			2.Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	79,55 Indeks		79,19 Indeks	79,25 Indeks	41.674.952,00						79,33 Indeks	55.474.952,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	87,10 Indeks		86,45 Indeks	86,57 Indeks	41.674.952,00						86,68 Indeks	55.474.952,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						384.000.000,00					-		628.560.200,00	
		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						384.000.000,00					-		628.560.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	215.000.000,00						110 Laporan	275.899.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	105.474.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	47.106.100,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	35.000.000,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		110 Laporan	5.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						80.000.000,00					-		445.000.000,00	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu						80.000.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	30.000.000,00						4 Unit	65.000.000,00	
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						850.646.952,00					-		2.132.491.759,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						850.646.952,00					-		2.132.491.759,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	456.902.000,00						1 Laporan	500.702.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	333.674.952,00						1 Laporan	1.564.719.759,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.070.000,00						2 Laporan	47.070.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	20.000.000,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	5.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.000.000,00							16.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	16.800.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	5.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						33.674.952,00							33.674.952,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33.674.952,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	33.674.952,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
76.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**380.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
		Terlindunginya hak-hak pekerja						***15.000.000,00***							***140.000.000,00***	
			1.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	53.48 (%)		52.28 (%)	52.58 (%)	15.000.000,00						52.88 (%)	140.000.000,00	
			2.Persentase kasusnketenagakerjaan yang tertangani	77.50 %		77.50 %	77.50 %	15.000.000,00						77.50 %	140.000.000,00	
			3.Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15.80 %		15.80 %	15.80 %	15.000.000,00						15.80 %	140.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						380.000.000,00					-		1.050.000.000,00	
		Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan (Dengan Satuan:persen)						380.000.000,00					-		1.050.000.000,00	
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus		15 Kasus	15 Kasus	70.000.000,00						15 Kasus	350.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	30 Perusahaan		20 Perusahaan	20 Perusahaan	70.000.000,00						30 Perusahaan	150.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan		50 Perusahaan	50 Perusahaan	240.000.000,00						50 Perusahaan	550.000.000,00	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						15.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan		50 Perusahaan	25 Perusahaan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Perusahaan	75.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan						15.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus		15 Kasus	5 Kasus	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Kasus	40.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	30 Perusahaan		20 Perusahaan	20 Perusahaan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Perusahaan	25.000.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana						**25.156.757.408,84**							**23.285.432.259,60**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**25.156.757.408,84**							**23.285.432.259,60**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**24.546.757.408,84**							**22.405.432.259,60**	
77.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**19.121.249.508,84**							**20.249.072.259,60**	
		Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau						***17.956.249.508,84***							***19.264.072.259,60***	
			1.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	77.75 Indeks		77.15 Indeks	77.30 Indeks	17.956.249.508,84						77.45 Indeks	19.264.072.259,60	
			2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	17.956.249.508,84						BB Predikat	19.264.072.259,60	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	78.00 Indeks		76.80 Indeks	77.00 Indeks	17.956.249.508,84						77.20 Indeks	19.264.072.259,60	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350.000.000,00					Perangkat Daerah		260.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350.000.000,00					Perangkat Daerah		260.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00						1 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	120.000.000,00						3 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	80.000.000,00	
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						120.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						130.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.564.814.423,84					-		12.778.543.249,60	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.564.814.423,84					-		12.778.543.249,60	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000,00						12 Dokumen	967.034.455,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan		90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	10.909.814.423,84						90 Orang/ Bulan	11.806.508.794,60	
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.909.814.423,84							11.806.508.794,60	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan		90 Orang/ Bulan	90/14 Orang/ Bulan	10.909.814.423,84	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		90 Orang/ Bulan	11.806.508.794,60	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						650.000.000,00							967.034.455,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	967.034.455,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						70.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						70.000.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
	2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						180.000.000,00					-		180.000.000,00	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						180.000.000,00					-		180.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		1 Paket	0 Paket	60.000.000,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang		0 Orang	90 Orang	120.000.000,00						90 Orang	180.000.000,00	
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						120.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang		0 Orang	84 Orang	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90 Orang	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						855.000.000,00					-		865.000.000,00	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						855.000.000,00					-		865.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	140.000.000,00						1 Paket	140.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130.000.000,00						1 Paket	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						375.000.000,00							375.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	375.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.496.435.085,00					-		4.549.129.010,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah						4.496.435.085,00					-		4.549.129.010,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	23.600.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	50.000.000,00						10 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.421.435.085,00						1 Unit	4.475.529.010,00	
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						25.000.000,00							23.600.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	23.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.421.435.085,00							4.475.529.010,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.421.435.085,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		1 Unit	4.475.529.010,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.015.000.000,00					-		956.400.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.015.000.000,00					-		956.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	390.000.000,00						1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		49 Laporan	12 Laporan	506.400.000,00						12 Laporan	506.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	118.600.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						68.600.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	68.600.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						506.400.000,00							506.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		49 Laporan	12 Laporan	506.400.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	506.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						590.000.000,00					-		590.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						590.000.000,00					-		590.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	140.000.000,00						1 Unit	140.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		5 Unit	4 Unit	290.000.000,00						4 Unit	290.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		25 Unit	45 Unit	150.000.000,00						45 Unit	150.000.000,00	
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						170.000.000,00							170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		5 Unit	4 Unit	170.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	170.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		25 Unit	45 Unit	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Unit	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						590.000.000,00					-		590.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
78.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**4.949.147.900,00**							**1.505.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan						***4.874.147.900,00***							***1.405.000.000,00***	
			1.Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	13.09 %		13.03 %	13.05 %	4.874.147.900,00						13.07 %	1.405.000.000,00	
			2.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	65.5 %		54.48 %	55.09 %	4.874.147.900,00						55.70 %	1.405.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layan Pemberdayaan Perempuan						1.595.000.000,00					Gender		275.000.000,00	
			Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga		2 Lembaga	1 Lembaga	1.420.000.000,00						1 Lembaga	100.000.000,00	
	2.08.02.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi						1.420.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga		2 Lembaga	4 Lembaga	1.420.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						125.000.000,00					Gender		150.000.000,00	
		Meningkatnya Capaian Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Provinsi Kepulauan Riau						125.000.000,00					Gender		150.000.000,00	
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Provinsi	-		-	-	25.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.08.02.1.01.0013	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-		-	30 Lembaga	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.1.01.0014	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	30 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.02.1.01.0016	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Provinsi	-		-	1 Kebijakan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi						3.229.147.900,00					Perempuan, dan Kelompok Rentan		1.080.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Perempuan Politik Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke Masyarakatan						3.229.147.900,00					Perempuan, dan Kelompok Rentan		1.080.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	2.649.147.900,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	550.000.000,00						-	550.000.000,00	
	2.08.02.1.02.0010	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi						2.649.147.900,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	29 Lembaga	2.649.147.900,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.02.1.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi						550.000.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	180 Orang	550.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	550.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.02.1.02.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						1.595.000.000,00					Gender		275.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layan Pemberdayaan Perempuan						1.595.000.000,00					Gender		275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.08.02.1.03.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	30 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.02.1.03.0013	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
79.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**429.171.500,00**							**474.171.500,00**	
		Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan						***100.852.100,00***							***295.852.100,00***	
			1.Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	40.38 %		43.33 %	42.31 %	100.852.100,00						41.34 %	295.852.100,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						150.852.100,00					-		120.852.100,00	
		Jumlah Program/Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO Pada Perangkat Daerah						150.852.100,00					-		120.852.100,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	-		-	-	50.852.100,00						-	50.852.100,00	
	2.08.03.1.01.0008	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi	-		-	1 Kegiatan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.03.1.01.0010	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi						50.852.100,00							50.852.100,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	-		-	20 Orang	50.852.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	50.852.100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.03.1.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						100.000.000,00					-		175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan/Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Pengembangannya						100.000.000,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	50.000.000,00						-	120.000.000,00	
	2.08.03.1.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	55.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.03.1.03.0013	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						50.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	30 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
80.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**280.000.000,00**							**295.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak						***235.000.000,00***							***295.000.000,00***	
			1.Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	73.48 (%)		72.44 (%)	72.7 (%)	235.000.000,00						72.96 (%)	295.000.000,00	
		Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi dalam mewujudkan Kesetaran Gender (KG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA)						50.000.000,00					Keluarga, Perempuan dan Anak		50.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	3 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	25.000.000,00						2 Lembaga	50.000.000,00	
	2.08.04.1.01.0005	penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	3 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Lembaga	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang didampingi dan diberi penguatan dalam mewujudkan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga		0 Lembaga	7 Lembaga	100.000.000,00						7 Lembaga	100.000.000,00	
	2.08.04.1.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga		0 Lembaga	7 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						130.000.000,00					-		145.000.000,00	
		Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak						130.000.000,00					-		145.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	550 Orang		500 Orang	500 Orang	50.000.000,00						500 Orang	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang		35 Orang	40 Orang	40.000.000,00						42 Orang	45.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang		0 Orang	20 Orang	20.000.000,00						20 Orang	23.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang		20 Orang	20 Orang	20.000.000,00						20 Orang	22.000.000,00	
	2.08.04.1.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang		20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	22.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.04.1.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang		35 Orang	40 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		42 Orang	45.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.04.1.03.0005	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	550 Orang		500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Orang	55.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.04.1.03.0006	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang		0 Orang	20 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	23.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						50.000.000,00					Keluarga, Perempuan dan Anak		50.000.000,00	
		Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi dalam mewujudkan Kesetaran Gender (KG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA)						50.000.000,00					Keluarga, Perempuan dan Anak		50.000.000,00	
			Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	2.08.04.1.01.0006	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-		-	1 Kebijakan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
81.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**20.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak						***10.000.000,00***							***15.000.000,00***	
			1.Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan	69.79 %		55.81 %	60.46 %	10.000.000,00						65.11 %	15.000.000,00	
		Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi						20.000.000,00					Perangkat Daerah		30.000.000,00	
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	10.000.000,00						1 Lembaga	15.000.000,00	
	2.08.05.1.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak						10.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Lembaga	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi						20.000.000,00					Perangkat Daerah		30.000.000,00	
		Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi						20.000.000,00					Perangkat Daerah		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.08.05.1.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak tingkat provinsi						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
82.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**220.000.000,00**							**265.000.000,00**	
		Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif						***220.000.000,00***							***265.000.000,00***	
			1.Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	85.71 Persentase		85.71 Persentase	85.71 Persentase	220.000.000,00						85.71 Persentase	265.000.000,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						170.000.000,00					-		195.000.000,00	
		Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang didampingi dan dikembangkan						170.000.000,00					-		195.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-		-	-	70.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	100.000.000,00						-	115.000.000,00	
	2.08.06.1.01.0009	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi						70.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-		-	4 Lembaga	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.06.1.01.0010	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi						100.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	50 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	115.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Jumlah Lembaga layanan pemenuhan hak anak yang Mendapatkan Penguatan dan Pembinaan						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	50.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.08.06.1.02.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
83.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**388.827.900,00**							**408.827.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak						***270.507.900,00***							***290.507.900,00***	
			1.Rasio Kekerasan Anak	5.56 Rasio		5.91 Rasio	5.79 Rasio	270.507.900,00						5.68 Rasio	290.507.900,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						201.147.900,00					-		221.147.900,00	
		Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Perangkat Daerah						201.147.900,00					-		221.147.900,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Provinsi	-		-	-	51.147.900,00						-	51.147.900,00	
			Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	-	150.000.000,00						-	170.000.000,00	
	2.08.07.1.01.0011	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi						51.147.900,00							51.147.900,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Provinsi	-		-	1 Kegiatan	51.147.900,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	51.147.900,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.07.1.01.0015	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi						150.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	30 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	170.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						69.360.000,00					-		69.360.000,00	
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Ditingkatkan Kapasitasnya						69.360.000,00					-		69.360.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	69.360.000,00						-	69.360.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.1.03.0017	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						69.360.000,00							69.360.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	30 Orang	69.360.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	69.360.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**610.000.000,00**							**880.000.000,00**	
84.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**50.000.000,00**							**70.000.000,00**	
		Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk						***50.000.000,00***							***70.000.000,00***	
			1.Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	72.10 Indeks		69.50 Indeks	70 Indeks	50.000.000,00						70.95 Indeks	70.000.000,00	
			2.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19)	9.60 %		10.50 %	10.20 %	50.000.000,00						9.90 %	70.000.000,00	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Tersusun dan termanfaatkanannya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-		-	-	50.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.14.02.1.01.0018	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
85.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**160.000.000,00**							**220.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						***110.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9.75 %		11.25 %	10.75 %	110.000.000,00						10.25 %	150.000.000,00	
			2.Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	88.69 %		82.69 %	84.19 %	110.000.000,00						85.69 %	150.000.000,00	
			3.Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64.00 %		58.40 %	59.70 %	110.000.000,00						61.10 %	150.000.000,00	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						110.000.000,00					Masyarakat, Keluarga		150.000.000,00	
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)						110.000.000,00					Masyarakat, Keluarga		150.000.000,00	
			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	4 Daerah		3 Daerah	3 Daerah	60.000.000,00						3 Daerah	80.000.000,00	
	2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan						60.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	4 Daerah		3 Daerah	3 Daerah	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Daerah	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Peran Serta dan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Mitra Kerja dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan kesehatan reproduksi	-		-	-	50.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.14.03.1.02.0010	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Mitra Kerja dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan kesehatan reproduksi						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Mitra Kerja dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan kesehatan reproduksi	Jumlah Peran Serta dan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Mitra Kerja dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan kesehatan reproduksi	-		-	25 Organisasi	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
86.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**400.000.000,00**							**590.000.000,00**	
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)						***200.000.000,00***							***470.000.000,00***	
			1.Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	71 Indeks		68 Indeks	69 Indeks	200.000.000,00						70 Indeks	470.000.000,00	
			2.Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	40.61 Persentase		34.61 Persentase	36.11 Persentase	200.000.000,00						37.61 Persentase	470.000.000,00	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						300.000.000,00					-		450.000.000,00	
		Jumlah Keluarga Terlatih Dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						300.000.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Daerah		2 Daerah	1 Daerah	50.000.000,00						1 Daerah	200.000.000,00	
			Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	7 Kelompok		1 Kelompok	5 Kelompok	50.000.000,00						5 Kelompok	50.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	20 Keluarga		25 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00						20 Keluarga	50.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	20 Keluarga		25 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Keluarga	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	7 Kelompok		1 Kelompok	5 Kelompok	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Kelompok	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja						50.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Daerah		2 Daerah	1 Daerah	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Daerah	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						100.000.000,00					-		140.000.000,00	
		Jumlah mitra dan organisasi dan kemasyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga						100.000.000,00					-		140.000.000,00	
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	5 Kabupaten/ Kota		1 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten/ Kota	50.000.000,00						3 Kabupaten/ Kota	70.000.000,00	
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	30 Organisasi		20 Organisasi	20 Organisasi	50.000.000,00						20 Organisasi	70.000.000,00	
	2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	5 Kabupaten/ Kota		1 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Kabupaten/ Kota	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						50.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	30 Organisasi		20 Organisasi	20 Organisasi	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Organisasi	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						**861.639.400,00**							**821.639.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**861.639.400,00**							**821.639.400,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**861.639.400,00**							**821.639.400,00**	
87.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**19.121.249.508,84**							**20.249.072.259,60**	
		Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau						***510.000.000,00***							***470.000.000,00***	
			1.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	77.75 Indeks		77.15 Indeks	77.30 Indeks	510.000.000,00						77.45 Indeks	470.000.000,00	
			2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	510.000.000,00						BB Predikat	470.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	78.00 Indeks		76.80 Indeks	77.00 Indeks	510.000.000,00						77.20 Indeks	470.000.000,00	
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						855.000.000,00					-		865.000.000,00	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						855.000.000,00					-		865.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	140.000.000,00						1 Paket	140.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130.000.000,00						1 Paket	130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.015.000.000,00					-		956.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.015.000.000,00					-		956.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	390.000.000,00						1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	118.600.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						190.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	190.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						590.000.000,00					-		590.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						590.000.000,00					-		590.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	140.000.000,00						1 Unit	140.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		5 Unit	4 Unit	290.000.000,00						4 Unit	290.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		25 Unit	45 Unit	150.000.000,00						45 Unit	150.000.000,00	
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		5 Unit	5 Unit	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	120.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		25 Unit	15 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Unit	30.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	70.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
88.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**429.171.500,00**							**474.171.500,00**	
			-	-		-	-	178.319.400,00						-	178.319.400,00	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						178.319.400,00					-		178.319.400,00	
		-						178.319.400,00					-		178.319.400,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	10.175.000,00						-	10.175.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.923.000,00						-	20.923.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	95.553.200,00						-	95.553.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.373.200,00						-	3.373.200,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	795.000,00						-	795.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	17.500.000,00						-	17.500.000,00	
	2.08.03.1.02.0011	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						795.000,00							795.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	5 Orang	795.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	795.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0012	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	5 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	10.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	20 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	20.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0014	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						10.175.000,00							10.175.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	10.175.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	10.175.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0015	Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.373.200,00							3.373.200,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	3.373.200,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	3.373.200,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0016	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.923.000,00							20.923.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	35 Orang	20.923.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	20.923.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0017	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						17.500.000,00							17.500.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	17.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	17.500.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0018	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						95.553.200,00							95.553.200,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	45 Orang	95.553.200,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	95.553.200,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
89.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**388.827.900,00**							**408.827.900,00**	
			-	-		-	-	118.320.000,00						-	118.320.000,00	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						118.320.000,00					-		118.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						118.320.000,00					-		118.320.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.848.000,00						-	1.848.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.326.000,00						-	1.326.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	9.482.700,00						-	9.482.700,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	40.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	21.384.000,00						-	21.384.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.141.600,00						-	20.141.600,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.782.700,00						-	1.782.700,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	22.355.000,00						-	22.355.000,00	
	2.08.07.1.02.0016	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.326.000,00							1.326.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	2 Orang	1.326.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	1.326.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0017	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	40.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0018	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						9.482.700,00							9.482.700,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	9.482.700,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	9.482.700,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0019	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						22.355.000,00							22.355.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	20 Orang	22.355.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	22.355.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0020	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.782.700,00							1.782.700,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	8 Orang	1.782.700,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	1.782.700,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0021	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.848.000,00							1.848.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	3 Orang	1.848.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	1.848.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.1.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.141.600,00							20.141.600,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	20.141.600,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	20.141.600,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0023	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						21.384.000,00							21.384.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	21.384.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	21.384.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan						**25.244.570.421,93**							**31.242.472.426,65**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.498.294.485,93**							**26.086.046.288,65**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**21.498.294.485,93**							**26.086.046.288,65**	
90.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**21.690.248.823,93**							**24.540.381.241,65**	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas						***20.899.606.547,93***							***23.999.969.391,65***	
			1.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	83.45 Indeks		83.19 Indeks	83.27 Indeks	20.899.606.547,93						83.33 Indeks	23.999.969.391,65	
			2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		A Predikat	A Predikat	20.899.606.547,93						A Predikat	23.999.969.391,65	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	20.899.606.547,93						87 Indeks	23.999.969.391,65	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00					-		199.366.781,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah						80.000.000,00					-		199.366.781,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	124.366.781,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							124.366.781,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	124.366.781,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.720.248.823,93					-		22.206.545.741,65	
		Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.720.248.823,93					-		22.206.545.741,65	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	682.176.000,00						1 Dokumen	687.120.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan		74 Orang/ Bulan	74 Orang/ Bulan	19.038.072.823,93						74 Orang/ Bulan	21.519.425.741,65	
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.038.072.823,93							21.519.425.741,65	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan		74 Orang/ Bulan	74 Orang/ Bulan	19.038.072.823,93	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		74 Orang/ Bulan	21.519.425.741,65	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						682.176.000,00							687.120.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	682.176.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	687.120.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						65.000.000,00					-		185.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya yang diadakan serta yang mengikuti pelatihan/pendidikan						65.000.000,00					-		185.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	30.000.000,00						5 Orang	35.000.000,00	
	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						35.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	35.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						518.395.805,00					-		683.619.929,00	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah						518.395.805,00					-		683.619.929,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.022.457,00						1 Dokumen	8.550.648,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1 Laporan	Laporan	22.820.000,00						Laporan	49.571.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	342.000.000,00						1 Laporan	312.818.437,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	99.999.999,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1 Paket	Paket	24.600.000,00						Paket	77.275.731,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	13.399.200,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.617.572,00						1 Paket	14.589.415,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.000.000,00						1 Paket	80.487.498,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1 Paket	Paket	30.335.776,00						Paket	26.927.801,00	
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.631.072,00							4.863.139,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.631.072,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	4.863.139,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							26.829.166,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	26.829.166,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							8.975.935,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	8.975.935,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							33.333.333,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	33.333.333,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							4.466.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	4.466.400,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.022.457,00							2.850.216,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.022.457,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.850.216,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.100.000,00							25.758.577,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1 Paket	1 Paket	1.100.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	25.758.577,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.000.000,00							19.571.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Laporan	19.571.200,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						290.000.000,00							312.818.437,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	290.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	312.818.437,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						55.000.000,00					-		216.655.404,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						55.000.000,00					-		216.655.404,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	15.000.000,00						5 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		3 Unit	6 Unit	40.000.000,00						6 Unit	116.655.404,00	
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							116.655.404,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		3 Unit	6 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	116.655.404,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						517.015.755,00					-		176.805.606,00	
		Terpenuhinya Laporan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah						517.015.755,00					-		176.805.606,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	418.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	83.015.755,00						1 Laporan	48.015.756,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00						1 Laporan	8.789.850,00	
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							6.289.850,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	6.289.850,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						218.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	218.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	40.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						48.015.755,00							16.005.252,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.015.755,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	16.005.252,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						734.588.440,00					-		872.387.780,00	
		Terpenuhinya jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara						734.588.440,00					-		872.387.780,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	200.000.000,00						3 Unit	117.057.960,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	305.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	352.588.440,00						8 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	22.676.750,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		21 Unit	21 Unit	62.000.000,00						33 Unit	148.063.770,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	25.000.000,00						2 Unit	178.980.750,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	25.000.000,00						2 Unit	90.608.550,00	
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						237.588.440,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	237.588.440,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							305.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	305.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						20.000.000,00							22.676.750,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	22.676.750,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							49.354.590,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		21 Unit	21 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		33 Unit	49.354.590,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00							39.019.320,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	39.019.320,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							178.980.750,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	178.980.750,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							90.608.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	90.608.550,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
91.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**278.687.938,00**							**1.359.470.952,00**	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat						***188.687.938,00***							***1.059.470.952,00***	
			1.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90.44 %		90.1 %	90.18 %	188.687.938,00						90.28 %	1.059.470.952,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						123.687.938,00					-		681.317.200,00	
		Meningkatnya Jumlah Daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan						123.687.938,00					-		681.317.200,00	
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	75.567.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	55.750.000,00	
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33.687.938,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						33.687.938,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33.687.938,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						10.000.000,00							55.750.000,00	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	55.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi						10.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						10.000.000,00							75.567.200,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	75.567.200,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						125.000.000,00					-		509.750.150,00	
		Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan terhadap Cadangan Beras daerah (CBD)						125.000.000,00					-		509.750.150,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	3 Ton		3 Ton	3 Ton	15.000.000,00						3 Ton	109.750.150,00	
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton		30 Ton	100 Ton	100.000.000,00						100 Ton	350.000.000,00	
	2.09.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						15.000.000,00							109.750.150,00	
		Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	3 Ton		3 Ton	3 Ton	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Ton	109.750.150,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						100.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton		30 Ton	100 Ton	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Ton	350.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi						30.000.000,00					-		168.403.602,00	
		Meningkatnya Konsumsi energi perkapita						30.000.000,00					-		168.403.602,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	68.403.602,00	
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						15.000.000,00							68.403.602,00	
		Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	68.403.602,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Jumlah Daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan						123.687.938,00					-		681.317.200,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
92.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**65.000.000,00**							**282.398.375,00**	
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan						***30.000.000,00***							***282.398.375,00***	
			1.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%		%	%	30.000.000,00						%	282.398.375,00	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi						10.000.000,00					-		57.398.375,00	
		Meningkatnya daerah yang dilakukan pemetaan kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA)						10.000.000,00					-		57.398.375,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	57.398.375,00	
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota						10.000.000,00							57.398.375,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	57.398.375,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Total Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan						55.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						15.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						55.000.000,00					-		225.000.000,00	
		Meningkatnya Total Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan						55.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi yang dilaksanakan	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	2.09.04.1.02.0008	Pelaksanaan kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi	Jumlah Kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
93.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**55.000.000,00**							**444.207.570,00**	
		Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan						***35.000.000,00***							***244.207.570,00***	
			1.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	85 Persentase		84 Persentase	85 Persentase	35.000.000,00						86 Persentase	244.207.570,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						55.000.000,00					-		444.207.570,00	
		Meningkatnya sampel pangan asal tumbuhan yang di uji						55.000.000,00					-		444.207.570,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Sertifikat		5 Sertifikat	5 Sertifikat	25.000.000,00						5 Sertifikat	144.207.570,00	
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan						25.000.000,00							144.207.570,00	
		Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Sertifikat		5 Sertifikat	5 Sertifikat	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Sertifikat	144.207.570,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						10.000.000,00							100.000.000,00	
		terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.746.275.936,00**							**5.156.426.138,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**3.746.275.936,00**							**5.156.426.138,00**	
94.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**530.000.000,00**							**1.708.000.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						***150.000.000,00***							***424.000.000,00***	
			1.Produksi Tanaman Pangan	33814.08 Ton		19960.1 Ton	22783.17 Ton	150.000.000,00						26004.19 Ton	424.000.000,00	
			2.Produksi Tanaman Hortikultura	30385.47 Ton		28628.71 Ton	29058.14 Ton	150.000.000,00						29494.01 Ton	424.000.000,00	
			3.Produksi Tanaman Perkebunan	34456.53 Ton		30614.18 Ton	31532.6 Ton	150.000.000,00						32478.58 Ton	424.000.000,00	
			4.Produksi Ternak	20128.32 Ton		19247.61 Ton	19464.84 Ton	150.000.000,00						19682.31 Ton	424.000.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						30.000.000,00					-		150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						30.000.000,00					-		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						30.000.000,00					-		114.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Straw (Semen Beku)						30.000.000,00					-		114.000.000,00	
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	37.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan		1 laporan	1 laporan	10.000.000,00						1 laporan	27.000.000,00	
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	2 Orang		2 Orang	2 Orang	10.000.000,00						2 Orang	50.000.000,00	
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						10.000.000,00							37.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	37.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						10.000.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan		1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 laporan	27.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	2 Orang		2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						30.000.000,00					-		210.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Akseptor yang di IB (Inseminasi Buatan)						30.000.000,00					-		210.000.000,00	
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan		1 laporan	1 laporan	10.000.000,00						1 laporan	85.000.000,00	
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						10.000.000,00							85.000.000,00	
		Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan		1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 laporan	85.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						140.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain						140.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	125 Dosis		100 Dosis	100 Dosis	10.000.000,00						110 Dosis	75.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	68 Ekor		45 Ekor	45 Ekor	120.000.000,00						45 Ekor	150.000.000,00	
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	40 Ton		30 Ton	30 Ton	10.000.000,00						40 Ton	75.000.000,00	
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	40 Ton		30 Ton	30 Ton	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Ton	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	125 Dosis		100 Dosis	100 Dosis	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		110 Dosis	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						120.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	68 Ekor		45 Ekor	45 Ekor	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Ekor	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
95.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**1.303.646.000,00**							**1.733.839.938,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***1.103.646.000,00***							***958.839.938,00***	
			1.Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan	90 Hektar		82 Hektar	82 Hektar	1.103.646.000,00						85 Hektar	958.839.938,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						1.303.646.000,00					-		1.733.839.938,00	
		Meningkatnya Prasarana Pertanian						1.303.646.000,00					-		1.733.839.938,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	102.727.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	60 Ha		40 Ha	40 Ha	1.063.646.000,00						50 Ha	523.687.938,00	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	107.425.000,00	
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH Sawit	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani						10.000.000,00							102.727.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	102.727.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH Sawit	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						1.063.646.000,00							523.687.938,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	60 Ha		40 Ha	40 Ha	1.063.646.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Ha	523.687.938,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi						10.000.000,00							107.425.000,00	
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	107.425.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH Sawit	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.1.01.0026	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Peternakan						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Peternakan	Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
96.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**220.000.000,00**							**1.204.936.700,00**	
		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						***35.000.000,00***							***668.586.200,00***	
			1.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan menular strategis (PHMS)	69 %		65 %	66 %	35.000.000,00						67 %	668.586.200,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						65.000.000,00					-		409.101.500,00	
		Meningkatnya Angka Kesembuhan Penyakit Hewan						65.000.000,00					-		409.101.500,00	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	102.751.000,00	
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						20.000.000,00							102.751.000,00	
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	102.751.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.01.0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						65.000.000,00					-		355.084.200,00	
		Tersedianya Jumlah Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tersusun						65.000.000,00					-		355.084.200,00	
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	89.756.100,00	
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	95.567.100,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	89.761.000,00	
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM						15.000.000,00							95.567.100,00	
		Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	95.567.100,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya						15.000.000,00							89.756.100,00	
		Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	89.756.100,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						15.000.000,00							89.761.000,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	89.761.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						45.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Tersedianya Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji.						45.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	3 Unit Usaha		3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	15.000.000,00						3 Unit Usaha	50.000.000,00	
	3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						15.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	3 Unit Usaha		3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit Usaha	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						15.000.000,00					-		65.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Pengembangan KompetensiTeknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						15.000.000,00					-		65.000.000,00	
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	15.000.000,00						3 Orang	65.000.000,00	
	3.27.04.1.04.0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan						15.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	3 Orang		3 Orang	3 Orang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	65.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan						30.000.000,00					-		175.751.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Ternak yang dilakukan Pengawasan						30.000.000,00					-		175.751.000,00	
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	15.000.000,00						1 Kasus	75.751.000,00	
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	4 Sertifikat		4 Sertifikat	4 Sertifikat	15.000.000,00						4 Sertifikat	100.000.000,00	
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya						15.000.000,00							75.751.000,00	
		Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Kasus	75.751.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	4 Sertifikat		4 Sertifikat	4 Sertifikat	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Sertifikat	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
97.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**2.177.629.936,00**							**2.130.000.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian						***2.147.629.936,00***							***2.130.000.000,00***	
			1.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	62 Persentase		54 Persentase	56 Persentase	2.147.629.936,00						58 Persentase	2.130.000.000,00	
		Meningkatnya penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya						30.000.000,00					-		130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00						1 Unit	60.000.000,00	
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian						15.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	60.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						2.147.629.936,00					-		2.000.000.000,00	
		Meningkatnya Penyuluh Pertanian yang menerapkan teknologi pertanian						2.147.629.936,00					-		2.000.000.000,00	
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	30 Kelompok		25 Kelompok	25 Kelompok	2.132.629.936,00						30 Kelompok	1.900.000.000,00	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH Sawit	-	-		4 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani						2.132.629.936,00							1.900.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	30 Kelompok		25 Kelompok	25 Kelompok	2.132.629.936,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Kelompok	1.900.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						30.000.000,00					-		130.000.000,00	
		Meningkatnya penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya						30.000.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	-	15.000.000,00						-	70.000.000,00	
	3.27.07.1.01.0006	Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota						15.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota	Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	2 Orang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)						**691.813.776,00**							**1.505.455.925,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**271.813.776,00**							**271.455.925,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**271.813.776,00**							**271.455.925,00**	
98.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**21.690.248.823,93**							**24.540.381.241,65**	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas						***239.813.776,00***							***268.955.925,00***	
			1.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	83.45 Indeks		83.19 Indeks	83.27 Indeks	239.813.776,00						83.33 Indeks	268.955.925,00	
			2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		A Predikat	A Predikat	239.813.776,00						A Predikat	268.955.925,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	239.813.776,00						87 Indeks	268.955.925,00	
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						518.395.805,00					-		683.619.929,00	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah						518.395.805,00					-		683.619.929,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.022.457,00						1 Dokumen	8.550.648,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1 Laporan	Laporan	22.820.000,00						Laporan	49.571.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	342.000.000,00						1 Laporan	312.818.437,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	99.999.999,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1 Paket	Paket	24.600.000,00						Paket	77.275.731,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	13.399.200,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.617.572,00						1 Paket	14.589.415,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.000.000,00						1 Paket	80.487.498,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1 Paket	Paket	30.335.776,00						Paket	26.927.801,00	
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.158.000,00							4.863.138,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.158.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	4.863.138,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.000.000,00							26.829.166,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	26.829.166,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.335.776,00							8.975.933,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1 Paket	1 Paket	5.335.776,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	8.975.933,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							33.333.333,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	33.333.333,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.500.000,00							4.466.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	3.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	4.466.400,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						2.000.000,00							2.850.216,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.850.216,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						3.500.000,00							25.758.577,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	25.758.577,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.820.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.820.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Laporan	15.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						517.015.755,00					-		176.805.606,00	
		Terpenuhinya Laporan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah						517.015.755,00					-		176.805.606,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	418.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	83.015.755,00						1 Laporan	48.015.756,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00						1 Laporan	8.789.850,00	
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	3.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.500.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	40.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00							16.005.252,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	16.005.252,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						734.588.440,00					-		872.387.780,00	
		Terpenuhinya jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara						734.588.440,00					-		872.387.780,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	200.000.000,00						3 Unit	117.057.960,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	352.588.440,00						8 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		21 Unit	21 Unit	62.000.000,00						33 Unit	148.063.770,00	
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	0 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	2.500.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							49.354.590,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		21 Unit	0 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		33 Unit	49.354.590,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							39.019.320,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	0 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	39.019.320,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**420.000.000,00**							**1.234.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**420.000.000,00**							**1.234.000.000,00**	
99.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**530.000.000,00**							**1.708.000.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						***120.000.000,00***							***559.000.000,00***	
			1.Produksi Tanaman Pangan	33814.08 Ton		19960.1 Ton	22783.17 Ton	120.000.000,00						26004.19 Ton	559.000.000,00	
			2.Produksi Tanaman Hortikultura	30385.47 Ton		28628.71 Ton	29058.14 Ton	120.000.000,00						29494.01 Ton	559.000.000,00	
			3.Produksi Tanaman Perkebunan	34456.53 Ton		30614.18 Ton	31532.6 Ton	120.000.000,00						32478.58 Ton	559.000.000,00	
			4.Produksi Ternak	20128.32 Ton		19247.61 Ton	19464.84 Ton	120.000.000,00						19682.31 Ton	559.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						300.000.000,00					-		934.000.000,00	
		Meningkatnya Sertiû kasi Benih/Bibit Tanaman Pertanian						300.000.000,00					-		934.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	0 Batang		0 Batang	0 Batang	100.000.000,00						0 Batang	200.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	1 Ton		0.8 Ton	0.8 Ton	20.000.000,00						1 Ton	75.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	150 Batang		200 Batang	200 Batang	20.000.000,00						150 Batang	75.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	76 Gram		66 Gram	66 Gram	20.000.000,00						76 Gram	66.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	430 Mata		130 Mata	130 Mata	20.000.000,00						430 Mata	50.500.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	550 Setek		200 Setek	200 Setek	20.000.000,00						450 Setek	67.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton		0.8 Ton	0.8 Ton	20.000.000,00						1 Ton	75.000.000,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00						0 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00						0 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00						0 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Sertifikat Benih	0 Sertifikat		0 Sertifikat	0 Sertifikat	20.000.000,00						0 Sertifikat	100.000.000,00	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	0 Sertifikat		0 Sertifikat	2000 Sertifikat	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Sertifikat	100.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	0 Batang		0 Batang	1500 Batang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Batang	200.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.02.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh						20.000.000,00							50.500.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	430 Mata		130 Mata	130 Mata	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		430 Mata	50.500.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek						20.000.000,00							67.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	550 Setek		200 Setek	200 Setek	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		450 Setek	67.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji						20.000.000,00							66.500.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	76 Gram		66 Gram	66 Gram	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		76 Gram	66.500.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	150 Batang		200 Batang	200 Batang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Batang	75.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton		0.8 Ton	0,8 Ton	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ton	75.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi						20.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	1 Ton		0.8 Ton	0,8 Ton	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ton	75.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Laporan	75.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Laporan	75.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Laporan	75.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
100.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**1.303.646.000,00**							**1.733.839.938,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***25.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			1.Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan	90 Hektar		82 Hektar	82 Hektar	25.000.000,00						85 Hektar	50.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						1.303.646.000,00					-		1.733.839.938,00	
		Meningkatnya Prasarana Pertanian						1.303.646.000,00					-		1.733.839.938,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	-		-	-	45.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terbangun dan Terpeliharanya LaboratoriumPertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
101.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**70.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian						***45.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			2.Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	45 %		43.5 %	45 %	45.000.000,00						45 %	150.000.000,00	
			2.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian	74.8 %		74.6 %	74.8 %	45.000.000,00						74.8 %	150.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah luas Lahan pertanian yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian						70.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha		20 Ha	Ha	20.000.000,00						Ha	50.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha		75 Ha	Ha	25.000.000,00						Ha	100.000.000,00	
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						25.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha		75 Ha	75 Ha	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Ha	100.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha		20 Ha	20 Ha	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Ha	50.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						70.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah luas Lahan pertanian yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian						70.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-		-	-	25.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-		-	50 Ha	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
		UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan						**453.828.500,00**							**855.306.425,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**318.828.500,00**							**268.955.925,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**318.828.500,00**							**268.955.925,00**	
102.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**21.690.248.823,93**							**24.540.381.241,65**	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas						***281.828.500,00***							***268.955.925,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	83.45 Indeks		83.19 Indeks	83.27 Indeks	281.828.500,00						83.33 Indeks	268.955.925,00	
			2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		A Predikat	A Predikat	281.828.500,00						A Predikat	268.955.925,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	281.828.500,00						87 Indeks	268.955.925,00	
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						518.395.805,00					-		683.619.929,00	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah						518.395.805,00					-		683.619.929,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.022.457,00						1 Dokumen	8.550.648,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1 Laporan	Laporan	22.820.000,00						Laporan	49.571.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	342.000.000,00						1 Laporan	312.818.437,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	99.999.999,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1 Paket	Paket	24.600.000,00						Paket	77.275.731,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	13.399.200,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.617.572,00						1 Paket	14.589.415,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.000.000,00						1 Paket	80.487.498,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1 Paket	Paket	30.335.776,00						Paket	26.927.801,00	
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.828.500,00							4.863.138,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	1.828.500,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	4.863.138,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.000.000,00							26.829.166,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	26.829.166,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.000.000,00							8.975.933,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1 Paket	0 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	8.975.933,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							33.333.333,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	33.333.333,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							4.466.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	4.466.400,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						2.000.000,00							2.850.216,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.850.216,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						20.000.000,00							25.758.577,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1 Paket	0 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	25.758.577,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Laporan	15.000.000,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						22.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	22.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						517.015.755,00					-		176.805.606,00	
		Terpenuhinya Laporan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah						517.015.755,00					-		176.805.606,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	418.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	83.015.755,00						1 Laporan	48.015.756,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00						1 Laporan	8.789.850,00	
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	40.000.000,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							16.005.252,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	16.005.252,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						734.588.440,00					-		872.387.780,00	
		Terpenuhinya jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara						734.588.440,00					-		872.387.780,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	200.000.000,00						3 Unit	117.057.960,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	352.588.440,00						8 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		21 Unit	21 Unit	62.000.000,00						33 Unit	148.063.770,00	
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						75.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	0 Unit	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	2.500.000,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.000.000,00							49.354.590,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		21 Unit	0 Unit	12.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		33 Unit	49.354.590,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							39.019.320,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	0 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	39.019.320,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**135.000.000,00**							**586.350.500,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**135.000.000,00**							**586.350.500,00**	
103.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**1.303.646.000,00**							**1.733.839.938,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***45.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			1.Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan	90 Hektar		82 Hektar	82 Hektar	45.000.000,00						85 Hektar	200.000.000,00	
		Meningkatnya Prasarana Pertanian						1.303.646.000,00					-		1.733.839.938,00	
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	1 Unit		Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
	3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet						25.000.000,00							150.000.000,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara, dan Terselenggaranya Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	1 Unit		Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	150.000.000,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						1.303.646.000,00					-		1.733.839.938,00	
		Meningkatnya Prasarana Pertanian						1.303.646.000,00					-		1.733.839.938,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	-		-	-	45.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terbangun dan Terpeliharanya LaboratoriumPertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
104.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**220.000.000,00**							**1.204.936.700,00**	
		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						***35.000.000,00***							***336.350.500,00***	
			1.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan menular strategis (PHMS)	69 %		65 %	66 %	35.000.000,00						67 %	336.350.500,00	
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						65.000.000,00					-		355.084.200,00	
		Tersedianya Jumlah Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tersusun						65.000.000,00					-		355.084.200,00	
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00						0 Laporan	80.000.000,00	
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan						20.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Laporan	80.000.000,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
		Tersedianya Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji.						45.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk		3 Produk	Produk	15.000.000,00						Produk	50.000.000,00	
	3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan						15.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk		3 Produk	3 Produk	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Produk	50.000.000,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						65.000.000,00					-		409.101.500,00	
		Meningkatnya Angka Kesembuhan Penyakit Hewan						65.000.000,00					-		409.101.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	-		-	-	15.000.000,00						-	106.350.500,00	
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						15.000.000,00							106.350.500,00	
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	-		-	1 Wilayah	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	106.350.500,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						45.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Tersedianya Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji.						45.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-		-	-	15.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						**33.434.291.503,53**							**37.184.114.207,33**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33.079.291.503,53**							**36.061.414.207,33**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**33.079.291.503,53**							**36.061.414.207,33**	
105.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**32.631.291.503,53**							**35.009.114.207,33**	
		Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan						***32.209.291.503,53***							***34.584.114.207,33***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	32.209.291.503,53						BB Predikat	34.584.114.207,33	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.51 Indeks		80.43 Indeks	80.47 Indeks	32.209.291.503,53						80.51 Indeks	34.584.114.207,33	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	85.30 Indeks		84.44 Indeks	84.65 Indeks	32.209.291.503,53						84.87 Indeks	34.584.114.207,33	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						125.000.000,00					-		180.000.000,00	
		Tersedianya tiga dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah						125.000.000,00					-		180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00						2 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	115.000.000,00	
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						70.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	65.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Laporan	115.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						31.276.291.503,53					-		32.838.114.207,33	
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN						31.276.291.503,53					-		32.838.114.207,33	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	558.552.000,00						1 Dokumen	575.112.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/ Bulan		192 Orang/ Bulan	192 Orang/ Bulan	30.717.739.503,53						192 Orang/ Bulan	32.263.002.207,33	
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						30.717.739.503,53							32.263.002.207,33	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/ Bulan		192 Orang/ Bulan	192 Orang/ Bulan	30.717.739.503,53	Provinsi Kepulauan Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		192 Orang/ Bulan	32.263.002.207,33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						558.552.000,00							575.112.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	558.552.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	575.112.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					-		20.000.000,00	
		Tersedianya satu Laporan Barang Milik Daerah						0,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan						10.000.000,00					-		140.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	10.000.000,00						6 Orang	70.000.000,00	
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		6 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Orang	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						560.000.000,00					-		696.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan adminitrasi umum perangkat daerah						560.000.000,00					-		696.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	315.000.000,00						1 Laporan	356.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	95.000.000,00						1 Paket	135.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00						1 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						80.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						18.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						300.000.000,00							321.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	321.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						210.000.000,00					-		400.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						210.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	230.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	120.000.000,00	
	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							230.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Unit	230.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						60.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	4 Unit	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		5 Unit	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						165.000.000,00					-		310.000.000,00	
		Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah						165.000.000,00					-		310.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00						1 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00						1 Laporan	220.000.000,00	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						80.000.000,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						285.000.000,00					-		425.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah						285.000.000,00					-		425.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	110.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	247.000.000,00						7 Unit	270.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	38.000.000,00						35 Unit	45.000.000,00	
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						220.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	8 Unit	220.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	43 Unit	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
106.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**						**80.000.000,00**							**240.000.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP						***40.000.000,00***							***120.000.000,00***	
			1.Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %		100 %	100 %	40.000.000,00						100 %	120.000.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi						40.000.000,00					-		85.000.000,00	
		Tersedianya satu dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						40.000.000,00					-		85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi						40.000.000,00							85.000.000,00	
		RPPLH Provinsi yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	85.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi						40.000.000,00					-		155.000.000,00	
		Tersedianya dokumen laporan kajian lingkungan hidup strategi						40.000.000,00					-		155.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						0,00							85.000.000,00	
		Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	85.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						40.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
107.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**360.000.000,00**							**695.000.000,00**	
		Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						***240.000.000,00***							***295.000.000,00***	
			1.Penurunan intensitas emisi GRK	10.11 (%)		5.03 (%)	6.30 (%)	240.000.000,00						7.57 (%)	295.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup						340.000.000,00					-		645.000.000,00	
		Tersedianya dokumen atau laporan pencagahan dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup						340.000.000,00					-		645.000.000,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	20 Lokasi		5 Lokasi	4 Lokasi	70.000.000,00						9 Lokasi	190.000.000,00	
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 laporan		1 laporan	1 laporan	0,00						1 laporan	35.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	20.000.000,00	
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						60.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						0,00							40.000.000,00	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi						40.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut						0,00							35.000.000,00	
		Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 laporan		1 laporan	0 laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 laporan	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						45.000.000,00							90.000.000,00	
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	20 Lokasi		5 Lokasi	9 Lokasi	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Lokasi	90.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK						25.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	85.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						50.000.000,00							35.000.000,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	1 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						20.000.000,00					-		25.000.000,00	
		Tersedianya laporan penanggulangan dan atau kerusakan lingkungan hidup						20.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	2.11.03.1.02.0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						0,00					-		25.000.000,00	
		Tersedianya laporan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup						0,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	2.11.03.1.03.0014	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
108.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**35.000.000,00**							**85.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						***35.000.000,00***							***85.000.000,00***	
			1.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0.545 (%)		0.505 (%)	0.515 (%)	35.000.000,00						0.525 (%)	85.000.000,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi						35.000.000,00					-		85.000.000,00	
		Tersedianya dokumen atau laporan pengelolaan keanekaragaman hayati						35.000.000,00					-		85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Orang		3 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	10.000.000,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	3 Ha		0 Ha	1 Ha	20.000.000,00						1 Ha	30.000.000,00	
			Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	15.000.000,00						1 Unit	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						0,00							25.000.000,00	
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	3 Ha		0 Ha	1 Ha	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ha	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Orang		3 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
109.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**45.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)						***45.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3	100 %		53.57 %	57.14 %	45.000.000,00						67.86 %	100.000.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						45.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Tersdianya dokumen atau laporan pengumpulan limbah B3 linta daerah Kab/Kota dalam satu Provinsi						45.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan						45.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
110.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**60.000.000,00**							**135.000.000,00**	
		Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan						***60.000.000,00***							***135.000.000,00***	
			1.Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi lingkungan kepada unit usaha	100.00 %		32.93 %	32.93 %	60.000.000,00						53.66 %	135.000.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						60.000.000,00					-		135.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan rekomendasi lingkungan dan PPLHyang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						60.000.000,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	98 Usaha/Kegiatan		27 Usaha/Kegiatan	27 Usaha/Kegiatan	35.000.000,00						44 Usaha/Kegiatan	90.000.000,00	
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang		3 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang		3 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						35.000.000,00							90.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	98 Usaha/Kegiatan		27 Usaha/Kegiatan	23 Usaha/Kegiatan	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		44 Usaha/Kegiatan	90.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
111.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**25.000.000,00**							**45.000.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup						***25.000.000,00***							***45.000.000,00***	
			1.Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitasnya Bidang Lingkungan Hidup	7.52 %		6.64 %	6.64 %	25.000.000,00						7.08 %	45.000.000,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi						25.000.000,00					-		45.000.000,00	
		Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada lembaga atau kelompok masyarakat di bidang lingkungan hidup						25.000.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga		3 Lembaga	2 Lembaga	0,00						2 Lembaga	10.000.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga		3 Lembaga	0 Lembaga	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Lembaga	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
112.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**25.000.000,00**							**50.000.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup						***25.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			1.Persentase Lembaga Masyarakat atau Dunia Usaha Yang dinilai kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %		59.57 %	68.09 %	25.000.000,00						78.72 %	50.000.000,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi						25.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Terselenggaranya penilaian kinerja PPLH untuk masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi						25.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	81 Entitas		28 Entitas	27 Entitas	25.000.000,00						27 Entitas	50.000.000,00	
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	81 Entitas		28 Entitas	14 Entitas	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		27 Entitas	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
113.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**25.000.000,00**							**137.300.000,00**	
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup						***25.000.000,00***							***137.300.000,00***	
			1.Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	24.39 %		12.20 %	14.63 %	25.000.000,00						17.07 %	137.300.000,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi						25.000.000,00					-		137.300.000,00	
		Terlaksananya penyelesaian pengaduan dan tindak pidana serta sengketa lingkungan hidup						25.000.000,00					-		137.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan		13 Pengaduan	10 Pengaduan	25.000.000,00						20 Pengaduan	102.300.000,00	
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	13 Perkara		13 Perkara	9 Perkara	0,00						9 Perkara	35.000.000,00	
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi						0,00							35.000.000,00	
		Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	13 Perkara		13 Perkara	0 Perkara	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Perkara	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi						25.000.000,00							102.300.000,00	
		Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan		13 Pengaduan	5 Pengaduan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pengaduan	102.300.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
114.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**90.000.000,00**							**110.000.000,00**	
		Meningkatnya tata Kelola Persampahan						***70.000.000,00***							***110.000.000,00***	
			1.Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%))	31.50 %		15.90 %	19.80 %	70.000.000,00						23.70 %	110.000.000,00	
			2.Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	88.75 %		85.75 %	86.50 %	70.000.000,00						87.25 %	110.000.000,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						90.000.000,00					-		110.000.000,00	
		Terlaksananya penanganan sampah						90.000.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	4 Unit		2 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	4 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi						20.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya penanganan sampah						90.000.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah sampah regional yang dikelola	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
	2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	-		-	1 Ton	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**355.000.000,00**							**1.122.700.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**355.000.000,00**							**1.122.700.000,00**	
115.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**530.000.000,00**							**1.807.700.000,00**	
		Menurunnya Kerusakan hutan						***85.000.000,00***							***297.700.000,00***	
			1.Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	100 %		100 %	100 %	85.000.000,00						100 %	297.700.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
		Persentase ketersediaan dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
			Dokumen RKTP yang disahkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.01.0005	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya penyusunan dan penetapan RKTP	Dokumen RKTP yang disahkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Tersedianya dokumen atau laporan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						100.000.000,00					-		380.000.000,00	
		Terlaksananya rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara						100.000.000,00					-		380.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	7 Ha		0 Ha	3 Ha	20.000.000,00						3 Ha	90.000.000,00	
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	3 Ha		1 Ha	1 Ha	20.000.000,00						1 Ha	80.000.000,00	
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	3 Ha		1 Ha	1 Ha	20.000.000,00						1 Ha	80.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						20.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	3 Ha		1 Ha	1 Ha	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Ha	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan						20.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan						20.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	3 Ha		1 Ha	1 Ha	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Ha	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2						20.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman RHL pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	7 Ha		0 Ha	1 Ha	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		3 Ha	90.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	185.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	50 Ha	160.000.000,00						50 Ha	350.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						0,00							50.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	0 Ha	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Ha	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						20.000.000,00					-		42.700.000,00	
		Terlaksananya pengawasan unit manajamen Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi Kurang dari 6000 m3/Tahun						20.000.000,00					-		42.700.000,00	
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	42.700.000,00	
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						20.000.000,00							42.700.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Laporan	42.700.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
116.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**40.000.000,00**							**80.000.000,00**	
		Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem						***20.000.000,00***							***60.000.000,00***	
			1.Persentase kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terkelola dengan baik	100 %		100 %	100 %	20.000.000,00						100 %	60.000.000,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						40.000.000,00					-		80.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistem						40.000.000,00					-		80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	4 Orang		8 Orang	4 Orang	0,00						4 Orang	20.000.000,00	
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	1 Ha		2 Ha	1 Ha	20.000.000,00						1 Ha	20.000.000,00	
			Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	2 Ha		2 Ha	2 Ha	20.000.000,00						2 Ha	40.000.000,00	
	3.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah						20.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	2 Ha		2 Ha	1 Ha	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Ha	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	4 Orang		8 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	1 Ha		2 Ha	1 Ha	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ha	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
117.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**35.000.000,00**							**175.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Kehutanan						***35.000.000,00***							***175.000.000,00***	
			1.Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan	1.201 SBM/Milyar Rupiah		1.185 SBM/Milyar Rupiah	1.192 SBM/Milyar Rupiah	35.000.000,00						1.196 SBM/Milyar Rupiah	175.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						35.000.000,00					-		175.000.000,00	
		Terselenggaranya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan						35.000.000,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit		3 Unit	2 Unit	20.000.000,00						2 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	5 Orang		0 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	25.000.000,00	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar		100 Hektar	100 Hektar	0,00						100 Hektar	50.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	5 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial						0,00							50.000.000,00	
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar		100 Hektar	0 Hektar	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Hektar	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						20.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit		3 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		2 Unit	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terselenggaranya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan						35.000.000,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	15.000.000,00						-	60.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						15.000.000,00							60.000.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	1 Kelompok	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
118.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**						**50.000.000,00**							**110.000.000,00**	
		Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)						***25.000.000,00***							***55.000.000,00***	
			1.Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Riau Yang Terkelola dengan baik	6.84 %		2.56 %	2.56 %	25.000.000,00						4.27 %	55.000.000,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		110.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan Daerah Aliran Sungai						50.000.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	0,00						1 Lembaga	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	4 Orang		0 Orang	4 Orang	0,00						4 Orang	20.000.000,00	
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	4 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga		0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Lembaga	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup						**297.000.000,00**							**545.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**297.000.000,00**							**545.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**297.000.000,00**							**545.000.000,00**	
119.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**32.631.291.503,53**							**35.009.114.207,33**	
		Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan						***152.000.000,00***							***160.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	152.000.000,00						BB Predikat	160.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.51 Indeks		80.43 Indeks	80.47 Indeks	152.000.000,00						80.51 Indeks	160.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	85.30 Indeks		84.44 Indeks	84.65 Indeks	152.000.000,00						84.87 Indeks	160.000.000,00	
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		140.000.000,00	
		Terlaksananya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan						10.000.000,00					-		140.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	10.000.000,00						6 Orang	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		6 Orang	1 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Orang	10.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						560.000.000,00					-		696.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan adminitrasi umum perangkat daerah						560.000.000,00					-		696.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	315.000.000,00						1 Laporan	356.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	95.000.000,00						1 Paket	135.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						15.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	35.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						210.000.000,00					-		400.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						210.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	120.000.000,00	
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	20.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						165.000.000,00					-		310.000.000,00	
		Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah						165.000.000,00					-		310.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00						1 Laporan	90.000.000,00	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	70.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						285.000.000,00					-		425.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah						285.000.000,00					-		425.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	110.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	247.000.000,00						7 Unit	270.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	38.000.000,00						35 Unit	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						27.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	27.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	20.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	3 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	10.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	35.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
120.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**360.000.000,00**							**695.000.000,00**	
		Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						***95.000.000,00***							***270.000.000,00***	
			1.Penurunan intensitas emisi GRK	10.11 (%)		5.03 (%)	6.30 (%)	95.000.000,00						7.57 (%)	270.000.000,00	
		Tersedianya dokumen atau laporan pencagahan dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup						340.000.000,00					-		645.000.000,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	20 Lokasi		5 Lokasi	4 Lokasi	70.000.000,00						9 Lokasi	190.000.000,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	60.000.000,00	
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						25.000.000,00							20.000.000,00	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						25.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	20 Lokasi		5 Lokasi	5 Lokasi	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Lokasi	100.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup						340.000.000,00					-		645.000.000,00	
		Tersedianya dokumen atau laporan pencagahan dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup						340.000.000,00					-		645.000.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	-	70.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi						70.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**0,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**0,00**							**0,00**	
121.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**530.000.000,00**							**1.807.700.000,00**	
		Menurunnya Kerusakan hutan						***0,00***							***0,00***	
			1.Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	0,00	
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						20.000.000,00					-		42.700.000,00	
		Terlaksananya pengawasan unit manajamen Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi Kurang dari 6000 m3/Tahun						20.000.000,00					-		42.700.000,00	
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	42.700.000,00	
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
		UPTD KPHP Unit I Karimun						**137.500.000,00**							**377.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**137.500.000,00**							**377.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**137.500.000,00**							**377.000.000,00**	
122.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**645.000.000,00**							**1.229.000.000,00**	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	BB Predikat	87.500.000,00						-	127.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80.47 Indeks	87.500.000,00						-	127.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84.65 Indeks	87.500.000,00						-	127.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84,65 Indeks	57.000.000,00						-	102.000.000,00	
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daera	-		-	80,47 Indeks	40.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80,47 Indeks	17.000.000,00						-	37.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	84,65 Indeks	30.500.000,00						-	70.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	80,47 Indeks	30.500.000,00						-	70.000.000,00	
			Nilai SAKIP DLHK	-		-	77,50 Predikat	87.500.000,00						-	127.000.000,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan adminitrasi umum perangkat daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00						1 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	35.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	48.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	72.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	12.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	79.000.000,00						1 Laporan	74.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	17.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00						1 Unit	140.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	211.000.000,00						7 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	22.000.000,00						35 Unit	60.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	6 Unit	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	5 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	35.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
123.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**530.000.000,00**							**1.807.700.000,00**	
		Menurunnya Kerusakan hutan						***40.000.000,00***							***125.000.000,00***	
			1.Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	100 %		100 %	100 %	40.000.000,00						100 %	125.000.000,00	
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	185.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	50 Ha	160.000.000,00						50 Ha	350.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	25 Ha	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		50 Ha	50.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
			-	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
		Persentase ketersediaan dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	-	30.000.000,00						-	120.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						0,00					-		150.000.000,00	
		-						0,00					-		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	-	60.000.000,00						-	180.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	2 Operasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	30.000.000,00	UPTD KPHP Unit I Karimun
		UPTD KPHP Unit II Batam						**124.500.000,00**							**367.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**124.500.000,00**							**367.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**124.500.000,00**							**367.000.000,00**	
124.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**645.000.000,00**							**1.229.000.000,00**	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	BB Predikat	74.500.000,00						-	117.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80.47 Indeks	74.500.000,00						-	117.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84.65 Indeks	74.500.000,00						-	117.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84,65 Indeks	44.000.000,00						-	92.000.000,00	
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daera	-		-	80,47 Indeks	37.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80,47 Indeks	7.000.000,00						-	27.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	80,47 Indeks	30.500.000,00						-	70.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	84,65 Indeks	30.500.000,00						-	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai SAKIP DLHK	-		-	77,50 Predikat	74.500.000,00						-	117.000.000,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan adminitrasi umum perangkat daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00						1 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	35.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	48.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	72.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	12.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	
		Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	79.000.000,00						1 Laporan	74.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	7.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00						1 Unit	140.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	211.000.000,00						7 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	22.000.000,00						35 Unit	60.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						32.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	2 Unit	32.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	5 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	35.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
125.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**530.000.000,00**							**1.807.700.000,00**	
		Menurunnya Kerusakan hutan						***40.000.000,00***							***125.000.000,00***	
			1.Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	100 %		100 %	100 %	40.000.000,00						100 %	125.000.000,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	185.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	50 Ha	160.000.000,00						50 Ha	350.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	25 Ha	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		50 Ha	50.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
			-	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
		Persentase ketersediaan dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH						120.000.000,00					-		370.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	-	30.000.000,00						-	120.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						0,00					-		150.000.000,00	
		-						0,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	-	60.000.000,00						-	180.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	2 Operasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	30.000.000,00	UPTD KPHP Unit II Batam
		UPTD KPHP Unit III Lingga						**130.000.000,00**							**364.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**130.000.000,00**							**364.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**130.000.000,00**							**364.000.000,00**	
126.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**645.000.000,00**							**1.229.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	BB Predikat	77.000.000,00						-	114.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80.47 Indeks	77.000.000,00						-	114.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84.65 Indeks	77.000.000,00						-	114.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84,65 Indeks	49.500.000,00						-	89.000.000,00	
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daera	-		-	80,47 Indeks	43.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80,47 Indeks	6.500.000,00						-	24.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	80,47 Indeks	30.500.000,00						-	70.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	84,65 Indeks	30.500.000,00						-	70.000.000,00	
			Nilai SAKIP DLHK	-		-	77,50 Predikat	77.000.000,00						-	114.000.000,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan adminitrasi umum perangkat daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00						1 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	35.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	48.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	72.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	12.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	
		Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	79.000.000,00						1 Laporan	74.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.500.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00						1 Unit	140.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	211.000.000,00						7 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	22.000.000,00						35 Unit	60.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	4 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	3 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	35.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
127.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**530.000.000,00**							**1.807.700.000,00**	
		Menurunnya Kerusakan hutan						***50.000.000,00***							***125.000.000,00***	
			1.Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00						100 %	125.000.000,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	185.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	50 Ha	160.000.000,00						50 Ha	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						35.000.000,00							50.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	35 Ha	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		50 Ha	50.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
			-	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
		Persentase ketersediaan dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	-	30.000.000,00						-	120.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						0,00					-		150.000.000,00	
		-						0,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	-	60.000.000,00						-	180.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	2 Operasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	30.000.000,00	UPTD KPHP Unit III Lingga
		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang						**192.500.000,00**							**384.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**192.500.000,00**							**384.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**192.500.000,00**							**384.000.000,00**	
128.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**645.000.000,00**							**1.229.000.000,00**	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	BB Predikat	139.500.000,00						-	134.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80.47 Indeks	139.500.000,00						-	134.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84.65 Indeks	139.500.000,00						-	134.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84,65 Indeks	117.000.000,00						-	109.000.000,00	
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daera	-		-	80,47 Indeks	93.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80,47 Indeks	24.000.000,00						-	44.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	80,47 Indeks	25.500.000,00						-	70.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	84,65 Indeks	25.500.000,00						-	70.000.000,00	
			Nilai SAKIP DLHK	-		-	77,50 Predikat	139.500.000,00						-	134.000.000,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan adminitrasi umum perangkat daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00						1 Laporan	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						5.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	35.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	72.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	12.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	
		Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	79.000.000,00						1 Laporan	74.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	24.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00						1 Unit	140.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	211.000.000,00						7 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	22.000.000,00						35 Unit	60.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	6 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	3 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	35.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
129.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**530.000.000,00**							**1.807.700.000,00**	
		Menurunnya Kerusakan hutan						***40.000.000,00***							***125.000.000,00***	
			1.Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	100 %		100 %	100 %	40.000.000,00						100 %	125.000.000,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	185.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	50 Ha	160.000.000,00						50 Ha	350.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	25 Ha	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		50 Ha	50.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
			-	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
		Persentase ketersediaan dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	-	30.000.000,00						-	120.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						10.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						0,00					-		150.000.000,00	
		-						0,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	-	60.000.000,00						-	180.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	2 Operasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	30.000.000,00	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
		UPTD KPHP Unit V Natuna						**164.500.000,00**							**370.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**164.500.000,00**							**370.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**164.500.000,00**							**370.000.000,00**	
130.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**645.000.000,00**							**1.229.000.000,00**	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	BB Predikat	101.500.000,00						-	110.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80.47 Indeks	101.500.000,00						-	110.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84.65 Indeks	101.500.000,00						-	110.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84,65 Indeks	84.000.000,00						-	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daera	-		-	80,47 Indeks	39.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80,47 Indeks	45.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	80,47 Indeks	30.500.000,00						-	70.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	84,65 Indeks	30.500.000,00						-	70.000.000,00	
			Nilai SAKIP DLHK	-		-	77,50 Predikat	101.500.000,00						-	110.000.000,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan adminitrasi umum perangkat daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00						1 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	35.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	48.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	72.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	12.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	
		Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	79.000.000,00						1 Laporan	74.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	115.000.000,00						-	115.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	35.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	211.000.000,00						7 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	22.000.000,00						35 Unit	60.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	6 Unit	36.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	3 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
131.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**530.000.000,00**							**1.807.700.000,00**	
		Menurunnya Kerusakan hutan						***40.000.000,00***							***125.000.000,00***	
			1.Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	100 %		100 %	100 %	40.000.000,00						100 %	125.000.000,00	
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	185.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	50 Ha	160.000.000,00						50 Ha	350.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	25 Ha	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		50 Ha	50.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
			-	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
		Persentase ketersediaan dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	-	30.000.000,00						-	120.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						0,00					-		150.000.000,00	
		-						0,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	-	60.000.000,00						-	180.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	2 Operasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	30.000.000,00	UPTD KPHP Unit V Natuna
		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas						**196.000.000,00**							**417.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**196.000.000,00**							**417.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**196.000.000,00**							**417.000.000,00**	
132.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**645.000.000,00**							**1.229.000.000,00**	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	BB Predikat	143.000.000,00						-	190.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80.47 Indeks	143.000.000,00						-	190.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84.65 Indeks	143.000.000,00						-	190.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84,65 Indeks	115.500.000,00						-	130.000.000,00	
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daera	-		-	80,47 Indeks	21.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Indeks Profesionalisme Sumberdaya Manusia Perangkat Daerah	-		-	80,47 Indeks	94.500.000,00						-	100.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	80,47 Indeks	30.500.000,00						-	70.000.000,00	
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-		-	84,65 Indeks	30.500.000,00						-	70.000.000,00	
			Nilai SAKIP DLHK	-		-	77,50 Predikat	143.000.000,00						-	190.000.000,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan adminitrasi umum perangkat daerah						178.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00						1 Laporan	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	60.000.000,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	35.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						0,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	72.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	12.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	
		Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah						194.000.000,00					-		189.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	79.000.000,00						1 Laporan	74.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	115.000.000,00						-	115.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.500.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	12.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	80.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah						273.000.000,00					-		320.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	211.000.000,00						7 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	22.000.000,00						35 Unit	60.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						18.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	3 Unit	18.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	3 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	10.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
133.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**530.000.000,00**							**1.807.700.000,00**	
		Menurunnya Kerusakan hutan						***40.000.000,00***							***125.000.000,00***	
			1.Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	100 %		100 %	100 %	40.000.000,00						100 %	125.000.000,00	
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	185.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	50 Ha	160.000.000,00						50 Ha	350.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	150 Ha		0 Ha	25 Ha	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		50 Ha	50.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
			-	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
		Persentase ketersediaan dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH						120.000.000,00					-		370.000.000,00	
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	-	30.000.000,00						-	120.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						10.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-		-	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	20.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						0,00					-		150.000.000,00	
		-						0,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
		Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi						240.000.000,00					-		765.000.000,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	-	60.000.000,00						-	180.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-		-	2 Operasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	30.000.000,00	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**15.504.604.667,25**							**17.804.692.804,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.504.604.667,25**							**17.804.692.804,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**305.000.000,00**							**1.270.000.000,00**	
134.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**145.000.000,00**							**540.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan						***110.000.000,00***							***540.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	99.80 %		99.77 %	99.78 %	110.000.000,00						99.79 %	540.000.000,00	
			2.Persentase Kepemilikan KTP-el	67 %		63 %	64 %	110.000.000,00						65 %	540.000.000,00	
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						110.000.000,00					-		405.000.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						110.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00						1 Laporan	190.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	215.000.000,00	
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk						35.000.000,00							190.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	190.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk						75.000.000,00							215.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	215.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						35.000.000,00					-		135.000.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						35.000.000,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00						1 Laporan	135.000.000,00	
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk						35.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	135.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
135.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**35.000.000,00**							**390.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil						***35.000.000,00***							***390.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100 %		100 %	100 %	35.000.000,00						100 %	390.000.000,00	
			2.Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100 %		100 %	100 %	35.000.000,00						100 %	390.000.000,00	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						0,00					-		255.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil						0,00					-		255.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	255.000.000,00	
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota						0,00							255.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	255.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						35.000.000,00					-		135.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						35.000.000,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00						1 Laporan	135.000.000,00	
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil						35.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	135.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
136.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**115.000.000,00**							**315.000.000,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan						***115.000.000,00***							***315.000.000,00***	
			1.Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi	50 %		38.64 %	40.91 %	115.000.000,00						43.18 %	315.000.000,00	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						115.000.000,00					-		315.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	315.000.000,00	
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						100.000.000,00							315.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	315.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						115.000.000,00					-		315.000.000,00	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						115.000.000,00					-		315.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						15.000.000,00							0,00	
		Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	-		-	7 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
137.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**10.000.000,00**							**25.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan						***10.000.000,00***							***25.000.000,00***	
			1.Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun	100 %		100 %	100 %	10.000.000,00						100 %	25.000.000,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan						10.000.000,00					-		25.000.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan Provinsi						10.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	25.000.000,00	
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi						10.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**15.199.604.667,25**							**16.534.692.804,00**	
138.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.003.104.667,25**							**13.398.692.804,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi						***12.958.104.667,25***							***13.283.692.804,00***	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	90.92 Indeks		88.95 Indeks	89.15 Indeks	12.958.104.667,25						89.35 Indeks	13.283.692.804,00	
			3.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	100 Indeks		90 Indeks	93 Indeks	12.958.104.667,25						95 Indeks	13.283.692.804,00	
			3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	12.958.104.667,25						BB Predikat	13.283.692.804,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						103.500.000,00					-		163.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						103.500.000,00					-		163.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	22.200.000,00						4 Dokumen	42.200.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.500.000,00						4 Laporan	45.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.800.000,00						1 Laporan	75.800.000,00	
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						22.200.000,00							42.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	22.200.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	42.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						45.500.000,00							45.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	45.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.800.000,00							75.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.800.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.568.104.667,25					-		11.473.692.804,00	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.568.104.667,25					-		11.473.692.804,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	484.848.524,00						1 Dokumen	484.848.524,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan		70 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	11.073.256.143,25						74 Orang/ Bulan	10.963.844.280,00	
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.073.256.143,25							10.963.844.280,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan		70 Orang/ Bulan	68 Orang/ Bulan	11.073.256.143,25	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		74 Orang/ Bulan	10.963.844.280,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						484.848.524,00							484.848.524,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	484.848.524,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	484.848.524,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						10.000.000,00					-		15.000.000,00	
		Tersedianya laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						86.500.000,00					-		106.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						86.500.000,00					-		106.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	68.000.000,00						1 Paket	91.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		3 Orang	5 Orang	18.500.000,00						5 Orang	15.000.000,00	
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						68.000.000,00							91.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	68.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	91.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						18.500.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		3 Orang	2 Orang	18.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						566.700.000,00					-		737.500.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah						566.700.000,00					-		737.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	420.000.000,00						10 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	92.000.000,00						6 Paket	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	27.700.000,00						2 Paket	36.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.500.000,00						1 Paket	6.500.000,00	
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.500.000,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						92.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	92.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Paket	130.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						27.700.000,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	27.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	36.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						15.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.500.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						420.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	420.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						265.000.000,00					-		430.000.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						265.000.000,00					-		430.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00						10 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		5 Unit	10 Unit	115.000.000,00						10 Unit	160.000.000,00	
	2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	45.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						115.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		5 Unit	8 Unit	115.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	160.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						223.144.600,00					-		258.000.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						223.144.600,00					-		258.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.272.192,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	145.917.408,00						1 Laporan	168.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00						2 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.955.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.955.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.955.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.272.192,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.272.192,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						145.917.408,00							168.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	145.917.408,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	168.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						180.155.400,00					-		215.000.000,00	
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						180.155.400,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	145.155.400,00						8 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	35.000.000,00						15 Unit	35.000.000,00	
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						145.155.400,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	145.155.400,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
139.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**90.000.000,00**							**170.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Desa						***90.000.000,00***							***170.000.000,00***	
			1.Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan Desanya sesuai standar	25 Desa		15 Desa	15 Desa	90.000.000,00						20 Desa	170.000.000,00	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat						90.000.000,00					-		170.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa						90.000.000,00					-		170.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00						1 Dokumen	170.000.000,00	
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa						90.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	170.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
140.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**160.000.000,00**							**285.500.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa						***160.000.000,00***							***285.500.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Difasilitasi Kerjasamanya	61.82 %		52.36 %	54.18 %	160.000.000,00						56.73 %	285.500.000,00	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi						160.000.000,00					-		285.500.000,00	
		Tersedianya laporan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi						160.000.000,00					-		285.500.000,00	
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00						1 Dokumen	125.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota						85.000.000,00							125.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	125.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						0,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
141.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**550.000.000,00**							**655.500.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						***550.000.000,00***							***655.500.000,00***	
			1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 %		47.39 %	51.03 %	550.000.000,00						63.15 %	655.500.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						550.000.000,00					-		655.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						550.000.000,00					-		655.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	200 Orang		60 Orang	80 Orang	300.000.000,00						100 Orang	155.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	203.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00						1 Dokumen	112.500.000,00	
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	188 Orang		35 Orang	80 Orang	70.000.000,00						100 Orang	100.000.000,00	
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						100.000.000,00							203.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	203.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa						300.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	200 Orang		60 Orang	550 Orang	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	155.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						70.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	188 Orang		35 Orang	111 Orang	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						25.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						55.000.000,00							112.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	112.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
142.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**1.396.500.000,00**							**2.025.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan						***1.351.500.000,00***							***2.025.000.000,00***	
			1.Pesentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Yang Sudah Dibina	32.80 %		11.14 %	16.55 %	1.351.500.000,00						21.97 %	2.025.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						1.396.500.000,00					-		2.025.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00						1 Laporan	220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	255.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00						1 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00						1 Laporan	1.300.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	6 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	45.000.000,00						5 Lembaga	95.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit		30 Unit	2 Unit	131.500.000,00						2 Unit	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						65.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						45.000.000,00							95.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	6 Lembaga		5 Lembaga	30 Lembaga	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Lembaga	95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						131.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit		30 Unit	17 Unit	131.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						100.000.000,00							255.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	255.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						45.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	220.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						1.000.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.396.500.000,00					-		2.025.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						1.396.500.000,00					-		2.025.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Perhubungan						**30.276.463.840,89**							**41.138.020.043,30**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.276.463.840,89**							**41.138.020.043,30**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**30.276.463.840,89**							**41.138.020.043,30**	
143.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.676.463.840,89**							**21.122.662.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan						***19.856.463.840,89***							***20.087.662.180,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	19.856.463.840,89						BB Predikat	20.087.662.180,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	83.00 Indeks		81.50 Indeks	82.00 Indeks	19.856.463.840,89						82.50 Indeks	20.087.662.180,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00 Indeks		79.53 Indeks	80.99 Indeks	19.856.463.840,89						81.36 Indeks	20.087.662.180,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						130.000.000,00					-		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						130.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00						2 Laporan	125.000.000,00	
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						80.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	125.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.950.000.000,00					-		17.500.000.000,00	
		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.950.000.000,00					-		17.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2093 Orang/ Bulan		2093 Orang/ Bulan	2093 Orang/ Bulan	17.250.000.000,00						2093 Orang/ Bulan	16.650.000.000,00	
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.250.000.000,00							16.650.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2093 Orang/ Bulan		2093 Orang/ Bulan	2093 Orang/ Bulan	17.250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2093 Orang/ Bulan	16.650.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						650.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						60.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						60.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						60.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						240.000.000,00					-		390.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						240.000.000,00					-		390.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		3 Orang	5 Orang	40.000.000,00						5 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	100.000.000,00						0 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	50.000.000,00						3 Orang	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		3 Orang	4 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	40.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	973.463.840,89						1 Laporan	1.245.662.180,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	150.000.000,00						3 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	50.000.000,00	
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	80.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						793.463.840,89							885.662.180,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	793.463.840,89	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	885.662.180,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						130.000.000,00					-		186.000.000,00	
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						130.000.000,00					-		186.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.000.000,00						1 Unit	86.000.000,00	
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						80.000.000,00							86.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	86.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						408.000.000,00					-		496.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						408.000.000,00					-		496.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	275.000.000,00						1 Laporan	275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00						1 Laporan	96.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						275.000.000,00							275.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	275.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	275.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						48.000.000,00							96.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	96.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						70.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara						380.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	250.000.000,00						15 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	40.000.000,00						10 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						250.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
		Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						380.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara						380.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Perhubungan
144.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**2.800.000.000,00**							**2.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						***2.650.000.000,00***							***1.650.000.000,00***	
			2.Persentase Peningkatan Ketersedian Perlengkapan Jalan	100 %		62.84 %	69.40 %	2.650.000.000,00						78.17 %	1.650.000.000,00	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						300.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		1.500.000.000,00	
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia/terpelihara						300.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		1.500.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	300 Unit		110 Unit	181 Unit	200.000.000,00						242 Unit	1.300.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	100 Unit		20 Unit	100 Unit	100.000.000,00						100 Unit	200.000.000,00	
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						200.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	300 Unit		110 Unit	40 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		242 Unit	1.300.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						100.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	100 Unit		20 Unit	50 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		100 Unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						100.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						100.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi						50.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi						50.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						50.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi						50.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						2.050.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pemenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan						2.050.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.050.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi						2.050.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.050.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						250.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						250.000.000,00					Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi						250.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
145.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**7.215.000.000,00**							**19.375.357.863,30**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut						***6.780.000.000,00***							***18.075.357.863,30***	
			1.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 %		52.50 %	56.00 %	6.780.000.000,00						59.50 %	18.075.357.863,30	
			2.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	96.15 %		84.62 %	88.46 %	6.780.000.000,00						92.31 %	18.075.357.863,30	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi						200.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha						200.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi						200.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional						400.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		1.100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat						400.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		1.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00						1 Laporan	1.100.000.000,00	
	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi						400.000.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	1.100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan						100.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan						100.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						100.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait						100.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	
		Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	2 Unit	2.815.000.000,00						2 Unit	3.000.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	3 Unit		2 Unit	2 Unit	3.500.000.000,00						2 Unit	14.875.357.863,30	
	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional						3.500.000.000,00							14.875.357.863,30	
		Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	3 Unit		2 Unit	1 Unit	3.500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	14.875.357.863,30	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						2.580.000.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	1 Unit	2.580.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam						**70.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**70.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**70.000.000,00**							**200.000.000,00**	
146.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.676.463.840,89**							**21.122.662.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan						***30.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	30.000.000,00						BB Predikat	50.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	83.00 Indeks		81.50 Indeks	82.00 Indeks	30.000.000,00						82.50 Indeks	50.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00 Indeks		79.53 Indeks	80.99 Indeks	30.000.000,00						81.36 Indeks	50.000.000,00	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
		Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	973.463.840,89						1 Laporan	1.245.662.180,00	
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam
147.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**7.215.000.000,00**							**19.375.357.863,30**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut						***40.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 %		52.50 %	56.00 %	40.000.000,00						59.50 %	150.000.000,00	
			2.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	96.15 %		84.62 %	88.46 %	40.000.000,00						92.31 %	150.000.000,00	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	
		Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	2 Unit	2.815.000.000,00						2 Unit	3.000.000.000,00	
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	150.000.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam
		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun						**70.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**70.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**70.000.000,00**							**200.000.000,00**	
148.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.676.463.840,89**							**21.122.662.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan						***30.000.000,00***							***50.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	30.000.000,00						BB Predikat	50.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	83.00 Indeks		81.50 Indeks	82.00 Indeks	30.000.000,00						82.50 Indeks	50.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00 Indeks		79.53 Indeks	80.99 Indeks	30.000.000,00						81.36 Indeks	50.000.000,00	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
		Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	973.463.840,89						1 Laporan	1.245.662.180,00	
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
149.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**7.215.000.000,00**							**19.375.357.863,30**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut						***40.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 %		52.50 %	56.00 %	40.000.000,00						59.50 %	150.000.000,00	
			2.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	96.15 %		84.62 %	88.46 %	40.000.000,00						92.31 %	150.000.000,00	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	
		Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	2 Unit	2.815.000.000,00						2 Unit	3.000.000.000,00	
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						40.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	150.000.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan						**105.000.000,00**							**380.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**105.000.000,00**							**380.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**105.000.000,00**							**380.000.000,00**	
150.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.676.463.840,89**							**21.122.662.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan						***30.000.000,00***							***80.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	30.000.000,00						BB Predikat	80.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	83.00 Indeks		81.50 Indeks	82.00 Indeks	30.000.000,00						82.50 Indeks	80.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00 Indeks		79.53 Indeks	80.99 Indeks	30.000.000,00						81.36 Indeks	80.000.000,00	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
		Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	973.463.840,89						1 Laporan	1.245.662.180,00	
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						30.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
151.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**7.215.000.000,00**							**19.375.357.863,30**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut						***75.000.000,00***							***300.000.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 %		52.50 %	56.00 %	75.000.000,00						59.50 %	300.000.000,00	
			2.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	96.15 %		84.62 %	88.46 %	75.000.000,00						92.31 %	300.000.000,00	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	
		Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	2 Unit	2.815.000.000,00						2 Unit	3.000.000.000,00	
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	3 Unit	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	300.000.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepualauan Anambas						**100.000.000,00**							**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**100.000.000,00**							**300.000.000,00**	
152.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.676.463.840,89**							**21.122.662.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan						***50.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	50.000.000,00						BB Predikat	100.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	83.00 Indeks		81.50 Indeks	82.00 Indeks	50.000.000,00						82.50 Indeks	100.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00 Indeks		79.53 Indeks	80.99 Indeks	50.000.000,00						81.36 Indeks	100.000.000,00	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
		Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	973.463.840,89						1 Laporan	1.245.662.180,00	
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepualauan Anambas
153.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**7.215.000.000,00**							**19.375.357.863,30**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut						***50.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 %		52.50 %	56.00 %	50.000.000,00						59.50 %	200.000.000,00	
			2.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	96.15 %		84.62 %	88.46 %	50.000.000,00						92.31 %	200.000.000,00	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	
		Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	2 Unit	2.815.000.000,00						2 Unit	3.000.000.000,00	
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	200.000.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepualauan Anambas
		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga						**70.000.000,00**							**280.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**70.000.000,00**							**280.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**70.000.000,00**							**280.000.000,00**	
154.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.676.463.840,89**							**21.122.662.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan						***40.000.000,00***							***80.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	40.000.000,00						BB Predikat	80.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	83.00 Indeks		81.50 Indeks	82.00 Indeks	40.000.000,00						82.50 Indeks	80.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00 Indeks		79.53 Indeks	80.99 Indeks	40.000.000,00						81.36 Indeks	80.000.000,00	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
		Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum						1.328.463.840,89					-		1.700.662.180,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	973.463.840,89						1 Laporan	1.245.662.180,00	
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						40.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
155.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**7.215.000.000,00**							**19.375.357.863,30**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut						***30.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 %		52.50 %	56.00 %	30.000.000,00						59.50 %	200.000.000,00	
			2.Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	96.15 %		84.62 %	88.46 %	30.000.000,00						92.31 %	200.000.000,00	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	
		Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara						6.415.000.000,00					Meningkatkan Layanan Transportasi Angkutan Perairan		17.975.357.863,30	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	2 Unit	2.815.000.000,00						2 Unit	3.000.000.000,00	
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						30.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	200.000.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
		Dinas Komunikasi dan Informatika						**26.285.374.110,15**							**16.911.201.858,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**26.285.374.110,15**							**16.911.201.858,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**25.960.374.110,15**							**16.701.201.858,00**	
156.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**18.348.374.110,15**							**16.641.201.858,00**	
		Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian						***18.113.374.110,15***							***16.286.201.858,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	18.113.374.110,15						BB Predikat	16.286.201.858,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	80 Indeks		76 Indeks	77 Indeks	18.113.374.110,15						78 Indeks	16.286.201.858,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks		82 Indeks	83 Indeks	18.113.374.110,15						84 Indeks	16.286.201.858,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00					Masyarakat		200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00					Masyarakat		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	75.000.000,00						5 Laporan	100.000.000,00	
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		5 Laporan	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.886.374.110,15					Masyarakat		15.419.301.858,00	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.886.374.110,15					Masyarakat		15.419.301.858,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	381.948.000,00						12 Dokumen	528.424.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 Orang/ Bulan		158 Orang/ Bulan	158 Orang/ Bulan	16.504.426.110,15						158 Orang/ Bulan	14.890.877.858,00	
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.504.426.110,15							14.890.877.858,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 Orang/ Bulan		158 Orang/ Bulan	145 Orang/ Bulan	16.504.426.110,15	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		158 Orang/ Bulan	14.890.877.858,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						381.948.000,00							528.424.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	381.948.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		12 Dokumen	528.424.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		3 Orang	5 Orang	30.000.000,00						5 Orang	50.000.000,00	
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		3 Orang	5 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		5 Orang	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						450.000.000,00					Masyarakat		515.000.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah						450.000.000,00					Masyarakat		515.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	40.000.000,00						4 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00						4 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00						4 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00						4 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00						4 Paket	50.000.000,00	
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		4 Paket	10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		4 Paket	10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		4 Paket	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		4 Paket	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		4 Paket	45.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					Masyarakat		115.000.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					Masyarakat		115.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00						5 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	65.000.000,00	
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		5 Unit	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Unit	65.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						117.000.000,00					Masyarakat		189.000.000,00	
		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						117.000.000,00					Masyarakat		189.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00						1 Laporan	144.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00						1 Laporan	45.000.000,00	
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	45.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						72.000.000,00							144.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	144.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						615.000.000,00					Masyarakat		152.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						615.000.000,00					Masyarakat		152.900.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	560.000.000,00						2 Unit	87.900.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	30.000.000,00						20 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		20 Unit	25 Unit	25.000.000,00						25 Unit	35.000.000,00	
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						560.000.000,00							87.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	560.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		2 Unit	87.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		20 Unit	30.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		20 Unit	25 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		25 Unit	35.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
157.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**4.262.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah						***4.162.000.000,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	76 Indeks		72 Indeks	73 Indeks	4.162.000.000,00						74 Indeks	0,00	
			2.Nilai Keterbukaan informasi Publik	90 Nilai		70 Nilai	75 Nilai	4.162.000.000,00						80 Nilai	0,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi						4.262.000.000,00					Masyarakat		0,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi						4.262.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	2.535.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kab/Kota yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	280.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	-	70.000.000,00						-	0,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	1.227.000.000,00						-	0,00	
	2.16.02.1.01.0026	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						1.227.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	65 %	1.227.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0028	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	2 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0029	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						2.535.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	500000 Orang	2.535.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0030	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	6 Rekomendasi	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0031	Penyusunan Konten						280.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	1000 Konten	280.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0032	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat						70.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	65 %	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0033	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kab/Kota yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	5 Komunitas	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
158.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**3.350.000.000,00**							**60.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika						***3.350.000.000,00***							***60.000.000,00***	
			2.Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	7.05 Indeks		6.85 Indeks	6.90 Indeks	3.350.000.000,00						6.95 Indeks	60.000.000,00	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						50.000.000,00					Masyarakat		60.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau						50.000.000,00					Masyarakat		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						50.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Dokumen	60.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						3.300.000.000,00					Masyarakat		0,00	
		Meningkatnya Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar						3.300.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	1.200.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	2.000.000.000,00						-	0,00	
	2.16.03.1.02.0038	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						1.200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	5 Layanan	1.200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0039	Penyediaan Akses Internet						2.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	32 Titik	2.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**175.000.000,00**							**0,00**	
159.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**175.000.000,00**							**0,00**	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						***125.000.000,00***							***0,00***	
			1.Indeks Pembangunan Statistik	3.00 Indeks		2.80 Indeks	2.85 Indeks	125.000.000,00						2.90 Indeks	0,00	
		Meningkatnya Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS						175.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	84 %		0 %	81 %	75.000.000,00						82 %	0,00	
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral						75.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	84 %		0 %	81 %	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		82 %	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01.0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						175.000.000,00					Masyarakat		0,00	
		Meningkatnya Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS						175.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.20.02.1.01.0022	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional						50.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	50 %	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**150.000.000,00**							**210.000.000,00**	
160.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**150.000.000,00**							**210.000.000,00**	
		Meningkatnya keamanan siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah						***150.000.000,00***							***210.000.000,00***	
			1.Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	62 %		46 %	50 %	150.000.000,00						54 %	210.000.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						150.000.000,00					Masyarakat		210.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah ASN yang menerapkan sistem manajemen keamanan informasi dan aplikasi persandian						150.000.000,00					Masyarakat		210.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	160.000.000,00	
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						100.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	160.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						**43.015.059.006,00**							**32.666.716.576,52**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**43.015.059.006,00**							**32.666.716.576,52**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**43.015.059.006,00**							**32.666.716.576,52**	
161.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.710.349.559,00**							**13.710.349.558,52**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM						***12.925.349.559,00***							***12.925.349.558,52***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	12.925.349.559,00						BB Predikat	12.925.349.558,52	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	82.08 Indeks		81.26 Indeks	81.48 Indeks	12.925.349.559,00						81.67 Indeks	12.925.349.558,52	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	83.72 Indeks		83.32 Indeks	83.42 Indeks	12.925.349.559,00						83.52 Indeks	12.925.349.558,52	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						220.000.000,00					-		220.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen)						220.000.000,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00						2 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00						6 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	25.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.223.349.559,00					-		11.223.349.558,52	
		Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)						11.223.349.559,00					-		11.223.349.558,52	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	436.305.100,00						4 Dokumen	436.305.100,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan		30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	10.762.044.459,00						30 Orang/ Bulan	10.762.044.458,52	
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.762.044.459,00							10.762.044.458,52	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan		30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	10.762.044.459,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		30 Orang/ Bulan	10.762.044.458,52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						436.305.100,00							436.305.100,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	436.305.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	436.305.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	25.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
	2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						102.000.000,00					-		102.000.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Orang)						102.000.000,00					-		102.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	144 Paket		72 Paket	72 Paket	72.000.000,00						72 Paket	72.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang		10 Orang	10 Orang	30.000.000,00						10 Orang	30.000.000,00	
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						72.000.000,00							72.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	144 Paket		72 Paket	72 Paket	72.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		72 Paket	72.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang		10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.040.000.000,00					-		1.040.000.000,00	
		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)						1.040.000.000,00					-		1.040.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00						1 Laporan	225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00						1 Laporan	450.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.000.000,00						1 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	80.000.000,00						3 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	70.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						80.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	80.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						225.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	225.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	450.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						430.000.000,00					-		430.000.000,00	
		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang (Dengan Satuan:Unit)						430.000.000,00					-		430.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
	2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						460.000.000,00					-		460.000.000,00	
		Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri (Dengan Satuan:Laporan)						460.000.000,00					-		460.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	320.000.000,00						1 Laporan	320.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						320.000.000,00							320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	320.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	320.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						225.000.000,00					-		225.000.000,00	
		Terlaksananya Jasa pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)						225.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	150.000.000,00						9 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	25.000.000,00						20 Unit	25.000.000,00	
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Unit	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	25.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
162.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**						**250.000.000,00**							**250.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam						***190.000.000,00***							***190.000.000,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	20.70 %		18.88 %	19.30 %	190.000.000,00						19.73 %	190.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						60.000.000,00					-		60.000.000,00	
		Terfasilitasinya KSP/USP mendapatkan penerbitan izin usaha (Dengan Satuan:KSP/ USP)						60.000.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	15 Unit Usaha		15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	60.000.000,00						15 Unit Usaha	60.000.000,00	
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	15 Unit Usaha		15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit Usaha	60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						190.000.000,00					-		190.000.000,00	
		Terfasilitasinya KSP/USP mendapatkan penerbitan izin usaha kantor cabang (Dengan Satuan:KSP/ USP)						190.000.000,00					-		190.000.000,00	
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	60.000.000,00						1 Unit Usaha	60.000.000,00	
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi&	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Usaha	60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Terfasilitasinya KSP/USP mendapatkan penerbitan izin usaha kantor cabang (Dengan Satuan:KSP/ USP)						190.000.000,00					-		190.000.000,00	
			-	-		-	-	130.000.000,00						-	130.000.000,00	
	2.17.02.1.02.0005	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						130.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
163.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**120.000.000,00**							**120.000.000,00**	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi						***60.000.000,00***							***60.000.000,00***	
			1.Persentase Koperasi yang Diawasi	7.39 %		5.82 %	6.20 %	60.000.000,00						6.59 %	60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)						120.000.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 Unit Usaha		25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	60.000.000,00						25 Unit Usaha	60.000.000,00	
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 Unit Usaha		25 Unit Usaha	326 Unit Usaha	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit Usaha	60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						120.000.000,00					-		120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)						120.000.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang diperiksa	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.17.03.1.01.0005	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa	-		-	25 Unit Usaha	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
164.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**60.000.000,00**							**60.000.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi						***60.000.000,00***							***60.000.000,00***	
			1.Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya	10.90 %		9.16 %	9.58 %	60.000.000,00						10.02 %	60.000.000,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						60.000.000,00					-		60.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)						60.000.000,00					-		60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha		25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	60.000.000,00						25 Unit Usaha	60.000.000,00	
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha		25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit Usaha	60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
165.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**720.000.000,00**							**720.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian						***320.000.000,00***							***320.000.000,00***	
			1.Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	37.50 %		30.50 %	32.22 %	320.000.000,00						33.96 %	320.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)						720.000.000,00					-		720.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	107 Orang		107 Orang	107 Orang	120.000.000,00						107 Orang	120.000.000,00	
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	107 Orang		107 Orang	107 Orang	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		107 Orang	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						720.000.000,00					-		720.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)						720.000.000,00					-		720.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang mendapatkan asistensi	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang mengikuti bimbingan teknis.	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat.	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.17.05.1.01.0003	Pelatihan Literasi Digital Koperasi						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelatihan Literasi Digital untuk Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan Anggota Koperasi	Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat.	-		-	80 Koperasi	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.05.1.01.0005	Bimbingan Teknis Operasional Pelaporan Data Koperasi secara mandiri kedalam Online Data System Koperasi (ODS Koperasi)						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelaporan Data Koperasi secara mandiri.	Jumlah Koperasi yang mengikuti bimbingan teknis.	-		-	80 Koperasi	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.05.1.01.0006	Program Pendampingan Digitalisasi Koperasi						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pendampingan teknis untuk koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan asistensi	-		-	80 Koperasi	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
166.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**670.000.000,00**							**690.000.000,00**	
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi						***670.000.000,00***							***690.000.000,00***	
			1.Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	50.12 %		39.89 %	42.64 %	670.000.000,00						45.43 %	690.000.000,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						670.000.000,00					-		690.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)						670.000.000,00					-		690.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendampingan restrukturisasi dan revitalisasi	-		-	-	470.000.000,00						-	490.000.000,00	
			Jumlah koperasi yang menggunakanaplikasi digital	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.17.06.1.01.0011	Digitalisasi pencatatan transaksi dan operasional koperasi						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Implementasi sistem pencatatan transaksi dan operasional koperasi	Jumlah koperasi yang menggunakanaplikasi digital	-		-	27 Koperasi	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.06.1.01.0012	Pendampingan dan Fasilitasi Koperasi						470.000.000,00							490.000.000,00	
		Terwujudnya restrukturisasi dan revitalisasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendampingan restrukturisasi dan revitalisasi	-		-	27 Koperasi	470.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	490.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
167.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**14.005.000.000,00**							**8.398.750.525,00**	
		Meningkatnya Produktivitas UMKM						***13.285.000.000,00***							***8.028.750.525,00***	
			1.Rasio Kewirausahaan Daerah	4.76 %		3.60 %	3.89 %	13.285.000.000,00						4.18 %	8.028.750.525,00	
			2.Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	15.95 %		15.15 %	15.35 %	13.285.000.000,00						15.55 %	8.028.750.525,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						14.005.000.000,00					-		8.398.750.525,00	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Dengan Satuan:Jumlah Wirausaha Baru)						14.005.000.000,00					-		8.398.750.525,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	350.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	12.000.000.000,00						-	6.743.750.525,00	
			Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	-	280.000.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	350.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	120.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	-	120.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penyelesaian Perkara Hukum	-		-	-	85.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.17.07.1.01.0013	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	40 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0014	Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Terfasilitasinya perlindungan UMKM melalui Pemulihan Usaha dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	5 Unit Usaha	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.07.1.01.0015	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						12.000.000.000,00							6.743.750.525,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	1956 Orang	12.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	6.743.750.525,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0016	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	175 Unit Usaha	350.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	350.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0017	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	15 Unit Usaha	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0018	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						350.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	350.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi pelaku UMKM						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	-		-	20 Unit Usaha	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0020	Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha						280.000.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	100 Orang	280.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	280.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0021	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	250 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	40 Unit Usaha	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0023	Layanan Bantuan Penyelesaian Perkara Hukum bagi Pelaku Usaha						85.000.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya perlindungan Pelaku Usaha dalam Penyelesaian Perkara Hukum	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penyelesaian Perkara Hukum	-		-	5 Orang	85.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	85.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0024	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	5 Lembaga	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
168.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**13.479.709.447,00**							**8.717.616.493,00**	
		Meningkatnya Daya Saing UMKM						***11.279.709.447,00***							***6.317.616.493,00***	
			1.Persentase UMKM yang dikembangkan	36.39 %		35.19 %	35.49 %	11.279.709.447,00						35.79 %	6.317.616.493,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						13.479.709.447,00					-		8.717.616.493,00	
		Terlaksananya fasilitasi pengembangan UMKM (Dengan Satuan:UMKM)						13.479.709.447,00					-		8.717.616.493,00	
			Jumlah Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya	-		-	-	252.000.000,00						-	252.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan perkuatan	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang terintegrasi pada Layanan Usaha Terpadu dalam rangka pengembangan usaha	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	-	240.000.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk	-		-	-	400.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan dan Fasilitasi Insentif atau Relaksasi Perpajakan	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah UMKM yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi Perluasan Akses Investasi	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	-	2.689.505.524,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negeri	-		-	-	3.082.587.430,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perluasan Produk Pasar Luar Negeri	-		-	-	400.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	1.973.379.000,00						-	1.973.379.000,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	-	592.237.493,00						-	602.237.493,00	
	2.17.08.1.01.0007	Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM						240.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM	Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	4 Lembaga	240.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	240.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0008	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Fungsional Pengembang Kewirausahaan						252.000.000,00							252.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Fungsional Pengembang Kewirausahaan	Jumlah Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya	-		-	9 Orang	252.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	252.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0009	Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator	Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan perkuatan	-		-	1 Lembaga	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK	-	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0010	Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik	Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	50 Orang	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0011	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up						1.973.379.000,00							1.973.379.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	100 Unit Usaha	1.973.379.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK	-	-		-	1.973.379.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0012	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha						592.237.493,00							602.237.493,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	150 Orang	592.237.493,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	602.237.493,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0014	Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri						3.082.587.430,00							400.000.000,00	
		Terfasilitasinya pengembangan UMKM dalam Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negeri	-		-	50 Produk	3.082.587.430,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0015	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	850 Unit Usaha	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0016	Pembinaan dan Fasilitasi Insentif atau Relaksasi Perpajakan bagi UMKM						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Insentif atau Relaksasi Perpajakan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan dan Fasilitasi Insentif atau Relaksasi Perpajakan	-		-	50 Unit Usaha	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0017	Pembinaan dan Fasilitasi Perluasan Produk UMKM Pasar Luar Negeri						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Terfasilitasinya pengembangan UMKM dalam Perluasan Produk UMKM Pasar Luar Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perluasan Produk Pasar Luar Negeri	-		-	20 Produk	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0018	Integrasi Lembaga Layanan Usaha Terpadu dalam rangka pengembangan usaha						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Integrasi Lembaga Layanan Usaha Terpadu dalam rangka pengembangan usaha	Jumlah Lembaga yang terintegrasi pada Layanan Usaha Terpadu dalam rangka pengembangan usaha	-		-	5 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM	-		-	10 Unit Usaha	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0020	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Riset dan Inovasi Produk bagi UMKM						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk bagi UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk	-		-	10 Unit Usaha	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0021	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	35 Unit Usaha	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0022	Penyusunan Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan						100.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0023	Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM						2.689.505.524,00							800.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	200 Unit Usaha	2.689.505.524,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	800.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0024	Penyusunan Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan						100.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0025	Pembinaan dan Fasilitasi Perluasan Akses Investasi bagi UMKM						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perluasan Akses Investasi bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi Perluasan Akses Investasi	-		-	10 Unit Usaha	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP						**16.316.594.235,65**							**18.968.873.421,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.316.594.235,65**							**18.968.873.421,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**16.316.594.235,65**							**18.968.873.421,00**	
169.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**15.308.594.235,65**							**16.723.873.421,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP						***15.308.594.235,65***							***16.493.873.421,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	15.308.594.235,65						BB Predikat	16.493.873.421,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	87.68 Indeks		86.36 Indeks	86.69 Indeks	15.308.594.235,65						87.02 Indeks	16.493.873.421,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	4.80 Indeks		4.00 Indeks	4.26 Indeks	15.308.594.235,65						4.52 Indeks	16.493.873.421,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						151.379.036,00					-		460.000.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia						151.379.036,00					-		460.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	57.972.196,00						9 Dokumen	220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	47.710.940,00						4 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	45.695.900,00						7 Laporan	120.000.000,00	
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						57.972.196,00							220.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	57.972.196,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	220.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						47.710.940,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	47.710.940,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	120.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.695.900,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	45.695.900,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	120.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.829.591.090,65					-		14.052.616.535,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan						13.829.591.090,65					-		14.052.616.535,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	691.084.000,00						1 Dokumen	467.496.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.996.855,00						1 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan		65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	13.125.510.235,65						65 Orang/ Bulan	13.525.120.535,00	
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.125.510.235,65							13.525.120.535,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan		65 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	13.125.510.235,65	Provinsi Kepulauan Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		65 Orang/ Bulan	13.525.120.535,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						691.084.000,00							467.496.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	691.084.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	467.496.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						12.996.855,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.996.855,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	60.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						42.150.000,00					-		140.000.000,00	
		Persentase Disiplin Pegawai						42.150.000,00					-		140.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		5 Orang	15 Orang	42.150.000,00						20 Orang	140.000.000,00	
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						42.150.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		5 Orang	20 Orang	42.150.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	140.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						389.213.535,00					-		596.082.079,00	
		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						389.213.535,00					-		596.082.079,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.100.000,00						4 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	18.746.100,00						4 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	185.267.460,00						12 Laporan	310.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.230.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.041.005,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.295.483,00						1 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	96.250.306,00						1 Paket	88.082.079,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	42.283.181,00						1 Paket	30.000.000,00	
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.295.483,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.295.483,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						96.250.306,00							88.082.079,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	96.250.306,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	88.082.079,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						42.283.181,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	42.283.181,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12.230.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.230.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.041.005,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.041.005,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						12.100.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.100.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						18.746.100,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	18.746.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						185.267.460,00							310.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	185.267.460,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	310.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						712.009.074,00					-		875.174.807,00	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						712.009.074,00					-		875.174.807,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	192.876.456,00						12 Laporan	324.877.247,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	402.626.065,00						12 Laporan	460.297.560,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116.506.553,00						1 Laporan	90.000.000,00	
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						192.876.456,00							324.877.247,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	192.876.456,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	324.877.247,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						116.506.553,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116.506.553,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	90.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						402.626.065,00							460.297.560,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	402.626.065,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	460.297.560,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						184.251.500,00					-		600.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan						184.251.500,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	84.651.000,00						1 Unit	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	73.565.000,00						12 Unit	190.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	26.035.500,00						10 Unit	60.000.000,00	
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						73.565.000,00							190.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	73.565.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	190.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.035.500,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	26.035.500,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	60.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						84.651.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	84.651.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
170.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**244.000.000,00**							**350.000.000,00**	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi						***244.000.000,00***							***225.000.000,00***	
			1.Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal	20 %		16 %	16 %	244.000.000,00						16 %	225.000.000,00	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						93.000.000,00					-		125.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kajian dan Regulasi Terkait Penanaman Modal yang Tersusun						93.000.000,00					-		125.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						39.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi						54.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi						151.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah		1 Daerah	1 Daerah	53.000.000,00						1 Daerah	50.000.000,00	
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)						53.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah		1 Daerah	1 Daerah	53.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Daerah	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi						151.000.000,00					-		225.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi						151.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	-	58.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-		-	-	40.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.18.02.1.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.02.1.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi						58.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	1 Dokumen	58.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
171.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**205.000.000,00**							**630.000.000,00**	
		Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal						***205.000.000,00***							***630.000.000,00***	
			1.Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti	20 %		16 %	16 %	205.000.000,00						16 %	630.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						205.000.000,00					-		630.000.000,00	
		Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal						205.000.000,00					-		630.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	151.000.000,00						1 Dokumen	560.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						151.000.000,00							560.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	151.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	560.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						54.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
172.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**310.000.000,00**							**725.000.000,00**	
		Meningkatnya Perizinan berusaha Berbasis Risiko						***203.000.000,00***							***525.000.000,00***	
			1.Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai SOP	20 %		16 %	16 %	203.000.000,00						16 %	525.000.000,00	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						106.000.000,00					-		250.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha yang Terlayani Ruang Lingkup Kabupaten/Kota						106.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	17 Kegiatan usaha		10 Kegiatan usaha	6 Kegiatan usaha	47.000.000,00						6 Kegiatan usaha	100.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	59.000.000,00						500 Pelaku Usaha	150.000.000,00	
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						59.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	59.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						47.000.000,00							100.000.000,00	
		Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	17 Kegiatan usaha		10 Kegiatan usaha	12 Kegiatan usaha	47.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Kegiatan usaha	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						204.000.000,00					-		475.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan Yang Terlayani Kewenangan Daerah Provinsi						204.000.000,00					-		475.000.000,00	
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	18 Kegiatan Usaha		14 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	48.000.000,00						6 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	49.000.000,00						1 Pelaku Usaha	130.000.000,00	
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	59.000.000,00						500 Pelaku Usaha	145.000.000,00	
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						48.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						49.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	49.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Pelaku Usaha	130.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						59.000.000,00							145.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	59.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Pelaku Usaha	145.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						48.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	18 Kegiatan Usaha		14 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	48.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
173.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**195.000.000,00**							**390.000.000,00**	
		Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal						***195.000.000,00***							***390.000.000,00***	
			1.Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	20 %		16 %	16 %	195.000.000,00						16 %	390.000.000,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						195.000.000,00					-		390.000.000,00	
		Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM						195.000.000,00					-		390.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	45 Kegiatan usaha		25 Kegiatan usaha	30 Kegiatan usaha	73.000.000,00						35 Kegiatan usaha	180.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70 Pelaku Usaha		40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	70.000.000,00						40 Pelaku Usaha	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan usaha		4 Kegiatan usaha	4 Kegiatan usaha	52.000.000,00						5 Kegiatan usaha	100.000.000,00	
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal						73.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	45 Kegiatan usaha		25 Kegiatan usaha	30 Kegiatan usaha	73.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Kegiatan usaha	180.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						52.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan usaha		4 Kegiatan usaha	8 Kegiatan usaha	52.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Kegiatan usaha	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						70.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70 Pelaku Usaha		40 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Pelaku Usaha	110.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
174.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**54.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi penanaman Modal						***54.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Persentase Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	20 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	54.000.000,00						16 Dokumen	150.000.000,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						54.000.000,00					-		150.000.000,00	
		Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik						54.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						54.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga						**29.926.402.636,56**							**36.845.518.709,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29.926.402.636,56**							**36.845.518.709,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**29.926.402.636,56**							**36.845.518.709,00**	
175.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**15.346.402.636,56**							**16.087.392.709,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan di Bidang Olahraga						***15.156.402.636,56***							***15.337.392.709,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	15.156.402.636,56						BB Predikat	15.337.392.709,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	81 Indeks		77 Indeks	78 Indeks	15.156.402.636,56						79 Indeks	15.337.392.709,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	88 Indeks		80 Indeks	85 Indeks	15.156.402.636,56						86 Indeks	15.337.392.709,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						134.910.000,00					-		275.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						134.910.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	54.910.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						54.910.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	54.910.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.429.501.987,00					-		9.774.961.036,00	
		Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.429.501.987,00					-		9.774.961.036,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	690.432.000,00						12 Dokumen	768.384.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	34.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546 Orang/ Bulan		546 Orang/ Bulan	546 Orang/ Bulan	12.709.069.987,00						546 Orang/ Bulan	8.972.577.036,00	
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.709.069.987,00							8.972.577.036,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546 Orang/ Bulan		546 Orang/ Bulan	546 Orang/ Bulan	12.709.069.987,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		546 Orang/ Bulan	8.972.577.036,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						690.432.000,00							768.384.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	690.432.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	768.384.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						30.000.000,00							34.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	34.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					-		233.075.688,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					-		233.075.688,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	233.075.688,00	
	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							233.075.688,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	233.075.688,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						85.000.000,00					-		85.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						85.000.000,00					-		85.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	88 Paket		88 Paket	88 Paket	65.000.000,00						88 Paket	65.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	20.000.000,00						4 Orang	20.000.000,00	
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	88 Paket		88 Paket	88 Paket	65.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		88 Paket	65.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	20.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						470.000.000,00					-		667.000.000,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						470.000.000,00					-		667.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	44.000.000,00						12 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	40.000.000,00						5 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	40.000.000,00						5 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	60.000.000,00						5 Paket	67.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	30.000.000,00						8 Paket	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							67.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	2 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	67.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	4 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	40.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	2 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	10.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						44.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	44.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						250.000.000,00					-		1.200.264.851,00	
		Terlaksananya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu						250.000.000,00					-		1.200.264.851,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	400.264.851,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
	2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							400.264.851,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.264.851,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						346.990.649,56					-		2.832.091.134,00	
		Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusasn Pemerintahan Daerah						346.990.649,56					-		2.832.091.134,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00						12 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	76.990.649,56						12 Laporan	2.532.091.134,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00						4 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	10.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						230.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	40.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						76.990.649,56							2.532.091.134,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	76.990.649,56	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	2.532.091.134,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						630.000.000,00					-		1.020.000.000,00	
		Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara						630.000.000,00					-		1.020.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.000.000,00						1 Unit	220.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	150.000.000,00						11 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00						1 Unit	550.000.000,00	
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Unit	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						80.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	220.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	550.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
176.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**1.010.000.000,00**							**6.650.000.000,00**	
		Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan						***710.000.000,00***							***6.450.000.000,00***	
			2.Rasio Wirausaha Pemuda	3.65 Rasio		1.89 Rasio	2.31 Rasio	710.000.000,00						2.80 Rasio	6.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	0.32 %		0.23 %	0.24 %	710.000.000,00						0.27 %	6.450.000.000,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						910.000.000,00					-		6.450.000.000,00	
		Terlaksananya Pemuda yang difasilitasi dalam Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						910.000.000,00					-		6.450.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	60 Orang		50 Orang	60 Orang	200.000.000,00						60 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	80 Orang		175 Orang	80 Orang	300.000.000,00						80 Orang	400.000.000,00	
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	60 Orang		50 Orang	60 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Orang	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	80 Orang		175 Orang	60 Orang	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Orang	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Terlaksananya Organisasi Kepemudaan yang dilakukan Pemberdayaan dan Pengembangan						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	4 Organisasi		4 Organisasi	4 Organisasi	50.000.000,00						4 Organisasi	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	80 Persentase		80 Persentase	80 Persentase	50.000.000,00						80 Persentase	100.000.000,00	
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	80 Persentase		80 Persentase	80 Persentase	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Persentase	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	4 Organisasi		4 Organisasi	1 Organisasi	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Organisasi	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Pemuda yang difasilitasi dalam Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						910.000.000,00					-		6.450.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-		-	-	40.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	-	50.000.000,00						-	5.000.000.000,00	
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	-	20.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.19.02.1.01.0016	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	-		-	40 Persentase	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0018	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						20.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	3 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0019	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-		-	20 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0020	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi						40.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	350.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0021	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi						50.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
177.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**12.470.000.000,00**							**13.108.126.000,00**	
		Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga						***12.220.000.000,00***							***12.408.126.000,00***	
			2.Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional	1.01 %		0.76 %	0.90 %	12.220.000.000,00						0.98 %	12.408.126.000,00	
			3.Cakupan Pembinaan Atlet Muda	16.30 %		7.98 %	9.49 %	12.220.000.000,00						13.28 %	12.408.126.000,00	
		Terlaksananya Atlet yang dikirimkan ke Kejuaraan Olahraga						2.550.000.000,00					-		2.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00						1 Kegiatan	200.000.000,00	
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Kegiatan	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						3.900.000.000,00					-		4.358.126.000,00	
		Terlaksananya Atlet Muda yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						3.900.000.000,00					-		4.358.126.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	-		-	-	200.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	-		-	-	1.450.000.000,00						-	2.047.470.000,00	
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-		-	-	2.250.000.000,00						-	2.210.656.000,00	
	2.19.03.1.01.0005	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus						200.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	-		-	6 Kegiatan	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.1.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi						1.450.000.000,00							2.047.470.000,00	
		Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	-		-	3 Unit	1.450.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.047.470.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.1.01.0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha						2.250.000.000,00							2.210.656.000,00	
		Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-		-	2 Unit	2.250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.210.656.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga						2.550.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
		Terlaksananya Atlet yang dikirimkan ke Kejuaraan Olahraga						2.550.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	-		-	-	850.000.000,00						-	900.000.000,00	
	2.19.03.1.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga						1.500.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-		-	85 Orang	1.500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.1.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi						850.000.000,00							900.000.000,00	
		Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	-		-	5 Kegiatan	850.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	900.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional						270.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Atlet yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi						270.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-		-	-	50.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	-		-	-	150.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	-	20.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	50.000.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.1.03.0010	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						20.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	1 Pelatda	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.1.03.0011	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi						150.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.1.03.0013	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						50.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	5 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.1.03.0014	Seleksi Atlet Daerah						50.000.000,00							300.000.000,00	
		Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-		-	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						5.750.000.000,00					-		5.650.000.000,00	
		Terlaksananya Organisasi Olahraga yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						5.750.000.000,00					-		5.650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-		-	-	5.450.000.000,00						-	5.500.000.000,00	
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	-		-	-	300.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.19.03.1.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait						5.450.000.000,00							5.500.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-		-	1 Dokumen	5.450.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.1.04.0007	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi						300.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
178.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**1.100.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kepramukaan						***1.100.000.000,00***							***1.000.000.000,00***	
			1.Persentase Kwartir terfasilitasi Pengembangan Kepramukaan	22.40 %		18.97 %	21.68 %	1.100.000.000,00						22.28 %	1.000.000.000,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						1.100.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
		Terpenuhinya Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepramukaan						1.100.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	1.000.000.000,00						-	900.000.000,00	
			Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.19.04.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi						1.000.000.000,00							900.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	1 Organisasi	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	900.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.04.1.01.0012	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	30 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Dinas Kebudayaan						**18.166.093.789,98**							**50.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.166.093.789,98**							**50.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**18.166.093.789,98**							**50.000.000,00**	
179.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.128.593.789,98**							**0,00**	
		Meningkatnya Kinerja dan Efisiensi Aparatur Dinas Kebudayaan						***11.798.593.789,98***							***0,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	11.798.593.789,98						BB Predikat	0,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	88 Indeks		86.5 Indeks	87 Indeks	11.798.593.789,98						88 Indeks	0,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	88.3 Indeks		88.3 Indeks	88.3 Indeks	11.798.593.789,98						88.3 Indeks	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkualitas						300.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						250.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						15.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.941.093.789,98					-		0,00	
		tersedianya layanan administrasi keuangan daerah						9.941.093.789,98					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan		65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	9.491.093.789,98						65 Orang/ Bulan	0,00	
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.491.093.789,98							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan		65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	9.491.093.789,98	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		65 Orang/ Bulan	0,00	Dinas Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						450.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas organisasi						50.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket		0 Paket	35 Paket	40.000.000,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		2 Orang	1 Orang	10.000.000,00						5 Orang	0,00	
	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						40.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket		0 Paket	35 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		2 Orang	1 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						413.000.000,00					-		0,00	
		Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah						413.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	235.000.000,00						6 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						235.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	235.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						13.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00					-		0,00	
		tersedianya barang milik daerah yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat harga, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi						150.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		2 Unit	10 Unit	150.000.000,00						5 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		2 Unit	10 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						984.500.000,00					-		0,00	
		terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang berkualitas, efektif, dan efisien						984.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	439.500.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	0,00	
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						439.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	439.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						500.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						290.000.000,00					-		0,00	
		terpeliharanya aset daerah secara optimal untuk memastikan keberlanjutan fungsi, peningkatan usia pakai, dan efisiensi operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.						290.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	75.000.000,00						11 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		40 Unit	30 Unit	15.000.000,00						30 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	Unit	50.000.000,00						1 Unit	0,00	
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						75.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		40 Unit	30 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
180.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**2.600.000.000,00**							**50.000.000,00**	
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan						***2.500.000.000,00***							***50.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	37.08 Persentase		28.09 Persentase	30.34 Persentase	2.500.000.000,00						32.58 Persentase	50.000.000,00	
			2.Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.89 %		1.73 %	1.77 %	2.500.000.000,00						1.81 %	50.000.000,00	
			3.Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	9.85 Persentase		7.66 Persentase	8.03 Persentase	2.500.000.000,00						8.39 Persentase	50.000.000,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						500.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penguatan Identitas Lokal dan pelestarian Warisan Budaya						500.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000,00						1 Kegiatan	0,00	
			Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	100 Lembaga		50 Lembaga	50 Lembaga	0,00						100 Lembaga	0,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	2 Objek		1 Objek	1 Objek	200.000.000,00						1 Objek	0,00	
			Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	2 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	0,00	
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	2 Objek		1 Objek	1 Objek	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0011	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	100 Lembaga		50 Lembaga	50 Lembaga	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Lembaga	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						250.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Kegiatan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0014	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	2 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan PPKD Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						100.000.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian Tradisional						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	38 Objek		26 Objek	29 Objek	50.000.000,00						32 Objek	0,00	
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	7 Sertifikat		7 Sertifikat	7 Sertifikat	50.000.000,00						7 Sertifikat	0,00	
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	38 Objek		26 Objek	29 Objek	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		32 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						0,00							0,00	
		Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	7 Sertifikat		7 Sertifikat	7 Sertifikat	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Sertifikat	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						2.000.000.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Peran Lembaga Adat yang Anggotanya Lintas Kabupaten/Kota dalam Menjaga dan Melestarikan Tradisi Budaya Lokal						2.000.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	500.000.000,00						1 Objek	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	80 Orang		50 Orang	70 Orang	0,00						80 Orang	0,00	
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						500.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	80 Orang		50 Orang	70 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						1.500.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
181.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**1.832.500.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional						***1.832.500.000,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0.3 %		0.18 %	0.21 %	1.832.500.000,00						0.24 %	0,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.832.500.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Pelaku Seni						1.832.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga		4 Lembaga	4 Lembaga	1.667.500.000,00						6 Lembaga	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	150 Orang		50 Orang	100 Orang	150.000.000,00						150 Orang	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	7 Sertifikat		1 Sertifikat	1 Sertifikat	15.000.000,00						7 Sertifikat	0,00	
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	150 Orang		50 Orang	100 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	7 Sertifikat		1 Sertifikat	1 Sertifikat	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Sertifikat	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						1.667.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga		4 Lembaga	4 Lembaga	1.667.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Lembaga	0,00	Dinas Kebudayaan
182.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**155.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah						***155.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Tingkat kompetensi SDM Sejarah	66.67 %		13.33 %	26.67 %	155.000.000,00						40 %	0,00	
			2.Persentase Tingkat kesadaran Pelajar se-Tingkat SLTA/sederajat tentang sejarah lokal	1.76		0.59	0.88	155.000.000,00						1.17	0,00	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi						155.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya SDM, sarana prasarana, dan dokumen sejarah yang terdokumentasi dan mudah diakses masyarakat untuk pelestarian sejarah lokal.						155.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	55.000.000,00						40 Orang	0,00	
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi						55.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	55.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal						100.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
183.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**400.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan						***100.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	13.89 Persentase		8.33 Persentase	9.72 Persentase	100.000.000,00						11.11 Persentase	0,00	
			2.Persentase cagar budaya yang dilestarikan	64.40 %		49.31 %	53.08 %	100.000.000,00						56.85 %	0,00	
			3.Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau Cagar budaya yang telah Ditetapkan	20.65 %		17.34 %	18.61 %	100.000.000,00						19.29 %	0,00	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						200.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya pengusulan dan penetapan Warisan Budaya						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek		2 Objek	2 Objek	100.000.000,00						2 Objek	0,00	
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	14 Objek		14 Objek	14 Objek	100.000.000,00						14 Objek	0,00	
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek		2 Objek	2 Objek	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	14 Objek		14 Objek	14 Objek	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						200.000.000,00					-		0,00	
		terlaksananya upaya pelestarian warisan budaya						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek		Objek	Objek	0,00						1 Objek	0,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	2 Objek		2 Objek	2 Objek	100.000.000,00						2 Objek	0,00	
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Orang		16 Orang	16 Orang	100.000.000,00						16 Orang	0,00	
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	2 Objek		2 Objek	2 Objek	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek		Objek	1 Objek	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Orang		16 Orang	16 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
184.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**1.050.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya tata kelola museum						***1.050.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun	20.59 %		13.03 %	14.92 %	1.050.000.000,00						16.81 %	0,00	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi						1.050.000.000,00					-		0,00	
		terwujudnya pengelolaan museum yang efektif dan berkelanjutan untuk melestarikan dan menyajikan warisan budaya dan sejarah daerah						1.050.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	200 Unit		200 Unit	200 Unit	50.000.000,00						200 Unit	0,00	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	200 Unit		200 Unit	200 Unit	0,00						200 Unit	0,00	
			Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	250 Orang		250 Orang	150 Orang	0,00						250 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	Unit	1.000.000.000,00						1 Unit	0,00	
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	200 Unit		200 Unit	200 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum						0,00							0,00	
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						1.000.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum						0,00							0,00	
		Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01.0008	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum						0,00							0,00	
		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	250 Orang		250 Orang	150 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01.0013	Pengelolaan Koleksi Museum						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	200 Unit		200 Unit	200 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan						**23.284.120.237,50**							**23.666.558.657,98**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**23.284.120.237,50**							**23.666.558.657,98**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**23.014.120.237,50**							**22.826.558.657,98**	
185.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**21.703.380.337,50**							**21.154.897.784,98**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						***21.510.040.337,50***							***20.152.287.958,98***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	21.510.040.337,50						BB Predikat	20.152.287.958,98	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	78.91 Indeks		78.31 Indeks	78.46 Indeks	21.510.040.337,50						78.61 Indeks	20.152.287.958,98	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	88.75 Indeks		88.35 Indeks	88.45 Indeks	21.510.040.337,50						88.55 Indeks	20.152.287.958,98	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00					Masyarakat Kepulauan Riau		225.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00					Masyarakat Kepulauan Riau		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00						1 Laporan	125.000.000,00	
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						70.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	125.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.415.040.337,50					-		17.914.897.784,98	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai serata Administrasi melaksanakan Tugas						19.415.040.337,50					-		17.914.897.784,98	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	405.000.000,00						15 Dokumen	438.745.224,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/ Bulan		145 Orang/ Bulan	145 Orang/ Bulan	19.010.040.337,50						145 Orang/ Bulan	17.436.152.560,98	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.010.040.337,50							17.436.152.560,98	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/ Bulan		145 Orang/ Bulan	145 Orang/ Bulan	19.010.040.337,50	Provinsi Kepulauan Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		145 Orang/ Bulan	17.436.152.560,98	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						405.000.000,00							438.745.224,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	405.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Dokumen	438.745.224,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		225.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket		0 Paket	95 Paket	0,00						95 Paket	115.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	110.000.000,00	
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		95 Paket	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						497.764.084,00					-		768.330.076,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						497.764.084,00					-		768.330.076,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	6.840.000,00						10 Dokumen	11.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.291.700,00						1 Dokumen	22.072.150,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	191.767.440,00						1 Laporan	347.785.626,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	65.899.494,00						5 Paket	146.143.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		3 Paket	1 Paket	9.618.000,00						1 Paket	53.256.400,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		30 Paket	25 Paket	10.603.550,00						25 Paket	34.652.300,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	204.743.900,00						15 Paket	152.920.400,00	
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.603.550,00							28.464.700,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		30 Paket	10 Paket	10.603.550,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Paket	28.464.700,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						204.743.900,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	204.743.900,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Paket	125.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						62.044.150,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	62.044.150,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	85.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.618.000,00							39.183.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		3 Paket	1 Paket	9.618.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	39.183.400,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						6.840.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	1 Dokumen	6.840.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						184.522.440,00							265.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	184.522.440,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	265.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						8.291.700,00							22.072.150,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.291.700,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	22.072.150,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						21.224.000,00					-		243.335.108,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diadakan						21.224.000,00					-		243.335.108,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		6 Paket	5 Paket	21.224.000,00						4 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	43.335.108,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	
	2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							43.335.108,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	43.335.108,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						21.224.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		6 Paket	3 Paket	21.224.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.284.188.316,00					-		1.275.834.816,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.284.188.316,00					-		1.275.834.816,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	921.395.256,00						1 Laporan	955.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	360.792.960,00						1 Laporan	291.834.816,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.000.100,00						1 Laporan	4.000.000,00	
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.100,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.000.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.500.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						844.349.700,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	844.349.700,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	850.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						360.792.960,00							291.834.816,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	360.792.960,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	291.834.816,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						335.163.600,00					-		502.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara						335.163.600,00					-		502.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	2 Unit	60.000.000,00						2 Unit	125.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		7 Unit	6 Unit	202.369.500,00						6 Unit	210.500.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		0 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		10 Unit	8 Unit	72.794.100,00						8 Unit	117.000.000,00	
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						155.719.500,00							158.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		7 Unit	6 Unit	155.719.500,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	158.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	85.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						64.250.000,00							67.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		10 Unit	5 Unit	64.250.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	67.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
186.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**1.295.739.900,00**							**1.899.270.699,00**	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan						***1.199.079.900,00***							***1.614.270.699,00***	
			1.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	79.69 Nilai		75.69 Nilai	76.69 Nilai	1.199.079.900,00						77.69 Nilai	1.614.270.699,00	
			2.Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan	51200 Orang		50800 Orang	50900 Orang	1.199.079.900,00						51000 Orang	1.614.270.699,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						860.739.900,00					-		755.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan						860.739.900,00					-		755.000.000,00	
			Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	80.24 Indeks		76.24 Indeks	77.24 Indeks	25.000.000,00						78.24 Indeks	25.000.000,00	
			Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	79.96 Nilai		75.96 Nilai	76.96 Nilai	25.000.000,00						77.96 Nilai	25.000.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 Eksemplar		500 Eksemplar	250 Eksemplar	150.000.000,00						250 Eksemplar	160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	35 Eksemplar		25 Eksemplar	20 Eksemplar	250.000.000,00						35 Eksemplar	30.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	126.660.000,00						1 Layanan	160.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan		0 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00						1 Perpustakaan	20.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	20.000.000,00						1 Perpustakaan	75.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan		15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	50.000.000,00						15 Perpustakaan	50.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	10 Perpustakaan		0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	15.000.000,00						10 Perpustakaan	25.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	2 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	134.079.900,00						2 Perpustakaan	30.000.000,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang		60 Orang	37 Orang	50.000.000,00						40 Orang	85.000.000,00	
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi						134.079.900,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	2 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	134.079.900,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-		2 Perpustakaan	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi						250.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	35 Eksemplar		25 Eksemplar	20 Eksemplar	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-		35 Eksemplar	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan		15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-		15 Perpustakaan	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi						50.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang		60 Orang	25 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-		40 Orang	85.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						120.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Layanan	125.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan		0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Perpustakaan	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 Eksemplar		500 Eksemplar	250 Eksemplar	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Eksemplar	160.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	79.96 Nilai		75.96 Nilai	76,96 Nilai	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		77.96 Nilai	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	80.24 Indeks		76.24 Indeks	77,24 Indeks	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		78.24 Indeks	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Perpustakaan	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	10 Perpustakaan		0 Perpustakaan	5 Perpustakaan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Perpustakaan	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi						435.000.000,00					-		1.144.270.699,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca						435.000.000,00					-		1.144.270.699,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	0 Orang		0 Orang	3 Orang	0,00						3 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	2 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100.000.000,00						2 Perpustakaan	50.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Lokus		1 Lokus	1 Lokus	60.000.000,00						2 Lokus	50.000.000,00	
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0 Orang		1 Orang	1 Orang	200.000.000,00						0 Orang	0,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3 Perpustakaan		3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	75.000.000,00						3 Perpustakaan	1.029.270.699,00	
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat						60.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Lokus		1 Lokus	1 Lokus	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-		2 Lokus	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						75.000.000,00							1.029.270.699,00	
		Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3 Perpustakaan		3 Perpustakaan	1 Perpustakaan	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-		3 Perpustakaan	1.029.270.699,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0 Orang		1 Orang	3 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-		0 Orang	0,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	2 Perpustakaan		1 Perpustakaan	2 Perpustakaan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-		2 Perpustakaan	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
187.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**215.000.000,00**							**325.000.000,00**	
		Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno						***205.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	22 Persentase		14 Persentase	16 Persentase	205.000.000,00						18 Persentase	150.000.000,00	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi						15.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Meningkatnya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi (KCKR)						15.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	120 Eksemplar		120 Eksemplar	120 Eksemplar	15.000.000,00						120 Eksemplar	25.000.000,00	
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	25 Penerbit		0 Penerbit	25 Penerbit	0,00						25 Penerbit	25.000.000,00	
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam						15.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	120 Eksemplar		120 Eksemplar	75 Eksemplar	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120 Eksemplar	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	25 Penerbit		0 Penerbit	0 Penerbit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Penerbit	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah						20.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Meningkatnya Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah						20.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	15 Naskah		15 Naskah	15 Naskah	10.000.000,00						15 Naskah	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	15 Entry		15 Entry	15 Entry	10.000.000,00						15 Entry	50.000.000,00	
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	15 Entry		15 Entry	5 Entry	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Entry	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	15 Naskah		15 Naskah	5 Naskah	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Naskah	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi						180.000.000,00					-		125.000.000,00	
		Meningkatnya Naskah Kuno yang Dilestarikan dan Dimiliki						180.000.000,00					-		125.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	11 Orang		7 Orang	8 Orang	100.000.000,00						9 Orang	75.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	5 Eksemplar		6 Eksemplar	4 Eksemplar	80.000.000,00						5 Eksemplar	50.000.000,00	
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						80.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	5 Eksemplar		6 Eksemplar	6 Eksemplar	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Eksemplar	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						100.000.000,00							75.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	11 Orang		7 Orang	7 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-		9 Orang	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						0,00					-		50.000.000,00	
		Meningkatnya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	50 Eksemplar		0 Eksemplar	50 Eksemplar	0,00						50 Eksemplar	25.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	50 Eksemplar		0 Eksemplar	50 Eksemplar	0,00						50 Eksemplar	25.000.000,00	
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	50 Eksemplar		0 Eksemplar	0 Eksemplar	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Eksemplar	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	50 Eksemplar		0 Eksemplar	0 Eksemplar	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Eksemplar	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**270.000.000,00**							**840.000.000,00**	
188.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**255.000.000,00**							**685.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis						***175.000.000,00***							***590.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009)	37.00 %		26.32 %	28.18 %	175.000.000,00						30.65 %	590.000.000,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						135.000.000,00					-		360.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						135.000.000,00					-		360.000.000,00	
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	50 Arsip		0 Arsip	50 Arsip	15.000.000,00						50 Arsip	55.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	25 Arsip		100 Arsip	25 Arsip	15.000.000,00						25 Arsip	35.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis	10 Arsip		30 Arsip	10 Arsip	15.000.000,00						10 Arsip	60.000.000,00	
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	41 Lembaga		41 Lembaga	41 Lembaga	90.000.000,00						41 Lembaga	210.000.000,00	
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis						15.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	50 Arsip		0 Arsip	15 Arsip	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Arsip	55.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi						15.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Alih Media Arsip dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	25 Arsip		100 Arsip	5 Arsip	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Arsip	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis						15.000.000,00							60.000.000,00	
		Terciptanya dan Terpeliharanya Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	10 Arsip		30 Arsip	3 Arsip	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Arsip	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi						90.000.000,00							210.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	41 Lembaga		41 Lembaga	41 Lembaga	90.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		41 Lembaga	210.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		135.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	0 Arsip		0 Arsip	1 Arsip	0,00						0 Arsip	0,00	
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	1 Arsip		0 Arsip	1 Arsip	0,00						1 Arsip	35.000.000,00	
	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI						0,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	1 Arsip		0 Arsip	0 Arsip	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Arsip	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	0 Arsip		0 Arsip	0 Arsip	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Arsip	0,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						70.000.000,00					-		190.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						70.000.000,00					-		190.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan		12 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00						10 Laporan	130.000.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	10 Pengguna		10 Pengguna	10 Pengguna	50.000.000,00						10 Pengguna	60.000.000,00	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	10 Pengguna		10 Pengguna	10 Pengguna	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Pengguna	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi						20.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan		12 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	130.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		135.000.000,00	
			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis						50.000.000,00							100.000.000,00	
		terlaksananya akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	-		-	5 Arsip	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
189.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**15.000.000,00**							**155.000.000,00**	
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK						***15.000.000,00***							***155.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	29.17 %		19.17 %	21.67 %	15.000.000,00						24.17 %	155.000.000,00	
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						15.000.000,00					-		130.000.000,00	
		Meningkatnya Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						15.000.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25 Arsip		0 Arsip	25 Arsip	0,00						25 Arsip	50.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	4 Berkas		0 Berkas	4 Berkas	15.000.000,00						4 Berkas	80.000.000,00	
	2.24.03.1.01.0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun						15.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	4 Berkas		0 Berkas	1 Berkas	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Berkas	80.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						0,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25 Arsip		0 Arsip	0 Arsip	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Arsip	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		25.000.000,00	
		Meningkatnya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	0 Arsip		0 Arsip	1 Arsip	0,00						0 Arsip	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	0 Daftar		0 Daftar	1 Daftar	0,00						1 Daftar	25.000.000,00	
	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi						0,00							25.000.000,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	0 Daftar		0 Daftar	0 Daftar	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Daftar	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	0 Arsip		0 Arsip	0 Arsip	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Arsip	0,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi						0,00					-		0,00	
		Meningkatnya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi						0,00					-		0,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1 Arsip		0 Arsip	1 Arsip	0,00						1 Arsip	0,00	
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1 Arsip		0 Arsip	1 Arsip	0,00						0 Arsip	0,00	
	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1 Arsip		0 Arsip	0 Arsip	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Arsip	0,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1 Arsip		0 Arsip	0 Arsip	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Arsip	0,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
		UPT Perpustakaan Muhammad Sani						**200.000.000,00**							**552.609.826,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**200.000.000,00**							**552.609.826,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**200.000.000,00**							**552.609.826,00**	
190.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**21.703.380.337,50**							**21.154.897.784,98**	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						***193.340.000,00***							***466.109.826,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	193.340.000,00						BB Predikat	466.109.826,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	78.91 Indeks		78.31 Indeks	78.46 Indeks	193.340.000,00						78.61 Indeks	466.109.826,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	88.75 Indeks		88.35 Indeks	88.45 Indeks	193.340.000,00						88.55 Indeks	466.109.826,00	
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		225.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket		0 Paket	95 Paket	0,00						95 Paket	115.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	110.000.000,00	
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		95 Paket	15.000.000,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	10.000.000,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						497.764.084,00					-		768.330.076,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						497.764.084,00					-		768.330.076,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	6.840.000,00						10 Dokumen	11.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	191.767.440,00						1 Laporan	347.785.626,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	65.899.494,00						5 Paket	146.143.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		3 Paket	1 Paket	9.618.000,00						1 Paket	53.256.400,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		30 Paket	25 Paket	10.603.550,00						25 Paket	34.652.300,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	204.743.900,00						15 Paket	152.920.400,00	
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							6.187.600,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		30 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Paket	6.187.600,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							27.920.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Paket	27.920.400,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.855.344,00							61.143.200,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	3.855.344,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	61.143.200,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							14.073.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	14.073.000,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	1.500.000,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						7.245.000,00							82.785.626,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.245.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	82.785.626,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						21.224.000,00					-		243.335.108,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diadakan						21.224.000,00					-		243.335.108,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		6 Paket	5 Paket	21.224.000,00						4 Paket	120.000.000,00	
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		6 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	50.000.000,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.284.188.316,00					-		1.275.834.816,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.284.188.316,00					-		1.275.834.816,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	921.395.256,00						1 Laporan	955.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.000.100,00						1 Laporan	4.000.000,00	
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.500.000,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						77.045.556,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	77.045.556,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	105.000.000,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						335.163.600,00					-		502.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara						335.163.600,00					-		502.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	2 Unit	60.000.000,00						2 Unit	125.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		7 Unit	6 Unit	202.369.500,00						6 Unit	210.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		10 Unit	8 Unit	72.794.100,00						8 Unit	117.000.000,00	
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						46.650.000,00							52.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		7 Unit	2 Unit	46.650.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	52.500.000,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	40.000.000,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.544.100,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		10 Unit	1 Unit	8.544.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	50.000.000,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
191.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**1.295.739.900,00**							**1.899.270.699,00**	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan						***6.660.000,00***							***35.000.000,00***	
			1.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	79.69 Nilai		75.69 Nilai	76.69 Nilai	6.660.000,00						77.69 Nilai	35.000.000,00	
			2.Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan	51200 Orang		50800 Orang	50900 Orang	6.660.000,00						51000 Orang	35.000.000,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						860.739.900,00					-		755.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan						860.739.900,00					-		755.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	126.660.000,00						1 Layanan	160.000.000,00	
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						6.660.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	6.660.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Layanan	35.000.000,00	UPT Perpustakaan Muhammad Sani
		Dinas Kelautan dan Perikanan						**62.352.256.038,72**							**58.911.278.656,36**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**62.352.256.038,72**							**58.911.278.656,36**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**62.352.256.038,72**							**58.911.278.656,36**	
192.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**41.150.000.988,72**							**41.918.669.822,36**	
		Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						***39.715.031.828,72***							***39.971.543.726,36***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	39.715.031.828,72						BB Predikat	39.971.543.726,36	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	81.45 Indeks		80.53 Indeks	80.84 Indeks	39.715.031.828,72						80.99 Indeks	39.971.543.726,36	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.01 Indeks		85.83 Indeks	85.85 Indeks	39.715.031.828,72						85.87 Indeks	39.971.543.726,36	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Terpenuhinya ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan serta evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						38.503.678.828,72					-		37.866.498.502,36	
		Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah						38.503.678.828,72					-		37.866.498.502,36	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.555.374.526,36						12 Dokumen	1.418.194.200,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/ Bulan		294 Orang/ Bulan	294 Orang/ Bulan	36.948.304.302,36						294 Orang/ Bulan	36.448.304.302,36	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						36.948.304.302,36							36.448.304.302,36	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/ Bulan		294 Orang/ Bulan	294 Orang/ Bulan	36.948.304.302,36	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		294 Orang/ Bulan	36.448.304.302,36	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						1.555.374.526,36							1.418.194.200,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.555.374.526,36	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	1.418.194.200,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						15.000.000,00					-		25.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas data dan sistem administrasi BMD Perangkat Daerah						15.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		130.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah						0,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang		134 Orang	20 Orang	0,00						10 Orang	130.000.000,00	
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang		134 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	130.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.060.000,00						12 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	599.000.000,00						12 Laporan	1.020.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	94.000.000,00						8 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		7 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		7 Paket	8 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						34.060.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.060.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						500.000.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	650.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan untuk menunjang program dan kegiatan Perangkat Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						3 Unit	340.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	89.000.000,00						3 Unit	122.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							340.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	340.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	835.969.160,00						12 Laporan	905.126.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00						12 Laporan	467.752.224,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	80.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						265.000.000,00							437.752.224,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	437.752.224,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00						2 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	216.000.000,00						25 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	2 Unit	108.000.000,00						3 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	72.293.000,00						20 Unit	77.293.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	40.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.293.000,00							17.293.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	17.293.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	17.293.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
193.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**395.000.000,00**							**909.844.664,00**	
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah						***230.000.000,00***							***496.844.664,00***	
			1.Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98 %		92 %	94 %	230.000.000,00						98 %	496.844.664,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						200.000.000,00					-		619.844.664,00	
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pelestarian ruang laut sampai dengan 12 mil						200.000.000,00					-		619.844.664,00	
			Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	2981940 Ha		2684526 Ha	2738198 Ha	150.000.000,00						2791516 Ha	509.844.664,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						100.000.000,00							296.844.664,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	2981940 Ha		2684526 Ha	2738198,44 Ha	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2791516 Ha	296.844.664,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/						50.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						50.000.000,00					-		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam proses penerbitan izin pemanfaatan ruang laut 12 Mil						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	50.000.000,00						48 Dokumen	50.000.000,00	
	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	48 Dokumen		48 Dokumen	24 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas dan pastisipasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	50 Orang	145.000.000,00						50 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0,00						1 Unit Usaha	40.000.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						80.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.03.0006	Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha						0,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Usaha	40.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
194.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.752.262.770,00**							**12.851.829.651,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap						***14.662.262.770,00***							***12.641.904.651,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	320042,54 Ton		316230,66 Ton	317179,36 Ton	14.662.262.770,00						318130,89 Ton	12.641.904.651,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						14.142.262.770,00					-		12.082.029.256,00	
		Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan yang berkelanjutan, efektif dan kepatuhan terhadap regulasi di wilayah laut sampai dengan 12 mil.						14.142.262.770,00					-		12.082.029.256,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit		1 Unit	1 Unit	6.350.400.000,00						1 Unit	6.768.192.500,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	6000 Unit		4000 Unit	5800 Unit	7.781.862.770,00						5800 Unit	5.293.836.756,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						6.350.400.000,00							6.768.192.500,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit		1 Unit	1 Unit	6.350.400.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	6.768.192.500,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						7.781.862.770,00							5.293.836.756,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	6000 Unit		4000 Unit	5800 Unit	7.781.862.770,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5800 Unit	5.293.836.756,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						20.000.000,00					-		33.350.800,00	
		Meningkatnya penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal berukuran 10 30 GT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.						20.000.000,00					-		33.350.800,00	
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	90 Persentase		90 Persentase	90 Persentase	20.000.000,00						90 Persentase	33.350.800,00	
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil						20.000.000,00							33.350.800,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	90 Persentase		90 Persentase	90 Persentase	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90 Persentase	33.350.800,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						550.000.000,00					-		636.524.595,00	
		Tersedianya lokasi yang strategis dan fasilitas pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi yang memadai untuk mendukung kegiatan perikanan secara optimal.						550.000.000,00					-		636.524.595,00	
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	100.000.000,00						3 Layanan	136.524.595,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	450.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						450.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						50.000.000,00							26.524.595,00	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan		2 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Layanan	26.524.595,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
195.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**6.754.961.440,00**							**5.589.346.865,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***6.519.961.440,00***							***4.385.985.615,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00 Ton		42508.16 Ton	45289.06 Ton	6.519.961.440,00						48251.89 Ton	4.385.985.615,00	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah pembudi daya ikan kecil yang terdaftar melalui penerbitan TDPIK di laut dan lintas daerah.						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Rekomendasi		30 Rekomendasi	50 Rekomendasi	45.000.000,00						70 Rekomendasi	60.000.000,00	
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Rekomendasi		30 Rekomendasi	20 Rekomendasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70 Rekomendasi	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						6.704.961.440,00					-		5.519.346.865,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya produksi dan kualitas hasil budidaya ikan di laut melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi						6.704.961.440,00					-		5.519.346.865,00	
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.677.840,00						1 Dokumen	17.727.340,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1000 Unit		1000 Unit	800 Unit	2.551.214.000,00						1000 Unit	2.901.619.525,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	30 Unit		15 Unit	20 Unit	2.474.095.614,00						25 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.611.973.986,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						17.677.840,00							17.727.340,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.677.840,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	17.727.340,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut						2.456.214.000,00							2.548.258.275,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1000 Unit		1000 Unit	100 Unit	2.456.214.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1000 Unit	2.548.258.275,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						2.374.095.614,00							1.200.000.000,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	30 Unit		15 Unit	10 Unit	2.374.095.614,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	1.200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1.611.973.986,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.611.973.986,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
196.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**511.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati						***200.000.000,00***							***625.000.000,00***	
			1.Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	90 %		90 %	90 %	200.000.000,00						90 %	625.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan penegakan hukum terhadap pelanggaran						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	30 Hari Operasi	250.000.000,00						30 Hari Operasi	750.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	59.000.000,00						20 Pelaku Usaha	160.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	58.000.000,00						15 Pelaku Usaha	125.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	67.000.000,00						35 Pelaku Usaha	205.000.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	54 Kelompok Masyarakat	77.000.000,00						54 Kelompok Masyarakat	260.000.000,00	
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	5 Hari Operasi	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Hari Operasi	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						30.000.000,00							75.000.000,00	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						30.000.000,00							75.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	17 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						20.000.000,00							80.000.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	80.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						20.000.000,00							120.000.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	30 Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Kelompok Masyarakat	120.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan sesuai dengan standar mutu dan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	0,00						20 Pelaku Usaha	100.000.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						0,00							50.000.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
197.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**705.000.000,00**							**745.000.000,00**	
		Meningkatnya produksi Olahan Hasil Perikanan						***615.000.000,00***							***490.000.000,00***	
			1.Angka Konsumsi Ikan	44.41 Kg/KAP/TH		41.37 Kg/KAP/TH	42.13 Kg/KAP/TH	615.000.000,00						42.90 Kg/KAP/TH	490.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	13900 Ton		13500 Ton	13600 Ton	615.000.000,00						13700 Ton	490.000.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						65.000.000,00					-		90.000.000,00	
		Tersedianya pelayanan perizinan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas kabupaten/kota						65.000.000,00					-		90.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	35 Rekomendasi		25 Rekomendasi	30 Rekomendasi	50.000.000,00						30 Rekomendasi	75.000.000,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	35 Rekomendasi		25 Rekomendasi	20 Rekomendasi	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Rekomendasi	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						290.000.000,00					-		405.000.000,00	
		Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar melalui pembinaan yang berkelanjutan						290.000.000,00					-		405.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	260.000.000,00						2 Kegiatan	330.000.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						200.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						350.000.000,00					-		250.000.000,00	
		Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan yang cukup dan merata untuk mendukung kelancaran produksi pengolahan perikanan						350.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	4 Unit Usaha		2 Unit Usaha	4 Unit Usaha	350.000.000,00						4 Unit Usaha	250.000.000,00	
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						350.000.000,00							250.000.000,00	
		Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	4 Unit Usaha		2 Unit Usaha	4 Unit Usaha	350.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit Usaha	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas						**145.000.000,00**							**313.405.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**145.000.000,00**							**313.405.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**145.000.000,00**							**313.405.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
198.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**41.150.000.988,72**							**41.918.669.822,36**	
		Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						***49.000.000,00***							***98.480.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	49.000.000,00						BB Predikat	98.480.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	81.45 Indeks		80.53 Indeks	80.84 Indeks	49.000.000,00						80.99 Indeks	98.480.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.01 Indeks		85.83 Indeks	85.85 Indeks	49.000.000,00						85.87 Indeks	98.480.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	599.000.000,00						12 Laporan	1.020.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	94.000.000,00						8 Paket	100.000.000,00	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	6.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	40.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan untuk menunjang program dan kegiatan Perangkat Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	89.000.000,00						3 Unit	122.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	8.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	835.969.160,00						12 Laporan	905.126.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00						12 Laporan	467.752.224,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.000.000,00							12.480.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	12.480.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	216.000.000,00						25 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	2 Unit	108.000.000,00						3 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	72.293.000,00						20 Unit	77.293.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	2 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	15.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	5 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	7.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	48.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
199.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**395.000.000,00**							**909.844.664,00**	
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah						***20.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			1.Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98 %		92 %	94 %	20.000.000,00						98 %	30.000.000,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas dan pastisipasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	50 Orang	145.000.000,00						50 Orang	200.000.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	15 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	30.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
200.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.752.262.770,00**							**12.851.829.651,00**	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	19.925.000,00	
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						40.000.000,00					-		99.925.000,00	
		-						40.000.000,00					-		99.925.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	40.000.000,00						-	99.925.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						10.000.000,00							19.925.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	20 Rekomendasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	19.925.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
201.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**6.754.961.440,00**							**5.589.346.865,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***10.000.000,00***							***10.000.000,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00 Ton		42508.16 Ton	45289.06 Ton	10.000.000,00						48251.89 Ton	10.000.000,00	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah pembudi daya ikan kecil yang terdaftar melalui penerbitan TDPIK di laut dan lintas daerah.						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Rekomendasi		30 Rekomendasi	50 Rekomendasi	45.000.000,00						70 Rekomendasi	60.000.000,00	
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Rekomendasi		30 Rekomendasi	20 Rekomendasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70 Rekomendasi	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
202.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**511.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati						***43.000.000,00***							***125.000.000,00***	
			1.Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	90 %		90 %	90 %	43.000.000,00						90 %	125.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan penegakan hukum terhadap pelanggaran						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	30 Hari Operasi	250.000.000,00						30 Hari Operasi	750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	59.000.000,00						20 Pelaku Usaha	160.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	58.000.000,00						15 Pelaku Usaha	125.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	67.000.000,00						35 Pelaku Usaha	205.000.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	54 Kelompok Masyarakat	77.000.000,00						54 Kelompok Masyarakat	260.000.000,00	
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						20.000.000,00							90.000.000,00	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	1 Hari Operasi	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Hari Operasi	90.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						8.000.000,00							10.000.000,00	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	8.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan sesuai dengan standar mutu dan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	0,00						20 Pelaku Usaha	100.000.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						0,00							10.000.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna						**139.969.160,00**							**345.969.160,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**139.969.160,00**							**345.969.160,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**139.969.160,00**							**345.969.160,00**	
203.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**41.150.000.988,72**							**41.918.669.822,36**	
		Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						***44.969.160,00***							***110.969.160,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	44.969.160,00						BB Predikat	110.969.160,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	81.45 Indeks		80.53 Indeks	80.84 Indeks	44.969.160,00						80.99 Indeks	110.969.160,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.01 Indeks		85.83 Indeks	85.85 Indeks	44.969.160,00						85.87 Indeks	110.969.160,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	599.000.000,00						12 Laporan	1.020.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	94.000.000,00						8 Paket	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	40.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan untuk menunjang program dan kegiatan Perangkat Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	89.000.000,00						3 Unit	122.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	8.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	835.969.160,00						12 Laporan	905.126.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00						12 Laporan	467.752.224,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.969.160,00							25.969.160,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.969.160,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	25.969.160,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	216.000.000,00						25 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	2 Unit	108.000.000,00						3 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	72.293.000,00						20 Unit	77.293.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	15.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	3 Unit	4.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	7.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	48.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
204.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**395.000.000,00**							**909.844.664,00**	
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah						***20.000.000,00***							***30.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98 %		92 %	94 %	20.000.000,00						98 %	30.000.000,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas dan pastisipasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	50 Orang	145.000.000,00						50 Orang	200.000.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	15 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	30.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
205.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.752.262.770,00**							**12.851.829.651,00**	
			-	-		-	-	5.000.000,00						-	20.000.000,00	
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						40.000.000,00					-		99.925.000,00	
		-						40.000.000,00					-		99.925.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	40.000.000,00						-	99.925.000,00	
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	20 Rekomendasi	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
206.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**6.754.961.440,00**							**5.589.346.865,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***5.000.000,00***							***10.000.000,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00 Ton		42508.16 Ton	45289.06 Ton	5.000.000,00						48251.89 Ton	10.000.000,00	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah pembudi daya ikan kecil yang terdaftar melalui penerbitan TDPIK di laut dan lintas daerah.						50.000.000,00					-		70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	3.25.04.1.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	17 Rekomendasi	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
207.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**511.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati						***40.000.000,00***							***145.000.000,00***	
			1.Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	90 %		90 %	90 %	40.000.000,00						90 %	145.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan penegakan hukum terhadap pelanggaran						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	30 Hari Operasi	250.000.000,00						30 Hari Operasi	750.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	59.000.000,00						20 Pelaku Usaha	160.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	58.000.000,00						15 Pelaku Usaha	125.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	67.000.000,00						35 Pelaku Usaha	205.000.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	54 Kelompok Masyarakat	77.000.000,00						54 Kelompok Masyarakat	260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						20.000.000,00							90.000.000,00	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	1 Hari Operasi	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Hari Operasi	90.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan sesuai dengan standar mutu dan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	0,00						20 Pelaku Usaha	100.000.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga						**131.000.000,00**							**347.178.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**131.000.000,00**							**347.178.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**131.000.000,00**							**347.178.000,00**	
208.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**41.150.000.988,72**							**41.918.669.822,36**	
		Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						***48.000.000,00***							***117.178.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	48.000.000,00						BB Predikat	117.178.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	81.45 Indeks		80.53 Indeks	80.84 Indeks	48.000.000,00						80.99 Indeks	117.178.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.01 Indeks		85.83 Indeks	85.85 Indeks	48.000.000,00						85.87 Indeks	117.178.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	599.000.000,00						12 Laporan	1.020.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	94.000.000,00						8 Paket	100.000.000,00	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	40.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan untuk menunjang program dan kegiatan Perangkat Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	89.000.000,00						3 Unit	122.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	8.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	835.969.160,00						12 Laporan	905.126.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00						12 Laporan	467.752.224,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00							32.178.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	32.178.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	216.000.000,00						25 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	2 Unit	108.000.000,00						3 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	72.293.000,00						20 Unit	77.293.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	15.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	3 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	7.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	48.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
209.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**395.000.000,00**							**909.844.664,00**	
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah						***5.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			1.Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98 %		92 %	94 %	5.000.000,00						98 %	30.000.000,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas dan pastisipasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	50 Orang	145.000.000,00						50 Orang	200.000.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						5.000.000,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	10 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	30.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
210.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.752.262.770,00**							**12.851.829.651,00**	
			-	-		-	-	5.000.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						40.000.000,00					-		99.925.000,00	
		-						40.000.000,00					-		99.925.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	40.000.000,00						-	99.925.000,00	
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	20 Rekomendasi	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
211.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**6.754.961.440,00**							**5.589.346.865,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***5.000.000,00***							***10.000.000,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00 Ton		42508.16 Ton	45289.06 Ton	5.000.000,00						48251.89 Ton	10.000.000,00	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah pembudi daya ikan kecil yang terdaftar melalui penerbitan TDPIK di laut dan lintas daerah.						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Rekomendasi		30 Rekomendasi	50 Rekomendasi	45.000.000,00						70 Rekomendasi	60.000.000,00	
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Rekomendasi		30 Rekomendasi	17 Rekomendasi	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70 Rekomendasi	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
212.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**511.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati						***43.000.000,00***							***140.000.000,00***	
			1.Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	90 %		90 %	90 %	43.000.000,00						90 %	140.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan penegakan hukum terhadap pelanggaran						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	30 Hari Operasi	250.000.000,00						30 Hari Operasi	750.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	59.000.000,00						20 Pelaku Usaha	160.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	58.000.000,00						15 Pelaku Usaha	125.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	67.000.000,00						35 Pelaku Usaha	205.000.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	54 Kelompok Masyarakat	77.000.000,00						54 Kelompok Masyarakat	260.000.000,00	
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						20.000.000,00							90.000.000,00	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	1 Hari Operasi	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Hari Operasi	90.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						8.000.000,00							25.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	8.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan sesuai dengan standar mutu dan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	0,00						20 Pelaku Usaha	100.000.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						0,00							10.000.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun						**171.000.000,00**							**426.063.936,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**171.000.000,00**							**426.063.936,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**171.000.000,00**							**426.063.936,00**	
213.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**41.150.000.988,72**							**41.918.669.822,36**	
		Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						***84.000.000,00***							***134.063.936,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	84.000.000,00						BB Predikat	134.063.936,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	81.45 Indeks		80.53 Indeks	80.84 Indeks	84.000.000,00						80.99 Indeks	134.063.936,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.01 Indeks		85.83 Indeks	85.85 Indeks	84.000.000,00						85.87 Indeks	134.063.936,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	599.000.000,00						12 Laporan	1.020.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	94.000.000,00						8 Paket	100.000.000,00	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	4.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	7.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	40.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan untuk menunjang program dan kegiatan Perangkat Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	89.000.000,00						3 Unit	122.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	4.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	8.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	835.969.160,00						12 Laporan	905.126.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00						12 Laporan	467.752.224,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						56.000.000,00							54.063.936,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	56.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	54.063.936,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	216.000.000,00						25 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	2 Unit	108.000.000,00						3 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	72.293.000,00						20 Unit	77.293.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	2 Unit	9.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	15.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	7.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	48.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
214.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**395.000.000,00**							**909.844.664,00**	
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah						***5.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			1.Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98 %		92 %	94 %	5.000.000,00						98 %	30.000.000,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas dan pastisipasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	50 Orang	145.000.000,00						50 Orang	200.000.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						5.000.000,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	10 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	30.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
215.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.752.262.770,00**							**12.851.829.651,00**	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						40.000.000,00					-		99.925.000,00	
		-						40.000.000,00					-		99.925.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	40.000.000,00						-	99.925.000,00	
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	30 Rekomendasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
216.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**6.754.961.440,00**							**5.589.346.865,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***10.000.000,00***							***10.000.000,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00 Ton		42508.16 Ton	45289.06 Ton	10.000.000,00						48251.89 Ton	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah pembudi daya ikan kecil yang terdaftar melalui penerbitan TDPIK di laut dan lintas daerah.						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Rekomendasi		30 Rekomendasi	50 Rekomendasi	45.000.000,00						70 Rekomendasi	60.000.000,00	
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Rekomendasi		30 Rekomendasi	50 Rekomendasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70 Rekomendasi	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
217.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**511.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati						***48.000.000,00***							***205.000.000,00***	
			1.Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	90 %		90 %	90 %	48.000.000,00						90 %	205.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan penegakan hukum terhadap pelanggaran						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	30 Hari Operasi	250.000.000,00						30 Hari Operasi	750.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	59.000.000,00						20 Pelaku Usaha	160.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	58.000.000,00						15 Pelaku Usaha	125.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	67.000.000,00						35 Pelaku Usaha	205.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	54 Kelompok Masyarakat	77.000.000,00						54 Kelompok Masyarakat	260.000.000,00	
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						20.000.000,00							90.000.000,00	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	1 Hari Operasi	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Hari Operasi	90.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						13.000.000,00							50.000.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	13.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan sesuai dengan standar mutu dan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	0,00						20 Pelaku Usaha	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						0,00							10.000.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam						**211.000.000,00**							**437.135.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**211.000.000,00**							**437.135.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**211.000.000,00**							**437.135.000,00**	
218.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**41.150.000.988,72**							**41.918.669.822,36**	
		Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						***98.000.000,00***							***145.135.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	98.000.000,00						BB Predikat	145.135.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	81.45 Indeks		80.53 Indeks	80.84 Indeks	98.000.000,00						80.99 Indeks	145.135.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.01 Indeks		85.83 Indeks	85.85 Indeks	98.000.000,00						85.87 Indeks	145.135.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	599.000.000,00						12 Laporan	1.020.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	94.000.000,00						8 Paket	100.000.000,00	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	7.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						15.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	40.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan untuk menunjang program dan kegiatan Perangkat Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	89.000.000,00						3 Unit	122.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	4.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	8.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	835.969.160,00						12 Laporan	905.126.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00						12 Laporan	467.752.224,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						68.000.000,00							65.135.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	65.135.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	216.000.000,00						25 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	2 Unit	108.000.000,00						3 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	72.293.000,00						20 Unit	77.293.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						8.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	1 Unit	8.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	2 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	15.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	2 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	7.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	48.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
219.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**395.000.000,00**							**909.844.664,00**	
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah						***15.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			1.Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98 %		92 %	94 %	15.000.000,00						98 %	30.000.000,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas dan pastisipasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil						145.000.000,00					-		240.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	50 Orang	145.000.000,00						50 Orang	200.000.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						15.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	10 Orang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	30.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
220.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.752.262.770,00**							**12.851.829.651,00**	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						40.000.000,00					-		99.925.000,00	
		-						40.000.000,00					-		99.925.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	-	40.000.000,00						-	99.925.000,00	
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-		-	30 Rekomendasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
221.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**6.754.961.440,00**							**5.589.346.865,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***10.000.000,00***							***10.000.000,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00 Ton		42508.16 Ton	45289.06 Ton	10.000.000,00						48251.89 Ton	10.000.000,00	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah pembudi daya ikan kecil yang terdaftar melalui penerbitan TDPIK di laut dan lintas daerah.						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Rekomendasi		30 Rekomendasi	50 Rekomendasi	45.000.000,00						70 Rekomendasi	60.000.000,00	
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Rekomendasi		30 Rekomendasi	50 Rekomendasi	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70 Rekomendasi	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
222.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**511.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati						***48.000.000,00***							***205.000.000,00***	
			1.Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	90 %		90 %	90 %	48.000.000,00						90 %	205.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan penegakan hukum terhadap pelanggaran						511.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	30 Hari Operasi	250.000.000,00						30 Hari Operasi	750.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	59.000.000,00						20 Pelaku Usaha	160.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	58.000.000,00						15 Pelaku Usaha	125.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	67.000.000,00						35 Pelaku Usaha	205.000.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	54 Kelompok Masyarakat	77.000.000,00						54 Kelompok Masyarakat	260.000.000,00	
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						20.000.000,00							90.000.000,00	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30 Hari Operasi		20 Hari Operasi	1 Hari Operasi	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Hari Operasi	90.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						9.000.000,00							30.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	9.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						9.000.000,00							25.000.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	9.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						14.000.000,00							50.000.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	54 Kelompok Masyarakat		54 Kelompok Masyarakat	8 Kelompok Masyarakat	14.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan sesuai dengan standar mutu dan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi						0,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	0,00						20 Pelaku Usaha	100.000.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						0,00							10.000.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
		UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai						**385.000.000,00**							**568.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**385.000.000,00**							**568.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**385.000.000,00**							**568.000.000,00**	
223.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**41.150.000.988,72**							**41.918.669.822,36**	
		Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						***320.000.000,00***							***450.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	320.000.000,00						BB Predikat	450.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	81.45 Indeks		80.53 Indeks	80.84 Indeks	320.000.000,00						80.99 Indeks	450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.01 Indeks		85.83 Indeks	85.85 Indeks	320.000.000,00						85.87 Indeks	450.000.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	599.000.000,00						12 Laporan	1.020.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	94.000.000,00						8 Paket	100.000.000,00	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	4.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						12.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	40.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan untuk menunjang program dan kegiatan Perangkat Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	89.000.000,00						3 Unit	122.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	8.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	835.969.160,00						12 Laporan	905.126.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00						12 Laporan	467.752.224,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						300.000.000,00							348.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	348.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	216.000.000,00						25 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	2 Unit	108.000.000,00						3 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	72.293.000,00						20 Unit	77.293.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	10.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	15.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	8.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	48.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
224.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**14.752.262.770,00**							**12.851.829.651,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap						***50.000.000,00***							***110.000.000,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	320042,54 Ton		316230,66 Ton	317179,36 Ton	50.000.000,00						318130,89 Ton	110.000.000,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						550.000.000,00					-		636.524.595,00	
		Tersedianya lokasi yang strategis dan fasilitas pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi yang memadai untuk mendukung kegiatan perikanan secara optimal.						550.000.000,00					-		636.524.595,00	
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	100.000.000,00						3 Layanan	136.524.595,00	
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						50.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan		2 Layanan	3 Layanan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Layanan	110.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
		UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)						**202.000.000,00**							**433.300.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**202.000.000,00**							**433.300.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**202.000.000,00**							**433.300.000,00**	
225.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**41.150.000.988,72**							**41.918.669.822,36**	
		Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						***112.000.000,00***							***168.300.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	112.000.000,00						BB Predikat	168.300.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	81.45 Indeks		80.53 Indeks	80.84 Indeks	112.000.000,00						80.99 Indeks	168.300.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.01 Indeks		85.83 Indeks	85.85 Indeks	112.000.000,00						85.87 Indeks	168.300.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	599.000.000,00						12 Laporan	1.020.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	94.000.000,00						8 Paket	100.000.000,00	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	40.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan untuk menunjang program dan kegiatan Perangkat Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	89.000.000,00						3 Unit	122.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	4.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	8.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	835.969.160,00						12 Laporan	905.126.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00						12 Laporan	467.752.224,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						65.000.000,00							83.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	83.300.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	216.000.000,00						25 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	2 Unit	108.000.000,00						3 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	72.293.000,00						20 Unit	77.293.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	10.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	15.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	5 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	7.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	48.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
226.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**705.000.000,00**							**745.000.000,00**	
		Meningkatnya produksi Olahan Hasil Perikanan						***90.000.000,00***							***255.000.000,00***	
			1.Angka Konsumsi Ikan	44.41 Kg/KAP/TH		41.37 Kg/KAP/TH	42.13 Kg/KAP/TH	90.000.000,00						42.90 Kg/KAP/TH	255.000.000,00	
			2.Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	13900 Ton		13500 Ton	13600 Ton	90.000.000,00						13700 Ton	255.000.000,00	
		Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar melalui pembinaan yang berkelanjutan						290.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	260.000.000,00						2 Kegiatan	330.000.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						60.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Kegiatan	180.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						290.000.000,00					-		405.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar melalui pembinaan yang berkelanjutan						290.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	30.000.000,00						-	75.000.000,00	
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						30.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Kegiatan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
		UPTD Balai Benih Ikan						**431.000.000,00**							**1.466.361.250,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**431.000.000,00**							**1.466.361.250,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**431.000.000,00**							**1.466.361.250,00**	
227.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**41.150.000.988,72**							**41.918.669.822,36**	
		Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						***228.000.000,00***							***313.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	228.000.000,00						BB Predikat	313.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	81.45 Indeks		80.53 Indeks	80.84 Indeks	228.000.000,00						80.99 Indeks	313.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.01 Indeks		85.83 Indeks	85.85 Indeks	228.000.000,00						85.87 Indeks	313.000.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	599.000.000,00						12 Laporan	1.020.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	94.000.000,00						8 Paket	100.000.000,00	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	4.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	40.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan untuk menunjang program dan kegiatan Perangkat Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	89.000.000,00						3 Unit	122.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	8.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	835.969.160,00						12 Laporan	905.126.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00						12 Laporan	467.752.224,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						190.000.000,00							189.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	190.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	189.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	UPTD Balai Benih Ikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	216.000.000,00						25 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	2 Unit	108.000.000,00						3 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	72.293.000,00						20 Unit	77.293.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	UPTD Balai Benih Ikan
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	15.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	5 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	7.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	48.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
228.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**6.754.961.440,00**							**5.589.346.865,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***195.000.000,00***							***1.153.361.250,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00 Ton		42508.16 Ton	45289.06 Ton	195.000.000,00						48251.89 Ton	1.153.361.250,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						6.704.961.440,00					-		5.519.346.865,00	
		Meningkatnya produksi dan kualitas hasil budidaya ikan di laut melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi						6.704.961.440,00					-		5.519.346.865,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1000 Unit		1000 Unit	800 Unit	2.551.214.000,00						1000 Unit	2.901.619.525,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	30 Unit		15 Unit	20 Unit	2.474.095.614,00						25 Unit	2.000.000.000,00	
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut						95.000.000,00							353.361.250,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1000 Unit		1000 Unit	2 Unit	95.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1000 Unit	353.361.250,00	UPTD Balai Benih Ikan
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						100.000.000,00							800.000.000,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	30 Unit		15 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	800.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
		UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan						**100.000.000,00**							**366.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**100.000.000,00**							**366.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**100.000.000,00**							**366.000.000,00**	
229.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**41.150.000.988,72**							**41.918.669.822,36**	
		Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						***46.000.000,00***							***123.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	46.000.000,00						BB Predikat	123.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	81.45 Indeks		80.53 Indeks	80.84 Indeks	46.000.000,00						80.99 Indeks	123.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.01 Indeks		85.83 Indeks	85.85 Indeks	46.000.000,00						85.87 Indeks	123.000.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.						777.060.000,00					-		1.155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	599.000.000,00						12 Laporan	1.020.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	94.000.000,00						8 Paket	100.000.000,00	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	7.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						12.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	50.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan untuk menunjang program dan kegiatan Perangkat Daerah						89.000.000,00					-		462.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	89.000.000,00						3 Unit	122.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	4.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	8.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah						1.100.969.160,00					-		1.372.878.320,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	835.969.160,00						12 Laporan	905.126.096,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00						12 Laporan	467.752.224,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	15.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	30.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	216.000.000,00						25 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	2 Unit	108.000.000,00						3 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	72.293.000,00						20 Unit	77.293.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	10.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	1 Unit	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	15.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	2 Unit	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	3.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
		Tersedianya pemeliharaan yang terencana dan efektif untuk menjaga Barang Milik Daerah						464.293.000,00					-		607.293.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	48.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	15.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
230.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**395.000.000,00**							**909.844.664,00**	
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah						***50.000.000,00***							***213.000.000,00***	
			1.Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98 %		92 %	94 %	50.000.000,00						98 %	213.000.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						200.000.000,00					-		619.844.664,00	
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pelestarian ruang laut sampai dengan 12 mil						200.000.000,00					-		619.844.664,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	2981940 Ha		2684526 Ha	2738198 Ha	150.000.000,00						2791516 Ha	509.844.664,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						50.000.000,00							213.000.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	2981940 Ha		2684526 Ha	2738198,44 Ha	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2791516 Ha	213.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
		Dinas Pariwisata						**20.818.771.393,00**							**25.555.446.601,94**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**20.818.771.393,00**							**25.555.446.601,94**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**20.818.771.393,00**							**25.555.446.601,94**	
231.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**14.083.771.393,00**							**15.555.446.601,94**	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata						***13.883.771.393,00***							***15.355.446.601,94***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	13.883.771.393,00						BB Predikat	15.355.446.601,94	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	83.80 Indeks		83.58 Indeks	83.58 Indeks	13.883.771.393,00						83.68 Indeks	15.355.446.601,94	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	89.50 Indeks		88.95 Indeks	89.00 Indeks	13.883.771.393,00						89.15 Indeks	15.355.446.601,94	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah						300.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00						5 Dokumen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	48.181.600,00						5 Laporan	48.181.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	51.818.400,00						1 Laporan	51.818.400,00	
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						48.181.600,00							48.181.600,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	48.181.600,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	48.181.600,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						51.818.400,00							51.818.400,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	51.818.400,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	51.818.400,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.593.771.393,00					-		13.065.446.601,94	
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.593.771.393,00					-		13.065.446.601,94	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	513.792.000,00						1 Dokumen	513.792.000,01	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan		72 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	11.069.979.393,00						72 Orang/ Bulan	12.541.654.601,93	
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.069.979.393,00							12.541.654.601,93	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan		72 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	11.069.979.393,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		72 Orang/ Bulan	12.541.654.601,93	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						513.792.000,00							513.792.000,01	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	513.792.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	513.792.000,01	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						375.400.000,00					-		375.400.000,00	
		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						375.400.000,00					-		375.400.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	275.400.000,00						3 Paket	275.400.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	100.000.000,00						10 Orang	100.000.000,00	
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						275.400.000,00							275.400.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	275.400.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	275.400.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						838.539.950,00					-		838.539.950,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						838.539.950,00					-		838.539.950,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	576.539.950,00						12 Laporan	576.539.950,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	150.000.000,00						3 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	112.000.000,00						2 Paket	112.000.000,00	
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						112.000.000,00							112.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	112.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	112.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						576.539.950,00							576.539.950,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	576.539.950,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	576.539.950,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	200.000.000,00						10 Unit	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						478.251.700,00					-		478.251.700,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						478.251.700,00					-		478.251.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.760.000,00						12 Laporan	105.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	357.491.700,00						12 Laporan	357.491.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						105.760.000,00							105.760.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.760.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0 || Provinsi Kepulauan Riau || Kota Batam || Kecamatan Batam Kota || Kelurahan Belian || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	105.760.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						357.491.700,00							357.491.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	357.491.700,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Batam || Kecamatan Batam Kota || Kelurahan Belian || 0 || Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	357.491.700,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						297.808.350,00					-		297.808.350,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						297.808.350,00					-		297.808.350,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	145.074.000,00						6 Unit	145.074.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	111.224.000,00						2 Unit	111.224.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	41.510.350,00						50 Unit	41.510.350,00	
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						111.224.000,00							111.224.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	111.224.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Batam || Kecamatan Batam Kota || Kelurahan Belian || 0 || Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	111.224.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						145.074.000,00							145.074.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	145.074.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	145.074.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						41.510.350,00							41.510.350,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	41.510.350,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	41.510.350,00	Dinas Pariwisata
232.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**600.000.000,00**							**700.000.000,00**	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata						***400.000.000,00***							***300.000.000,00***	
			1.Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	2.15 Hari		1.95 Hari	2.00 Hari	400.000.000,00						2.05 Hari	300.000.000,00	
			2.Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1.90 Hari		1.70 Hari	1.75 Hari	400.000.000,00						1.80 Hari	300.000.000,00	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						0,00					-		300.000.000,00	
		Terkelolanya Daya Tarik Wisata Provinsi						0,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	0,00						7 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	0,00						1 Lokasi	150.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	0 Lokasi		0 Lokasi	3 Lokasi	0,00						0 Lokasi	0,00	
			Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang		25 Orang	25 Orang	0,00						25 Orang	100.000.000,00	
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi						0,00							0,00	
		Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	0 Lokasi		0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		0 Lokasi	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi						0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Lokasi		1 Lokasi	0 Lokasi	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		1 Lokasi	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7 Laporan		7 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		7 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang		25 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		25 Orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00					-		150.000.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7 Laporan		0 Laporan	7 Laporan	0,00						7 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	50 Orang		0 Orang	25 Orang	0,00						25 Orang	100.000.000,00	
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							0,00	
		Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		7 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	50 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		25 Orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						550.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Terkelolanya Destinasi Pariwisata Provinsi						550.000.000,00					-		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	0 Lokasi		0 Lokasi	2 Lokasi	0,00						0 Lokasi	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	200.000.000,00						1 Lokasi	100.000.000,00	
	3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi						0,00							0,00	
		Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	0 Lokasi		0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		0 Lokasi	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						200.000.000,00							100.000.000,00	
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Lokasi		1 Lokasi	2 Lokasi	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Lokasi	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi						150.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.03.0013	Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional						200.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Industri dan Usaha Pariwisata						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.26.02.1.04.0018	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	50 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.04.0019	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	-		-	10 Unit Usaha	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
233.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**4.835.000.000,00**							**6.535.000.000,00**	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata						***4.835.000.000,00***							***6.535.000.000,00***	
			1.Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	3621.8 Ribu Orang		2722.6 Ribu Orang	2947.4 Ribu Orang	4.835.000.000,00						3172.2 Ribu Orang	6.535.000.000,00	
			2.Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	3606151 Perjalanan		3512500 Perjalanan	3525750 Perjalanan	4.835.000.000,00						3539850 Perjalanan	6.535.000.000,00	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						4.835.000.000,00					-		6.535.000.000,00	
		Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						4.835.000.000,00					-		6.535.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	235.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00						5 Dokumen	1.150.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Kegiatan		15 Kegiatan	10 Kegiatan	4.000.000.000,00						15 Kegiatan	5.335.000.000,00	
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						600.000.000,00							1.150.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen		5 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	1.150.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						235.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	235.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri						4.000.000.000,00							5.335.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Kegiatan		15 Kegiatan	22 Kegiatan	4.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Kegiatan	5.335.000.000,00	Dinas Pariwisata
234.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**500.000.000,00**							**900.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif						***400.000.000,00***							***900.000.000,00***	
			1.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	14.08 %		6.54 %	8.42 %	400.000.000,00						10.31 %	900.000.000,00	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif						300.000.000,00					-		0,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif						300.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						0 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						0 Laporan	0,00	
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif						300.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		0 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						200.000.000,00					-		900.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						200.000.000,00					-		900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	2 Promosi		2 Promosi	2 Promosi	0,00						2 Promosi	400.000.000,00	
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						100.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah						0,00							0,00	
		Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.02.0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif						0,00							400.000.000,00	
		Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	2 Promosi		2 Promosi	0 Promosi	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		2 Promosi	400.000.000,00	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						200.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Konsultasi, Advokasi, dan Penguatan Kekayaan Intelektual	-		-	-	100.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3.26.04.1.02.0023	Pengembangan Sistem Pemasaran						0,00							0,00	
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.02.0024	Fasilitasi Kekayaan Intelektual						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Konsultasi, Advokasi, dan Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Orang yang Mendapatkan Konsultasi, Advokasi, dan Penguatan Kekayaan Intelektual	-		-	45 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
235.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**800.000.000,00**							**1.865.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif						***550.000.000,00***							***1.715.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19.61 %		11.61 %	13.61 %	550.000.000,00						15.61 %	1.715.000.000,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan						700.000.000,00					-		1.490.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan						700.000.000,00					-		1.490.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	70 Orang		25 Orang	50 Orang	250.000.000,00						50 Orang	120.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	250 Orang		240 Orang	250 Orang	250.000.000,00						250 Orang	550.000.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang		0 Orang	100 Orang	150.000.000,00						100 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	200 Orang		0 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	220.000.000,00	
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						250.000.000,00							550.000.000,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	250 Orang		240 Orang	150 Orang	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	550.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif						0,00							150.000.000,00	
		Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						250.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	70 Orang		25 Orang	100 Orang	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	120.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI						0,00							220.000.000,00	
		Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	200 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		100 Orang	220.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang		0 Orang	50 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						100.000.000,00					-		375.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						100.000.000,00					-		375.000.000,00	
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	50 Orang		0 Orang	50 Orang	100.000.000,00						50 Orang	150.000.000,00	
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	50 Orang		0 Orang	50 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						100.000.000,00					-		375.000.000,00	
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	-	0,00						-	225.000.000,00	
	3.26.05.1.02.0008	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						0,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		-	225.000.000,00	Dinas Pariwisata
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral						**18.001.316.277,29**							**22.672.561.315,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**17.851.316.277,29**							**22.592.561.315,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**17.851.316.277,29**							**22.592.561.315,00**	
236.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.561.316.277,29**							**14.927.665.009,00**	
		Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral						***13.101.316.277,29***							***14.067.665.009,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	13.101.316.277,29						BB Predikat	14.067.665.009,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	90 Indeks		87.5 Indeks	88.2 Indeks	13.101.316.277,29						88.7 Indeks	14.067.665.009,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	87.8 Indeks		87.65 Indeks	87.75 Indeks	13.101.316.277,29						87.76 Indeks	14.067.665.009,00	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						265.000.000,00					Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Instansi Lainnya		500.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah						265.000.000,00					Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Instansi Lainnya		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						85.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.601.216.277,29					Pegawai Dinas ESDM		12.300.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Adminisrasi Keuangan						11.601.216.277,29					Pegawai Dinas ESDM		12.300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	461.316.277,29						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	39.900.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan		72 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	11.100.000.000,00						72 Orang/ Bulan	11.600.000.000,00	
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.100.000.000,00							11.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan		72 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	11.100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		72 Orang/ Bulan	11.600.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						461.316.277,29							500.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	461.316.277,29	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						39.900.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	39.900.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						165.000.000,00					Pegawai Dinas ESDM		350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						165.000.000,00					Pegawai Dinas ESDM		350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		10 Orang	18 Orang	35.000.000,00						20 Orang	100.000.000,00	
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						35.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		10 Orang	18 Orang	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Orang	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						690.000.000,00					Pegawai Dinas ESDM		967.665.009,00	
		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						690.000.000,00					Pegawai Dinas ESDM		967.665.009,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00						1 Laporan	787.665.009,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						120.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	110.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	20.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						500.000.000,00							787.665.009,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	787.665.009,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						290.100.000,00					Barang milik daerah		330.000.000,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						290.100.000,00					Barang milik daerah		330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.000.000,00						1 Paket	205.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	45.000.000,00						1 Unit	45.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.100.000,00						1 Unit	30.000.000,00	
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						70.000.000,00							205.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	205.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	45.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.100.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.100.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	30.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						180.000.000,00					Penyediaan jasa Keamanan, Kebersihan, komunikasi, sumber daya air dan listrik		110.000.000,00	
		Jumlah dokumen kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						180.000.000,00					Penyediaan jasa Keamanan, Kebersihan, komunikasi, sumber daya air dan listrik		110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	80.000.000,00	
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						150.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	80.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						370.000.000,00					Barang milik daerah		370.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara						370.000.000,00					Barang milik daerah		370.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	190.000.000,00						16 Unit	190.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		30 Unit	47 Unit	30.000.000,00						47 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						190.000.000,00							190.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	190.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		16 Unit	190.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		30 Unit	47 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		47 Unit	30.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
237.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**250.000.000,00**							**1.220.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian						***150.000.000,00***							***1.100.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	95.45 %		27.27 %	68.18 %	150.000.000,00						81.82 %	1.100.000.000,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						100.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		730.000.000,00	
		Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah						100.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		730.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						100.000.000,00							130.000.000,00	
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	130.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						0,00							500.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						150.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		490.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						150.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		490.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	120.000.000,00	
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah						50.000.000,00							120.000.000,00	
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah						0,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	120.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah						100.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
238.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**750.000.000,00**							**400.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara						***600.000.000,00***							***320.000.000,00***	
			1.Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik	68 %		59 %	62 %	600.000.000,00						64 %	320.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						550.000.000,00					Pelaku usaha pertambangan		120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						100.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat						150.000.000,00					Pelaku usaha pertambangan		110.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Wilayah Pertambangan Rakyat						150.000.000,00					Pelaku usaha pertambangan		110.000.000,00	
			Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	30.000.000,00	
	3.29.03.1.04.0006	Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						50.000.000,00					Pelaku usaha pertambangan		170.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						50.000.000,00					Pelaku usaha pertambangan		170.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						550.000.000,00					Pelaku usaha pertambangan		120.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						550.000.000,00					Pelaku usaha pertambangan		120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-		-	-	450.000.000,00						-	0,00	
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						450.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-		-	1 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
239.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**						**2.160.000.000,00**							**2.867.448.153,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan						***2.160.000.000,00***							***2.767.448.153,00***	
			1.Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20.2 %		16.5 %	17.1 %	2.160.000.000,00						18.3 %	2.767.448.153,00	
			2.Intensitas energi primer	134.4 SBM/Milyar Rupiah		135.4 SBM/Milyar Rupiah	135.2 SBM/Milyar Rupiah	2.160.000.000,00						135 SBM/Milyar Rupiah	2.767.448.153,00	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi						2.085.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		2.467.448.153,00	
		Jumlah dokumen Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi						2.085.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		2.467.448.153,00	
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	60 unit		229 unit	30 unit	2.085.000.000,00						35 unit	2.167.448.153,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	7 unit		1 unit	1 unit	0,00						2 unit	200.000.000,00	
	3.29.05.1.07.0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT						2.085.000.000,00							2.167.448.153,00	
		Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	60 unit		229 unit	50 unit	2.085.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		35 unit	2.167.448.153,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT						0,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	7 unit		1 unit	0 unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 unit	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral						45.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		300.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral						45.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		300.000.000,00	
			Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	6 Unit		5 Unit	5 Unit	45.000.000,00						6 Unit	300.000.000,00	
	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi						45.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	6 Unit		5 Unit	1 Unit	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		6 Unit	300.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi						30.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		100.000.000,00	
		Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi						30.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 laporan		1 laporan	1 laporan	30.000.000,00						1 laporan	100.000.000,00	
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 laporan		1 laporan	1 laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 laporan	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
240.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**1.280.000.000,00**							**3.257.448.153,00**	
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan						***1.222.500.000,00***							***3.222.448.153,00***	
			1.Rasio Elektrifikasi	99.55 %		99.20 %	99.30 %	1.222.500.000,00						99.40 %	3.222.448.153,00	
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						1.210.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		3.257.448.153,00	
		Jumlah dokumen Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						1.210.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		3.257.448.153,00	
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	500 Keluarga		460 Keluarga	500 Keluarga	30.000.000,00						500 Keluarga	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	524 Unit		467 Unit	503 Unit	1.050.000.000,00						504 Unit	3.037.448.153,00	
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	500 Keluarga		460 Keluarga	40 Keluarga	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		500 Keluarga	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						15.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	35.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						1.050.000.000,00							3.037.448.153,00	
		Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	524 Unit		467 Unit	47 Unit	1.050.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		504 Unit	3.037.448.153,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						15.000.000,00							35.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	35.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						28.000.000,00					Masyarakat, Badan Usaha Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Kab/Kota		0,00	
		Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						28.000.000,00					Masyarakat, Badan Usaha Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Kab/Kota		0,00	
			Jumlah pelaksanaan perizinan usaha yang dibina dan diawasi	-		-	-	14.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah rekomendasi kepada Badan Usaha dalam rangka Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pemerintah Pusat	-		-	-	14.000.000,00						-	0,00	
	3.29.06.1.01.0005	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik						14.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik	Jumlah pelaksanaan perizinan usaha yang dibina dan diawasi	-		-	1 Laporan	14.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.01.0006	Penerbitan rekomendasi dalam rangka penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik						14.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya penerbitan rekomendasi kepada badan usaha dalam rangka penerbitan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat	Jumlah rekomendasi kepada Badan Usaha dalam rangka Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pemerintah Pusat	-		-	1 Dokumen	14.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						15.000.000,00					Masyarakat, Badan Usaha Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Kab/Kota		0,00	
		Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						15.000.000,00					Masyarakat, Badan Usaha Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Kab/Kota		0,00	
			Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
	3.29.06.1.02.0007	Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri						27.000.000,00					Masyarakat, Badan Usaha Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Kab/Kota		0,00	
		Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri						27.000.000,00					Masyarakat, Badan Usaha Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Kab/Kota		0,00	
			Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-		-	-	13.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembar Pengesahan Evaluasi Teknis Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-		-	-	13.500.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.06.1.05.0005	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri						13.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-		-	1 Laporan	13.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.05.0006	Pengesahan Evaluasi Teknis Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri						13.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengesahan Evaluasi Teknis Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Lembar Pengesahan Evaluasi Teknis Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-		-	1 Dokumen	13.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan						**19.699.551.860,83**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**19.699.551.860,83**							**0,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**17.184.551.860,83**							**0,00**	
241.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**16.214.551.860,83**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Urusan Perindustrian dan Perdagangan						***16.064.551.860,83***							***0,00***	
			1.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	87 Indeks		86.85 Indeks	86.85 Indeks	16.064.551.860,83						86.9 Indeks	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	87.31 Indeks		86.93 Indeks	87.02 Indeks	16.064.551.860,83						87.14 Indeks	0,00	
			3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	16.064.551.860,83						BB Predikat	0,00	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						90.000.000,00					Perangkat Daerah		0,00	
		Tersusunya Dokumen Perancanaan, Penganggaran serla tersedianya laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						90.000.000,00					Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	0,00	
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.084.551.860,83					ASN		0,00	
		Terlaksanya Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah						15.084.551.860,83					ASN		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	489.390.972,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/ Bulan		102 Orang/ Bulan	102 Orang/ Bulan	14.595.160.888,83						102 Orang/ Bulan	0,00	
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.595.160.888,83							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/ Bulan		102 Orang/ Bulan	102 Orang/ Bulan	14.595.160.888,83	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		102 Orang/ Bulan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						489.390.972,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	489.390.972,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00					ASN		0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00					ASN		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						701.004.512,00					ASN		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksanya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						701.004.512,00					ASN		0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	401.004.512,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	125.000.000,00						1 Paket	0,00	
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						125.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	125.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						80.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						401.004.512,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	401.004.512,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						88.995.488,00					ASN		0,00	
		Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah						88.995.488,00					ASN		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	38.995.488,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	0,00	
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						38.995.488,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	38.995.488,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						220.000.000,00					ASN		0,00	
		Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						220.000.000,00					ASN		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	190.000.000,00						11 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	70 Unit	30.000.000,00						70 Unit	0,00	
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						190.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	190.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		11 Unit	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	15 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		70 Unit	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
242.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**50.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha						***50.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00						100 %	0,00	
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor						50.000.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan (Distributor)		0,00	
		Terbitnya Rekomendasi terhadap Permohonan Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB)						50.000.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan (Distributor)		0,00	
			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
243.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi						***50.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri	2.64 %		2.11 %	2.24 %	50.000.000,00						2.38 %	0,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						100.000.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha						100.000.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	
			Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00						1 Kegiatan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00						0 Laporan	0,00	
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.1.01.0004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi						50.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Kegiatan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
244.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**						**100.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						***50.000.000,00***							***0,00***	
			1.Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	5.58 %		5.63 %	5.62 %	50.000.000,00						5.61 %	0,00	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						100.000.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan dan Masyarakat		0,00	
		Terpantaunya Harga Kebutuhan Barang Pokok di Provinsi Kepulauan Riau						100.000.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	0,00	
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
245.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**150.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor						***50.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Pengembangan Ekspor	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00						100 %	0,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						150.000.000,00					Pelaku Usaha Ekspor		0,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha dalam pengembangan Ekspor						150.000.000,00					Pelaku Usaha Ekspor		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	50.000.000,00						10 Pelaku Usaha	0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	50.000.000,00						5 Pelaku Usaha	0,00	
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	5 Produk		5 Produk	5 Produk	50.000.000,00						5 Produk	0,00	
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						50.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	5 Produk		5 Produk	1 Produk	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Produk	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
246.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**520.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk						***520.000.000,00***							***0,00***	
			1.Indeks Tertib Niaga	81-100 Indeks		61-80 Indeks	61-80 Indeks	520.000.000,00						81-100 Indeks	0,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						470.000.000,00					Pelaku Usaha dan Konsumen (Masyarakat)		0,00	
		Terlaksananya Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						470.000.000,00					Pelaku Usaha dan Konsumen (Masyarakat)		0,00	
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK		2 BPSK	2 BPSK	470.000.000,00						2 BPSK	0,00	
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen						470.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK		2 BPSK	2 BPSK	470.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 BPSK	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	
		Terlaksananya Pengawasan yang dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan						50.000.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	0,00	
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga						50.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
247.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**50.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri						***50.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi	55 %		35 %	40 %	50.000.000,00						45 %	0,00	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						50.000.000,00					Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk Lokal						50.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	0,00	
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Literasi Anak Didik, Generasi Muda dan Masyarakat Tentang Kecintaan dan Kebanggaan dalam Menggunakan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**2.515.000.000,00**							**0,00**	
248.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**2.415.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri						***2.165.000.000,00***							***0,00***	
			2.Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas	7 %		7 %	7 %	2.165.000.000,00						7 %	0,00	
			2.Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	3.36 %		2.92 %	3.03 %	2.165.000.000,00						3.14 %	0,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						2.415.000.000,00					Palaku Industri		0,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri						2.415.000.000,00					Palaku Industri		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.115.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi						50.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						50.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						2.115.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.115.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						50.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						50.000.000,00							0,00	
		Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi						50.000.000,00							0,00	
		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
249.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**50.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian						***50.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	9.26 %		0.85 %	2.95 %	50.000.000,00						5.05 %	0,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						50.000.000,00					Palaku Industri		0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						50.000.000,00					Palaku Industri		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi						50.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
250.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**50.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri						***50.000.000,00***							***0,00***	
			1.Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						50.000.000,00					Palaku Industri		0,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						50.000.000,00					Palaku Industri		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah						**2.000.000.000,00**							**3.200.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.000.000.000,00**							**3.200.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.000.000.000,00**							**3.200.000.000,00**	
251.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**203.865.815.700,95**							**207.810.293.326,00**	
			-	-		-	-	1.490.000.000,00						-	1.612.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
		-						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	572.942.900,00						-	553.416.764,00	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						135.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	135.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	65.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
		-						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	405.901.800,00						-	358.177.700,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						130.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	130.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
		-						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	63.117.500,00						-	88.909.624,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	2.963.143.500,00						-	2.338.361.916,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.444.649.780,00						-	10.994.787.314,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	320.621.700,00						-	410.955.521,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.245.000,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.418.192.737,00						-	2.260.956.350,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	307.995.100,00						-	233.826.280,00	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						245.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	245.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.200.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	60.200.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	30.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	4 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.200.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	26.200.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	30.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.200.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	3.200.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	15.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						265.655.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	4 Laporan	265.655.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	300.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
		-						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	623.898.540,00						-	312.800.000,00	
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							212.800.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	212.800.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
		-						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.399.514.430,00						-	7.633.118.078,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.532.263.957,00						-	12.705.902.478,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.482.067.290,00						-	6.757.525.835,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	131.013.100,00						-	163.066.012,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.500.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.000.000,00							1.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.200.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						48.000.000,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	48.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	48.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						49.000.000,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	49.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	48.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
		-						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.412.531.250,00						-	2.465.274.011,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.238.077.371,00						-	1.333.815.093,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.344.767.449,00						-	1.433.775.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						92.500.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	92.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	60.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						142.500.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	142.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	7.500.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						3.230.673.900,00					-		3.875.548.193,00	
		-						3.230.673.900,00					-		3.875.548.193,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	1.949.996.900,00						-	3.175.548.193,00	
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						500.000.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	4 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	700.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
252.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**500.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
			-	-		-	-	470.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						165.000.000,00					-		410.000.000,00	
		-						165.000.000,00					-		410.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	-		-	-	30.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	-		-	-	135.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan						0,00							10.000.000,00	
		Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						135.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	-		-	2 Dokumen	135.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	300.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah						162.500.000,00					-		500.000.000,00	
		-						162.500.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	-		-	-	40.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	-		-	-	22.500.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		-	-	100.000.000,00						-	350.000.000,00	
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						40.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan						22.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	22.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						100.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		-	2 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	350.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						172.500.000,00					-		590.000.000,00	
		-						172.500.000,00					-		590.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	-		-	-	110.000.000,00						-	315.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	-		-	-	32.500.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	-		-	-	30.000.000,00						-	75.000.000,00	
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah						110.000.000,00							315.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	-		-	2 Dokumen	110.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	315.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta						32.500.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	-		-	2 Dokumen	32.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						30.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	-		-	2 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Biro Organisasi						**1.750.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.625.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.625.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
253.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**203.865.815.700,95**							**207.810.293.326,00**	
			-	-		-	-	600.000.000,00						-	0,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
		-						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	572.942.900,00						-	553.416.764,00	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
		-						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	45.000.000,00						-	250.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	642.457.000,00						-	705.578.548,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	405.901.800,00						-	358.177.700,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	15 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	15 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						20.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	10 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
		-						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	63.117.500,00						-	88.909.624,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	5.732.786.735,20						-	6.988.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	2.963.143.500,00						-	2.338.361.916,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.444.649.780,00						-	10.994.787.314,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	320.621.700,00						-	410.955.521,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.245.000,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.418.192.737,00						-	2.260.956.350,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	307.995.100,00						-	233.826.280,00	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	8.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						38.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	5 Paket	38.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						300.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
		-						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	509.996.800,00						-	475.896.552,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	389.391.724,00						-	270.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
		-						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.399.514.430,00						-	7.633.118.078,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.532.263.957,00						-	12.705.902.478,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.482.067.290,00						-	6.757.525.835,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	131.013.100,00						-	163.066.012,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	3 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						37.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	37.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
		-						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.344.767.449,00						-	1.433.775.000,00	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
254.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**						**750.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
			-	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						250.000.000,00					-		500.000.000,00	
		-						250.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-		-	-	75.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	-		-	-	100.000.000,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-		-	-	75.000.000,00						-	150.000.000,00	
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						500.000.000,00					-		500.000.000,00	
		-						500.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	-		-	-	125.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-		-	-	75.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		-	-	100.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	-		-	-	125.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	-		-	-	75.000.000,00						-	150.000.000,00	
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	-		-	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan						125.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	-		-	1 Dokumen	125.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						125.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	-		-	1 Dokumen	125.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
	X							**125.000.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**125.000.000,00**							**0,00**	
255.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**940.000.000,00**							**1.053.981.636,00**	
			-	-		-	-	125.000.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						361.833.636,00					-		286.833.636,00	
		-						361.833.636,00					-		286.833.636,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	329.833.636,00						-	254.833.636,00	
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						125.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	125.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Organisasi
		Biro Kesejahteraan Rakyat						**47.401.169.952,00**							**62.273.073.400,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**47.401.169.952,00**							**62.273.073.400,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**47.401.169.952,00**							**62.273.073.400,00**	
256.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**203.865.815.700,95**							**207.810.293.326,00**	
			-	-		-	-	1.362.890.662,00						-	1.351.468.078,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
		-						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	165.611.000,00						-	278.002.300,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	14.490.800,00						-	27.404.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	572.942.900,00						-	553.416.764,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.611.000,00							28.002.300,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	15.611.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	28.002.300,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						14.490.800,00							27.404.700,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	14.490.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	27.404.700,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.424.800,00							30.529.700,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	25.424.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	30.529.700,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
		-						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	642.457.000,00						-	705.578.548,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	405.901.800,00						-	358.177.700,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						46.500.000,00							50.852.700,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	46.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.852.700,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.901.800,00							14.602.700,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	3 Orang	10.901.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	14.602.700,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
		-						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	2.963.143.500,00						-	2.338.361.916,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.444.649.780,00						-	10.994.787.314,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.956.119,00							49.297.192,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.956.119,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	49.297.192,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						247.507.800,00							310.287.700,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	247.507.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	310.287.700,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
		-						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	509.996.800,00						-	475.896.552,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	389.391.724,00						-	270.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						102.013.420,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	102.013.420,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
		-						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.532.263.957,00						-	12.705.902.478,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.482.067.290,00						-	6.757.525.835,00	
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						110.601.800,00							110.802.700,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	110.601.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.802.700,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						511.280.752,00							472.860.774,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	511.280.752,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	472.860.774,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
		-						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.238.077.371,00						-	1.333.815.093,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						227.602.371,00							236.827.612,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	7 Unit	227.602.371,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	236.827.612,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
257.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**46.038.279.290,00**							**60.901.605.322,00**	
			-	-		-	-	45.758.279.290,00						-	60.484.850.522,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual						39.127.617.490,00					-		50.124.659.882,00	
		-						39.127.617.490,00					-		50.124.659.882,00	
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	-		-	-	16.307.536.800,00						-	22.892.410.791,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	-		-	-	22.820.080.690,00						-	27.232.249.091,00	
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual						22.820.080.690,00							27.232.249.091,00	
		Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	-		-	400 Unit	22.820.080.690,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	27.232.249.091,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						16.307.536.800,00							22.892.410.791,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	-		-	6 Lembaga	16.307.536.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	22.892.410.791,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						6.700.661.800,00					-		10.464.379.340,00	
		-						6.700.661.800,00					-		10.464.379.340,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	-		-	-	70.000.000,00						-	104.188.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	-		-	-	6.560.661.800,00						-	10.256.001.940,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	-		-	-	70.000.000,00						-	104.188.700,00	
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						6.560.661.800,00							10.256.001.940,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	6.560.661.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.256.001.940,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						70.000.000,00							104.188.700,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	-		-	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	104.188.700,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial						70.000.000,00							104.188.700,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	-		-	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	104.188.700,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						210.000.000,00					-		312.566.100,00	
		-						210.000.000,00					-		312.566.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	-		-	-	70.000.000,00						-	104.188.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	-		-	-	70.000.000,00						-	104.188.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-		-	-	70.000.000,00						-	104.188.700,00	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						70.000.000,00							104.188.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	-		-	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	104.188.700,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja						70.000.000,00							104.188.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-		-	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	104.188.700,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan						70.000.000,00							104.188.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	-		-	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	104.188.700,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Biro Perekonomian dan Pembangunan						**2.500.000.000,00**							**3.200.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.500.000.000,00**							**3.200.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.500.000.000,00**							**3.200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
258.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**203.865.815.700,95**							**207.810.293.326,00**	
			-	-		-	-	1.755.000.000,00						-	1.928.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
		-						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	572.942.900,00						-	553.416.764,00	
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						90.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	70.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
		-						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	45.000.000,00						-	250.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	642.457.000,00						-	705.578.548,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	405.901.800,00						-	358.177.700,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						60.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						15.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	3 Orang	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
		-						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	2.963.143.500,00						-	2.338.361.916,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.444.649.780,00						-	10.994.787.314,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	320.621.700,00						-	410.955.521,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.418.192.737,00						-	2.260.956.350,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	307.995.100,00						-	233.826.280,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						97.143.600,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	97.143.600,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	105.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						32.010.400,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	32.010.400,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	60.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						350.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	400.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
		-						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	509.996.800,00						-	475.896.552,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	389.391.724,00						-	270.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						87.378.304,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	87.378.304,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
		-						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.399.514.430,00						-	7.633.118.078,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.532.263.957,00						-	12.705.902.478,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.482.067.290,00						-	6.757.525.835,00	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	36.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						98.500.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	98.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						86.967.696,00							72.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	86.967.696,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	72.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
		-						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.238.077.371,00						-	1.333.815.093,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.344.767.449,00						-	1.433.775.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						148.000.000,00							140.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	148.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	140.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	40.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						3.230.673.900,00					-		3.875.548.193,00	
		-						3.230.673.900,00					-		3.875.548.193,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	1.949.996.900,00						-	3.175.548.193,00	
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						500.000.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	1 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	700.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
259.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**585.000.000,00**							**785.000.000,00**	
			-	-		-	-	255.000.000,00						-	500.000.000,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						210.000.000,00					-		270.000.000,00	
		-						210.000.000,00					-		270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	-		-	-	50.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	-		-	-	60.000.000,00						-	100.000.000,00	
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						60.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.06.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	70.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						170.000.000,00					-		130.000.000,00	
		-						170.000.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-		-	-	50.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-		-	-	60.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-		-	-	60.000.000,00						-	25.000.000,00	
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						60.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						60.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						50.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	80.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						205.000.000,00					-		385.000.000,00	
		-						205.000.000,00					-		385.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-		-	-	20.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	-		-	-	60.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	-		-	-	25.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-		-	-	100.000.000,00						-	155.000.000,00	
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						100.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	155.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi						25.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	80.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						20.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	80.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah						60.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
260.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**						**160.000.000,00**							**317.000.000,00**	
			-	-		-	-	160.000.000,00						-	277.000.000,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						160.000.000,00					-		207.000.000,00	
		-						160.000.000,00					-		207.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	-		-	-	100.000.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	-		-	-	60.000.000,00						-	62.000.000,00	
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						100.000.000,00							125.000.000,00	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	125.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN						0,00							20.000.000,00	
		Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						60.000.000,00							62.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	-		-	1 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	62.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						0,00					-		110.000.000,00	
		-						0,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	-		-	-	0,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						0,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	70.000.000,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
		Biro Umum						**191.437.925.038,95**							**193.895.411.304,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**191.437.925.038,95**							**193.895.411.304,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**191.437.925.038,95**							**193.895.411.304,00**	
261.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**203.865.815.700,95**							**207.810.293.326,00**	
			-	-		-	-	191.437.925.038,95						-	193.786.473.804,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
		-						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	572.942.900,00						-	553.416.764,00	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						87.518.100,00							207.887.064,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	87.518.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	207.887.064,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						114.672.285.477,95					-		122.647.509.915,00	
		-						114.672.285.477,95					-		122.647.509.915,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	62.955.000,00						-	49.021.875,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	49.999.500,00						-	54.468.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	3.565.757.100,00						-	3.699.473.199,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	250.000.000,00						-	77.812.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	0,00						-	50.111.250,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	187.217.100,00						-	105.825.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	110.556.356.777,95						-	118.610.797.341,00	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						110.556.356.777,95							118.610.797.341,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1015 Orang/ Bulan	110.556.356.777,95	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	118.610.797.341,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						3.565.757.100,00							3.699.473.199,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	3.565.757.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.699.473.199,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						250.000.000,00							77.812.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	77.812.500,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						49.999.500,00							54.468.750,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	1 Dokumen	49.999.500,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	54.468.750,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.111.250,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.111.250,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						62.955.000,00							49.021.875,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	1 Dokumen	62.955.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	49.021.875,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						187.217.100,00							105.825.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	4 Laporan	187.217.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	105.825.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						838.847.236,80					-		945.434.777,00	
		-						838.847.236,80					-		945.434.777,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	549.997.236,80						-	631.038.397,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	138.860.700,00						-	136.815.130,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	49.997.400,00						-	65.362.500,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	49.999.400,00						-	57.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	49.992.500,00						-	54.468.750,00	
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						49.992.500,00							54.468.750,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	49.992.500,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	54.468.750,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						549.997.236,80							631.038.397,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	549.997.236,80	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	631.038.397,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						138.860.700,00							136.815.130,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	138.860.700,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	136.815.130,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						49.999.400,00							57.750.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	49.999.400,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	57.750.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						49.997.400,00							65.362.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	49.997.400,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	65.362.500,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
		-						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	54.468.750,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	45.000.000,00						-	250.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	642.457.000,00						-	705.578.548,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	405.901.800,00						-	358.177.700,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						249.991.000,00							204.725.848,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	3 Paket	249.991.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	204.725.848,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							54.468.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	54.468.750,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							43.575.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	43.575.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							115.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	50 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	115.500.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
		-						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	63.117.500,00						-	88.909.624,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	400.000.000,00						-	81.688.092,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	5.732.786.735,20						-	6.988.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	2.963.143.500,00						-	2.338.361.916,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.444.649.780,00						-	10.994.787.314,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	320.621.700,00						-	410.955.521,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.418.192.737,00						-	2.260.956.350,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	307.995.100,00						-	233.826.280,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.299.992.737,00							2.055.956.350,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	1.299.992.737,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.055.956.350,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						199.995.100,00							94.430.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	199.995.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	94.430.700,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.000.350.061,00							10.535.490.122,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.000.350.061,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.535.490.122,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.611.300,00							215.955.521,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	200.611.300,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	215.955.521,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						49.917.500,00							54.909.624,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	49.917.500,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	54.909.624,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.707.786.735,20							6.968.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	5.707.786.735,20	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.968.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.099.980.700,00							628.074.216,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	1.099.980.700,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	628.074.216,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						400.000.000,00							81.688.092,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	81.688.092,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
		-						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	509.996.800,00						-	475.896.552,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	4.008.543.800,00						-	1.089.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	623.898.540,00						-	312.800.000,00	
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						498.898.540,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	498.898.540,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.008.543.800,00							1.089.375.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	3 Unit	4.008.543.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.089.375.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						449.996.800,00							355.896.552,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	449.996.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	355.896.552,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
		-						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.399.514.430,00						-	7.633.118.078,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.532.263.957,00						-	12.705.902.478,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.482.067.290,00						-	6.757.525.835,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	131.013.100,00						-	163.066.012,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						109.513.100,00							118.566.012,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	109.513.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	118.566.012,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.191.514.430,00							7.435.918.078,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	7.191.514.430,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	7.435.918.078,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.999.965.490,00							6.263.723.135,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	8.999.965.490,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.263.723.135,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						17.313.015.509,00							11.608.041.704,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	17.313.015.509,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	11.608.041.704,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
		-						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.206.965.488,00						-	1.459.730.255,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.717.120.844,00						-	2.221.851.293,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.412.531.250,00						-	2.465.274.011,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.238.077.371,00						-	1.333.815.093,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	49.918.000,00						-	302.113.644,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.344.767.449,00						-	1.433.775.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						509.975.000,00							611.987.481,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	38 Unit	509.975.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	611.987.481,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.270.031.250,00							2.355.274.011,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	189 Unit	2.270.031.250,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.355.274.011,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						49.918.000,00							302.113.644,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	250 Unit	49.918.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	302.113.644,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.199.767.449,00							1.276.275.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	2.199.767.449,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.276.275.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						1.206.965.488,00							1.459.730.255,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	7 Unit	1.206.965.488,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.459.730.255,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.717.120.844,00							1.888.832.929,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	18 Unit	1.717.120.844,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.888.832.929,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						4.561.008.991,00					-		4.729.018.873,00	
		-						4.561.008.991,00					-		4.729.018.873,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	2.687.800.116,00						-	2.786.800.786,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	1.635.123.083,00						-	1.696.440.199,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	33.098.792,00						-	33.098.792,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	204.987.000,00						-	212.679.096,00	
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.635.123.083,00							1.696.440.199,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	28 Orang/Bulan	1.635.123.083,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.696.440.199,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						204.987.000,00							212.679.096,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	6 Paket	204.987.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	212.679.096,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						33.098.792,00							33.098.792,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	6 Orang	33.098.792,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	33.098.792,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.687.800.116,00							2.786.800.786,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	24 Orang/ Bulan	2.687.800.116,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.786.800.786,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						6.694.417.500,00					-		8.371.504.458,00	
		-						6.694.417.500,00					-		8.371.504.458,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	2.888.286.600,00						-	3.606.449.007,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	-	1.243.928.100,00						-	1.826.410.151,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	2.562.202.800,00						-	2.938.645.300,00	
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						2.888.286.600,00							3.606.449.007,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.888.286.600,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.606.449.007,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						2.562.202.800,00							2.938.645.300,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.562.202.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.938.645.300,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah TanggaSekretariat Daerah						1.243.928.100,00							1.826.410.151,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.243.928.100,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.826.410.151,00	Biro Umum
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						3.230.673.900,00					-		3.875.548.193,00	
		-						3.230.673.900,00					-		3.875.548.193,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	1.949.996.900,00						-	3.175.548.193,00	
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						699.996.900,00							1.175.548.193,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	1 Laporan	699.996.900,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.175.548.193,00	Biro Umum
		Biro Pengadaan Barang/Jasa						**1.500.000.000,00**							**2.480.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**685.000.000,00**							**1.426.018.364,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**685.000.000,00**							**1.426.018.364,00**	
262.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**203.865.815.700,95**							**207.810.293.326,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	230.000.000,00						-	751.018.364,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
		-						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	45.000.000,00						-	250.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	642.457.000,00						-	705.578.548,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	405.901.800,00						-	358.177.700,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	90.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
		-						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	63.117.500,00						-	88.909.624,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	5.732.786.735,20						-	6.988.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.444.649.780,00						-	10.994.787.314,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.245.000,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	307.995.100,00						-	233.826.280,00	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	16.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	40.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							185.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	185.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							19.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	19.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
		-						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	509.996.800,00						-	475.896.552,00	
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
		-						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	131.013.100,00						-	163.066.012,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	18.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
		-						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.717.120.844,00						-	2.221.851.293,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							308.018.364,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	308.018.364,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
263.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**						**450.000.000,00**							**675.000.000,00**	
			-	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						150.000.000,00					-		225.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						150.000.000,00					-		225.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						150.000.000,00					-		225.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	30 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X							**815.000.000,00**							**1.053.981.636,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**815.000.000,00**							**1.053.981.636,00**	
264.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**940.000.000,00**							**1.053.981.636,00**	
			-	-		-	-	775.000.000,00						-	1.053.981.636,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00					-		42.000.000,00	
		-						20.000.000,00					-		42.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	20.000.000,00						-	42.000.000,00	
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	42.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						402.393.068,00					-		556.922.152,00	
		-						402.393.068,00					-		556.922.152,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	362.393.068,00						-	448.922.152,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	33.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	75.000.000,00	
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	33.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						362.393.068,00							448.922.152,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	4 Laporan	362.393.068,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	448.922.152,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						155.773.296,00					-		168.225.848,00	
		-						155.773.296,00					-		168.225.848,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	43.547.448,00						-	49.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.225.848,00						-	97.225.848,00	
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	22.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						97.225.848,00							97.225.848,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	97.225.848,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	97.225.848,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.547.448,00							49.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	43.547.448,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	49.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						361.833.636,00					-		286.833.636,00	
		-						361.833.636,00					-		286.833.636,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	329.833.636,00						-	254.833.636,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	32.000.000,00						-	32.000.000,00	
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						204.833.636,00							254.833.636,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	3 Unit	204.833.636,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	254.833.636,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						32.000.000,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	32.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	32.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
		Biro Hukum						**1.500.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.500.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.500.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
265.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**203.865.815.700,95**							**207.810.293.326,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	755.000.000,00						-	605.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
		-						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	572.942.900,00						-	553.416.764,00	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						60.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	80.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
		-						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	45.000.000,00						-	250.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	642.457.000,00						-	705.578.548,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	405.901.800,00						-	358.177.700,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	40 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	20 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
		-						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	5.732.786.735,20						-	6.988.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	2.963.143.500,00						-	2.338.361.916,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.444.649.780,00						-	10.994.787.314,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	320.621.700,00						-	410.955.521,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.245.000,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.418.192.737,00						-	2.260.956.350,00	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	15.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	20.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
		-						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	509.996.800,00						-	475.896.552,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	623.898.540,00						-	312.800.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	389.391.724,00						-	270.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						125.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	125.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
		-						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.399.514.430,00						-	7.633.118.078,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.532.263.957,00						-	12.705.902.478,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.482.067.290,00						-	6.757.525.835,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	131.013.100,00						-	163.066.012,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						85.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	85.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	55.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
		-						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.717.120.844,00						-	2.221.851.293,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.238.077.371,00						-	1.333.815.093,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.344.767.449,00						-	1.433.775.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	6 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
266.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**						**500.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
			-	-		-	-	500.000.000,00						-	980.000.000,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						360.000.000,00					-		980.000.000,00	
		-						360.000.000,00					-		980.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	-		-	-	120.000.000,00						-	320.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	-		-	-	80.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	-		-	-	110.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	-		-	-	50.000.000,00						-	160.000.000,00	
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPengaturan						110.000.000,00							300.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	-		-	50 Dokumen	110.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	300.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPenetapan						80.000.000,00							200.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	-		-	1800 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya						50.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	-		-	20 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	160.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk HukumKabupaten/Kota						120.000.000,00							320.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	-		-	72 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	320.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum						140.000.000,00					-		520.000.000,00	
		-						140.000.000,00					-		520.000.000,00	
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	-		-	-	75.000.000,00						-	320.000.000,00	
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	-		-	-	65.000.000,00						-	200.000.000,00	
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum						75.000.000,00							320.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	-		-	5 Kasus	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	320.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						65.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	-		-	5 Kasus	65.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Biro Hukum
		Biro Administrasi Pimpinan						**5.700.000.000,00**							**6.994.395.580,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.700.000.000,00**							**6.994.395.580,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**5.700.000.000,00**							**6.994.395.580,00**	
267.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**203.865.815.700,95**							**207.810.293.326,00**	
			-	-		-	-	5.125.000.000,00						-	5.494.395.580,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
		-						978.044.700,00					-		1.018.823.764,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	165.611.000,00						-	278.002.300,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	572.942.900,00						-	553.416.764,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	125.000.000,00						-	50.000.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						125.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
		-						1.113.358.800,00					-		1.368.724.998,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	642.457.000,00						-	705.578.548,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	405.901.800,00						-	358.177.700,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						185.966.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	185.966.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	350.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
		-						19.712.752.052,20					-		23.429.485.097,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	2.963.143.500,00						-	2.338.361.916,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.444.649.780,00						-	10.994.787.314,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	320.621.700,00						-	410.955.521,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.418.192.737,00						-	2.260.956.350,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	307.995.100,00						-	233.826.280,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						45.000.000,00							69.395.580,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	69.395.580,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	70.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	450.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
		-						5.531.830.864,00					-		2.148.071.552,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	389.391.724,00						-	270.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
		-						35.544.858.777,00					-		27.259.612.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.399.514.430,00						-	7.633.118.078,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.532.263.957,00						-	12.705.902.478,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.482.067.290,00						-	6.757.525.835,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	131.013.100,00						-	163.066.012,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						135.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	135.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						125.000.000,00							235.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	235.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	450.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
		-						9.019.380.402,00					-		9.216.559.296,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.238.077.371,00						-	1.333.815.093,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.344.767.449,00						-	1.433.775.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						160.000.000,00							185.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	160.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	185.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	25 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	85.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						3.230.673.900,00					-		3.875.548.193,00	
		-						3.230.673.900,00					-		3.875.548.193,00	
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	-		-	-	495.610.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	1.949.996.900,00						-	3.175.548.193,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	-		-	-	785.067.000,00						-	600.000.000,00	
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan						495.610.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	-		-	1 Dokumen	495.610.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						250.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	1 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	600.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan						785.067.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	-		-	1 Laporan	785.067.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	600.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan						1.968.357.000,00					-		2.800.000.000,00	
		-						1.968.357.000,00					-		2.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-		-	-	1.025.842.000,00						-	1.400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	416.932.000,00						-	750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	-		-	-	525.583.000,00						-	650.000.000,00	
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						1.025.842.000,00							1.400.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-		-	1 Laporan	1.025.842.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.400.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						416.932.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	1 Laporan	416.932.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	750.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						525.583.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	-		-	1 Laporan	525.583.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	650.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
		Sekretariat DPRD						**105.784.304.270,14**							**91.971.334.861,97**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**105.784.304.270,14**							**91.971.334.861,97**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**105.784.304.270,14**							**91.971.334.861,97**	
268.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**71.556.184.270,14**							**66.762.172.044,97**	
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD						***68.496.184.270,14***							***66.102.172.044,97***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	68.496.184.270,14						BB Predikat	66.102.172.044,97	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Indeks		80 Indeks	80 Indeks	68.496.184.270,14						80 Indeks	66.102.172.044,97	
			3.Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	85.00 Indeks		83.05 Indeks	84.00 Indeks	68.496.184.270,14						84.05 Indeks	66.102.172.044,97	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000.000,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD						500.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	120.000.000,00						7 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						120.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						120.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						120.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						120.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						29.011.972.748,14					-		29.042.579.946,97	
		Terlaksanaannya Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD						29.011.972.748,14					-		29.042.579.946,97	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	789.936.000,00						19 Dokumen	789.936.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	356 Orang/ Bulan		356 Orang/ Bulan	356 Orang/ Bulan	28.072.036.748,14						356 Orang/ Bulan	27.952.643.946,97	
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						28.072.036.748,14							27.952.643.946,97	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	356 Orang/ Bulan		356 Orang/ Bulan	348 Orang/ Bulan	28.072.036.748,14	Provinsi Kepulauan Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		356 Orang/ Bulan	27.952.643.946,97	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						789.936.000,00							789.936.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	789.936.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		19 Dokumen	789.936.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						590.000.000,00					-		440.000.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi						590.000.000,00					-		440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	40.000.000,00						60 Orang	80.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	40.000.000,00						60 Orang	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	410.000.000,00						60 Orang	80.000.000,00	
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	200.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						410.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	410.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Orang	80.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						40.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	40 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Orang	80.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						40.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	40 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Orang	80.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.170.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						4.170.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	0,00	
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.000.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						70.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						300.000.000,00					-		350.000.000,00	
		Tersedianya Aset Sekretariat DPRD						300.000.000,00					-		350.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
	4.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	150.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.817.260.576,00					-		2.237.260.576,00	
		Terpenuhinya kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan						1.817.260.576,00					-		2.237.260.576,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.600.000.000,00						1 Laporan	2.020.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	217.260.576,00						1 Laporan	217.260.576,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.600.000.000,00							2.020.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.600.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.020.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						217.260.576,00							217.260.576,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	217.260.576,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	217.260.576,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.910.000.000,00					-		3.000.000.000,00	
		Terpenuhinya sarana prasarana kondisi baik						3.910.000.000,00					-		3.000.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	70.000.000,00						10 Unit	0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	70.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	1.500.000.000,00						60 Unit	3.000.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	70.000.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.200.000.000,00						1 Unit	0,00	
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.500.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	1.500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	3.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						70.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	5 Unit	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						70.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						31.192.331.522,00					-		31.592.331.522,00	
		Terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraan DPRD						31.192.331.522,00					-		31.592.331.522,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	30.922.331.522,00						45 Orang/ Bulan	30.922.331.522,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	170.000.000,00						45 Orang	170.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	500.000.000,00	
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						30.922.331.522,00							30.922.331.522,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	30.922.331.522,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Orang/ Bulan	30.922.331.522,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						100.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						170.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	170.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Orang	170.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD						64.619.424,00					-		100.000.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi DPRD						64.619.424,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	64.619.424,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						64.619.424,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	64.619.424,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
269.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**34.228.120.000,00**							**25.209.162.817,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif						***34.228.120.000,00***							***24.009.162.817,00***	
			1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	34.228.120.000,00						100 Persentase	24.009.162.817,00	
			2.Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase)	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	34.228.120.000,00						100 Persentase	24.009.162.817,00	
			3.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %		100 %	100 %	34.228.120.000,00						100 %	24.009.162.817,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD						735.000.000,00					-		2.700.000.000,00	
		Terselenggaranya Pembahasan Ranperda dalam Propemperda						735.000.000,00					-		2.700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	410.000.000,00						4 Dokumen	1.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	190.000.000,00						4 Dokumen	1.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	90.000.000,00						4 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	45.000.000,00						4 Dokumen	350.000.000,00	
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						190.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	1.100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda						410.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	410.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	1.100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						45.000.000,00							350.000.000,00	
		Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	350.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik						90.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	150.000.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Penganggaran Daerah (APBD dan APBD P)						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						4.778.120.000,00					-		11.180.000.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD						4.778.120.000,00					-		11.180.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	444.120.000,00						1 Dokumen	2.044.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00						1 Dokumen	4.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00						1 Dokumen	2.400.000.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang		36 Orang	36 Orang	1.392.000.000,00						36 Orang	2.232.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang		7 Orang	7 Orang	342.000.000,00						7 Orang	504.000.000,00	
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						444.120.000,00							2.044.000.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	444.120.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.044.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						1.392.000.000,00							2.232.000.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang		36 Orang	28 Orang	1.392.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Orang	2.232.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						342.000.000,00							504.000.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang		7 Orang	7 Orang	342.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	504.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						1.400.000.000,00							4.000.000.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	4.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						1.200.000.000,00							2.400.000.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.400.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						22.040.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Reses DPRD						22.040.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	22.000.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						40.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses						22.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD						6.575.000.000,00					-		11.229.162.817,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD Secara Optimal						6.575.000.000,00					-		11.229.162.817,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00						12 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00						1 Dokumen	2.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000.000,00						1 Dokumen	8.729.162.817,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	405.000.000,00						2 Laporan	200.000.000,00	
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						5.000.000.000,00							8.729.162.817,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	8.729.162.817,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						405.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	2 Laporan		Laporan	4 Laporan	405.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	200.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						70.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						1.100.000.000,00							2.200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.200.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						**30.067.626.807,41**							**36.884.050.217,25**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.067.626.807,41**							**36.884.050.217,25**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**29.737.626.807,41**							**35.584.050.217,25**	
270.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**26.967.626.807,41**							**28.902.983.554,25**	
		Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau						***26.457.626.807,41***							***27.427.983.554,25***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		A Predikat	A Predikat	26.457.626.807,41						A Predikat	27.427.983.554,25	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	93.00 Indeks		91.00 Indeks	91.50 Indeks	26.457.626.807,41						92.00 Indeks	27.427.983.554,25	
			3.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	80.98 Indeks		78.98 Indeks	79.48 Indeks	26.457.626.807,41						79.98 Indeks	27.427.983.554,25	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.545.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		350.000.000,00	
		-						1.545.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		350.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.400.000.000,00						1 Berita Acara	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	70.000.000,00						6 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00						5 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						70.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	75.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						1.400.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	75.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22.112.626.807,41					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		25.300.185.256,04	
		-						22.112.626.807,41					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		25.300.185.256,04	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	487.244.000,00						1 Dokumen	613.320.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/ Bulan		126 Orang/ Bulan	128 Orang/ Bulan	21.580.382.807,41						130 Orang/ Bulan	24.611.865.256,04	
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						21.580.382.807,41							24.611.865.256,04	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/ Bulan		126 Orang/ Bulan	128 Orang/ Bulan	21.580.382.807,41	Provinsi Kepulauan Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		130 Orang/ Bulan	24.611.865.256,04	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						487.244.000,00							613.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	487.244.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	613.320.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	25.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	25.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						80.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	
		-						80.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		12 Orang	10 Orang	80.000.000,00						10 Orang	100.000.000,00	
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Paket	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		12 Orang	8 Orang	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Orang	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Orang	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.373.701.432,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		1.621.922.186,21	
		-						1.373.701.432,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		1.621.922.186,21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	822.552.112,00						1 Laporan	901.922.186,21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	36.149.320,00						1 Paket	100.000.000,00	
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	70.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						36.149.320,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	36.149.320,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						200.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						822.552.112,00							901.922.186,21	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	822.552.112,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	901.922.186,21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						300.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	
		-						300.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	150.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		11 Unit	10 Unit	150.000.000,00						8 Unit	100.000.000,00	
	5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						150.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		11 Unit	10 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						728.626.804,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		580.876.112,00	
		-						728.626.804,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		580.876.112,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	91.632.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	257.994.804,00						1 Laporan	218.876.112,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	364.000.000,00						1 Laporan	242.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	20.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						91.632.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	91.632.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						364.000.000,00							242.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	364.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	242.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						257.994.804,00							218.876.112,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	257.994.804,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	218.876.112,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						827.671.764,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		650.000.000,00	
		-						827.671.764,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		650.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		34 Unit	34 Unit	450.000.000,00						37 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	108.820.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		39 Unit	40 Unit	100.000.000,00						30 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	168.851.764,00						1 Unit	50.000.000,00	
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						108.820.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	108.820.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						450.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		34 Unit	34 Unit	450.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		37 Unit	350.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		39 Unit	40 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Unit	150.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						168.851.764,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	168.851.764,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	50.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
271.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.510.000.000,00**							**2.325.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah						***1.510.000.000,00***							***1.550.000.000,00***	
			3.Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	100 %		80 %	80 %	1.510.000.000,00						90 %	1.550.000.000,00	
			4.Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD	81.63 %		73.47 %	75.51 %	1.510.000.000,00						77.55 %	1.550.000.000,00	
			5.Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Menejemen Risiko	4.76 %		14.29 %	11.9 %	1.510.000.000,00						9.52 %	1.550.000.000,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						1.140.000.000,00					Perangkat Daerah		1.350.000.000,00	
		-						1.140.000.000,00					Perangkat Daerah		1.350.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	55.000.000,00						1 Berita Acara	175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	35.000.000,00						1 Berita Acara	175.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	300.000.000,00						1 Berita Acara	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00						2 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						500.000.000,00							0,00	
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						35.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	175.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						55.000.000,00							175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	55.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	175.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi						300.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	500.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi						250.000.000,00							500.000.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						20.000.000,00					Perangkat Daerah		175.000.000,00	
		-						20.000.000,00					Perangkat Daerah		175.000.000,00	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	30 Buku		200 Buku	50 Buku	0,00						25 Buku	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi						0,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	30 Buku		200 Buku	0 Buku	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Buku	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						350.000.000,00					Perangkat Daerah		800.000.000,00	
		-						350.000.000,00					Perangkat Daerah		800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	28 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	150.000.000,00						14 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00						9 Laporan	450.000.000,00	
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi						200.000.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan		10 Laporan	7 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Laporan	450.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						0,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	28 Dokumen		14 Dokumen	16 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Dokumen	250.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
272.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.260.000.000,00**							**4.356.066.663,00**	
		Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						***960.000.000,00***							***2.990.477.727,00***	
			10.Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	49.83 Nilai		47.83 Nilai	48.33 Nilai	960.000.000,00						48.83 Nilai	2.990.477.727,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			11.Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	22.03 %		18.64 %	20.34 %	960.000.000,00						20.34 %	2.990.477.727,00	
			12.Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	40 %		20 %	30 %	960.000.000,00						30 %	2.990.477.727,00	
			15.Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %		100 %	100 %	960.000.000,00						100 %	2.990.477.727,00	
			16.Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	48 Nilai		46 Nilai	46.5 Nilai	960.000.000,00						47 Nilai	2.990.477.727,00	
			17.Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	63 %		52 %	52 %	960.000.000,00						63 %	2.990.477.727,00	
			18.Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	100 %		100 %	100 %	960.000.000,00						100 %	2.990.477.727,00	
			3.Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		80.95 %	85.71 %	960.000.000,00						90.48 %	2.990.477.727,00	
			4.Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	48.94 Nilai		46.94 Nilai	47.44 Nilai	960.000.000,00						47.94 Nilai	2.990.477.727,00	
			5.Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		77.11 %	81.93 %	960.000.000,00						86.75 %	2.990.477.727,00	
			6.Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	100 %		58.82 %	70.59 %	960.000.000,00						82.35 %	2.990.477.727,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			9.Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %		100 %	100 %	960.000.000,00						100 %	2.990.477.727,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						420.000.000,00					Perangkat Daerah		1.411.323.780,00	
		-						420.000.000,00					Perangkat Daerah		1.411.323.780,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	172.901.156,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	172.901.156,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	260.392.036,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	194.773.876,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	270.000.000,00						5 Laporan	610.355.556,00	
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						100.000.000,00							172.901.156,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	172.901.156,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						50.000.000,00							194.773.876,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	194.773.876,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						0,00							172.901.156,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	172.901.156,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						0,00							260.392.036,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	260.392.036,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						270.000.000,00							610.355.556,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	270.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Laporan	610.355.556,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						420.000.000,00					Perangkat Daerah		1.375.138.190,00	
		-						420.000.000,00					Perangkat Daerah		1.375.138.190,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00						1 Dokumen	320.987.966,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	263.537.556,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	263.537.556,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00						1 Laporan	263.537.556,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	263.537.556,00	
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						160.000.000,00							320.987.966,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	320.987.966,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						0,00							263.537.556,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	263.537.556,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						260.000.000,00							263.537.556,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	263.537.556,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						0,00							263.537.556,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	263.537.556,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						0,00							263.537.556,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	263.537.556,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						420.000.000,00					Perangkat Daerah		1.569.604.693,00	
		-						420.000.000,00					Perangkat Daerah		1.569.604.693,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	402.075.112,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	302.075.112,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	363.379.357,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00						1 Laporan	402.075.112,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						100.000.000,00							402.075.112,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	402.075.112,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						100.000.000,00							302.075.112,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	302.075.112,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						100.000.000,00							363.379.357,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	363.379.357,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						120.000.000,00							402.075.112,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	402.075.112,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						0,00							100.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**330.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	
273.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**240.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah						***195.000.000,00***							***400.000.000,00***	
			2.Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	100 %		80 %	85 %	195.000.000,00						90 %	400.000.000,00	
			3.Persentase Inovasi yang dilaporkan	85 %		75 %	60 %	195.000.000,00						80 %	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			4.Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan	20 Karya		20 Karya	20 Karya	195.000.000,00						20 Karya	400.000.000,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						135.000.000,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal		650.000.000,00	
		-						135.000.000,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal		650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi						45.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi						40.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						60.000.000,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal		150.000.000,00	
		-						60.000.000,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						60.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						0,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal		150.000.000,00	
		-						0,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						45.000.000,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal		250.000.000,00	
		-						45.000.000,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						45.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
274.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**90.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti dalam Perencanaan Pembangunan						***90.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			2.Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan	100 %		100 %	100 %	90.000.000,00						100 %	100.000.000,00	
	5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						90.000.000,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal		100.000.000,00	
		-						90.000.000,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal		100.000.000,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah		1 Naskah	1 Naskah	90.000.000,00						1 Naskah	100.000.000,00	
	5.05.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						90.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah		1 Naskah	1 Naskah	90.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Naskah	100.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Badan Keuangan dan Aset Daerah						**600.489.378.386,58**							**617.244.704.704,44**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**600.489.378.386,58**							**617.244.704.704,44**	
	5.02	**KEUANGAN**						**600.489.378.386,58**							**617.244.704.704,44**	
275.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**38.855.087.734,58**							**43.571.784.403,44**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan						***37.557.487.734,58***							***40.691.784.403,44***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	37.557.487.734,58						BB Predikat	40.691.784.403,44	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	84.68 Indeks		83.31 Indeks	83.51 Indeks	37.557.487.734,58						83.81 Indeks	40.691.784.403,44	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	90.05 Indeks		89.25 Indeks	89.50 Indeks	37.557.487.734,58						89.75 Indeks	40.691.784.403,44	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						235.000.000,00					-		410.000.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						235.000.000,00					-		410.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00						1 Dokumen	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						55.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	80.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						40.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	100.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						35.247.487.734,58					-		36.711.784.403,44	
		Terpenuhinya kebutuhan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						35.247.487.734,58					-		36.711.784.403,44	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.611.237.457,58						4 Dokumen	9.194.237.457,44	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/ Bulan		218 Orang/ Bulan	218 Orang/ Bulan	26.586.250.277,00						218 Orang/ Bulan	27.377.546.946,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						26.586.250.277,00							27.377.546.946,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/ Bulan		218 Orang/ Bulan	218 Orang/ Bulan	26.586.250.277,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		218 Orang/ Bulan	27.377.546.946,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						8.611.237.457,58							9.194.237.457,44	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.611.237.457,58	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	9.194.237.457,44	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	60.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						50.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	80.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		400.000.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		0 Orang	100 Orang	0,00						0 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	218 Paket		218 Paket	218 Paket	0,00						218 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		11 Orang	16 Orang	40.000.000,00						11 Orang	150.000.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	218 Paket		218 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		218 Paket	250.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		11 Orang	3 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Orang	150.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Orang	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.433.000.000,00					-		2.295.000.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.433.000.000,00					-		2.295.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00						4 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00						4 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	665.000.000,00						4 Laporan	960.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	85.000.000,00						2 Paket	230.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	58.000.000,00						4 Paket	230.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	105.000.000,00						4 Paket	240.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						30.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	60.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	80.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	180.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						50.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						45.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	80.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						600.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	800.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	400.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00					-		1.300.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00					-		1.300.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						0 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						2 Unit	450.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	450.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		18 Unit	20 Unit	125.000.000,00						20 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	50.000.000,00	
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	450.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	450.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						125.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		18 Unit	5 Unit	125.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	350.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						899.600.000,00					-		1.070.000.000,00	
		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						899.600.000,00					-		1.070.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	560.000.000,00						4 Laporan	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	214.600.000,00						4 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00						4 Laporan	210.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						125.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	210.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						130.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	130.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	150.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						850.000.000,00					-		1.335.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						850.000.000,00					-		1.335.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	105.000.000,00						1 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	560.000.000,00						37 Unit	720.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	85.000.000,00						2 Unit	85.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit		112 Unit	112 Unit	100.000.000,00						112 Unit	130.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						85.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	85.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						560.000.000,00							720.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	36 Unit	560.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	720.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit		112 Unit	60 Unit	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		112 Unit	80.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						80.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
276.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**561.231.290.652,00**							**572.832.920.301,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah						***559.631.290.652,00***							***569.422.920.301,00***	
			1.Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	100 %		100 %	100 %	559.631.290.652,00						100 %	569.422.920.301,00	
			2.Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu	100 %		100 %	100 %	559.631.290.652,00						100 %	569.422.920.301,00	
			2.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	92.94 %		91.96 %	92.22 %	559.631.290.652,00						92.47 %	569.422.920.301,00	
			4.Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	559.631.290.652,00						100 %	569.422.920.301,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.085.000.000,00					-		2.640.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran Daerah						1.085.000.000,00					-		2.640.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000,00						4 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00						4 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00						2 Dokumen	230.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	75.000.000,00						40 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	50.000.000,00						43 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	50.000.000,00						43 Dokumen	130.000.000,00	
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUAdan Perubahan PPAS						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD						50.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		43 Dokumen	130.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						50.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		43 Dokumen	80.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						80.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	250.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	250.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						75.000.000,00							230.000.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	230.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	300.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						350.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	750.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	100.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi						75.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						415.000.000,00					-		1.270.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						415.000.000,00					-		1.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00						7 Dokumen	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00						7 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00						7 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00						7 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00						1 Laporan	220.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang		40 Orang	40 Orang	0,00						40 Orang	200.000.000,00	
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	150.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah						65.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	220.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang		40 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	100.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						991.500.000,00					-		1.470.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah						991.500.000,00					-		1.470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	575.000.000,00						4 Dokumen	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	65.000.000,00						4 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00						4 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	41.500.000,00						Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	80.000.000,00						100 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						575.000.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	575.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	650.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	100.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						65.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						70.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	150.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						41.500.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	41.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	100.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						60.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						80.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	80 Orang	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	150.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						845.000.000,00					-		1.630.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						845.000.000,00					-		1.630.000.000,00	
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	21 Lembaga		21 Lembaga	21 Lembaga	50.000.000,00						21 Lembaga	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	105.000.000,00						4 Dokumen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00						4 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	95 Orang		95 Orang	95 Orang	40.000.000,00						95 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	80.000.000,00	
	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						80.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	180.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						80.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	150.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUDdan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						300.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	500.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	300.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						40.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	70.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						50.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	80.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	95 Orang		95 Orang	50 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		95 Orang	100.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	21 Lembaga		21 Lembaga	21 Lembaga	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Lembaga	150.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						557.734.790.652,00					-		565.352.920.301,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						557.734.790.652,00					-		565.352.920.301,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.111.913.136,00						1 Laporan	13.361.958.029,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.365.000.000,00						1 Laporan	21.365.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	509.994.877.516,00						4 Laporan	515.445.962.272,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.173.000.000,00						4 Laporan	15.000.000.000,00	
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						17.111.913.136,00							13.361.958.029,00	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.111.913.136,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	13.361.958.029,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						21.365.000.000,00							21.365.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.365.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	21.365.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						9.173.000.000,00							15.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	9.173.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	15.000.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi						509.994.877.516,00							515.445.962.272,00	
		Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	509.994.877.516,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	515.445.962.272,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						160.000.000,00					-		470.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						160.000.000,00					-		470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	129 Orang		129 Orang	129 Orang	80.000.000,00						129 Orang	270.000.000,00	
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						80.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi						80.000.000,00							270.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	129 Orang		129 Orang	86 Orang	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		129 Orang	270.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
277.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**1.295.600.000,00**							**2.340.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola aset daerah						***1.145.600.000,00***							***1.990.000.000,00***	
			1.Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3 %		3 %	3 %	1.145.600.000,00						3 %	1.990.000.000,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.295.600.000,00					-		2.340.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Pengelolaan BMD						1.295.600.000,00					-		2.340.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00						1 Laporan	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	320.000.000,00						4 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.600.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga						250.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	350.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						75.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	200.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						320.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	320.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	500.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						200.600.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.600.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	300.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						30.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	80.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						120.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	160.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		UPT Dana Bergulir						**155.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**155.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**155.000.000,00**							**310.000.000,00**	
278.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**38.855.087.734,58**							**43.571.784.403,44**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan						***40.000.000,00***							***80.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	40.000.000,00						BB Predikat	80.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	84.68 Indeks		83.31 Indeks	83.51 Indeks	40.000.000,00						83.81 Indeks	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	90.05 Indeks		89.25 Indeks	89.50 Indeks	40.000.000,00						89.75 Indeks	80.000.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.433.000.000,00					-		2.295.000.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.433.000.000,00					-		2.295.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	665.000.000,00						4 Laporan	960.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						40.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	80.000.000,00	UPT Dana Bergulir
279.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**561.231.290.652,00**							**572.832.920.301,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah						***115.000.000,00***							***230.000.000,00***	
			1.Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	100 %		100 %	100 %	115.000.000,00						100 %	230.000.000,00	
			2.Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu	100 %		100 %	100 %	115.000.000,00						100 %	230.000.000,00	
			2.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	92.94 %		91.96 %	92.22 %	115.000.000,00						92.47 %	230.000.000,00	
			4.Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	115.000.000,00						100 %	230.000.000,00	
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						845.000.000,00					-		1.630.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						845.000.000,00					-		1.630.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	105.000.000,00						4 Dokumen	200.000.000,00	
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	50.000.000,00	UPT Dana Bergulir
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						557.734.790.652,00					-		565.352.920.301,00	
		Tersedianya Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						557.734.790.652,00					-		565.352.920.301,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-		-	-	90.000.000,00						-	180.000.000,00	
	5.02.02.1.05.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah						90.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-		-	2 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	180.000.000,00	UPT Dana Bergulir
		UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset						**737.600.000,00**							**1.190.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**737.600.000,00**							**1.190.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**737.600.000,00**							**1.190.000.000,00**	
280.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**38.855.087.734,58**							**43.571.784.403,44**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan						***662.600.000,00***							***930.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	662.600.000,00						BB Predikat	930.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	84.68 Indeks		83.31 Indeks	83.51 Indeks	662.600.000,00						83.81 Indeks	930.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	90.05 Indeks		89.25 Indeks	89.50 Indeks	662.600.000,00						89.75 Indeks	930.000.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.433.000.000,00					-		2.295.000.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.433.000.000,00					-		2.295.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	665.000.000,00						4 Laporan	960.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	85.000.000,00						2 Paket	230.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	58.000.000,00						4 Paket	230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	105.000.000,00						4 Paket	240.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	60.000.000,00	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	65.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	160.000.000,00	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	50.000.000,00	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	8.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	30.000.000,00	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						25.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	80.000.000,00	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						899.600.000,00					-		1.070.000.000,00	
		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						899.600.000,00					-		1.070.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	560.000.000,00						4 Laporan	650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	214.600.000,00						4 Laporan	210.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						460.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	460.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	450.000.000,00	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						84.600.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	84.600.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	60.000.000,00	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
		Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						850.000.000,00					-		1.335.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	105.000.000,00						1 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit		112 Unit	112 Unit	100.000.000,00						112 Unit	130.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit		112 Unit	25 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		112 Unit	50.000.000,00	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
			-	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0,00					-		50.000.000,00	
		-						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan KebijakanRetribusi Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						850.000.000,00					-		1.335.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						850.000.000,00					-		1.335.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
		Badan Pendapatan Daerah						**92.147.072.129,06**							**91.945.027.924,65**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**92.147.072.129,06**							**91.945.027.924,65**	
	5.02	**KEUANGAN**						**92.147.072.129,06**							**91.945.027.924,65**	
281.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.217.314.129,06**							**93.661.062.724,65**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan						***88.114.072.129,06***							***83.717.027.924,65***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	88.114.072.129,06						BB Predikat	83.717.027.924,65	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	88.114.072.129,06						87 Indeks	83.717.027.924,65	
			3.Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	17.16 %		12.83 %	13.10 %	88.114.072.129,06						13.29 %	83.717.027.924,65	
			4.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.55 Indeks		76.15 Indeks	77.23 Indeks	88.114.072.129,06						78.80 Indeks	83.717.027.924,65	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						280.000.000,00					-		504.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja						280.000.000,00					-		504.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	28.000.000,00						11 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	28.000.000,00						11 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	30.000.000,00						11 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	35.000.000,00						11 Dokumen	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00						4 Laporan	170.000.000,00	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						35.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Dokumen	85.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Dokumen	40.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						28.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	28.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Dokumen	75.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						28.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	28.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Dokumen	4.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	170.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.977.948.644,06					-		76.033.027.924,65	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.977.948.644,06					-		76.033.027.924,65	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00						1 Dokumen	1.621.530.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189 Orang/ Bulan		189 Orang/ Bulan	189 Orang/ Bulan	73.462.948.644,06						189 Orang/ Bulan	74.381.497.924,65	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						73.462.948.644,06							74.381.497.924,65	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189 Orang/ Bulan		189 Orang/ Bulan	189 Orang/ Bulan	73.462.948.644,06	Provinsi Kepulauan Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		189 Orang/ Bulan	74.381.497.924,65	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						1.500.000.000,00							1.621.530.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.621.530.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						15.000.000,00					-		30.000.000,00	
		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah						15.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		175.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	175.000.000,00	
	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						100.000.000,00							175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	175.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10.000.000,00						10 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	270.000.000,00						139 Paket	280.955.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	100.000.000,00						10 Orang	100.000.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						220.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	220.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139 Paket	75.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	83.900.000,00						1 Dokumen	72.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	289.200.000,00						1 Laporan	137.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.246.000.000,00						1 Laporan	1.623.886.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.275.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.975.000.000,00						1 Paket	1.937.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	135.800.000,00						1 Paket	110.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.137.000.000,00						1 Paket	460.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	375.000.000,00						1 Paket	317.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						81.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	4 Paket	81.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	40.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	75 Paket	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						250.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	15 Paket	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	120.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						550.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	550.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.650.000.000,00							1.400.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.650.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	1.400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						55.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	4 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						250.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	70.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						750.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	4 Laporan	750.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						10.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						3.261.000.000,00					-		1.700.000.000,00	
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.261.000.000,00					-		1.700.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit		11 Unit	11 Unit	1.231.000.000,00						11 Unit	1.300.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	30.000.000,00						2 Unit	300.000.000,00	
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						2.000.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.231.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit		11 Unit	11 Unit	1.231.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Unit	1.300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.152.000.000,00						1 Laporan	3.013.016.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	337.500.000,00						1 Laporan	221.501.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00						1 Laporan	64.411.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.750.000.000,00							1.700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.750.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.700.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						182.500.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	182.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	2.627.442.000,00						21 Unit	2.334.701.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	435.000.000,00						30 Unit	406.911.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	1.999.623.485,00						3 Unit	2.567.953.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.250.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	1.250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						250.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.734.623.485,00							1.700.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	1.734.623.485,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	1.700.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
282.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.721.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***3.000.000.000,00***							***5.168.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	3.000.000.000,00						100 Persentase	5.168.000.000,00	
			2.Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2.32 %		-3.41 %	1.44 %	3.000.000.000,00						2.02 %	5.168.000.000,00	
			4.Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	100 %		35 %	50 %	3.000.000.000,00						70 %	5.168.000.000,00	
			4.Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30 %		27 %	28 %	3.000.000.000,00						28 %	5.168.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan		2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	60.000.000,00						2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	130.000.000,00						2 Dokumen Ketetapan	544.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	230.000.000,00						2 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	700.000.000,00						4 Dokumen SSPD	3.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00						2 Dokumen	285.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00						2 Laporan	281.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	1.145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	456.000.000,00						2 Laporan	3.020.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.200.000.000,00						2 Laporan	1.650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00						2 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00						2 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00						2 Laporan	295.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	850.000.000,00						3 Sarana dan Prasarana	2.510.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						230.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	230.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						600.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	600.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana dan Prasarana	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						10.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						1.200.000.000,00							1.650.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	1.650.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						10.000.000,00							127.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Ketetapan	127.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						60.000.000,00							295.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	295.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						60.000.000,00							285.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	285.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						100.000.000,00							510.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen SSPD	510.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						60.000.000,00							270.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan		2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	270.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						60.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						60.000.000,00							281.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	281.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		UPT PPD Batam Centre						**1.349.000.000,00**							**3.377.500.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.349.000.000,00**							**3.377.500.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.349.000.000,00**							**3.377.500.000,00**	
283.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.217.314.129,06**							**93.661.062.724,65**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan						***972.000.000,00***							***1.462.500.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	972.000.000,00						BB Predikat	1.462.500.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	972.000.000,00						87 Indeks	1.462.500.000,00	
			3.Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	17.16 %		12.83 %	13.10 %	972.000.000,00						13.29 %	1.462.500.000,00	
			4.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.55 Indeks		76.15 Indeks	77.23 Indeks	972.000.000,00						78.80 Indeks	1.462.500.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	270.000.000,00						139 Paket	280.955.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139 Paket	35.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	83.900.000,00						1 Dokumen	72.700.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	289.200.000,00						1 Laporan	137.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.246.000.000,00						1 Laporan	1.623.886.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.275.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.975.000.000,00						1 Paket	1.937.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	135.800.000,00						1 Paket	110.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.137.000.000,00						1 Paket	460.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	375.000.000,00						1 Paket	317.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	13.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	55.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						200.000.000,00							310.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	310.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						80.000.000,00							242.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	242.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.500.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	UPT PPD Batam Centre

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						48.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	60.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.152.000.000,00						1 Laporan	3.013.016.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	337.500.000,00						1 Laporan	221.501.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00						1 Laporan	64.411.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						135.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	2.627.442.000,00						21 Unit	2.334.701.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	435.000.000,00						30 Unit	406.911.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						395.000.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	13 Unit	395.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Unit	550.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	50 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	30.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
284.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.721.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***287.000.000,00***							***1.865.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	287.000.000,00						100 Persentase	1.865.000.000,00	
			2.Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2.32 %		-3.41 %	1.44 %	287.000.000,00						2.02 %	1.865.000.000,00	
			4.Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	100 %		35 %	50 %	287.000.000,00						70 %	1.865.000.000,00	
			4.Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30 %		27 %	28 %	287.000.000,00						28 %	1.865.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	130.000.000,00						2 Dokumen Ketetapan	544.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	700.000.000,00						4 Dokumen SSPD	3.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	1.145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	456.000.000,00						2 Laporan	3.020.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	850.000.000,00						3 Sarana dan Prasarana	2.510.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						40.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	12 Sarana dan Prasarana	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana dan Prasarana	350.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						15.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						15.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Ketetapan	60.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						168.000.000,00							685.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	168.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen SSPD	685.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						64.000.000,00							670.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	64.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	670.000.000,00	UPT PPD Batam Centre
		UPT PPD Tanjungpinang						**1.197.000.000,00**							**2.620.300.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.197.000.000,00**							**2.620.300.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.197.000.000,00**							**2.620.300.000,00**	
285.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.217.314.129,06**							**93.661.062.724,65**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan						***876.000.000,00***							***935.300.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	876.000.000,00						BB Predikat	935.300.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	876.000.000,00						87 Indeks	935.300.000,00	
			3.Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	17.16 %		12.83 %	13.10 %	876.000.000,00						13.29 %	935.300.000,00	
			4.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.55 Indeks		76.15 Indeks	77.23 Indeks	876.000.000,00						78.80 Indeks	935.300.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	270.000.000,00						139 Paket	280.955.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							25.600.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139 Paket	25.600.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	83.900.000,00						1 Dokumen	72.700.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	289.200.000,00						1 Laporan	137.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.246.000.000,00						1 Laporan	1.623.886.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.275.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.975.000.000,00						1 Paket	1.937.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	135.800.000,00						1 Paket	110.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.137.000.000,00						1 Paket	460.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	375.000.000,00						1 Paket	317.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	12.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						70.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	60.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	6.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000,00							4.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.200.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						24.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.152.000.000,00						1 Laporan	3.013.016.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	337.500.000,00						1 Laporan	221.501.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00						1 Laporan	64.411.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.500.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						270.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	2.627.442.000,00						21 Unit	2.334.701.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	435.000.000,00						30 Unit	406.911.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	1.999.623.485,00						3 Unit	2.567.953.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300.000.000,00							190.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	12 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Unit	190.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							48.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	6 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	48.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	150.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
286.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.721.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***281.000.000,00***							***1.585.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	281.000.000,00						100 Persentase	1.585.000.000,00	
			2.Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2.32 %		-3.41 %	1.44 %	281.000.000,00						2.02 %	1.585.000.000,00	
			4.Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	100 %		35 %	50 %	281.000.000,00						70 %	1.585.000.000,00	
			4.Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30 %		27 %	28 %	281.000.000,00						28 %	1.585.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	130.000.000,00						2 Dokumen Ketetapan	544.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	700.000.000,00						4 Dokumen SSPD	3.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	1.145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	456.000.000,00						2 Laporan	3.020.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	850.000.000,00						3 Sarana dan Prasarana	2.510.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						40.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	4 Sarana dan Prasarana	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana dan Prasarana	300.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						10.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						15.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Ketetapan	60.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						160.000.000,00							645.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	160.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen SSPD	645.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						56.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	56.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	500.000.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
		UPT PPD Bintan						**816.000.000,00**							**1.990.350.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**816.000.000,00**							**1.990.350.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**816.000.000,00**							**1.990.350.000,00**	
287.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.217.314.129,06**							**93.661.062.724,65**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan						***615.000.000,00***							***1.000.350.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	615.000.000,00						BB Predikat	1.000.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	615.000.000,00						87 Indeks	1.000.350.000,00	
			3.Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	17.16 %		12.83 %	13.10 %	615.000.000,00						13.29 %	1.000.350.000,00	
			4.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.55 Indeks		76.15 Indeks	77.23 Indeks	615.000.000,00						78.80 Indeks	1.000.350.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	270.000.000,00						139 Paket	280.955.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							64.350.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139 Paket	64.350.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	83.900.000,00						1 Dokumen	72.700.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	289.200.000,00						1 Laporan	137.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.246.000.000,00						1 Laporan	1.623.886.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.275.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.975.000.000,00						1 Paket	1.937.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	135.800.000,00						1 Paket	110.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.137.000.000,00						1 Paket	460.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	375.000.000,00						1 Paket	317.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.500.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	40.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						85.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	85.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	90.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						70.000.000,00							62.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	62.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						24.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	115.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.152.000.000,00						1 Laporan	3.013.016.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	337.500.000,00						1 Laporan	221.501.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00						1 Laporan	64.411.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.500.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						152.000.000,00							165.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	152.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	165.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	2.627.442.000,00						21 Unit	2.334.701.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	435.000.000,00						30 Unit	406.911.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	1.999.623.485,00						3 Unit	2.567.953.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						180.000.000,00							217.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	10 Unit	180.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Unit	217.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							43.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	11 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	43.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000.000,00							180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	180.000.000,00	UPT PPD Bintan
288.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.721.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***121.000.000,00***							***980.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	121.000.000,00						100 Persentase	980.000.000,00	
			2.Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2.32 %		-3.41 %	1.44 %	121.000.000,00						2.02 %	980.000.000,00	
			4.Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	100 %		35 %	50 %	121.000.000,00						70 %	980.000.000,00	
			4.Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30 %		27 %	28 %	121.000.000,00						28 %	980.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	130.000.000,00						2 Dokumen Ketetapan	544.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	700.000.000,00						4 Dokumen SSPD	3.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	1.145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	456.000.000,00						2 Laporan	3.020.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	850.000.000,00						3 Sarana dan Prasarana	2.510.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						40.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	2 Sarana dan Prasarana	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana dan Prasarana	200.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						10.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						15.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Ketetapan	50.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						40.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen SSPD	300.000.000,00	UPT PPD Bintan
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						56.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	56.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	350.000.000,00	UPT PPD Bintan
		UPT PPD Karimun						**685.300.000,00**							**1.797.886.800,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**685.300.000,00**							**1.797.886.800,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**685.300.000,00**							**1.797.886.800,00**	
289.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.217.314.129,06**							**93.661.062.724,65**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan						***516.300.000,00***							***849.886.800,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	516.300.000,00						BB Predikat	849.886.800,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	516.300.000,00						87 Indeks	849.886.800,00	
			3.Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	17.16 %		12.83 %	13.10 %	516.300.000,00						13.29 %	849.886.800,00	
			4.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.55 Indeks		76.15 Indeks	77.23 Indeks	516.300.000,00						78.80 Indeks	849.886.800,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	270.000.000,00						139 Paket	280.955.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139 Paket	25.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	83.900.000,00						1 Dokumen	72.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	289.200.000,00						1 Laporan	137.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.246.000.000,00						1 Laporan	1.623.886.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.275.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.975.000.000,00						1 Paket	1.937.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	135.800.000,00						1 Paket	110.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.137.000.000,00						1 Paket	460.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	375.000.000,00						1 Paket	317.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	9.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	38.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	23.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							17.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	17.500.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.700.000,00							4.750.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	3.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	4.750.000,00	UPT PPD Karimun

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						60.000.000,00							222.886.800,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	222.886.800,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.152.000.000,00						1 Laporan	3.013.016.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	337.500.000,00						1 Laporan	221.501.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00						1 Laporan	64.411.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.600.000,00							6.750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.600.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	6.750.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						340.000.000,00							282.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	340.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	282.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	2.627.442.000,00						21 Unit	2.334.701.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	435.000.000,00						30 Unit	406.911.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	1.999.623.485,00						3 Unit	2.567.953.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						45.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	7 Unit	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Unit	60.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	25 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	23.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00							102.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	102.000.000,00	UPT PPD Karimun
290.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.721.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***89.000.000,00***							***625.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	89.000.000,00						100 Persentase	625.000.000,00	
			2.Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2.32 %		-3.41 %	1.44 %	89.000.000,00						2.02 %	625.000.000,00	
			4.Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	100 %		35 %	50 %	89.000.000,00						70 %	625.000.000,00	
			4.Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30 %		27 %	28 %	89.000.000,00						28 %	625.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	130.000.000,00						2 Dokumen Ketetapan	544.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	700.000.000,00						4 Dokumen SSPD	3.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	1.145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	456.000.000,00						2 Laporan	3.020.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	850.000.000,00						3 Sarana dan Prasarana	2.510.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						15.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana dan Prasarana	200.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						10.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						15.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Ketetapan	45.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						24.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	24.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen SSPD	300.000.000,00	UPT PPD Karimun
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						40.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	300.000.000,00	UPT PPD Karimun
		UPT PPD Lingga						**373.342.000,00**							**1.140.553.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**373.342.000,00**							**1.140.553.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**373.342.000,00**							**1.140.553.000,00**	
291.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.217.314.129,06**							**93.661.062.724,65**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan						***276.342.000,00***							***390.553.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	276.342.000,00						BB Predikat	390.553.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	276.342.000,00						87 Indeks	390.553.000,00	
			3.Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	17.16 %		12.83 %	13.10 %	276.342.000,00						13.29 %	390.553.000,00	
			4.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.55 Indeks		76.15 Indeks	77.23 Indeks	276.342.000,00						78.80 Indeks	390.553.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	270.000.000,00						139 Paket	280.955.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139 Paket	7.000.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	83.900.000,00						1 Dokumen	72.700.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	289.200.000,00						1 Laporan	137.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.246.000.000,00						1 Laporan	1.623.886.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.275.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.975.000.000,00						1 Paket	1.937.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	135.800.000,00						1 Paket	110.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.137.000.000,00						1 Paket	460.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	375.000.000,00						1 Paket	317.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.500.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	4.000.000,00	UPT PPD Lingga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	9.500.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	40.000.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.700.000,00							1.750.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.750.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.700.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	2.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						60.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	105.000.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.152.000.000,00						1 Laporan	3.013.016.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	337.500.000,00						1 Laporan	221.501.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00						1 Laporan	64.411.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							2.481.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.481.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						65.000.000,00							70.256.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	70.256.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							4.501.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.501.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	2.627.442.000,00						21 Unit	2.334.701.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	435.000.000,00						30 Unit	406.911.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	1.999.623.485,00						3 Unit	2.567.953.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						61.442.000,00							51.201.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	6 Unit	61.442.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Unit	51.201.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							14.911.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	23 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	14.911.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							67.453.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	67.453.000,00	UPT PPD Lingga
292.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.721.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***77.000.000,00***							***740.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	77.000.000,00						100 Persentase	740.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2.32 %		-3.41 %	1.44 %	77.000.000,00						2.02 %	740.000.000,00	
			4.Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	100 %		35 %	50 %	77.000.000,00						70 %	740.000.000,00	
			4.Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30 %		27 %	28 %	77.000.000,00						28 %	740.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	130.000.000,00						2 Dokumen Ketetapan	544.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	700.000.000,00						4 Dokumen SSPD	3.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	1.145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	456.000.000,00						2 Laporan	3.020.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	850.000.000,00						3 Sarana dan Prasarana	2.510.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						15.000.000,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	2 Sarana dan Prasarana	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana dan Prasarana	170.000.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						10.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Ketetapan	40.000.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						24.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	24.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen SSPD	200.000.000,00	UPT PPD Lingga
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						28.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	28.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	250.000.000,00	UPT PPD Lingga
		UPT PPD Natuna						**455.900.000,00**							**1.416.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**455.900.000,00**							**1.416.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**455.900.000,00**							**1.416.000.000,00**	
293.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.217.314.129,06**							**93.661.062.724,65**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan						***240.900.000,00***							***666.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	240.900.000,00						BB Predikat	666.000.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	240.900.000,00						87 Indeks	666.000.000,00	
			3.Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	17.16 %		12.83 %	13.10 %	240.900.000,00						13.29 %	666.000.000,00	
			4.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.55 Indeks		76.15 Indeks	77.23 Indeks	240.900.000,00						78.80 Indeks	666.000.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	270.000.000,00						139 Paket	280.955.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139 Paket	7.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	83.900.000,00						1 Dokumen	72.700.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	289.200.000,00						1 Laporan	137.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.246.000.000,00						1 Laporan	1.623.886.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.275.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.975.000.000,00						1 Paket	1.937.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	135.800.000,00						1 Paket	110.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.137.000.000,00						1 Paket	460.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	375.000.000,00						1 Paket	317.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	3.500.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							57.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	57.500.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	45.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.700.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.700.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	2.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	6.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						80.000.000,00							278.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	278.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.152.000.000,00						1 Laporan	3.013.016.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	337.500.000,00						1 Laporan	221.501.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00						1 Laporan	64.411.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						73.000.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	95.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	2.627.442.000,00						21 Unit	2.334.701.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	435.000.000,00						30 Unit	406.911.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	1.999.623.485,00						3 Unit	2.567.953.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						80.000.000,00							78.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	5 Unit	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Unit	78.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	9 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	8.500.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							68.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	68.500.000,00	UPT PPD Natuna
294.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.721.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***100.000.000,00***							***740.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	100.000.000,00						100 Persentase	740.000.000,00	
			2.Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2.32 %		-3.41 %	1.44 %	100.000.000,00						2.02 %	740.000.000,00	
			4.Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	100 %		35 %	50 %	100.000.000,00						70 %	740.000.000,00	
			4.Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30 %		27 %	28 %	100.000.000,00						28 %	740.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	130.000.000,00						2 Dokumen Ketetapan	544.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	700.000.000,00						4 Dokumen SSPD	3.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	1.145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	456.000.000,00						2 Laporan	3.020.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	850.000.000,00						3 Sarana dan Prasarana	2.510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						30.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	2 Sarana dan Prasarana	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana dan Prasarana	150.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Ketetapan	40.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						32.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	2 Dokumen SSPD	32.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen SSPD	250.000.000,00	UPT PPD Natuna
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						28.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	28.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	200.000.000,00	UPT PPD Natuna
		UPT PPD Anambas						**400.400.000,00**							**1.086.700.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**400.400.000,00**							**1.086.700.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**400.400.000,00**							**1.086.700.000,00**	
295.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.217.314.129,06**							**93.661.062.724,65**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan						***224.400.000,00***							***349.700.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	224.400.000,00						BB Predikat	349.700.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	224.400.000,00						87 Indeks	349.700.000,00	
			3.Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	17.16 %		12.83 %	13.10 %	224.400.000,00						13.29 %	349.700.000,00	
			4.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.55 Indeks		76.15 Indeks	77.23 Indeks	224.400.000,00						78.80 Indeks	349.700.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	270.000.000,00						139 Paket	280.955.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	12 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139 Paket	7.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	83.900.000,00						1 Dokumen	72.700.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	289.200.000,00						1 Laporan	137.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.246.000.000,00						1 Laporan	1.623.886.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.275.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.975.000.000,00						1 Paket	1.937.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	135.800.000,00						1 Paket	110.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.137.000.000,00						1 Paket	460.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	375.000.000,00						1 Paket	317.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.500.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	15.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	27.000.000,00	UPT PPD Anambas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	48.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	28.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.700.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	3.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.700.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	2.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	3.500.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						80.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	115.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.152.000.000,00						1 Laporan	3.013.016.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	337.500.000,00						1 Laporan	221.501.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00						1 Laporan	64.411.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							1.700.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.700.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						65.000.000,00							62.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	62.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	2.627.442.000,00						21 Unit	2.334.701.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	435.000.000,00						30 Unit	406.911.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	1.999.623.485,00						3 Unit	2.567.953.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	4 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Unit	12.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	5 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	5.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	20.000.000,00	UPT PPD Anambas
296.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.721.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***123.000.000,00***							***732.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	123.000.000,00						100 Persentase	732.000.000,00	
			2.Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2.32 %		-3.41 %	1.44 %	123.000.000,00						2.02 %	732.000.000,00	
			4.Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	100 %		35 %	50 %	123.000.000,00						70 %	732.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			4.Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30 %		27 %	28 %	123.000.000,00						28 %	732.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	130.000.000,00						2 Dokumen Ketetapan	544.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	700.000.000,00						4 Dokumen SSPD	3.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	1.145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	456.000.000,00						2 Laporan	3.020.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	850.000.000,00						3 Sarana dan Prasarana	2.510.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						25.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana dan Prasarana	150.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						10.000.000,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Ketetapan	32.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						60.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen SSPD	250.000.000,00	UPT PPD Anambas
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						28.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	200.000.000,00	UPT PPD Anambas
		UPT PPD Batu Aji						**677.400.000,00**							**1.478.500.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**677.400.000,00**							**1.478.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02	**KEUANGAN**						**677.400.000,00**							**1.478.500.000,00**	
297.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.217.314.129,06**							**93.661.062.724,65**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan						***533.400.000,00***							***740.500.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	533.400.000,00						BB Predikat	740.500.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	533.400.000,00						87 Indeks	740.500.000,00	
			3.Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	17.16 %		12.83 %	13.10 %	533.400.000,00						13.29 %	740.500.000,00	
			4.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.55 Indeks		76.15 Indeks	77.23 Indeks	533.400.000,00						78.80 Indeks	740.500.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	270.000.000,00						139 Paket	280.955.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	29 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139 Paket	14.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	83.900.000,00						1 Dokumen	72.700.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	289.200.000,00						1 Laporan	137.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.246.000.000,00						1 Laporan	1.623.886.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.275.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.975.000.000,00						1 Paket	1.937.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	135.800.000,00						1 Paket	110.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.137.000.000,00						1 Paket	460.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	375.000.000,00						1 Paket	317.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.500.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	8.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.000.000,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	28.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	15.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	135.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	33.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.700.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	3.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.700.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	2.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						44.000.000,00							93.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	44.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	93.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.152.000.000,00						1 Laporan	3.013.016.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	337.500.000,00						1 Laporan	221.501.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00						1 Laporan	64.411.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	3.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						170.000.000,00							165.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	165.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							48.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	48.500.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	2.627.442.000,00						21 Unit	2.334.701.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	435.000.000,00						30 Unit	406.911.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	1.999.623.485,00						3 Unit	2.567.953.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						96.000.000,00							53.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	5 Unit	96.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Unit	53.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	9 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	15.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	140.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
298.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.721.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***109.000.000,00***							***720.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	109.000.000,00						100 Persentase	720.000.000,00	
			2.Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2.32 %		-3.41 %	1.44 %	109.000.000,00						2.02 %	720.000.000,00	
			4.Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	100 %		35 %	50 %	109.000.000,00						70 %	720.000.000,00	
			4.Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30 %		27 %	28 %	109.000.000,00						28 %	720.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	130.000.000,00						2 Dokumen Ketetapan	544.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	700.000.000,00						4 Dokumen SSPD	3.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	1.145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	456.000.000,00						2 Laporan	3.020.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	850.000.000,00						3 Sarana dan Prasarana	2.510.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						15.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana dan Prasarana	180.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						10.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	120.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Ketetapan	40.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						44.000.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	44.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen SSPD	280.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	100.000.000,00	UPT PPD Batu Aji
		UPT PPD Kijang						**391.200.000,00**							**951.680.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**391.200.000,00**							**951.680.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**391.200.000,00**							**951.680.000,00**	
299.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.217.314.129,06**							**93.661.062.724,65**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan						***274.200.000,00***							***436.680.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	274.200.000,00						BB Predikat	436.680.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	274.200.000,00						87 Indeks	436.680.000,00	
			3.Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	17.16 %		12.83 %	13.10 %	274.200.000,00						13.29 %	436.680.000,00	
			4.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.55 Indeks		76.15 Indeks	77.23 Indeks	274.200.000,00						78.80 Indeks	436.680.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	270.000.000,00						139 Paket	280.955.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139 Paket	10.500.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	83.900.000,00						1 Dokumen	72.700.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	289.200.000,00						1 Laporan	137.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.246.000.000,00						1 Laporan	1.623.886.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.275.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.975.000.000,00						1 Paket	1.937.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	135.800.000,00						1 Paket	110.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.137.000.000,00						1 Paket	460.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	375.000.000,00						1 Paket	317.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.300.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.300.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							62.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	62.000.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	15.000.000,00	UPT PPD Kijang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.700.000,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	4.200.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.700.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	2.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	3.500.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						24.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.152.000.000,00						1 Laporan	3.013.016.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	337.500.000,00						1 Laporan	221.501.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00						1 Laporan	64.411.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							2.480.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.480.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	90.000.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	12.500.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	2.627.442.000,00						21 Unit	2.334.701.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	435.000.000,00						30 Unit	406.911.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	1.999.623.485,00						3 Unit	2.567.953.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						85.000.000,00							78.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	6 Unit	85.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Unit	78.500.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	5 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	8.000.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	70.000.000,00	UPT PPD Kijang
300.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.721.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***77.000.000,00***							***510.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	77.000.000,00						100 Persentase	510.000.000,00	
			2.Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2.32 %		-3.41 %	1.44 %	77.000.000,00						2.02 %	510.000.000,00	
			4.Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	100 %		35 %	50 %	77.000.000,00						70 %	510.000.000,00	
			4.Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30 %		27 %	28 %	77.000.000,00						28 %	510.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	130.000.000,00						2 Dokumen Ketetapan	544.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	700.000.000,00						4 Dokumen SSPD	3.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	1.145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	456.000.000,00						2 Laporan	3.020.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	850.000.000,00						3 Sarana dan Prasarana	2.510.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						15.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana dan Prasarana	110.000.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						10.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Ketetapan	20.000.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						24.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	24.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen SSPD	200.000.000,00	UPT PPD Kijang
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						28.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	100.000.000,00	UPT PPD Kijang
		UPT PPD Tanjung Batu						**445.700.000,00**							**856.565.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**445.700.000,00**							**856.565.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**445.700.000,00**							**856.565.000,00**	
301.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.217.314.129,06**							**93.661.062.724,65**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan						***296.700.000,00***							***371.565.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	296.700.000,00						BB Predikat	371.565.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks		85 Indeks	86 Indeks	296.700.000,00						87 Indeks	371.565.000,00	
			3.Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	17.16 %		12.83 %	13.10 %	296.700.000,00						13.29 %	371.565.000,00	
			4.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	80.55 Indeks		76.15 Indeks	77.23 Indeks	296.700.000,00						78.80 Indeks	371.565.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.000.000,00					-		480.955.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	139 Paket	270.000.000,00						139 Paket	280.955.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						5.000.000,00							10.505.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket		139 Paket	32 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139 Paket	10.505.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.501.900.000,00					-		6.029.586.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	83.900.000,00						1 Dokumen	72.700.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	289.200.000,00						1 Laporan	137.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.246.000.000,00						1 Laporan	1.623.886.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00						1 Paket	1.275.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.975.000.000,00						1 Paket	1.937.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	135.800.000,00						1 Paket	110.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	1.137.000.000,00						1 Paket	460.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	375.000.000,00						1 Paket	317.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							6.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	6.300.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	15.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.500.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	33.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		11 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.700.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.500.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.700.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	2.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.500.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						52.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	85.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.639.400.000,00					-		3.398.928.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.152.000.000,00						1 Laporan	3.013.016.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	337.500.000,00						1 Laporan	221.501.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00						1 Laporan	64.411.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.300.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.300.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	3.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						52.000.000,00							53.760.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	53.760.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.062.065.485,00					-		5.309.565.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	2.627.442.000,00						21 Unit	2.334.701.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	30 Unit	435.000.000,00						30 Unit	406.911.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	1.999.623.485,00						3 Unit	2.567.953.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						120.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	1 Unit	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Unit	45.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							11.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		105 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	11.500.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						55.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	1 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	70.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
302.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.721.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***77.000.000,00***							***385.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	77.000.000,00						100 Persentase	385.000.000,00	
			2.Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2.32 %		-3.41 %	1.44 %	77.000.000,00						2.02 %	385.000.000,00	
			4.Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	100 %		35 %	50 %	77.000.000,00						70 %	385.000.000,00	
			4.Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30 %		27 %	28 %	77.000.000,00						28 %	385.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan						4.721.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	130.000.000,00						2 Dokumen Ketetapan	544.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	4 Dokumen SSPD	700.000.000,00						4 Dokumen SSPD	3.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	1.145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	456.000.000,00						2 Laporan	3.020.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	850.000.000,00						3 Sarana dan Prasarana	2.510.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						15.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana dan Prasarana		3 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana	15.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Sarana dan Prasarana	100.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						10.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						24.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	24.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen SSPD	180.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						28.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	100.000.000,00	UPT PPD Tanjung Batu
		Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI						**22.405.735.511,83**							**23.074.689.768,89**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**22.405.735.511,83**							**23.074.689.768,89**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**22.405.735.511,83**							**23.074.689.768,89**	
303.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.016.035.511,83**							**20.849.689.768,89**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian						***19.710.035.511,83***							***19.299.689.768,89***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		A Predikat	A Predikat	19.710.035.511,83						A Predikat	19.299.689.768,89	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	85.07 Indeks		80.98 Indeks	81.94 Indeks	19.710.035.511,83						82.89 Indeks	19.299.689.768,89	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.97 Indeks		86.77 Indeks	86.82 Indeks	19.710.035.511,83						86.87 Indeks	19.299.689.768,89	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		175.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi						50.000.000,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	25.000.000,00	
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	25.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.344.053.671,83					-		18.274.689.768,89	
		Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.344.053.671,83					-		18.274.689.768,89	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	467.664.000,00						4 Dokumen	354.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan		81 Orang/ Bulan	81 Orang/ Bulan	17.876.389.671,83						81 Orang/ Bulan	17.870.689.768,89	
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.876.389.671,83							17.870.689.768,89	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan		81 Orang/ Bulan	81 Orang/ Bulan	17.876.389.671,83	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		81 Orang/ Bulan	17.870.689.768,89	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						467.664.000,00							354.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	467.664.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	354.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					-		40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah						0,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						235.000.000,00					-		360.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian						235.000.000,00					-		360.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	81 Orang		81 Orang	81 Orang	100.000.000,00						81 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket		81 Paket	81 Paket	85.000.000,00						81 Paket	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		4 Orang	5 Orang	50.000.000,00						5 Orang	110.000.000,00	
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						85.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket		81 Paket	81 Paket	85.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		81 Paket	100.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		4 Orang	5 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	60.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	81 Orang		81 Orang	81 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		81 Orang	100.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						764.374.592,00					-		1.130.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah						764.374.592,00					-		1.130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00						1 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.374.592,00						1 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33.000.000,00						1 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00						12 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.000.000,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	120.000.000,00						2 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	200.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	40.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						7.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						47.374.592,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.374.592,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						140.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					-		380.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					-		380.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	170.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	160.000.000,00	
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						356.607.248,00					-		330.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						356.607.248,00					-		330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.008.000,00						1 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	238.599.248,00						1 Laporan	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	88.000.000,00						1 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.008.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.008.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						88.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	88.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	90.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						238.599.248,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	238.599.248,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						256.000.000,00					-		160.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara						256.000.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	226.000.000,00						14 Unit	110.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	30.000.000,00						5 Unit	30.000.000,00	
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						220.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	220.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	100.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	20.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	10.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
304.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**2.650.700.000,00**							**3.575.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian						***2.160.700.000,00***							***2.605.000.000,00***	
			1.Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit	39.75 Nilai		38.50 Nilai	39.00 Nilai	2.160.700.000,00						39.15 Nilai	2.605.000.000,00	
			2.Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit	32.00 Nilai		24.00 Nilai	25.50 Nilai	2.160.700.000,00						28.00 Nilai	2.605.000.000,00	
			3.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	98.63 %		98.59 %	98.60 %	2.160.700.000,00						98.61 %	2.605.000.000,00	
			4.Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat	99.85 %		99.65 %	99.70 %	2.160.700.000,00						99.75 %	2.605.000.000,00	
			5.Persentase ASN yang dibina Karirnya	5.99 %		5.28 %	5.46 %	2.160.700.000,00						5.64 %	2.605.000.000,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						110.700.000,00					-		335.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						110.700.000,00					-		335.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	20.700.000,00						1 Lembaga	80.000.000,00	
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-		0 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						50.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						20.700.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	20.700.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Lembaga	80.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						30.000.000,00							85.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	85.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						0,00							0,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN						250.000.000,00					-		400.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN						250.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	180.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	90.000.000,00	
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						50.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	130.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						50.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	90.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						150.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	180.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						2.050.000.000,00					-		2.500.000.000,00	
		Tersedianya ASN yang dibina kariernya						2.050.000.000,00					-		2.500.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	90 Orang		70 Orang	70 Orang	120.000.000,00						75 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000.000,00						1 Dokumen	1.700.000.000,00	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	200 Orang		159 Orang	160 Orang	50.000.000,00						165 Orang	50.000.000,00	
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	90 Orang		70 Orang	70 Orang	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Orang	100.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						1.750.000.000,00							1.700.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.700.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	200 Orang		159 Orang	490 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		165 Orang	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						0,00							50.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						240.000.000,00					-		340.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Disiplin						240.000.000,00					-		340.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600 Orang		600 Orang	600 Orang	70.000.000,00						600 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	50.000.000,00						500 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00						1 Laporan	70.000.000,00	
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						50.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	80.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						70.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600 Orang		600 Orang	800 Orang	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		600 Orang	90.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Orang	100.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	70.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai						**261.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**261.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**261.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
305.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.016.035.511,83**							**20.849.689.768,89**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian						***51.000.000,00***							***395.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		A Predikat	A Predikat	51.000.000,00						A Predikat	395.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	85.07 Indeks		80.98 Indeks	81.94 Indeks	51.000.000,00						82.89 Indeks	395.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	86.97 Indeks		86.77 Indeks	86.82 Indeks	51.000.000,00						86.87 Indeks	395.000.000,00	
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					-		40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah						0,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						235.000.000,00					-		360.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian						235.000.000,00					-		360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket		81 Paket	81 Paket	85.000.000,00						81 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		4 Orang	5 Orang	50.000.000,00						5 Orang	110.000.000,00	
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket		81 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		81 Paket	50.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		4 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						764.374.592,00					-		1.130.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah						764.374.592,00					-		1.130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00						1 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.374.592,00						1 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33.000.000,00						1 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00						12 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.000.000,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	120.000.000,00						2 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	50.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	40.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	40.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						8.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	100.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					-		380.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					-		380.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	160.000.000,00	
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	50.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	70.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	60.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						356.607.248,00					-		330.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						356.607.248,00					-		330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.008.000,00						1 Laporan	70.000.000,00	
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						256.000.000,00					-		160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara						256.000.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	226.000.000,00						14 Unit	110.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	30.000.000,00						5 Unit	30.000.000,00	
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	1 Unit	6.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	10.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	10.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	10.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		175.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi						50.000.000,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					-		380.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	5.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
306.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**2.650.700.000,00**							**3.575.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian						***170.000.000,00***							***600.000.000,00***	
			1.Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit	39.75 Nilai		38.50 Nilai	39.00 Nilai	170.000.000,00						39.15 Nilai	600.000.000,00	
			2.Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit	32.00 Nilai		24.00 Nilai	25.50 Nilai	170.000.000,00						28.00 Nilai	600.000.000,00	
			3.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	98.63 %		98.59 %	98.60 %	170.000.000,00						98.61 %	600.000.000,00	
			4.Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat	99.85 %		99.65 %	99.70 %	170.000.000,00						99.75 %	600.000.000,00	
			5.Persentase ASN yang dibina Karirnya	5.99 %		5.28 %	5.46 %	170.000.000,00						5.64 %	600.000.000,00	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						2.050.000.000,00					-		2.500.000.000,00	
		Tersedianya ASN yang dibina kariernya						2.050.000.000,00					-		2.500.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	90 Orang		70 Orang	70 Orang	120.000.000,00						75 Orang	250.000.000,00	
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	90 Orang		70 Orang	5 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Orang	150.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Tersedianya ASN yang dibina kariernya						2.050.000.000,00					-		2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-		-	-	130.000.000,00						-	450.000.000,00	
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						130.000.000,00							450.000.000,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-		-	4 Dokumen	130.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau || Kota Tanjung Pinang || Kecamatan Bukit Bestari || Kelurahan Dompak || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	450.000.000,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah						**15.772.116.876,84**							**20.308.153.067,12**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.772.116.876,84**							**20.308.153.067,12**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**15.772.116.876,84**							**20.308.153.067,12**	
307.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.072.116.876,84**							**13.308.153.067,12**	
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan bidang urusan pendidikan dan pelatihan						***11.347.116.876,84***							***12.693.153.067,12***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		BB Predikat	BB Predikat	11.347.116.876,84						BB Predikat	12.693.153.067,12	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	87,68 Indeks		85,68 Indeks	86,18 Indeks	11.347.116.876,84						86,68 Indeks	12.693.153.067,12	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	91,32 Indeks		91,12 Indeks	91,17 Indeks	11.347.116.876,84						91,22 Indeks	12.693.153.067,12	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		210.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja						150.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	40.000.000,00	
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Laporan	110.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Laporan	40.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.577.116.876,84					ASN Provinsi Kepulauan Riau		11.080.201.067,12	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.577.116.876,84					ASN Provinsi Kepulauan Riau		11.080.201.067,12	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	266.808.000,00						4 Dokumen	252.048.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	10.305.308.876,84						45 Orang/ Bulan	10.818.153.067,12	
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.305.308.876,84							10.818.153.067,12	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	10.305.308.876,84	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		45 Orang/ Bulan	10.818.153.067,12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						266.808.000,00							252.048.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	266.808.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	252.048.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	10.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						10.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						10.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	10.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	10.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		135.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		135.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		10 Orang	40 Orang	10.000.000,00						40 Orang	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10.000.000,00						10 Orang	30.000.000,00	
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	75.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		10 Orang	30.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		10 Orang	40 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		40 Orang	30.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						390.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		425.000.000,00	
		Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik						390.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		425.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00						4 Laporan	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00						1 Paket	85.000.000,00	
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	25.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	25.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						80.000.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	85.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						120.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	110.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	10.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	10.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						150.000.000,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	160.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						115.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		415.952.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						115.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		415.952.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00						3 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00						1 Unit	205.952.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20.000.000,00						5 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00						2 Unit	50.000.000,00	
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						30.000.000,00							205.952.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	205.952.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Paket	50.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	50.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	10.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	50.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	50.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						492.000.000,00					-		542.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor						492.000.000,00					-		542.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	292.000.000,00						4 Laporan	292.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00						4 Laporan	150.000.000,00	
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	100.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	150.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						292.000.000,00							292.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	292.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	292.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						258.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		460.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharan Barang Milik Daerah						258.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		460.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00						1 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		5 Unit	6 Unit	150.000.000,00						7 Unit	210.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00						5 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		30 Unit	35 Unit	20.000.000,00						35 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						150.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		5 Unit	6 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		7 Unit	210.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	10.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		30 Unit	5 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		35 Unit	60.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	20.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	60.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	50.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						18.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	50.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
308.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**3.700.000.000,00**							**7.000.000.000,00**	
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional						***3.150.000.000,00***							***5.290.000.000,00***	
			0.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	100 %		40.72 %	54.69 %	3.150.000.000,00						65.49 %	5.290.000.000,00	
			1.Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	51.55 %		49.57 %	50.23 %	3.150.000.000,00						50.89 %	5.290.000.000,00	
			2.Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	100 %		23.75 %	42.50 %	3.150.000.000,00						62.50 %	5.290.000.000,00	
			4.Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	44.08 %		37.82 %	39.07 %	3.150.000.000,00						42.41 %	5.290.000.000,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						1.050.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		2.250.000.000,00	
		Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya						1.050.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		2.250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5475 Orang		4525 Orang	4675 Orang	900.000.000,00						5075 Orang	1.650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						50.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						900.000.000,00							1.650.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5475 Orang		4525 Orang	4675 Orang	900.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5075 Orang	1.650.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						50.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						2.320.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		3.720.000.000,00	
		Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural						2.320.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		3.720.000.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	200.000.000,00						40 Orang	400.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4962 Orang		7160 Orang	3572 Orang	1.500.000.000,00						2762 Orang	1.870.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	370.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	225.000.000,00	
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi						50.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						200.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		40 Orang	400.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						370.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	370.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	400.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional						50.000.000,00							225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	225.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						1.500.000.000,00							1.870.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4962 Orang		7160 Orang	3572 Orang	1.500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2762 Orang	1.870.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						50.000.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	125.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						330.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		1.030.000.000,00	
		Meningkatnya ASN yang Mengikuti Kompetensi Pemerintahan						330.000.000,00					ASN Provinsi Kepulauan Riau		1.030.000.000,00	
			Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	81.08 Nilai Akreditasi		81.00 Nilai Akreditasi	81.02 Nilai Akreditasi	100.000.000,00						81.04 Nilai Akreditasi	110.000.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	40 Orang		5 Orang	40 Orang	50.000.000,00						40 Orang	310.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	40 Orang		5 Orang	40 Orang	50.000.000,00						40 Orang	310.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	60 Orang		30 Orang	60 Orang	100.000.000,00						60 Orang	200.000.000,00	
			Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	5.04.02.1.03.0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						100.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	60 Orang		30 Orang	40 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		60 Orang	200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						50.000.000,00							310.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	40 Orang		5 Orang	20 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		40 Orang	310.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						50.000.000,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	40 Orang		5 Orang	20 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		40 Orang	310.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.03.0004	Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	81.08 Nilai Akreditasi		81.00 Nilai Akreditasi	81,02 Nilai Akreditasi	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		81.04 Nilai Akreditasi	110.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.03.0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi						30.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Badan Pengelola Perbatasan Daerah						**7.490.849.649,50**							**10.200.979.516,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.490.849.649,50**							**10.200.979.516,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**						**7.490.849.649,50**							**10.200.979.516,00**	
309.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**6.490.849.649,50**							**9.742.979.516,00**	
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan						***6.395.849.649,50***							***9.722.979.516,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Predikat		B Predikat	B Predikat	6.395.849.649,50						B Predikat	9.722.979.516,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	85 Indeks		83 Indeks	83.5 Indeks	6.395.849.649,50						84 Indeks	9.722.979.516,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Indeks		81.5 Indeks	82.5 Indeks	6.395.849.649,50						83 Indeks	9.722.979.516,00	
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						160.000.000,00					Perangkat Daerah		135.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Regulasi (Dengan Satuan:Persen)						160.000.000,00					Perangkat Daerah		135.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00						2 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						110.000.000,00							95.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Dokumen	95.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Laporan	40.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.490.849.649,50					Perangkat Daerah		8.984.779.516,00	
		Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dengan Satuan:Persentase)						5.490.849.649,50					Perangkat Daerah		8.984.779.516,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.144.000,00						12 Dokumen	245.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ Bulan		27 Orang/ Bulan	27 Orang/ Bulan	5.253.705.649,50						27 Orang/ Bulan	8.739.779.516,00	
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.253.705.649,50							8.739.779.516,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ Bulan		27 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	5.253.705.649,50	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		27 Orang/ Bulan	8.739.779.516,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						237.144.000,00							245.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.144.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Dokumen	245.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						63.770.618,00					Perangkat Daerah		65.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)						63.770.618,00					Perangkat Daerah		65.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	55.770.618,00						1 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		8 Orang	4 Orang	8.000.000,00						4 Orang	10.000.000,00	
	5.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						55.770.618,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	55.770.618,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	55.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						8.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		8 Orang	4 Orang	8.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Orang	10.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						362.000.000,00					Perangkat Daerah		369.000.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase						362.000.000,00					Perangkat Daerah		369.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.000.000,00						12 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	190.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		4 Paket	4 Paket	33.000.000,00						4 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00						4 Paket	23.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	12.000.000,00						1 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		4 Paket	4 Paket	35.000.000,00						4 Paket	38.000.000,00	
	5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	12.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	25.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						35.000.000,00							38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		4 Paket	4 Paket	35.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Paket	38.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						33.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		4 Paket	4 Paket	33.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Paket	35.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Paket	23.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						22.000.000,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Dokumen	22.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.000.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	14.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						190.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	190.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	200.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						220.029.382,00					Perangkat Daerah		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan (Dengan Satuan:Persentase)						220.029.382,00					Perangkat Daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	85.390.000,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit		8 Unit	1 Unit	134.639.382,00						0 Unit	0,00	
	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						85.390.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	85.390.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0 Paket	0,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						134.639.382,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit		8 Unit	6 Unit	134.639.382,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0 Unit	0,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						99.200.000,00					Perangkat Daerah		99.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibutuhkan (Dengan Satuan:Persentase)						99.200.000,00					Perangkat Daerah		99.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00						12 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00						12 Laporan	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.200.000,00						12 Laporan	2.200.000,00	
	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.200.000,00							2.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.200.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	2.200.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	2.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	45.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.000.000,00					Perangkat Daerah		90.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara (Dengan Satuan:Persentase)						95.000.000,00					Perangkat Daerah		90.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit		1 Unit	1 Unit	70.000.000,00						1 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		3 Unit	3 Unit	5.000.000,00						5 Unit	10.000.000,00	
	5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit		1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	70.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	10.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		3 Unit	5 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Unit	10.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
310.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**						**1.000.000.000,00**							**458.000.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan						***840.000.000,00***							***108.000.000,00***	
			1.Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota	67 %		50 %	55 %	840.000.000,00						60 %	108.000.000,00	
			2.Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan	48.28 %		42.55 %	43.14 %	840.000.000,00						46.15 %	108.000.000,00	
			3.Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring	44.83 %		34.48 %	37.93 %	840.000.000,00						41.38 %	108.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama						370.000.000,00					Perangkat Daerah		108.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Kerjasama, Rencana Aksi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Dengan Satuan:Dokumen)						370.000.000,00					Perangkat Daerah		108.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00						1 Dokumen	58.000.000,00	
	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah						250.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan						120.000.000,00							58.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	58.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan						315.000.000,00					Perangkat Daerah		200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Kawasan Perbatasan yang Dikembangkan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan. (Dengan Satuan:Dokumen)						315.000.000,00					Perangkat Daerah		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan						75.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan						80.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, danPengamanan Batas Wilayah Negara						80.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan						80.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi						315.000.000,00					Perangkat Daerah		150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Realisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan dalam pengembangan Kawasan Perbatasan (Dengan Satuan: Dokumen)						315.000.000,00					Perangkat Daerah		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	160.000.000,00						5 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00						5 Laporan	50.000.000,00	
	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan						95.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan						60.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Laporan	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						160.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	160.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Laporan	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
		Badan Penghubung Daerah						**14.558.454.613,50**							**20.954.274.793,53**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14.558.454.613,50**							**20.454.274.793,53**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**14.558.454.613,50**							**20.454.274.793,53**	
311.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.533.468.848,40**							**15.041.135.615,53**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Bidang Penghubung						***11.883.468.848,40***							***15.041.135.615,53***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		B Predikat	BB Predikat	11.883.468.848,40						BB Predikat	15.041.135.615,53	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	74.4 Indeks		64.92 Indeks	65.04 Indeks	11.883.468.848,40						66.16 Indeks	15.041.135.615,53	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks		89 Indeks	89.4 Indeks	11.883.468.848,40						89.6 Indeks	15.041.135.615,53	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00					-		543.449.922,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						200.000.000,00					-		543.449.922,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	97.405.553,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	275.201.761,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	84.655.897,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	86.186.711,00	
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.000.000,00							97.405.553,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	97.405.553,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							275.201.761,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	275.201.761,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							84.655.897,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	84.655.897,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							86.186.711,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	86.186.711,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.987.584.706,40					-		7.237.728.442,53	
		Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur						5.987.584.706,40					-		7.237.728.442,53	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	194.511.600,00						1 Dokumen	194.511.600,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	157.722.658,53	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	5.693.073.106,40						45 Orang/ Bulan	6.885.494.184,00	
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.693.073.106,40							6.885.494.184,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	5.693.073.106,40	Provinsi Kepulauan Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		45 Orang/ Bulan	6.885.494.184,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						194.511.600,00							194.511.600,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	194.511.600,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	194.511.600,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						100.000.000,00							157.722.658,53	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	157.722.658,53	Badan Penghubung Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						25.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah						25.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						90.000.000,00					-		167.756.476,00	
		Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Pegawai						90.000.000,00					-		167.756.476,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00						1 Paket	106.556.476,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang		6 Orang	1 Orang	30.000.000,00						4 Orang	61.200.000,00	
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						60.000.000,00							106.556.476,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	106.556.476,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00							61.200.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang		6 Orang	7 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	61.200.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						530.000.000,00					-		831.989.897,00	
		Tersedianya perlengkapan kantor dan unsur pendukung lainnya						530.000.000,00					-		831.989.897,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00						12 Laporan	286.989.897,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00						1 Paket	125.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	120.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	200.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						80.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	125.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	100.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						300.000.000,00							286.989.897,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	286.989.897,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.820.000.000,00					-		425.000.000,00	
		Tersedianya Belanja Aset						1.820.000.000,00					-		425.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.820.000.000,00						1 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	350.000.000,00	
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	350.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						1.820.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.820.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	75.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.919.783.842,00					-		2.641.989.832,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang						1.919.783.842,00					-		2.641.989.832,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	807.798.686,00						12 Laporan	1.013.281.987,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.061.985.156,00						12 Laporan	1.408.278.524,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	220.429.321,00	
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						807.798.686,00							1.013.281.987,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	807.798.686,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	1.013.281.987,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							220.429.321,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	220.429.321,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.061.985.156,00							1.408.278.524,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.061.985.156,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	1.408.278.524,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.961.100.300,00					-		3.143.221.046,00	
		Terpeliharanya Bangunan dan Gedung lainnya						1.961.100.300,00					-		3.143.221.046,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.000.000,00						2 Unit	924.566.138,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit		37 Unit	39 Unit	1.411.100.300,00						40 Unit	1.823.399.449,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	250.000.000,00						50 Unit	365.255.459,00	
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.411.100.300,00							1.823.399.449,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit		37 Unit	39 Unit	1.411.100.300,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Unit	1.823.399.449,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	30.000.000,00	Badan Penghubung Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						250.000.000,00							365.255.459,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	365.255.459,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00							924.566.138,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	3 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	924.566.138,00	Badan Penghubung Daerah
312.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**						**2.024.985.765,10**							**5.413.139.178,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung						***2.024.985.765,10***							***5.413.139.178,00***	
			1.Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani	100 %		100 %	100 %	2.024.985.765,10						100 %	5.413.139.178,00	
			2.Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau	100 %		100 %	100 %	2.024.985.765,10						100 %	5.413.139.178,00	
			3.Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.024.985.765,10						100 %	5.413.139.178,00	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						2.024.985.765,10					-		5.413.139.178,00	
		Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						2.024.985.765,10					-		5.413.139.178,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	251.859.010,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00						1 Laporan	1.038.955.458,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	774.985.765,10						1 Laporan	2.009.864.694,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00						1 Laporan	1.217.370.906,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	895.089.110,00	
		Persentase Hasil Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat						2.024.985.765,10					-		5.413.139.178,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	251.859.010,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00						1 Laporan	1.038.955.458,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	774.985.765,10						1 Laporan	2.009.864.694,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00						1 Laporan	1.217.370.906,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	895.089.110,00	
		Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						2.024.985.765,10					-		5.413.139.178,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	251.859.010,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00						1 Laporan	1.038.955.458,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	774.985.765,10						1 Laporan	2.009.864.694,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00						1 Laporan	1.217.370.906,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	895.089.110,00	
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagiAparatur dan Masyarakat						774.985.765,10							2.009.864.694,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	774.985.765,10	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.009.864.694,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur danMasyarakat						600.000.000,00							1.217.370.906,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.217.370.906,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi ProdukUnggulan dan Pelestarian Seni Budaya						200.000.000,00							895.089.110,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	895.089.110,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						50.000.000,00							251.859.010,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	251.859.010,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPelayanan Penghubung						400.000.000,00							1.038.955.458,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.038.955.458,00	Badan Penghubung Daerah
	X							**0,00**							**500.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**500.000.000,00**	
313.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**0,00**							**500.000.000,00**	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	BB Predikat	0,00						-	500.000.000,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	-		-	65.04 Indeks	0,00						-	500.000.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	89.4 Indeks	0,00						-	500.000.000,00	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		500.000.000,00	
		Tersedianya Belanja Aset						0,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						2 Unit	500.000.000,00	
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	500.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
		Inspektorat						**58.333.299.345,32**							**55.187.249.127,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**58.333.299.345,32**							**55.187.249.127,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**58.333.299.345,32**							**55.187.249.127,00**	
314.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**46.414.350.129,32**							**43.921.849.911,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan						***45.814.350.129,32***							***43.221.849.911,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		A Predikat	A Predikat	45.814.350.129,32						A Predikat	43.221.849.911,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks		89 Indeks	89.03 Indeks	45.814.350.129,32						89.07 Indeks	43.221.849.911,00	
			3.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	86.24 Indeks		85.76 Indeks	85.88 Indeks	45.814.350.129,32						86.00 Indeks	43.221.849.911,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						430.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		430.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						430.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		430.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		12 Dokumen	14 Dokumen	350.000.000,00						14 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	80.000.000,00						7 Laporan	80.000.000,00	
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		12 Dokumen	14 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Dokumen	350.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	80.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						35.257.940.693,32					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		34.042.242.964,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						35.257.940.693,32					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		34.042.242.964,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	491.896.000,00						1 Dokumen	491.896.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	108.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/ Bulan		132 Orang/ Bulan	132 Orang/ Bulan	34.658.044.693,32						132 Orang/ Bulan	33.450.346.964,00	
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						34.658.044.693,32							33.450.346.964,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/ Bulan		132 Orang/ Bulan	132 Orang/ Bulan	34.658.044.693,32	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		132 Orang/ Bulan	33.450.346.964,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						491.896.000,00							491.896.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	491.896.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	491.896.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						108.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	108.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	100.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						86.983.500,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		86.983.500,00	
		Meningkatnya kualitas Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						86.983.500,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		86.983.500,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		4 Laporan	5 Laporan	46.021.500,00						5 Laporan	46.021.500,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	40.962.000,00						4 Dokumen	40.962.000,00	
	6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						40.962.000,00							40.962.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	40.962.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	40.962.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						46.021.500,00							46.021.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		4 Laporan	5 Laporan	46.021.500,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	46.021.500,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.143.749.080,00					OPD		2.143.089.030,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.143.749.080,00					OPD		2.143.089.030,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	90.396.530,00						5 Dokumen	90.396.530,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		50 Orang	100 Orang	100.000.000,00						100 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	160.870.000,00						2 Paket	142.692.500,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	122 Orang		100 Orang	122 Orang	2.792.482.550,00						122 Orang	1.810.000.000,00	
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						160.870.000,00							142.692.500,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	160.870.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	142.692.500,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						90.396.530,00							90.396.530,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	90.396.530,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	90.396.530,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.792.482.550,00							1.810.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	122 Orang		100 Orang	132 Orang	2.792.482.550,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		122 Orang	1.810.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		50 Orang	100 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Orang	100.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.538.183.800,00					Inspektorat Daerah		4.407.939.101,00	
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.538.183.800,00					Inspektorat Daerah		4.407.939.101,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		15 Dokumen	10 Dokumen	19.975.800,00						10 Dokumen	19.975.800,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	40.999.500,00						2 Dokumen	40.999.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan		20 Laporan	27 Laporan	2.900.000.000,00						27 Laporan	2.769.755.301,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		6 Paket	6 Paket	498.279.300,00						6 Paket	498.279.300,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	350.000.000,00						3 Paket	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	90.199.700,00						1 Paket	90.199.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	538.729.500,00						2 Paket	538.729.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	50.000.000,00	
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						90.199.700,00							90.199.700,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	90.199.700,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	90.199.700,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						538.729.500,00							538.729.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	538.729.500,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	538.729.500,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Paket	50.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						498.279.300,00							498.279.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		6 Paket	6 Paket	498.279.300,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Paket	498.279.300,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	350.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Paket	350.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						19.975.800,00							19.975.800,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	19.975.800,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Dokumen	19.975.800,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						2.900.000.000,00							2.769.755.301,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan		20 Laporan	30 Laporan	2.900.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		27 Laporan	2.769.755.301,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						40.999.500,00							40.999.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	40.999.500,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	40.999.500,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.350.000.000,00					Pegawai Inspektorat Daerah		1.314.655.500,00	
		Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah						1.350.000.000,00					Pegawai Inspektorat Daerah		1.314.655.500,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.000.000,00						4 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00						2 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	250.000.000,00						4 Unit	214.655.500,00	
	6.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	1.000.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	100.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						250.000.000,00							214.655.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	214.655.500,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						514.388.056,00					Pegawai Inspektorat Daerah		403.834.816,00	
		Meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						514.388.056,00					Pegawai Inspektorat Daerah		403.834.816,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	402.388.056,00						12 Laporan	291.834.816,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00						1 Laporan	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	12.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						402.388.056,00							291.834.816,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	402.388.056,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	291.834.816,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.093.105.000,00					Pegawai Inspektorat Daerah, Gedung Inspektorat Daerah		1.093.105.000,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.093.105.000,00					Pegawai Inspektorat Daerah, Gedung Inspektorat Daerah		1.093.105.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	519.890.000,00						21 Unit	519.890.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	275.175.000,00						7 Unit	275.175.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		30 Unit	30 Unit	98.040.000,00						31 Unit	98.040.000,00	
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						275.175.000,00							275.175.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	275.175.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Unit	275.175.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						519.890.000,00							519.890.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	519.890.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		21 Unit	519.890.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						98.040.000,00							98.040.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		30 Unit	30 Unit	98.040.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		31 Unit	98.040.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	200.000.000,00	Inspektorat
315.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**7.813.380.000,00**							**7.379.144.000,00**	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan						***7.563.380.000,00***							***6.129.144.000,00***	
			1.Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas	91.17 %		88.24 %	91.17 %	7.563.380.000,00						91.17 %	6.129.144.000,00	
			2.Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan	100 %		100 %	100 %	7.563.380.000,00						100 %	6.129.144.000,00	
			4.Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah	100 %		100 %	100 %	7.563.380.000,00						100 %	6.129.144.000,00	
			4.Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	7.563.380.000,00						100 %	6.129.144.000,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						6.193.380.000,00					Kab/Kota , OPD		5.929.144.000,00	
		Meningkatnya kualitas laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut						6.193.380.000,00					Kab/Kota , OPD		5.929.144.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	14 Dokumen		12 Dokumen	14 Dokumen	650.000.000,00						14 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	400.000.000,00						1 Kesepakatan	1.250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160 Laporan		80 Laporan	160 Laporan	2.000.000.000,00						160 Laporan	1.705.764.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	95 Laporan		85 Laporan	95 Laporan	1.820.000.000,00						95 Laporan	1.250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	7 Laporan		3 Laporan	7 Laporan	823.380.000,00						7 Laporan	823.380.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal						6.193.380.000,00					Kab/Kota , OPD		5.929.144.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	14 Dokumen		12 Dokumen	14 Dokumen	650.000.000,00						14 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	400.000.000,00						1 Kesepakatan	1.250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160 Laporan		80 Laporan	160 Laporan	2.000.000.000,00						160 Laporan	1.705.764.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	95 Laporan		85 Laporan	95 Laporan	1.820.000.000,00						95 Laporan	1.250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	7 Laporan		3 Laporan	7 Laporan	823.380.000,00						7 Laporan	823.380.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						1.820.000.000,00							1.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	95 Laporan		85 Laporan	100 Laporan	1.820.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		95 Laporan	1.250.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						2.000.000.000,00							1.705.764.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160 Laporan		80 Laporan	200 Laporan	2.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		160 Laporan	1.705.764.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						250.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						250.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	200.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan TeknisKabupaten/Kota						823.380.000,00							823.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	7 Laporan		3 Laporan	7 Laporan	823.380.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	823.380.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal						400.000.000,00							1.250.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Kesepakatan	1.250.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						650.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	14 Dokumen		12 Dokumen	14 Dokumen	650.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Dokumen	600.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						1.620.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kab/Kota		1.450.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						1.620.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kab/Kota		1.450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	45 Laporan		30 Laporan	45 Laporan	1.200.000.000,00						45 Laporan	1.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	9 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	420.000.000,00						8 Laporan	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						420.000.000,00							250.000.000,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	9 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	420.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	250.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						1.200.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	45 Laporan		30 Laporan	45 Laporan	1.200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Laporan	1.200.000.000,00	Inspektorat
316.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**4.105.569.216,00**							**3.886.255.216,00**	
		Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi						***4.105.569.216,00***							***3.886.255.216,00***	
			1.Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	4.105.569.216,00						1 Perangkat Daerah	3.886.255.216,00	
			3.Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang dihasilkan	9 Rekomendasi		5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	4.105.569.216,00						7 Rekomendasi	3.886.255.216,00	
			3.perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK	12 Perangkat Daerah		12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	4.105.569.216,00						12 Perangkat Daerah	3.886.255.216,00	
			4.Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi SPIP	34 Perangkat Daerah		34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	4.105.569.216,00						34 Perangkat Daerah	3.886.255.216,00	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						895.569.216,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		891.255.216,00	
		Meningkatnya kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi						895.569.216,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		891.255.216,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi		2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	475.569.216,00						3 Rekomendasi	475.569.216,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		2 Rekomendasi	4 Rekomendasi	420.000.000,00						4 Rekomendasi	415.686.000,00	
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan						420.000.000,00							415.686.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		2 Rekomendasi	4 Rekomendasi	420.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Rekomendasi	415.686.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangFasilitasi Pengawasan						475.569.216,00							475.569.216,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi		2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	475.569.216,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Rekomendasi	475.569.216,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi						3.210.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		2.995.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah yang diberikan pendampingan/asistensi						3.210.000.000,00					Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		2.995.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.500.000.000,00						2 Kegiatan	1.300.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34 Perangkat Daerah		34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	560.000.000,00						34 Perangkat Daerah	560.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 Perangkat Daerah		34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	400.000.000,00						34 Perangkat Daerah	385.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 Perangkat Daerah		34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	750.000.000,00						34 Perangkat Daerah	750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 Perangkat Daerah		34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	750.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		34 Perangkat Daerah	750.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, danPenilaian Reformasi Birokrasi						400.000.000,00							385.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 Perangkat Daerah		34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	400.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		34 Perangkat Daerah	385.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						1.500.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.500.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Kegiatan	1.300.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan VerifikasiPenegakan Integritas						560.000.000,00							560.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34 Perangkat Daerah		34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	560.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		34 Perangkat Daerah	560.000.000,00	Inspektorat
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**40.617.775.807,33**							**80.067.808.845,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**40.617.775.807,33**							**80.067.808.845,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**40.617.775.807,33**							**80.067.808.845,00**	
317.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.112.265.419,33**							**19.226.276.906,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik						***11.097.756.103,39***							***19.226.276.906,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	11.097.756.103,39						BB Predikat	19.226.276.906,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	88.60 Indeks		88.56 Indeks	88.57 Indeks	11.097.756.103,39						88.58 Indeks	19.226.276.906,00	
			2.Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	89.64 Indeks		84.85 Indeks	85.73 Indeks	11.097.756.103,39						87.53 Indeks	19.226.276.906,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						141.522.786,17					-		629.444.732,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja perangkat daerah						141.522.786,17					-		629.444.732,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	33.155.460,87						4 Dokumen	150.034.956,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		22 Dokumen	18 Dokumen	71.658.756,23						18 Dokumen	324.269.912,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	36.708.569,07						7 Laporan	155.139.864,00	
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						71.658.756,23							324.269.912,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		22 Dokumen	18 Dokumen	71.658.756,23	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Dokumen	324.269.912,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						33.155.460,87							150.034.956,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	33.155.460,87	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	150.034.956,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						36.708.569,07							155.139.864,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	36.708.569,07	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	155.139.864,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.652.644.845,24					-		12.957.523.788,00	
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan						9.652.644.845,24					-		12.957.523.788,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	453.916.000,00						1 Dokumen	916.824.744,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.409.240,27						1 Laporan	120.064.764,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.970.185,64						12 Laporan	50.589.086,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan		61 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	9.158.349.419,33						61 Orang/ Bulan	11.870.045.194,00	
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.158.349.419,33							11.870.045.194,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan		61 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	9.158.349.419,33	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		61 Orang/ Bulan	11.870.045.194,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						453.916.000,00							916.824.744,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	453.916.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	916.824.744,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						28.409.240,27							120.064.764,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.409.240,27	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	120.064.764,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						11.970.185,64							50.589.086,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.970.185,64	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	50.589.086,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36.273.289,60					-		117.065.653,00	
		Tersedianya administrasi kepegawaian kantor secara lengkap dan sesuai ketentuan						36.273.289,60					-		117.065.653,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket		61 Paket	61 Paket	14.509.315,94						61 Paket	25.085.497,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang		12 Orang	61 Orang	21.763.973,66						61 Orang	91.980.156,00	
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						14.509.315,94							25.085.497,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket		61 Paket	61 Paket	14.509.315,94	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		61 Paket	25.085.497,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						21.763.973,66							91.980.156,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang		12 Orang	61 Orang	21.763.973,66	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		61 Orang	91.980.156,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						526.643.044,68					-		2.294.437.114,00	
		Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran secara lengkap dan sesuai standar						526.643.044,68					-		2.294.437.114,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.920.494,87						1 Dokumen	134.904.229,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.980.123,60						1 Dokumen	33.726.057,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.960.247,43						1 Laporan	66.894.659,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	272.730.017,71						1 Laporan	1.234.156.766,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.431.055,34						1 Paket	39.021.885,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.489.439,53						1 Paket	89.192.879,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		13 Paket	27 Paket	151.622.350,26						20 Paket	640.795.090,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.509.315,94						1 Paket	55.745.549,00	
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						151.622.350,26							640.795.090,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		13 Paket	6 Paket	151.622.350,26	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Paket	640.795.090,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						14.509.315,94							55.745.549,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.509.315,94	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	55.745.549,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.431.055,34							39.021.885,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.431.055,34	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	39.021.885,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.489.439,53							89.192.879,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.489.439,53	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	89.192.879,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.960.247,43							66.894.659,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.960.247,43	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	66.894.659,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						272.730.017,71							1.234.156.766,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	272.730.017,71	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.234.156.766,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.980.123,60							33.726.057,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.980.123,60	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	33.726.057,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						31.920.494,87							134.904.229,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.920.494,87	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	134.904.229,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						279.304.329,49					-		1.180.412.007,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya barang kantor penunjang urusan perkantoran secara memadai dan sesuai ketentuan						279.304.329,49					-		1.180.412.007,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	119.701.855,39						5 Paket	505.890.860,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	2 Unit	87.781.360,77						2 Unit	370.986.631,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	71.821.113,33						2 Unit	303.534.516,00	
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						87.781.360,77							370.986.631,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	2 Unit	87.781.360,77	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	370.986.631,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						119.701.855,39							505.890.860,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	119.701.855,39	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	505.890.860,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						71.821.113,33							303.534.516,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	71.821.113,33	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	303.534.516,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						361.001.461,36					-		1.303.523.162,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan kantor secara optimal dan sesuai kebutuhan						361.001.461,36					-		1.303.523.162,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	239.403.711,03						1 Laporan	1.011.781.721,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	104.743.729,00						1 Laporan	220.512.008,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	16.854.021,33						2 Laporan	71.229.433,00	
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						239.403.711,03							1.011.781.721,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	239.403.711,03	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.011.781.721,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16.854.021,33							71.229.433,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	16.854.021,33	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	71.229.433,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						104.743.729,00							220.512.008,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	104.743.729,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	220.512.008,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						114.875.662,79					-		743.870.450,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang-barang kantor secara teratur sesuai ketentuan						114.875.662,79					-		743.870.450,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	39.900.618,46						12 Unit	168.630.289,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	53.463.147,42						13 Unit	486.302.868,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	11.862.154,76						6 Unit	49.240.044,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	15 Unit	9.649.742,15						11 Unit	39.697.249,00	
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						11.862.154,76							49.240.044,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	11.862.154,76	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	49.240.044,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						53.463.147,42							486.302.868,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	53.463.147,42	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Unit	486.302.868,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.649.742,15							39.697.249,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	15 Unit	9.649.742,15	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Unit	39.697.249,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						39.900.618,46							168.630.289,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	39.900.618,46	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	168.630.289,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
318.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**1.709.200.123,00**							**3.536.352.747,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa						***1.584.200.123,00***							***3.536.352.747,00***	
			1.Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	100 %		100 %	100 %	1.584.200.123,00						100 %	3.536.352.747,00	
			2.Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara	0.002 %		0.002 %	0.002 %	1.584.200.123,00						0.002 %	3.536.352.747,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.709.200.123,00					-		3.536.352.747,00	
		Terlaksananya penanganan konflik sosial serta pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara bagi masyarakat, pemuda, dan Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan						1.709.200.123,00					-		3.536.352.747,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	69.681.937,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	125.427.486,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	337.260.574,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6500 Orang		6066 Orang	6200 Orang	200.000.000,00						6300 Orang	370.502.035,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	25.000.000,00						100 Orang	70.502.035,00	
			Jumlah Paskibraka	35 Orang		35 Orang	35 Orang	1.259.200.123,00						35 Orang	2.114.910.985,00	
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	35 Orang		Orang	35 Orang	20.000.000,00						35 Orang	127.872.775,00	
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	122.640.209,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	55.745.549,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	141.809.162,00	
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						25.000.000,00							70.502.035,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	70.502.035,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						200.000.000,00							370.502.035,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6500 Orang		6066 Orang	6200 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6300 Orang	370.502.035,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						50.000.000,00							337.260.574,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	337.260.574,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						25.000.000,00							69.681.937,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	69.681.937,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila						20.000.000,00							127.872.775,00	
		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	35 Orang		Orang	35 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Orang	127.872.775,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka						20.000.000,00							55.745.549,00	
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	55.745.549,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka						50.000.000,00							125.427.486,00	
		Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	125.427.486,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila						30.000.000,00							122.640.209,00	
		Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	122.640.209,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila						30.000.000,00							141.809.162,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	141.809.162,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka						1.259.200.123,00							2.114.910.985,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	35 Orang		35 Orang	35 Orang	1.259.200.123,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Orang	2.114.910.985,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
319.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**5.406.815.700,00**							**26.710.028.653,00**	
		Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik						***5.406.815.700,00***							***26.710.028.653,00***	
			1.Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat	61.11 %		38.89 %	44.44 %	5.406.815.700,00						50.00 %	26.710.028.653,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						5.406.815.700,00					-		26.710.028.653,00	
		Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik di Provinsi Kepulauan Riau						5.406.815.700,00					-		26.710.028.653,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	337.260.574,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	145 Orang		100 Orang	110 Orang	5.156.815.700,00						120 Orang	25.631.677.361,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6500 Orang		6114 Orang	6200 Orang	200.000.000,00						6300 Orang	741.090.718,00	
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						200.000.000,00							741.090.718,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6500 Orang		6114 Orang	2378 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6300 Orang	741.090.718,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						5.156.815.700,00							25.631.677.361,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	145 Orang		100 Orang	110 Orang	5.156.815.700,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120 Orang	25.631.677.361,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						50.000.000,00							337.260.574,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	337.260.574,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
320.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**3.565.000.000,00**							**2.105.196.435,00**	
		Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan						***3.565.000.000,00***							***2.105.196.435,00***	
			1.Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	85.71 %		85 %	85.15 %	3.565.000.000,00						85.31 %	2.105.196.435,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						3.565.000.000,00					-		2.105.196.435,00	
		Meningkatnya kepatuhan Ormas/LSM terhadap ketentuan hukum dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi						3.565.000.000,00					-		2.105.196.435,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	337.260.574,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	58 Orang		150 Orang	44 Orang	3.440.000.000,00						48 Orang	1.409.391.701,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	219 Orang		75 Orang	165 Orang	100.000.000,00						181 Orang	358.544.160,00	
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						100.000.000,00							358.544.160,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	219 Orang		75 Orang	49 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		181 Orang	358.544.160,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						3.440.000.000,00							1.409.391.701,00	
		Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	58 Orang		150 Orang	44 Orang	3.440.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Orang	1.409.391.701,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						25.000.000,00							337.260.574,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	337.260.574,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
321.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**1.125.000.000,00**							**1.409.752.570,00**	
		Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat						***1.075.000.000,00***							***1.409.752.570,00***	
			1.Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	100 %		100 %	100 %	1.075.000.000,00						100 %	1.409.752.570,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						1.125.000.000,00					-		1.409.752.570,00	
		Terlaksananya penanganan konflik ekonomi, budaya, dan agama sesuai kewenangan pemerintah daerah						1.125.000.000,00					-		1.409.752.570,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						0 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	337.260.576,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	17 Orang		12 Orang	13 Orang	1.000.000.000,00						14 Orang	755.463.682,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	439.2 Orang		1200 Orang	330 Orang	50.000.000,00						363 Orang	317.028.312,00	
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						50.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						50.000.000,00							317.028.312,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	439.2 Orang		1200 Orang	53 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		363 Orang	317.028.312,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						1.000.000.000,00							755.463.682,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	17 Orang		12 Orang	13 Orang	1.000.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Orang	755.463.682,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						25.000.000,00							337.260.576,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	337.260.576,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
322.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**17.699.494.565,00**							**27.080.201.534,00**	
		Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial						***17.699.494.565,00***							***27.080.201.534,00***	
			1.Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani	100 %		100 %	100 %	17.699.494.565,00						100 %	27.080.201.534,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						17.699.494.565,00					-		27.080.201.534,00	
		Terlaksananya penanganan potensi konflik sosial sesuai kewenangan pemerintah daerah						17.699.494.565,00					-		27.080.201.534,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.522.124.575,00						4 Dokumen	22.460.813.066,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	337.260.574,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	217 Orang		1190 Orang	180 Orang	3.527.369.990,00						180 Orang	4.085.108.094,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	302 Orang		2 Orang	250 Orang	600.000.000,00						250 Orang	197.019.800,00	
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						600.000.000,00							197.019.800,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	302 Orang		2 Orang	250 Orang	600.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	197.019.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						3.527.369.990,00							4.085.108.094,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	217 Orang		1190 Orang	180 Orang	3.527.369.990,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	4.085.108.094,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						50.000.000,00							337.260.574,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	337.260.574,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi PimpinanDaerah Provinsi						13.522.124.575,00							22.460.813.066,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.522.124.575,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	22.460.813.066,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1.Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik	-		-	62 %	150.000.000,00						-	80.000.000,00	
323.	**-**	**-**						**750.000.000,00**							**400.000.000,00**	
			Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik	-		-	62 %	150.000.000,00						-	80.000.000,00	
	-	**-**						**150.000.000,00**							**80.000.000,00**	
	-	**-**						**150.000.000,00**							**80.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	-	-						150.000.000,00					Pelaku usaha pertambangan		110.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Wilayah Pertambangan Rakyat						150.000.000,00					Pelaku usaha pertambangan		110.000.000,00	
			-	-		-	-	150.000.000,00						-	80.000.000,00	
	-	-						150.000.000,00							80.000.000,00	
		-	-	-		-	-	130.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	130.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		-	-	-		-	-	150.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	80.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	J U M L A H							**3.509.461.110.517,15**							**3.416.209.071.134,71**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang diseleksi dari indikator tujuan dan atau sasaran daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah yang memiliki daya ungkit tinggi dalam perwujudan visi daerah. Pencapaian indikator kinerja utama tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa program pembangunan daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	5,67-7,62
2	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,14
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A-
4	Indeks Harmoni	Indeks	Bagus
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,62-0,64
6	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	50,45
7	Rasio Gini (Indeks)	Indeks	0,348-0,360
8	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)	Rp. Juta Per Tahun	192,06-203,60
9	Tingkat Kemiskinan	%	3,87-3,27
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,21-6,14

7.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai

dengan kewenangan daerah provinsi. Penetapan target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target 2027
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**		
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	106
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	75,88
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	67,79
4	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	3,188
5	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%))	%	19,80
6	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	6,30
7	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	53,25
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	10,08
9	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	(%)	0,515
10	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	86,50
11	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	82,48
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	84.42-84.56
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	72,35
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.321-0.316
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	62,30
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,84
6	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	11,19
7	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,356
8	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	13,90
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73,28
11	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	8,78
12	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasiona (Literasi Membaca)	%	48,92
13	Persentase Desa Mandiri	%	24,00
14	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	88
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,53
16	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasiona (Numerasi)	%	30

No	Indikator	Satuan	Target 2027
17	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)* (%)	%	84
18	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)	%	62,01
19	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	%	42,74
20	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	14,03
21	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	%	5,62
22	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	72,7
23	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	3,03
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55,09
25	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	60
26	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,21
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	39,7
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	42.20-42.68
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	44,76
5	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,691
6	Rasio Konektivitas	Rasio	0,76
7	Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman	%	54,40
8	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	73,65
9	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	%	47,61
10	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,56
11	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	Inovatif
12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	63,72
13	Aset Perbankan Syariah/PDRB	Persentase	4,83
14	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	29,74
15	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	70,20
16	Aset Dana Pensiun/PDRB	(%)	0,11
17	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	2,71
18	Kontribusi PDRB Provinsi	(%)	1,64
19	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	35.921
20	Tingkat Inflasi	%	1.5-3.5
21	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah	19.651.062,16
22	Total Kredit/PDRB	(%)	20,32

No	Indikator	Satuan	Target 2027
23	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5,14
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	52,58
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	2.947,40
26	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17,1
27	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,89
28	Intensitas energi primer	SBM/Milyar Rupiah	135,2
29	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	73,99
30	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	15,35
31	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	49,90
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
1	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Indeks	51,67
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81,83
3	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Indeks	73,15
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,37
5	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks	77,69
6	Predikat SAKIP	Predikat	BB
7	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP
8	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3
9	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,33
10	Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan	%	100
11	Indeks Integritas Nasional	Indeks	72,30
12	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,65
13	Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,97
14	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	73,00
15	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	6,90
16	Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan	%	100
17	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	75,23
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**		
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		
1	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	628,60
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	100
3	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	100
5	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	80,47

No	Indikator	Satuan	Target 2027
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	89,44
9	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB	Angka	0,011
10	Rasio peserta didik per kelas	Rasio	36
11	Persentase Konten Pendidikan	%	30
12	Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa	Nilai	65,69
13	Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa	Nilai	62,90
14	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	100
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	100
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	91
2	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	%	87
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B
4	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10%	%	28,57
5	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	Rasio	4,29
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
7	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib	Peringkat	Utama
8	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud	Peringkat	Satelit
9	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	93,50
10	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	%	65
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92
12	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	82
13	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	Angka	9
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B
15	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	5,7
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	98,70
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,80
19	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	%	100

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan		
20	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	%	100
21	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	Per 1000	0,33
22	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	7
23	Hipertensi dalam pengendalian	%	18
24	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	92
25	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	99,20
26	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 1000	1,99
27	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	kabupaten/kota	1
28	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	%	89,20
29	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	%	100,00
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	0,128
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
3	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	8
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
5	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	9,09
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
7	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	7,41
8	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	14,29
9	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	72
10	Persentase Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	%	0
11	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	82,29
12	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	86,23
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,83
14	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	27,55
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,83
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**		

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
2	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	9,17
3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	53,50
4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
5	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	81,74
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
7	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	Unit	100
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,10
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
2	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	42,86
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
5	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	89
6	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	2,76
7	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	%	3,25
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,10
9	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	80,88
10	Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya	%	79,55
11	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,31
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,50
13	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,58
14	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100
15	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	70,75
16	Persentase penanganan pra bencana	%	60,64
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		
1	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang	%	42,35

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		
2	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	3,22
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100
6	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	11,11
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,43
8	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
9	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	2,38
10	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin	%	100
11	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83,30
12	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	0,13
13	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
14	Persentase Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	%	100
15	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
16	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,68
2	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	79,66
3	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas	%	62,50
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,57
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,57
6	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	(%)	52,58
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	55

No	Indikator	Satuan	Target 2027
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	73,82
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	73,82
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
11	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks	79,25
12	Persentase kasusnketenagakerjaan yang tertangani	%	77,50
13	Persentase kasusnketenagakerjaan yang tertangani	%	77,50
14	Persentase kasusnketenagakerjaan yang tertangani	%	77,50
15	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	%	15,80
16	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	%	16,00
17	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	%	15,80
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,57
19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	218,50
20	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	71,43
21	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4,87
22	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%	83,39
23	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	22,76
24	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	41,43
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	13,05
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	97
3	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak	%	60,46

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	Dalam Perencanaan		
4	Rasio Kekerasan Anak	Rasio	5,79
5	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	77,30
6	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	97
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	42,31
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,55
9	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	85,71
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,0
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**		
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	â‰¤10
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	90,18
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	85
4	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	83,27
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86
7	Persentase Cadangan Pangan	%	76,57
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		
1	Persentase luas lahan yang di bebaskan untuk kepentingan umum	%	20,53
2	Persentase Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau	%	25
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**		
1	Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100
2	Persentase Lembaga Masyarakat atau Dunia Usaha Yang dinilai kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	68,09
3	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	14,63
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,65
6	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitasnya Bidang Lingkungan Hidup	%	6,64
7	Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi lingkungan kepada unit usaha	%	32,93
8	Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3	%	57,14

No	Indikator	Satuan	Target 2027
9	Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa	%	60,00
10	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	80,47
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,65
12	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	50,00
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
1	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun	%	100
2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi	%	40,91
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	99,78
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100
5	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100
6	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	64
7	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100
8	Pemanfaatan data kependudukan	%	79,59
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
1	Persentase Desa Yang Difasilitasi Kerjasamanya	%	54,18
2	Pesentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang Sudah Dibina	%	16,55
3	Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan Desanya sesuai standar	Desa	15
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	51,03
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,15
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
7	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	93
8	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100
9	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	12,73
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	70
2	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	69
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	10,75

No	Indikator	Satuan	Target 2027
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	84,19
5	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	36,11
6	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) 15-19)	%	10,20
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	%	59,70
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**		
1	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	%	56,00
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
3	Persentase Peningkatan Ketersedian Perlengkapan Jalan	%	69,40
4	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	%	88,46
5	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	82,00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,99
7	Kinerja lalu lintas provinsi	Rasio	0,25
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
1	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Indeks	73
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
3	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	77
4	Nilai Keterbukaan informasi Publik	Nilai	75
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	88,89
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	28
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	42
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		
1	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	%	32,22
2	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	35,49
3	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	%	42,64
4	Persentase Koperasi yang Diawasi	%	6,20
5	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	19,30
6	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya	%	9,58
7	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	81,48

No	Indikator	Satuan	Target 2027
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,42
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		
1	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	16
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
3	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai SOP	%	16
4	Persentase Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Dokumen	16
5	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti	%	16
6	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal	%	16
7	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	86,69
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	4,26
9	Peningkatan Investasi di Provinsi	%	5,00
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		
1	Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	Nilai	47,85
2	Jumlah Prestasi Olahraga	Orang	8
3	Persentase Kwartir terfasilitasi Pengembangan Kepramukaan	%	21,68
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
5	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	78
6	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional	%	0,90
7	Rasio Wirausaha Pemuda	Rasio	2,31
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	%	0,24
9	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	9,49
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,85
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
3	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
AU	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	50
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	50
AV	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**		

No	Indikator	Satuan	Target 2027
1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	0,21
2	Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun	%	14,92
3	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	30,34
4	Persentase Tingkat kompetensi SDM Sejarah	%	26,67
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	9,72
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
7	Persentase Tingkat kesadaran Pelajar se-Tingkat SLTA/sederajat tentang sejarah lokal		0,88
8	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	87
9	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	53,08
10	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,77
11	Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau Cagar budaya yang telah Ditetapkan	%	18,61
12	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	8,03
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,3
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,50
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	76,69
4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	16
5	Jumlah Kunjungan Pemustaka ke UPT Perpustakaan M. Sani Batam	Orang	4.304
6	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan	Orang	50.900
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	78,46
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,45
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009)	%	28,18
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan,	%	21,67

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	42,13
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	317.179,36
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	45.289,06
4	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	90
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
6	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	%	94
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	80,84
8	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	13.600
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,85
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**		
1	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	13,61
2	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	8,42
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,00
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	3.525.750
6	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,75
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83,58
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,00
9	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	0,38
10	Tingkat hunian akomodasi	%	47,50
11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,21
12	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	8,26
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		
1	Produksi Tanaman Pangan	Ton	22.783,17
2	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	56
3	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	66
4	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	%	45
5	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan	Hektar	82
6	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	29.058,14
7	Persentase Penanganan Dampak Perubahan	%	748

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	Iklim terhadap Pertanian		
8	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	31.532,60
9	Produksi Ternak	Ton	19.464,84
10	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5
11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	24,77
BB	**3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,64
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,64
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,64
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,64
5	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan	SBM/Milyar Rupiah	1,192
6	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Riau Yang Terkelola dengan baik	%	2,56
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,65
8	Persentase kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terkelola dengan baik	%	100
9	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	31,75
10	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	23,33
11	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	26,24
12	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	19,00
13	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	29,00
14	Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	%	100
15	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	25,50
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,63
17	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	531,11
BC	**3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
2	Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik	%	62
3	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	%	68,18
4	Rasio Elektrifikasi	%	99,30
5	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	88,2
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,75

No	Indikator	Satuan	Target 2027
BD	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**		
1	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi	%	40
2	Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi	%	100
3	Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri	%	2,24
4	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	86,85
5	Persentase Fasilitasi Pengembangan Ekspor	%	100
6	Indeks Tertib Niaga	Indeks	61-80
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,02
9	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	79,33
10	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	10,15
11	Tertib Usaha	%	86,49
12	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100
13	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	86,49
14	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	9,08
BE	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		
1	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif	Dokumen	1
2	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	%	2,95
3	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non-Migas	%	7
4	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	%	5
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0
6	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0
9	Tersedianya informasi industri secara lengkap	%	100

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	dan terkini		
BF	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**		
1	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	31,25
2	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	33,3
3	Persentase bidang ahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	45,9
BG	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	91,5
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
5	Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan	Persentase	100
6	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	75
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	75
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
11	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	Persentase	100
12	Skor LPPD	Skor	2,59
13	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat	Sangat Baik
16	Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General	Skor	2,18
17	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan	Persentase	97
18	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	75
19	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	75
20	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	75
21	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	75
22	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi	Indeks	41,6
23	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	75
24	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia	Indeks	75

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	Perangkat Daerah		
25	Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	Persentase	88
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
28	Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan	Persentase	88,37
29	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
31	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
32	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
33	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
34	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
35	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP	Nilai	12,02
BH	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**		
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100
2	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase)	Persentase	100
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100
BI	**5.01 - PERENCANAAN**		
1	Capaian Kinerja Program RPJMD	Predikat	-
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
3	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Pemerintaan dan Pembangunan Manusia	%	0
4	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	0
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,50
6	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kab/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi	%	100
7	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	79,48
8	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	%	80
9	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	85,71
10	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD	%	75,51
11	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	47,44
12	Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko	%	11,9

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Menejemen Risiko		
13	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	81,93
14	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	%	70,59
15	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	%	0
16	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	%	0
17	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100
18	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	48,33
19	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	20,34
20	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	%	30
21	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0
22	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0
23	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100
24	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	46,5
25	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	52
26	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	%	100
BJ	**5.02 - KEUANGAN**		
1	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	1,82

No	Indikator	Satuan	Target 2027
2	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	1,86
3	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	1,81
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,73
5	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	1,89
6	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	1,83
7	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	1,73
8	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	1,83
9	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	1,87
10	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	1,73
11	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3
12	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100
13	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	%	100
14	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer dibandingkan Target Tahun Berjalan	%	0
15	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	100
16	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
17	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,85
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	97,58
20	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	1,71
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	97,19
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,26
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,24
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,06
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	94,38
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,36
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,8
28	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,50
29	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,50
30	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	1,44
31	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86
32	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	92,22
33	Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan	%	100

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu		
34	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83,51
35	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,50
36	Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	%	13,10
37	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	28
38	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100
39	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	77,23
40	Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	%	50
BK	**5.03 - KEPEGAWAIAN**		
1	Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit	Nilai	39,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,07
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
4	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	82,83
5	Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit	Nilai	25,50
6	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	81,94
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,82
8	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	98,60
9	Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat	%	99,70
10	Persentase ASN yang dibina Karirnya	%	5,46
11	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	69,86
12	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	38,00
13	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	89,92
BL	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	54,69
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	50,23
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
4	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	86,18
5	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	42,50
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,17
7	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	39,07
BM	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		

No	Indikator	Satuan	Target 2027
1	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan	%	0
2	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	%	85
3	Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan	%	100
4	Persentase Inovasi yang dilaporkan	%	80
5	Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan	Karya	20
BN	**5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN**		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B
2	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota	%	55
3	Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan	%	43,14
4	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83,5
5	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring	%	37,93
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,5
BO	**5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG**		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
2	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani	%	100
3	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau	%	100
4	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	65,04
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,4
6	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah	%	100
BP	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**		
1	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas	%	91,17
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI	Perangkat Daerah	1
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,03
5	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan	%	100
6	perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK	Perangkat Daerah	12
7	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang dihasilkan	Rekomendasi	5
8	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	85,88
9	Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	%	100

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	Daerah		
10	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi SPIP	Perangkat Daerah	34
11	Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota	%	100
12	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
13	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
BQ	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		
1	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat	%	44,44
2	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	85,15
3	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani	%	100
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
5	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	%	100
6	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	%	100
7	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara	%	0,002
8	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	85,73
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,57

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2027, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau, serta mempertimbangkan perkembangan isu strategis di tingkat global, nasional, dan daerah. RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah **"Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata"** melalui penguatan ekonomi berbasis maritim dan potensi unggulan wilayah, pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah kepulauan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 memiliki peran strategis sebagai instrumen penghubung antara perencanaan pembangunan jangka menengah dan proses penganggaran tahunan daerah. Dokumen ini memastikan terbangunnya keselarasan dan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. RKPD menjadi pedoman utama bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027. Dalam tahapan penganggaran, RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027 beserta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah hingga penetapan APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 yang perlu diperhatikan dalam proses penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, Bappeda melaksanakan pengendalian terhadap penjabaran RKPD Tahun 2027 ke dalam Renja Perangkat Daerah agar selaras dan mengarah pada perbaikan kinerja.
3. Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

4. Guna memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 wajib mengacu pada RKPD Tahun 2027.
5. Guna menjamin konsistensi, keterpaduan dan akuntabilitas pembangunan daerah, seluruh proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dilaksanakan melalui SIPD RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Seluruh Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2027 secara optimal dan tepat sasaran.
7. Seluruh perangkat daerah wajib memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
8. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, yang hasilnya menjadi bahan evaluasi RKPD Tahun 2027 oleh Bappeda.
9. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah.
10. Partisipasi masyarakat, akademisi, dan dunia usaha diharapkan turut mendukung pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Tahun 2027 guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan risiko pembangunan menjadi landasan strategis dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, sebagai tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Daerah. Risiko pembangunan mencakup risiko fiskal daerah dan risiko ekonomi eksternal yang dapat mempengaruhi kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pendekatan manajemen risiko diterapkan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga pengendalian pembangunan daerah, guna merespons berbagai dinamika dan ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi capaian kinerja. Tantangan yang diantisipasi meliputi dinamika ekonomi global dan nasional, karakteristik geografis wilayah kepulauan, dampak perubahan iklim, ketimpangan akses terhadap layanan dasar, serta risiko yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan teknologi. Melalui pengelolaan risiko yang sistematis, setiap Perangkat Daerah didorong untuk mengenali potensi hambatan pada program prioritas, merumuskan langkah mitigasi yang proporsional, dan memastikan kesinambungan hasil pembangunan.

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, partisipatif, terbuka, bertanggung jawab, serta berorientasi pada capaian kinerja. RKPD Tahun 2027 menjadi acuan utama bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan dan

pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam pelaksanaannya, diperlukan keterpaduan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Kaidah pelaksanaan RKPD diarahkan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal, memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah dan lintas sektor, serta memastikan fokus pembangunan pada prioritas daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penerapan manajemen risiko pembangunan di tingkat daerah menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah melalui integrasi pengelolaan risiko ke dalam setiap program dan kegiatan prioritas. Masing-masing Perangkat Daerah wajib mengidentifikasi risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja, menetapkan strategi mitigasi yang jelas dan terukur, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melalui Bappeda, berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam pembinaan penerapan manajemen risiko agar terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan risiko yang efektif, RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 diharapkan mampu memperkuat ketahanan pembangunan daerah, mendukung keberlanjutan pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2025–2029, serta mewujudkan pembangunan yang adaptif, inklusif, dan memiliki daya saing.